Bank Aladin Syariah

Membangun Pertumbuhan Usaha dengan Mengedepankan **Transformasi, Kolaborasi, dan Inovasi.**

(Building Business Growth by Prioritizing Transformation, Collaboration, and Innovation)



2024

Laporan Tahunan

Annual Report

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan

Preparation Method and About This Annual Report

PT Bank Aladin Syariah Tbk telah menyusun Laporan Tahunan tahun buku 2024 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan ini juga disusun berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan Tahunan ini terdiri dari beberapa bab, meliputi bab Performa yang mencakup Ikhtisar Data Keuangan Penting dan Informasi Saham; Laporan Manajemen yang mencakup Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi; Profil Perusahaan; Analisis dan Pembahasan Manajemen yang mencakup pembahasan Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko; Fungsi Penunjang Bisnis; Tata Kelola Perusahaan; serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Penyebutan kata "'Bank Aladin Syariah", "Aladin Bank dan "Bank" dan "Bank" didefinisikan sebagai PT Bank Aladin Syariah Tbk yang menjalankan bisnis utamanya di bidang perbankan syariah.

PT Bank Aladin Syariah Tbk has prepared the Annual Report for the 2024 fiscal year based on Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. This Annual Report is also prepared based on Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

This Annual Report consists of several chapters, including the Performance chapter which includes Key Financial Data and Share Information; Management Report which includes the Board of Commissioners' Report and the Board of Directors' Report; Company Profile; Management Analysis and Discussion which includes discussions on Capital Structure and Risk Management Practices; Business Support Functions; Corporate Governance; and Social and Environmental Responsibility.

The mention of currency units "Rupiah", "Rp" or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah currency in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards. The mention of the words "Bank Aladin Syariah", "Aladin Bank and "the Bank" is defined as PT Bank Aladin Syariah Tbk which runs its main business in the field of sharia banking.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di portal resmi PT Bank Aladin Syariah Tbk dengan alamat, **https://aladinbank.id/laporan-tahunan/**.

This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using easy-to-read fonts and sizes and printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the official portal of PT Bank Aladin Syariah Tbk at the address, **https://aladinbank.id/laporan-tahunan/**.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Bank Aladin Syariah Tbk, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Bank Aladin Syariah Tbk serta lingkungan bisnis di mana PT Bank Aladin Syariah Tbk menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali PT Bank Aladin Syariah Tbk.

This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies and objectives of PT Bank Aladin Syariah Tbk, which are classified as forward-looking statements in compliance of applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements have prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments to be materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on assumptions based on the current and future conditions of PT Bank Aladin Syariah Tbk, as well as the business environment in which PT Bank Aladin Syariah Tbk carries out its business activities. The statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance, as actual results in the future may differ as they can be influenced by several factors outside the control of PT Bank Aladin Syariah Tbk




Bank
Aladin
Syariah
Membangun Pertumbuhan
Usaha dengan Mengedepankan
Transformasi, Kolaborasi, dan Inovasi.
2024
Laporan Tahunan
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Penjelasan Tema
Theme Explanation

Membangun Pertumbuhan Usaha dengan mengedepankan Transformasi, Kolaborasi, dan Inovasi

Building Business Growth by Prioritizing Transformation, Collaboration, and Innovation

Bank Aladin Syariah secara konsisten menunjukkan sebagai Bank Syariah Digital Terdepan terus membangun pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Aladin Syariah yaitu dengan mengedepankan transformasi melalui fitur-fitur layanan perbankan dimana produk Bank yang terkini adalah Banking as a Service (BaaS). Bank Aladin Syariah menunjukkan komitmennya dengan meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai kolaborasi Bersama mitra-mitranya serta mengedepankan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan Tata Kelola yang Baik.

Bank Aladin Syariah akan terus siap mendorong ekspansi bisnis dengan terobosan inovasi terbaru dan memberikan kontribusi positif yang dekat dengan keseharian masyarakat dan terus berkomitmen melebarkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Bank Aladin Syariah consistently shows itself as a Leading Digital Sharia Bank that continues to build sustainable business growth. One of the efforts made by Bank Aladin Syariah is by prioritizing transformation through banking service features where the Bank's latest product is Banking as a Service (BaaS). Bank Aladin Syariah shows its commitment by increasing sharia financial inclusion in Indonesia through various collaborations with its partners and prioritizing sharia principles, principles of prudence, and Good Governance.

Bank Aladin Syariah will continuously be ready to encourage business expansion with the latest innovation breakthroughs and provide positive contributions that are close to the daily lives of the community and continues to be committed to expanding sharia financial inclusion in Indonesia.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2023



Menjembatani Inklusivitas dengan Kolaborasi dan Kemudahan
Bridging Inclusivity with Collaboration and Simplicity

Sebagai bank syariah digital terdepan di Indonesia, Bank Aladin Syariah senantiasa membangun pondasi yang kuat dan berkelanjutan, dengan memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan Masyarakat. Bank Aladin Syariah juga terus memperluas kolaborasi melalui kerjasama dengan berbagai mitra, dalam rangka memperluas layanan perbankan. Hal tersebut juga dibarengi dengan pengembangan fitur produk agar lebih mudah dimanfaatkan untuk masyarakat.

Upaya yang dilakukan Bank Aladin Syariah tersebut, tercatat membuahkan hasil yang maksimal, di mana persebaran nasabah Bank Aladin Syariah baik dari sisi korporasi maupun nasabah ritel, semakin luas dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Di mana sejak aplikasi digital Bank Aladin Syariah diluncurkan pada awal tahun 2022, Bank Aladin Syariah tercatat telah berhasil mengakuisisi lebih dari tiga juta nasabah sampai dengan akhir tahun 2023.

As the leading digital sharia bank in Indonesia, Bank Aladin Syariah continues to build a strong and sustainable foundation, by strengthening a sharia financial ecosystem that is beneficial at all levels of society. Bank Aladin Syariah also continues to expand collaboration through cooperation with a number of partners, to expand its banking services. This goes hand-in-hand with the development of product features to make them easier for the public to use.

Bank Aladin Syariah's efforts has produced maximum results, where the distribution of Bank Aladin Syariah customers, both corporate and retail customers, has become wider and is spread across all provinces in Indonesia. Since the Bank Aladin Syariah digital application was launched in early 2022, Bank Aladin Syariah succeeded in acquiring more than three million customers by the end of 2023.

2022



Bertumbuh Dalam Kebaikan: Masa Depan Berkelanjutan Untuk Semua
Growing With Kindness: A Sustainable Future For All

2022 menjadi tahun yang penuh optimisme bagi Bank Aladin Syariah untuk tumbuh berkelanjutan dalam kebaikan. Di mana pada awal tahun 2022, Bank Aladin Syariah resmi meluncurkan aplikasi digital dan berhasil mengakuisisi lebih dari satu koma tujuh juta Nasabah sampai dengan akhir tahun 2022. Hasil tersebut memperkuat optimisme Bank Aladin Syariah untuk "Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan" sebagaimana visi Bank. Aplikasi digital yang diluncurkan Bank Aladin Syariah terdiri dari produk-produk digital bank dengan fitur-fitur yang senantiasa memberikan kemudahan bagi nasabah. Produk-produk tersebut adalah tabungan transaksional Ala Dompet dan tabungan rencana Ala Impian serta fitur bill payment, Ala Berbagi dan tarik setor tunai melalui gerai Alfamart.

Bank Aladin Syariah juga berbagi kebaikan guna mewujudkan masa depan berkelanjutan untuk semua, melalui kegiatan pembiayaan yang sudah mulai terealisasi di tahun 2022. Di mana Bank memulai penyaluran dana melalui produk invoice financing, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ritel konsumtif. Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan bisnis ke depan, Bank Aladin Syariah juga memperluas kolaborasi dengan mitra-mitra strategis. Bank Aladin Syariah berharap, pertumbuhan yang berhasil dibukukan Bank di tahun 2022, dapat memberikan kebaikan yang berkelanjutan untuk semua.

2022 will be a full of optimism year for Bank Aladin Syariah to grow sustainably in kindness. Where in early 2022, Bank Aladin Syariah officially launched a digital application and succeeded in acquiring more than one point seven million customers by the end of 2022. These results strengthen the optimism of Bank Aladin Syariah to "Become the Leading Digital Sharia Bank" as the Bank's vision. The digital application launched by Bank Aladin Syariah consists of bank digital products with features that always provide convenience for customers. These products are Ala Dompet transactional savings and Ala Impian savings plans as well as bill payment features, Ala Berbagi and cash withdrawals through Alfamart outlets.

Bank Aladin Syariah also shares kindness in order to create a sustainable future for all, through financing activities that have begun to be disbursed in 2022. The Bank started disbursing funds through invoice financing products, working capital financing and consumer retail financing. Meanwhile, in order to support future business development, Bank Aladin Syariah is also expanding collaboration with strategic partners. Bank Aladin Syariah hopes that the growth that the Bank has successfully recorded in 2022 can provide sustainable good for all.

2021



Siap Berbagi Kebaikan untuk Masa Depan
Ready to Share Kindness for the Future

Di tengah tahun yang penuh dengan tantangan, Aladin Bank melakukan langkah besar di tahun 2021 yang menjadi babak baru bagi perkembangan bisnis Bank ke depan. Setelah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 1 Februari 2021, dengan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, Bank melakukan perubahan nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Juni 2021. Pergantian nama yang dilakukan Bank, bukan sekadar proses merubah nama, melainkan juga sebuah transformasi diri menjadi bank yang dapat melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat akan produk-produk perbankan, khususnya perbankan syariah, melalui pendekatan digitalisasi. Dimana Bank melakukan perubahan core bussiness dari yang sebelumnya berfokus pada segmen corporate banking menjadi bank yang mengedepankan layanan digital dan berfokus pada segmen ritel. Melalui transformasi bisnis ini, Aladin Bank berupaya untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan siap berbagi kebaikan untuk masa depan bersama.

In the midst of a full of challenges year, Bank Aladin Syariah took big steps in 2021 which will become a new chapter for the Bank's business development going forward. After conducting an Initial Public Offering (IPO) on February 1, 2021, by listing shares on the Indonesia Stock Exchange, the Bank changed its name from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk, and has obtained approval from the Authority Financial Services (OJK) on June 3, 2021. The name change carried out by the Bank was not just a name change process, but also a self- transformation into a bank that can serve the needs of all levels of society for banking products, especially sharia banking, through a digitalization approach. Where the Bank made changes to its core business from previously focusing on the corporate banking segment to becoming a bank that prioritizes digital services and focuses on the retail segment. Through this business transformation, Bank Aladin Syariah seeks to become closer to the community and is ready to share goodness for a common future.

2020



Inovasi Digital dan Transformasi untuk Menjadi Lebih Tangguh
Digital Innovation and Transformation to be Stronger

Bagi PT Bank Net Indonesia Syariah selanjutnya disebut "Bank Net Syariah" atau "BNS" dalam laporan ini, tahun 2020 merupakan tahun penuh harapan dan menantang. Hal itu ditandai dengan peralihan pemegang saham, upaya rebranding dan penguatan internal perusahaan serta upaya meningkatkan kapasitas usaha melalui aksi korporasi Go Public (IPO) di tahun 2021.

Perseroan memanfaatkan momentum tersebut dengan melakukan berbagai upaya transformasi, inovasi digital demi kemudahan layanan konsumen sekaligus mempertajam kapabilitas internal. Perseroan juga turut berkontribusi dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang kian tahun semakin menjanjikan. Sepanjang tahun 2020, kinerja perbankan syariah nasional justru lebih baik dibandingkan industri perbankan nasional.

For PT Bank Net Indonesia Syariah, hereinafter referred to as "Bank Net Syariah" or "BNS" in this report, 2020 was a full of hopes and challenges year. This was marked by the shift of shareholders, rebranding and strengthening efforts internal company as well as efforts to increase business capacity through Go Public (IPO) Corporate Action in 2021.

The Company takes advantage of this momentum by carrying out various transformation efforts, digital innovations for the convenience of customer service as well as sharpening internal capabilities. The Company also contributes to the development of the sharia banking industry in Indonesia, which is increasingly promising. Throughout 2020, the performance of the national sharia banking was actually better than the national banking industry.

Sekilas Tentang Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah at a Glance

PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS

51,40%
PT Aladin Global Ventures

48,60%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)
Public (each under 5%)

FOKUS BISNIS
BUSINESS FOCUS

Layanan Perbankan Digital
Digital Banking Services

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

Bank Umum Syariah
Sharia Commercial Banking

JARINGAN USAHA
NETWORK

Seluruh Indonesia
Throughout Indonesia

ROA
ROA

78,67%

SEGMEN USAHA
BUSINESS SEGMENT

Segmen Ritel
Segmen yang dirancang untuk melakukan akuisisi nasabah secara digital melalui aplikasi Bank.

Retail Segment
The segment designed for acquiring customers digitally through the Bank's application.

Segmen Non-Ritel (Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM & Korporasi)
Segmen yang dirancang untuk membangun portofolio pendanaan dan juga pembiayaan Bank.

Non-Retail Segment (Small Medium Enterprise/ SME & Corporation)
The segment designed to build the Bank's funding and financing portfolio.



Pencapaian Terbaik Bank Aladin Syariah
Best Achievements of Bank Aladin Syariah

TOTAL ASET
TOTAL ASSETS

Total Aset meningkat
28,17% dari Rp7,1 triliun di tahun 2023
menjadi **Rp9,4 triliun** di tahun 2024

Total Assets increased by 28.17% from Rp 7.1 trillion in 2023 to **Rp9.4 trillion** in 2024

REGISTERED USER
REGISTERED USER

Registered User yang telah menyelesaikan KYC mencapai
Registered Users completed the KYC reached

3,3

Juta/million

TOTAL PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB
TOTAL INCOME FROM FUND MANAGED BY BANK AS MUDHARIB

Total Pendapatan Bank sebagai Mudharib meningkat 83,39% dari Rp334,5 miliar di tahun 2023 menjadi **Rp613,4 miliar** di tahun 2024

Total Bank Mudharib Income increased by 83.39% from Rp334.5 billion in 2023 to **Rp613.4 miliar** in 2024

PEMBIAYAAN
FINANCING

Total Pembiayaan Bank di tahun 2024
Total Bank Financing in 2024

Rp4,7

Triliun/Trillion

DANA PIHAK KETIGA (DPK)
THIRD PARTY FUNDS

Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar Rp. 2,16 Triliun atau naik 66,21% menjadi **Rp5,41** Triliun dari Rp3,25 Triliun di tahun 2023

Third Party Funds (DPK) experienced an increase in 2024 amounting to Rp. 2.16 Trillion or rose 66.21% to **Rp5.41** Trillion from Rp3.25 Trillion in 2023.

Milestone Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah Milestones

1994

Pertama kali berdiri dengan nama PT Bank Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994.
It was first established under the name PT Bank Maybank Nusa International on September 16, 1994.

2000

Pada tanggal 11 September 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp.
On September 11, 2000, PT Maybank Nusa International changed its name to PT Bank Maybank Indocorp.

2021

PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berganti nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.
PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk changed its name to PT Bank Aladin Syariah Tbk, and has received approval from OJK through letter No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 concerning the determination of the use of a license on behalf of PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to become a business license on behalf of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

2022

Pada Januari 2022, Bank telah berhasil meluncurkan aplikasi mobile banking untuk nasabah atau masyarakat. Selain itu, Bank juga sudah mulai menyalurkan financing di kuartal II tahun 2022 dengan total outstanding pembiayaan mencapai Rp1,3 triliun per 31 Desember 2022. Bank juga telah berhasil melakukan pemenuhan Modal Inti Bank sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK. 03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
In January 2022, the Bank has successfully launched a mobile banking application for customers or the public. In addition, the Bank has also started disbursing financing in the second quarter of 2022 with a total outstanding financing of IDR1.3 trillion as of December 31, 2022. The Bank has also succeeded in fulfilling the Bank's Core Capital in accordance with OJK Regulation No.12/POJK. 03/2020 on Commercial. Bank Consolidation.

2023

Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah meluncurkan QRIS dan Corporate Internet Banking (CIB) yang membuat layanan perbankan menjadi lebih luas kepada pengguna Korporat & Ritel. Di tahun ini juga, Bank meluncurkan fitur Setor & Tarik Tunai (Tarsetun) bersama Alfamidi.
Bank juga sukses meluncurkan Banking as a Service (BaaS) yang telah go live dengan Alfagift.
Dari sisi penyaluran pembiayaan, Bank telah melakukan penyaluran pembiayaan dengan total outstanding lebih dari Rp8,6 triliun hingga 31 Desember 2023.
In 2023, Bank Aladin Syariah launched QRIS and Corporate Internet Banking (CIB) making banking services wider for Corporate & Retail users. Also this year, the Bank launched the Cash Deposit & Withdrawal (Tarsetun) feature with Alfamidi.
The Bank also successfully launched Banking as a Service (BaaS) that went live with Alfagift.
For financing distribution, the Bank distributed financing with a total outstanding of more than Rp8.6 trillion as at December 31, 2023.

2010

PT Bank Maybank Indocorp berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010, seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

PT Bank Maybank Indocorp changed its name to PT Bank Maybank Syariah Indonesia based on the Decree of the Governor of the Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 dated September 23, 2010, in line with the change in business sector from conventional commercial banks to Sharia Commercial Bank.

2019

Pada tanggal 3 Juli 2019, kembali terjadi perubahan nama dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah, sekaligus merubah fokus bisnis, dari segmen korporasi menjadi ritel.

On July 3, 2019, there was another name change from PT Bank Maybank Syariah Indonesia to PT Bank Net Indonesia Syariah, as well as changing the focus of the business, from the corporate segment to retail.

2021

Pada tanggal 1 Februari 2021, saham BNS telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "BANK", setelah sebelumnya memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya No. S-8/D.04/2021 tanggal 22 Januari 2021.

On February 1, 2021, BNS shares were listed on the Indonesia Stock Exchange with the stock code "BANK", having previously obtained an effective statement from OJK with its letter No. S-8/D.04/2021 dated January 22, 2021.

2020

Perubahan status PT Bank Net Indonesia Syariah dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020.

Change of status of PT Bank Net Indonesia Syariah from a private company to a public company and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 November 3, 2020.

2024

Pada tahun 2024, di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat dan perlambatan pertumbuhan DPK di industri, Bank Aladin Syariah berhasil menghimpun DPK sebesar Rp5,4 triliun atau tumbuh 66% yoy. Di tahun 2024, Bank juga berhasil meraih registered user yang telah menyelesaikan Know Your Customer (KYC) mencapai lebih dari 3,3 juta pengguna.

In 2024, amidst increasingly tight liquidity conditions and slowing growth of TPF in the industry, Bank Aladin Syariah managed to collect TPF of Rp 5.4 trillion or grew 66% yoy. In 2024, the Bank also managed to achieve registered users who have completed Know Your Customer (KYC) reaching more than 3.3 million users.

Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS CPM di tahun 2024 untuk memudahkan metode pembayaran melalui aplikasi mobile banking dan Bank pun meluncurkan Super Flip by Aladin yang bekerjasama dengan Flip. Bank juga meluincurkan tabungan Aladin Gen, tabungan untuk anak. Untuk layana tarik dan setor tunai Bank pun terus memperluas dan telah tersedia di lebih dari 23.000 gerai Alfa grup termasuk Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan DAN+DAN di seluruh Indonesia.

Bank services continue to be enhanced through the launch of the QRIS CPM feature in 2024 to facilitate payment methods via mobile banking, and the Bank also launched Super Flip by Aladin in collaboration with Flip. The Bank also launched Aladin Gen savings, a savings account for children. For cash withdrawal and deposit services, the Bank continues to expand and is now available at more than 23,000 Alfa Group outlets, including Alfamart, Alfamidi, Lawson, and DAN+DAN throughout Indonesia.

Daftar Isi
Table Of Contents

2 Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan
Preparation Method and About This Annual Report

3 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability

5 Penjelasan Tema
Theme Explanation

6 Kesinambungan Tema
Theme Continuity

8 Sekilas Tentang Bank Aladin Syariah
Bank Aladin Syariah at a Glance

9 Pencapaian Terbaik Bank Aladin Syariah
Best Achievements of Bank Aladin Syariah

10 Milestone Bank Aladin Syariah
Bank Aladin Syariah Milestones

12 Daftar Isi
Table Of Contents

Ikhtisar
Highlights

16 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

21 Ikhtisar Saham
Share Information

22 Aksi Korporasi Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pada Saham
Corporate Actions Resulting In Changes In Shares

23 Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, Atau Obligasi Konversi, Serta Pendanaan Lainnya
Information About Bonds, Sukuk, Or Convertible Bonds, As Well As Other Funding

24 Peristiwa Penting
Important Events

Laporan Manajemen
Management Report

32 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report

48 Laporan Direksi
Board of Directors' Report

74 Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board's Report

81 Surat Pernyataan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2024 Pt Bank Aladin Syariah Tbk
Statement Of The Board Of Directors And Board Of Commissioners For The Annual Report 2024 Of Pt Bank Aladin Syariah Tbk

Profil Perusahaan
Company Profile

84 Informasi Umum Perusahaan
General Information About the Company

86 Riwayat Singkat Bank
Brief History of The Bank

92 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama Bank
Vision, Mission, and Key Values of The Bank

94 Logo Bank
The Bank's Logo

95 Kegiatan Usaha
Business Activities

101 Wilayah Operasional Bank
Bank's Operational Areas

102 Struktur Organisasi Bank
Bank's Organizational Structure

104 Keanggotaan Bank dalam Asosiasi atau Organisasi
Bank's Membership in Associations or Organizations

105 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profile

109 Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board' Profile

112 Profil Direksi
Board of Directors' Profile

119 Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Demographics and Competence Development

148 Komposisi Pemegang Saham Bank
Bank's Shareholders Composition

151 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Aladin Syariah
Information on Majority and Controlling Shareholders of Bank Aladin Syariah Until the Final Individual Owner

152 Informasi Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Information on List of Subsidiaries and Associates and Joint Ventures

152 Nama Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang Atau Kantor Perwakilan
Name, Address Of Subsidiaries and/or Branch Office or Representative Office

153 Kronologis Penerbitan Dan/ Atau Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and/or Listing

155 Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

155 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

156 Informasi Pada Situs Web Bank Aladin Syariah
Information on The Website of Bank Aladin Syariah

158 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

162 Tinjauan Umum
General Overview

164 Kebijakan Strategis Bisnis Bank dan Aspek Pemasaran
Bank Business Strategic Policies And Marketing Aspects

167 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Bank
Overview Of Operations Per Bank Business Segment

170 Tinjauan Keuangan
Financial Overview

188 Komitmen dan Kontinjensi
Commitments And Contingencies

189 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Ability To Pay Debts And Collectibility Of Receivables

191 Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko
Capital Structure And Risk Management Practices

206 Deklarasi Transaksi Material
Declaration Of Material Transactions

207 Informasi atau Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik
Information Or Material Facts Occurring After The Date Of The Public Accountant's Report

207 Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan
Comparison Between Target And Realization And Projection For 1 (One) Year Ahead

209 Tinjauan Keuangan Lainnya
Other Financial Reviews

210 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee And Management Stock Ownership Program (Esop/Msop)

210 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization Of Use Of Funds From Public Offering

212 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang Modal
Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Mergers/ Amalgamations, Acquisitions, And Debt/Capital Restructuring

212 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information On Material Transactions Containing Conflict Of Interest And/Or Transactions With Affiliated Parties

216 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Bank
Changes In Statutory Regulations That Have A Significant Impact On The Bank

232 Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Bank
Changes In Accounting Policies And Their Impact On The Bank

233 Tingkat Kesehatan Bank
Bank Soundness Level

233 Prospek Usaha Dan Strategi Ke Depan
Business Prospects And Future Strategy

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Functions

238 Tata Kelola Sumber Daya Insani
Human Capital Governance

261 Teknologi Informasi
Information Technology

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

270 Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Statement Of Good Corporate Governance Implementation

275 *Governance Framework*

280 Penerapan GCG Secara Berkelanjutan
Sustainable Implementation Of GCG

289 Struktur Dan Organ Gcg
Gcg Structure And Organs

290 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting Of Shareholders

298 Dewan Komisaris
The Board Of Commissioners

312 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

320 Direksi
Board Of Directors

334 Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris Dan Direksi
Transparency Of Information Related To The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

358 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs For The Board Of Commissioners

384 Komite-Komite Di Bawah Direksi
Committees Under The Board Of Directors

419 Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs Of The Board Of Directors

432 Akuntan Publik
Public Accountant

434 Manajemen Risiko
Risk Management

450 Perkara Hukum
Legal Cases

452 *Buy Back* Saham Dan/Atau *Buy Back* Obligasi Bank
Buy Backs Of The Bank's Shares And/Or Bonds

452 Program Kepemilikan Saham Karyawan Dan/Atau Manajemen
Employee And/Or Management Stock Option Program

453 Akses Informasi Dan Data Perusahaan
Access To Company Information And Data

454 Kode Etik Bank
The Bank's Code Of Conduct

455 Informasi Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah Oleh Dewan Komisaris Dan Direksi
Information On Bank Aladin Syariah Share Ownership By The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

456 Penanganan Benturan Kepentingan
Handling Of Conflicts Of Interest

456 Penerapan Fungsi Kepatuhan
Implementation Of Compliance Function

460 Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Apu, Ppt, Dan Pppspm)
Anti-Money Laundering, Combating Financing Of Terrorism, And Weapons Of Mass Destruction Proliferation Funding (Aml, Cft, And Pppspm) Program

462 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

463 Pendapatan Non Halal
Non Halal Income

464 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

466 Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Implementation Of Corporate Governance Aspects And Principles In Accordance With Financial Services Authority Provisions

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

472 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

Laporan Keuangan
Financial Statements

01

Ikhtisar

Highlights

Bank Aladin Syariah membukukan Total Pendapatan Bank sebagai Mudharib sebesar Rp613.442 juta, mengalami peningkatan 83,39% atau sebesar Rp278.940 juta.
Bank Aladin Syariah recorded Total Revenue of the Bank as Mudharib of Rp613,442 million, an increase of 83.39% or Rp 278,940 million.

Aladin Bank Syariah
Masa Depan



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Income from fund managed by bank as mudharib						
Pendapatan Dari Jual Beli Bagi Hasil dan Ujrah Income From Margin, Profit Sharing and Ujrah	**446.069**	201.056	16.101	3	86	121,86%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya Other Main Operating Income	**167.373**	133.446	65.654	36.108	31.191	25,42%
Total Pendapatan Bank sebagai *Mudharib* Total income from fund managed by Bank as mudharib	**613.442**	334.502	81.755	36.111	31.277	83,39%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Third parties' share on return of temporary syirkah funds	**(308.801)**	(121.047)	(23.982)	(403)	(158)	155,11%
Hak Bagi Hasil Milik Bank Profit Sharing Rights Owned by the Bank	**304.641**	213.455	57.773	35.708	31.119	42,72%
Pendapatan Operasional Lainnya Bank's share in profit sharing	**179.286**	36.794	19.788	785	476	387,27%
Pembalikan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif Reversal (provision) allowance for impairment losses on earning assets	**(20.548)**	(15.724)	(36.777)	(3.069)	65.250	30,68%
Beban Operasional Operating Expenses	**(536.866)**	(477.666)	(305.143)	(156.319)	(54.374)	12,39%
Laba (Rugi) Operasional Operating Profit (Loss)	**(73.487)**	(243.141)	(264.359)	(122.895)	42.471	-69,78%
Pendapatan (Beban) Non-Operasional – Neto Non-Operating Income (Expense) – Net	**(240)**	16.403	(554)	1.620	2.397	-101,46%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	**(73.727)**	(226.738)	(264.913)	(121.275)	44.868	-67,48%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**(73.727)**	(226.738)	(264.913)	(121.275)	44.868	-67,48%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income (Loss)	**4.067**	3.798	(5.552)	7.946	(2.217)	7,08%
Total Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year	**(69.660)**	(222.940)	(270.465)	(113.329)	42.651	-68,75%
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Profit (Loss) per Share (Full Rupiah)	**(5)**	(16)	(20)	(9)	5	-68,75%

Ket: Sampai dengan akhir tahun buku, Bank Aladin Syariah tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi, dengan demikian Laporan Keuangan Bank tidak menyajikan Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan serta Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non-pengendali.
Note: Until the end of the fiscal year, PT Bank Aladin Syariah Tbk did not have any subsidiary and associated entity, thus the Bank's Financial Statements do not present Net Profit (Loss) for the Year and Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year attributable to both owners of the parent entity and non-controlling interest.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
ASET ASSETS						
Kas Cash	**233**	1.013	651	224	182	-77,00%
Giro pada Bank Indonesia Current Accounts with Bank Indonesia	**307.476**	423.910	83.353	16.354	4.163	-27,47%
Giro pada Bank Lain - Neto Current Accounts with Other Banks – Net	**1.157**	13.353	1.851	2.421	2.018	-91,34%
Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia	**1.892.700**	1.752.700	1.734.100	1.139.500	49.100	7,99%
Investasi pada Surat Berharga - Neto Investment in Marketable Securities - Net	**2.082.160**	1.403.362	1.217.062	898.024	608.728	48,37%
Piutang Murabahah - Neto Murabahah Receivables - Net	**38.847**	790.645	796.716	-	52	-95,09%
Pinjaman Qardh – Neto Funds of Qardh – Net	**597.995**	815.623	544.800	-	-	-26,68%
Pembiayaan Musyarakah – Neto Musyarakah Financing – Net	**4.050.086**	1.449.932	-	-	-	179,33%
Aset Tetap dan Aset Hak Guna – Neto Fixed Assets and Right of Use Assets – Net	**34.744**	47.367	45.177	51.114	12.630	-26,65%
Aset tak Berwujud - Neto Intangible Assets – Net	**102.469**	77.339	51.538	5.603	85	32,49%
Aset Lain-Lain Other Assets	**254.218**	316.876	258.153	59.922	44.439	-19,77%
Total Aset Total Assets	**9.362.085**	**7.092.120**	**4.733.401**	**2.173.162**	**721.397**	**32,01%**
LIABILITAS LIABILITIES						
Liabilitas Segera Liabilities due Immediately	**32.612**	69.839	16.392	1.003	2	-53,30%
Simpanan Wadiah Wadiah Deposits	**5.073**	1	1	-	5	507200,00%
Simpanan dari Bank Lain Deposits from Other Banks	**-**	-	-	-	4	-
Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued	**600.000**	-	684.000	-	-	100,00%
Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilities due to Bank Indonesia	**-**	584.248	-	-	-	-100,00%
Utang Pajak Taxes Payable	**7.853**	6.973	6.066	3.042	640	12,62%
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Estimated Loss of Commitments and Contingencies	**1.873**	2.822	1.752	-	-	-33,63%
Liabilitas Lain-Lain Other Liabilities	**166.050**	87.997	87.265	84.606	39.310	88,70%
Total Liabilitas Total Liabilities	**813.461**	**751.880**	**795.476**	**88.651**	**39.961**	**8,19%**

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
DANA SYIRKAH TEMPORER TEMPORARY SYIRKAH FUND						
Giro Mudharabah Mudharabah Demand Deposits	**678**	-	-	-	40.062	100,00%
Tabungan Mudharabah Mudharabah Savings Deposits	**665.213**	510.651	116.306	38.184	-	30,27%
Deposito Mudharabah Mudharabah Time Deposits	**4.744.140**	2.744.348	678.343	1.000.000	100	72,87%
Total Dana Syirkah Temporer Total Temporary Syirkah Fund	**5.410.031**	**3.254.999**	**794.649**	**1.038.184**	**40.162**	**66,21%**
EKUITAS EQUITY						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully paid up Capital	**1.391.848**	1.391.838	1.377.051	1.324.135	819.307	0,00%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	**965.670**	965.669	964.190	10.870	-	0,00%
Dana Setoran Modal Capital Deposit Funds	**1.635.502**	1.512.501	1.363.862	2.684	-	8,13%
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plan	**7.464**	4.761	2.720	1.808	689	56,77%
Keuntungan yang Belum Direalisasikan atas Surat Berharga dalam Kelompok diukur pada: **Unrealized Gain on Securities Measured at:**						
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Fair Value Through Other Comprehensive Income	**3.484**	2.120	363	6.827	-	64,34%
Saldo Laba **Retained Earnings**						
Saldo Laba dari Kegiatan Konvensional Retained Earnings from Conventional Activities	**29.541**	29.541	29.541	29.541	29.541	0,00%
Saldo Rugi dari Kegiatan Syariah Deficit from Sharia Activities	**(894.916)**	(821.189)	(594.451)	(329.538)	(208.263)	8,98%
Total Ekuitas Total Equity	**3.138.593**	**3.085.241**	**3.143.276**	**1.046.327**	**641.274**	**1,73%**

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	**622.526**	442.616	(1.334.535)	898.170	7.769	40,65%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**(722.376)**	(223.992)	(359.215)	(304.857)	(74.047)	222,50%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**110.286**	152.529	2.355.076	509.689	-	-27,70%
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) Net Cash and Cash Equivalents	**10.436**	371.153	661.326	1.103.002	(66.064)	-97,19%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of The Year	**2.191.111**	1.819.974	1.158.523	55.483	121.547	20,39%
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang pada Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	**31**	(16)	125	38	214	-293,75%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of The Year	**2.201.578**	2.191.111	1.819.974	1.158.523	55.483	0,48%

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL RATIOS

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Rasio Kinerja Performance Ratios						
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR)	**64,96**	96,17	189,28	390,50	329,09	-32,45%
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif Earning Assets and Non-Earning Non-Performing Assets to Total Assets	**0,02**	-	-	-	-	100,00%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif Non-performing Earning Assets to Total Earning Assets	**0,02**	-	-	-	-	100,00%
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif CKPN Financial Assets to Earning Assets	**0,85**	0,84	0,88	-	0,01	1,19%
NPF *Gross*	**0,04**	-	-	-	-	100,00%
NPF *Net*	**0,03**	-	-	-	-	100,00%
Return on Assets (ROA)	**(0,90)**	(4,22)	(10,85)	(8,81)	6,19	78,67%

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Return on Equity (ROE)	**(2,43)**	(7,55)	(8,50)	(10,10)	7,07	67,81%
Net Imbalan (NI)	**4,42**	4,56	3,36	2,96	4,69	-3,07%
Net Operating Margin (NOM)	**(0,99)**	(4,77)	(12,24)	(9,93)	6,30	79,25%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Cost to Revenue (BOPO)	**109,29**	128,65	354,75	428,4	56,16	-15,05%
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan Profit Sharing Financing to Total Financing	**86,34**	47,20	-	-	-	82,92%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	**87,72**	95,31	173,27	0,00	0,13	-7,96%
Cost to Revenue Ratio (CIR)	**110,98**	186,04	385,11	411,22	51,64	-40,35%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	**198,29**	129,87	50,59	107,69	6,23	52,68%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Debt to Assets Ratio (DAR)	**66,48**	56,50	33,59	51,85	5,54	17,66%
Rasio Kepatuhan Compliance Ratios						
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) Percentage of Legal Funding Limit Violation (BPMD)						
Pihak Terkait Related Parties	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pihak Tidak Terkait Non-Related Parties	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Persentase Pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) Percentage of Legal Funding Limit Excess						
Pihak Terkait Related Parties	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pihak Tidak Terkait Non-Related Parties	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Giro Wajib Minimum Minimum Statutory Reserves (GWM)						
GWM Rupiah Rupiah Statutory Reserve	**5,53**	13,46	10,39	17,17	4,38	-58,92%
GWM Valuta Asing Foreign Currency Statutory Reserve	**157,73**	157,73	157,73	157,73	157,98	0,00%
Posisi Devisa Neto Secara Keseluruhan Overall Net Open Position	**0,03**	0,03	0,03	0,21	0,75	0,00%

Ikhtisar Saham
Share Information

INFORMASI KINERJA SAHAM
SHARE PERFORMANCE INFORMATION

Kode Saham: BANK Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia

Table of Prices, Transaction Volume, and Market Capitalization 2023-2024

Bulan Month	harga Prices			Peredaran Saham Di Pasar Reguler (saham) Share Circulation In The Regular (Market)			Jumlah Saham Tercatat Total Listed Shares	Kapatalisasi Pasar Market Capitalization
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Akhir Closing	Volume (Unit) Volume (Units)	Nilai (Rp) Value (Rp)	Frek (X) Frequency (X)		
2023								
Januari	1.545	1.280	1.325	695.954.000	978.404.601.000	41.536	14.509.061.592	19.224.506.609.400
Februari	1.415	1.275	1.300	394.401.400	523.051.534.500	34.784	14.509.064.592	18.861.783.969.600
Maret	1.325	1.110	1.200	419.380.300	519.582.222.500	25.134	14.509.071.740	17.410.886.088.000
April	1.495	1.195	1.400	317.347.200	426.410.182.000	24.845	14.509.071.740	20.312.700.436.000
Mei	1.460	1.230	1.285	356.607.600	477.917.512.000	29.276	14.509.072.140	18.644.157.699.900
Juni	1.480	1.135	1.225	235.063.000	301.359.215.500	24.515	14.509.072.140	17.773.613.371.500
Juli	1.380	1.205	1.270	246.799.500	318.238.478.000	23.086	14.509.072.640	18.426.522.252.800
Agustus	1.300	1.185	1.195	274.917.600	338.229.561.500	15.828	14.509.072.940	17.338.342.163.300
September	1.205	1.035	1.075	289.689.300	322.563.541.000	15.409	14.509.073.440	15.597.253.948.000
Oktober	1.090	930	1.040	298.744.300	308.942.583.000	16.717	14.509.075.140	15.089.438.145.600
November	1.130	975	1.080	328.053.900	347.131.506.000	18.808	14.509.075.940	15.669.802.015.200
Desember	1.250	1.050	1.240	290.803.000	328.740.321.500	19.843	14.621.833.840	18.131.073.961.600
Jumlah				4.147.761.100	5.190.571.258.500	289.781		
2024								
Januari	1.420	1.015	1.050	288.863.900	367.657.217.000	33.996	14.621.864.340	15.352.957.557.000
Februari	1.150	1.015	1.070	57.948.100	62.255.813.000	19.838	14.621.864.340	15.645.394.843.800
Maret	1.080	960	1.075	65.475.600	65.697.739.500	8.093	14.621.864.340	15.718.504.165.500
April	1.075	915	1.005	33.234.400	32.376.746.000	6.620	14.621.864.340	14.694.973.661.700
Mei	1.020	880	910	31.603.700	28.943.805.000	6.795	14.621.897.640	13.305.926.852.400
Juni	955	875	920	86.612.700	78.607785.500	12.177	14.621.932.740	13.452.178.120.800
Juli	1.020	880	910	95.197.400	89.198.970.500	18.000	14.621.932.740	13.305.958.793.400
Agustus	915	855	880	87.309.500	7.228.499.000	18.941	14.621.933.840	12.867.301.779.200
September	895	825	845	109.190.100	93.322.207.500	17.255	14.621.933.840	12.355.534.094.800
Oktober	910	755	910	126.135.900	104.987.334.500	23.944	14.621.940.588	13.305.965.935.080
November	915	775	815	100.579.000	82.639.407.500	16.270	14.621.940.588	11.916.881.579.220
Desember	845	780	825	92.241.500	74.780.222.500	10.050	14.621.940.688	12.063.101.067.600
Jumlah				1.174.391.800	1.157.695.747.500	191.979		

Aksi Korporasi Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pada Saham

Corporate Actions Resulting In Changes In Shares

INFORMASI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat aksi korporasi yang menyebabkan perubahan pada saham PT Aladin Global Venture selaku pemegang saham pengendali Bank.

DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Bank tidak melakukan pembagian dividen saham untuk kinerja tahun buku 2021, 2022, dan 2023 sehingga menjadikan seluruh porsi laba bersih menjadi laba ditahan yang digunakan untuk modal kerja.

KONVERSI WARAN MENJADI SAHAM

Sepanjang tahun 2024 (1 Januari - 31 Desember 2024) terdapat 106.848 lembar Waran Seri 1 Bank Aladin Syariah yang dikonversi menjadi saham. Akibat konversi waran menjadi saham tersebut, saham Perseroan bertambah dari sebelumnya sejumlah 14.768.390.017 lembar menjadi 14.768.496.865 lembar.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PEMBATALAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Hingga 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Bank mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dampak dari penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*), yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMATION ON THE BANK'S CONTROLLING SHAREHOLDER

Throughout 2024, there were no corporate actions that resulted in changes to the shares of PT Aladin Global Venture as the controlling shareholder of the Bank.

SHARE DIVIDENDS

Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) resolution, the Bank did not distribute share dividends for the performance of the 2021, 2022, and 2023 fiscal years, so that all portion of the net profits became retained earnings used for working capital.

CONVERSION OF WARRANTS INTO SHARES

Throughout 2024 (January 1 - December 31, 2024) there were 106,848 Series 1 Warrants of Bank Aladin Syariah converted into shares. As a result of the conversion of warrants into shares, the Company's shares increased from the previous 14,768,390,017 shares to 14,768,496,865 shares.

TEMPORARY SUSPENSION OF SHARE TRADING AND/ OR DELISTING OF SHARES

Until December 31 2024, Bank Aladin Syariah has never been subject to sanctions that could affect its share trading activities on the Stock Exchange where the Bank lists shares and trades shares, whether temporary suspension of share trading and/or delisting of shares. Therefore, there is no information to report on the impact of temporary suspension of share trading and/or delisting of shares in this Annual Report.

Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, Atau Obligasi Konversi, Serta Pendanaan Lainnya

Information About Bonds, Sukuk, Or Convertible Bonds, As Well As Other Funding

Hingga 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya serta bentuk pendanaan lainnya seperti *Medium Term Notes* (MTN). Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk serta pendanaan lainnya.

Until December 31, 2024, Bank Aladin Syariah has not issue bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities and other forms of funding such as Medium Term Notes (MTN). Thus, there is no information to report on outstanding bonds/ sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and ratings of bonds/ sukuk and other funding.

Peristiwa Penting
Important Events



Bank Aladin Syariah Meluncurkan Produk Simpanan Berjangka yaitu Ala Deposito
Bank Aladin Syariah Launched Term Deposit Product, Ala Deposito

Bank Aladin Syariah menghadirkan Ala Deposito, produk simpanan berjangka berbasis syariah dengan sistem bagi hasil (nisbah) yang kompetitif. Dengan tenor fleksibel 1, 3, 6, dan 12 bulan, produk ini membantu nasabah dalam perencanaan keuangan untuk berbagai kebutuhan seperti haji, pendidikan, dan dana darurat.

Bank Aladin Syariah presented Ala Deposito, a sharia-based term deposit product with a competitive profit-sharing system (nisbah). With flexible tenors of 1, 3, 6, and 12 months, this product helps customers in financial planning for various needs such as hajj, education, and emergency funds.



Direktur Digital Banking Bank Aladin Syariah Menjadi Guest Speaker di Townhall Zurich Syariah
Bank Aladin Syariah Director of Digital Banking Became Guest Speaker at Zurich Syariah Townhall

Direktur Digital Banking Bank Aladin Syariah, Ibu Firdila Sari, menjadi guest speaker dalam acara Townhall Zurich Syariah pada 21 Februari 2024. Dalam kesempatan ini, beliau memaparkan perjalanan dan pertumbuhan Bank Aladin Syariah, yang kini telah memiliki lebih dari 3,2 juta pengguna terdaftar per Desember 2023. Kemitraan strategis dengan Alfamart menjadi inovasi utama dalam memberikan akses layanan keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat.

Bank Aladin Syariah Director of Digital Banking, Mrs. Firdila Sari, became a guest speaker at the Zurich Syariah Townhall event on February 21, 2024. On this occasion, she explained the journey and growth of Bank Aladin Syariah, which now has more than 3.2 million registered users as of December 2023. The strategic partnership with Alfamart is a major innovation in providing easier access to financial services for the public.

27 Februari 2024
February 27, 2024



CTO Bank Aladin Syariah Menjadi Guest Speaker di Tech a Leap oleh Adira Finance

Bank Aladin Syariah CTO Became Guest Speaker at Tech a Leap by Adira Finance

Bapak Budi Kusmiantoro, Chief Technology Officer Bank Aladin Syariah, menjadi guest speaker dalam acara Tech a Leap yang diselenggarakan oleh Adira Finance pada 27 Februari 2024. Dalam kesempatan ini, beliau berbagi pengalaman membangun Bank Aladin Syariah serta memberikan motivasi kepada karyawan Adira Finance tentang kepemimpinan di dunia IT. Beliau menegaskan bahwa pemimpin yang baik harus mampu menginspirasi tim dan menyamakan visi serta rencana untuk mencapai tujuan bersama.

Mr. Budi Kusmiantoro, Chief Technology Officer of Bank Aladin Syariah, became a guest speaker at the Tech a Leap event organized by Adira Finance on February 27, 2024. On this occasion, he shared his experience in building Bank Aladin Syariah and provided motivation to Adira Finance employees about leadership in the IT world. He emphasized that a good leader must be able to inspire the team and align visions and plans to achieve common goals.

27 Maret 2024
March 27, 2024



Program Ala Deposito Bank Aladin Syariah: Menabung dengan Kebaikan Ramadan

Bank Aladin Syariah Time Deposit Program: Saving with the Goodness of Ramadan

Menyambut bulan Ramadan, Bank Aladin Syariah menghadirkan program spesial Ala Deposito dengan total benefit hingga 7,5% per tahun. Program ini bertujuan untuk membantu perencanaan keuangan nasabah dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran dengan sistem bagi hasil (nisbah) berbasis syariah.

Welcoming the month of Ramadan, Bank Aladin Syariah presented a special Time Deposit Program with a total benefit of up to 7.5% per year. This program aimed to help customers' financial planning in meeting their needs during Ramadan and Eid with a sharia-based profit sharing system.

1 April 2024
April 1, 2024



Konsistensi Bank Aladin Syariah, Mendorong Kinerja yang Solid
Bank Aladin Syariah's Consistency, Driving Solid Performance

Bank Aladin Syariah mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, dengan lebih dari 5,2 juta unduhan aplikasi, peningkatan outstanding pembiayaan lebih dari 125% dan menyalurkan lebih dari Rp8,6 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh lebih dari 300%, serta aset bank mencapai Rp7,1 triliun, meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Bank Aladin Syariah juga Konsisten dalam mengembangkan inovasi digital dan kolaborasi ekosistem, termasuk Banking as a Service (BaaS) bersama Alfamart.

Bank Aladin Syariah recorded significant growth in 2023, with more than 5.2 million application downloads, an increase in outstanding financing of more than 125% and disbursement of more than Rp 8.6 trillion. Third Party Funds (TPF) also grew by more than 300%, and the Bank's assets reached Rp7.1 trillion, an increase of almost 50% compared to the previous year. Bank Aladin Syariah has also been consistent in developing digital innovation and ecosystem collaboration, including Banking as a Service (BaaS) with Alfamart.

26 Juni 2024
June 26, 2024



Bank Aladin Syariah Gelar RUPST
Bank Aladin Syariah Held AGMS

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah") atau ("BANK"), melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Dalam RUPST yang diselenggarakan, Bank Aladin Syariah telah mengambil sejumlah keputusan di antaranya adalah persetujuan Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan, Laporan Keuangan, serta Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah") or ("the Bank"), held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on June 26, 2024 at the Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. In the AGMS, Bank Aladin Syariah made several resolutions including the approval of the Annual Report, including the Company's Activity Report, Approval of Changes to the Company's Management, Financial Statements, and Sustainability Report for the fiscal year ending December 31, 2023.

4 Juli 2024
July 4, 2024



Kerja Sama Bank Aladin Syariah dengan PT Taspen sebagai Mitra Layanan Perbankan
Bank Aladin Syariah's Cooperation with PT Taspen as Banking Service Partner

Bank Aladin Syariah resmi menjalin kerja sama dengan PT Taspen (Persero) sebagai Mitra Layanan Perbankan. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Ariyandi, Direktur Operasional PT Taspen (Persero), dan Bapak Jo Anula Putra, Direktur Bank Aladin Syariah. Kerja sama ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan bagi seluruh peserta.

Bank Aladin Syariah has officially established a partnership with PT Taspen (Persero) as a Banking Service Partner. The signing was carried out by Mr. Ariyandi, Chief Operational Officer of PT Taspen (Persero), and Mr. Jo Anula Putra, Director of Bank Aladin Syariah. This partnership confirms the commitment of both parties to improve the quality of banking services for all participants.

4 Juli 2024
July 4, 2024



Bank Aladin Syariah Berpartisipasi dalam Digital Banking Asia Summit 2024

Bank Aladin Syariah Participated in the 2024 Digital Banking Asia Summit

Bank Aladin Syariah turut serta dalam Digital Banking Asia Summit 2024. Fauzi Aditya selaku Group Head Digital Product Bank Aladin Syariah, menjadi narasumber dalam diskusi panel bertema Transforming Digital Banking Customer Experience. Dalam kesempatan ini, ia memaparkan kolaborasi Bank Aladin Syariah dengan Alfamart Group, layanan digital yang memudahkan transaksi, serta keamanan teknologi perbankan digital yang tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan dan Good Corporate Governance.

Bank Aladin Syariah participated in the 2024 Digital Banking Asia Summit. Fauzi Aditya as Group Head of Digital Product of Bank Aladin Syariah, was a resource person in a panel discussion themed Transforming Digital Banking Customer Experience. On this occasion, he explained the collaboration between Bank Aladin Syariah and Alfamart Group, digital services that facilitate transactions, and the security of digital banking technology that is still based on the principles of sustainability and Good Corporate Governance.

30 Juli 2024
July 30, 2024



Total Pendapatan Bank meningkat 111%, kinerja Bank Aladin Syariah kian solid

Total Bank Revenue Increased by 111%, Bank Aladin Syariah's Performance was Increasingly Solid

Hingga Kuartal II 2024, Bank Aladin Syariah mencatatkan total pendapatan Rp320 miliar, meningkat 111% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp4,7 triliun meningkat 44%, sementara outstanding pembiayaan tumbuh 29% menjadi Rp4 triliun. Total aset juga naik 18% menjadi Rp8,3 triliun. Bank Aladin Syariah terus memperluas layanan tarik setor tunai serta QRIS di lebih dari 20.000 gerai, serta meluncurkan produk inovatif seperti Ala Deposito dan Ala Gen. Bank Aladin Syariah terus mengedepankan prinsip syariah, kehati-hatian (prudent), dan Tata Kelola yang Baik, dengan kualitas pembiayaan yang terjaga di level NPF 0%, serta berkomitmen untuk mendorong ekspansi bisnis, menghadirkan inovasi yang dekat dengan masyarakat, dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Until Q2 2024, Bank Aladin Syariah recorded a total revenue of Rp320 billion, an increase of 111% compared to the same period of the previous year. Third Party Funds (TPF) reached Rp4.7 trillion, an increase of 44%, while outstanding financing grew 29% to Rp4 trillion. Total assets also increased by 18% to Rp8.3 trillion. Bank Aladin Syariah continued to expand its cash withdrawal and QRIS services in more than 20,000 outlets, and launch innovative products such as Ala Deposito and Ala Gen. Bank Aladin Syariah continued to prioritize sharia principles, prudence, and Good Governance, with financing quality maintained at the NPF level of 0%, and is committed to encouraging business expansion, presenting innovations that are close to the community, and expanding sharia financial inclusion in Indonesia.

23 Agustus 2024
August 23, 2024



HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia
79th Anniversary of the Republic of Indonesia's Independence

Bank Aladin Syariah merayakan HUT Kemerdekaan RI yang disambut antusias oleh seluruh karyawan dengan mengadakan berbagai macam perlombaan dan kuliner dari seluruh karyawan. Acara ini dapat menjadi ajang kebersamaan dan mempersatukan seluruh karyawan dengan mengingat jasa-jasa pahlawan Indonesia.

Bank Aladin Syariah celebrated the Independence Day of the Republic of Indonesia which was enthusiastically welcomed by all employees by holding various competitions and culinary from all employees. This event can be a place for togetherness and uniting all employees by remembering the services of Indonesian heroes.

30 Oktober 2024
October 30, 2024



Penyaluran Pembiayaan terus meningkat, Total Pendapatan Bank Aladin Syariah Naik 108%
Financing Disbursement Continues to Increase, Bank Aladin Syariah's Total Revenue Increased by 108%

Hingga Kuartal III 2024, Bank Aladin Syariah mencatat total pendapatan Rp528 miliar, meningkat 108% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 5,2 triliun meningkat 83%, sementara outstanding pembiayaan tumbuh 77% menjadi Rp 4,4 triliun. Total aset juga naik 21% menjadi Rp 8,6 triliun. Peningkatan nasabah ritel hingga 43% didukung oleh produk inovatif seperti Ala Deposito, Ala Impian, dan Ala Gen. Bank Aladin Syariah juga terus memperkuat ekosistem perbankan digital dengan Banking as a Service (BaaS) dan kemitraan strategis dengan Alfa Group dan Taspen.

Until Q3 2024, Bank Aladin Syariah recorded a total revenue of Rp528 billion, an increase of 108% compared to the same period of the previous year. Third Party Funds (TPF) reached Rp5.2 trillion, an increase of 83%, while outstanding financing grew 77% to Rp4.4 trillion. Total assets also increased by 21% to Rp8.6 trillion. The increase in retail customers by 43% was supported by innovative products such as Ala Deposito, Ala Impian, and Ala Gen. Bank Aladin Syariah also continued to strengthen the digital banking ecosystem with Banking as a Service (BaaS) and strategic partnerships with Alfa Group and Taspen

19 Desember 2024
December 19, 2024



Bank Aladin Syariah Berkolaborasi dengan Yayasan Karya Salemba Empat untuk Meningkatkan Literasi Keuangan dan Kepemimpinan Siswa
Bank Aladin Syariah Collaborated with Karya Salemba Empat Foundation to Improve Financial Literacy and Student Leadership

Selamat kepada Direktur Utama kami, Koko Tjatur Rachmadi, atas penghargaan Indonesia CEO Excellence Award 2024 yang diberikan oleh Warta Ekonomi pada tanggal 19 Desember 2024 di Jakarta. Penghargaan bergengsi ini merupakan bentuk penghormatan atas kepemimpinannya yang luar biasa dalam mendorong pertumbuhan bisnis melalui strategi yang inovatif dan berpusat pada nasabah dalam ekosistem Syariah.

Bapak Koko juga menyampaikan rasa terima kasihnya dan menegaskan bahwa pencapaian ini dapat terwujud berkat kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank Aladin Syariah. Beliau juga menegaskan kembali komitmen bank untuk terus berinovasi dan memberikan layanan perbankan syariah yang unggul.

Congratulations to our President Director, Koko Tjatur Rachmadi, on receiving the Indonesia CEO Excellence Award 2024 by Warta Ekonomi on December 19, 2024, in Jakarta. This prestigious recognition honors his exceptional leadership in driving business growth through innovative, customer-centric strategies within the Sharia ecosystem.

Bapak Koko also expressed his gratitude and emphasizing that this achievement was made possible by the hard work and dedication of the entire management team and employees of Bank Aladin Syariah. He also reaffirmed the bank's commitment to continuously innovating and delivering outstanding sharia banking services.

22 Desember 2024
December 22, 2024



Bank Aladin Syariah Berkolaborasi dengan Yayasan Karya Salemba Empat untuk Meningkatkan Literasi Keuangan dan Kepemimpinan Siswa
Bank Aladin Syariah Collaborated with Karya Salemba Empat Foundation to Improve Financial Literacy and Student Leadership

Bank Aladin Syariah menjalin kolaborasi dengan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) untuk membekali siswa dengan beasiswa, keterampilan kepemimpinan, dan literasi keuangan. Melalui program ini, siswa diperkenalkan dengan layanan perbankan syariah seperti Ala Impian, Ala Berbagi, serta fitur Tarik & Setor Tunai di Alfa Group guna membantu mereka dalam perencanaan keuangan. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu siswa membangun fondasi keuangan yang kuat dan berdampak positif bagi masyarakat.

Bank Aladin Syariah collaborated with Karya Salemba Empat (KSE) Foundation to provide students with scholarships, leadership skills, and financial literacy. Through this program, students were introduced to sharia banking services such as Ala Impian, Ala Berbagi, and the Withdraw & Deposit Cash feature at Alfa Group to help them with financial planning. This initiative aims to help students build a strong financial foundation and have a positive impact on society.

02

Laporan Manajemen

Management Report



Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah membangun komunikasi yang intensif dan efektif untuk menjaga konsistensi dalam mendorong pertumbuhan positif bisnis Bank. Komunikasi yang terjalin mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah di setiap strategi dan kebijakan strategis Bank.
The Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board build intensive and effective communication to maintain consistency in driving positive growth of the Bank's business. The communication established includes the application of sharia principles in every strategy and the Bank's strategic policy.



Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report

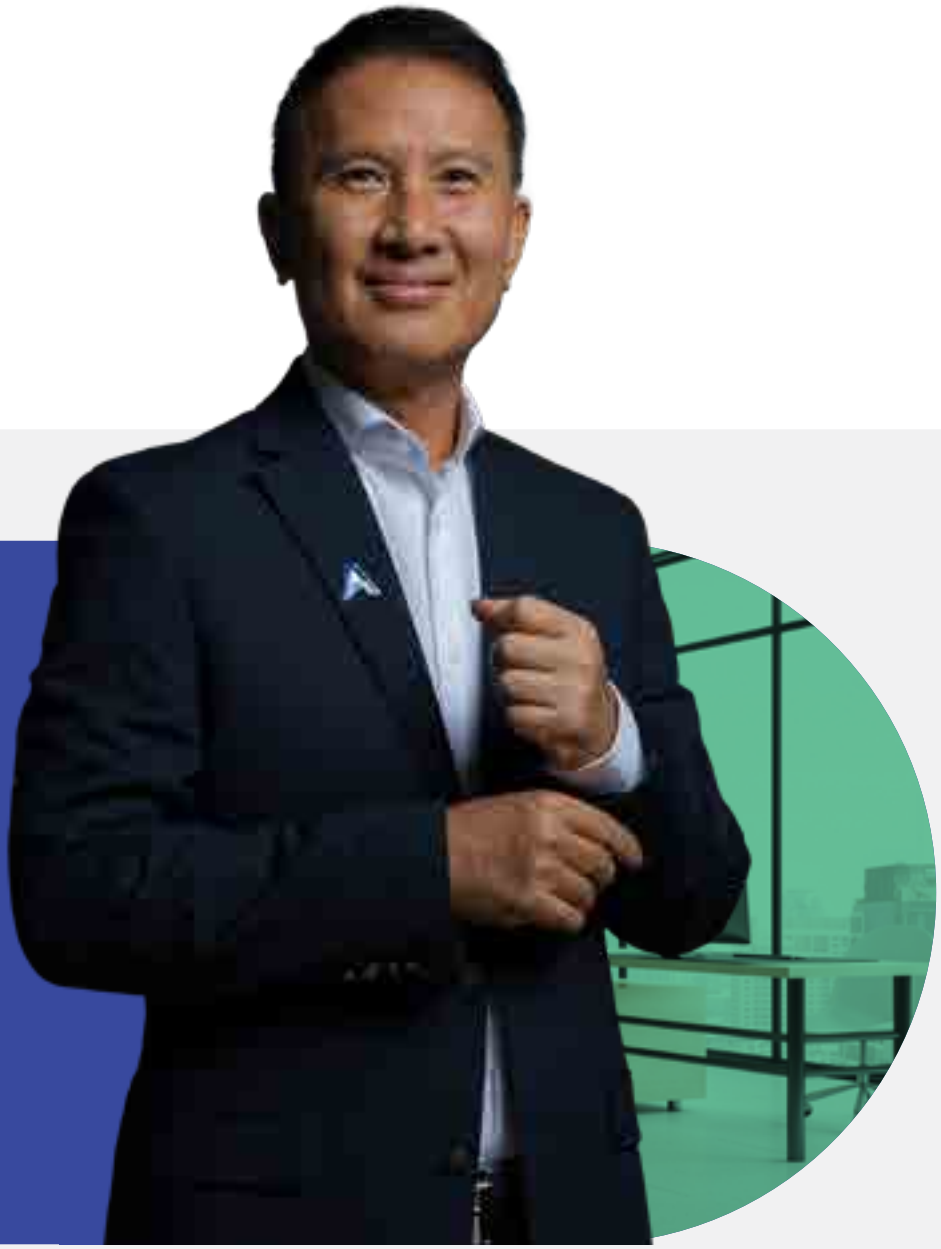

Rudy Hamdani
Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner (Independent)

Dewan Komisaris memusatkan pengawasannya pada pengembangan bisnis guna mewujudkan Bank Aladin Syariah sebagai bank digital yang mampu memberikan solusi perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dewan Komisaris memusatkan pengawasannya pada pengembangan bisnis guna mewujudkan Bank Aladin Syariah sebagai bank digital yang mampu memberikan solusi perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Respected Shareholders and Stakeholders,



Pertama-tama, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bank Aladin Syariah dapat melalui tahun 2024 dengan pencapaian kinerja yang cukup baik dan solid. Hal tersebut seiring dengan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat serta arahan kepada Direksi, yang senantiasa dilaksanakan dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan penuh kehati-hatian, demi kepentingan Bank, sebagaimana arahan Pemegang Saham.

Laporan Dewan Komisaris meliputi penilaian kami atas kinerja Direksi dalam pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; pengawasan dalam perumusan dan implementasi strategi oleh Direksi; pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi dan dasar pertimbangannya; serta pengawasan dalam penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja dari struktur Organ Tata Kelola.

First and foremost, allow me to express gratitude and praise on behalf of the Board of Commissioners to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His blessings and grace upon Bank Aladin Syariah, enabling it to navigate through the year 2024 with commendable and solid performance. This achievement is in line with the role of the Board of Commissioners in overseeing and providing advice and guidance to the Board of Directors, which is always carried out with good intentions, responsibility, and utmost caution, all for the benefit of the Bank, as directed by the Shareholders.

The Board of Commissioners' report covers our assessment of the Board of Directors' performance in managing the Company and its evaluation criteria; supervision on the formulation and implementation of strategies by the Board of Directors; views on the Company's business prospects prepared by the Board of Directors and their underlying considerations; and supervision on the implementation of corporate governance and the performance of the Governance Organ structure.

TINJAUAN KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL DAN GLOBAL

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 ditandai dengan volatilitas di pasar keuangan akibat berbagai gejolak geopolitik, termasuk konflik di beberapa wilayah serta terpilihnya pemimpin negara yang membawa arah kebijakan baru. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 akan mencapai 3,2%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, IMF juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami sedikit peningkatan pada 2025.

Salah satu tantangan utama dalam perekonomian global adalah perbedaan arah pertumbuhan ekonomi yang semakin terlihat. Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan di atas ekspektasi, mencapai 3% secara tahunan hingga Triwulan III 2024, sedangkan kondisi ekonomi di beberapa negara utama lainnya, seperti Jerman dan Inggris, mengalami perlambatan. Selain itu, Tiongkok, yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi global, mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,9% pada akhir September 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelum pandemi yang mencapai 6,7%.

Di sisi lain, perekonomian global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang dipicu oleh berlanjutnya konflik geopolitik, pemulihan ekonomi Tiongkok yang masih tertahan pasca pandemi, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan AS. Faktor-faktor ini mempengaruhi ekspektasi terhadap suku bunga acuan The Fed dan mendorong penguatan USD terhadap mata uang negara

REVIEW OF NATIONAL AND GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS

The global economic conditions in 2024 were marked by volatility in financial markets due to various geopolitical upheavals, including conflicts in several regions and the election of national leaders who brought new policy directions. The IMF estimates that global economic growth in 2024 will reach 3.2%, slightly lower than the previous year. Meanwhile, the IMF also projects that global economic growth will experience a slight increase in 2025.

One of the main challenges in the global economy was the increasingly visible difference in the direction of economic growth. The United States economy showed growth above expectations, reaching 3% annually until the third quarter of 2024, while economic conditions in several other major countries, such as Germany and the UK, experienced a slowdown. In addition, China, which has been the main driver of the global economy, recorded growth of 4.9% at the end of September 2024, lower than the pre-pandemic average of 6.7%.

On the flip side, the global economy was still overshadowed by uncertainty triggered by ongoing geopolitical conflicts, China's economic recovery which was still being held back after the pandemic, and uncertainty over US trade policy. These factors affected expectations regarding the Fed's benchmark interest rate and encouraged the strengthening of the USD against emerging market currencies, including

berkembang, termasuk Rupiah. Kondisi tersebut kemudian berkontribusi pada meningkatnya volatilitas di pasar keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.

the Rupiah. This condition then contributed to increasing volatility in financial markets, including the Indonesia's capital market.

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan pertumbuhan sebesar 5% hingga Triwulan III. Namun, pertumbuhan tersebut tidak merata, terutama dalam hal konsumsi, di mana daya beli kelompok menengah ke bawah mengalami tekanan. Hal ini juga tercermin dari tingkat inflasi yang tetap rendah sepanjang tahun, yakni sebesar 1,6% YoY pada Desember 2024.

In 2024, the Indonesia's economy showed quite good resilience with growth of 5% until the third quarter. However, this growth was uneven, especially in terms of consumption, where the purchasing power of the lower middle class was under pressure. This was also reflected in the inflation rate which remained low throughout the year, namely 1.6% YoY in December 2024.

Inflasi menunjukkan tren penurunan baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Penurunan ini didorong oleh perbaikan kondisi rantai pasok global, meskipun masih berpotensi dipengaruhi oleh dinamika serta ketegangan geopolitik. Perubahan dalam ketegangan geopolitik dan pertumbuhan ekonomi turut mempengaruhi kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral di masing-masing negara. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, bank-bank sentral mulai menurunkan suku bunga acuannya.

Inflation showed a downward trend in both developed and developing countries. This decline was spurred by improvements in global supply chain conditions, although it was still potentially influenced by geopolitical dynamics and tensions. Changes in geopolitical tensions and economic growth also affected monetary policies taken by central banks in each country. In response to these conditions, central banks began to lower their benchmark interest rates.

Salah satu tantangan utama dalam sektor keuangan adalah volatilitas nilai tukar Rupiah. Meskipun suku bunga acuan The Fed (FFR) telah dipangkas sebesar 100 bps sepanjang 2024, dampaknya terhadap penurunan suku bunga BI hanya sebesar 25 bps, lebih kecil dari perkiraan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, terutama di akhir tahun, seiring dengan pasar yang mulai mengantisipasi risiko kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di AS.

One of the main challenges in the financial sector was the volatility of the Rupiah exchange rate. Although the Fed's benchmark interest rate (FFR) had been cut by 100 bps throughout 2024, its impact on the BI interest rate cut was only 25 bps, smaller than previously estimated. This was due to pressure on the Rupiah exchange rate, especially at the end of the year, as the market began to anticipate the risk of the policies of the elected president of the United States, Donald Trump, which had the potential to increase inflationary pressures in the US.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik di sektor riil, keuangan, maupun industri perbankan, Bank Aladin Syariah tetap mampu menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dengan risiko yang terkendali sepanjang 2024. Memasuki tahun 2025, kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi global dan domestik akan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan akan muncul di tahun mendatang.

Despite facing a range of challenges, both in the real sector, finance, and banking industry, Bank Aladin Syariah was still able to maintain healthy business growth with controlled risks throughout 2024. Entering 2025, the ability to adapt to the dynamics of the global and domestic economy will be an important capital in facing various challenges that are expected to emerge in the coming year.

Perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan oleh regulator, serta semakin tingginya persaingan di industri perbankan merupakan faktor eksternal penting dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yang juga dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan atas adaptasi masyarakat ke teknologi dan digital, serta perkembangan literasi keuangan di Indonesia.

National and global economic developments, changes in policies by regulators, and increasing competition in the banking industry are important external factors in the preparation of the Bank Business Plan (RBB) and the Sustainable Financial Action Plan (RAKB), which also considers the opportunities and challenges of society's adaptation to technology and digital, as well as the development of financial literacy in Indonesia.

Setelah memasuki tahapan pertumbuhan yang dimulai dengan diluncurkannya aplikasi digital Bank di tahun 2022, Bank Aladin Syariah terus mengembangkan produk-produknya sebagai bank digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, Bank telah berhasil mengakuisisi lebih dari 3,3 juta nasabah sampai dengan akhir

After entering the growth phase that began with the launch of the Bank's digital application in 2022, Bank Aladin Syariah continued to develop its products as a digital bank to meet the needs of the community. Through this application, the Bank successfully acquired more than 3.3 million customers by the end of 2024. In addition to previously

tahun 2024. Selain produk-produk yang telah diluncurkan sebelumnya seperti tabungan transaksional "Ala Dompet", tabungan rencana "Ala Impian", fitur-fitur baru seperti bill payment, Ala Berbagi, dan tarik setor tunai melalui gerai Alfamart, di tahun 2024 ini Bank meluncurkan inovasi produk-produk perbankan seperti "Ala Deposito" online untuk nasabah ritel, "Ala Gen" yang merupakan tabungan untuk anak-anak dan remaja, penambahan fitur *e-wallet,* dan tersedianya QRIS CPM yang menampilkan QRIS dari aplikasi *mobile banking* Aladin untuk nasabah melakukan pembayaran dengan menunjukan *scan* kepada merchant.

Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dengan penambahan pada *outlet* DAN+DAN dan Lawson, sehingga layanan tersebut telah tersedia di lebih dari 23.000 gerai Alfa Group di seluruh Indonesia. Di tahun 2024, Bank juga telah menghadirkan terobosan baru meluncurkan layanan Banking as a Service (BaaS), sebuah layanan dari bank digital dengan pihak ketiga untuk terhubung dengan sistem perbankan secara langsung melalui Application Programming Interface (API) dengan mitra yaitu Virgo dan Super Flip by Aladin.

Dari sisi pembiayaan, Bank juga terus mendorong penyaluran dana melalui produk invoice financing, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ritel konsumtif. Di tahun 2024, Bank juga telah menyalurkan pembiayaan ritel melalui mitra Taspen dan Traveloka. Guna mendukung pengembangan bisnis Bank, kemitraan yang dimiliki Bank juga akan terus diperluas dan Bank akan terus berupaya menggali potensi pengembangan bisnis melalui ekosistem mitra strategis Bank.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris melihat bahwa kebijakan strategis Bank di tahun 2024 dengan memperkuat fokus sebagai entitas digital banking pada segmen ritel serta terus berkolaborasi dengan mitra-mitra sudah sangat tepat. Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah Bank untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia serta memperkuat fungsi intermediari melalui pertumbuhan bisnis bersama mitra-mitra yang akrab dengan keseharian nasabah.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN BANK

Di sepanjang tahun 2024, Direksi Bank Aladin Syariah telah melakukan beberapa langkah yang besar untuk masa depan Bank, atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan arahan Pemegang Saham. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah tersebut sudah cukup tepat dan telah terimplementasi dengan baik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik selama 2023, tercermin antara lain dari capaian

launched products such as "Ala Dompet" transactional savings, "Ala Impian" planned savings, new features such as bill payment, Ala Berbagi, and cash withdrawal and deposit through Alfamart outlets, in 2024 Bank launched innovative banking products such as "Ala Deposito" online for retail customers, "Ala Gen" which is savings for children and teenagers, the addition of e-wallet features, and the availability of QRIS CPM which displays QRIS from the Aladin mobile banking application for customers to make payments by showing a scan to merchants.

The Bank's cash withdrawal and deposit services also continue to be expanded with the addition of DAN+DAN and Lawson outlets, so that these services are now available at more than 23,000 Alfa Group outlets throughout Indonesia. In 2024, the Bank also presented a new breakthrough by launching the Banking as a Service (BaaS) service, a service from a digital bank with a third party to connect to the banking system directly through the Application Programming Interface (API) with partners, namely Virgo and Super Flip by Aladin.

In terms of financing, the Bank also continued to encourage the distribution of funds through invoice financing products, working capital financing and consumer retail financing. In 2024, the Bank also disbursed retail financing through Taspen and Traveloka partners. To support the Bank's business development, the Bank's partnerships will also continue to be expanded and the Bank will continuously strive to explore the potential for business development through the Bank's strategic partner ecosystem.

Based on these developments, the Board of Commissioners sees that the Bank's strategic policy in 2024 by strengthening its focus as a digital banking entity in the retail segment and continuing to collaborate with partners is very appropriate. The Board of Commissioners also appreciates the Bank's measure to strengthen the sharia financial ecosystem that is beneficial for all levels of society in Indonesia and strengthens the intermediary function through business growth with partners who are familiar with customers' daily lives.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT ON THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN MANAGING THE BANK

Throughout 2024, the Board of Directors of Bank Aladin Syariah has taken several major measures for the Bank's future, with the approval of the Board of Commissioners and in accordance with the directives from the Shareholders. The Board of Commissioners considers that these steps are quite appropriate and have been implemented well, in accordance with what has been planned. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities very well

kinerja Bank yang secara keseluruhan telah melebihi target yang ditetapkan khususnya dari sisi penghimpunan dana dan pembiayaan.

Kami melihat Bank Aladin Syariah melalui tahun 2024 yang berkembang menjadi penuh tantangan tetap mencatatkan kinerja yang baik. Di tahun 2024, Bank Aladin Syariah berhasil membukukan pembiayaan lebih dari Rp4,7 triliun. Pembiayaan ini naik lebih dari 53% dibandingkan dengan posisi pembiayaan di akhir tahun 2023 sebesar Rp3,1 triliun. Secara total *disbursement*, Bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp8,8 triliun selama tahun 2024. Sedangkan dari sisi penghimpunan dana, Bank berhasil memperoleh lebih dari Rp5,4 triliun hingga akhir Desember 2024.

Sementara itu dalam rangka mendukung kegiatan bisnis bank, Bank terus memperluas jaringan kerjasama mitra dan terus mengoptimalisasi fungsi intermediarinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Untuk mendorong penghimpunan dana, Bank meluncurkan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas dan produk tabungan remaja, serta mitra-mitra strategis yang terus bertambah.

Pada sisi pembiayaan, Bank telah menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah ritel, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Komersial. Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS CPM sebagai metode pembayaran melalui aplikasi *mobile banking* dan peningkatan *platform Corporate Internet Banking* yang terus dikinikan untuk mempermudah transaksi perbankan bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 23.000 gerai Alfamart, Alfamidi, DAN+DAN, dan Lawson di seluruh Indonesia. Dewan Komisaris juga mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan Bank Aladin Syariah yang dapat menjaga serta memitigasi dengan baik *Non-Performing Financing* (NPF) atau kualitas pembiayaan bermasalah di level 0,03%.

Berdasarkan kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh Direksi, Bank berhasil memperoleh lebih dari 3,3 juta pengguna per 31 Desember 2024. Hal ini menjadi pencapaian yang cukup membanggakan dan Bank akan terus mempertahankan posisinya sebagai Bank Syariah masa depan dengan segmen ritel dan komersial.

Dewan Komisaris optimis bahwa pencapaian yang diraih sepanjang tahun 2024 akan menjadi landasan kokoh bagi pertumbuhan bisnis Bank di masa depan. Selain itu, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja, komitmen, dan dedikasi Direksi serta seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan dan mengantisipasi dinamika bisnis ke depan.

during 2024, reflected among others in the Bank's overall performance achievements which have exceeded the targets set, especially in terms of fund collection and financing.

We see that Bank Aladin Syariah has navigated through 2024 which has developed into a year filled with challenges by continuously recording a good performance. In 2024, Bank Aladin Syariah managed to record financing of more than Rp4.7 trillion. This financing increased by more than 53% compared to the financing position at the end of 2023 of Rp3.1 trillion. In total disbursement, the Bank disbursed financing of more than Rp8.8 trillion during 2024. Meanwhile, in terms of fundraising, the Bank succeeded in obtaining more than Rp5.4 trillion until the end of December 2024.

Meanwhile, to support its business activities, the Bank continued to expand its network of partner collaborations and to optimize its intermediary function by increasing third-party fundraising and financing disbursement activities. To encourage fundraising, the Bank launched Time Deposit products for middle-upper segment retail customers and youth savings products, as well as strategic partners that continued to grow.

On the financing side, the Bank disbursed productive financing based on profit sharing for retail customers, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Commercial. The Bank's services were also continuously complemented by the launch of the QRIS CPM feature as a payment method through the mobile banking application and the improvement of the Corporate Internet Banking platform which is continuously updated to facilitate banking transactions for corporate customers. The Bank's cash withdrawal services are also continuously expanded and are available at more than 23,000 Alfamart, Alfamidi, DAN+DAN, and Lawson outlets throughout Indonesia. The Board of Commissioners also appreciates the measures taken by Bank Aladin Syariah which can maintain and mitigate Non-Performing Financing (NPF) at the level of 0.03%.

Based on the strategic policies implemented by the Board of Directors, the Bank has succeeded in acquiring more than 3.3 million users as of December 31, 2024. This is a proud achievement, and the Bank will continue to maintain its position as a future Sharia Bank with retail and commercial segments.

The Board of Commissioners is optimistic that the achievements made throughout 2024 will be a solid foundation for the Bank's business growth in the future. In addition, the Board of Commissioners expresses its appreciation for the performance, commitment, and dedication of the Board of Directors and all levels in facing challenges and anticipating future business dynamics.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI BANK

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun dengan saling menghormati antar keduanya. Terdapat batasan dari tanggung jawab dan peran yang dijalankan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Direksi berperan mengelola operasional dan bisnis Bank, sedangkan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Bank, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank melaksanakan aspek Tata Kelola Perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris memusatkan pengawasannya pada rencana pengembangan bisnis Bank guna mewujudkan Bank Aladin Syariah sebagai bank digital yang mampu memberikan solusi perbankan yang efektif dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk selalu mengutamakan kepatuhan serta menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Sebagai bagian dari tugasnya, Dewan Komisaris terus berupaya menjalankan peran dalam memberikan arahan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif serta solutif kepada Direksi. Komunikasi yang baik dan intens antara Dewan Komisaris dan Direksi tetap terjalin, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip kepatuhan dan Tata Kelola guna memperkuat fondasi bisnis Bank yang dibangun sepanjang tahun 2024.

Mengacu pada Peraturan OJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB), Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Rencana RBB, yang mencakup kebijakan serta strategi manajemen. Bank Aladin Syariah secara rutin melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin dan berkala.

FREKUENSI DAN MEKANISME PEMBERIAN NASIHAT OLEH DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris telah menjalankan pengawasan terhadap implementasi strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Direksi, salah satunya melalui mekanisme rapat yang diselenggarakan secara berkala. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi dalam forum rapat gabungan untuk membahas berbagai aspek pengelolaan Bank. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Komisaris meminta penjelasan dari Direksi mengenai strategi dan kebijakan yang diterapkan, pencapaian

BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISION ON THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF THE BANK'S STRATEGIES

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is built on mutual respect between the two. There are limitations to the responsibilities and roles carried out by both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Directors plays a role in managing the Bank's operations and business, while the Board of Commissioners is tasked with supervising the Bank's management, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that the Bank implements aspects of Corporate Governance properly.

The Board of Commissioners focuses its supervision on the Bank's business development plan to realize Bank Aladin Syariah as a digital bank that can provide effective and efficient banking solutions for all levels of society. In realizing this vision, the Board of Commissioners always reminds the Board of Directors to always prioritize compliance and implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).

As part of its duties, the Board of Commissioners continuously strives to carry out its role in providing constructive and solution-oriented direction, advice, and recommendations to the Board of Directors. Good and intense communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors is maintained, especially in ensuring compliance with the principles of compliance and Governance in order to strengthen the Bank's business foundation built throughout 2024.

Referring to OJK Regulation No. 5/POJK.03/2016 concerning the Bank Business Plan (RBB), the Board of Commissioners supervises the implementation of the RBB Plan, which includes management policies and strategies. Bank Aladin Syariah reports the results of supervision of the RBB implementation to the Financial Services Authority (OJK) routinely and periodically.

FREQUENCY AND MECHANISM OF PROVISION OF ADVICE BY THE BOARD OF COMMISSIONERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners has carried out supervision of the implementation of strategies and policies by the Board of Directors, one of which is through a meeting mechanism held periodically. The Board of Commissioners routinely holds meetings with the Board of Directors in a joint meeting forum to discuss various aspects of Bank management. In these meetings, the Board of Commissioners requests an explanation from the Board of Directors regarding the strategies and policies implemented, achievements that

yang telah diraih, serta kendala yang dihadapi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan pandangan, arahan, dan rekomendasi kepada Direksi terkait berbagai aspek strategis.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menggelar rapat gabungan yang melibatkan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengadakan pertemuan dengan organ pendukungnya, seperti Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko, guna membahas hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing komite sesuai dengan perannya.

Secara keseluruhan, selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan mengadakan rapat terkait evaluasi manajemen dan kinerja Bank. Sepanjang tahun, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) rapat, yang terdiri dari 6 (enam) Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) Rapat Gabungan bersama Direksi serta Dewan Pengawas Syariah. Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat Komite Audit sebanyak 12 (dua belas) rapat, Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (dua belas) rapat dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 7 (tujuh) rapat.

Selain mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik, Dewan Komisaris juga telah menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pengelolaan Bank serta memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan bahwa bisnis dan operasional Bank berjalan secara optimal.

PANDANGAN ATAU TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS ATAS PROSPEK USAHA DAN TANTANGAN KE DEPAN

Pada tahun 2025, dinamika geopolitik serta perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian global. Selain itu, pergantian kepemimpinan di negara-negara dengan perekonomian besar, seperti Amerika Serikat, juga berpotensi mempengaruhi prospek ekonomi dunia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 4,9–5,4%, yang relatif moderat dibandingkan dengan negara mitra lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih lebih tinggi dibandingkan Tiongkok (4,5%), Thailand (3,0%), dan Malaysia (4,4%), tetapi lebih rendah dari India (6,5%), Filipina (6,1%), dan Vietnam (6,1%). Pertumbuhan ini akan didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang didukung oleh kebijakan pemerintah baru yang berfokus pada perbaikan daya beli masyarakat.

have been achieved, and obstacles faced. In addition, the Board of Commissioners also provides views, directions, and recommendations to the Board of Directors regarding various strategic aspects.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held joint meetings involving the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. In addition, the Board of Commissioners also held meetings with its supporting organs, such as the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee, to discuss the results of supervision carried out by each committee in accordance with their roles.

Overall, throughout 2024, the Board of Commissioners has carried out its duties by holding meetings related to the evaluation of the Bank's management and performance. Throughout the year, the Board of Commissioners held 10 (ten) meetings, consisting of 6 (six) Board of Commissioners Meetings and 4 (four) Joint Meetings with the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. The Board of Commissioners also held 12 (twelve) Audit Committee Meetings, 12 (twelve) Risk Monitoring Committee Meetings and 7 (seven) Remuneration and Nomination Committee Meetings.

In addition to encouraging the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, the Board of Commissioners has also carried out its supervisory function on the Bank's management policies and provided advice and recommendations to the Board of Directors to ensure that the Bank's business and operations run optimally.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS OR RESPONSES ON BUSINESS PROSPECTS AND FUTURE CHALLENGES

In 2025, geopolitical dynamics and the slowdown in China's economic growth are expected to continue to be factors influencing global economic conditions. In addition, changes in leadership in countries with large economies, such as the United States, also have the potential to affect world economic prospects. The IMF estimates that global economic growth in 2025 will experience a slight increase compared to the previous year.

Meanwhile, Indonesia's economic growth is projected to be in the range of 4.9–5.4%, which is relatively moderate compared to other partner countries. Indonesia's economic growth is expected to still be higher than China (4.5%), Thailand (3.0%), and Malaysia (4.4%), but lower than India (6.5%), the Philippines (6.1%), and Vietnam (6.1%). This growth will be driven by increased consumption and investment, supported by new government policies that focus on improving people's purchasing power.

Melihat kondisi makroekonomi yang ada, Dewan Komisaris menilai bahwa kebijakan Bank yang dirancang oleh Direksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tetap berada di jalur yang tepat dan memiliki prospek yang menjanjikan, sejalan dengan visi dan tujuan Bank. Direksi telah dengan cermat mempertimbangkan asumsi dasar serta proyeksi ekonomi ke depan, didukung oleh penerapan strategi kebijakan yang positif.

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan modal inti minimum. Dari perspektif manajemen risiko, Bank berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan risiko secara menyeluruh dan konsisten dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Bank juga akan terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan manajemen risiko guna memastikan efektivitasnya dalam mengelola risiko sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan.

Dengan mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki, kami yakin bahwa Bank akan terus mengalami pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang dimana Bank akan melanjutkan ekspansi bisnis dengan terus melengkapi produk dan layanan *offline* yang dimiliki oleh Bank atau melalui jaringan yang dimiliki oleh mitra strategis Bank. Pengembangan bisnis bank akan terus berfokus pada kerja sama kemitraan dimana Bank akan senantiasa menggali potensi bisnis dengan mitra strategis yang telah ada dan terus berupaya menjalin kerja sama dengan mitra baru.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai Direksi memiliki komitmen optimal dalam memenuhi tujuan dan penerapan GCG sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan-peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai bahwa Bank Aladin Syariah senantiasa fokus pada penerapan praktik tata kelola perusahaan sesuai rencana yang telah disusun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan regulator yang berkepentingan pada pasar modal serta perkembangan dunia usaha Indonesia, telah berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip dan praktik GCG sebagai sebuah nilai yang wajib diemban oleh setiap entitas usaha yang berusaha di Indonesia. Bank Aladin Syariah menyambut dengan baik hal tersebut, terutama karena penerapan GCG melalui 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, terbukti memberikan hasil positif bagi keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi.

Dilihat dari *governance structure*, terdapat kemajuan penerapan GCG Bank Aladin Syariah sepanjang tahun 2024, yaitu secara umum struktur organisasi Bank Aladin Syariah telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank Aladin Syariah dan secara reguler telah direviu dan dievaluasi

Given the existing macroeconomic conditions, the Board of Commissioners assesses that the Bank's policies designed by the Board of Directors in the Bank Business Plan (RBB) remain on the right track and have promising prospects, in line with the Bank's vision and objectives. The Board of Directors has carefully considered the basic assumptions and future economic projections, supported by the implementation of positive policy strategies.

In carrying out its operations, the Bank always complies with applicable regulations, including ensuring compliance with the minimum core capital requirements. From a risk management perspective, the Bank is committed to implementing comprehensive and consistent risk management by prioritizing the principle of prudence. The Bank will also continue to conduct ongoing evaluations of the implementation of risk management to ensure its effectiveness in managing risks in accordance with the business activities carried out.

By optimizing the Bank's competitive advantages, we are confident that the Bank will continue to experience better growth in the future where the Bank will continue to expand its business by continuing to complement its offline products and services or through networks owned by the Bank's strategic partners. The Bank's business development will continue to focus on partnership cooperation where the Bank will always explore business potential with existing strategic partners and continue to strive to establish cooperation with new partners.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF BANK GOVERNANCE

The Board of Commissioners assesses that in 2024 the Board of Directors had an optimal commitment to fulfilling the objectives and implementation of GCG as mandated in the Company's Articles of Association and applicable regulations. The Board of Commissioners assesses that Bank Aladin Syariah always focused on implementing corporate governance practices according to the plan prepared. The Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and regulators concerned wih the capital market and the development of the Indonesian business world, have committed to encouraging the implementation of GCG principles and practices as a value that must be carried out by every business entity operating in Indonesia. Bank Aladin Syariah welcomes this, especially because the implementation of GCG through 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, has proven to provide positive results for the sustainability of the business world and investment climate.

Observing the governance structure, there has been progress in GCG implementation of Bank Aladin Syariah throughout 2024, namely in general the organizational structure of Bank Aladin Syariah has been aligned with the business focus of Bank Aladin Syariah and has been

sesuai dengan kebutuhan Bank Aladin Syariah. Selain itu, dilihat dari *governance process*, Bank Aladin Syariah selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank Aladin Syariah sesuai dengan *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian. Dengan struktur dan proses yang telah dilakukan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan serta disempurnakan, diharapkan *outcome* yang dicapai oleh Bank Aladin Syariah dapat membantu Bank Aladin Syariah untuk terus berkembang.

Secara khusus, perkembangan/kemajuan yang dilaksanakan Bank Aladin Syariah sepanjang tahun 2024 dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bank telah meluncurkan meluncurkan layanan *Banking as a Service* (BaaS) sebagai terobosan baru guna mendukung layanan perbankan bersama mitra salah satunya Alfamart melalui aplikasi Alfagift serta layanan keuangan digital Super Flip by Aladin;
2. Bank telah berhasil meluncurkan QRIS CPM dan CIB yang terus diperbarui untuk memungkinkan layanan perbankan yang lebih luas kepada pengguna Korporat & Ritel;
3. Bank Aladin Syariah terus meningkatkan penyaluran pembiayaan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp4,7 triliun;
4. Bank Aladin Syariah terus mematuhi modal inti minimum sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris memandang, bahwa seluruh perangkat GCG Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penilaian pada *governance structure, process*, dan *outcome* dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris selalu meng-*update* dengan baik mengenai kondisi Bank Aladin Syariah sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif.

Tahun 2024 adalah tahun yang penting bagi Bank Aladin Syariah mengingat di tahun ini Bank berhasil melanjutkan optimalisasi fungsi intermediari dengan terus mendorong pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran dana dan berkolaborasi dengan mitra-mitranya. Tanpa pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pencapaian tersebut tidak akan mungkin tercapai. Oleh karenanya, ke depannya *Good Corporate Governance* perlu semakin memadai agar sesuai dengan misi Bank Aladin Syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Lebih dari itu, kami tetap mengamanatkan kepada Direksi untuk memperhatikan komponen kunci penerapan Governansi yang mendapat perhatian utama dari Dewan Komisaris di antaranya meliputi manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

regularly reviewed and evaluated according to the needs of Bank Aladin Syariah. In addition, observing the governance process, Bank Aladin Syariah always strives to ensure that business activities and operational processes in Bank Aladin Syariah are carried out in accordance with Good Corporate Governance and the principle of prudence. With the structure and process that have been carried out and continue to be improved and enhanced, it is hoped that the outcome achieved by Bank Aladin Syariah can help Bank Aladin Syariah to continuously grow.

Specifically, the development/progress implemented by Bank Aladin Syariah throughout 2024 can be seen in the following matters:

1. The Bank has launched the Banking as a Service (BaaS) service as a new breakthrough to support banking services with partners, one of which is Alfamart through the Alfagift application and Super Flip digital financial service by Aladin;
2. The Bank has successfully launched QRIS CPM and CIB which are continuously updated to enable broader banking services to Corporate & Retail users;
3. Bank Aladin Syariah continued to increase financing disbursement in 2024 to reach Rp4.7 trillion;
4. Bank Aladin Syariah continued to comply with the minimum core capital as required by applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners views that all the Bank's GCG tools have implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the assessment of governance structure, process, and outcome by paying attention to the principles of Good Corporate Governance. Throughout 2024, the Board of Commissioners always properly updated the condition of Bank Aladin Syariah so that the Board of Commissioners can carry out an effective supervisory function.

2024 is an important year for Bank Aladin Syariah considering that this year the Bank has succeeded in continuing to optimize the intermediary function by continuing to encourage the growth of fund collection and disbursement and collaborating with its partners. Without the implementation of Good Corporate Governance, this achievement would not have been possible. Therefore, in the future, Good Corporate Governance needs to be more adequate in order to be in conformity with Bank Aladin Syariah's mission to strengthen the sharia financial ecosystem that is beneficial for all levels of society. Moreover, we continue to mandate the Board of Directors to pay attention to the key components of Governance implementation that receive primary attention from the Board of Commissioners, including risk management, internal control system, and whistleblowing system.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAM INTERNAL

Pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan peran dan tanggung jawab dari semua lini yang dimiliki, termasuk didalamnya peran Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris menempatkan sistem pengendalian internal sebagai komponen pengawasan yang utama dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali sehingga dapat mencapai visi dan misi Bank serta dapat meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif, Bank telah memiliki Kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank mengacu kepada 5 (lima) komponen dasar pelaksanaan yang sejalan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017. Selain itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank telah mencakup kepada kecukupan pengendalian keuangan dan operasional, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta penerapan sistem/aplikasi.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank pada tahun 2024 telah lebih baik, hal ini tercermin dari kecukupan kerangka kerja sistem pengendalian internal untuk mendukung aktivitas Bank dalam bentuk ketentuan internal dan adanya penguatan fungsi pada lini pertahanan yaitu fungsi lini kedua pada Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan lini ketiga pada Satuan Kerja Internal Audit serta penerapan sistem/aplikasi.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ekonomi, pandemi COVID-19, serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank Aladin Syariah, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing Bank. Dewan Komisaris memandang bahwa pengelolaan manajemen risiko di Bank Aladin Syariah telah dilakukan secara terintegrasi dengan strategi bisnis Bank. Penerapan manajemen risiko bersifat proaktif dan *forward looking* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi Pemegang Saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of the internal control system is the role and responsibility of all lines in the Company, including the role of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners places the internal control system as the main supervisory component in the management of the Bank and becomes a reference for healthy and controlled Bank operational activities so that it can achieve the Bank's vision and mission and can increase value for stakeholders, minimize the risk of loss and maintain compliance with applicable laws and regulations.

To ensure the implementation of an effective internal control system, the Bank has a Bank internal control system framework referring to 5 (five) basic components of implementation in line with the Internal Control System Guidelines for Commercial Banks as stipulated by the Financial Services Authority (OJK) through the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017. In addition, the internal control system implemented by the Bank has covered the adequacy of financial and operational controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, compliance with applicable laws and regulations and the implementation of systems/applications.

The implementation of the Bank's internal control system in 2024 has been better. This is reflected in the adequacy of the internal control system framework to support the Bank's activities in the form of internal provisions and the strengthening of functions in the line of defense, namely the second line function in the Risk Management Work Unit, Compliance Work Unit and the third line in Internal Audit Unit and the implementation of systems/applications.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

In order to anticipate economic challenges, the COVID-19 pandemic, and the increasing risk exposure faced by Bank Aladin Syariah, an effective and integrated risk and capital management system is needed, which is able to support the achievement and growth of performance sustainably while increasing the Bank's competitiveness. The Board of Commissioners views that risk management at Bank Aladin Syariah has been carried out in an integrated manner with the Bank's business strategy. The implementation of risk management is proactive and forward-looking with the aim of maximizing added value for Shareholders, managing capital comprehensively, and ensuring profitability and sustainable business growth.

Kemudian, keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan strategi risiko dan *risk appetite* juga dibutuhkan serta menjadi elemen penting dalam penerapan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko dan *risk appetite* tersebut diterjemahkan ke dalam tata kelola, proses, kebijakan serta perangkat dan metodologi yang didukung oleh teknologi informasi, sumber daya manusia dan budaya risiko yang kuat. Dewan Komisaris memandang bahwa Bank Aladin Syariah telah mengimplementasikan kebijakan umum manajemen risiko sebagai kebijakan yang menjadi acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank.

Furthermore, alignment between business strategy and objectives with risk strategy and risk appetite is also needed and is an important element in the implementation of risk management. The risk management strategy and risk appetite are translated into governance, processes, policies and tools and methodologies supported by information technology, human capital, and a strong risk culture. The Board of Commissioners views that Bank Aladin Syariah has implemented a general risk management policy as a policy that is a basic reference becoming strategic and comprehensive in the implementation of the Bank's Risk Management.

Di mana sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank Aladin Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan terhadap masing-masing profil risiko. Dewan Komisaris senantiasa mendorong agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, dengan didasarkan pada tata kelola risiko yang telah ditetapkan. Di mana dalam menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif, Bank Aladin Syariah telah menyesuaikan sistem manajemen risiko dengan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

As a guideline in the implementation of Risk Management, Bank Aladin Syariah has in place policies and procedures as a basis for managing each risk profile. The Board of Commissioners always encourages effective implementation of risk management based on the established risk governance. In implementing the risk management system effectively, Bank Aladin Syariah has adjusted the risk management system with POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and POJK No. 08 / POJK.03 / 2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Dewan Komisaris juga senantiasa mengedepankan upaya untuk memitigasi risiko melalui pengawasan aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Audit. Dengan dukungan dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan inisiatif manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi dalam upayanya memitigasi faktor risiko utama Bank dan mencegah terjadinya risiko serta memastikan keberlangsungan bisnis Bank dalam jangka panjang.

The Board of Commissioners also always prioritizes efforts to mitigate risks through active supervision of the risk management implementation. The Board of Commissioners' supervisory function is carried out through the Board of Directors and Commissioners Meeting (Radirkom) forum, as well as in the Risk Monitoring Committee meeting, and the Audit Committee. With the support of the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners continues to monitor the implementation of risk management initiatives carried out by the Board of Directors in its efforts to mitigate the Bank's main risk factors and prevent risks from occurring and ensure the Bank's long-term business continuity.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank di tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Bank Aladin Syariah telah memiliki kecukupan kebijakan, toleransi risiko dan limit risiko yang secara berkala dikaji dengan mendapat persetujuan Direksi. Bank Aladin Syariah juga telah memiliki kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko.

The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of the Bank's risk management in 2024 has gone well. In the view of the Board of Commissioners, Bank Aladin Syariah has adequate policies, risk tolerances and risk limits that are periodically reviewed with the approval of the Board of Directors. Bank Aladin Syariah also has adequate processes for continuous identification, measurement, monitoring and control of risks against all material risk factors supported by a risk management information system.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS TERSEBUT

Keberadaan *Whistleblowing System* (WBS) merupakan bagian dari komitmen Bank Aladin Syariah untuk menjadikan prinsip GCG sebagai landasan dari setiap aspek operasi dan bisnis Bank sehari-hari. WBS memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor. Penerapan WBS bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran dalam setiap aspek kegiatan bisnis Bank. Dalam pandangan Dewan Komisaris, WBS dapat menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di lingkungan Bank. Dewan Komisaris memandang bahwa Bank Aladin Syariah senantiasa mendorong partisipasi aktif seluruh Insan Bank untuk melaporkan setiap pelanggaran atau indikasi *fraud* di lingkungan Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, tujuan WBS untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas menjadi lebih efektif dan independen.

Peran Dewan Komisaris dalam pengelolaan WBS Bank Aladin Syariah antara lain untuk melakukan pengawasan guna memastikan terselenggaranya WBS dengan dibantu oleh Gugus Tugas Tim Investigasi Bank dan Komite Sanksi. Gugus Tugas Tim Investigasi Bank senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang diterima dan melaporkan ke Komite Sanksi.

Berdasarkan laporan yang diterima Dewan Komisaris, di sepanjang tahun 2024, terdapat 1 (satu) karyawan atau Manajemen Bank yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System*. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan WBS di lingkup Bank Aladin Syariah telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi agar sosialisasi penerapan WBS terus menerus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian segenap Insan Bank dalam melaporkan tindak pelanggaran, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

PENCAPAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DALAM FUNGSI PENGAWASAN PADA PENERAPAN TATA KELOLA BANK DI LINGKUP BANK ALADIN SYARIAH

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta regulator lain yang berwenang dalam sektor perbankan, pasar modal, dan dunia usaha di Indonesia telah berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip dan praktik Good Corporate Governance (GCG). Prinsip ini dianggap sebagai nilai fundamental yang harus dipegang oleh setiap entitas usaha di Indonesia. Bank Aladin Syariah menyambut baik inisiatif ini, terutama karena

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) AND THE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN THE WBS

The existence of the Whistleblowing System (WBS) is part of Bank Aladin Syariah's commitment to making GCG principles the foundation of every aspect of the Bank's daily operations and business. WBS enables a reporting mechanism that guarantees the confidentiality of the reporter. The implementation of WBS aims to detect early and prevent deviations or violations in every aspect of the Bank's business activities. In the view of the Board of Commissioners, WBS can create an open, sincere, honest and responsible work climate in the Bank's environment. The Board of Commissioners views that Bank Aladin Syariah always encourages the active participation of all Bank Personnel to report any violations or indications of fraud in the Bank Aladin Syariah environment. Thus, the objective of WBS to create a clean and integrity-based work environment becomes more effective and independent.

The role of the Board of Commissioners in the management of Bank Aladin Syariah WBS includes conducting supervision to ensure the implementation of WBS assisted by the Bank Investigation Team Task Force and the Sanction Committee. The Bank Investigation Team Task Force always evaluates and follows up on reports received and reports to the Sanction Committee.

Based on the report received by the Board of Commissioners, throughout 2024, there was 1 (one) employee or Bank Management reported through the Whistleblowing System. The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of WBS within Bank Aladin Syariah has been running well. The Board of Commissioners provides directive to the Board of Directors to continue conducting dissemination of WBS implementation to increase the understanding and concern of all Bank Personnel in reporting violations, so that a clean and integrated work environment can be created.

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN THE SUPERVISORY FUNCTION ON THE IMPLEMENTATION OF BANK GOVERNANCE IN BANK ALADIN SYARIAH

Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and other authorized regulators in the banking sector, capital markets, and the business world in Indonesia have committed to encouraging the implementation of the principles and practices of Good Corporate Governance (GCG). This principle is considered a fundamental value that must be upheld by every business entity in Indonesia. Bank Aladin Syariah welcomes this initiative, especially because

penerapan GCG yang berlandaskan lima prinsip utama—transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran—terbukti memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis dan iklim investasi.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi GCG di lingkungan Bank terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini juga selaras dengan transformasi bisnis yang dilakukan Bank pada tahun 2024. Penyusunan dan pengkinian kebijakan, serta evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap implementasi GCG, mencerminkan komitmen Direksi untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh aspek operasional dan bisnis Bank.

Keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang efektif antara organ pendukung Dewan Komisaris dan organ pendukung Direksi. Dengan adanya organ-organ pendukung ini, setiap aspek penerapan GCG—termasuk kepatuhan, manajemen risiko, audit, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi—dapat terlaksana dengan baik. Semua elemen ini menjadi landasan penting dalam memastikan akuntabilitas Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG di lingkup Bank telah berjalan dengan baik. Untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan GCG, Bank Aladin Syariah secara berkala melaksanakan self assessment atas praktik GCG, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hasil self assessment GCG Bank yang dilaksanakan pada tahun 2024 secara semesteran, self assessment implementasi GCG Bank semester I dan semester II di tahun 2024 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat secara Individual adalah 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya yang telah bekerja secara optimal dalam menerapkan GCG dalam melakukan pengelolaan Bank selama tahun 2024. Dewan Komisaris menilai, perangkat GCG yang dimiliki Bank Aladin Syariah saat ini telah sesuai dengan proses bisnis Bank. Dewan Komisaris juga senantiasa terlibat dalam berbagai implementasi GCG, dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui pengawasan yang dilakukan oleh organ Komite Dewan Komisaris. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris bersama Komite, Dewan Komisaris sangat mengapresiasi atas upaya

the implementation of GCG based on five main principles—transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—has proven to have a positive impact on business sustainability and the investment climate.

As the party responsible for supervising the implementation of GCG by the Board of Directors, the Board of Commissioners assesses that the implementation of GCG within the Bank continues to improve over time. This development is also in line with the business transformation carried out by the Bank in 2024. The preparation and updating of policies, as well as continuous evaluation and monitoring of GCG implementation, reflect the Board of Directors' commitment to implementing these principles in all aspects of the Bank's operations and business.

The success of GCG implementation is highly dependent on effective synergy and collaboration between the supporting organs of the Board of Commissioners and the supporting organs of the Board of Directors. With these supporting organs, every aspect of GCG implementation — including compliance, risk management, audit, and development of human capital and information technology — can be carried out properly. All these elements are an important foundation in ensuring the Bank's accountability.

In addition, the Board of Commissioners believes that the implementation of GCG within the Bank has been running well. To evaluate the effectiveness of GCG implementation, Bank Aladin Syariah periodically carries out self-assessment of GCG practices, which refers to Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. and Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Based on the results of the Bank's GCG self-assessment carried out in 2024 on a semester basis, the Bank's GCG implementation self-assessment for semester I and semester II in 2024 has been carried out comprehensively with an individual rating of 2 (two) with a rating definition that reflects that the Bank's Management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the implementation of Good Corporate Governance principles.

The Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors and all its staff who have worked optimally in implementing GCG in managing the Bank during 2024. The Board of Commissioners assesses that the GCG tools currently owned by Bank Aladin Syariah are in accordance with the Bank's business processes. The Board of Commissioners is also always involved in various implementations of GCG, by conducting supervision both directly and through supervision carried out by the Board of Commissioners' Committees. Based on the supervision carried out by the Board of Commissioners together with the Committees, the Board of Commissioners greatly appreciates Bank Aladin Syariah's efforts in implementing

Bank Aladin Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal. Hal tersebut sebagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh Bank Aladin Syariah untuk terus berupaya menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional pada seluruh aktivitas kegiatan usaha Bank.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya pengurusan Bank didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Komite masing-masing Komite yang telah disusun. Di setiap awal tahun, komite-komite di bawah Dewan Komisaris menyusun program rencana kerja masing-masing yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, melalui pemantauan, penelaahan/review serta pemberian saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas komite-komite yang bersangkutan. Penilaian kinerja terhadap Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah dilakukan sebagai berikut:

- **Komite Audit**
  Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait laporan maupun berbagai hal lain yang disampaikan oleh Direksi. Selain itu, Komite Audit juga mengidentifikasi isu-isu yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, khususnya dalam aspek Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, dan Kepatuhan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit telah menelaah informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Bank kepada masyarakat atau pihak berwenang. Selain itu, Komite Audit juga meninjau kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan operasional Bank serta mengevaluasi efektivitas audit atau layanan yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas KAP. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan 12 (dua belas) rapat, termasuk penyusunan risalah rapat.

- **Komite Nominasi dan Remunerasi**
  Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa proses pencalonan untuk posisi strategis dalam manajemen dan penetapan remunerasi dilakukan secara objektif, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK. Dalam menjalankan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi kebijakan nominasi dan remunerasi di seluruh tingkatan organisasi, mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai, sesuai dengan

GCG principles optimally. This is in accordance with the commitment shown by Bank Aladin Syariah to continuously strive to make GCG principles the operational basis for all business activities of the Bank.

PERFORMANCE ASSESSMENTS OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners in supervising the management of the Bank is supported by the Audit Committee, the Nomination & Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee. The implementation of the duties of the Committees under the Board of Commissioners is guided by the Committee Charter of each Committee that has been prepared. At the beginning of each year, the committees under the Board of Commissioners prepare their respective work plan programs which are used as a reference in carrying out their duties in assisting the implementation of the duties of the Board of Commissioners, through monitoring, reviewing and providing advice or recommendations to the Board of Commissioners on matters related to the functions and duties of the committees. The performance assessments of the Committees under the Board of Commissioners have been carried out as follows:

- **Audit Committee**
  The Audit Committee has the duty and responsibility to provide input to the Board of Commissioners regarding reports and various other matters submitted by the Board of Directors. In addition, the Audit Committee also identifies issues that require the attention of the Board of Commissioners, especially in the aspects of Financial Statements, Internal Control, and Compliance. In carrying out its functions, the Audit Committee has reviewed financial information that will be published by the Bank to the public or authorities. In addition, the Audit Committee also reviews compliance with regulations related to the Bank's operations and evaluates the effectiveness of audits or services provided by the Public Accountant Firm (KAP), including reviewing the independence and objectivity of the KAP. Throughout 2024, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings, including the preparation of minutes of meetings.

- **Nomination and Remuneration Committee**
  The Nomination and Remuneration Committee was formed to support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and ensuring that the nomination process for strategic positions in management and determination of remuneration is carried out objectively, effectively, and efficiently in accordance with the provisions of the OJK Regulation. In carrying out its role, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities in overseeing nomination and remuneration policies at all levels of the organization, including the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees, in accordance with applicable regulations.

peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, Komite ini telah mengadakan 7 (tujuh) kali rapat, termasuk menyusun risalah rapat.

- **Komite Pemantau Risiko**
  Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi guna memastikan bahwa manajemen risiko Bank diterapkan secara memadai. Komite ini berperan dalam memastikan bahwa prosedur dan metodologi pengelolaan risiko telah memenuhi standar kecukupan, sehingga operasional Bank tetap terkendali dalam batas yang dapat diterima serta tetap menguntungkan. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, termasuk penyusunan risalah rapat.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas kinerja dan pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh komite. Dukungan dari komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk dapat memberikan masukan secara formal kepada Direksi untuk terus meningkatkan pengelolaan dan Tata Kelola yang Baik bagi Bank.

PENJELASAN TERKAIT PERUBAHAN KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris di Bank Aladin Syariah. Susunan Direksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, this Committee held 7 (seven) meetings, including preparing minutes of meetings.

- **Risk Monitoring Committee**
  The Risk Monitoring Committee was formed to support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors to ensure that the Bank's risk management is implemented adequately. This committee plays a role in ensuring that risk management procedures and methodologies have met adequacy standards, so that the Bank's operations remain controlled within acceptable limits and remain profitable. Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings, including the preparation of minutes of meetings.

Throughout 2024, the Board of Commissioners assessed that these committees had carried out their functions, duties, and responsibilities well. The Board of Commissioners expresses its appreciation for the performance and implementation of duties demonstrated by all committees. Support from the committees is the basis for the Board of Commissioners to be able to provide formal input to the Board of Directors to continue improving management and Good Governance for the Bank.

EXPLANATION REGARDING CHANGES IN THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2024, there were no changes in the composition of the Board of Directors of Bank Aladin Syariah. The composition of the Board of Directors as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 8 Juli 2022, dibuat di hadapan Yulia,S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. The Annual General Meeting of Shareholders on June 23, 2022, was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 41 dated July 8, 2022, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta, and was reappointed at the Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2024, and was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.
Ationo Teguh Basuki	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 November 2020 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Yulia,S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. The Resolutions of the Company's Shareholders dated November 19, 2020, were notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 46 dated November 20, 2020, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta, and were reappointed at the Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2023, and were notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

Fransisca Ekawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 10 Juli 2012, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. The Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2012, was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 27 dated July 10, 2012, drawn up before Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, and was reappointed at the Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2023, and was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

APRESIASI DAN PENUTUP

Dewan Komisaris optimis bahwa Bank Aladin Syariah akan terus meningkatkan standar kinerjanya melalui inovasi berkelanjutan dan kolaborasi yang lebih erat, serta secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Keberhasilan yang dicapai sepanjang tahun 2024 semakin memperkuat bisnis Bank dalam memberikan layanan yang berkelanjutan bagi nasabah yang berharga.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam memajukan Bank Aladin Syariah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para nasabah setia dan mitra Bank atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Selain itu, Dewan Komisaris turut mengucapkan selamat kepada Direksi atas pencapaian kinerja Bank yang terus membaik.

APPRECIATION AND CLOSING

The Board of Commissioners is optimistic that Bank Aladin Syariah will continue to improve its performance standards through continuous innovation and closer collaboration, as well as by consistently implementing the principles of good corporate governance. The success achieved throughout 2024 further strengthens the Bank's business in providing sustainable services to valued customers.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our highest appreciation to the Board of Directors and all employees for their dedication and hard work in advancing Bank Aladin Syariah. We also express our gratitude to the Bank's loyal customers and partners for their trust and support. In addition, the Board of Commissioners also congratulates the Board of Directors on the Bank's continuously improving performance.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29 , 2025

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners



Rudy Hamdani
Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner (Independent)

Laporan Direksi
Board of Directors' Report



Koko Tjatur Rachmadi

Presiden Direktur
President Director

Bank Aladin Syariah berhasil membukukan kinerja yang baik di sepanjang tahun 2024. Bank Aladin Syariah berhasil meningkatkan total aset sebesar 32% dari Rp7,1 triliun di tahun 2023 menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2024.

Bank Aladin Syariah managed to record good performance throughout 2024. Bank Aladin Syariah managed to increase total assets by 32% from Rp7.1 trillion in 2023 to Rp9.4 trillion in 2024.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga PT Bank Aladin Syariah Tbk. ("Bank Aladin Syariah") berhasil melalui tahun 2024 yang berkembang dinamis dengan pertumbuhan dan kinerja yang cemerlang. Pencapaian kinerja tersebut telah sejalan dengan visi Bank Aladin Syariah untuk Menjadi Bank Syariah Digital terdepan yang andal, praktis, mudah diakses oleh seluruh kalangan, serta terpercaya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan nasabah di era digital ini.

First and foremost, allow us to express our praise and gratitude to Allah SWT for abundant blessing enabling PT Bank Aladin Syariah Tbk. ("Bank Aladin Syariah") to navigate through the dynamically evolving year of 2024 with remarkable growth and performance. These achievements align with Bank Aladin Syariah's vision to become a leading Digital Sharia Bank which is reliable, practical, easily accessible to all groups, and trustworthy, making it an inseparable part of customers' lives in this digital era.

Sepanjang tahun 2024, tantangan besar dalam perekonomian global dan nasional memberikan dampak langsung pada sektor perbankan. Ketegangan geopolitik yang terus berlanjut menjadi isu utama yang mengganggu stabilitas rantai ekonomi dunia. Selain itu, kebijakan keuangan Amerika Serikat yang cenderung defensif telah memicu capital flight di pasar modal dan pasar keuangan di berbagai negara. Perlambatan ekonomi di Tiongkok juga turut menambah tantangan bagi perekonomian global, yang pada akhirnya berdampak pada sektor perbankan nasional.

Throughout 2024, major challenges in the global and national economy had a direct impact on the banking sector. Ongoing geopolitical tensions became a major issue disrupting the stability of the world's economic chain. In addition, the United States' defensive financial policy triggered capital flight in capital markets and financial markets in various countries. The economic slowdown in China also added to the challenges for the global economy, which ultimately had an impact on the national banking sector.

Namun demikian, Bank Aladin Syariah berhasil mengatasi berbagai tantangan dengan mencatatkan kinerja solid yang semakin memperkuat fondasi usaha serta memantapkan posisinya sebagai Bank Syariah Masa Depan. Kami, selaku Direksi Bank Aladin Syariah, merasa terhormat untuk menyampaikan laporan pengelolaan Bank untuk tahun buku 2024, yang mencerminkan kemampuan Bank dalam menghadapi berbagai kendala serta tantangan, sekaligus mencatatkan pencapaian yang membanggakan.

Nevertheless, Bank Aladin Syariah succeeded in overcoming a range of challenges by recording solid performance that further strengthened the business foundation and established its position as a Sharia Bank of the Future. We, as the Board of Directors of Bank Aladin Syariah, are honored to submit the Bank's management report for the 2024 fiscal year, which reflects the Bank's ability to face various obstacles and challenges, while also recording proud achievements.

Di tengah kondisi yang dinamis, Bank Aladin Syariah terus berupaya menjaga kinerjanya melalui program transformasi serta strategi pertumbuhan yang selektif dan terukur. Kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2024 menunjukkan kemampuan Bank dalam memenuhi aspirasi pemegang saham, investor, serta seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, proses transformasi dapat dijalankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, menghasilkan dampak positif bagi pengelolaan perbankan dan perkembangan bisnis Bank Aladin Syariah.

Amid dynamic conditions, Bank Aladin Syariah continuously strived to maintain its performance through transformation programs and selective and measurable growth strategies. Solid financial performance throughout 2024 demonstrates the Bank's ability to meet the aspirations of shareholders, investors, and all stakeholders. In addition, the transformation process can be carried out in accordance with the targets that have been set, resulting in a positive impact on banking management and business development of Bank Aladin Syariah.

TINJAUAN KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL DAN GLOBAL

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah") tahun buku 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, Bank Aladin Syariah mempertimbangkan berbagai aspek eksternal seperti perkembangan ekonomi dan industri perbankan nasional, serta kondisi internal Bank.

REVIEW OF NATIONAL AND GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS

Praise and gratitude to Allah SWT, for all His mercy and grace. The Annual Report of PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah") for the 2024 fiscal year has been completed. In the preparation of this Annual Report, Bank Aladin Syariah has taken into account various external aspects such as economic developments and the national banking industry, as well as internal conditions within the Bank.

Konflik geopolitik yang terus berlangsung di Ukraina, ditambah dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, tetap menjadi faktor yang membayangi perekonomian global sepanjang tahun 2024. Kondisi ini tercermin dari terbatasnya pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) di tengah kuatnya data ekonomi AS, tingginya inflasi domestik, serta solidnya pasar tenaga kerja, yang mendorong penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Meskipun inflasi di AS masih berada di atas target The Fed, inflasi global secara umum terus menunjukkan tren penurunan, sehingga banyak negara mulai menurunkan suku bunga acuannya. Namun, penurunan ini tidak serta-merta berdampak pada suku bunga pinjaman dan biaya dana, karena dolar AS terus menguat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan utama dunia melambat dengan tingkat perlambatan yang bervariasi, berbeda dengan ekonomi AS yang tetap tangguh. Menjelang akhir tahun 2024, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS menciptakan potensi risiko baru bagi ekonomi global, termasuk kemungkinan meningkatnya perang dagang dan semakin menguatnya dolar AS, yang dapat mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

The ongoing geopolitical conflict in Ukraine, coupled with rising tensions in the Middle East, continued to be factors overshadowing the global economy throughout 2024. This condition was reflected in the limited cuts in the benchmark interest rate by the United States Central Bank (The Fed) amid strong US economic data, high domestic inflation, and a solid labor market, which had strengthened the US dollar against almost all world currencies. Although inflation in the US was still above the Fed's target, global inflation in general continued to show a downward trend, so that many countries began to lower their benchmark interest rates. However, this decline did not immediately have an impact on borrowing rates and cost of funds, as the US dollar continued to strengthen. As a result, economic growth in various major regions of the world slowed at varying rates, in contrast to the US economy which remained resilient. Towards the end of 2024, the re-election of Donald Trump as US President had created new potential risks for the global economy, including the possibility of an escalating trade war and a strengthening US dollar, which could affect the dynamics of world economic growth in the future.

Dalam laporan *World Economic Outlook* Januari 2025, IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 hanya mencapai 3,2% *year-on-year* (yoy), lebih rendah dibandingkan 3,3% pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 3,3% pada tahun 2025 dan 2026. Sementara itu, volume perdagangan dunia pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,4%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,7% pada 2023, sebelum kembali melambat menjadi 3,3% pada tahun 2025. Meski demikian, penguatan dolar AS dan berbagai faktor global lainnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama mengalami perbedaan. Kawasan Euro diperkirakan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara beberapa negara utama lainnya seperti Jepang, Tiongkok, India, dan Kanada mengalami perlambatan ekonomi.

In its January 2025 World Economic Outlook report, the IMF estimates that global economic growth in 2024 will only reach 3.2% year-on-year (yoy), lower than 3.3% in 2023, before increasing slightly to 3.3% in 2025 and 2026. Meanwhile, the world trade volume in 2024 is projected to grow by 3.4%, higher than the 0.7% growth in 2023, before slowing again to 3.3% in 2025. However, the strengthening of the US dollar and various other global factors have caused economic growth in major countries to differ. The Eurozone is expected to record higher growth than the previous year, while several other major countries such as Japan, China, India, and Canada are experiencing economic slowdowns.

Di tengah ketidakpastian dan dinamika ekonomi global, perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanannya dengan mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% year-on-year (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,05% (yoy) pada tahun sebelumnya, didorong oleh ekspansi di sebagian besar sektor usaha. Sektor Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,80%, diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 8,69%, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan yang mengalami peningkatan sebesar 8,56%. Sementara itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, tumbuh sebesar 4,43%. Selain itu, tingkat inflasi nasional berhasil dikendalikan dengan baik, turun menjadi 1,57% (yoy) dari 2,61% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Amidst the uncertainty and dynamics of the global economy, the national economy continued to demonstrate its resilience by recording positive growth. In 2024, the Indonesia's economy grew by 5.03% year-on-year (yoy), slightly lower than the growth of 5.05% (yoy) in the previous year, driven by expansion in most business sectors. The Other Services sector recorded the highest growth of 9.80%, followed by the Transportation and Warehousing sector which grew by 8.69%, and the Accommodation and Food Provision sector which increased by 8.56%. Meanwhile, the manufacturing industry sector, which plays an important role in the Indonesia's economy, grew by 4.43%. In addition, the national inflation rate was successfully controlled, falling to 1.57% (yoy) from 2.61% (yoy) in the previous year.

Menanggapi penurunan suku bunga acuan The Fed, yang memangkas *Fed Funds Rate* (FFR) dari 5,50% menjadi 4,50% pada akhir 2024, serta langkah *European Central Bank* (ECB) yang menurunkan suku bunganya menjadi 3,15%, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 6,00% pada akhir 2024. Selanjutnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2025, BI menurunkan BI7DRRR ke level 5,75%. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kombinasi kebijakan makroprudensial dan fleksibilitas kebijakan moneter turut berkontribusi pada surplus neraca perdagangan Indonesia yang mencapai USD31,04 miliar, berdampak pada peningkatan cadangan devisa hingga USD155,7 miliar pada akhir 2024. Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan impor selama 6,7 bulan atau 6,5 bulan jika termasuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2024 meliputi rendahnya pertumbuhan belanja konsumsi rumah tangga (di bawah 5%) yang belum pulih seperti sebelum pandemi. Hal ini diduga terkait dengan stagnasi daya beli kelompok masyarakat tertentu, yang tercermin dari rendahnya inflasi inti. Selain itu, industri perbankan menghadapi tantangan dari suku bunga global yang tinggi dan berdampak pada suku bunga domestik, likuiditas yang ketat, serta volatilitas pasar yang cukup tinggi sepanjang tahun 2024

Akibat gejolak ekonomi global yang berkelanjutan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 4,6% sepanjang tahun 2024. Pada akhir Desember 2024, kurs rupiah tercatat Rp16.102 per dolar AS, turun dari Rp15.397 per dolar AS pada akhir tahun sebelumnya.

KONDISI PERBANKAN NASIONAL DAN PASAR MODAL INDONESIA

Selama tahun 2024, kinerja perbankan nasional menunjukkan tren positif dalam mendukung perekonomian, tercermin dari pembiayaan, penghimpunan dana, dan perolehan laba. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10,4% secara tahunan pada Desember 2024, didorong oleh peningkatan di beberapa segmen utama. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,62% secara tahunan, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,61% secara tahunan, dan kredit modal kerja sebesar 8,35% secara tahunan. Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit dengan kenaikan 12,10% secara tahunan. Kredit korporasi tumbuh signifikan sebesar 15,67% secara tahunan, sementara kredit UMKM tumbuh lebih moderat sebesar 3,37% secara tahunan.

Peningkatan kredit ini diimbangi dengan perbaikan kualitas kredit, yang ditunjukkan oleh penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross menjadi 2,08% pada

In response to the Fed's benchmark interest rate cut, which cut the Fed Funds Rate (FFR) from 5.50% to 4.50% by the end of 2024, as well as the European Central Bank's (ECB) move to lower its interest rate to 3.15%, Bank Indonesia (BI) maintained its benchmark interest rate (BI-Rate) at 6.00% by the end of 2024. Furthermore, in the January 2025 Board of Governors Meeting (RDG), BI lowered the BI7DRRR to 5.75%. This policy was taken to maintain exchange rate stability while maintaining the momentum of national economic growth amidst global economic uncertainty. The combination of macroprudential policies and monetary policy flexibility contributed to Indonesia's trade balance surplus reaching USD31.04 billion, resulting in an increase in foreign exchange reserves of up to USD155.7 billion by the end of 2024. These foreign exchange reserves are equivalent to 6.7 months of import financing or 6.5 months if including the Government's foreign debt payments and are above the international adequacy standard of around 3 months of imports.

Indonesia's economic challenges in 2024 covered low growth in household consumption spending (below 5%) which had not recovered to pre-pandemic levels. This was thought to be related to the stagnation of purchasing power of certain groups of people, as reflected in low core inflation. In addition, the banking industry faced challenges from high global interest rates and impacts on domestic interest rates, tight liquidity, and quite high market volatility throughout 2024.

As a result of the ongoing global economic turmoil, the rupiah exchange rate against the US dollar weakened by 4.6% throughout 2024. At the end of December 2024, the rupiah exchange rate was recorded at Rp16,102 per US dollar, down from Rp15,397 per US dollar at the end of the previous year.

CONDITIONS OF INDONESIA'S NATIONAL BANKING AND CAPITAL MARKET

During 2024, national banking performance showed a positive trend in supporting the economy, reflected in financing, fundraising, and profit generation. According to data from the Financial Services Authority (OJK), banking credit growth reached 10.4% annually in December 2024, driven by increases in several main segments. Investment credit recorded the highest growth of 13.62% annually, followed by consumer credit at 10.61% annually, and working capital credit at 8.35% annually. State-owned banks were the main drivers of credit growth with an increase of 12.10% annually. Corporate credit grew significantly by 15.67% annually, while MSME credit grew more moderately by 3.37% annually.

This increase in credit was balanced by improvements in credit quality, as indicated by a decrease in the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio to 2.08% in December 2024,

Desember 2024, dibandingkan dengan 2,38% pada tahun 2023. Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) tetap kuat, mencapai 26,69% pada Desember 2024, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan 27,97% pada tahun 2023.

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 4,48% secara tahunan pada Desember 2024, didorong oleh peningkatan pada giro, tabungan, dan deposito, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,34%, 6,78%, dan 3,50% secara tahunan. Likuiditas industri perbankan tetap terjaga dengan baik. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,87% dan 25,59% pada Desember 2024, jauh melampaui batas ketentuan sebesar 50% dan 10%. Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 213,23%, menunjukkan ketahanan likuiditas yang kuat.

Berbeda dengan sektor perbankan, pasar modal Indonesia mengalami penurunan seiring dengan tren negatif di pasar modal global akibat tantangan ekonomi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 2,65% pada akhir tahun 2024, menjadi 7.079,90 dari 7.272,80 pada akhir 2023. Meskipun demikian, kapitalisasi pasar mencapai Rp12.336,0 triliun pada akhir 2024, meningkat 5,36% dibandingkan posisi akhir 2023 yang sebesar Rp11.708,0 triliun.

PERKEMBANGAN BANK ALADIN SYARIAH TAHUN 2024

Secara umum, Bank Aladin Syariah berhasil membukukan kinerja yang baik di sepanjang tahun 2024. Bank Aladin Syariah berhasil meningkatkan total aset sebesar 32% dari Rp7,1 triliun di tahun 2023 menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2024. Pertumbuhan aset ini didukung oleh peningkatan volume pembiayaan, tentunya dengan kualitas aset yang terus membaik. Tercatat, penyaluran pembiayaan Bank Aladin Syariah mencapai Rp4,7 triliun, tumbuh 53% yoy.

Kinerja ekspansi pembiayaan tersebut diimbangi oleh kemampuan Bank Aladin Syariah dalam menjaga kualitas aset melalui pendekatan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dengan disiplin. Hingga akhir tahun 2024, Bank berhasil mempertahankan rasio NPF di level 0,03%.

Selain itu, di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat dan perlambatan pertumbuhan DPK di industri, Bank Aladin Syariah berhasil menghimpun DPK sebesar Rp5,4 triliun atau tumbuh 66% yoy. Di tahun 2024, Bank juga berhasil meraih *registered user* yang telah menyelesaikan *Know Your Customer* (KYC) mencapai lebih dari 3,3 juta pengguna.

Perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan oleh regulator, serta semakin tingginya persaingan di industri perbankan merupakan faktor eksternal penting dalam perkembangan bisnis Bank Aladin Syariah. Pencapaian dan perkembangan bisnis Bank juga mempertimbangkan peluang dan tantangan yang hadir

compared to 2.38% in 2023. The Capital Adequacy Ratio (CAR) remained strong, reaching 26.69% in December 2024, although slightly lower than 27.97% in 2023.

Banking Third Party Funds (TPF) grew by 4.48% annually in December 2024, driven by increases in demand deposits, savings, and time deposits, which grew by 3.34%, 6.78%, and 3.50% annually, respectively. The liquidity of the banking industry remained well maintained. The Liquid Assets/Non-Core Deposit (AL/NCD) and Liquid Assets/TPF (AL/TPF) ratios were recorded at 112.87% and 25.59% respectively in December 2024, far exceeding the regulatory limits of 50% and 10%. The Liquidity Coverage Ratio (LCR) reached 213.23%, indicating strong liquidity resilience.

Unlike the banking sector, the Indonesian capital market experienced a decline in line with the negative trend in the global capital market due to economic challenges. The Jakarta Composite Index (JCI) on the Indonesia Stock Exchange (IDX) fell 2.65% at the end of 2024, to 7,079.90 from 7,272.80 at the end of 2023. However, market capitalization reached Rp12,336.0 trillion at the end of 2024, an increase of 5.36% compared to the position at the end of 2023, which was Rp11,708.0 trillion.

BANK ALADIN SYARIAH DEVELOPMENT IN 2024

In general, Bank Aladin Syariah managed to record good performance throughout 2024. Bank Aladin Syariah managed to increase total assets by 32% from Rp7.1 trillion in 2023 to Rp9.4 trillion in 2024. This asset growth was supported by an increase in financing volume, certainly with asset quality that continued to improve. It was recorded that Bank Aladin Syariah's financing disbursement reached Rp4.7 trillion, growing 53% yoy.

The financing expansion performance was balanced by Bank Aladin Syariah's ability to maintain asset quality through a prudent principle approach that was applied with discipline. Until the end of 2024, the Bank managed to maintain the NPF ratio at 0.03%.

In addition, amidst increasingly tight liquidity conditions and slowing growth of TPF in the industry, Bank Aladin Syariah managed to collect TPF of Rp 5.4 trillion or grew 66% yoy. In 2024, the Bank also managed to achieve registered users who have completed Know Your Customer (KYC) reaching more than 3.3 million users.

National and global economic developments, changes in policies by regulators, and increasing competition in the banking industry are important external factors in the development of Bank Aladin Syariah's business. The Bank's business achievements and developments also consider the opportunities and challenges that arise from

dari adaptasi masyarakat ke teknologi dan digital, serta perkembangan literasi keuangan di Indonesia.

Di tahun 2024, Bank terus memperluas jaringan kerjasama mitra dan terus mengoptimalisasi fungsi intermediarinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran pembiayaan. Untuk mendorong penghimpunan dana, Bank terus mengedepankan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas, produk tabungan remaja, serta fitur tabungan rencana Ala Impian. Tidak hanya dari sisi produk, Bank juga terus menambah mitra-mitra strategis untuk mengembangkan bisnisnya. Sedangkan pada sisi pembiayaan, Bank telah menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah dengan segmentasi UMKM dan Komersial dan pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel.

Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS CPM di tahun 2024 untuk memudahkan metode pembayaran melalui aplikasi *mobile banking* dan *platform Corporate Internet Banking* untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 23.000 gerai Alfa grup termasuk Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan DAN+DAN di seluruh Indonesia.

Di tahun 2025, Bank akan melanjutkan pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Bank akan menambah ragam produk tabungan, memperluas layanan rekening payroll, serta meluncurkan Layanan Nasabah Prima yang ditujukan kepada nasabah ritel kelas menengah atas. Selain itu Bank akan melanjutkan integrasi platform *Banking as a Service* dengan mitra strategis Bank sebagai langkah untuk mengakuisisi nasabah segmen ritel melalui tabungan *co-branding*. Dari sisi pembiayaan, di tahun 2025 layanan Bank utamanya akan difokuskan pada penyaluran pembiayaan berbasis kerjasama dengan mitra.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank, infrastruktur teknologi pendukung akan terus dikembangkan secara berkelanjutan. Bank akan terus menjajaki potensi kerjasama dengan mitra bisnis yang telah ada serta mitra bisnis baru.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS BANK ALADIN SYARIAH

Penetapan strategi Bank Aladin Syariah mengacu pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan nasional dan meningkatkan kemakmuran negeri. Bank Aladin Syariah kemudian menetapkan Visi, yakni "Menjadi Bank Syariah Terdepan". Bank Aladin Syariah melengkapi visi tersebut dengan menetapkan Misi "Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat".

the adaptation of society to technology and digital, as well as the development of financial literacy in Indonesia.

In 2024, the Bank continued to expand its network of partner collaborations and to optimize its intermediary function by increasing Third Party Fund collection activities and financing disbursement. To encourage fund collection, the Bank continued to prioritize Time Deposit products for middle to upper segment retail customers, youth savings products, and the Ala Impian savings plan feature. Not only in terms of products, but the Bank also continued to add strategic partners to develop its business. Meanwhile, on the financing side, the Bank distributed productive financing based on profit sharing for customers with MSME and Commercial segments and motor vehicle financing for retail customers.

Bank services were also continuously enhanced through the launch of the QRIS CPM feature in 2024 to facilitate payment methods through mobile banking applications and the Corporate Internet Banking platform to facilitate transactions for corporate customers. The Bank's cash withdrawal and deposit services were also continuously expanded and are available at more than 23,000 Alfa group outlets including Alfamart, Alfamidi, Lawson, and DAN+DAN throughout Indonesia.

In 2025, the Bank will continue to develop products and services to meet customer needs. The Bank will increase the variety of savings products, expand payroll account services, and launch the Prima Customer Service aimed at upper middle-class retail customers. In addition, the Bank will continue to integrate the Banking as a Service platform with the Bank's strategic partners as a step to acquire retail segment customers through co-branding savings. In terms of financing, in 2025 the Bank's main services will be focused on distributing financing based on cooperation with partners.

To support the Bank's business growth, the supporting technology infrastructure will continue to be developed sustainably. The Bank will continue to explore potential collaborations with existing business partners as well as new business partners.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICY OF BANK ALADIN SYARIAH

The determination of Bank Aladin Syariah's strategy refers to the achievement of the Government's Medium-Term Development Plan with the aim of driving national growth and increasing the prosperity of the country. Bank Aladin Syariah then set a Vision, namely "Becoming the Leading Sharia Bank". Bank Aladin Syariah complements this vision by setting the Mission " Together, strengthen and create a beneficial sharia financial ecosystem for the society".

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Bank Aladin Syariah kemudian menetapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh, yakni:

- Penghimpunan dana dan peningkatan kualitas rekening nasabah ritel melalui diversifikasi produk pendanaan, kerjasama kemitraan, program *marketing*, serta melengkapi jenis layanan yang tersedia pada aplikasi *digital* bank untuk membuat nasabah ritel lebih aktif bertransaksi.
- Mendorong pertumbuhan dana korporasi melalui akuisisi nasabah baru dan retensi nasabah eksisting.

- Optimalisasi pendapatan dari pembiayaan dengan mendorong pertumbuhan pembiayaan yang menyasar segmen ritel melalui penyaluran berbasis kerja sama kemitraan dan pengembangan produk baru.
- Menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dengan penyaluran dana.
- Pengembangan bisnis yang berkesinambungan melalui inovasi produk dan layanan berkelanjutan.
- Pengelolaan Tingkat Kesehatan Bank, menjalankan Tata Kelola Perusahaan dengan baik dan profil risiko pada tingkat yang terukur.
- Menjaga tingkat permodalan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Guna berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank terus membangun sinergi melalui kemitraan strategis dengan mitra yang memiliki reputasi baik, jaringan luas, serta basis Nasabah yang kuat guna mendorong aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Bank membangun sinergi melalui kemitraan strategis dengan mitra yang memiliki reputasi baik, jaringan luas, serta basis Nasabah yang kuat melalui *payroll* yaitu dengan Alfa grup. Tidak hanya itu, Bank juga memperluas layanan Tarik Setor Tunai ("Tarsetun") yang telah terjalin sejak tahun 2022 ke ekosistem Alfa grup dengan tambahan pada seluruh gerai Lawson dan DAN+DAN di tahun 2024.

Kebijakan Bank mengarah pada penyediaan layanan *omnichannel* yang mengintegrasikan penyediaan layanan perbankan secara *online* dan *offline*. Bank berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan syariah terdepan dan terpercaya melalui *digital banking* serta mengedepankan kerjasama berbasis kemitraan guna memperluas jaringan bisnis Bank. Bisnis Bank didukung oleh tenaga *Relationship Manager* guna memberikan layanan yang komprehensif bagi Nasabah. Bisnis Bank mencakup penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan yang menyasar Nasabah ritel, UMKM, dan komersial.

Melalui aplikasi digital, Bank telah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan layanan fitur perbankan yang ditujukan untuk nasabah dari segmen ritel. Sementara itu, melalui jaringan *offline* dan kerja sama kemitraan yang telah dijalin, produk penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan Bank dapat dirasakan baik oleh nasabah ritel maupun non-ritel. Di tahun 2025, Bank berencana untuk

In order to realize the vision and mission, Bank Aladin Syariah then has determined the strategic measures to be taken, namely:

- Collecting funds and improving the quality of retail customer accounts through diversification of funding products, partnership cooperation, marketing programs, and completing the types of services available on the Bank's digital application to make retail customers more active in making transactions.
- Encouraging the growth of corporate funds through new customer acquisition and retention of existing customers.
- Optimizing income from financing by encouraging financing growth targeting the retail segment through disbursement based on partnership cooperation and new product development.
- Maintaining a balance between fund raising and fund disbursement.
- Continuous business development through product innovation and sustainable services.
- Managing the Bank's Soundness Level, implementing good Corporate Governance and risk profiles at a measurable level.
- Maintaining the Bank's capital level in accordance with applicable regulations.

In order to focus on sustainable growth, the Bank continues to build synergy through strategic partnerships with partners who have good reputations, extensive networks, and a strong customer base to encourage fundraising and fund disbursement activities. The Bank builds synergy through strategic partnerships with partners who have good reputations, extensive networks, and a strong customer base through payroll, namely with the Alfa group. Not only that, the Bank is also expanding the Cash Deposit and Withdrawal ("Tarik Setor Tunai" or "Tarsetun") service that has been established since 2022 to the Alfa group ecosystem with the addition of all Lawson and DAN+DAN outlets in 2024.

The Bank's policy is directed towards providing omnichannel services that integrate the provision of online and offline banking services. The Bank is committed to providing leading and trusted sharia banking services through digital banking and prioritizing partnership-based cooperation to expand the Bank's business network. The Bank's business is supported by Relationship Managers to provide comprehensive services to Customers. The Bank's business includes fundraising and financing disbursement targeting retail, MSME, and commercial customers.

Through digital applications, the Bank has offered various fundraising products and banking feature services aimed at customers from the retail segment. Meanwhile, through offline networks and partnerships that have been established, the Bank's fundraising and financing disbursement products can be enjoyed by both retail and non-retail customers. In 2025, the Bank plans to encourage

mendorong pengembangan bisnis melalui penambahan ragam produk dan layanan yang ditawarkan melalui aplikasi *digital* yang dimiliki oleh Bank maupun secara langsung *(offline)*. Bank akan berupaya untuk memastikan pertumbuhan pembiayaan dan penghimpunan dana berada di titik optimum guna menghasilkan kinerja yang maksimal untuk Bank secara keseluruhan.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Bank Aladin Syariah menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menyusun dan menerapkan strategi guna memastikan optimalnya hasil berkat keselarasannya dengan kebutuhan dan perkembangan industri serta selaras dengan kompetensi dan potensi pengembangan usaha yang ditetapkan. Perumusan strategi dan kebijakan strategis yang disusun Bank Aladin Syariah senantiasa diselaraskan dengan Visi, Misi dan rencana strategis bank. Direksi secara aktif telah mengkomunikasikan rencana kerja kepada Pemegang saham dan seluruh jajaran bank.

Penyusunan strategi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilannya mengacu pada daya saing bank, dilengkapi tahapan pelaksanaannya. Dalam menyusun target Bank dilakukan secara *bottom up*. Dimana setiap direktorat yang dimiliki Bank Aladin Syariah ditugaskan untuk menyusun target dan strategi pencapaian target baik untuk satu tahun ke depan maupun untuk jangka panjang. Rencana target dan strategi pencapaian target tersebut kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk bersama-sama dilakukan reviu.

Setelah itu diadakan pertemuan, yang bertujuan untuk memetakan tantangan dan peluang yang ada, kemudian mencanangkan target dan arah strategi ke depan, kemudian diselaraskan dengan target dan strategi yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Aladin Syariah. Setelah target tersusun, Direksi menentukan visi-misi ke depan yang relevan dengan target, strategi, dan perkembangan bisnis Bank.

Direksi bersama Dewan Komisaris juga mempertimbangkan kondisi eksternal yang harus diatasi, sehingga strategi tetap dapat dijalankan dengan hasil optimal, dan menuangkannya dalam Rencana Bisnis Bank maupun secara spesifik dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Direksi telah menyusun RBB dan RAKB secara realistis, komprehensif, dan terukur untuk dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan asumsi eksternal dan internal serta kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Bank yang berkelanjutan.

business development by adding a variety of products and services offered through digital applications owned by the Bank or directly (offline). The Bank will strive to ensure that financing growth and fundraising are at the optimum point in order to produce maximum performance for the Bank as a whole.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES

Bank Aladin Syariah upholds the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in formulating and implementing strategies to ensure optimal results, owing to their alignment with the needs and developments of the industry and in line with the competencies and potential for business development that have been set. The formulation of strategies and strategic policies formulated by Bank Aladin Syariah are always aligned with the Bank's Vision, Mission and strategic plan. The Board of Directors has actively communicated the work plan to Shareholders and all levels of the Bank.

The formulation of the strategy is carried out by considering the driving and inhibiting factors for its success referring to the Bank's competitiveness, complete with the stages of its implementation. Compilation of the Bank's targets is done in a bottom-up manner. Where each directorate of Bank Aladin Syariah is assigned to compile targets and strategies for achieving targets both for the next year and for the long term. The target plan and strategy for achieving the target are then reported to the Board of Directors for joint review.

After that, a meeting is held, which aims to map the existing challenges and opportunities, then there is a setting of targets and future strategic directions, which then will be aligned with the targets and strategies stated in the Bank Aladin Syariah Business Plan. After the targets are set, the Board of Directors will determine the future vision and mission relevant to the targets, strategies, and business development of the Bank.

The Board of Directors together with the Board of Commissioners also considers external conditions that must be addressed, so that the strategy can still be implemented with optimal results, and states them in the Bank's Business Plan or specifically in the Sustainable Financial Action Plan (RAKB). The Board of Directors has prepared the RBB and RAKB realistically, comprehensively, and measurably to be implemented and evaluated by considering the principles of prudence and responsiveness to change. This is of course by considering external and internal assumptions as well as the interests of shareholders and other stakeholders that aim to maintain and improve the Bank's sustainable performance.

Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB dan RAKB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank melalui forum dan rapat-rapat yang diadakan secara reguler. Dalam melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategi bank, diawasi oleh Dewan Komisaris dan tetap mematuhi prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Dalam rangka memastikan implementasi strategi dan kebijakan berjalan dengan baik, Direksi melakukan berbagai arahan yang diperlukan kepada seluruh jajaran agar rancangan dan rumusan strategi dapat lebih mudah diaplikasikan. Dengan arahan Dewan Komisaris serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah, Direksi memastikan implementasi strategi Bank yang telah ditetapkan di RBB dan RAKB berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan melalui forum-forum koordinasi seperti rapat rutin dan rapat komite dibawah Direksi. Direksi kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RBB maupun RAKB bersama-sama seluruh jajaran dibawahnya dan mendelegasikan kewenangan untuk mengeksekusi tiap program sesuai tugas dan wewenang yang digariskan.

Direksi memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan strategi dilaksanakan sesuai rencana. Direksi melakukan pemantauan terhadap kinerja serta pelaksanaan rencana bisnis dengan proses evaluasi, dan jika diperlukan dilakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk beradaptasi selaras dengan dinamika pasar dan industri.

Sementara, untuk memastikan implementasi dari kebijakan strategis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris tersebut, telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka target-target yang diberikan kepada Manajemen maupun setiap direktorat dituangkan ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Manajemen maupun masing-masing Direktorat. Direksi memiliki peran yang sangat stratejik dalam memastikan kebijakan strategi Bank yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan sesuai rencana. Salah satunya adalah melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala bersama dengan tiap direktorat untuk memastikan bahwa implementasi strategi yang telah dilakukan, sesuai dengan arah kebijakan Bank dan tercapainya berbagai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Direksi juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua rencana, rumusan, dan target yang tercantum dalam RBB dan RAKB dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan harapan. Kebijakan pengambilan keputusan yang bersifat *top down* dan *bottom up* dikembangkan berdasarkan proporsi dan sudut

The Board of Directors has also communicated the RBB and RAKB to the Bank's shareholders and all levels of the organization in the Bank through forums and meetings held regularly. The formulation of the Bank's strategy and strategic policies is supervised by the Board of Commissioners and continues to comply with sharia principles supervised by the Sharia Supervisory Board.

PROCESS CARRIED OUT BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE IMPLEMENTATION OF STRATEGIES

In order to ensure that the implementation of strategies and policies runs smoothly, the Board of Directors provides various necessary directions to all levels so that the design and formulation of strategies can be more easily applied. With the direction of the Board of Commissioners and by paying attention to the sharia principles of the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors ensures that the implementation of the Bank's strategies set in the RBB and RAKB runs in accordance with what has been determined through coordination forums such as routine meetings and meetings of committees under the Board of Directors. The Board of Directors then coordinates the implementation of all programs and work plans set in the RBB and RAKB together with all levels below and delegates the authority to execute each program according to the tasks and authorities outlined.

The Board of Directors has a very strategic role in ensuring that the strategy is implemented according to plan. The Board of Directors monitors the performance and implementation of the business plan through an evaluation process, and if necessary, makes adjustments to the strategies and policies that have been set to adapt in line with market and industry dynamics.

Meanwhile, to ensure that the implementation of the strategic policies that have been approved by the Board of Commissioners is in accordance with what has been set, the targets given to Management and each directorate are stated in the Key Performance Indicator (KPI) of Management and each Directorate. The Board of Directors has a very strategic role in ensuring that the Bank's strategic policies that have been set are implemented according to plan. One of them is through coordination and evaluation meetings that are held periodically together with each directorate to ensure that the implementation of the strategies that have been carried out is in accordance with the direction of the Bank's policies, and ensure the achievement of various targets that have been previously set.

The Board of Directors also has an important role in ensuring that all plans, formulations, and targets listed in the RBB and RAKB can be well understood and implemented according to expectations. Top-down and bottom-up decision-making policies are developed based on their proportions and perspectives, with the hope of producing

pandangnya, dengan harapan dapat melahirkan berbagai inovasi dari tingkat bawah, termasuk partisipasi komite dan seluruh organ pendukung Direksi.

KINERJA BANK ALADIN SYARIAH TAHUN 2024

Kinerja Keuangan

Berdasarkan seluruh strategi dan kebijakan yang telah ditempuh di sepanjang tahun 2024, Bank Aladin Syariah menunjukkan kinerja yang dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan. Dimana Bank Aladin Syariah berhasil membukukan pembiayaan lebih dari Rp4,7 triliun pada posisi akhir tahun 2024. Pembiayaan ini naik lebih dari 53% dengan posisi pembiayaan di akhir tahun 2023 sebesar Rp3,1 triliun. Secara total *disbursement*, Bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp8,8 triliun selama tahun 2024. Sedangkan dari sisi penghimpunan dana, Bank berhasil memperoleh lebih dari Rp5,4 triliun per akhir Desember 2024. Dengan pencapaian penyaluran dan penghimpunan dana, Bank dapat menjaga rasio FDR di level 87,7%.

Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank di tahun 2024, pendapatan dari penyaluran dana ke pembiayaan dan surat berharga menunjukkan pertumbuhan yang baik dari tahun sebelumnya. Dari sisi rentabilitas, meskipun masih membukukan kerugian di tahun 2023, namun hal ini masih sesuai dengan proyeksi di dalam Rencana Bisnis Bank mengingat Bank masih dalam tahap awal pertumbuhan bisnisnya. Hal ini didukung pula oleh pengendalian biaya yang efisien.

Secara umum, realisasi tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya lebih baik dikarenakan fungsi intermediari bank sudah berjalan dimana penghimpunan DPK dari nasabah ritel dan non ritel sudah dimulai dan penyaluran pembiayaan sudah berjalan dengan baik.

Kinerja Non Keuangan

Operasional

Pencapaian kinerja finansial Bank Aladin Syariah di sepanjang tahun 2023, tentunya juga didukung oleh transformasi pada aspek-aspek *human capital*, inovasi produk, dan pengembangan teknologi informasi. Sementara dari sisi operasional, Bank mencatatkan pencapaian yang cukup membanggakan dan bisa menjadi fondasi pertumbuhan kinerja ke depan. Di mana pada tahun 2024 Bank terus mengembangkan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas dan produk tabungan remaja, serta fitur tabungan rencana Ala Impian. Pada sisi pembiayaan, Bank telah menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah UMKM dan Komersial dan pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel. Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS CPM untuk kemudahan metode pembayaran melalui aplikasi *mobile banking* dan *platform Corporate Internet Banking* untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun

various innovations from the lower levels, including the participation of the committees and all supporting organs of the Board of Directors.

BANK ALADIN SYARIAH PERFORMANCE IN 2024

Financial Performance

Based on all the strategies and policies that have been taken throughout 2024, Bank Aladin Syariah has shown performance that can be a foundation for sustainable growth. Bank Aladin Syariah managed to record financing of more than Rp4.7 trillion at the end of 2024. This financing increased by more than 53% with a financing position at the end of 2023 of Rp3.1 trillion. In total disbursement, the Bank has disbursed financing of more than Rp8.8 trillion during 2024. Meanwhile, in terms of fund collection, the Bank has succeeded in obtaining more than Rp5.4 trillion as of the end of December 2024. With the achievement of fund disbursement and collection, the Bank can maintain the FDR ratio at the level of 87.7%.

In line with the Bank's business development in 2024, income from channeling of funds to financing and marketable securities showed good growth from the previous year. In terms of profitability, although still posting a loss in 2023, this is still in accordance with the projections in the Bank's Business Plan considering that the Bank is still in the early stages of its business growth. This is also supported by efficient cost control.

In general, the realization in 2024 when compared to the previous year was better because the Bank's intermediary function was already running where the collection of TPF from retail and non-retail customers had begun and the financing disbursement had been running well.

Non-Financial Performance

Operations

The achievement of Bank Aladin Syariah's financial performance throughout 2023 is certainly also supported by the transformation in aspects of human capital, product innovation, and information technology development. Meanwhile, from the operational side, the Bank has recorded quite proud achievements and can be the foundation for future performance growth. In 2024 the Bank continued to develop Time Deposit products for upper-middle segment retail customers and youth savings products, as well as the Ala Impian savings plan feature. On the financing side, the Bank has disbursed productive financing based on profit sharing for MSME and Commercial customers and motor vehicle financing for retail customers. The Bank's services also continued to be complemented by the launch of the QRIS CPM feature for easy payment methods through the mobile banking application and the Corporate Internet Banking platform to facilitate transactions for corporate customers. The Bank's cash withdrawal services continued

terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 23.000 gerai Alfa grup di seluruh Indonesia.

Sementara itu, guna meningkatkan kualitas layanan serta mendukung kegiatan bisnis, secara berkelanjutan Bank terus melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Bank juga melanjutkan pengembangan terhadap produk dan fitur aplikasi, seperti akun transaksional (Ala Dompet), *goal savings account* (Ala Impian), Ziswaf (Ala Berbagi), dan *bill payment*. Dari sisi kerja sama kemitraan, Bank pun terus memperdalam kolaborasi bersama Alfa grup dan ekosistemnya, diantaranya dengan telah diluncurkannya layanan Tarsetun di seluruh gerai lawson dan DAN+DAN di tahun 2024 sehingga saat ini layanan Tarsetun Bank telah tersedia di seluruh gerai Alfa grup di Indonesia.

Selain itu, di tahun 2024 Bank juga terus memperluas kerjasama rekening *payroll* karyawan Alfamart dan ekosistemnya serta mitra-mitra lainnya. Kerja sama Bank dengan ekosistem Alfamart juga meliputi penyediaan layanan BaaS pada aplikasi Alfagift yang tersedia sejak tahun 2023. Selain itu Bank juga melakukan layanan BaaS dengan mitra Flip dengan menyediakan produk Super Flip by Aladin. Hal ini dilakukan guna memastikan layanan Bank Aladin Syariah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian Produk

Di tahun 2024, Bank telah berhasil meraih lebih dari 3,3 juta. Nasabah bank berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan konsentrasi pengguna di daerah dengan populasi Muslim tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten.

Sepanjang tahun 2024, Bank melanjutkan pertumbuhan aktivitas intermediari Bank baik dari sisi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di tahun 2024. Bank juga melanjutkan pertumbuhan bisnis dengan melakukan optimalisasi kerjasama dengan mitra bisnis Bank. Untuk mendukung pertumbuhan penghimpunan dana, Bank meluncurkan produk Ala Deposito yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile banking* milik Bank untuk meningkatkan penghimpunan dana Deposito dari nasabah ritel. Deposito ritel hingga akhir tahun 2024 tumbuh sebesar 88,90% secara *year-on-year*.

Bank juga meluncurkan produk Giro Mudharabah untuk penghimpunan dana murah dari nasabah non ritel. Tren pertumbuhan juga terlihat dari sisi pembiayaan Bank. Bank telah menyalurkan pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang ditujukan bagi segmen non ritel. Selain itu, Bank juga melakukan kerjasama bisnis dengan Taspen untuk penyaluran pembiayaan ke segmen ritel. Pada sisi layanan, Bank meluncurkan fitur QRIS CPM pada aplikasi *mobile banking* milik Bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran.

to be expanded and are available at more than 23,000 Alfa group outlets throughout Indonesia.

Meanwhile, in order to improve the quality of services and support business activities, the Bank continued to develop information technology infrastructure. The Bank also continued to develop products and application features, such as transactional accounts (Ala Dompet), goal savings accounts (Ala Impian), Ziswaf (Ala Berbagi), and bill payments. In terms of partnership cooperation, the Bank also continued to deepen collaboration with the Alfa group and its ecosystem, including the launch of Tarsetun services at all Lawson and DAN+DAN outlets in 2024 so that currently the Bank's Tarsetun service is available at all Alfa group outlets in Indonesia.

In addition, in 2024 the Bank also continued to expand cooperation on Alfamart employee payroll accounts and its ecosystem and other partners. The Bank's collaboration with the Alfamart ecosystem also included the provision of BaaS services on the Alfagift application which has been available since 2023. In addition, the Bank also provided BaaS services with Flip partners by providing the Super Flip by Aladin product. This was done to ensure that Bank Aladin Syariah services could be reached by all levels of society.

Product Achievements

In 2024, the Bank has successfully reached more than 3.3 million. The Bank's customers come from all provinces in Indonesia with a concentration of users in areas with the highest Muslim populations in Indonesia, namely West Java, East Java, Central Java, DKI Jakarta and Banten.

Throughout 2024, the Bank continued to grow the Bank's intermediary activities both in terms of products and services to meet customer needs in 2024. The Bank also continued business growth by optimizing cooperation with the Bank's business partners. To support the growth of fund collection, the Bank launched the Ala Deposito product which is integrated with the Bank's mobile banking application to increase the collection of Time Deposit funds from retail customers. Retail time deposits until the end of 2024 grew by 88.90% year-on-year.

The Bank also launched the Giro Mudharabah product to collect low-cost funds from non-retail customers. The growth trend is also seen from the Bank's financing side. The Bank has disbursed financing with the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) contract aimed at the non-retail segment. In addition, the Bank also collaborated with Taspen to distribute financing to the retail segment. On the service side, the Bank launched the QRIS CPM feature on the Bank's mobile banking application to make it easier for customers to make payment transactions.

Human Capital

Untuk meningkatkan produktivitas pekerja, Bank senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi. Bank Aladin Syariah menyadari bahwa keberlanjutan usaha Bank, sangat ditentukan dengan pengelolaan dan pengembangan *Human Capital* (HC) yang unggul dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan lingkungan bisnis. Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang ini, Bank membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di bidangnya untuk menunjang perkembangan dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan dan pengembangan HC yang tepat dan berkesinambungan, terus dilakukan Bank Aladin Syariah dalam mengembangkan talenta yang berkualitas dan berkompeten agar tetap adaptif terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis.

Untuk itu, Bank Aladin Syariah melalui *Human Capital* terus memantapkan program strategis pengelolaan dan pengembangan SDI di tahun 2024, melalui kanal-kanal pelatihan:

1. *Mandatory Training*: Seluruh *training* atau program pelatihan yang bersifat wajib, termasuk program sertifikasi yang dibutuhkan oleh karyawan dalam pengembangan kompetensinya.
2. *Non Mandatory Training*: Seluruh training atau program pelatihan yang bersifat tidak wajib, yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu *related to job* maupun *non related to job*. Kedua tipe ini diinisiasi oleh karyawan. Hal ini mencakup tapi tidak terbatas pada *Technical Training* yang bersifat *non mandatory, Soft Skill Training* yang bersifat *non mandatory*, Pelatihan External, dan *Personal Development*.

KENDALA DAN ATAU TANTANGAN YANG DIHADAPI SERTA STRATEGI MENGHADAPINYA

Dalam empat tahun terakhir, perekonomian Indonesia berhasil menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan global, dengan pertumbuhan yang konsisten meskipun menghadapi berbagai tekanan. Pada 2022, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan ekspor komoditas, menghasilkan pertumbuhan 5,31%. Namun, tantangan mulai meningkat pada 2023, terutama dari perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga di negara maju, dan ketidakpastian geopolitik, yang mempengaruhi inflasi dan arus modal internasional.

Pertumbuhan ekonomi yang solid, didorong oleh stabilitas makro dan kebijakan moneter, membantu menjaga kesehatan sektor perbankan, tetapi tantangan eksternal terus menuntut perbankan Indonesia untuk beradaptasi lebih cepat, terutama dalam hal transformasi digital, pengelolaan likuiditas, dan penanganan volatilitas pasar global.

Human Capital

To increase employee productivity, the Bank is always committed to enhancing competence through competency development programs. Bank Aladin Syariah realizes that the sustainability of the Bank's business is largely determined by the management and development of superior and quality Human Capital (HC), in accordance with the needs and developments of the business environment. Especially in the digitalization era like today, the Bank needs reliable human capital with competence in their fields to support business development and sustainability. The management and development of appropriate and sustainable HC continues to be carried out by Bank Aladin Syariah in developing quality and competent talents so that they remain adaptive to every change in the business environment.

For this reason, Bank Aladin Syariah through Human Capital continues to strengthen strategic programs for managing and developing HR in 2024, through training channels as follows:

1. Mandatory Training: All training programs that are mandatory, including certification programs needed by employees in developing their competencies.

2. Non-Mandatory Training: All training programs that are not mandatory, which are divided into two types, namely related to job and non-related to job. Both types are initiated by employees. This includes but is not limited to non-mandatory Technical Training, non-mandatory Soft Skill Training, External Training, and Personal Development.

OBSTACLES AND/OR CHALLENGES FACED AND STRATEGIES TO DEAL WITH THEM

In the past four years, the Indonesia's economy has successfully demonstrated strong resilience amidst global challenges, with consistent growth despite facing various pressures. In 2022, the post-pandemic economic recovery, driven by domestic consumption, investment, and commodity exports, resulted in growth of 5.31%. However, challenges began to increase in 2023, especially from the global economic slowdown, rising interest rates in developed countries, and geopolitical uncertainty, which affected inflation and international capital flows.

Solid economic growth, driven by macro stability and monetary policy, helped maintain the health of the banking sector, but external challenges continue to require Indonesian banks to adapt more quickly, especially in terms of digital transformation, liquidity management, and handling global market volatility.

Bank telah mempertimbangkan peluang dan tantangan yang hadir dari adaptasi masyarakat ke teknologi dan digital, serta perkembangan literasi keuangan di Indonesia. Rencana Bisnis Bank Aladin Syariah juga telah mempertimbangkan tantangan dalam menghadapi era teknologi digital, dimana sudah mulai berkembangnya ekosistem digital khususnya yang dimotori oleh penyedia jasa keuangan non-bank berbasis teknologi (fintech), e-commerce, transportasi online, dan lain-lain. Setelah melalui penguatan pada infrastruktur Bank dalam hal pelayanan, produk, organisasi, dan juga sumber daya manusia, Bank telah melalui transformasi menjadi bank digital dan meluncurkan aplikasi mobile banking di awal tahun 2022. Bank juga telah meluncurkan layanan Banking as a Service dan bekerja sama dengan berbagai mitra strategis sebagai bagian dari rencana bisnis B2B2C. Sejak diluncurkan, bank berhasil mengakuisisi lebih dari 3,4 juta nasabah sampai dengan bulan akhir 2024. Bank juga melakukan beberapa aksi korporasi yaitu Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") pada tahun 2022.

The Bank has considered the opportunities and challenges arising from society's adaptation to technology and digital, as well as the development of financial literacy in Indonesia. Bank Aladin Syariah's Business Plan has also considered the challenges in facing the digital technology era, where the digital ecosystem has begun to develop, especially those driven by technology-based non-bank financial service providers (fintech), e-commerce, online transportation, and others. After strengthening the Bank's infrastructure in terms of services, products, organizations, and human capital, the Bank has transformed into a digital bank and launched a mobile banking application in early 2022. The Bank has also launched the Banking as a Service service and collaborated with various strategic partners as part of the B2B2C business plan. Since its launch, the Bank has successfully acquired more than 3.4 million customers until the end of 2024. The Bank has also carried out several corporate actions, namely Capital Increase through Pre-emptive Rights ("Rights Issue") and Capital Increase Without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") in 2022.

Mengacu kepada hal-hal ini, perusahaan berkeyakinan bahwa rencana strategi TI dalam menerapkan transformasi digital yang bertujuan untuk menciptakan kolaborasi ekonomi, membuka akses terhadap UMKM seluas-luasnya, serta mendukung pengembangan ekosistem jasa keuangan, telah berjalan sesuai dengan perkembangan makro ekonomi Indonesia dan akan terus berlanjut menuju pertumbuhan dan penguatan yang berkesinambungan.

Referring to these matters, the Company believes that the IT strategy plan in implementing digital transformation aimed at creating economic collaboration, opening access to MSMEs as widely as possible, and supporting the development of the financial services ecosystem, has been running in accordance with Indonesia's macroeconomic developments and will continue towards sustainable growth and strengthening.

GAMBARAN PROSPEK USAHA

Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan masih akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya risiko dan ketidakpastian. Perbaikan ekonomi di negara maju akan terpengaruh oleh disinflasi, ketegangan geopolitik yang berlanjut di Timur Tengah, serta fragmentasi dalam geo-ekonomi dan perdagangan yang perlu diperhatikan. Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, serta koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

BUSINESS PROSPECT OVERVIEW

The global economy in 2025 is expected to remain facing various challenges, including increasing risks and uncertainties. Economic recovery in developed countries will be affected by disinflation, continued geopolitical tensions in the Middle East, and fragmentation in geo-economics and trade that need to be considered. These challenges emphasize the importance of controlling inflation, fiscal consolidation, and coordination between monetary and fiscal policies to strengthen macroeconomic stability and support economic growth.

Menurut IMF dalam World Economic Outlook yang dirilis pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 diperkirakan stabil di angka 3,2%, sama dengan prediksi untuk tahun 2024. Meskipun ketegangan geopolitik masih harus diperhatikan, tren penurunan suku bunga kebijakan di negara maju, terutama Amerika Serikat, diperkirakan akan berlanjut. Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan kehati-hatian dalam respons kebijakan untuk mengurangi dampak global, termasuk dalam mendorong aliran modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar.

According to the IMF in its World Economic Outlook released in October 2024, global economic growth in 2025 is expected to be stable at 3.2%, the same as the prediction for 2024. Although geopolitical tensions still need to be watched, the downward trend in policy interest rates in developed countries, especially the United States, is expected to continue. To maintain stability and support economic growth, caution is needed in policy responses to reduce global impacts, including in encouraging foreign capital flows and strengthening exchange rate stability.

Meskipun menghadapi risiko global, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap stabil. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi domestik diprediksi akan mencapai lebih dari 5% (yoy), melanjutkan kinerja positif yang terlihat sepanjang tahun 2024, yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, terutama di kalangan kelas menengah ke atas, diperkirakan akan tetap kuat. Selain itu, investasi akan terus meningkat seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kinerja ekspor nonmigas juga diprediksi akan meningkat, didorong oleh sektor manufaktur dan pertambangan.

Despite facing global risks, Indonesia's economy is expected to remain stable. In 2025, domestic economic growth is predicted to reach more than 5% (yoy), continuing the positive performance seen throughout 2024, driven by household consumption and investment. Household consumption, especially among the upper middle class, is expected to remain strong. In addition, investment will continue to increase along with the completion of various National Strategic Projects (PSN). Non-oil and gas export performance is also predicted to increase, driven by the manufacturing and mining sectors.

Aktivitas perekonomian Indonesia diharapkan terus meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2% (yoy) pada tahun 2025. Namun, pencapaian ini memerlukan dukungan dari penguatan permintaan domestik dan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas serta memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah yang tinggi.

Indonesia's economic activity is expected to continue to increase with a projected growth of 5.2% (yoy) in 2025. However, this achievement requires support from strengthening domestic demand and structural reforms to increase productivity and strengthen the structure of economic growth, including sectors that can absorb labor and provide high added value.

Di tahun 2025, Bank Aladin Syariah akan melanjutkan pengembangan bisnis serta melakukan optimalisasi fungsi intermediari Bank melalui pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran dana. Pengembangan bisnis Bank akan menyasar segmen ritel, UMKM dan korporasi. Layanan dan produk Bank akan tersedia baik secara online melalui aplikasi digital Bank dan integrasi layanan Banking as a Service dengan mitra strategis, maupun secara offline melalui relationship manager Bank dan jaringan yang dimiliki oleh mitra Bank. Dalam penyaluran pembiayaan, Bank akan melakukan perluasan kerja sama dengan mitra strategis Bank untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan terutama pada segmen ritel, diantaranya optimalisasi penyaluran pembiayaan ke Nasabah pensiunan melalui kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dan penyaluran pembiayaan ke ekosistem Alfamart.

In 2025, Bank Aladin Syariah will continue to develop its business and optimize the Bank's intermediary function through growth in collection and disbursement of funds. The Bank's business development will target the retail, MSME and corporate segments. The Bank's services and products will be available both online through the Bank's digital application and integration of Banking as a Service services with strategic partners, as well as offline through the Bank's relationship managers and networks owned by the Bank's partners. In distributing financing, the Bank will expand cooperation with the Bank's strategic partners to encourage financing growth, especially in the retail segment, including optimizing financing disbursement to retired customers through cooperation with PT Taspen (Persero) and financing disbursement to the Alfamart ecosystem.

Di tahun 2025 Bank akan melanjutkan pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah. Diantaranya, Bank akan menambah ragam produk tabungan, memperluas layanan rekening payroll serta meluncurkan Layanan Nasabah Prima yang ditujukan kepada Nasabah segmen ritel kelas menengah atas. Selain itu, Bank akan melanjutkan integrasi platform Banking as a Service dengan mitra strategis Bank sebagai langkah untuk mengakuisisi Nasabah segmen ritel melalui tabungan co-branding. Dari sisi pembiayaan, di tahun 2025 layanan Bank utamanya akan difokuskan pada penyaluran pembiayaan berbasis kerja sama dengan mitra.

In 2025, the Bank will continue to develop products and services to meet Customers' needs. This includes the Bank's effort to increase the variety of savings products, expand payroll account services and launch Prima Customer Services aimed at middle-upper class retail segment customers. In addition, the Bank will continue the integration of the Banking as a Service platform with the Bank's strategic partners as a step to acquire retail segment customers through co-branding savings. In terms of financing, in 2025 the Bank's main services will be focused on disbursing financing based on cooperation with partners.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis ini, infrastruktur teknologi pendukung akan terus dikembangkan secara berkelanjutan, begitu juga penyempurnaan organisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai model bisnis. Bank juga akan terus menjajaki potensi kerja sama dengan mitra bisnis yang telah ada dan mitra bisnis baru.

To support the growth of this business, the supporting technology infrastructure will continue to be developed sustainably, as well as organizational improvements and Human Capital development according to the business model. The Bank will also continue to explore potential collaborations with existing and new business partners.

Dalam melaksanakan bisnisnya, Bank akan selalu mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk diantaranya menjaga modal inti minimum sesuai dengan ketentuan. Dari sisi manajemen risiko, Bank berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan risiko secara konsisten dan terpadu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Secara berkesinambungan, Bank akan mengevaluasi penerapan manajemen risiko agar dapat secara efektif mengelola risiko sesuai dengan aktivitas bisnis Bank.

PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Direksi menyadari bahwa penerapan teknologi informasi (TI) yang optimal dapat membuat Bank menjadi lebih produktif, kompetitif, dan beradaptasi dengan perubahan serta tantangan dari perkembangan bisnis, sehingga membawa Bank dalam mencapai percepatan pertumbuhan bisnis. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dilakukan sebagai langkah berkelanjutan dari pengembangan infrastruktur dasar yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Tema pengembangan TI akan mencakup aspek yang lebih luas dari sebelumnya yang ditujukan agar teknologi bisa mendukung pertumbuhan secara komprehensif dari berbagai unit di dalam Perseroan baik untuk kebutuhan pengembangan bisnis maupun kegiatan operasional.

Antara lain hal ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pengembangan aplikasi mobile banking dengan penambahan berbagai fitur seperti pembukaan produk tabungan dan deposito yang lebih beragam, transfer dana melalui BI-Fast, pembayaran tagihan dan pembelian, penjadwalan transaksi, tarik-setor tunai, donasi, zakat, dan berbagai layanan Nasabah lainnya
2. Melanjutkan pengembangan Open API dan pengem—bangan aspek teknis lainnya untuk kemudahan interkoneksi dengan berbagai mitra sehingga layanan bisa digunakan oleh ekosistem yang lebih luas (BaaS - *Banking as a Service*)
3. Melanjutkan pengembangan *Corporate Internet Banking* untuk melayani Nasabah korporasi dalam kegiatan transaksi dasar penggajian dan pembayaran, sekaligus menjadikan kanal untuk pengelolaan ekosistem dengan mitra
4. Melanjutkan pengembangan aplikasi untuk mendukung aktivitas pembiayaan dengan berbagai akad yang lebih bervariasi serta integrasinya dengan berbagai *channel* yang digunakan oleh Nasabah
5. Melanjutkan program yang mampu meningkatkan keterlibatan Nasabah sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan menyeluruh
6. Melanjutkan pengembangan sistem loyalty sehingga bisa meningkatkan konversi dan retensi Nasabah serta kemampuan *up-selling* dan *cross-selling*
7. Melanjutkan pengembangan terkait pengamanan informasi serta ketahanan *cyber* dalam bentuk pengamanan akses terhadap data dan aplikasi melalui jaringan internal maupun eksternal

In carrying out its business, the Bank will always comply with prevailing regulations, including maintaining minimum core capital in accordance with the provisions. In terms of risk management, the Bank is committed to implementing risk management consistently and in an integrated manner by prioritizing the principle of prudence. The Bank will continuously evaluate the implementation of risk management to effectively manage risks in accordance with the Bank's business activities.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) SYSTEM MANAGEMENT

The Board of Directors realizes that the optimal implementation of information technology (IT) can make the Bank more productive, competitive, and adaptive to changes and challenges from business development, thus bringing the Bank to achieve accelerated business growth. The development of Information Technology (IT) is carried out as a continuous step from the development of basic infrastructure that has been carried out in the previous period. The theme of IT development will cover broader aspects than before, aimed at ensuring that technology can support comprehensive growth from various units within the Company both for business development needs and operational activities.

This will be done with the following steps, including:

1. Continuing the development of mobile banking applications by adding various features such as opening more diverse savings and time deposit products, fund transfers via BI-Fast, bill payments and purchases, transaction scheduling, cash withdrawals and deposits, donations, zakat, and various other customer services.
2. Continuing the development of Open API and the development of other technical aspects for easy interconnection with various partners so that services can be used by a wider ecosystem (BaaS - Banking as a Service)
3. Continuing the development of Corporate Internet Banking to serve corporate customers in basic payroll and payment transaction activities, while also making it a channel for ecosystem management with partners.
4. Continuing application development to support financing activities with more varied contracts and their integration with various channels used by Customers.
5. Continuing programs that can increase Customer involvement with a view to providing a more personal and comprehensive experience.
6. Continuing the development of a loyalty system with a view to increasing Customer conversion and retention as well as up-selling and cross-selling capabilities.
7. Continuing development related to information security and cyber resilience in the form of securing access to data and applications through internal and external networks.

8. Melanjutkan penguatan infrastruktur Devops untuk mendukung kegiatan pengembangan dan operasional melalui pemindahan *Data Center/Disaster Recovery Center* serta aksesibilitasnya
9. Melanjutkan pengembangan kemampuan untuk penanganan anti-money laundering dan anti-fraud untuk mengantisipasi ekspansi *channel*, Nasabah dan produk yang terus berkembang
10. Melanjutkan pengembangan sistem aplikasi lainnya untuk mendukung kegiatan operasional dan management internal terkait layanan *call center* dan *back-office*, kepegawaian, pembelanjaan, rekon, pelaporan dan lain sebagainya.

Melalui pengembangan teknologi informasi yang dilakukan Bank, Direksi berharap terwujudnya pertumbuhan usaha yang lebih baik dan berkesinambungan, sehingga Bank lebih mudah dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja. Adanya TI meningkatkan kualitas SDI karena unit sistem kerja terkoordinasi dengan sistematis, selanjutnya juga meningkatkan produktivitas dan mendukung layanan operasional. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di Bank Aladin Syariah juga telah diselaraskan dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai bank yang sepenuhnya mengadopsi layanan digital, Bank Aladin Syariah menempatkan teknologi informasi sebagai tulang punggung dalam seluruh aktivitas operasional dan pengembangan bisnis. Teknologi tidak hanya menjadi alat pendukung, tetapi juga pendorong utama dalam menghadirkan layanan keuangan syariah yang aman, cepat, dan dapat diakses kapan saja oleh seluruh nasabah. Oleh karena itu, keamanan dan keandalan sistem informasi menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Komitmen Bank Aladin Syariah terhadap keamanan informasi diwujudkan melalui pencapaian sertifikasi ISO 27001, sebuah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Sertifikasi ini mencerminkan dedikasi Bank dalam melindungi data nasabah dan menjamin transaksi yang aman melalui aplikasi digital. Ke depan, Bank Aladin berupaya untuk terus memperluas cakupan sistem manajemen keamanan informasi ini guna menjangkau seluruh aspek layanan dan operasional.

Dengan landasan kebijakan yang kuat dan pendekatan proaktif terhadap keamanan serta inovasi teknologi, Bank Aladin Syariah terus berupaya menghadirkan pengalaman perbankan digital yang aman, andal, dan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan sistem teknologi informasi yang adaptif dan strategis ini menjadi bagian integral dari perjalanan Bank Aladin dalam membangun ekosistem

8. Continuing the strengthening of Devops infrastructure to support development and operational activities through the relocation of Data Center/Disaster Recovery Center and their accessibility.
9. Continuing to develop capabilities for handling anti-money laundering and anti-fraud to anticipate the expansion of channels, customers and products that continue to grow.
10. Continuing to develop other application systems to support operational activities and internal management related to call center and back-office services, personnel, spending, recon, reporting and so on.

Through the development of information technology carried out by the Bank, the Board of Directors hopes to realize better and sustainable business growth, so that the Bank is easier in planning, supervising, directing, and delegating work. The existence of IT improves the quality of HC because the work system unit is systematically coordinated, then also increases productivity and supports operational services. The development and utilization of information technology at Bank Aladin Syariah has also been aligned with the OJK Circular Letter (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS

As a bank that fully adopts digital services, Bank Aladin Syariah places information technology as the backbone of all operational activities and business development. Technology is not only a supporting tool, but also the main driver in providing safe, fast, and accessible sharia financial services to all customers. Therefore, the security and reliability of the information system are non-negotiable priorities.

Bank Aladin Syariah's commitment to information security is realized through the achievement of ISO 27001 certification, an international standard for information security management system. This certification reflects the Bank's dedication to protecting customer data and ensuring secure transactions through digital applications. In the future, Bank Aladin strives to continuously expand the scope of this information security management system to reach all aspects of services and operations.

With a strong policy foundation and a proactive approach to security and technological innovation, Bank Aladin Syariah continuously strives to provide a safe, reliable, and sharia-compliant digital banking experience. The management of this adaptive and strategic information technology system is an integral part of Bank Aladin's journey in building an inclusive and sustainable digital financial ecosystem in

keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Aladin Syariah senantiasa menyelaraskan pengelolaan Teknologi Informasi dengan tren digitalisasi perbankan dan kemunculan inovasi teknologi keuangan yang dinamis.

Indonesia. Therefore, Bank Aladin Syariah always aligns the management of Information Technology with the trend of banking digitalization and the emergence of dynamic financial technology innovations.

Bank Aladin Syariah menyadari pentingnya kesiapan infrastruktur, proses, dan sumber daya manusia dalam menghadapi disrupsi teknologi. Untuk itu, Bank terus meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi informasi guna memperkuat daya saing dan relevansi di pasar keuangan digital. Transformasi teknologi yang dijalankan tidak hanya menyasar aspek infrastruktur dasar, namun juga mencakup kebijakan, prosedur, dan pengelolaan risiko teknologi secara menyeluruh.

Bank Aladin Syariah realizes the importance of infrastructure, process, and human capital readiness in facing technological disruption. To that end, the Bank continues to increase investment in the development of information technology to strengthen its competitive advantages and relevance in the digital financial market. The technological transformation carried out not only targets basic infrastructure aspects, but also includes policies, procedures, and comprehensive technology risk management.

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah menjalankan berbagai inisiatif strategis melalui penguatan kebijakan dan prosedur pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup:

1. Kebijakan Teknologi Informasi – sebagai kerangka kerja utama dalam pengelolaan infrastruktur dan sistem TI.
2. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan – untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.
3. Standar Prosedur Pengembangan dan Pengadaan IT – memastikan proses pengadaan dan pengembangan sesuai standar yang berlaku.
4. Standar Prosedur Operasional Teknologi Informasi – mengatur pengelolaan operasional harian IT secara efisien dan aman.
5. Standar Prosedur IT Change Management – untuk mengelola setiap perubahan sistem secara terstruktur dan minim risiko.
6. Standar Prosedur Penanganan Insiden Teknologi Informasi dan Siber – memperkuat kesiapsiagaan terhadap gangguan dan ancaman digital.
7. Standar Prosedur Backup dan Restore – menjamin ketersediaan data dan pemulihan sistem secara cepat.
8. Standar Prosedur Pengujian Keamanan Siber – memastikan sistem Bank terlindungi dari potensi serangan siber.
9. Standar Prosedur Disaster Recovery Plan - sebagai rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan.
10. Standar Prosedur Pelindungan Data - upaya untuk melindungi Data dalam rangkaian pemrosesan Data guna menjamin hak konstitusional subjek Data .
11. Standar Prosedur Hak Privasi Konsumen - untuk pemenuhan hak-hak privasi Konsumen Bank termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi pemrosesan, dan mencabut Persetujuan atas penggunaan Data Pribadinya.

In 2024, Bank Aladin Syariah carried out various strategic initiatives by strengthening information technology management policies and procedures, including:

1. Information Technology Policy – as the main framework in managing IT infrastructure and systems.
2. Security Management System Policy – to ensure comprehensive data protection.
3. IT Development and Procurement Standard Procedure – ensuring procurement and development processes comply with applicable standards.
4. Information Technology Operational Standard Procedure – to regulate the efficient and safe management of daily IT operations.
5. IT Change Management Standard Procedure – to manage every system change in a structured and low-risk manner.
6. Information Technology and Cyber Incident Handling Standard Procedure – to strengthen preparedness for digital disruptions and threats.
7. Backup and Restore Standard Procedure – to ensure data availability and rapid system recovery.
8. Cyber Security Testing Standard Procedure – to ensure the Bank's system is protected from potential cyber-attacks.
9. Standard Operating Procedure for Disaster Recovery Plan - as a plan and steps to replace and/or restore access to necessary data, hardware, and software.
10. Standard Operating Procedure for Data Protection - efforts to protect Data throughout the data processing lifecycle in order to guarantee the constitutional rights of the Data subject.
11. Standard Operating Procedure for Consumer Privacy Rights - for the fulfillment of Bank Consumer privacy rights, including the right to access, rectify, erase, restrict processing, and withdraw Consent for the use of their Personal Data.

PENERAPAN GCG DI LINGKUP BANK ALADIN SYARIAH

Bank Aladin Syariah terus menunjukkan konsistensinya dalam mewujudkan komitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) sebagai landasan dan fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan dipenuhinya seluruh kaidah praktik pengelolaan terbaik guna mengatasi kondisi usaha yang berkembang dinamis serta penuh tantangan. Selama 2024 Direksi telah melakukan 16 (enam belas) kali rapat, yang terdiri dari 12 (dua belas) kali Rapat Direksi dan 4 (empat) kali Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Bank Aladin Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Aladin Syariah antara lain:

1. ***Governance Structure***
   Struktur organisasi Bank Aladin Syariah telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank Aladin Syariah dan secara reguler telah direviu dan dievaluasi menyesuaikan kebutuhan Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah juga telah melengkapi struktur Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR"), dan Satuan Kerja Kepatuhan secara memadai sehingga masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

   Demikian juga, komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS juga telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis serta kebutuhan Bank. Terkait persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau Bank Indonesia, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/PKK (fit and proper) dan seluruh anggota DPS juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK atau Bank Indonesia.

   Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, telah memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

GCG IMPLEMENTATION IN BANK ALADIN SYARIAH

Bank Aladin Syariah continues to demonstrate its consistency in realizing its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) as the basis and foundation in carrying out business activities. Therefore, in order to carry out its duties and responsibilities and ensure the fulfillment of all best management practice rules to overcome dynamic and challenging business conditions, during 2024, the Board of Directors held 16 (sixteen) meetings, consisting of 12 (twelve) Board of Directors Meetings and 4 (four) Joint Meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.

In general, Bank Aladin Syariah has implemented Good Corporate Governance properly. This is reflected in the implementation of adequate Good Corporate Governance principles. The strengths of Good Corporate Governance implementation at Bank Aladin Syariah include:

1. **Governance Structure**
   The organizational structure of Bank Aladin Syariah has been aligned with the business focus of Bank Aladin Syariah and has been regularly reviewed and evaluated to suit the needs of Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah has also completed the structure of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board ("DPS"), Internal Audit Work Unit ("SKAI"), Risk Management Work Unit ("SKMR"), and Compliance Work Unit adequately so that each function can carry out its duties and responsibilities properly.

   Likewise, the composition of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS is also in accordance with the regulations and business scale and needs of the Bank. Regarding the approval from the Financial Services Authority ("OJK") or Bank Indonesia, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test and all members of the DPS have also received approval from the OJK or Bank Indonesia.

   In appointing members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and DPS, integrity, competence, and financial reputation factors have been taken into account so that members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and DPS have adequate and relevant competence to their positions to carry out their duties and responsibilities and are able to implement the competence they posses in carrying out their duties and responsibilities.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Direksi juga telah membentuk 5 (lima) komite yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi/ *Information Technology Steering Committee* (ITSC); Komite Aset dan Liabilitas/*Assets & Liabilities Committee* (ALCO); Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC); Komite Pembiayaan/*Credit Committee* (CC); dan Komite Eksekutif Keberlanjutan/*Sustainability Executive Committee* (SEC), guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan secara efektif dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini Bank dan tantangan bisnis ke depan.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has formed and completed the membership of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee so that they are in accordance with regulations and in accordance with the Bank's needs. The Board of Directors has also formed 5 (five) committees, namely the Information Technology Steering Committee (ITSC); the Assets & Liabilities Committee (ALCO); the Risk Management Committee (RMC); the Credit Committee (CC); and the Sustainability Executive Committee (SEC), to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities and are expected to be able to make decisions effectively and appropriately in facing the Bank's current conditions and future business challenges.

Selain kelima Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan SKAI, SKMR, dan SKK yang independen dari satuan kerja operasional dan bisnis. Satuan kerja yang merupakan *second* & *third line of defense* tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*. Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok, dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

In addition to the five Committees, the Board of Directors has also equipped the organization with SKAI, SKMR, and SKK that are independent from the operational and business work units. The work units that are the second & third line of defense are expected to be able to support the Bank's operational activities by considering the principles of prudence and Good Corporate Governance. The Bank's governance infrastructure in the form of Bank policies and procedures, main tasks, and functions of each organizational structure are adequate and support the Bank's business activities.

2. ***Governance Process***

Bank Aladin Syariah selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank Aladin Syariah sesuai dengan *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian. Proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Semua organ Bank Aladin Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing secara proper. Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi telah melakukan rapat koordinasi untuk saling memberikan informasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga bisnis Bank Aladin Syariah berjalan dengan baik.

Pada level Dewan Komisaris, untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan RAKB yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank Aladin Syariah. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi dari RBB dan RAKB yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris membentuk komite yang dapat membantu Dewan Komisaris dalam

2. **Governance Process**

Bank Aladin Syariah always strives to ensure that business activities and operational processes of Bank Aladin Syariah are carried out in accordance with Good Corporate Governance and the principles of prudence. The process of appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and DPS has been carried out in accordance with applicable provisions and taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee by considering assessments of integrity, competence, and financial reputation factors. All organs of Bank Aladin Syariah carry out their duties and responsibilities in accordance with their respective functions properly. The Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors have held coordination meetings to provide information to each other, discuss, and make decisions needed to keep Bank Aladin Syariah's business running smoothly.

At the Board of Commissioners level, to support its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has approved the RBB and RAKB prepared by taking into account the external and internal conditions of Bank Aladin Syariah. The Board of Commissioners has also supervised the realization of the RBB and RAKB that have been determined. As an effort to improve its supervisory function, the Board of Commissioners has formed committees that can assist the Board of Commissioners in carrying

melaksanakan tugas pengawasan. Komite-Komite yang dibentuk telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait proses perbaikan yang perlu dilakukan oleh Bank Aladin Syariah.

DPS secara rutin telah menyelenggarakan rapat bulanan guna memastikan antara lain usulan produk, jasa, dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibantu oleh 2 (dua) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran ke OJK, DSN MUI, dan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, *Good Corporate Governance*, dan prinsip syariah. RBB yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menjadi panduan dan fokus bagi Direksi untuk dapat direalisasikan dengan baik.

Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan Bank dan karyawan. Secara reguler juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Saat ini, Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan internal dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah.

3. ***Governance Overcome***
   Dengan struktur dan proses yang telah dilakukan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan serta disempurnakan, diharapkan *outcome* yang dicapai oleh Bank Aladin Syariah dapat membantu Bank Aladin Syariah untuk terus berkembang. Bank juga terus melakukan pengkinian untuk Ketentuan internal Bank Aladin Syariah dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan usaha Bank berjalan secara efektif melalui adanya proses audit internal yang meliputi seluruh aspek keuangan dan operasional serta penerapan teknologi informasi. Proses audit internal tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Selain itu SKAI Bank dibentuk untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian Intern yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dan rekomendasi dari regulator, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan mengidentifikasi potensi risiko

out its supervisory duties. The committees formed have submitted recommendations to the Board of Commissioners regarding the improvement process that needs to be carried out by Bank Aladin Syariah.

DPS has routinely held monthly meetings to ensure, among other things, that product, service, and program proposals are in accordance with sharia principles as stipulated in the DSN-MUI Fatwa. To carry out its duties and responsibilities, DPS is assisted by 2 (two) Liaison Officer who is under the supervision of the Compliance Work Unit. The results of supervision by DPS have been reported semi-annually to the OJK, DSN MUI, and the Board of Directors.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors, without intervention from shareholders, is fully responsible for the implementation of the Bank's management based on the principles of prudence, Good Corporate Governance, and sharia principles. The RBB that has been approved by the Board of Commissioners, becomes a guide and focus for the Board of Directors to be realized properly.

Employees also have the opportunity to receive flexible training based on the needs of the Bank and employees. Regular training is also carried out to improve employee skills and knowledge so as to support employees in carrying out their duties and responsibilities properly.

Currently, the Bank has also conducted an evaluation and updating of internal provisions in order to maintain the effectiveness, adequacy, and conformity of internal provisions with applicable laws and regulations and sharia principles.

3. **Governance Overcome**
   With the structure and process that have been implemented and continue to be improved and enhanced, it is expected that the outcome achieved by Bank Aladin Syariah can help Bank Aladin Syariah to continuously grow. The Bank also continues to update the internal provisions of Bank Aladin Syariah and adjust them to applicable regulations.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The objective is to ensure that the implementation of the internal control system in the Bank's business environment runs effectively through an internal audit process that covers all financial and operational aspects as well as the application of information technology. The internal audit process is carried out by the Internal Audit Work Unit (SKAI). In addition, the Bank's SKAI has been formed to examine the effectiveness of the Internal control system focusing on significant business risks and recommendations from regulators, the Board of Directors, the Board of Commissioners and the

internal yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan unit kerja terkait serta tidak ada temuan yang berulang.

Bank Aladin Syariah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dan signifikan diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank Aladin Syariah dan masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada Rencana Audit Internal yang telah disusun oleh SKAI secara tahunan yang disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan pertimbangan dari Komite Audit.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK

Bank Aladin Syariah menyusun kerangka kerja dan strategi manajemen risiko sesuai dengan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank menerapkan Manajemen Risiko dengan melakukan pengimplementasian manajemen risiko di segala aktivitas fungsional operasional Bank.

Bank memiliki struktur organisasi dan kebijakan serta prosedur yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja lini 2 (dua) yang independen. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko Perseroan akan diselaraskan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Bank Aladin Syariah telah melakukan penyaluran pembiayaan yang fokus di ekosistem mitra strategis sejak pertengahan tahun 2022. Pembiayaan tersebut dapat dimitigasi dengan baik sehingga di tahun 2024, *Non Performing Financing* (NPF) Nett atau kualitas pembiayaan bermasalah Bank terjaga di level 0.03%.

Tahun 2024, penyusunan, penetapan dan pengkinian prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko telah dilaksanakan dengan memadai. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Audit Committee by identifying potential internal risks that can affect the Bank's performance, including compliance with applicable laws and regulations, the adequacy of the Bank's governance process, risk management, and internal control system, and to provide recommendations for improvement. The SKAI's audit findings have been followed up by the Board of Directors and related work units and there are no recurring findings.

Bank Aladin Syariah implements the internal audit function effectively in all aspects and elements of activities that are directly and significantly estimated to affect the interests of Bank Aladin Syariah and the community as can be seen in the Internal Audit Plan that has been prepared by SKAI annually, which is approved by the President Director and the Board of Commissioners with consideration from the Audit Committee.

IMPLEMENTATION OF THE BANK'S RISK MANAGEMENT

Bank Aladin Syariah prepares a risk management framework and strategy in accordance with POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Bank implements Risk Management by implementing risk management in all functional operational activities of the Bank.

The Bank has an organizational structure and policies and procedures that support the implementation of risk management. The Risk Management Work Unit is an independent work unit of line 2 (two). The Head of Risk Management Work Unit is responsible to the Director of Compliance. Furthermore, the implementation of the Company's risk management will be aligned with the objectives, business policies, size, business complexity, and capabilities of the Bank with a risk scope that includes Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Return Risk, and Investment Risk.

Bank Aladin Syariah has been disbursing financing focused on the strategic partner ecosystem since mid-2022. The financing can be mitigated well so that in 2024, Net Non-Performing Financing (NPF) or the quality of the Bank's non-performing financing was maintained at 0.03%.

In 2024, the preparation, determination and updating of procedures and tools to identify, measure, monitor and control risks have been implemented adequately. The Board of Directors and the Board of Commissioners actively supervised the implementation of risk management strategies and policies through the Risk Management Committee and the Risk Monitoring Committee.

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*/SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

Bank Aladin Syariah mempersiapkan WBS sebagai sarana bagi pelapor untuk menyampaikan pengaduan perilaku pelanggaran seperti perbuatan *Fraud*, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau Peraturan Perusahaan, serta perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil yang diduga dilakukan oleh Karyawan yang terjadi di lingkungan Bank dengan proses penanganan yang cepat, tepat dan efektif. Sistem ini disediakan dengan maksud untuk menindaklanjuti dengan serius hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, baik dari segi keuangan maupun reputasi Bank tetapi tidak terbatas pada:

1. Penipuan/*Fraud*, Ketidakjujuran atau Korupsi.
2. Penggunaan tidak sah atau klaim palsu atas dana bank.
3. Penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi.
4. Aktivitas tidak sah dan/atau perdagangan ilegal dan/ atau kelakuan buruk.
5. Pelanggaran hukum, aturan, peraturan dan pedoman seperti UU Perbankan.
6. Kegagalan untuk memenuhi standar professional.
7. Tindakan ilegal atau kriminal (seperti perusakan fisik properti, pembakaran, pencurian, bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menipu bank).
8. Pemalsuan, perubahan/penggantian catatan bank.
9. Pelanggaran serius Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
10. Pelecehan Seksual (baik secara fisik maupun verbal), intimidasi/pengancaman, pemerasan.
11. Penyalahgunaan Informasi yang bersifat rahasia.
12. Menyetujui, mengarahkan atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di atas.

Di sepanjang tahun 2024, terdapat 1 (satu) pelaporan yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System*. Direksi berpendapat bahwa penerapan WBS di lingkup Bank Aladin Syariah telah berjalan dengan baik. Sosialisasi penerapan WBS terus menerus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian segenap Insan Bank dalam melaporkan tindak pelanggaran, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Bank Aladin Syariah melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) terhadap risiko dan kinerja Bank dengan mengacu pada POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah , serta berdasarkan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*). Hasil akhir tercermin pada Peringkat Komposit (PK) yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko (*risk profile*), GCG, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM / REPORTS HANDLING SYSTEM

Bank Aladin Syariah prepares WBS as a means for reporters to submit reports of violations such as fraud, unethical / improper actions, violations of Company policies and / or Regulations, as well as actions or behavior that can cause losses, both material and immaterial, which are suspected of being carried out by Employees that occur in the Bank's environment with a fast, precise and effective handling process. This system is provided with the intention of seriously following up on things that can cause losses, both in terms of finances and the Bank's reputation but are not limited to:

1. Fraud, Dishonesty or Corruption.
2. Unauthorized use or false claims of bank funds.
3. Abuse of position for personal gain.
4. Unauthorized activity and/or illegal trading and/or misconduct.
5. Violation of laws, rules, regulations and guidelines such as the Banking Act.
6. Failure to meet professional standards.
7. Illegal or criminal acts (such as physical destruction of property, arson, theft, collusion with third parties to defraud the bank).
8. Forgery, alteration/replacement of the Bank's records.
9. Serious violation of the Code of Conduct.
10. Sexual Harassment (either physical or verbal), intimidation/threats, blackmail.
11. Misuse of Confidential Information.
12. Approving, directing or participating in any of the above activities.

Throughout 2024, there was 1 (one) report submitted through the Whistleblowing System. The Board of Directors is of the opinion that the implementation of WBS within Bank Aladin Syariah has been running well. Dissemination of WBS implementation is continuously carried out on an ongoing basis to increase the understanding and concern of all Bank Personnel in reporting violations, so as to create a clean and integrated work environment.

BANK SOUNDNESS LEVEL

Bank Aladin Syariah conducts a self-assessment of the Bank's Soundness Level (TKB) against the Bank's risks and performance by referring to POJK No. 08/POJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and based on a risk approach (Risk-Based Bank Rating). The final result is reflected in the Composite Rating which includes an assessment of the risk profile, GCG, earnings, and capital factors.

Hasil *self-assessment* TKB Bank Aladin Syariah secara individu per 31 Desember 2024 berada pada Peringkat Komposit 2 (Dua). Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, aspek rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Jika ditemukan kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

PENJELASAN DIREKSI TERKAIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bagi Bank Aladin Syariah, penerapan Program TJSL merupakan bagian dari komitmen Bank terhadap aspek keberlanjutan. Pelaksanaan Program TJSL dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi internal maupun eksternal, guna mewujudkan kesejahteraan bersama (*shared prosperity*) baik bagi penerima bantuan program TJSL, mitra pelaksana, maupun untuk Bank. Oleh karena itu, pelaksanaan program TJSL ditujukan untuk menciptakan nilai secara bersama (*shared value*) yang akan mendukung kepentingan Bank dan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Perencanaan dan penerapan Program TJSL Bank Aladin Syariah dilakukan secara strategis agar selaras dengan kepentingan bisnis Bank dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Terkait dengan hal ini, Bank telah menetapkan nilai-nilai sebagai berikut yang menjadi landasan dalam penerapan Program TJSL.

1. Memungkinkan *(enable*): Penerapan Program TJSL diharapkan dapat menyiapkan para pelaku usaha dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Selain itu, penerapan Program ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada karyawan Bank untuk turut berpartisipasi dalam membantu mengatasi isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.
2. Mendukung (*support*): Penerapan Program TJSL diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup maupun menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.
3. Melestarikan (*preserve*): Penerapan Program TJSL dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2024, program-program TJSL secara khusus ditujukan guna memenuhi pencapaian SDG 1 (*No Poverty*), SDG 2 (*Zero Hunger*); SDG 3 (*Good Health and Well Being*); SDG 4 (*Quality Education*); SDG 5 (*Gender Equality*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 10 (*Reduced Inequalities*), SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*); SDG 13 (*Climate Action*); dan SDG 17 (*Partnerships for the Goals*).

The result of Bank Aladin Syariah's TKB self-assessment individually as of December 31, 2024 was at Composite Rating 2 (Two). This reflects that the Bank's condition is generally quite healthy so that it is considered capable of facing significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors, reflected in the rating of assessment factors, including risk profile, implementation of Governance, profitability aspects, and capital which are generally quite good. If weaknesses are found, these weaknesses can generally be resolved in normal business activities.

BOARD OF DIRECTORS' EXPLANATION REGARDING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (TJSL) PROGRAM

For Bank Aladin Syariah, the implementation of the TJSL Program is part of the Bank's commitment to sustainability aspects. The implementation of the TJSL Program is carried out by involving various parties, both internally and externally, in order to realize shared prosperity for both recipients of TJSL program assistance, implementing partners, and for the Bank. Therefore, the implementation of the TJSL program is intended to create shared value that will support the interests of the Bank and stakeholders in the long term.

The planning and implementation of the TJSL Program of Bank Aladin Syariah is carried out strategically so that it is in line with the Bank's business interests and the Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). In this regard, the Bank has established the following values as the basis for the implementation of the TJSL Program.

1. Enable: The implementation of the TJSL Program is expected to prepare business actors and the community to adapt to various changes. In addition, the implementation of this Program is also expected to provide opportunities for Bank employees to participate in helping to overcome social, economic and environmental issues faced by stakeholders.
2. Support: The implementation of the TJSL Program is expected to improve the standard of living and maintain the sustainability of the community.
3. Preserve: The TJSL Program is implemented to maintain the sustainability of nature and the environment.

Throughout 2024, TJSL programs are specifically aimed at achieving SDG 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger); SDG 3 (Good Health and Well Being); SDG 4 (Quality Education); SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production); SDG 13 (Climate Action); and SDG 17 (Partnerships for the Goals).

Program-program TJSL unggulan yang dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Program literasi keuangan bersama Yayasan Benih Baik untuk 75 UMKM yang merupakan bagian dari ekosistem Alfamind; dan 35 UMKM non Alfamidi untuk mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan bisnis sehingga usaha tersebut dapat berkelanjutan, mengalami peningkatan profit, dan mendukung ekonomi keluarga secara terukur.
2. Bersama Yayasan Benih Baik membantu mengentaskan isu stunting di kalangan balita di 3 wilayah: DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Target penerima bantuan: 141 balita dengan indikasi berat badan kurang.
3. Program Beasiswa bersama Yayasan Karya Salemba Empat Memberikan dukungan bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, serta memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik.
4. Program Warteg Gratis bekerjasama dengan Alfamart untuk pemberian bantuan kepada 35 ribu kaum dhuafa selama bulan suci Ramadhan, sekaligus mendukung 33 warteg di seluruh Indonesia dengan skala mikro.
5. Kerjasama dengan Alfamart melaksanakan mudik gratis ramadhan untuk mendukung terhadap 5.000 pemudik UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah.
6. Penggalangan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan Bank yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia.
7. Program kurban sapi yang disalurkan melalui Islamic Dakwah Fund - Majelis Ulama Indonesia (IDF - MUI) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha

Selain program-program TJSL di atas, Bank Aladin Syariah juga melanjutkan beberapa program TJSL unggulan dengan mitra-mitra eksisting, dengan fokus pada pengukuran dampak sosial dan/atau lingkungan dari program-program tersebut. Program-program ini meliputi:

1. Pembelian 435 carbon credit yang dihasilkan oleh Proyek Katingan (Katingan Peatland Restoration and Conservation Project) via Fairatmos untuk offset 435 tonnes of CO2e.
2. Program pemberdayaan petani kopi Garut (pembebasan lahan, biaya tumpang sari, penanaman bibit kopi, santunan petani);

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga akhir 2024, Direksi telah menilai bahwa Komite di bawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan memberikan dukungan yang positif dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengurusan oleh Direksi. Hal ini didasari oleh realisasi pemenuhan tugas masing-masing Komite yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2024:

- **Komite Pengarah Teknologi Informasi atau *Information Technology Steering Committee* (ITSC)**

The TJSL flagship programs implemented by the Bank in 2024 include:

1. Financial literacy program with Yayasan Benih Baik for 75 MSMEs that are part of the Alfamind ecosystem; and 35 non-Alfamidi MSMEs to encourage behavioral changes in business management so that these businesses can be sustainable, experience increased profits, and support the family economy in a measurable manner.
2. Together with Yayasan Benih Baik, help eradicate stunting issues among toddlers in 3 regions: DKI Jakarta, Banten and West Java. Target recipients of assistance: 141 toddlers with underweight indication.
3. Scholarship Program with Yayasan Karya Salemba Empat to provide support for underprivileged high-achieving students to continue their studies at university, as well as to empower the community's economy by creating a better environment.
4. Free Warteg Program in collaboration with Alfamart to provide assistance to 35 thousand poor people during the holy month of Ramadan, while also supporting 33 wartegs throughout Indonesia on a micro scale.
5. Collaboration with Alfamart to implement free homecoming during Ramadan to support 5,000 MSME homecoming travelers and low-income communities.
6. Blood donation fundraising involving all Bank employees which was distributed through the Indonesian Red Cross.
7. Cow sacrifice program, which was distributed through the Islamic Dakwah Fund - Indonesian Ulema Council (IDF – MUI to celebrate Eid al-Adha.

In addition to the TJSL programs above, Bank Aladin Syariah also continued several flagship TJSL programs with existing partners, with a focus on measuring the social and/or environmental impacts of these programs.
These programs include:

1. Purchase of 435 carbon credits generated by the Katingan Project (Katingan Peatland Restoration and Conservation Project) via Fairatmos to offset 435 tons of CO2e.
2. Empowerment program for coffee farmers in Garut (land acquisition, intercropping costs, planting coffee seedlings, farmer compensation).

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Until the end of 2024, the Board of Directors has assessed that the Committees under the Board of Directors have carried out their respective duties and responsibilities well and provided positive support in the implementation of the management and administration functions by the Board of Directors. This is based on the realization of the fulfillment of the duties of each Committee that has been carried out throughout 2024:

- **Information Technology Steering Committee (ITSC)**
  ITSC was formed by the Board of Directors to ensure

ITSC dibentuk oleh Direksi untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Bank serta meningkatkan kemampuan daya saing Bank Aladin Syariah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

- **Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & *Liabilities Committee* (ALCO)**
  ALCO dibentuk oleh Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI atau OJK maupun strategi bisnis.
- **Komite Manajemen Risiko**
  KMR dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko secara efektif di Bank Aladin Syariah.

- **Komite Pembiayaan atau *Credit Committee* (CC)**
  CC dibentuk Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pembiayaan.
- **Komite Eksekutif Keberlanjutan atau *Sustainability Executive Committee* (SEC)**
  SEC dibentuk untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan pada seluruh aspek operasional Bank sejalan dengan strategi dan rencana kerja keberlanjutan guna mencapai target-target keberlanjutan yang telah ditetapkan.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI

Mengacu pada RUPS Tahunan yang berlangsung pada 26 Juni 2024, Bank Aladin Syariah melakukan perubahan komposisi Direksi dengan ringkasan sebagai berikut:

- Menerima pengunduran diri Dyota Marsudi dari jabatannya selaku Presiden Direktur;
- Menerima pengunduran diri Mayang Ekaputri dari jabatannya selaku Direktur;
- Mengangkat Koko Tjatur Rachmadi sebagai Presiden Direktur;
- Mengangkat Jo, Anula Putra sebagai Direktur

Berikut susunan anggota Direksi Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2024:

that the implementation of information technology (IT) systems is in line with the Bank's strategic plan and to improve the competitiveness of Bank Aladin Syariah using appropriate information technology.

- **Assets & Liabilities Committee (ALCO)**
  ALCO was formed by the Board of Directors to maintain a strong balance sheet structure, which includes analysis and formulation of policies and strategies, decision making, supervision in the management of liquidity risk, market risk and capital in line with BI or OJK regulations and business strategies.

- **Risk Management Committee (KMR)**
  The KMR is formed by the Board of Directors to assist in the implementation of the Board of Directors' duties and authorities related to the effective implementation of risk management at Bank Aladin Syariah.
- **Credit Committee (CC)**
  The CC is formed by the Board of Directors with the aim of assisting the Board of Directors in implementing the supervisory function related to financing.
- **Sustainability Executive Committee (SEC)**
  The SEC is formed to ensure the implementation of sustainability principles in all aspects of the Bank's operations in line with the sustainability strategy and work plan in order to achieve the sustainability targets that have been set.

INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Referring to the Annual GMS held on June 26, 2024, Bank Aladin Syariah made changes to the composition of the Board of Directors with the following summary:

- Accepted the resignation of Dyota Marsudi from his position as President Director;
- Accepted the resignation of Mayang Ekaputri from her position as Director;
- Appointed Koko Tjatur Rachmadi as President Director;
- Appointed Jo, Anula Putra as Director

The following is the composition of the members of Bank Aladin Syariah Board of Directors as of December 31, 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris No 3 tanggal 1 Juli 2024. Annual GMS dated June 26, 2024, and has been notarized in the Notarial Deed of Meeting Resolutions Statement No. 3 dated July 1, 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Firdila Sari	Direktur Director	RUPS Tahunan tanggal 7 April 2021 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 16 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H.,, Notaris di Jakarta Selatan dan telah diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. The Annual General Meeting of Shareholders on April 7, 2021, was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 33 dated November 16, 2021, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta, and was reappointed at the Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2024, and was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.
Jo, Anula Putra	Direktur Director	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris No 3 tanggal 1 Juli 2024. Annual GMS dated June 26, 2024, and has been notarized in the Notarial Deed of Meeting Resolutions Statement No. 3 dated July 1, 2024.
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	RUPS Tahunan tanggal 24 April 2009 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 27 April 2009, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. The Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2009, was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 01 dated April 27, 2009, drawn up before Arman Lany, S.H., Notary in Jakarta, and was reappointed at the Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2023, and was notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

APRESIASI DAN PENUTUP

Pencapaian kinerja tahun 2024, tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama banyak pihak, khususnya para pemegang saham, yang tiada henti dan secara terus menerus mendukung terwujudnya visi dan misi Bank Aladin Syariah. Sebagai penutup dari laporan tahun 2024, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Insan Bank Aladin Syariah atas dedikasi, loyalitas serta kerja kerasnya dalam mendukung target dan realisasi bisnis Bank hingga tumbuh dengan baik seperti sekarang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua Pemangku Kepentingan, Mitra Bisnis, nasabah serta Dewan Komisaris atas dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga Bank dapat mengoptimalkan perannya sebagai Bank Digital Syariah yang senantiasa memberikan solusi pembiayaan dan layanan perbankan syariah inovatif.

APPRECIATION AND CLOSING

The achievement of performance in 2024 cannot be separated from the support and cooperation of many parties, especially shareholders, who have ceaselessly and continuously supported the realization of Bank Aladin Syariah's vision and mission. As a closing of the 2024 report, allow us to express our profound gratitude and appreciation to all Bank Aladin Syariah Personnel for their dedication, loyalty and hard work in supporting the Bank's business targets and realizations to grow well as it is today. We also express our gratitude to all Stakeholders, Business Partners, customers and the Board of Commissioners for their support and cooperation so far so that the Bank can optimize its role as a Sharia Digital Bank that always provides innovative sharia financing solutions and banking services.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29, 2025

Atas Nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors



Koko Tjatur Rachmadi
Presiden Direktur
President Director

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board's Report



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Pengembangan produk baru yang dilakukan Bank senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat/opini syariah dari DPS.



Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Member

The Bank always pays attention to the fatwa of the National Sharia Council and has obtained sharia opinions from DPS.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wa bihi nastai'in, wa 'ala 'umuriddunya waddin, washshalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya iwal mursalin, nabiyyina muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, amma ba'du

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT Bank Aladin Syariah Tbk dapat merasakan segala nikmat dan mewujudkan kinerja yang terus membaik di sepanjang tahun 2024. Pada kesempatan ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aladin Syariah merasa bangga untuk menyampaikan peran serta pencapaian Bank. Dimana di tengah perkembangan perekonomian di tahun 2024 ini yang penuh dengan dinamika, PT Bank Aladin Syariah Tbk dapat meraih pencapaian yang positif.

All praise be to Allah SWT for the mercy and grace, enabling PT Bank Aladin Syariah Tbk to experience all blessings and achieve great performance throughout the year 2024. On this occasion, the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank Aladin Syariah is proud to convey the role and achievements of the Bank. Amid the economic developments in 2024 filled with dynamics, PT Bank Aladin Syariah Tbk managed to achieve positive outcomes.

Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi atas konsistensi seluruh komponen Bank Aladin Syariah atas penerapan model bisnis yang fokus dan berkelanjutan. Dewan Pengawas Syariah pun turut merasa bangga dan bersyukur atas komitmen yang tetap konsisten terjaga dalam mengembangkan bisnis Bank secara positif dan berkelanjutan. Hal tersebut terutama dari segi infrastruktur teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman, perluasan jaringan pemasaran, hingga inovasi terkait produk dan layanan yang turut berperan dalam pencapaian kinerja Bank.

For this result, the Sharia Supervisory Board appreciates the consistency of all components of Bank Aladin Syariah in implementing a focused and sustainable business model. The Sharia Supervisory Board also feels proud and grateful for its consistent commitment to developing the Bank's business in a positive and sustainable manner. This is especially evident in the aspect of technological infrastructure that are relevant to current developments, expansion of marketing networks, to innovations related to products and services that play a role in achieving the Bank's performance.

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah juga berhasil meraih penghargaan sebagai *Best Bank Sharia* dengan kategori aset dibawah Rp 20 Triliun dari InvestorTrust. Penghargaan ini sebagai wujud komitmen Bank Aladin Syariah dalam melakukan inovasi dan optimalisasi layanan kepada masyarakat. Inovasi dan layanan yang dihadirkan tentunya sudah memenuhi prinsip syariah, untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan dan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

In 2024, Bank Aladin Syariah also won the award as the Best Sharia Bank with assets under Rp20 trillion from InvestorTrust. This award is a manifestation of Bank Aladin Syariah's commitment to innovating and optimizing services to the community. The innovations and services presented certainly meet sharia principles. To ensure compliance with sharia, DPS carries out supervision, both actively and passively, especially in implementing the fatwa of the National Sharia Council (DSN) and providing direction and/or supervision of products or services and business activities so that they are in accordance with sharia principles.

Bank Aladin Syariah telah memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa), yaitu satuan kerja *Business Development*. Sumber Daya Insani yang ada pada satuan kerja pengembangan produk telah memiliki pengetahuan dan atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. Adapun proses pengembangan produk baru yang dilakukan Bank senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat/opini syariah dari DPS.

Bank Aladin Syariah has a product development function that is independent of the business unit (fund collection, fund disbursement, and service functions), namely the Business Development work unit. The Human Capital in the product development work unit has knowledge and/or understanding of sharia principles and banking products in general. The process of developing new products carried out by the Bank always pays attention to the fatwa of the National Sharia Council and has obtained sharia opinions from DPS.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sebagai emiten perbankan yang berprinsip syariah, Bank Aladin Syariah menegaskan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dijalankan melalui penyelenggaraan Rapat Bulanan dengan tujuan untuk memastikan antara lain usulan produk, jasa, dan program sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI serta Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris dan Direksi yang dijalankan setiap empat bulan sekali. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 2 (dua) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran kepada Direksi. Kemudian Direksi menindaklanjuti laporan DPS tersebut kepada OJK dan DSN-MUI.

Dalam menjalankan tugasnya, DPS diwajibkan melakukan rapat setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Adapun setiap hasil rapat akan dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Per 31 Desember tahun 2024, DPS telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali untuk periode tahun 2024.

Selain itu DPS juga diwajibkan melaksanakan rapat dengan Direksi setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan rapat DPS dengan Dewan Komisaris dengan jumlah yang sama. Adapun untuk pelaksanaan rapat tersebut di Bank Aladin Syariah dilakukan secara bersamaan dalam Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Bank setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang tertuang dalam Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Hingga 31 Desember 2024, DPS telah melakukan Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk periode tahun 2024.

Pada tahun 2024, agenda yang diaktualisasikan Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah adalah terkait dengan pemenuhan *sharia compliance* dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkelanjutan. Pengembangan SDI dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait pemahaman dasar perbankan syariah bagi karyawan yang baru bergabung dan training peningkatan pemahaman bagi karyawan eksisting sesuai dengan jenjang kekaryawanan. Selain itu, DPS juga memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah pada strategi dan kebijakan strategis bank. Untuk itu, DPS mengapresiasi Direksi yang dalam melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategi bank senantiasa memperhatikan prinsip syariah yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD'S DUTIES

As a sharia-based banking issuer, Bank Aladin Syariah affirms the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) as the main organ in the corporate governance structure. The function of the Sharia Supervisory Board (DPS) is carried out by holding Monthly Meetings with the aim of ensuring, among other things, that product, service, and program proposals are in accordance with the principles set out in the DSN-MUI Fatwa, and Joint Meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors held every four months. In carrying out its duties, the Sharia Supervisory Board is assisted by 2 (two) Liaison Officers who are under the supervision of the Compliance Work Unit. The results of supervision from DPS have been reported semi-annually to the Board of Directors. Then the Board of Directors makes follows up on DPS report to the OJK and DSN-MUI.

In carrying out its duties, DPS is required to hold meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month. The results of each meeting will be stated in the DPS Meeting Minutes and properly documented. All DPS decisions outlined in the DPS Meeting Minutes are joint decisions of all DPS members. As of December 31, 2024, the DPS has held 14 (fourteen) meetings for the 2024 period.

In addition, DPS is also required to hold meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months and DPS meetings with the Board of Commissioners at the same frequency. These meetings at Bank Aladin Syariah are carried out simultaneously in Joint Meetings with the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months as stated in the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS. Until December 31, 2024, the DPS held Joint Meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors 3 (three) times for the period of 2024.

In 2024, the agenda actualized by the Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah is related to the fulfillment of sharia compliance and the development of sustainable Human Capital (HC). HC development is carried out by increasing understanding and knowledge related to the basic understanding of sharia banking for new employees and training to increase understanding for existing employees according to their level of employment. In addition, DPS also ensures the fulfillment of sharia principles in the Bank's strategies and strategic policies. Therefore, DPS appreciates the Board of Directors who in formulating the Bank's strategies and strategic policies always pays attention to the applicable sharia principles.

Pada tahun 2024, DPS tidak melihat implementasi dari kebijakan strategis Bank yang melanggar prinsip syariah yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank Aladin Syariah telah berupaya untuk menjalankan roda usaha sesuai dengan regulasi dan terus menanamkan nilai-nilai budaya kerja dan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi kesepakatan bersama guna mengarahkan seluruh SDI agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Bank Aladin Syariah.

PENERAPAN GCG ASPEK DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagi Bank Aladin Syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan 5 (lima) *prinsip Good Corporate Governance* (GCG) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Profesional dan Kewajaran tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak utama di Bank Aladin Syariah menjadi unsur penting dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Maka daripada itu, dalam melakukan *self-assessment* GCG, aspek Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu dalam penilaian tersebut. Aspek Dewan Pengawas Syariah dinilai berdasarkan faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah. Dimana pada tahun 2024, *self assessment* GCG DPS Periode Semester II tahun 2024, DPS mendapat peringkat 2 (dua).

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan jumlah, susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah.

In 2024, the Sharia Supervisory Board (DPS) did not observe any of the Bank's strategic policies that contravened the sharia principles referring to the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Bank Aladin Syariah conducts its operations in accordance with regulations and consistently promotes an Islamic work culture and values which have become mutual agreement to direct all Human Capital (HC) to adhere to the values of Bank Aladin Syariah.

IMPLEMENTATION OF GCG ASPECTS BY THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

For Bank Aladin Syariah, the implementation of Good Corporate Governance in sharia banking is not only intended to develop bank management that applies the 5 (five) principles of Good Corporate Governance (GCG), Transparency, Accountability, Responsibility, Professionalism and Fairness, but also must act in accordance with sharia principles. This is aimed at broader interests, including protecting the interests of stakeholders and increasing compliance with applicable laws and regulations, as well as ethical values that generally apply to the sharia banking industry.

The Sharia Supervisory Board, as one of the organs of Bank Aladin Syariah, plays a crucial role in implementing the principles of Good Corporate Governance. Therefore, in conducting the self-assessment of GCG, the aspect of the Sharia Supervisory Board is one of the factors considered in the evaluation. The Sharia Supervisory Board aspects are assessed based on factors in the Implementation of the Sharia Supervisory Board Duties and Responsibilities. In 2024, in the self-assessment of DPS for Semester II of 2024, DPS received a rating 2 (two).

COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah consists of 2 (two) persons consisting of a chairman and a member. Throughout 2024 until this Annual Report was signed, there were no changes in the number, structure and composition of the Sharia Supervisory Board.

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2024
Composition and Structure of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024

Nama Names	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Ketua Chairman	Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil di Luar RUPS tanggal 20 Agustus 2019 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 21 Agustus 2018, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan He Resolutions of the Shareholders Taken Outside of the General Meeting dated August 20, 2019, were notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 27 dated August 21, 2018, drawn up before Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, and were reappointed at the Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2023, and were notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2024
Composition and Structure of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024

Nama Names	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Anggota Member	Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil di Luar RUPS tanggal 20 Agustus 2019 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 21 Agustus 2018, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan The Resolutions of the Shareholders Taken Outside of the General Meeting dated August 20, 2019, were notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 27 dated August 21, 2018, drawn up before Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, and were reappointed at the Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2023, and were notarized based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

APRESIASI DAN PENUTUP

Pada kesempatan ini Dewan Pengawas Syariah juga senantiasa mengingatkan manajemen Bank Aladin Syariah agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Daya Insani Bank Aladin Syariah pun diharapkan untuk terus bertumbuh menjadi bibit-bibit unggul yang berdedikasi tinggi, amanah dan profesional sehingga Bank Aladin Syariah mampu menjadi emiten perbankan syariah yang dapat memberikan manfaat bagi Umat Islam diseluruh Indonesia.

APPRECIATION AND CLOSING

On this occasion, the Sharia Supervisory Board also always reminds the management of Bank Aladin Syariah to remain committed to maintaining the fulfillment of sharia principles and compliance with applicable laws and regulations. Bank Aladin Syariah's HC is also expected to continuously grow into superior seeds that are highly dedicated, trustworthy and professional, so that Bank Aladin Syariah is able to become a sharia banking issuer that can provide benefits to Muslims throughout Indonesia.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29, 2025

PT Bank Aladin Syariah Tbk



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Chairman



Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Member

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Aladin Syariah Tbk. Tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29, 2025

Dewan Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk,
Board of Commissioner of PT Bank Aladin Syariah Tbk

Rudy Hamdani



Presiden Komisaris (Independen)
President (Independent) Commissioner

Ationo Teguh Basuki



Komisaris
Commissioner

Fransisca Ekawati



Komisaris Independen
Independent Commissioner

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS FOR THE ANNUAL REPORT 2024 OF PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2024 of PT Bank Aladin Syariah Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible for the accuracy of all contents of the Annual Report.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 29 April 2025
Jakarta, April 29, 2025

Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk,
Board of Directors of PT Bank Aladin Syariah Tbk

Koko Tjatur Rachmadi



Presiden Direktur
President Director

Firdila Sari



Direktur
Director

Baiq Nadea Dzurriatin



Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Jo, Anula Putra



Direktur
Director

Aladin Bank Syariah
Masa Depan



03

Profil Perusahaan
Company Profile

Di tahun 2024, Bank meluncurkan produk Ala Deposito yang terintegrasi dengan aplikasi mobile banking milik Bank. Selain itu, Bank juga meluncurkan produk Giro Mudharabah untuk penghimpunan dana murah. Pada sisi layanan, Bank meluncurkan fitur QRIS CPM pada aplikasi mobile banking milik Bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran.
In 2024, the Bank launched the Ala Deposito product which is integrated with the Bank's mobile banking application. In addition, the Bank also launched the Mudharabah Current Accounts product for cheap fund collection. On the service side, the Bank launched the QRIS CPM feature on the Bank's mobile banking application to make it easier for customers to make payment transactions.

Informasi Umum Perusahaan
General Information About the Company



Nama Perusahaan Name of the Company	**PT Bank Aladin Syariah Tbk**	
Nama Inisial Initial	**Bank Aladin Syariah**	
Informasi Perubahan Nama Information on Change of Bank Name	Tidak terdapat perubahan nama Bank pada tahun buku. Adapun kronologis perubahan nama dan status Bank sejak awal berdiri, disampaikan pada pembahasan Riwayat Singkat Bank.	There was no change in the Bank's name in the fiscal year. The chronology of the change in the Bank's name and status since its inception is presented in the discussion of the Bank's Brief History.
Tanggal Pendirian Date of Establishment	16 September 1994 September 16, 1994	
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta No. 58 tanggal 16 September 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Abid, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994.	Deed No. 58 dated September 16, 1994 which was passed before Notary Achmad Abid, S.H., and has been approved by the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (now Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 dated October 17, 1994 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 103 dated December 27, 1994, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 10872 Year 1994.
Bidang Usaha Line of Business	**Bank Umum Syariah** **Sharia Commercial Bank**	
Kepemilikan Saham Share Ownership	Kepemilikan Saham Perusahaan per 31 Desember 2024: • PT Aladin Global Ventures (51,40%) • Masyarakat (Kepemilikan di bawah 5%) (48,60%)	Share Ownership as of December 31, 2024: • PT Aladin Global Ventures (51.40%) • Public (Ownership under 5%): 48.60%
Modal Dasar Authorized Capital	**Rp5.000.000.000.000**	**Rp5,000,000,000,000**





Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital	**Rp1.476.849.686.500** (Periode 31 Desember 2024)	**Rp1,476,849,686,500** (As of December 31, 2024)
Informasi Pencatatan Saham Share Listing Information	Saham Bank telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 Februari 2021. Namun efektif pada 29 November 2024 pencatatan saham Bank Aladin Syariah berpindah dari Papan Utama ke Papan Pengembangan.	The Bank's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on February 1, 2021. However, effective November 29, 2024, the listing of Bank Aladin Syariah's shares has been moved from the Main Board to the Development Board.
Kode Saham Share Code	BANK	
Jumlah Karyawan Total Employees	**290** orang (2024)	**290** employees (2024)
Alamat Address	Kantor Pusat Gedung Millenium Centennial Center, Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25. Jakarta Selatan, Indonesia. 12920	
Telepon Telephone	+62 21 85500947 +62 21 39708007	
Surel Email	corsec@aladinbank.id	
Website Perusahaan Company Website	www.aladinbank.id	
Media Sosial Social media	Instagram : @aladinbank.id Tiktok : aladinbank Linkedin : PT Bank Aladin Syariah Tbk	
Jaringan Usaha Business Network	Seluruh Indonesia Throughout Indonesia	

Riwayat Singkat Bank
Brief History of The Bank



Pendirian PT Bank Aladin Syariah Tbk merupakan bagian dari kerja sama dalam perjanjian bisnis (*Joint Venture*) antara PT Bank Nusa Nasional (BNN) dan Malayan Banking (Maybank) Berhad dari Malaysia

Pendirian PT Bank Aladin Syariah Tbk ini merupakan bagian dari kerja sama dalam perjanjian bisnis (Joint Venture) antara PT Bank Nusa Nasional (BNN) dan Malayan Banking (Maybank) Berhad dari Malaysia

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah") awalnya didirikan sebagai bank umum konvensional dengan nama PT Bank Maybank Nusa International (BMNI) berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 16 September 1994. Pendirian ini sebagai bagian dari program kerja sama dalam perjanjian bisnis (Joint Venture) antara dua bank umum PT Bank Nusa Nasional (BNN) dan Malayan Banking (Maybank) Berhad yang berasal dari Malaysia.

Lalu, seiring dengan beralihnya kepemilikan saham BMNI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA, pada tanggal 11 September 2000, BMNI berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp (BMI). Kemudian pada tahun 2010, BMI berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (BMSI) seiring dengan pergantian bidang usaha Bank, dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010.

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah" or "the Bank") was initially established as a conventional commercial bank under the name PT Bank Maybank Nusa International (BMNI), based on Deed of Establishment No. 58 dated September 16, 1994. This establishment was part of a cooperation program in a business agreement (Joint Venture) between two commercial banks, PT Bank Nusa Nasional (BNN) and Malayan Banking (Maybank) Berhad originating from Malaysia.

Then, along with the transfer of BMNI share ownership to the National Banking Restructuring Agency (IBRA) and then by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) or PPA, on September 11, 2000, BMNI changed its name to PT Bank Maybank Indocorp (BMI). Then in 2010, BMI changed its name to PT Bank Maybank Syariah Indonesia (BMSI) in line with the change in the Bank's line of business, from a conventional commercial bank to a sharia commercial bank based on the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 12/60/KEP. GBI/DpG/2010 dated September 23, 2010.

Kemudian pada tahun 2011, terdapat perubahan pemegang saham, dimana 30.000 lembar saham Bank yang dimiliki oleh PPA dijual kepada Malayan Banking (Maybank) Berhad dan Maybank telah melakukan penjualan 9.451 saham Bank kepada PT Prosperindo. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011.

Then in 2011, there was a change in shareholders, where 30,000 shares of the Bank owned by PPA were sold to Malayan Banking (Maybank) Berhad and Maybank has sold 9,451 shares of the Bank to PT Prosperindo. This is as stated in the Notarial Deed of Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 dated December 19, 2011.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei 2019, Malayan Banking Berhad (Maybank) dan PT Prosperindo yang merupakan pemegang saham Bank, menandatangani Perjanjian Pembelian Saham (Agreement for the Sale and Purchase of Shares) dengan PT NTI Global Indonesia (NTI) dan PT Berkah Anugerah Abadi (BAA). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjual dan mentransfer seluruh kepemilikan saham Bank oleh Malayan Banking Berhad (Maybank) dan PT Prosperindo kepada NTI dan BAA. Pada tanggal 31 Januari 2020, akuisisi Bank telah berlaku efektif dan disahkan oleh Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., berdasarkan Akta No. 20 tanggal 31 Januari 2020 mengenai akuisisi Bank. Seiring perubahan pemegang saham, Bank kembali berganti nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah (BNIS).

Furthermore, on May 15, 2019, Malayan Banking Berhad (Maybank) and PT Prosperindo which are shareholders of the Bank, entered into an Agreement for the Sale and Purchase of Shares with PT NTI Global Indonesia (NTI) and PT Berkah Anugerah Abadi (BAA). The purpose of this agreement is to sell and transfer the entire shareholding of the Bank by Malayan Banking Berhad (Maybank) and PT Prosperindo to NTI and BAA. On January 31, 2020, the acquisition of the Bank was effective and authorized by Notary Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., based on Deed No. 20 dated January 31, 2020 regarding the acquisition of the Bank. Along with the change in shareholders, the Bank changed its name back to PT Bank Net Indonesia Syariah (BNIS).

Pada tahun 2020, yakni berdasarkan Akta No. 26 tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham Bank kepada masyarakat dan mencatatkannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. Sementara, berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank, yang telah diaktakan dalam akta No. 63 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 17 Desember 2020, para Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada BAA untuk menjual seluruh sahamnya dalam Bank, yakni sebanyak 2.457.924.400 saham, kepada dan menunjuk sebagai pembelinya, yakni PT Alphaplus Adhigana Asia, sebanyak 204.826.814 saham dan PT NTI Global Indonesia sebanyak 2.253.097.586 saham.

In 2020, based on Deed No. 26 dated July 6, 2020, made before Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the Bank's plan to conduct an Initial Public Offering of the Bank's shares to the public and list them on the Indonesia Stock Exchange (IDX), and change the Bank's status from a Closed Company to a Public Company. Meanwhile, based on the Statement of Decision of the Bank's Shareholders, which has been notarized in deed No. 63 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, dated December 17, 2020, the Shareholders gave approval to BAA to sell all of its shares in the Bank, totaling 2,457,924,400 shares, to and appointed as buyers, namely PT Alphaplus Adhigana Asia, totaling 204,826,814 shares and PT NTI Global Indonesia totaling 2,253,097,586 shares.

Adapun pada tanggal 22 Januari 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No.S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103,- (nilai penuh) per saham.

On January 22, 2021, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) with its letter No.S-8/D.04/2021 to conduct an initial public offering of 5,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share to the public at an offering price of Rp103 (full amount) per share.

Selanjutnya, seiring dengan perubahan pemegang saham dan berubahnya fokus bisnis, pada tanggal 7 April 2021, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diwakili dalam Akta No. 11 oleh Notaris Yulia S.H., di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Perubahan ini mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021937.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 dan telah disetujui oleh OJK melalui surat No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Sementara itu, pada tanggal 24 September 2021, Bank menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik terkait perubahan nama Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank yang semula bernama PT NTI Global Indonesia menjadi PT Aladin Global Ventures.

Sepanjang tahun 2022, Bank melaksanakan aksi korporasi berupa penambahan modal Bank melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Kedua aksi korporasi tersebut dilakukan Bank dalam rangka memenuhi ketentuan OJK yang disampaikan melalui Peraturan OJK No. 12 Tahun 2022 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana bank umum diwajibkan memiliki modal inti Rp3 triliun per akhir tahun 2022.

Adapun melalui PMTHMETD tanggal 29 Desember 2022, Bank menerbitkan saham baru sejumlah 850.000.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp1.400,- (nilai penuh) atau senilai dengan Rp1.190.000.000.000,-. PT BNC Technologies Ventures menyerap seluruhnya saham yang ditawarkan dalam PMTHMETD tersebut dan membuatnya menjadi pemegang saham baru Bank dengan kepemilikan sebesar 5,80%. Sehingga, kepemilikan saham Bank aladin Syariah per 31 Desember 2022 adalah PT Aladin Global Ventures sebesar 53,67%, PT BNC Technologies Ventures sebesar 5,80%, dan Masyarakat sebesar 40,53%.

Dengan telah dilaksanakannya dua aksi korporasi di tahun 2022, menambah optimisme Bank untuk melakukan pengembangan usaha dengan tetap fokus untuk mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Indonesia, selaku basis utama nasabah Bank Aladin Syariah. Di tahun 2023, Bank Aladin Syariah terus meningkatkan kualitas layanan yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan perencanaan keuangan dan bertransaksi sehari hari seperti pembayaran atau pembelian, juga produk pembiayaan yang lebih beragam baik untuk nasabah ritel maupun korporasi.

Furthermore, in line with changes in shareholders and changes in business focus, on April 7, 2021, at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) represented in Deed No. 11 by Notary Yulia S.H., in Jakarta, the shareholders approved the name change from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0021937.AH.01.02 of 2021 dated April 12, 2021 and was approved by OJK through letter No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 concerning the determination of the use of a business license in the name of PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to become a business license in the name of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Meanwhile, on September 24, 2021, the Bank submitted information disclosure to the public regarding the change in the name of the Controlling Shareholder (PSP) of the Bank from PT NTI Global Indonesia to PT Aladin Global Ventures.

Throughout 2022, the Bank carried out corporate actions in the form of increasing the Bank's capital through the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) and Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD). Both corporate actions were carried out by the Bank in order to comply with OJK regulations conveyed through OJK Regulation No. 12 of 2022 concerning Commercial Bank Consolidation, where commercial banks are required to have core capital of IDR3 trillion by the end of 2022.

Through the PMTHMETD dated December 29, 2022, the Bank issued 850,000,000 new shares at an exercise price of Rp1,400 (full amount) or Rp1,190,000,000,000. PT BNC Technologies Ventures absorbed all the shares offered in the PMTHMETD and made it a new shareholder of the Bank with an ownership of 5.80%. Thus, the share ownership of Bank aladin Syariah as of December 31, 2022 is PT Aladin Global Ventures 53.67%, PT BNC Technologies Ventures 5.80%, and Public 40.53%.

With the implementation of two corporate actions in 2022, it adds to the Bank's optimism to carry out business development while still focusing on supporting the development of Indonesian MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), as the main base of Bank Aladin Syariah customers. In 2023, Bank Aladin Syariah continues to improve the quality of services that can facilitate customers in conducting financial planning and daily transactions such as payments or purchases, as well as more diverse financing products for both retail and corporate customers.

Di tahun 2023, Bank berupaya memperluas jaringan kerjasama mitra dan terus mengoptimalisasi fungsi intermediasinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Selain itu, guna mendorong penghimpunan dana, Bank meluncurkan produk Deposito untuk nasabah ritel segmen menengah atas dan produk tabungan remaja, serta fitur tabungan rencana Ala Impian dengan membuat tema tabungan baru Ala Impian Qurban. Pada sisi pembiayaan, Bank telah mulai menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk nasabah UMKM dan Korporasi, serta pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah ritel. Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS sebagai metode pembayaran melalui aplikasi mobile banking dan platform Corporate Internet Banking untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank terus diperluas dan telah tersedia di seluruh gerai Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia. Pada triwulan akhir di tahun 2023, Bank juga telah meluncurkan layanan Banking as a Service.

In 2023, the Bank seeks to expand its network of partners and continue to optimize its intermediary function by increasing third party fund raising activities and financing distribution. In addition, to boost fundraising, the Bank launched Deposit products for upper middle segment retail customers and youth savings products, as well as Ala Dream savings plan feature by creating a new savings theme Ala Dream Qurban. On the financing side, the Bank has started to distribute profit-sharing-based productive financing for MSME and Corporate customers, as well as motor vehicle financing for retail customers. The Bank's services continue to be complemented through the launch of the QRIS feature as a payment method through the mobile banking application and Corporate Internet Banking platform to facilitate transactions for corporate customers. The Bank's cash deposit services continue to be expanded and are available at all Alfamart and Alfamidi outlets throughout Indonesia. In the final quarter of 2023, the Bank also launched Banking as a Service.

Bank melanjutkan pertumbuhan aktivitas intermediari Bank baik dari sisi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di tahun 2024. Bank juga melanjutkan pertumbuhan bisnis dengan melakukan optimalisasi kerjasama dengan mitra bisnis Bank. Untuk mendukung pertumbuhan penghimpunan dana, Bank meluncurkan produk Ala Deposito yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile banking* milik Bank untuk meningkatkan penghimpunan dana Deposito dari nasabah ritel. Deposito ritel hingga akhir tahun 2024 tumbuh sebesar 88,90% secara *year-on-year*. Bank juga meluncurkan produk Giro Mudharabah untuk penghimpunan dana murah dari nasabah non ritel. Tren pertumbuhan juga terlihat pada sisi pembiayaan. Bank telah menyalurkan pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang ditujukan bagi segmen non ritel. Bank juga melakukan kerjasama bisnis dengan Taspen untuk penyaluran pembiayaan ke segmen ritel. Pada sisi layanan, Bank meluncurkan fitur QRIS CPM pada aplikasi *mobile banking* milik Bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran.

The Bank continues to grow its intermediary activities in terms of products and services to meet customer needs in 2024. The Bank also continued business growth by optimizing cooperation with the Bank's business partners. To support the growth of fundraising, the Bank launched Ala Deposit products integrated with the Bank's mobile banking application to increase the collection of deposits from retail customers. Retail deposits by the end of 2024 grew by 88.90% year-on-year. The Bank also launched the Mudharabah Current Account product to raise low-cost funds from non-retail customers. The growth trend was also seen on the financing side. The Bank has channeled financing with the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) contract aimed at the non-retail segment. The Bank also entered into a business partnership with Taspen to channel financing to the retail segment. On the service side, the Bank launched the QRIS CPM feature on the Bank's mobile banking application to facilitate customers in making payment transactions.

Layanan Bank pun terus dilengkapi melalui peluncuran fitur QRIS CPM di tahun 2024 untuk memudahkan metode pembayaran melalui aplikasi mobile banking dan Bank pun meluncurkan Super Flip by Aladin yang bekerjasama dengan Flip. Bank juga meluincurkan tabungan Aladin Gen, tabungan untuk anak.

Bank services continue to be enhanced through the launch of the QRIS CPM feature in 2024 to facilitate payment methods via mobile banking, and the Bank also launched Super Flip by Aladin in collaboration with Flip. The Bank also launched Aladin Gen savings, a savings account for children.

Informasi Perubahan Nama dan Status Bank serta Alasannya

Dalam perkembangannya, Bank telah mengalami sejumlah perubahan nama dan status, sebelum menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Berikut kronologis perubahan nama dan status Bank sejak pertama kali didirikan sampai menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, sebagaimana terlampir di bawah ini.

Kronologis Perubahan Nama dan Status Bank serta Alasan Perubahannya
Chronology of Changes in the Bank's Name and Status and Reasons for the Changes

1994

Bank Pertama kali berdiri dengan nama PT Bank Maybank Nusa International (BMNI) pada tanggal 16 September 1994.

The Bank was first established under the name PT Bank Maybank Nusa International on September 16, 1994

2000

Pada tanggal 11 September 2000, BMNI berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp (BMI), seiring dengan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa Nasional selaku salah satu pemegang saham, kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PAA

On September 11 2000, BMNI changed its name to PT Bank Maybank Indocorp (BMI), in line with the transfer of share ownership of Bank Nusa Nasional as one of the shareholders, to Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) to the Republic of Indonesia Minister of Finance qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) or PAA.

2010

Pada tahun 2010, BMI berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (BMSI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010, sejalan dengan perubahan fokus bisnis dari bank konvensional menjadi jadi Bank Umum Syariah.

In 2010, BMI changed its name to PT Bank Maybank Syariah Indonesia based on the Governor of Bank Indonesia Decree No. 12/60/KEP.GBI/ DpG/2010 dated September 23, 2010, in line with the change of business focus from a conventional bank to a Sharia Commercial Bank

2019

Pada tanggal 20 Desember 2019, kembali terjadi perubahan nama Bank, dari BMSI menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah (BNIS), seiring dengan diakuisisinya 70% saham Bank oleh PT NTI Global Indonesia (NTI) dan sisanya sebesar 30% saham diakuisisi oleh PT Berkah Anugerah Abadi (BAA), perubahan ini sekaligus mengubah fokus bisnis Bank, dari segmen korporasi menjadi ritel.

On December 20 2019, the Bank changed its name again, from BMSI to PT Bank Net Indonesia Syariah (BNIS), in line with the acquisition of 70% of the Bank's shares by PT NTI Global Indonesia (NTI) and the remaining 30% shares by PT Berkah Anugerah Abadi (BAA), which also changes the Bank's business focus, from the corporate to retail segment

2020

Perubahan status BNIS dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074002.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 3 November 2020.

The change in BNIS status from a Limited Company to a Public Company received approval from the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0074002. AH.01.02. 2020 dated November 3, 2020.

2021

"hingga saat ini
to date"

Pada tanggal 1 Februari 2021, saham BNIS telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "BANK", setelah sebelumnya memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan suratnya No. S-8/D.04/2021 tanggal 22 Januari 2021.

Sering dengan perubahan pemegang saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 7 April 2021, para pemegang saham memberikan persetujuan perubahan nama Bank dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk, perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

On February 1 2021, BNIS shares were listed on the Indonesia Stock Exchange with the stock code "BANK", after obtaining an effective statement from OJK in its letter No. S-8/D.04/2021 dated January 22, 2021.

Following the changes in shareholders, based on an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on April 7, 2021, shareholders gave approval to change the name of the Bank from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk, this change received approval from OJK based on their letter No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 concerning the determination of the use of a permit in the name of PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to become a business permit in the name of PT Bank Aladin Syaruah Tbk.



Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama Bank

Vision, Mission, and Key Values of The Bank

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama Bank Aladin Syariah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi, senantiasa dievaluasi dengan menggunakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Bank. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa Visi, Misi, dan Nilai-nilai Utama Bank Aladin Syariah cukup relevan dengan kondisi perkembangan lingkungan bisnis tahun 2023, serta arah dan tujuan bisnis Bank Aladin Syariah.

The Vision, Mission and Key Values of Bank Aladin Syariah, which have received joint approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors, are always evaluated using the mechanism for preparing the Bank's Work Plan. The Board of Commissioners and Board of Directors has assessed that the Vision, Mission and Key Values of Bank Aladin Syariah are still relevant to the development conditions in the business environment in 2023, as well as the business direction and objectives of Bank Aladin Syariah

VISI | VISION

Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan

Becoming the Leading Digital Sharia Bank

MISI | MISSION

Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.

Together, strengthen and create a beneficial sharia financial ecosystem for the society.

NILAI-NILAI UTAMA BANK ALADIN SYARIAH | BANK ALADIN SYARIAH CORE VALUES

BANTU | HELP

Tulus membantu baik untuk sesama Aladiners maupun kepada masyarakat

Providing sincere support for one another and to society at large

BANGUN | BUILD

Setiap proses dan produk oleh Bank Aladin Syariah dibangun dengan baik dan berkelanjutan

Assuring that products and processes are built well and sustainable

TUMBUH | GROW

Bank Aladin Syariah menjadi tempat belajar dan berkembang bersama

Aladin Sharia Bank is a place to learn and grow together

Karakter Dan Perilaku *Core Value* Bantu, Bangun, Dan Tumbuh (Babat)
Character And Behavior Of Core Values Help, Build, And Grow (*Bantu, Bangun, & Tumbuh* / Babat)

BANTU | HELP

1. Tulus (*sincere*)
2. Integritas (*integrity*)
3. Menghormati (*respect*)
4. Kolaboratif/Gotong Royong (*Collaborate*)
5. Terampil (*skillful*)

1. Sincere
2. Integrity
3. Respect
4. Collaborative/ Cooperation
5. Skillful

BANGUN | BUILD

1. Inklusif
2. Inovatif
3. Percaya Diri (self confidience)
4. Produktif
5. Adaptif

1. Inclusive
2. Innovative
3. Self-confidence
4. Productive
5. Adaptive

TUMBUH | GROW

1. Tangguh (resilient)
2. Berkelanjutan (sustained)
3. Berdampak (impactful)
4. Sinergi
5. Bermanfaat (giving value added)

1. Resilient
2. Sustainable
3. Impactful
4. Synergy
5. Beneficial (giving value added)

Logo Bank
The Bank's Logo

Aladin Bank Syariah Masa Depan

Desain logo yang secara keseluruhan bergelombang menunjukkan karakter brand Bank Aladin Syariah yang dinamis. Desain yang nampak bergelombang ini juga sebuah epitomi dari karpet terbang Aladin, yang akan membawa nasabah Bank Aladin Syariah masuk ke dunia baru yang penuh dengan banyak kesempatan.

The overall wavy logo design shows the dynamic character of the Aladin brand. This wavy design is also the epitome of a flying carpet, which will bring Bank Aladin Syariah customers into a new world full of opportunities.

Kegiatan Usaha
Business Activities

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Bank Aladin Syariah adalah

- Bank Umum Syariah
- Penyedia Jasa Pembayaan, dan
- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Aladin Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia (BI) untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
2. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi:
   a. Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
   b. Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
   c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
   d. Kegiatan *treasury* secara terbatas;
   e. Jasa lainnya;
   f. Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerja sama; dan
   g. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
4. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Pursuant to the Bank's Articles of Association which were last amended and ratified through the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 43 dated July 15, 2024, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta, the aims and objectives of Bank Aladin Syariah are

- Sharia Commercial Bank,
- Payment Service Provider, and
- Commercial Purpose Web Portal and/or Digital Platform.

To achieve these aims and objectives, Bank Aladin Syariah can carry out the following business activities:

Main Business Activities:

1. Carrying out business by conducting banking activities that follow sharia principles, the main activity is collecting public funds in the form of savings and syirkah whose rules follow Islamic law and redistributing the funds in the form of providing financing. Sharia commercial banks are sharia banks that in their activities provide services for payment traffic and have obtained a letter of appointment from Bank Indonesia (BI) to carry out banking business activities in foreign currency and/or carry out banking transactions with foreign parties;
2. Carrying out business activities in Rupiah and foreign currency includes:
   a. Fund raising activities as basic products or activities;
   b. Fund distribution activities as basic products or activities with a wider scope;
   c. Trade finance activities ;
   d. Limited treasury activities;
   e. Other services;
   f. Activities with a wider scope for agency and collaboration; and
   g. Payment system and electronic banking activities with a wider scope;
3. Carrying out other activities commonly carried out by a Bank as long as they do not conflict with sharia principles and statutory regulations;
4. Collecting funds in the form of savings in the form of current accounts, savings, or other similar forms based on wadi'ah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles.
5. Collecting investment funds in the form of deposits, savings, or other similar forms based on mudharabah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;

6. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, akad salam, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
9. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
10. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
11. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
12. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
    a. *wakalah;*
    b. *hawalah;*
    c. *kafalah;*
    d. *rahn.*
13. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
14. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia (BI);
15. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
16. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
17. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
18. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad Amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
20. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
21. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
22. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
23. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia (BI) dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

6. Distributing profit sharing financing based on mudharabah contracts, musyarakah contracts, or other contracts that do not conflict with sharia principles;
7. Distributing financing based on mudharabah contracts, salam contracts, istishna contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
8. Channeling financing based on qardh contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
9. Channeling financing for the rental of movable or immovable goods to customers based on ijarah contracts and/or hire purchase contracts in the form of ijarah muntahiyah bittamlik or other contracts that do not conflict with sharia principles;
10. Carrying out debt acquisition based on hawalah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
11. Carrying out debit card and/or financing card business based on sharia principles;
12. Providing banking services based on:
    a. wakalah;
    b. hawalah;
    c. kafalah;
    d. rahn.
13. Buying, selling and/or guaranteeing at your own risk third party securities issued on the basis of actual transactions (underlying transactions) and based on sharia principles;
14. Purchasing securities based on sharia principles issued by the Government and/or Bank Indonesia (BI);
15. Receiving payments from claims on securities and carrying out calculations with third parties or between third parties based on sharia principles;
16. Transferring money for own and/or customer interests based on sharia principles;
17. Placing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other banks, whether using letters, telecommunication facilities or by bearer money orders, checks or other means;
18. Providing a place to store goods and securities based on the principles of wadi'ah yad amanah or other principles based on sharia principles;
19. Carrying out custodial activities including administration for the benefit of another party based on a contract based on sharia principles;
20. Providing letter of credit (L/C) facilities based on sharia principles;
21. Providing bank guarantee facilities based on sharia principles;
22. Carrying out trustee activities based on the wakalah agreement;
23. Carrying out other activities commonly carried out by banks as long as they are approved by the Financial Services Authority (OJK) and/or Bank Indonesia (BI) and obtain a fatwa from the National Sharia Council (DSN).

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
3. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
4. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
6. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal;
8. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainya yang berdasarkan prinsip syariah.

Business Support Activities:

1. Carrying out capital investment activities in sharia financial institutions in Indonesia;
2. Carrying out temporary capital investment activities to overcome the consequences of financing failure based on sharia principles with the condition that the participation must be withdrawn;
3. Acting as founder and administrator of pension funds based on sharia principles;
4. Carrying out activities in the capital market as long as they do not conflict with sharia principles and statutory provisions in the capital market sector;
5. Carrying out banking activities or products based on sharia principles using electronic means;
6. Issuing, offering and trading short-term securities based on sharia principles, either directly or indirectly, through the money market;
7. Issuing, offering and trading long-term securities based on sharia principles, either directly or indirectly through the capital market;
8. Providing products or carrying out other sharia commercial banking business activities based on sharia principles.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank mencakup usaha sebagai Bank Umum Syariah dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

PRODUK DAN/ATAU JASA BANK ALADIN SYARIAH

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Aladin Syariah hadir untuk melayani berbagai segmen nasabah, baik individu maupun bisnis, dengan beragam solusi keuangan yang terpercaya dan kompetitif, melalui dua jenis produk perbankan syariah, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT IN THE FISCAL YEAR

Pursuant to the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities covers business as the Sharia Commercial Bank and Payment Service Provider (PSP)..

BANK ALADIN SYARIAH'S PRODUCTS AND/OR SERVICES

Bank Aladin Syariah is committed to providing innovative banking products and services based on Sharia principle. Bank Aladin Syariah is present to serve a range of customer segments, both individual and business customers, with various financial solutions that are trusted and competitive, through two types of sharia banking products, namely savings products and financing products.



Produk Simpanan

Bank Aladin Syariah tidak hanya berfokus pada nasabah dari segmen ritel, namun juga berperan sebagai lembaga intermediasi untuk melayani segmen non-ritel (SME & Korporasi). Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah di kedua segmen tersebut, Bank Aladin Syariah menyajikan produk simpanan berbasis prinsip syariah, antara lain:

1. **Tabungan iB**
   Tabungan iB adalah produk yang dirancang khusus untuk nasabah segmen ritel dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan transaksi dan perencanaan keuangan. Produk ini didasarkan pada akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana dari Tabungan iB hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro, atau alat pembayaran serupa.

   Bank saat ini telah menyediakan produk simpanan seperti :
   1. Ala Dompet
   2. Ala Impian
   3. Ala Bisnis
   4. Ala Dompet Gen
   5. Ala Impian Gen
   6. Ala Impian Haji
   7. Tabungan Perantara Pembiayaan
   8. Tabungan Superflip.

   Produk untuk nasabah segmen ritel dapat diakses melalui aplikasi Aladin, sementara nasabah non-ritel dapat mengaksesnya melalui internet banking atau cabang Bank Aladin Syariah.

2. **Deposito iB**
   Deposito iB dapat digunakan oleh nasabah dari segmen ritel dan non-ritel. Deposito iB adalah produk berbasis investasi yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana dari deposito iB hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati antara nasabah penyimpanan dan Bank.

Savings Products

Bank Aladin Syariah not only focuses on customers from the retail segment, but also acts as an intermediation institution to serve the non-retail segment (SME & Corporate). To meet customer needs in these two segments, Bank Aladin Syariah provides savings products based on sharia principles, including:

1. **iB Savings**
   iB Savings is a product specifically designed for retail segment customers with the aim of supporting transactional and financial planning needs. This product is based on a wadi'ah contract or investment of funds based on a mudharabah contract or other contracts that comply with sharia principles. Withdrawing funds from iB Savings can only be made in accordance with certain agreed terms and conditions, but cannot be withdrawn via check, giro or similar payment instruments.

   The Bank currently offers deposit products such as:

   1. Ala Dompet
   2. Ala Impian
   3. Ala Bisnis
   4. Ala Dompet Gen
   5. Ala Impian Gen
   6. Ala Impian Haji
   7. Tabungan Perantara Pembiayaan / Financing Intermediary Savings
   8. Tabungan Superflip

   Products for retail segment customers can be accessed via the Aladin application, while non-retail customers can access them via internet banking or Bank Aladin Syariah branches.

2. **iB Deposits**
   iB deposits can be used by customers in the retail and non retail segments. iB Deposits are investment-based products based on mudharabah contracts or other contracts that comply with sharia principles. Withdrawals from iB deposits can only be made at certain times based on an agreement between the deposit customer and the Bank.



Produk Pembiayaan

Bank Aladin Syariah, memiliki komitmen untuk memberikan pembiayaan kepada debitur yang terlibat dalam beragam sektor usaha, termasuk perdagangan besar, menengah, dan kecil. Bank akan menyediakan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam jaringan mitra bisnis mereka. Bank telah memiliki produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, yakni Invoice Financing iB, di mana produk ini merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja jangka pendek. Produk pembiayaan ini diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah dan berkaitan dengan transaksi perdagangan. Hal itu dapat diberikan baik kepada pembeli (*buyer*) maupun penjual (*seller/supplier*) yang terlibat dalam perdagangan. Tujuannya adalah untuk membantu perputaran kas nasabah yang mengajukan invoice sebagai dasar utama untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Segmentasi Produk

Dari sisi segmentasi, produk yang ditawarkan Bank Aladin Syariah saat ini adalah:

1. **Segmen Retail**
   a. Ala Dompet
      Produk Ala Dompet adalah bentuk tabungan yang didasarkan pada prinsip Akad Mudharabah. Produk ini dirancang untuk memenuhi keperluan transaksi perbankan sehari-hari dan dapat dihubungkan dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh Bank.
   b. Ala Impian
      Ala Impian adalah produk tabungan berdasarkan Akad Mudharabah yang bertujuan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan mereka. Nasabah dapat membuat hingga 20 rekening yang berbeda, hingga menetapkan target waktu, atau jumlah tabungan sesuai dengan kebutuhan mereka.
   c. Ala Impian Qurban
      Ala Impian Qurban adalah solusi tabungan terpisah yang memudahkan nasabah dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk ibadah qurban. Nasabah dapat menentukan jenis hewan qurban yang diinginkan sejak awal pembukaan rekening sehingga proses perencanaan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan.
   d. Aladin Gen
      Aladin Gen adalah tabungan khusus untuk anak berusia 12–17 tahun yang dirancang untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini. Dengan Aladin Gen, anak dapat belajar mengelola uang dengan lebih bijak dan orang tua juga bisa memantau transaksi anak dengan mudah.

Financing Products

Bank Aladin Syariah is committed to providing financing to debtors involved in business sectors, including large, medium and small trade. The Bank will provide financing to MSME businesses who are members of a business partner network. The Bank has financing products to meet customer needs, including iB Invoice Financing, a financing product used for short-term working capital. This financing product is carried out in accordance with sharia principles and is related to trade transactions. This can be given to both buyers and sellers/ suppliers involved in trade. The aim is to help cash circulation for customers who submit invoices as the main basis for obtaining financing facilities.

Product Segmentation

In term of segmentation, the products currently offered by Bank Aladin Syariah are as follows:

1. **Retail Segment**
   a. Ala Dompet
      Ala Dompet products are a form of savings based on the principles of a Mudharabah Agreement. This product is designed to meet daily banking transaction needs and can be linked to a Debit Card issued by the Bank.
   b. Ala Impian
      Ala Impian is a savings product based on a Mudharabah Agreement which aims to help customers plan their finances. Customers can make up to 20 different accounts and set a time target or savings amount according to their needs.
   c. Ala Impian Qurban
      Ala Impian Qurban is a separate savings solution that makes it easier for customers to plan and collect funds for qurban worship. Customers can determine the type of qurban animal they want from the start of opening an account so that the planning process becomes easier and according to needs.
   d. Aladin Gen
      Aladin Gen is a special savings for children aged 12-17 years old, designed to build the habit of saving and managing finances from an early age. With Aladin Gen, children can learn to manage money more wisely and parents can also monitor their children's transactions easily.

e. Ala Berbagi
Ala Berbagi adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat yang telah menjalin kemitraan dengan Bank dan dikenal sebagai lembaga tepercaya melalui aplikasi Mobile Aladin.

f. Layanan Bill Payment
Layanan Bill Payment atau Bayar & Beli adalah layanan yang menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi harian. Di dalam layanan ini terdapat berbagai pilihan, yaitu pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, pembelian paket data, pembelian token listrik, hingga top up saldo e-Wallet.

g. Tarik dan Setor Tunai
Layanan Tarik dan Setor Tunai membantu nasabah untuk menarik dan menyetor uang tunai tanpa perlu menggunakan kartu debit. Layanan ini dapat diakses melalui seluruh outlet Alfamart, Alfamidi, dan DAN+DAN di seluruh Indonesia.

2. Segmen Bisnis

a. Tabungan Ala Bisnis
Tabungan Ala Bisnis adalah produk tabungan yang menggunakan prinsip Akad *Mudharabah* yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus perusahaan. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.

b. Deposito Ala Bisnis
Deposito Ala Bisnis adalah produk deposito yang menggunakan prinsip Akad *Mudharabah* yang disediakan oleh Aladin untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus perusahaan. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.

c. *Invoice Financing*
Invoice Financing atau yang dikenal sebagai anjak piutang, adalah layanan pembiayaan yang berfokus pada pengelolaan penagihan piutang. Layanan ini didasarkan pada bukti tagihan (*invoice*) dan dapat mencakup tindakan penagihan dengan atau tanpa talangan (*qardh*). Layanan ini diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

d. Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan Modal Kerja adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung modal kerja perusahaan dengan jangka waktu tertentu dengan periode waktu yang pendek. Layanan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip syariah.

e. Ala Berbagi
Ala Berbagi is a service allowing customers to donate through the Amil Zakat Institution that has established a partnership with the Bank and is known as a trusted institution. This service is available through the Aladin mobile application.

f. Bill Payment Service
Bill Payment Service or Pay & Buy is a service that offers convenience for customers to perform various daily transactions. In this service there are various options, namely paying electricity bills, buying credit, buying data packages, buying electricity tokens, to topping up e-Wallet balances.

g. Cash Withdraw and Deposit
The Cash Withdrawal and Deposit service helps customers withdraw and deposit cash without needing to use a debit card. This service can be accessed through all outlets of Alfamart, Alfamidi, and DAN+DAN throughout Indonesia.

2. **Business Segment**

a. Ala Bisnis Savings
Ala Bisnis is a savings product that uses the principles of the Mudharabah Agreement provided by Aladin to facilitate transactions related to the company's specific financial goals. This product is offered with competitive ratios.

b. Ala Bisnis Deposits
Ala Bisnis Deposits are deposit products that use the principles of the Mudharabah Agreement provided by Aladin to facilitate transactions related to the company's specific financial goals. This product is offered with competitive ratios.

c. Invoice Financing
Invoice Financing, also known as factoring, is a financing service that focuses on managing receivables collection. This service is based on proof of billing (invoice) and can include collection actions with or without bailout (qardh). This service is provided to business actors who have bills from third parties (payors).

d. Working Capital Financing
Working Capital Financing is a form of financing that aims to support a company's working capital for a certain period of time over a short period of time. This service is aimed at businesses that needs additional working capital in accordance with sharia principles.

Wilayah Operasional Bank

Bank's Operational Areas



Sebagai bank digital terdepan di Indonesia, Bank Aladin Syariah terus merambah syariah ekosistem dan memperluas pangsa pasar melalui strategi *Offline-to-Online* (O2O) yang bekerja sama dengan salah satu minimarket terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan demikian, wilayah operasional Bank Aladin Syariah adalah mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

As the leading digital bank in Indonesia, Bank Aladin Syariah continues to penetrate the sharia ecosystem and expands its market share through an Offline-to-Online (O2O) strategy in collaboration with one of the largest minimarkets in Indonesia that has a network in all provinces in Indonesia. Thus, Bank Aladin Syariah's operational area covers all provinces

Struktur Organisasi Bank
Bank's Organizational Structure

Struktur organisasi Aladin Bank disahkan melalui Surat Keputusan No. 307 tanggal 31 Desember 2024 tentang Struktur Organisasi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Berikut struktur organisasi Aladin Bank per 31 Desember 2024, sebagaimana terlampir di bawah ini.

Struktur Organisasi Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2024
Bank Aladin Syariah Organizational Structure as of December 31, 2024

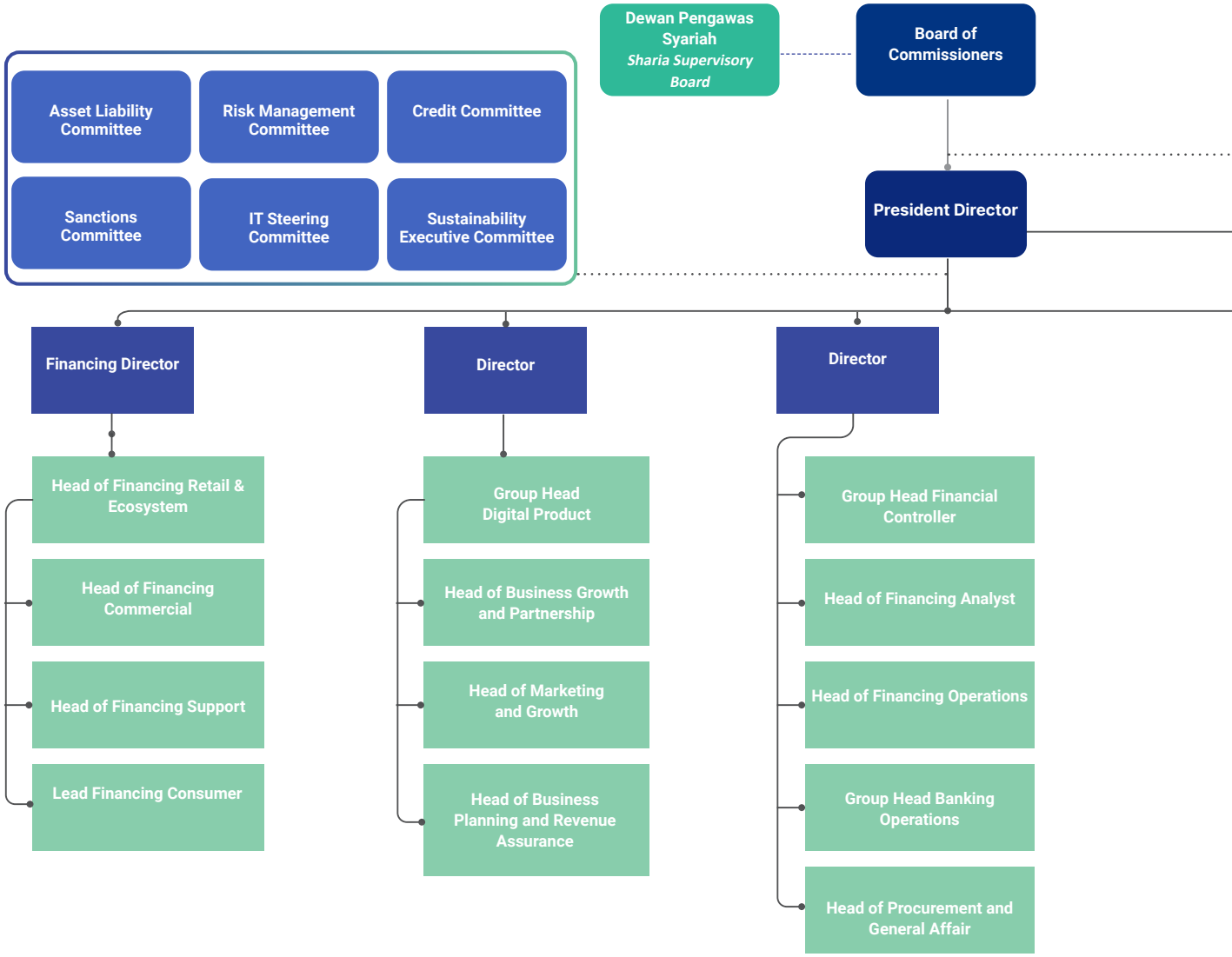

Bank Aladin's organizational structure was ratified through the Decision Letter No. 307 dated December 31, 2024 concerning the Organizational Structure of PT Bank Aladin Syariah Tbk. The following is Bank Aladin's organizational structure as of December 31, 2024:

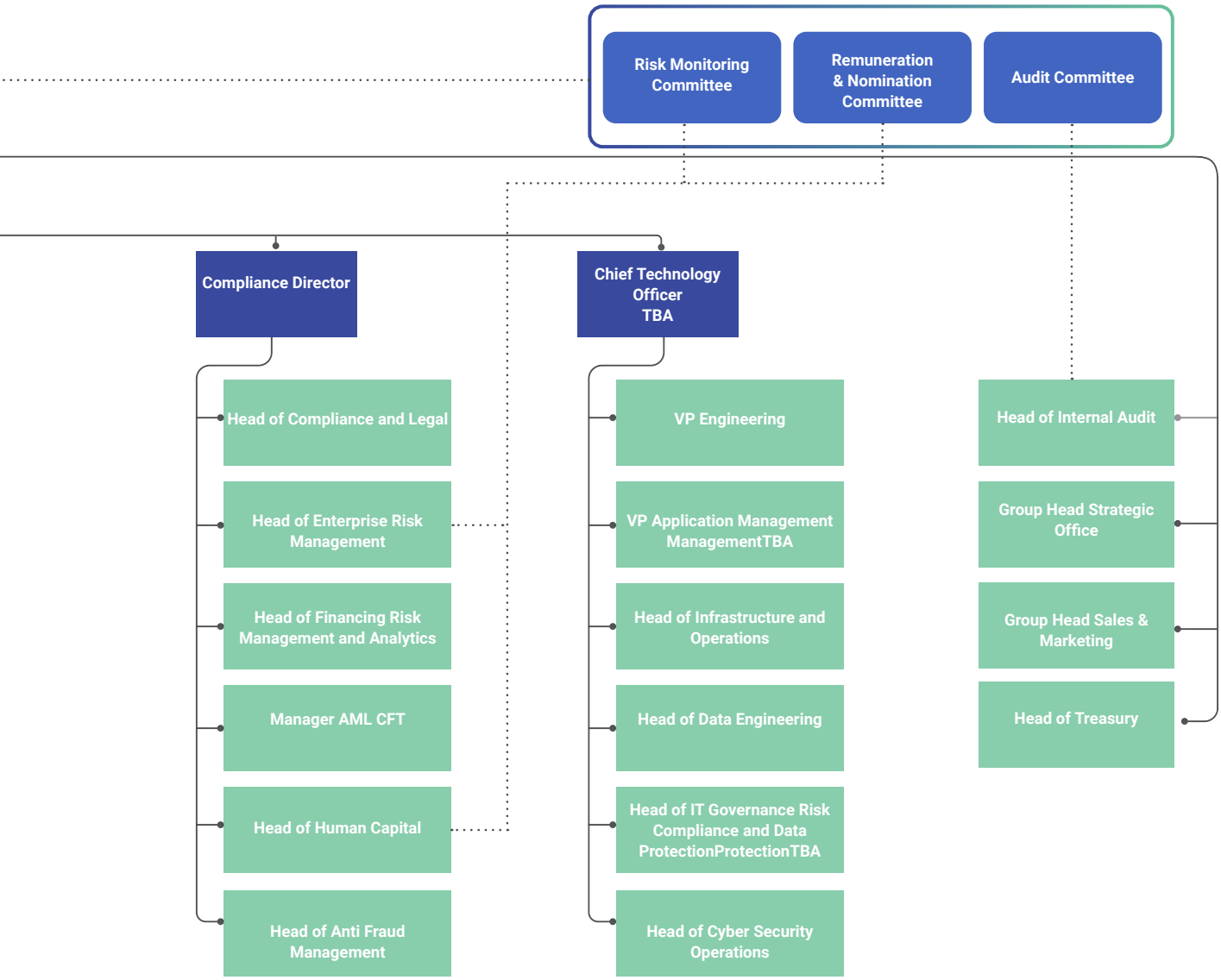

Keanggotaan Bank dalam Asosiasi atau Organisasi

Bank's Membership in Associations or Organizations

Sampai akhir tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah menjadi anggota dari beberapa asosiasi atau organisasi, baik dalam skala nasional maupun internasional, yaitu:

Nasional

a. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
b. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
c. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
d. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)
e. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
f. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
g. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
h. Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)
i. Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP)

Internasional

a. UN Global Compact Network Indonesia (UNGC)
b. UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI) – Principles for Responsible Banking

Until the end of 2024, Bank Aladin Syariah has become a member of several associations or organizations, both on a national and international scale, including:

National

a. Association of Indonesian Banks (ASBISINDO)
b. Indonesian Payment System Association (ASPI)
c. Indonesian Fintech Association (AFTECH)
d. Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI)
e. Membership of the MUI National Sharia Council (DSN)
f. Indonesian Issuers Association (AEI)
g. Indonesian Employers Association (APINDO)
h. Communication Forum of Compliance Directors (FKDKP)
i. Communication Forum of Banking Operations Director s(FKDOP)

International

a. UN Global Compact Network Indonesia (UNGC)
b. UN Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) - Principles for Responsible Banking



Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profile



Rudy Hamdani
Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner (Independent)

Masa Jabatan: 26 Juni 2024-RUPS Tahunan 2027 (Periode Jabatan Kedua)
Term of Office: June 26, 2024 - Annual General Meeting of Shareholders 2027 (Second Term of Office)

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 62 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 29 Juli 2021 yang telah diaktakan melalui Akta No. 54 tanggal 29 Juli 2021. Kemudian beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris (Independen) berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 yang diaktakan melalui Akta No. 38 tanggal 10 Februari 2022.

Beliau diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris (Independen) untuk yang kedua kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-24/D.03/2022 tanggal 18 Februari 2022.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Sains, Economics and Business Administration, St. Mary College of California (1987).

Riwayat Pekerjaan
Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Danakita Investama sejak Desember 2013 hingga Juli 2021. Beliau sempat menjabat sebagai Vice President Director PT Sequis Life Insurance Indonesia (Agustus 2017-Juli 2018). Beliau memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan sejak tahun 1989, yakni di PT Bank Internasional Indonesia (BII) bermula menjabat sebagai Account Officer sampai menjabat sebagai Direktur Perbankan Konsumer (Maret 2000-April 2007). Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Perbankan Konsumer PT Bank OCBC NISP Tbk (Mei 2007-April 2013).

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, serta sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Independensi
Beliau telah menyampaikan pernyataan independensi kepada RUPS dan telah membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2021.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Aged 62 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on July 29, 2021, which was notarized through Deed No. 54 dated July 29, 2021. Then he was appointed as President Commissioner (Independent) based on the Extraordinary GMS on February 10, 2022, which was notarized through Deed No. 38 dated February 10, 2022.

He has been reappointed as President Commissioner (Independent) for the second time based on the Resolution of the Annual GMS dated June 26, 2024 and was notarized through the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024.

Fit and Proper Test
Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. KEP- 24/D.03/2022 dated February 18, 2022.

Educational Background
Bachelor of Science, Economics and Business Administration, St. Mary College of California (1987).

Employment History
He once served as President Commissioner of PT Danakita Investama from December 2013 to July 2021. Also served as Vice President Director of PT Sequis Life Insurance Indonesia (August 2017 - July 2018). He has a long experience in the Banking world since 1989, namely at PT Bank Internasional Indonesia (BII) starting as an Account Officer until serving as Director of Consumer Banking (March 2000 - April 2007). Then served as Consumer Banking Director of PT Bank OCBC NISP Tbk (May 2007 - April 2013).

Information on Concurrent Positions
He has no concurrent positions in other companies or institutions. In the scope of Bank Aladin Syariah, he holds concurrent positions as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee, as well as Member of the Audit Committee, and Member of the Risk Monitoring Committee.

Affiliated Relationship
He has no affiliated relationship with members of Board of Directors, Sharia Supervisory Board and fellow members of Board of Commissioners, or with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Independence Statement
He has submitted a statement of independence to the GMS and has made a statement of independence signed on November 25, 2021.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
He has no share ownership in Bank Aladin Syariah.

Ationo Teguh Basuki

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 21 Juni 2023-RUPS Tahunan 2026 (Periode Jabatan Kedua)
Term of Office: June 21, 2023 -Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Second Term of Office)



Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 64 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 7 April 2021 yang telah diaktakan melalui Akta No. 11 tanggal 7 April 2021. Beliau diangkat kembali untuk yang keduakalinya sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. SR-30/PB.101/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Presiden Komisaris PT Bank Net Indonesia Syariah.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Elektro, Insititut Teknologi Bandung, Jawa Barat (1985).

Riwayat Pekerjaan
Beliau memiliki pengalaman panjang di industri perbankan, di antaranya, pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Index (2018-2019), Direktur IT & E-Channel Bank Index (2015-2018), Direktur Pengembangan Bisnis Bank Index (2011-2015), Direktur Bisnis Support Bank Index (2008-2011). Beliau juga pernah menduduki posisi Advisor untuk Direksi di Bidang Operasional Bank Index (2008-2008), Kepala Bidang Operasi di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (2004-2007), Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (1997-2003), Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (1996-1997), Pemimpin KCP Tanah Abang di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (1994-1995) dan Koordinator Marketing KCU Senayan di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (1993-1994).

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Aged 64 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
First appointed as Commissioner based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated April 7, 2021 which was notarized through Deed No. 11 dated April 7, 2021. He was reappointed for the second time as Commissioner based on the decision of the Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through Deed of Meeting Resolution Statement No. 12 dated July 6, 2023.

Fit and Proper Test
Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. SR-30/ PB.101/2020 dated October 12, 2020 concerning Decision on the results of the fit and proper test for the Candidate for President Commissioner of PT Bank Net Indonesia Syariah.

Educational Background
Bachelor of Engineering degree majoring in Electrical Engineering from Insititut Teknologi Bandung, Jawa Barat (1985).

Employment History
He has a long experience in Banking industry including serving as Director of Compliance at Bank Index (2018 2019), Director of IT & E-Channel Bank Index (2015-2018), Director of Business Development for Bank Index (2011-2015), Director of Support Business for Bank Index (2008-2011). He once held the positions as Advisor to Board of Directors in the Field of Operations at Bank Index (2008-2008), Head of Operations at PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (2004-2007), Head of KCU Services at PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (1997-2003), Head of Operations Administration Section KCU Senayan at PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (1996-1997), Head of KCP Tanah Abang at Panin Bank (1994-1995) and KCU Senayan Marketing Coordinator at PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) (1993-1994).

Information on Concurrent Positions
He has no concurrent positions in other companies or institutions. In the scope of Bank Aladin Syariah, he also holds the position of Member of the Remuneration and Nomination Committee.

Affiliated Relationship
He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board and fellow members of the Board of Commissioners, as well as with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
He has no share ownership in Bank Aladin Syariah.

Fransisca Ekawati

Komisaris Independe
Commissioner Independent

Masa Jabatan: 21 Juni 2023-RUPS Tahunan 2026 (Periode Jabatan Kedua)
Term of Office: June 21, 2023 - Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Second Term of Office)



Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 59 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (1988).

Riwayat Pekerjaan
Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Aladin Syariah Tbk. Sebelum Bank diakuisisi dan mengalami perubahan nama, beliau tercatat menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Maybank Syariah Indonesia sejak 15 Maret 2012. Beliau memiliki pengalaman panjang di berbagai korporasi, di antaranya mendapat penugasan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai Direktur PT SIPPA Kemasan Internasional (April 2020 - September 2021), General Manager Treasury PPA (Juni 2019 - April 2020), General Manager Business Advisory & Asset Management PPA (Juli 2014-Juni 2019), General Manager Monitoring and Administration of Equity Management (Mei 2004 - Juni 2014), kemudian menjabat posisi Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank Unit Restrukturisasi Bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Desember 1999 - April 2004), serta berkarir di PT Bank Pesona Kriyadana sejak tahun 1989 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang.

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap sebagai Ketua Komite Audit, serta Ketua Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Independensi
Beliau telah menyampaikan pernyataan independensi kepada RUPS dan telah membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2007.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Aged 59 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
Appointed for the first time as Independent Commissioner based on Governor of Bank Indonesia Decree No. 14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012. Then was reappointed as Independent Commissioner based on the decision of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023, passed before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.

Fit and Proper Test
Passed the fit and proper test by Bank Indonesia (BI) as stated in the Governor of Bank Indonesia Decree No. 14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012.

Educational Background
Bachelor of Economics, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (1988).

Employment History
Currently she has been serving as Independent Commissioner of PT Bank Aladin Syariah Tbk. Before the Bank was acquired and underwent a name change, she was an Independent Commissioner of PT Bank Maybank Syariah Indonesia since March 15, 2012. She has a long experience in various corporations, including being assigned by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as Director of PT SIPPA Kemasan Internasional (April 2020-September 2021), General Manager Treasury at PPA (June 2019 - April 2020), General Manager Business Advisory & Asset Management at PPA (July 2014-June 2019), General Manager Monitoring and Administration of Equity Management (May 2004- June 2014), then held the position of Group Head of Analysis and Assessment of Bank Management at Bank Restructuring Unit at the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (December 1999-April 2004), and had a career at PT Bank Pesona Kriyadana since 1989 with her last position as Head of Branch Development Sub Division.

Information on Concurrent Positions
She has no concurrent positions in other companies or institutions, while in Bank Aladin Syariah, she serves concurrently as Chair of the Audit Committee, and Chair of the Risk Monitoring Committee.

Affiliated Relationship
She has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board and fellow members of the Board of Commissioners, as well as with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Independence Statement
She has submitted a statement of independence to the GMS and has made a statement of independence which was signed on April 2, 2007.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
She has no share ownership in Bank Aladin Syariah.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Sepanjang tahun 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris, namun terdapat pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 26 Juni 2024.

INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS AND REASONS FOR THE CHANGES

Throughout 2024 until this Annual Report was signed, there were no changes in the structure and composition of the Board of Commissioners members, but there was a reappointment of the Board of Commissioners members whose terms of office had expired, as stated in the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 26, 2024.



Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board' Profile



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Masa Jabatan: 21 Juni 2023-RUPS Tahunan 2026 (Periode Jabatan Kedua)
Term of Office: June 21, 2023 - Annual GMS 2026 (Second Term of Office)

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 48 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. Beliau diangkat kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan
Doktor di Bidang Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Riwayat Pekerjaan
Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sejak 19 Januari 2024, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT FWD *Insurance*, Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian (Persero), Dosen di UIN Jakarta (2004-sekarang). Katib Syuriah PBNU, Ketua Shariah *Committee* WHFC, Pengasuh Ponpes *Al-Nahdlah*, Depok, Jawa Barat (2006-sekarang).

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Wakil Sekretaris Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ketua DPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Ketua DPS di PT FWD *Insurance*. Anggota DPS PT Pegadaian (Persero), Dosen di UIN Jakarta (2004-sekarang), dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Nahdlah, Depok, Jawa Barat (2006-sekarang), Ketua PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ketua MPP ICMI Koordinasi Pemuda.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Age 48 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
Appointed as Chairman of Sharia Supervisory Board based on the resolution of the Circular GMS Year 2020 which was notarized in the Notary Deed No. 149 dated May 28, 2020. He was reappointed for the second tem of office as Chairman of the Sharia Supervisory Board based on the resolution of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Resolutions Statement No. 12 dated July 6, 2023.

Educational Background
Doctor of Sharia Law Concentration, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Employment History
Apart from serving as Chairman of Bank Aladin Syariah's Sharia Supervisory Board, currently he also serves as Chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI) for Fatwa, Deputy for Youth Development at the Ministry of Youth and Sports. He also currently serves as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah since January 19, 2024, Chairman of the Sharia Supervisory Board (DPS) of PT FWD Insurance, Member of the Sharia Supervisory Board of PT Pegadaian (Persero), Lecturer at UIN Jakarta (2004-present). Katib of Syuriah PBNU, Chairman of the Shariah Committee of WHFC, Caretaker of the Al-Nahdlah Islamic Boarding School, Depok, West Java (2006-present).

Affiliated Relationship
He concurrently serves as Chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI) for Fatwa, Deputy Secretary of the Board of Stewardship of the National Sharia Council of MUI, Deputy for Youth Development of the Ministry of Youth and Sports, Chairman of the DPS of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Chairman of the DPS at PT FWD Insurance. Member of the DPS of PT Pegadaian (Persero), Lecturer at UIN Jakarta (2004-present), and Caretaker of the Al-Nahdlah Islamic Boarding School, Depok, West Java (2006-present), Chairman of the PP of the Sharia Economic Community (MES), and Chairman of the MPP ICMI Youth Coordination.
Affiliated Relationship
He has no affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, fellow member of the Sharia Supervisory Board, and with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
He has no share ownership in Bank Aladin Syariah.



Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Masa Jabatan: 21 Juni 2023-RUPS Tahunan 2026 (Periode Jabatan Kedua)
Term of Office: June 21, 2023 - Annual GMS 2026 (Second Term of Office)

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. Beliau diangkat kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan
- Magister Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia, Jakarta (2007).
- Sarjana Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Aqidah (IAIA), Jakarta (2003).

Riwayat Pekerjaan
Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), Ketua Dewan Penasihat Syariah BP Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Indomobil Finance Syariah.

Sebelum bergabung dengan PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau berkiprah sebagai Sekretaris Pribadi di Sekretariat Wakil Presiden (2019-2024), Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia (2017-sekarang), Dewan Pengawas Syariah di PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), (2016-sekarang), Wakil Sekjen MUI (2015-sekarang), Wakil Sekretaris BPH di DSN-MUI (2015-sekarang), *Katib Syuriah* di PBNU (2015-sekarang), Dewan Pengawas Syariah di PT Indomobil Finance Syariah (2013-sekarang).

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) (2024-sekarang), Ketua Dewan Penasihat Syariah BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia (2017-sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), (2016-sekarang), Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Indomobil Finance Syariah (2013-sekarang), Wakil Sekjen MUI (2015-sekarang), Wakil Sekretaris BPH di DSN-MUI (2015-sekarang), dan Katib Syuriah di PBNU (2015-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Age 50 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
Appointed as Member of Sharia Supervisory Board based on the resolution of the Circular GMS 2020 with the minutes of the Notary Deed No. 149 dated May 28, 2020. He was reappointed as Member of the Sharia Supervisory Board for the second time based on the resolution of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023.

Educational Background
- Master of Islamic Economics and Finance, University of Indonesia, Jakarta (2007).
- Bachelor of Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Aqidah (IAIA), Jakarta (2003).

Employment History
Apart from serving as Member of the Company's Sharia Supervisory Board, currently he also serves as Executive Director of the National Committee for Sharia Finance and Economy (KNEKS), Chairman of the Sharia Advisory Board of BP Tapera (People's Housing Savings), Chairman of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia, Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), and Member of the Sharia Supervisory Board of PT Indomobil Finance Syariah.

Prior to joining PT Bank Aladin Syariah Tbk, he served as Personal Secretary at the Vice President's Secretariat (2019-2024), Sharia Supervisory Board at Bank Muamalat Indonesia (2017-present), Sharia Supervisory Board at PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), (2016-present), Deputy Secretary General of MUI (2015-present), Deputy Secretary of BPH at DSN-MUI (2015-present), Katib Syuriah at PBNU (2015-present), Sharia Supervisory Board at PT Indomobil Finance Syariah (2013-present).

Information on Concurrent Positions
He holds concurrent positions as Executive Director of the National Committee for Sharia Economics and Finance (KNEKS) (2024-present), Chairman of the Sharia Advisory Board of BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Chairman of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia (2017-present), Chairman of the Sharia Supervisory Board at PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah), (2016-present), Member of the Sharia Supervisory Board at PT Indomobil Finance Syariah (2013-present), Deputy Secretary General of MUI (2015-present), Deputy Secretary of BPH at DSN-MUI (2015-present), and Katib Syuriah at PBNU (2015-present).

Affiliated Relationship
He has no affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, fellow member of the Sharia Supervisory Board, and with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
He has no share ownership in Bank Aladin Syariah.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Sepanjang tahun 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah, namun terdapat pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatannya, sebagaimana tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 26 Juni 2024.

INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBERS AND REASONS FOR THE CHANGES

Throughout 2024 until this Annual Report was signed, there were no changes to the composition of the Sharia Supervisory Board, but there was a reappointment of the Sharia Supervisory Board whose term of office had expired, as stated in the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 26, 2024.



Profil Direksi
Board of Directors' Profile



Koko Tjatur Rachmadi
Presiden Direktur
President Director

Masa Jabatan: 26 Juni 2024-RUPS Tahunan 2027 (Periode Jabatan Pertama)
Term of Office: June 26, 2024 - Annual General Meeting of Shareholders 2027 (First Term of Office)

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Presiden Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2024 dengan berita acara dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-18/PB.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Matematika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995)

Riwayat Pekerjaan
Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau memiliki pengalaman berkarir sebagai CEO PT Bank KB Bukopin Syariah (Maret 2023 – Juli 2024), Business Director PT Bank BJB Syariah (Desember 2021 – Maret 2023), Executive Vice President – Head of Sharia Business Unit PT Bank OCBC NISP Tbk (Februari 2006 – October 2021), serta posisi-posisi strategis lainnya di industri perbankan Indonesia.

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di bank/perusahaan/lembaga lain ataupun di Entitas Anak. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Age 54 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
Has been serving as President Director for the first time based on the resolution of the GMS dated June 26, 2024 with the minutes in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024.

Fit and Proper Test
Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Decree of the Board of Commissioners Member of OJK No. KEPR-18/PB.02/2024 dated August 23, 2024.

Educational Background
Bachelor of Mathematics, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1995)

Employment History
Prior to serving as President Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he had career experience as CEO of PT Bank KB Bukopin Syariah (March 2023 – July 2024), Business Director of PT Bank BJB Syariah (December 2021 – March 2023), Executive Vice President – Head of Sharia Business Unit of PT Bank OCBC NISP Tbk (February 2006 – October 2021), as well as other strategic positions in the Indonesian banking industry.

Information on Concurrent Positions
He has no concurrent positions in other banks/companies/institutions or in Subsidiaries. In Bank Aladin Syariah, he holds concurrent positions as Chairman of the Risk Management Committee, Assets & Liabilities Committee (ALCO), Information Technology Steering Committee, Financing Committee, and Sustainability Committee.

Affiliated Relationship
She has no affiliated relationship with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
He has no share ownership in Bank Aladin Syariah.



Firdila Sari

Direktur
Director

Masa Jabatan: 26 Juni 2024-RUPS Tahunan 2027 (Periode Jabatan Kedua)
Term of Office: June 26, 2024 - Annual General Meeting of Shareholders 2027 (Second Term of Office)

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 39 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 7 April 2021 yang telah diaktakan melalui Akta No. 11 tanggal 7 April 2021. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024,

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-167/D.03/2021 tanggal 11 November 2021.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta (2007).

Riwayat Pekerjaan
Sebelum bergabung dengan Bank Aladin Syariah, beliau berkarir sebagai Manager, Product Management- Global Payments & Cash Management (PCM) di PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012), Senior Manager, Office of CEO di PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012-2013), Senior Manager, Business Development, Product, & Content Management di PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015), Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017), Vice President, Head of Mobile Products di PT Bank Commonwealth (2017-2018), Vice President, Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) dan Digital Banking Group Head di PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021).

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai anggota komite di bawah Direksi, yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko (RMC), dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Aged 39 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
Appointed as Director based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) on April 7, 2021, which was notarized through Deed No. 11 dated April 7, 2021. She was reappointed as Director at the Annual GMS on June 26, 2024 which was notarized through the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024,

Fit and Proper Test
Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-167/D.03/2021 dated November 11, 2021.

Educational Background
Bachelor of Economics, Universitas Indonesia, (2007).

Employment History
Prior to joining Bank Aladin Syariah, she had a career as Manager, Product Management- Global Payments & Cash Management (PCM) at PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012), Senior Manager, Office of CEO at PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012 -2013), Senior Manager, Business Development, Product & Content Management at PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015), Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017), Vice President, Head of Mobile Products at PT Bank Commonwealth (2017-2018), Vice President, Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) and Digital Banking Group Head at PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021).

Information on Concurrent Positions
She has no concurrent positions in other companies or institutions. Within Bank Aladin Syariah, she serves concurrently as member of the committees under the Board of Directors namely Information Technology Steering Committee; Assets and Liabilities Committee (ALCO); Risk Management Committee (RMC), and Sustainability Committee.

Affiliated Relationship
She has no affiliated relationship with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
She has no share ownership in Bank Aladin Syariah.



Jo, Anula Putra

Direktur
Director

Masa Jabatan: 26 Juni 2024-RUPS Tahunan 2027 (Periode Jabatan Pertama)
Term of Office: June 26, 2024 - Annual General Meeting of Shareholders 2027 (First Term of Office)

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 57 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia OJK OJK Nomor KEPR-5/PB.02/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Presiden Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 yang telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris No 3 tanggal 1 Juli 2024.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Diponegoro Semarang (1994)
- Magister Manajemen Keuangan - Universitas Tarumanegara Jakarta (2024)

Riwayat Pekerjaan
Sebelum menjabat sebagai Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau menjabat sebagai Account Officer PT Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Semarang pada (1995 – 2004), Manager PT Sinarmas Multifinance Cabang Solo (2004 – 2005). Beliau juga pernah bergabung dengan PT Bank Sinarmas Tbk (Bank Sinarmas) selama kurang lebih 18 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Credit Management Group Head.

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai anggota komite di bawah Direksi, yaitu Komite Pembiayaan, Komite Assets & Liabilities Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko (RMC), dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Aged 57 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Fit and Proper Test
Passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Decree of the Head of the Department of Licensing and Banking Crisis Management of Confidential OJK No. KEPR-5/PB.02/2024 dated June 11, 2024.

Appointment History
Has been serving as Director for the first time based on the resolution of the Annual GMS dated June 26, 2024 which was notarized in the Notarial Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024.

Educational Background
- Bachelor of Economics Management, Diponegoro University Semarang (1994)
- Master of Financial Management - Tarumanegara University Jakarta (2024)

Employment History
Prior to serving as Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he served as Account Officer of PT Bank Internasional Indonesia (BII) Semarang Branch (1995 - 2004), Manager of PT Sinarmas Multifinance Solo Branch (2004 - 2005). He also joined PT Bank Sinarmas Tbk (Bank Sinarmas) for approximately 18 years with his last position as Credit Management Group Head.

Information on Concurrent Positions
He has no concurrent positions in other companies or institutions. Within Bank Aladin Syariah, she serves concurrently as member of the committees under the Board of Directors, namely Financing Committee, Assets & Liabilities Committee (ALCO), Risk Management Committee (RMC), and Sustainability Committee.

Affiliated Relationship
She has no affiliated relationship with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
He has no share ownership in Bank Aladin Syariah.

Baiq Nadea Dzurriatin

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Masa Jabatan: 21 Juni 2023 –RUPS Tahunan 2026 (Periode Jabatan Kedua)
Term of Office: June 21, 2023 – Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Second Term of Office)



Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler tanggal 31 Januari 2020 yang telah diaktakan melalui Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2020. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010.

Riwayat Pendidikan
- S2 – Master Bidang Hukum (LLM) Jurusan International Comparative Law dari Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, Amerika Serikat (1999).
- S1 – Sarjana Hukum, Universitas Airlangga, (1993).

Riwayat Pekerjaan
Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di PT Maybank Syariah Indonesia (Oktober 2010 - Januari 2020). Karir awal beliau adalah Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 17-2, Direktorat Hukum di Bank Indonesia (Juni 1995 - Juni 2001). Kemudian menjabat Head of Compliance Department di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta (September 2001-Juli 2005), Direktur Kepatuhan di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta (Juli 2005-November 2008), Direktur Kepatuhan di PT Bank Maybank Indocorp (Febuari 2009-Oktober 2010).

Informasi Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai anggota komite di bawah direksi, yaitu Komite Sanksi, Komite Assets & Liabilities Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah
Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Personal Data
Indonesian citizen
Aged 54 as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Appointment History
Appointed as Compliance Director based on the resolution of the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) dated January 31, 2020, which was notarized through Deed No. 19 dated January 31, 2020. She was then reappointed as Compliance Director based on the resolution of the Annual GMS dated June 21, 2023, which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023.

Fit and Proper Test
Passed the fit and proper test by Bank Indonesia (BI) as stated in Bank Indonesia Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010.

Educational Background
- Master of Law degree (LLM) majoring in International Comparative Law from Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, USA (1999)
- Bachelor of Law degree, Universitas Airlangga, (1993)

Employment History
She once served as Compliance Director at PT Maybank Syariah Indonesia (October 2010 - January 2020). She began her career as a Junior Officer (PCPM) Batch 17-2, Legal Directorate at Bank Indonesia (June 1995-June 2001). Then served as Head of Compliance Department at Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Jakarta (September 2001-July 2005), Compliance Director at Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Jakarta (July 2005-November 2008), Compliance Director at PT Bank Maybank Indocorp (February 2009 - October 2010).

Information on Concurrent Positions
She has no concurrent positions in other companies or institutions; while within Bank Aladin Syariah, she concurrently serves as member of committees under the Board of Directors, namely Assets & Liabilities Committee (ALCO); Risk Management Committee (RMC), Information Technology Steering Committee, and Sustainability Committee.

Affiliated Relationship
She has no affiliated relationship with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and with the majority and controlling shareholders either directly or indirectly.

Ownership of Bank Aladin Syariah Shares
She has no share ownership in Bank Aladin Syariah.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, Komposisi anggota Direksi Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

During 2024, there were changes in the composition of the Company's Board of Directors according to the Company's needs as explained below.



KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN 2024

Komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan 2024 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur, 2 (dua) orang Direktur, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS PRIOR TO THE ANNUAL GMS 2024

The composition of the Board of Directors prior to the Annual GMS 2024 was 4 (four) members consisting of 1 (one) President Director, 2 (two) Directors, and 1 (one) Compliance Director. The composition and basis for appointments of the Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2024
Table of Composition and Basis of Appointment of the Board of Directors Before the Annual GMS 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur President Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 7 April 2021 Resolution of the Annual GMS dated April 7, 2021	Penutupan RUPS tahun ketiga Closing of the GMS of the third year
Firdila Sari	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 7 April 2021 Resolution of the Annual GMS dated April 7, 2021	Penutupan RUPS tahun ketiga Closing of the GMS of the third year
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 Resolution of the Annual GMS dated June 21, 2023	Penutupan RUPS tahun ketiga Closing of the GMS of the third year
Mayang Ekaputri	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Februari 2022 Resolution of the Annual GMS dated February 10, 2022	Penutupan RUPS tahun ketiga Closing of the GMS of the third year

Tabel Keberagaman Manajemen dan Independensi
Table of Management Diversity and Independence

Tahun Year	Tipe Manajemen Perusahaan Type of Company Management	Jumlah Total Number	Laki - Laki Male	Perempuan Female	Pihak Independen Independent Party
2024	Direksi/Board of Directors	4	2	2	4
2023	Direksi/Board of Directors	4	2	2	4
2024	Komisaris/Board of Commissioners	3	2	1	2
2023	Komisaris/Board of Commissioners	3	2	1	2
2024	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	2	2	-	2
2023	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	2	2	-	2

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN 2024

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi berdasarkan RUPS Tahunan 26 Juni 2024. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. RUPS Tahunan 2024 memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI dari Presiden Direktur;
2. Menerima pengunduran diri nyonya MAYANG EKAPUTRI dari Direktur;
3. Mengangkat tuan KOKO TJATUR RACHMADI sebagai Presiden Direktur Perseroan;
4. Mengangkat tuan JO ANULA PUTRA sebagai Direktur Perseroan.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AFTER THE ANNUAL GMS 2024

During 2024, there were changes in the composition of the Board of Directors based on the Annual GMS on June 26, 2024. Changes in the composition of the Board of Directors were made based on the needs of the Company. The Annual GMS 2024 decided:

1. To accept the resignation of Mr. DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI as President Director;
2. To accept the resignation of Mrs. MAYANG EKAPUTRI as Director;
3. To appoint Mr. KOKO TJATUR RACHMADI as President Director of the Company;
4. To appoint Mr. JO ANULA PUTRA as Director of the Company

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan 2024

Table of Composition and Basis of Appointment of the Board of Directors After the Annual GMS 2024

Nama Name	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 Resolution of the Annual GMS dated June 26, 2024	Hingga Penutupan RUPS tahun ketiga Until the Closing of the GMS of the third year
Firdila Sari	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 7 April 2021 Resolution of the Annual GMS dated April 7, 2021	Hingga Penutupan RUPS tahun ketiga Until the Closing of the GMS of the third year
Jo, Anula Putra	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 Resolution of the Annual GMS dated June 26, 2024	Hingga Penutupan RUPS tahun ketiga Until the Closing of the GMS of the third year
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 Resolution of the Annual GMS dated June 26, 2024	Hingga Penutupan RUPS tahun ketiga Until the Closing of the GMS of the third year

*) Untuk pengangkatan Bapak Koko Tjatur Rachmadi sebagai Presiden Direktur Perseroan akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Surat Keputusan OJK Nomor KEPR-18/PB.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
The appointment of Mr. Koko Tjatur Rachmadi as President Director of the Company will be effective after receiving approval from the OJK for the fit and proper test. Declared to have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in the OJK Decree No. KEPR-18/PB.02/2024 dated August 23, 2024.

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Demographics and Competence Development

DEMOGRAFI PEGAWAI BANK

Pegawai Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2024, adalah sebanyak 290 pegawai, mengalami penurunan sebesar 0,34% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 291 orang.

BANK EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

The number of Bank Aladin Syariah employees as of December 31, 2024 was 290 employees, a decrease of 0.34% compared to 291 employees in the previous year.

Pergerakan Jumlah Pegawai 2020-2024 (orang)

Total Employee Turnover 2020-2024 (persons)

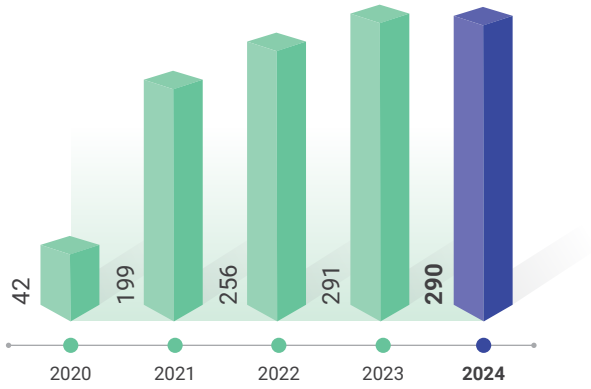

Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi (orang)

Employee Demographics by Organizational Level (persons)

Level Organisasi Organizational Level	2024				2023				
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
Director	2	2	4	1,38%	1	3	4	1,37%	↑
Upper Manager (VP, SVP/Group Head)	19	12	31	10,69%	26	15	41	14,09%	↓
Middle Manager (Sr. Manager s.d AVP)	66	27	93	32,07%	68	26	94	32,30%	↓
Junior Manager (Manager)	62	32	94	32,41%	67	26	93	31,96%	↑
Senior Officer (Sr. Staff)	9	13	22	7,59%	7	13	20	6,87%	↑
Officer (Staff)	21	25	46	15,86%	17	22	39	13,40%	↑
Jumlah Total	179	111	290	100,00%	186	105	291	100,00%	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

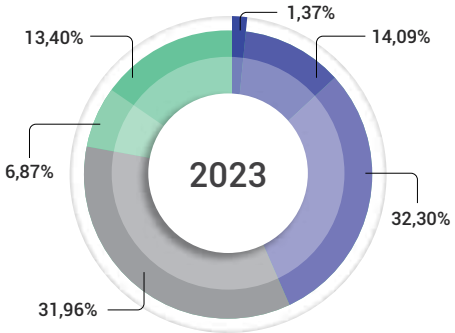

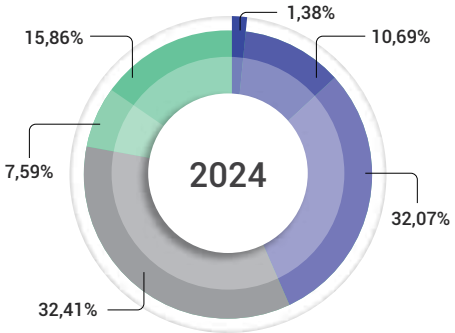

Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Employee Demographics by Education Level (persons)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024				2023				
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
Pasca Sarjana Postgraduate	26	10	36	12,41%	26	12	38	13,06%	↓
Strata 1 Bachelor Degree	136	95	231	79,66%	146	87	233	80,07%	↓
Diploma	8	2	10	3,45%	7	2	9	3,09%	↑
SMA dan Sederajat High School and Equivalent	9	4	13	4,48%	7	4	11	3,78%	↑
Jumlah Total	179	111	290	100%	186	105	291	100,00%	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Employee Demographics by Education Level (person)

B. Kinerja Sosial (Social Performance)/B. Social Performance

S-01 Kesetaraan Gender/ S-01 Gender Equality

Level Jabatan Position Level	2024				2023			
	Laki-Laki Male		Perempuan Female		Laki-Laki Male		Perempuan Female	
	Jumlah Pegawai Total Employees	Presentasi Pegawai Employee Percentage	Jumlah Pegawai Total Employees	Presentasi Pegawai Employee Percentage	Jumlah Pegawai Total Employees	Presentasi Pegawai Employee Percentage	Jumlah Pegawai Total Employees	Presentasi Pegawai Employee Percentage
Entry-level	30	10,34%	38	13,10%	24	8,25%	35	12,03%
Mid-level	119	41,03%	53	18,28%	125	42,96%	46	15,81%
Senior-level	28	9,66%	18	6,21%	36	12,37%	21	7,22%
Executive-level	2	0,69%	2	0,69%	1	0,34%	3	1,03%
Total Pegawai Total Employees	179	61,72%	111	38,28%	186	63,92%	105	36,08%

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur
S-02 Number of employee levels held by men and women based on age group

Rentang Usia (Tahun) Age Range (Years)	2024									2023								Jumlah Pegawai Total Employees
	Level Jabatan Position Level								Jumlah Pegawai Total Employees	Level Jabatan Position Level								
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level			Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	L M	P F	L M	P F	L M	P F	L M	P F		L M	P F	L M	P F	L M	P F	L M	P F	
18-25	7	8	4	0	0	0	0	0	19	3	7	8	1	0	0	0	0	19
25-35	19	23	66	33	8	3	0	0	152	16	26	74	33	11	6	1	0	167
35-45	4	7	43	19	16	10	0	1	100	5	2	37	12	21	9	0	2	88
45-55	0	0	6	1	2	4	1	1	15	0	0	6	0	3	5	0	1	15
>55	0	0	0	0	2	1	1	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Total Pegawai Total Employees	30	38	119	53	28	18	2	2	290	24	35	125	46	36	21	1	3	291

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai
S-03 Employee Turnover Rate

	2024		2023	
	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) Total Employees (in the reporting year)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan) Employee Percentage (in the reporting year)	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan Total Employees (in the reporting year)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan Employee Percentage (in the reporting year)
Jumlah Pegawai yang Mengundurkan Diri/Pemutusan Hubungan Kerja Number of Employees Who Resigned/ Employment Termination	66	22,76%	49	16,84%
Jumlah Pegawai Baru/Pengganti Number of New/Replacement Employees	65	22,41%	85	29,21%

S-04 Jumlah Pegawai Sementara

	2024		2023	
	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) Total Employees (in the reporting year)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan) Employee Percentage (in the reporting year)	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan Total Employees (in the reporting year)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan Employee Percentage (in the reporting year)
Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan	61	21%	69	24%

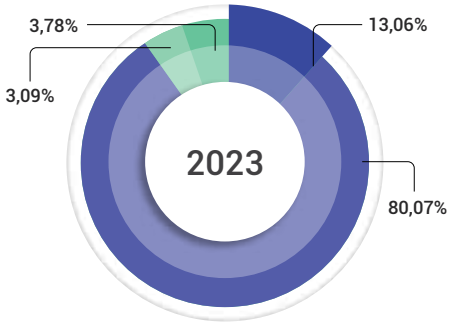

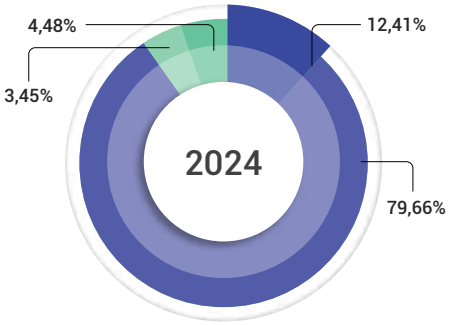

Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Employee Demographics by Employment Status (person)

Status Kepegawaian Employment Status	2024				2023				
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
Pegawai Tetap/Permanent Employee	172	105	277	95,52%	181	98	279	95,88%	↓
Pegawai Tidak Tetap/Contract Employee	7	6	13	4,48%	5	7	12	4,12%	↑
Jumlah Total	179	111	290	100,00%	186	105	291	100,00%	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

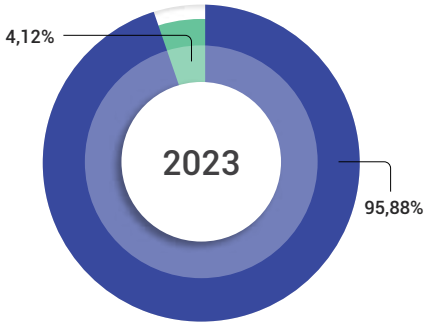

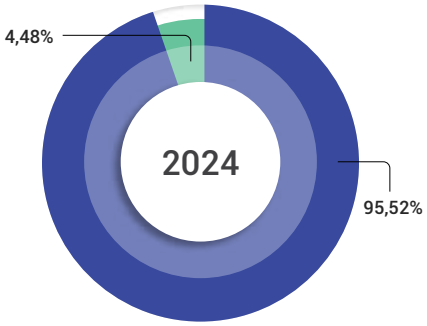

Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Employee Demographics by Age Range (person)

Rentang Usia Age Range	2024				2023				
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
>50 tahun/years	4	7	11	3,79%	3	6	9	3,09%	↑
41 s/d 50 tahun/years	23	11	34	11,72%	28	15	43	14,78%	↓
21 s/d 40 tahun/years	152	93	245	84,48%	155	84	239	82,13%	↑
18 s/d 20 tahun/years	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-
Jumlah Total	179	111	290	100%	186	105	291	100,00%	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

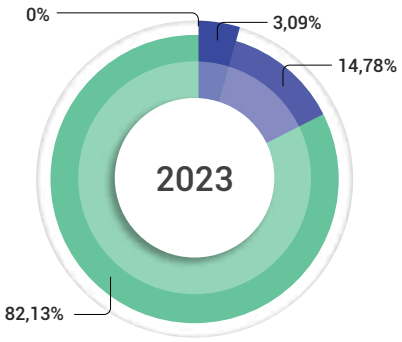

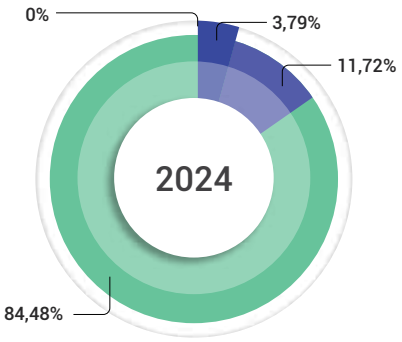

Demografi Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographics by Gender (person)

Gender/Jenis Kelamin Gender	2024		2023		
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
Laki-laki/Male	179	61,72%	186	63,92%	↓
Perempuan/Female	111	38,28%	105	36,08%	↑
Jumlah Total	290	100,00%	291	100,00%	↓

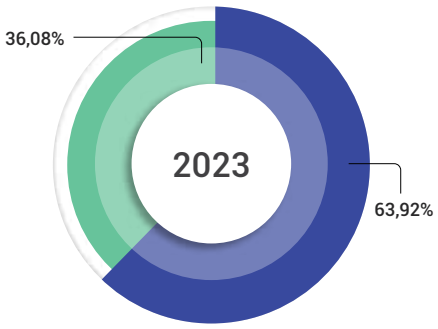

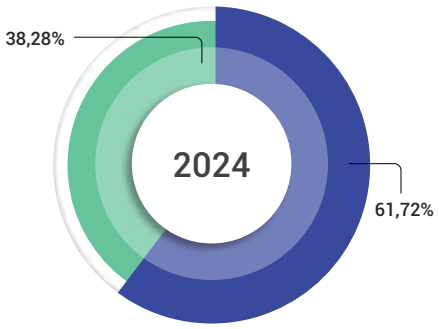

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Sebagai langkah konkret untuk membangun tim yang berkualitas dan profesional dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung dalam dunia bisnis yang dinamis, Bank Aladin Syariah secara konsisten melaksanakan program pendidikan dan pengembangan pegawai. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi perkembangan industri serta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja Bank.

Bank Aladin Syariah memahami bahwa Sumber Daya Insani (SDI) yang kompeten adalah elemen utama dalam mewujudkan visi dan misi Bank. Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pegawai adalah dengan memberikan akses pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Bank Aladin Syariah secara berkesinambungan mendorong semua Insan Bank di seluruh unit kerja untuk mengikuti program pengembangan kompetensi agar selalu siap menghadapi tantangan yang akan datang dan mendukung pertumbuhan Bank di masa depan.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

As a concrete step to build a quality and professional team in facing ongoing changes in the dynamic business world, Bank Aladin Syariah consistently implements employee education and development programs. This aims to increase competitiveness in facing industrial developments and to increase the Bank's work efficiency and productivity.

Bank Aladin Syariah understands that competent Human Resources (HR) are the key element in realizing the Bank's vision and mission. One way to improve and develop employee competency is by providing access to quality training and education. Every employee is given the same opportunity to develop their abilities according to their needs. Bank Aladin Syariah continuously encourages all Bank Personnel in all work units to participate in competency development programs so that they are always ready to face future challenges and support the Bank's growth in the future.

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Director	External	Climate Risk Management System Training	Mengetahui kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Understand the integrated framework that includes aspects of governance, strategy, risk management, and disclosure to assess the resilience of the Bank's business model and strategy in facing climate change in the short, medium and long term.	1	25%	4%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Director	External	Otoritas Jasa Keuangan : Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri Financial Services Authority: 2024 Annual Meeting of Sharia Banking: Acceleration of the Development of Sharia Banking to Build the Country	Meningkatkan pemahaman bersama mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Increase shared understanding of the potential and challenges faced by Sharia banking in Indonesia, and encouraging collaboration between various parties, including banking institutions, government, academics and the community.	1	25%	50%
Director	External	Pemahaman Konsep dan Implementasi Bagi Hasil Training Understanding the Concept and Implementation of Profit Sharing Training	Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan mekanisme bagi hasil dalam konteks keuangan dan perbankan syariah. Provide an in-depth understanding of the principles and mechanisms of profit sharing in the context of Sharia finance and banking.	1	25%	33%
Director	External	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Banking Risk Management Recertification Provision Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensure that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	1	25%	100%
Director	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Provision Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensure that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations	2	50%	100%
Director	External	Pembekalan Sertifikasi Tresuri Jenjang 7 Treasury Certification Provision Level 7	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	25%	100%
Director	External	Program Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Alignment Program Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensure that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	2	50%	100%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Director	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Exam Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensure that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	2	50%	100%
Director	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Banking Risk Management Recertification Exam Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensure that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	1	25%	50%
Upper Management	External	Audit Aspek Syariah atas Pembiayaan Audit of Sharia Aspects of Financing	Memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang bagaimana melaksanakan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Provide participants with an in-depth understanding of how to carry out audits in accordance with sharia principles on financing provided by sharia financial institutions.	2	6%	33%
Upper Management	External	Basic Sharia Banking (Batch 14) Basic Sharia Banking (Batch 14)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Islamic banking operates in accordance with Islamic law.	1	3%	8%
Upper Management	External	Basic Sharia Banking (Batch 15) Basic Sharia Banking (Batch 15)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Islamic banking operates in accordance with Islamic law.	2	6%	14%
Upper Management	External	CAFM Certification & CAFM Examination CAFM Certification & CAFM Examination	Mempersiapkan peserta agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola fasilitas (facility management) secara profesional dan sesuai dengan standar industri. Prepae participants to have the knowledge and skills needed to manage facilities (facility management) professionally and in accordance with industry standards.	1	3%	100%
Upper Management	External	Climate Risk Management System Training Climate Risk Management System Training	Mengetahui kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Understand the integrated framework that includes aspects of governance, strategy, risk management, and disclosure to assess the resilience of the bank's business model and strategy in facing climate change in the short, medium and long term.	11	34%	39%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Corporate Culture Training : The Catalyst Effect Corporate Culture Training : The Catalyst Effect	Membantu organisasi dalam mengembangkan dan memperkuat budaya perusahaan yang positif, produktif, dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Assist organizations in developing and strengthening a positive, productive corporate culture that supports the Company's strategic objectives.	5	16%	20%
Upper Management	External	Disaster Recovery Planning Disaster Recovery Planning	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam merencanakan dan mempersiapkan strategi pemulihan bencana yang efektif untuk menjaga kelangsungan operasional organisasi dalam menghadapi kejadian tak terduga, seperti bencana alam, serangan siber, atau kegagalan sistem kritis. Provide participants with knowledge and skills in planning and preparing effective disaster recovery strategies to maintain organizational operational continuity in the face of unexpected events, such as natural disasters, cyber attacks, or critical system failures.	1	3%	100%
Upper Management	External	Financial Risk Manager Level 1 Financial Risk Manager Level 1	Memberikan pemahaman dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola risiko keuangan dalam suatu organisasi. Provide the basic understanding and skills necessary to manage financial risk within an organization.	1	3%	100%
Upper Management	External	Idecision and Credit Scoring Development Training Idecision and Credit Scoring Development Training	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem penilaian kredit (credit scoring) yang efektif, serta memahami bagaimana membuat keputusan kredit yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko dalam pemberian kredit. Provide participants with an understanding and skills in designing, developing, and managing an effective credit scoring system, as well as understanding how to make data-based loan decisions to increase efficiency and reduce risk in loan disbursemenet.	3	9%	27%
Upper Management	External	Lead Auditor Training Course Lead Auditor Training Course	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta untuk menjadi auditor internal atau eksternal yang kompeten dalam mengelola dan melakukan audit sistem manajemen, sesuai dengan standar internasional seperti ISO 9001 (manajemen kualitas), ISO 14001 (manajemen lingkungan), ISO 45001 (manajemen keselamatan dan kesehatan kerja), dan lainnya. Provide knowledge and skills to participants to become competent internal or external auditors in managing and conducting management system audits, in accordance with international standards such as ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), ISO 45001 (occupational safety and health management), and others.	1	3%	100%
Upper Management	External	Otoritas Jasa Keuangan : International Research Forum Otoritas Jasa Keuangan : International Research Forum	Memperkuat kerja sama internasional dalam riset keuangan, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam industri, serta mendukung kebijakan yang lebih baik melalui data dan analisis berbasis riset. Strengthen international cooperation in financial research, identify challenges and opportunities in the industry, and support better policies through research-based data and analysis.	1	3%	100%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Pemahaman Dasar Perbankan Syariah Basic Understanding of Sharia Banking	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	2	6%	29%
Upper Management	External	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko J5 Batch Desember 2024 Risk Management Provision and Certification J5 Batch December 2024	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	6	19%	25%
Upper Management	External	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko J7 Batch Desember 2024 Risk Management Provision and Certification J7 Batch December 2024	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	3%	100%
Upper Management	External	Pembekalan "Fit and Proper Test"" Provision of "Fit and Proper Test"	Mengevaluasi kompetensi, integritas, serta kelayakan calon direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Evaluate the competence, integrity, and suitability of prospective directors in carrying out their duties and responsibilities in accordance with applicable regulations and policies.	1	3%	100%
Upper Management	External	Pembekalan Pengkinian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5 Banking Risk Management Certification Update Provision Level 5	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	6	19%	100%
Upper Management	External	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 Banking Risk Management Recertification Provision Level 6	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	3%	100%
Upper Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	3%	6%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	5	16%	23%
Upper Management	External	Pembekalan Sertifikasi Tresuri Jenjang 5 Treasury Certification Provision Level 5	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	3%	100%
Upper Management	External	Penerapan UU PDP di Bank Umum Implementation of PDP Law in Commercial Banks	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	3%	50%
Upper Management	External	Penilaian dan Evaluasi Proyek Project Assessment and Evaluation	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mengevaluasi dan menilai kelayakan serta potensi keberhasilan suatu proyek, khususnya proyek yang akan dibiayai atau didanai oleh bank. Provide knowledge and skills to participants in evaluating and assessing the feasibility and potential success of a project, especially projects that will be financed or funded by banks.	3	9%	20%
Upper Management	External	Perpanjangan Sertifikat Treasury Dealer Treasury Dealer Certificate Extension	Memastikan bahwa para treasury dealer tetap memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola kegiatan treasury, seperti transaksi valuta asing, pengelolaan likuiditas, dan risiko keuangan, dengan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ensure that treasury dealers maintain the necessary competencies to manage treasury activities, such as foreign exchange transactions, liquidity management, and financial risks, effectively and in accordance with applicable regulations.	1	3%	100%
Upper Management	External	Personal Data Protection Personal Data Protection	Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, serta memastikan bahwa individu atau organisasi memahami dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku. Provide a deep understanding of the importance of personal data protection, and ensure that individuals or organizations understand and comply with applicable personal data protection regulations.	12	38%	24%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Recovery Plan and Resolution Plan Recovery Plan and Resolution Plan	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola rencana pemulihan (recovery plan) dan rencana resolusi (resolution plan) bagi institusi keuangan atau organisasi, guna memastikan kelangsungan operasional dalam menghadapi krisis atau kegagalan finansial yang signifikan. Provide participants with an understanding and skills in designing, implementing, and managing recovery plans and resolution plans for financial institutions or organizations, to ensure operational continuity in the face of a significant financial crisis or failure.	11	34%	37%
Upper Management	External	Refreshment Anti Fraud 25 Sept 2024 Anti Fraud Refreshment September 25, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provie knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent acts that may occur within an organization.	1	3%	8%
Upper Management	External	Refreshment Anti Fraud 9 Okt 2024 Anti Fraud Refreshment October 9, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent acts that may occur within an organization.	1	3%	100%
Upper Management	External	Refreshment Anti Fraud Training	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi.	5	16%	12%
Upper Management	External	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Refreshment Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	2	6%	20%
Upper Management	External	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Refreshment Level 5	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	9	28%	82%
Upper Management	External	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Refreshment Level 6	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	3%	50%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Refreshment Treasury Dealer Level Advance Advance Level Dealer Treasury Refreshment	Memastikan bahwa para treasury dealer tetap memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola kegiatan treasury, seperti transaksi valuta asing, pengelolaan likuiditas, dan risiko keuangan, dengan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ensure that treasury dealers maintain the necessary competencies to manage treasury activities, such as foreign exchange transactions, liquidity management, and financial risks, effectively and in accordance with applicable regulations.	1	3%	100%
Upper Management	External	Public Program : Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 Public Program : Banking Risk Management Recertification Level 6	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk	1	3%	100%
Upper Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk	2	6%	17%
Upper Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Exam Level 5	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk	9	28%	90%
Upper Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Exam Level 6	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk	1	3%	50%
Upper Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko J6 Batch Oktober 2024 Risk Management Certification Exam J6 Batch October 2024	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk	1	3%	50%
Upper Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk	2	6%	6%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Upper Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Banking Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk	5	16%	23%
Middle Management	External	Basic Sharia Banking (Batch 14) Basic Sharia Banking (Batch 14)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	3	3%	25%
Middle Management	External	Basic Sharia Banking (Batch 15) Basic Sharia Banking (Batch 15)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	5	5%	36%
Middle Management	External	Basic Sharia Banking Batch Oktober 2024 Basic Sharia Banking Batch October 2024	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	2	2%	12%
Middle Management	External	Breakthrough Communication and Human Relation Breakthrough in Communication and Human Relation	Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dan hubungan manusia di lingkungan kerja atau organisasi, agar tercipta interaksi yang lebih efektif, harmonis, dan produktif. Improve interpersonal communication and human relations skills in the work environment or organization, to create more effective, harmonious and productive interactions.	19	21%	83%
Middle Management	External	Climate Risk Management System Training Climate Risk Management System Training	Mengetahui kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Understand the integrated framework that includes aspects of governance, strategy, risk management and disclosure to assess the resilience of the bank's business model and strategy in facing climate change in the short, medium and long term.	8	9%	29%
Middle Management	External	Communication & Business Presentation Communication & Business Presentation	Meningkatkan keterampilan peserta dalam berkomunikasi secara efektif serta menyampaikan presentasi bisnis yang menarik dan persuasif. Improve participants' skills in communicating effectively and delivering interesting and persuasive business presentations.	1	1%	6%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Corporate Culture Training : The Catalyst Effect Corporate Culture Training : The Catalyst Effect	Membantu organisasi dalam mengembangkan dan memperkuat budaya perusahaan yang positif, produktif, dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Assist organizations in developing and strengthening a positive, productive corporate culture that supports the company's strategic objectives.	9	10%	36%
Middle Management	External	Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI The Basis of Islamic Muamalah and the DSN-MUI Fatwa	Memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip muamalah maliyah (transaksi keuangan dalam perspektif syariah) dan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Provide a deep understanding of the principles of muamalah maliyah (financial transactions from a sharia perspective) and fatwas issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)	1	1%	100%
Middle Management	External	Data Analytic Course Data Analytic Course	Memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada peserta dalam mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Provide participants with skills and knowledge in processing, analyzing, and interpreting data to make smarter, evidence-based decisions.	1	1%	100%
Middle Management	External	Enterprise Analytics Workshop Enterprise Analytics Workshop	Memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta untuk memanfaatkan analitik dalam skala perusahaan (enterprise) guna meningkatkan kinerja bisnis, pengambilan keputusan yang berbasis data, dan efisiensi operasional. Provide participants with the understanding and skills needed to leverage enterprise-scale analytics to improve business performance, data-driven decision making, and operational efficiency.	1	1%	100%
Middle Management	External	Idecision and Credit Scoring Development Training Idecision and Credit Scoring Development Training	Memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta untuk memanfaatkan analitik dalam skala perusahaan (enterprise) guna meningkatkan kinerja bisnis, pengambilan keputusan yang berbasis data, dan efisiensi operasional. Provide participants with the understanding and skills needed to leverage enterprise-scale analytics to improve business performance, data-driven decision making, and operational efficiency.	4	4%	36%
Middle Management	External	Modern IT Asset Management Modern IT Asset Management	Memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola aset teknologi informasi (TI) dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Provide participants with the knowledge and skills needed to manage information technology (IT) assets in a more effective, efficient and up-to-date manner.	1	1%	100%
Middle Management	External	Pemahaman Dasar Perbankan Syariah Basic Understanding of Sharia Banking	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provides a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	1	1%	14%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Pemahaman Konsep dan Implementasi Bagi Hasil Training Training on Understanding the Concept and Implementation of Profit Sharing	Memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan prinsip-prinsip dasar bagi hasil dalam sistem keuangan syariah, serta cara mengimplementasikan konsep tersebut dalam transaksi bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Provide knowledge and skills related to the basic principles of profit sharing in the Sharia financial system, as well as how to implement the concept in business transactions in accordance with Islamic law.	2	2%	67%
Middle Management	External	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko J5 Batch Desember 2024 Risk Management Provision and Certification J5 Batch December 2024	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	12	13%	50%
Middle Management	External	Pembekalan Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Certification Maintenance Provision Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	50%
Middle Management	External	Pembekalan Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Banking Risk Management Certification Maintenance Provision Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	100%
Middle Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko J4 Batch Agustus 2024 Risk Management Certification Provision J4 Batch August 2024	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	25%
Middle Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Provision Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	5	5%	45%
Middle Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	13	14%	76%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024
Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 2 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 2	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	7	8%	37%
Middle Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	8	9%	36%
Middle Management	External	Penerapan UU PDP di Bank Umum Implementation of PDP Law in Commercial Banks	Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta bagaimana penerapannya dalam konteks operasional dan bisnis di bank umum. Provide participants with a comprehensive understanding of the Personal Data Protection Act (PDP Act), as well as how it is applied in the operational and business context of commercial banks.	1	1%	50%
Middle Management	External	Penilaian dan Evaluasi Proyek Project Assessment and Evaluation	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mengevaluasi dan menilai kelayakan serta potensi keberhasilan suatu proyek, khususnya proyek yang akan dibiayai atau didanai oleh bank. Provide knowledge and skills to participants in evaluating and assessing the feasibility and potential success of a project, especially projects that will be financed or funded by banks.	3	3%	20%
Middle Management	External	Personal Data Protection Personal Data Protection	Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, serta memastikan bahwa individu atau organisasi memahami dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku. Provide a deep understanding of the importance of personal data protection, and ensures that individuals or organizations understand and comply with applicable personal data protection regulations.	20	22%	39%
Middle Management	External	Recovery Plan and Resolution Plan Recovery Plan and Resolution Plan	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola rencana pemulihan (recovery plan) dan rencana resolusi (resolution plan) bagi institusi keuangan atau organisasi, guna memastikan kelangsungan operasional dalam menghadapi krisis atau kegagalan finansial yang signifikan. Provide participants with an understanding and skills in designing, implementing, and managing recovery plans and resolution plans for financial institutions or organizations, to ensure operational continuity in the face of a significant financial crisis or failure.	10	11%	33%
Middle Management	External	Refreshment Anti Fraud 18 Des 2024 Anti Fraud Refreshment December 18, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent acts that may occur within an organization.	5	5%	38%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Refreshment Anti Fraud 22 Okt 2024 Anti Fraud Refreshment October 22, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent acts that may occur within an organization.	3	3%	50%
Middle Management	External	Refreshment Anti Fraud 25 Sept 2024 Anti Fraud Refreshment September 25, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent acts that may occur within an organization.	4	4%	31%
Middle Management	External	Refreshment Anti Fraud 9 Okt 2024 Anti Fraud Refreshment October 9, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent acts that may occur within an organization.	4	4%	31%
Middle Management	External	Refreshment Anti Fraud Training Anti Fraud Refreshment Training	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent acts that may occur within an organization.	16	18%	39%
Middle Management	External	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan	3	3%	30%
Middle Management	External	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Refreshment Level 5	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	2	2%	18%
Middle Management	External	Refreshment Treasury Dealer Level Intermediate Treasury Dealer Refreshment Intermediate Level	Memastikan bahwa para treasury dealer tetap memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola kegiatan treasury, seperti transaksi valuta asing, pengelolaan likuiditas, dan risiko keuangan, dengan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ensure that treasury dealers maintain the necessary competencies to manage treasury activities, such as foreign exchange transactions, liquidity management, and financial risks, effectively and in accordance with applicable regulations.	1	1%	100%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Serial Pendidikan PROPAMI Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran (WPPE-P) PROPAMI Education Series for Marketing Securities Trading Intermediary Representatives (WPPE-P)	Memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam kepada peserta terkait dengan peran dan tanggung jawab Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran, serta memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku di pasar modal Indonesia. Provide participants with in-depth knowledge, skills and understanding regarding the roles and responsibilities of Marketing Securities Trading Intermediary Representatives, and ensure that they are able to carry out their duties in accordance with the regulations applicable in the Indonesian capital market.	1	1%	100%
Middle Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	4	4%	33%
Middle Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Exam Level 5	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	10%
Middle Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Recertification Exam Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	50%
Middle Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Banking Risk Management Recertification Exam Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	100%
Middle Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	17	19%	50%
Middle Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	13	14%	87%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Middle Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 2 Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 2	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	7	8%	37%
Middle Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	8	9%	36%
Middle Management	External	Workshop QA QA Workshop	Memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh bank memenuhi standar kualitas yang tinggi, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Ensure that the products and services provided by the bank meet high quality standards, comply with applicable regulations, and can increase customer satisfaction.	2	2%	100%
Junior Management	External	APU-PPT & PPPSPM AML-CFT & PPPSPM	Memberikan peserta pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku terkait dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), baik pada level nasional maupun internasional, termasuk peran lembaga keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Provide participants with an in-depth understanding of applicable regulations related to Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT), both at the national and international levels, including the role of financial institutions in detecting and preventing money laundering and terrorism financing practices.	1	1%	100%
Junior Management	External	Audit Aspek Syariah atas Pembiayaan Audit of Sharia Aspect of Financing	Memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang bagaimana melaksanakan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Provide participants with an in-depth understanding of how to carry out audits in accordance with sharia principles on financing provided by sharia financial institutions.	4	4%	67%
Junior Management	External	Bank Indonesia : Undangan Pertemuan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) 2024 Bank Indonesia: Invitation to the 2024 National Blacklist Management Office (KPDHN) Meeting	Memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan kebijakan dan prosedur pengelolaan daftar hitam nasional yang diterapkan oleh Bank Indonesia Provide a better understanding of the national blacklist management policies and procedures implemented by Bank Indonesia.	1	1%	100%
Junior Management	External	Basic Sharia Banking (Batch 14) Basic Sharia Banking (Batch 14)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	7	7%	58%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Basic Sharia Banking (Batch 15) Basic Sharia Banking (Batch 15)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	4	4%	29%
Junior Management	External	Basic Sharia Banking Batch Oktober 2024 Basic Sharia Banking Batch October 2024	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	9	10%	53%
Junior Management	External	Breakthrough Communication and Human Relation	Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dan hubungan manusia di lingkungan kerja atau organisasi, agar tercipta interaksi yang lebih efektif, harmonis, dan produktif.	4	4%	17%
Junior Management	External	Certified Contact Center Manager Certified Contact Center Manager	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta agar dapat mengelola dan mengoptimalkan operasional contact center dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Provide knowledge and skills to participants to manage and optimize contact center operations in a more effective and efficient manner.	1	1%	100%
Junior Management	External	Climate Risk Management System Training Climate Risk Management System Training	Mengetahui kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Understand the integrated framework that includes aspects of governance, strategy, risk management, and disclosure to assess the resilience of the bank's business model and strategy in facing climate change in the short, medium and long term.	8	9%	29%
Junior Management	External	Communication & Business Presentation Communication & Business Presentation	Meningkatkan keterampilan peserta dalam berkomunikasi secara efektif serta menyampaikan presentasi bisnis yang menarik dan persuasif. Improve participants' skills in communicating effectively and delivering interesting and persuasive business presentations.	1	1%	6%
Junior Management	External	Corporate Culture Training : The Catalyst Effect Corporate Culture Training : The Catalyst Effect	Membantu organisasi dalam mengembangkan dan memperkuat budaya perusahaan yang positif, produktif, dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Assist organizations in developing and strengthening a positive, productive corporate culture that supports the company's strategic objectives.	3	3%	12%
Junior Management	External	CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta untuk melakukan audit terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang sesuai dengan standar ISO/IEC 27001:2022. Provide participants with an understanding and skills to conduct audits of Information Security Management Systems (ISMS) in accordance with the ISO/IEC 27001:2022 standard.	1	1%	100%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Idecision and Credit Scoring Development Training Idecision and Credit Scoring Development Training	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem penilaian kredit (credit scoring) yang efektif, serta memahami bagaimana membuat keputusan kredit yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko dalam pemberian kredit. Provide participants with an understanding and skills in designing, developing, and managing an effective credit scoring system, as well as understanding how to make data-based loan decisions to increase efficiency and reduce risk in loan disbursement	4	4%	36%
Junior Management	External	ISO/IEC 27001:2022 Internal Auditor Training Course ISO/IEC 27001:2022 Internal Auditor Training Course	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta agar dapat melakukan audit internal terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) yang sesuai dengan standar ISO/IEC 27001:2022. Provide participants with an understanding and skills to conduct internal audits of Information Security Management Systems (ISMS) in accordance with the ISO/IEC 27001:2022 standard.	1	1%	100%
Junior Management	External	Lembaga Penjamin Keuangan (LPS) : Undangan Workshop Pelaporan SCV LPS kepada Bank Umum 21 November 2024 Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC): Invitation to IDIC's SCV Reporting Workshop to Commercial Banks on November 21, 2024	Memastikan bahwa bank umum dapat memahami dengan jelas prosedur, kewajiban, serta aspek teknis dalam pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga transparansi dan akurasi data yang dilaporkan kepada LPS. Ensure that commercial banks can clearly understand the procedures, obligations, and technical aspects of reporting in accordance with applicable provisions, in order to maintain transparency and accuracy of data reported to IDIC.	1	1%	50%
Junior Management	External	Pemahaman Dasar Perbankan Syariah Basic Understanding of Sharia Banking	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provides a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	3	3%	43%
Junior Management	External	Pembekalan Audit Intern Bank Level Auditor Bank Internal Audit Briefing for Auditor Level	Memastikan bahwa auditor internal bank memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan audit secara efektif, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola dan pengelolaan risiko di bank. Ensure that the bank's internal auditors have sufficient competence to conduct audits effectively, maintain regulatory compliance, and make a positive contribution to governance and risk management in the bank.	1	1%	100%
Junior Management	External	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko J5 Batch Desember 2024 Risk Management Provision and Certification J5 Batch December 2024	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	5	5%	21%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Pembekalan Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Certification Maintenance Provision Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	50%
Junior Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko J4 Batch Agustus 2024	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	25%
Junior Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Provision Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	5	5%	45%
Junior Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	3	3%	18%
Junior Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 2 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 2	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	8	9%	42%
Junior Management	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Banking Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	9	10%	41%
Junior Management	External	Penilaian dan Evaluasi Proyek Project Assessment and Evaluation	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mengevaluasi dan menilai kelayakan serta potensi keberhasilan suatu proyek, khususnya proyek yang akan dibiayai atau didanai oleh bank. Provide knowledge and skills to participants in evaluating and assessing the feasibility and potential success of a project, especially projects that will be financed or funded by banks.	6	6%	40%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Personal Data Protection Personal Data Protection	Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, serta memastikan bahwa individu atau organisasi memahami dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku. Provide a deep understanding of the importance of personal data protection, and ensures that individuals or organizations understand and comply with applicable personal data protection regulations.	15	16%	29%
Junior Management	External	Recovery Plan and Resolution Plan Recovery Plan and Resolution Plan	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola rencana pemulihan (recovery plan) dan rencana resolusi (resolution plan) bagi institusi keuangan atau organisasi, guna memastikan kelangsungan operasional dalam menghadapi krisis atau kegagalan finansial yang signifikan. Provide participants with an understanding and skills in designing, implementing, and managing recovery plans and resolution plans for financial institutions or organizations, to ensure operational continuity in the face of a significant financial crisis or failure.	9	10%	30%
Junior Management	External	Refreshment Anti Fraud 18 Des 2024 Anti Fraud Refreshment December 18, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	2	2%	15%
Junior Management	External	Refreshment Anti Fraud 22 Okt 2024 Anti Fraud Refreshment October 22, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	1	1%	17%
Junior Management	External	Refreshment Anti Fraud 25 Sept 2024 Anti Fraud Refreshment September 25, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	5	5%	38%
Junior Management	External	Refreshment Anti Fraud 9 Okt 2024 Anti Fraud Refreshment October 9, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	4	4%	31%
Junior Management	External	Refreshment Anti Fraud Training Anti Fraud Refreshment Training	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	16	17%	39%
Junior Management	External	Refreshment dan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (Publik) Refreshment and Recertification of Risk Management Level 4 (Public)	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	100%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Refreshment Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	10%
Junior Management	External	Sharia Restricted Investment Account Training Sharia Restricted Investment Account Training	Memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dilakukan dengan membatasi atau mengontrol penggunaan dana untuk tujuan yang sesuai dengan hukum Islam. Facilitate a better understanding of how investments in accordance with Sharia principles can be made by limiting or controlling the use of funds for purposes consistent with Islamic law.	1	1%	100%
Junior Management	External	Tax Training House Bimbel USKP A Tax Training House Tutoring USKP A	Mempersiapkan peserta dalam menghadapi ujian Sertifikasi Kompetensi Profesi (USKP) untuk Anggota (A), yang merupakan bagian dari proses sertifikasi untuk profesi di bidang perpajakan di Indonesia. Prepare participants to face the Professional Competency Certification (USKP) exam for Members (A), which is part of the certification process for professions in the taxation sector in Indonesia.	1	1%	100%
Junior Management	External	Teknik Identifikasi dan Penulisan LTKM TPA Perjudian, Korupsi, Penipuan dan Narkotika Bagi Analis Bank Identification and Writing Techniques for LTKM TPA Gambling, Corruption, Fraud and Narcotics for Bank Analysts	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para analis bank dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun laporan Tindak Lanjut Kasus Malpraktik (LTKM) dalam kasus terkait dengan perjudian, korupsi, penipuan, dan narkotika yang berhubungan dengan sektor perbankan. Provide knowledge and skills to bank analysts in identifying, analyzing, and compiling Malpractice Case Follow-up (LTKM) reports in cases related to gambling, corruption, fraud, and narcotics related to the banking sector.	1	1%	100%
Junior Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	2	2%	17%
Junior Management	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Recertification Exam Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	50%
Junior Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	12	13%	35%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Junior Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Banking Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	2	2%	13%
Junior Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 2 Banking Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 2	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	8	9%	42%
Junior Management	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Banking Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 3	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	9	10%	41%
Staff	External	Bank Indonesia : Undangan Forum Koordinasi Strategi Koordinasi Pemenuhan Uang Rupiah di Masyarakat dan Sosialisasi Penggunaan Bisilk Gen 2 Bank Indonesia: Invitation to the Strategy Coordination Forum for the Fulfillment of Rupiah Currency in the Community and Socialization of the Use of Bisilk Gen 2	Sebagai wadah untuk koordinasi dan pemahaman terkait pemenuhan kebutuhan uang rupiah yang tepat, efisien, dan aman di masyarakat, serta mendukung pengembangan teknologi dalam transaksi keuangan. As a forum for coordination and understanding related to the fulfillment of the need for appropriate, efficient, and safe rupiah currency in society, as well as supporting the development of technology in financial transactions.	1	1%	100%
Staff	External	Basic Sharia Banking (Batch 14) Basic Sharia Banking (Batch 14)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	1	1%	8%
Staff	External	Basic Sharia Banking (Batch 15) Basic Sharia Banking (Batch 15)	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	3	4%	21%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Staff	External	Basic Sharia Banking Batch Oktober 2024 Basic Sharia Banking Batch October 2024	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	6	9%	35%
Staff	External	Communication & Business Presentation Communication & Business Presentation	Meningkatkan keterampilan peserta dalam berkomunikasi secara efektif serta menyampaikan presentasi bisnis yang menarik dan persuasif. Improve participants' skills in communicating effectively and delivering interesting and persuasive business presentations.	16	24%	89%
Staff	External	Corporate Culture Training : The Catalyst Effect Corporate Culture Training : The Catalyst Effect	Membantu organisasi dalam mengembangkan dan memperkuat budaya perusahaan yang positif, produktif, dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Assist organizations in developing and strengthening a positive, productive corporate culture that supports the company's strategic objectives.	8	12%	32%
Staff	External	Lembaga Penjamin Keuangan (LPS) : Undangan Workshop Pelaporan SCV LPS kepada Bank Umum 21 November 2024 Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC): Invitation to IDIC's SCV Reporting Workshop to Commercial Banks on November 21, 2024	Memastikan bahwa bank umum dapat memahami dengan jelas prosedur, kewajiban, serta aspek teknis dalam pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga transparansi dan akurasi data yang dilaporkan kepada LPS. Ensure that commercial banks can clearly understand the procedures, obligations, and technical aspects of reporting in accordance with applicable provisions, in order to maintain transparency and accuracy of data reported to IDIC.	1	1%	50%
Staff	External	PBK SPPUR Jenjang 4 Pengelolaan Uang Tunai (Publik) PBK SPPUR Level 4 Cash Management (Public)	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait dengan pengelolaan uang tunai yang efektif di sektor publik. Hal ini mencakup pengelolaan distribusi uang rupiah, penarikan, dan penyebarannya di masyarakat. Improve understanding and skills related to effective cash management in the public sector. This includes managing the distribution of rupiah, its withdrawal, and its distribution in the community.	1	1%	100%
Staff	External	PBK SPPUR Jenjang 4 Setelmen Transaksi Tresuri (Publik) PBK SPPUR Level 4 Treasury Transaction Settlement (Public)	Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses setelmen transaksi tresuri, yang mencakup penyelesaian transaksi antara lembaga-lembaga keuangan dan Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan transaksi surat berharga dan instrumen keuangan lainnya. Provide a deeper understanding of the treasury transaction settlement process, which includes the settlement of transactions between financial institutions and Bank Indonesia, especially those relating to securities transactions and other financial instruments.	1	1%	100%
Staff	External	Pemahaman Dasar Perbankan Syariah Basic Understanding of Sharia Banking	Memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Provide a basic understanding of the principles and products in Sharia banking, as well as how Sharia banking operates in accordance with Islamic law.	1	1%	14%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Staff	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Provision Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	1	1%	9%
Staff	External	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 2 Risk Management Certification Provision Level 4 Batch 2	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	4	6%	21%
Staff	External	Penilaian dan Evaluasi Proyek Project Assessment and Evaluation	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mengevaluasi dan menilai kelayakan serta potensi keberhasilan suatu proyek, khususnya proyek yang akan dibiayai atau didanai oleh bank. Provide knowledge and skills to participants in evaluating and assessing the feasibility and potential success of a project, especially projects that will be financed or funded by banks.	3	4%	20%
Staff	External	Personal Data Protection Personal Data Protection	Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, serta memastikan bahwa individu atau organisasi memahami dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku. Provide a deep understanding of the importance of personal data protection, and ensures that individuals or organizations understand and comply with applicable personal data protection regulations.	4	6%	8%
Staff	External	Refreshment Anti Fraud 18 Des 2024 Anti Fraud Refreshment December 18, 2024	Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola rencana pemulihan (recovery plan) dan rencana resolusi (resolution plan) bagi institusi keuangan atau organisasi, guna memastikan kelangsungan operasional dalam menghadapi krisis atau kegagalan finansial yang signifikan. Provide participants with an understanding and skills in designing, implementing, and managing recovery plans and resolution plans for financial institutions or organizations, to ensure operational continuity in the face of a significant financial crisis or failure.	6	9%	46%
Staff	External	Refreshment Anti Fraud 22 Okt 2024 Anti Fraud Refreshment October 22, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	2	3%	33%
Staff	External	Refreshment Anti Fraud 25 Sept 2024 Anti Fraud Refreshment September 25, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	3	4%	23%

Pengembangan Kompetensi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2024

Employee Competency Development Based on Organizational/Position Level 2024

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan atau Pelatihan Type of Education or Training	Nama Pendidikan atau Pelatihan Name of Education or Training	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Objective of Education or Training	Jumlah Peserta Total Partici-pants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
					Berdasarkan Level Organisasi Based on Organizational Level (%)	Berdasarkan Jenis Pelatihan Based on Type of Training (%)
Staff	External	Refreshment Anti Fraud 9 Okt 2024 Anti Fraud Refreshment October 9, 2024	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	3	4%	23%
Staff	External	Refreshment Anti Fraud Training Anti Fraud Refreshment Training	Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani tindakan kecurangan atau fraud yang dapat terjadi di dalam organisasi. Provide knowledge and skills to participants in detecting, preventing, and handling fraudulent actions that can occur within an organization.	4	6%	10%
Staff	External	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Refreshment Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	4	6%	40%
Staff	External	Time and Stress Management Time and Stress Management	Membantu peserta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola waktu dan mengurangi stres, baik di kehidupan pribadi maupun profesional. Help participants improve their ability to manage time and reduce stress, both in their personal and professional lives.	3	4%	100%
Staff	External	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	4	6%	33%
Staff	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Exam Level 4	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	3	4%	9%
Staff	External	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 2 Banking Risk Management Certification Exam Level 4 Batch 2	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improve professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	4	6%	21%

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Bank Aladin Syariah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDI yang dimilikinya. Salah satu upaya konkret dalam mewujudkan komitmen ini adalah melalui pengalokasian anggaran investasi untuk program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Pada tahun 2024, realisasi biaya yang dialokasikan untuk pengembangan kompetensi pegawai mencapai Rp3.714.275.199,- mengalami penurunan 35% atau setara dengan Rp2.040.027.663,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp5.754.302.862,-.

Rincian total biaya pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada tabel berikut:

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

Bank Aladin Syariah emphasized its commitment to enhancing the capacity and quality of its HC. One concrete effort to realize this commitment is by allocating an investment budget for sustainable employee competency development programs. In 2024, the costs allocated for employee competency development reached Rp3.714.275.199, a decrease of 35%, or Rp2.040.027.663 compared to Rp5.754.302.862 the previous year.

Details of the total costs for employee competency development can be seen in the following table:

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development Costs

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Perbandingan Realisasi Realization Comparison 2023 - 2024	
			Selisih Difference (Rp)	Persentase Percentage (%)
Pengembangan Kompetensi Competency Development	**3.714.275.199**	5.754.302.862	2.040.027.663	35% ↓

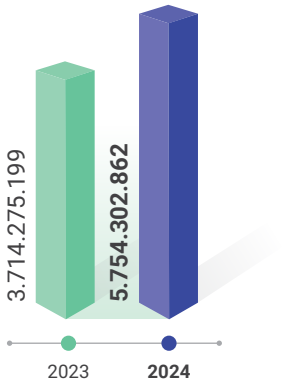

Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai 2023-2024 (Rp)
Comparison of Employee Competency Development Costs 2023-2024 (Rp)

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun pelaporan Average hours of training per employee in the reporting year	2024		2023	
	Jumlah Pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan Number of Employees who participated in the training program	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%) Percentage of employees who participated in training (%)	Jumlah Pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan Number of Employees who participated in the training program	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%) Percentage of employees who participated in training (%)
9.5 jam/pegawai	**290**	**100%**	291	100%

Komposisi Pemegang Saham Bank
Bank's Shareholders Composition

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BANK

COMPOSITION OF BANK SHARE OWNERSHIP

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah Pada Awal dan Akhir Tahun 2024
Bank Aladin Syariah Share Ownership at the Beginning and End of 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Nominal Value of Shares = Rp100/share			
1 Januari 2024 January 1, 2024			
PT Aladin Global Ventures	7.726.530.746	772.653.074.600	52,32%
Masyarakat Public	7.041.889.771	704.188.977.100	47,68%
Jumlah Total	**14.768.420.517**	**1.476.842.051.700**	**100%**
31 Desember 2024 December 31, 2024			
PT Aladin Global Ventures	7.591.658.246	759.165.824.600	51,40%
Masyarakat Public	7.176.838.619	717.683.861.900	48,60%
Jumlah Total	**14.768.496.865**	**1.476.849.686.500**	**100%**

Komposisi Pemegang Saham Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2024
Composition of Bank Aladin Syariah Shareholders As of December 31, 2024

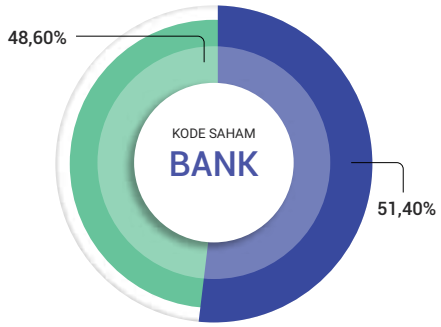

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH 5% OR MORE SHARE OWNERSHIP

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih per 31 Desember 2024
Composition of Shareholders with 5% or More Share Ownership As of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
PT Aladin Global Ventures	7.591.658.246	51,40%

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT YANG MASING-MASING MEMILIKI KURANG DARI 5% SAHAM BANK

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 31 Desember 2024

Public Shareholders with Share Ownership Less Than 5% as of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pemodal Nasional National Shareholders			
Perorangan Indonesia Indonesian individuals	9.690	344.764.385	2,33
Perseroan Terbatas Limited Liability Companies	93	3.719.120.448	25,18
Asuransi Insurance	15	1.108.640.100	7,51
Dana Pensiun Pension Funds	3	852.300	0,01
Jumlah Total	**9.801**	**5.173.377.233**	**35,03**
Pemodal Asing Foreign Investors			
Perorangan Asing Foreign individuals	4	78.100	0,00
Badan Usaha Asing Foreign Business Entities	68	2.003.383.286	13,57
Jumlah Total	**72**	**2.003.461.386**	**13,57**
Jumlah Keseluruhan Grand Total	**9.873**	**7.176.838.619**	**48,60**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK ALADIN SYARIAH BERDASARKAN STATUS

COMPOSITION OF BANK ALADIN SYARIAH SHAREHOLDERS BY STATUS

Rincian Komposisi Pemegang Saham Bank Aladin Syariah Berdasarkan Status per 31 Desember 2024

Details of Bank Aladin Syariah Shareholders Composition By Status as of December 31, 2024

Status Pemegang Saham Shareholder Status	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (in shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Lokal Local			
Perorangan Individuals	9.690	344.764.385	2,33
Institusi Institutions	112	12.420.271.094	84,10
Jumlah Total	**9.802**	**12.765.035.479**	**86,43**
Asing Foreign			
Perorangan Individuals	4	78.100	0,00
Institusi Institutions	68	2.003.383.286	13,57
Jumlah Total	**72**	**2.003.461.386**	**13,57**
Jumlah Keseluruhan Grand Total	**9.874**	**14.768.496.865**	**100,00**

KOMPOSISI KEPEMILIKAN WARAN SERI I

Bersamaan dengan penawaran umum perdana saham, yakni pada tanggal 22 Januari 2021, Bank Aladin Syariah menerbitkan sebanyak 2.800.000.000 Waran Seri I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran Rp110,- yang mulai berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026.

SERIES I WARRANT OWNERSHIP COMPOSITION

Simultaneously with the initial public offering of shares, on January 22, 2021, Bank Aladin Syariah issued a total of 2,800,000,000 Series I Warrants attached to the shares issued and given free of charge as an incentive for shareholders with a warrant exercise price of Rp110 which will take effect from August 2, 2021 to January 30, 2026.

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM BANK ALADIN SYARIAH OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah belum melaksanakan program kepemilikan saham bagi pegawai (Employee Stock Option Program/ESOP) atau manajemen (Management Stock Option Program/ MSOP). Oleh karena itu, tidak ada pegawai atau anggota manajemen termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah. Selain itu, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, tidak ada informasi tentang persentase kepemilikan tidak langsung saham Bank Aladin Syariah oleh Dewan Komisaris atau Direksi pada awal dan akhir tahun buku termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk tujuan kepemilikan tidak langsung oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

INFORMATION ON BANK ALADIN SYARIAH SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31 2024, Bank Aladin Syariah has not yet implemented a share ownership program for employees (Employee Stock Option Program/ESOP) or management (Management Stock Option Program/ MSOP). Therefore, no employees or members of management, including the Commissioners and Directors, own shares in Bank Aladin Syariah. In addition, neither the Commissioners nor the Directors have indirect ownership of Bank Aladin Syariah shares. Thus, there is no information to report on the percentage of indirect ownership of Bank Aladin Syariah shares by the Board of Commissioners or Board of Directors at the beginning and end of the fiscal year, nor information on shareholders registered in the list of shareholders for the purpose of indirect ownership by members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.



Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Aladin Syariah

Information on Majority and Controlling Shareholders of Bank Aladin Syariah Until the Final Individual Owner

Pemegang saham utama dan pengendali Bank adalah PT Aladin Global Ventures dengan Pemegang saham akhir adalah John Dharma J. Kusuma. PT Aladin Global Ventures memiliki 51,40% saham Bank Aladin Syariah dan sisanya dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan saham kurang dari 5%, mencapai 48,60%.

The majority and controlling shareholder of the Bank is PT Aladin Global Ventures with the final shareholder being John Dharma J. Kusuma. PT Aladin Global Ventures owns 51.40% of Bank Aladin Syariah shares and the remainder is owned by the public with share ownership of less than 5% reaching 48.60%.

Struktur Grup Bank Aladin Syariah
per 31 Desember 2024



Informasi Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Information on List of Subsidiaries and Associates and Joint Ventures

Per 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi, maupun ventura bersama. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha, total aset, dan status operasi terkait entitas anak dan entitas asosiasi, maupun ventura bersama.

As of December 31, 2024, Bank Aladin Syariah did not have subsidiaries and associated entities, or joint ventures. Therefore there is no information to report on the names, percentage of ownership, business field, total assets, and operational status of subsidiaries and associated entities, or joint ventures.

Nama Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang Atau Kantor Perwakilan

Name, Address Of Subsidiaries and/or Branch Office or Representative Office

Per 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi, serta Kantor Cabang ataupun Kantor Perwakilan.

As of December 31, 2024, Bank Aladin Syariah did not have any subsidiaries or associated entities, as well as branch offices or representative offices.

Kronologis Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Pada tahun 2021, Bank Aladin Syariah melakukan Aksi Korporasi dalam bentuk Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) kepada masyarakat. Sebelum melaksanakan IPO, saham Bank dimiliki oleh PT Aladin Global Ventures (sebelumnya dikenal sebagai PT NTI Global Indonesia) sebanyak 7.988.245.746 saham atau setara dengan 97,50% dan PT Alphaplus Adhigana Asia sebanyak 204.826.814 saham atau 2,50%. Pada tanggal 22 Januari 2021, Bank menerima persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham Bank dengan nilai nominal Rp100 per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 per saham. Pada tanggal 1 Februari 2021, saham tersebut resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "BANK". Dari hasil penawaran umum saham perdana, Bank berhasil mengumpulkan tambahan modal disetor sebesar Rp500.000.000.000 serta tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp15.000.000.000 setelah dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp4.612.334.741. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum saham perdana ini adalah sebesar Rp510.387.665.259.

In 2021, Bank Aladin Syariah exercised a Corporate Action in the form of an Initial Public Offering (IPO) to the public. Prior to carrying out the IPO action, Bank's shares were owned by PT Aladin Global Ventures (formerly PT NTI Global Indonesia) with a total of 7,988,245,746 shares or 97.50% and PT Alphaplus Adhigana Asia with 204,826,814 shares with 2.50%. Then on January 22, 2021, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) through its letter No. S-8/D.04/2021 to conduct an initial public offering of 5,000,000,000 Bank shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share to the public at an offering price of Rp103 (full amount) per share. On February 1, 2021, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange with the ticker code BANK. From the results of the initial public offering, Bank recorded additional paid-in capital of Rp500,000,000,000 and additional paid-in capital in the form of premiums of Rp15,000,000,000 before deducting the issuance costs of shares of Rp4,612,334,741. The net proceeds from this initial public offering amounted to Rp510,387,665,259.

Pada tanggal 22 Januari 2021, yang bersamaan dengan penawaran umum perdana saham, Bank menerbitkan 2.800.000.000 Waran Seri I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp110 yang mulai berlaku tanggal 2 Agustus 2021 hingga 30 Januari 2026. Jumlah dana yang mungkin diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika seluruh waran yang diterbitkan dieksekusi, adalah sebanyak Rp308.000.000.000.

On January 22, 2021, which coincided with the initial public offering of shares, Bank issued 2,800,000,000 Series I Warrants attached to the issued shares and provided free of charge as an incentive for shareholders with a warrant exercise price of Rp110 with an effective date between August 2, 2021 to January 30, 2026. So the total funds obtained from the results of the exercise of the Series I Warrants if all of the warrants are exercised will be Rp308,000,000,000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021, para Pemegang Saham menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I atau rights issue Bank menawarkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, setara dengan 13,12% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah HMETD I.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on May 28, 2021, the Shareholders approved the Bank's plan to increase Capital through a Rights Issue. The Bank offered a maximum of 2,000,000,000 new shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share or 13.12% of the issued and fully paid-up capital of Bank after the Rights Issue I.

Bank berhasil menjalankan Aksi Korporasi penambahan modal sepanjang tahun 2022 melalui Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) untuk memenuhi ketentuan OJK yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

The Bank successfully carried out Corporate Actions to increase capital throughout 2022 through additional Rights Issue and Private Placements. The two Corporate Action were in compliance with OJK regulations as conveyed through Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12 of 2022 concerning Commercial Bank Consolidation, in

(POJK) No. 12 Tahun 2022 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mengharuskan bank umum memiliki modal inti sebesar Rp3 triliun pada akhir 2022.

which commercial banks are required to have a core capital of Rp3 trillion by the end of 2022

Bank melaksanakan HMETD mulai 23 Mei hingga 7 Juni 2022 dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.999.933.723 saham, setara dengan 11,12% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan HMETD adalah Rp2.000 per saham. Dari pelaksanaan HMETD tersebut, Bank berhasil menjual sejumlah 504.264.065 saham, senilai dengan Rp1.008.528.130.000. Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana yang dihasilkan dari rights issue akan digunakan untuk mendukung penyaluran pembiayaan dan menguatkan kinerja Perusahaan.

Bank carried out Rights Issues on May 23 - June 7, 2022 by offering a maximum of 1,999,933,723 equivalent to 11.12% of the issued and fully paid capital. The exercise price for the Rights Issue was Rp2,000 per share. Through the Rights Issue, 504,264,065 shares were successfully executed for a value of Rp1,008,528,130,000. After deducting issuance costs, all proceeds from the rights issue would be used to support financing distribution and strengthen the Company's performance.

Pada akhir tahun 2022, melalui PMTHMETD yang berlangsung pada 29 Desember 2022, Bank mengeluarkan saham baru sebesar 850.000.000 dengan harga pelaksanaan Rp1.400, senilai dengan Rp1.190.000.000.000. Keseluruhan saham yang ditawarkan dalam PMTHMETD tersebut diambil alih oleh PT BNC Technologies Ventures sehingga perusahaan tersebut menjadi pemegang saham baru Bank dengan kepemilikan sebanyak 5,80%. Dana yang diperoleh dari PMTHMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur modal perusahaan guna mendukung perkembangan usaha Bank.

At the end of 2022 through a Private Placement on December 29, 2022 the Bank issued 850,000,000 new shares with an exercise price of Rp1,400 or a value of Rp1,190,000,000,000. PT BNC Technologies Ventures absorbed all of the shares offered in the Private Placement thereby making it a new shareholder of Bank with ownership of 5.80%. All funds from the Private Placement were used to strengthen the capital structure in order to develop the Company's business.

Sejak diterbitkan di tanggal 1 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2024 telah dilaksanakan eksekusi waran sejumlah 221.160.240 lembar atau setara dengan Rp24,327,626,400.00. Adapun waran yang belum di eksekusi adalah sejumlah 2,578,839,760 lembar dari 2,800,000,000 lembar yang diterbitkan.

Since its issuance on August 1, 2021, to December 31, 2024, as many as 221,160,240 warrants or equivalent to Rp24,327,626,400.00 have been executed. The warrants that have not been executed are 2,578,839,760 out of 2,800,000,000 warrants issued.

Berikut disampaikan kronologis penerbitan dan pencatatan saham Bank.

The following shows the chronology of the issuance and listing of the Bank's shares.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham
Chronology of Issuance and Listing of Shares

Periode Period	Keterangan Information	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Harga Penawaran Offering Price (Rp)	Modal Ditempatkan dan Disetor			
				Jumlah Saham yang Diterbitkan Total Shares Issued	Jumlah Saham Total Shares	Total Nilai (Rp) Total Value (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp) Total Offering Price (Rp)
Sebelum - IPO Before IPO					8.193.072.560	819.307.256.000	
2021	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	100	103	5.000.000.000	13.193.072.560	1.319.307.256.000	515.000.000.000
2022	HMETD	100	2.000	504.264.065	13.266.245.924	1.326.624.592.400	1.008.528.130.000
2022	PMTHMETD	100	1.400	850.000.000	14.655.617.601	1.465.561.760.100	1.190.000.000.000
2021 - 2026	Waran Seri I Series I Warrant	100	110	2.800.000.000	15.993.072.560*	1.599.307.256.000	308.000.000.000

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

Hingga akhir tahun 2024 dan sampai informasi ini diberikan, Bank tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, tidak ada data terkait dengan nama efek, tahun penerbitan, tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa efek lainnya, atau peringkat efek yang dapat disediakan

Until the end of 2024 and until the date this information was submitted, the Bank has not issued securities in any form. Therefore, there is no data to report on the name of the security, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, name of other stock exchanges, or security ratings.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Supporting Institutions and/or Professionals

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant and Public Accountant Firm

Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accountant Firm	**KAP Purwantono, Sungkoro & Surja**
Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Yasir
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Stock Exchange Building, Tower II Floor 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services rendered	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants
Periode Penugasan Assignment Period	Audit Tahun Buku 2024 Audit for Fiscal Year 2024

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

Nama Biro Administrasi Efek Name of Share Registrar	**PT Sharestar Indonesia**
Alamat Address	Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jasa yang Diberikan Services rendered	Membantu Penjamin Pelaksanaan Administrasi Efek (Saham dan Waran) Assisting in the Guarantor of the Implementation of Securities (Shares and Warrants) Administration
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024

Notaris
Notary

Nama Kantor Notaris Name of Notary Office	**Yulia, S.H.**
Alamat Address	Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Indonesia
Jasa yang Diberikan Services rendered	Perubahan Anggaran Dasar dan Pembuatan Akta Amendments to Articles of Association and the Preparation of Deeds
Periode Penugasan	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024

Informasi Pada Situs Web Bank Aladin Syariah

Information on The Website of Bank Aladin Syariah

PT Bank Aladin Syariah Tbk menyediakan situs web resmi sebagai salah satu sarana untuk menjaga transparansi dan keterbukaan kepada publik dengan menyajikan informasi yang up to date. Situs web ini dapat diakses dengan mudah dan sederhana melalui alamat aladinbank.id. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang komprehensif, akurat, dan terkini tentang Perusahaan kepada masyarakat umum. Situs web resmi Bank telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 yang berkaitan dengan situs web perusahaan publik.

Peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk menyajikan berbagai informasi, antara lain:
1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

PT Bank Aladin Syariah Tbk provides an official website as a means of maintaining transparency and openness to the public by presenting up to date information. This website can be accessed easily and simply via the aladinbank.id address. The main objective is to provide comprehensive, accurate and up-to-date information about the Company to the general public. The Bank's official website was created in accordance with the provisions of Article 6 in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 relating to public company websites.

This regulation requires companies to present information, including:
1. General Information on Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information;
4. Corporate Social Responsibility Information.



Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; Shareholder information up to the individual final owner	v	Memuat informasi kepemilikan Saham dari Para pemegang Saham Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Hubungan Investor Struktur Pemegang Saham" https://aladinbank.id/struktur-pemegang-saham/ Contains information on share ownership of Bank's Shareholders that can be accessed on the Bank's website at "Investor Relations" ? "Shareholder Structure" https:// aladinbank.id/struktur-pemegang-saham/
Isi Kode Etik Contents of the Code of Conduct	v	Memuat informasi mengenai Kode Etik Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Tentang Kami Tata Kelola" https://aladinbank.id/id/tata-kelola Contains information on the Bank's Code of Conduct that can be accessed on Bank's website at "About Us" ? "Governance" https:// aladinbank.id/id/tata-kelola
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) including agenda items discussed at the GMS, summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the summons for the GMS, the date of the GMS, the date the summary of the minutes of the GMS was announced	v	Memuat informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Hubungan Investor Rapat Umum Pemegang Saham" https://aladinbank.id/id/rapat-umum-pemegang-saham Contains information on the Bank's General Meeting of Shareholders (GMS) that can be accessed on Bank's website at "Investor Relations" ? General Meeting of Shareholders" https:// aladinbank.id/id/rapat-umum-pemegang-saham
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statements (last 5 years)	v	Memuat Informasi terkait Laporan Keuangan Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Hubungan Investor Laporan Triwulanan" https://aladinbank.id/id/laporan-tahunan Contains information on the Bank's Financial Statements that can be accessed on Bank's website at "Investor Relations " ? Quarterly Reports" https://aladinbank.id/id/laporan-tahunan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors	v	Memuat informasi terkait Profil Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses di situs web Bank pada "Tentang Kami Manajemen Bank Aladin Syariah" https://aladinbank.id/id/manajemen Contains information on the Profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors that can be accessed on the Company's website at "About Us" ? Bank Aladin Syariah Management" https://aladinbank.id/id/manajemen
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	v	Memuat Informasi terkait Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Audit Internal Bank yang dapat diakses di situs web Bank pada "Tentang Kami Tata Kelola" https://aladinbank.id/id/tata-kelola Contains information on the Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and the Company's Internal Audit Unit that can be accessed on the Company's website at "About Us" ? "Governance" https://aladinbank.id/id/tata-kelola

v = tersedia pada situs web Perusahaan/available on the Company's website
x = belum tersedia pada situs web Perusahaan/not yet available on the Company's website

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2024
Awards received in 2024

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Awards	Badan atau Lembaga yang Memberikan Body or Institution presenting the Award
27 Maret 2024 March 27, 2024	BRONZE CHAMPION THE MOST PROMISING COMPANY IN SOCIAL MEDIA	TECH FOR ISLAMIC MARKETING AWARD 2024
1 April 2024 April 1, 2024	THE BEST DIGITAL BANK (KBMI 1)	INFOBANK DIGITAL BRAND AWARD 2024
	THE BEST SHARIA BANK (KBMI 1)	INFOBANK DIGITAL BRAND AWARD 2024
	THE BEST DEPOSIT SHARIA BANK (KBMI 1)	INFOBANK DIGITAL BRAND AWARD 2024
	THE 2nd BEST SAVINGS ACCOUNT SHARIA BANK (KBMI 1)	INFOBANK DIGITAL BRAND AWARD 2024
	THE 3rd DIGITAL INDEX DEPOSIT SHARIA BANK (KBMI 1)	INFOBANK DIGITAL BRAND AWARD 2024
29 Mei 2024 May 29, 2024	INVESTORTRUST - TRANSPARANSI & PENURUNAN EMISI KORPORASI TERBAIK 2024	PREDIKAT " PLATINUM PLUS "
1 Juli 2024 July 1, 2024	BEST ISLAMIC BANK	GLOBAL SUSTAINABLE FINANCE AWARD 2024
31 Juli 2024 July 31, 2024	OUTSTANDING ACHIEVEMENT TO SUSTAINABILITY & GOVERNANCE	SPEx 2nd AWARD 2024
	THE BEST EXECUTION WINNER IN DIGITAL SYARIAH BANKING INDUSTRY	SPEx 2nd AWARD 2024
3 September 2024 September 3, 2024	BANK BERPREDIKAT " SANGAT BAGUS"	MAJALAH PELUANG AWARD 2024
23 September 2024 September 23, 2024	BEST BANK SHARIA ASET DI BAWAH 20 TRILIUN	BEST SHARIA AWARD 2024 INVESTORTRUST
18 Oktober 2024 October 18, 2024	BEST SOCIAL CONTRIBUTION REPUTATION IN SHARIA BANK CATEGORY	THE ICONOMICS INDONESIA BEST FINANCIAL AWARD 2024
3 November 2024 November 3, 2024	bank syariah pendukung eksyar terbaik	ISEF 2024
28 November 2024 November 28, 2024	INVESTORTRUST - ESG AWARD 2024	GOLD STAR MEDIUM CAP

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2024
Certification Still Valid in 2024

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certification Issue Date	Jenis Sertifikat Type of Certification	Badan atau Lembaga yang Memberikan Body or Institution Issuing the Certification
12 April 2023 April 12, 2023	ISO 27001:2013	CBQA Global



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Di tengah dinamika bisnis, Bank Aladin Syariah Syariah secara konsisten menunjukkan sebagai Bank Syariah Digital Terdepan dengan meraih hasil kinerja yang positif. Selain menghadirkan produk dan layanan unggulan, Bank memperluas jangkauan pasar ke seluruh Indonesia dengan mengedepankan transformasi, kolaborasi, dan .inovasi teknologi

Amidst the dynamics of business, Bank Aladin Syariah Syariah consistently shows itself as a Leading Digital Sharia Bank by achieving positive performance results. In addition to presenting superior products and services, the Bank expands its market reach throughout Indonesia by prioritizing transformation, collaboration, and technological .innovation

Aladin Bank Syariah
Masa Depan



Tinjauan Umum
General Overview



TINJAUAN PEREKONOMIAN

Kondisi ekonomi global hingga akhir tahun 2024 masih mengalami dinamika akibat ketegangan geopolitik dan perubahan pemimpin dari beberapa negara. Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat akibat dari stimulus fiskal serta penguatan pasar tenaga kerja. Berbeda dengan yang dialami oleh Eropa, Tiongkok, dan juga Jepang yang mengalami pelemahan akibat kurangnya keyakinan konsumen dan tertahannya produktivitas sejalan dengan dampak dari implementasi kenaikan tarif impor oleh Presiden Trump di Amerika Serikat.

Sejalan dengan ekonomi Amerika Serikat yang menguat membuat proses disinflasi menjadi tertahan dan berdampak pada ekspektasi penurunan suku bunga acuan Fed Funds Rate (Rate). Oleh karena itu, pada Desember The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebanyak 25 bps menjadi di kisaran 4,25% - 4,50%.

Perekonomian Indonesia hingga akhir 2024 ditutup dengan pertumbuhan sebesar 5,02% (yoy) dan inflasi masih terjaga di dalam kisaran 1,57%. Dengan laju inflasi yang terkendali rendah, hingga akhir Desember 2024 Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 6,00%.

ECONOMIC OVERVIEW

Global economic condition until the end of 2024 still experienced dynamics due to geopolitical tensions and changes in leaders from several countries. The United States showed stronger growth due to fiscal stimulus and strengthening labor markets. This was different from what was experienced by Europe, China, and Japan which experienced weakness due to a lack of consumer confidence and restrained productivity in line with the impact of the implementation of import tariff increases by President Trump in the United States.

In line with the strengthening United States economy, the disinflation process was restrained and impacted on expectations of a decrease in the Fed Funds Rate. Therefore, in December, the Fed decided to lower the benchmark interest rate by 25 bps to the range of 4.25% - 4.50%.

The Indonesia's economy until the end of 2024 closed with a growth of 5.02% (yoy) and inflation was still maintained in the range of 1.57%. With a low controlled inflation rate, until the end of December 2024 Bank Indonesia maintained the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 6.00%.

Kontribusi pertumbuhan di Indonesia dari sisi pengeluaran, paling tinggi berasal dari aktivitas impor barang & jasa sebesar 10,36% (yoy) dan ekspor barang & jasa sebesar 7,63% (yoy). Kondisi yang berbeda dialami oleh aktivitas konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,98% sejalan dengan belum menguatnya ekspektasi penghasilan dan masih terbatasnya ketersediaan lapangan kerja.

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis laporan perkembangan industri perkembangan perbankan nasional Hingga Desember 2024, penyaluran kredit tumbuh 10,39% (YoY) menjadi Rp7.827,15 Triliun dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi berasal dari penyaluran kredit investasi sebesar 13,62%. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,48% (YoY) menjadi Rp8.837,24 Triliun. Ketahanan sistem keuangan pun terus terjaga dengan rasio kecukupan modal (KPMM) pada sektor perbankan tergolong kuat dalam menyalurkan kredit yaitu sebesar 26,68% dengan NPL terjaga pada level 2,09%.

Tren yang sama juga terlihat pada industri perbankan syariah yaitu penyaluran pembiayaan tumbuh 12,18% pada Desember 2024. Kontribusi pertumbuhan tertinggi berasal dari penyaluran pembiayaan investasi sebesar 23,33%. Pada segmen UMKM, penyaluran pembiayaan juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,56% (YoY). Di sisi penghimpunan dana, DPK juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,75% (YoY) hingga akhir Desember 2024 yang mencapai Rp511,37 Triliun.

Sementara itu, Bank Aladin Syariah menutup tahun 2024 dengan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Sebagai fungsi intermediari Bank, Bank Aladin Syariah berhasil mencatatkan pertumbuhan baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Dari sisi penghimpunan dana, Bank mencatatkan pertumbuhan sebesar 66,33% secara *year-on-year*. Pertumbuhan ini sebagian besar berasal dari pertumbuhan produk Deposito yang mencapai 72,83%. Hingga akhir Desember 2024, aplikasi *mobile banking* Bank telah memiliki lebih dari 3,4 juta pengguna yang teregistrasi. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 7,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan produk tabungan tumbuh sebesar 31,38%. Dari sisi penyaluran pembiayaan, Bank mencatatkan pertumbuhan sebesar 53,08% (yoy). Pertumbuhan ini sebagian besar dari segmen ritel yang mencapai 1.960,40% (yoy), sedangkan segmen non ritel tumbuh sebesar 42,52% (yoy).

The highest contribution to growth in Indonesia from the expenditure side came from imports of goods & services at 10.36% (yoy) and exports of goods & services at 7.63% (yoy). A different condition was experienced by household consumption activities which only grew by 4.98% in line with the lack of strengthening income expectations and the still limited availability of jobs.

SHARIA BANKING INDUSTRY OVERVIEW

The Financial Services Authority (OJK) has released a report on the development of the national banking industry. Until December 2024, loan disbursement grew by 10.39% (YoY) to Rp7,827.15 trillion with the highest growth contribution coming from investment loan disbursement of 13.62%. In terms of fund accumulation, Third Party Funds (TPF) grew by 4.48% (YoY) to Rp8,837.24 trillion. The resilience of the financial system continued to be maintained with the capital adequacy ratio (CAR) in the banking sector being relatively strong in disbursing loans, namely 26.68% with NPL maintained at the level of 2.09%.

The same trend was also seen in the Sharia banking industry, namely financing disbursement which grew by 12.18% in December 2024. The highest growth contribution came from investment financing disbursement of 23.33%. In the MSME segment, financing disbursement also experienced growth of 8.56% (YoY). In terms of fund accumulation, TPF also experienced growth of 9.75% (YoY) until the end of December 2024, reaching Rp511.37 trillion.

Meanwhile, Bank Aladin Syariah closed 2024 by continuing its positive growth trend. As an intermediary function of the Bank, Bank Aladin Syariah managed to record growth both in terms of fund accumulation and financing disbursement. In terms of fund accumulation, the Bank recorded growth of 66.33% year-on-year. This growth mostly came from the growth of Time Deposit products which reached 72.83%. By the end of December 2024, the Bank's mobile banking application had more than 3.4 million registered users. This number grew by 7.30% compared to the previous year.

Meanwhile, savings products grew by 31.38%. In terms of financing disbursement, the Bank recorded a growth of 53.08% (yoy). This growth was mostly from the retail segment which reached 1,960.40% (yoy), while the non-retail segment grew by 42.52% (yoy).

Kebijakan Strategis Bisnis Bank dan Aspek Pemasaran

Bank Business Strategic Policy And Marketing Aspect

STRATEGI BISNIS BANK ALADIN SYARIAH TAHUN 2024

Di tahun 2024, Bank Aladin Syariah terus melakukan *improvement* produk dan pelayanan, untuk melanjutkan tren pertumbuhan positif. Sebagai bank syariah digital terdepan di Indonesia, Bank Aladin Syariah terus meningkatkan fokus pada strategi ekspansi bisnis dengan melakukan inovasi produk yang berkesinambungan melalui pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka memberikan kemudahan layanan perbankan untuk masyarakat luas. Disamping itu, Bank Aladin Syariah juga terus memperkuat dan meningkatkan kerja sama dengan mitra bisnis potensial dalam rangka membangun ekosistem digital berbasis syariah, serta terus melanjutkan pengembangan TI, dan meningkatkan akuisisi nasabah baik dari sisi korporasi maupun nasabah ritel. Kemudian sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, Bank Aladin Syariah juga terus meningkatkan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) untuk menunjang tercapainya target pertumbuhan di 2024.

Pada Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah menyusun serangkaian kebijakan strategis untuk mencapai target pertumbuhan, sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Bank (RJPB) Bank Aladin Syariah. Adapun inisiatif strategis yang telah ditetapkan Bank Aladin Syariah di tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Membangun strategi akuisisi nasabah pendanaan ritel dan non ritel
2. Pemenuhan permodalan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan pendapatan Bank dari penyaluran pembiayaan.
4. Pengelolaan tingkat kesehatan Bank, menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan profil risiko pada tingkat yang terukur.
5. Pengembangan akses layanan perbankan berbasis teknologi baik melalui kemitraan maupun secara langsung kepada 6. Nasabah sehingga dapat memberikan proses transaksi yang aman, efektif dan efisien.
6. Pengembangkan bisnis yang berkesinambungan melalui inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan.
7. Keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana

STRATEGI PEMASARAN DAN PANGSA PASAR BANK

Menjadi bank syariah digital terdepan di tahun 2024 Bank Aladin Syariah terus meningkatkan semangat untuk terus tumbuh, diperkuat dengan telah didapatkannya izin dari

BANK ALADIN SYARIAH'S BUSINESS STRATEGY IN 2024

In 2024, Bank Aladin Syariah constantly improved its products and services to continue the positive growth trend. As the leading digital sharia bank in Indonesia, Bank Aladin Syariah continued to sharpen its focus on business expansion strategies by carrying out continuous product innovation through the utilization of developments in Information Technology (IT) in order to provide easy banking services for the wider community. In addition, Bank Aladin Syariah also continued to strengthen and enhance cooperation with potential business partners in order to build a sharia-based digital ecosystem, as well as continued IT development, and increased customer acquisition from both corporate and retail customers. Moreover, in line with the Bank's business development, Bank Aladin Syariah also continuusly improved the development of Human Capital (HC) to support the achievement of growth targets in 2024.

In the 2024 Bank Business Plan (RBB), Bank Aladin Syariah has prepared a series of strategic policies to achieve growth targets, in accordance with the Bank Long-Term Plan (RJPB) of Bank Aladin Syariah. The strategic initiatives set by Bank Aladin Syariah in 2024 include the following:

1. Developing customer acquisition strategies for both retail and non-retail funding.
2. Fulfilling the Bank's capital requirements in accordance with applicable regulations.
3. Optimizing the Bank's income from financing disbursements.
4. Managing the Bank's soundness level, implementing good corporate governance, and maintaining a measurable risk profile.
5. Expanding access to technology-based banking services, either through partnerships or directly to customers, to ensure secure, effective, and efficient transaction processes.
6. Developing sustainable business through continuous product and service innovation.
7. Maintaining a balance between fund raising and fund disbursement.

MARKETING STRATEGY AND MARKET SHARE OF THE BANK

Becoming a leading digital sharia bank in 2024, Bank Aladin Syariah continues to increase its enthusiasm to continuously grow, strengthened by obtaining permits from relevant

regulator terkait, perihal produk-produk Bank Aladin Syariah yang berhasil dikembangkan dan didaftarkan, di tahun sebelumnya. Bank Aladin Syariah menyadari, ditengah perubahan perilaku dan persaingan yang cukup ketat, dibutuhkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, yang tentunya harus dilakukan secara intensif. Di mana dalam rangka mencapai pertumbuhan, Bank Aladin Syariah harus berfokus pada peningkatan akuisisi nasabah.

Pada prinsipnya, Indonesia yang merupakan penduduk dengan populasi muslim terbesar di dunia, merupakan potensi besar bagi Bank Aladin Syariah untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pertumbuhan. Terlebih, Bank Aladin Syariah yang merupakan bank syariah digital, diuntungkan dengan semakin masifnya penggunaan ponsel di hampir seluruh kalangan masyarakat, yang didukung oleh infrastruktur jaringan yang memadai.

Untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan di tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah menyusun dan menetapkan strategi pemasaran, sebagaimana berikut ini:

1. Strategi Akuisisi Nasabah *Digital-First*
   Sebagai bank digital berbasis syariah, kami menerapkan strategi akuisisi nasabah yang berfokus pada pendekatan *digital-first*. Dengan memanfaatkan berbagai kanal digital dan kemitraan strategis, kami terus meningkatkan jumlah nasabah baru melalui pendekatan berikut:
   a. Optimasi Digital Marketing: Menggunakan *funnel* akuisisi berbasis digital, termasuk *Search Engine Marketing* (SEM), iklan media sosial, dan *retargeting campaign* untuk meningkatkan konversi pendaftaran akun secara efektif.
   b. *Referral & Incentive* Program: Mengembangkan program *referral* berbasis *member-get-member* untuk mendorong pertumbuhan organik dengan memberikan insentif menarik bagi nasabah yang berhasil mengajak pengguna baru.
   c. Optimalisasi *Customer Onboarding*: Memastikan pengalaman pendaftaran akun yang *seamless* menjadi prioritas kami dengan menghadirkan integrasi e-KYC yang cepat, mudah, dan *user-friendly* melalui aplikasi *mobile banking* kami.
2. *Mass Awareness & Brand Positioning Campaign*
   Untuk memperkuat posisi sebagai bank syariah digital terdepan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Bank Aladin Syariah, kami menjalankan berbagai kampanye pemasaran yang strategis, seperti Ramadan campaign video. Dengan memanfaatkan momentum Ramadan dengan menghadirkan kampanye video emosional bertajuk *This Time Is Better*. Kampanye ini mengomunikasikan bagaimana menjadikan momen Ramadan kali ini akan lebih baik. Hidup lebih baik, masa depan lebih baik, hubungan dengan keluarga dan teman-teman lebih baik, kondisi keuangan yang lebih baik. Untuk itu, Aladin hadir untuk menemani mencapai tujuan yang lebih baik melalui berbagai promo dan program menarik yang dapat menjadikan Ramadan lebih bermakna, dengan mengangkat produk unggulan,

regulators, regarding Bank Aladin Syariah products that have been successfully developed and registered in the previous year. Bank Aladin Syariah realizes that amidst changes in behavior and quite tight competition, a more effective and efficient marketing strategy is needed, which certainly must be carried out intensively. In order to achieve growth, Bank Aladin Syariah must focus on increasing customer acquisition.

In principle, Indonesia, which has the largest Muslim population in the world, is a great potential for Bank Aladin Syariah to improve performance and achieve growth. Moreover, Bank Aladin Syariah, which is a digital sharia bank, benefits from the increasingly massive use of mobile phones in almost all levels of society, which is supported by adequate network infrastructure.

To support the growth achievement target in 2024, Bank Aladin Syariah has prepared and established a marketing strategy, as follows:

1. Digital-First Customer Acquisition Strategy
   As a sharia-based digital bank, we implemented a customer acquisition strategy that focuses on a digital-first approach. By utilizing various digital channels and strategic partnerships, we continued to increase the number of new customers through the following approaches:
   a. Digital Marketing Optimization: Using digital-based acquisition funnels, including Search Engine Marketing (SEM), social media advertising, and retargeting campaigns to effectively increase account registration conversions.
   b. Referral & Incentive Program: Developing a member-get-member based referral program to drive organic growth by providing attractive incentives for customers who successfully invite new users.
   c. Customer Onboarding Optimization: Ensuring a seamless account registration experience is our priority by presenting fast, easy, and user-friendly e-KYC integration through our mobile banking application.
2. Mass Awareness & Brand Positioning Campaign
   To strengthen our position as the leading digital sharia bank and increase public awareness of Bank Aladin Syariah, we ran various strategic marketing campaigns, such as the Ramadan video campaign. By utilizing the momentum of Ramadan by presenting an emotional video campaign entitled “This Time Is Better”. This campaign communicates how to make this Ramadan moment better. Better life, better future, better relationships with family and friends, better financial conditions. For that, Aladin is here to accompany you in achieving better goals through various interesting promos and programs that can make Ramadan more meaningful, by promoting superior products, such as Ala Deposito and Ala Impian. This campaign is strengthened through a digital amplification strategy, including digital

seperti Ala Deposito dan Ala Impian. Kampanye ini diperkuat melalui strategi amplifikasi digital, termasuk iklan digital, media sosial, serta kolaborasi dengan *Key Opinion Leader* (KOL) dari industri finansial.

3. Program dan Fitur Menarik Untuk Nasabah
   Dalam rangka meningkatkan loyalitas dan *engagement* nasabah, kami menghadirkan berbagai program dan fitur yang menarik serta relevan dengan kebutuhan mereka:
   a. Kampanye Ala Deposito: Menawarkan imbal hasil kompetitif berbasis syariah melalui produk Ala Deposito, yang memberikan keuntungan optimal bagi nasabah yang ingin menyimpan dana dengan prinsip syariah.
   b. *Gamification*: Mengembangkan program *gamification* untuk meningkatkan jumlah pengguna aktif melalui berbagai fitur transaksi, termasuk Ala Berbagi, Bayar & Beli, QRIS, kartu debit, *e-Wallet*, hingga integrasi dengan BaaS Alfagift.
   c. Joint Promo dengan Ekosistem Minimarket Terbesar: Berkolaborasi dengan ekosistem minimarket terbesar untuk menghadirkan promo eksklusif di momen-momen relevan, guna meningkatkan transaksi nasabah dalam ekosistem keuangan digital berbasis syariah.
   d. Ala Berbagi *Recurring*: Program yang dirancang untuk meningkatkan *active user*. Melalui program ini, nasabah diberikan kemudahan untuk berdonasi setiap hari Jumat melalui Ala Berbagi, serta memanfaatkan fitur transaksi rutin yang dapat dijadwalkan setiap minggu.

Dengan strategi pemasaran yang efektif, Bank Aladin Syariah percaya tingkat penetrasi produk dan layanan yang ditawarkan Bank kepada masyarakat akan terus meningkat. Dengan begitu, harapannya terjadi peningkatan pangsa pasar Bank Aladin Syariah, yang berfokus pada akuisisi dan peningkatan kualitas nasabah dari segmen Ritel, serta segmen Small Medium Enterprise (SME) & Korporasi.

advertising, social media, and collaboration with Key Opinion Leaders (KOL) from the financial industry.

3. Interesting Programs and Features for Customers
   In order to increase customer loyalty and engagement, we present various interesting programs and features that are relevant to their needs:
   a. Ala Deposito Campaign: Offering competitive sharia-based returns through the Ala Deposito product, which provides optimal benefits for customers who want to save funds with sharia principles.
   b. Gamification: Developing a gamification program to increase the number of active users through various transaction features, including Ala Berbagi, Pay & Buy, QRIS, debit cards, e-Wallet, and integration with BaaS Alfagift.
   c. Joint Promo with the Largest Minimarket Ecosystem: Collaborating with the largest minimarket ecosystem to present exclusive promos at relevant moments, in order to increase customer transactions in the sharia-based digital financial ecosystem.
   d. Ala Berbagi Recurring: A program designed to increase active users. Through this program, customers are given the convenience of donating every Friday through Ala Berbagi, as well as utilizing the routine transaction feature that can be scheduled every week.

With an effective marketing strategy, Bank Aladin Syariah believes that the penetration rate of products and services offered by the Bank to the public will continue to increase. Thus, it is hoped that there will be an increase in the market share of Bank Aladin Syariah, which focuses on the acquisition and improvement of customer quality from the Retail segment, as well as the Small Medium Enterprise (SME) & Corporate segments.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Bank
Overview Of Operations Per Bank Business Segment

Bank Aladin Syariah Syariah perusahaan bergerak di bidang syariah berbasis digital terus berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dengan menyediakan berbagai produk-produk perbankan syariah terbaik. Selain fokus dalam menyediakan produk dan layanan unggul, Bank Aladin Syariah juga memperluas cakupan pasar hingga ke seluruh wilayah di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasi Aladin. Di samping itu, untuk memberikan layanan yang optimal kepada nasabah, Bank Aladin Syariah juga terus memperluas kerja sama kemitraan. Di antaranya adalah kemitraan dengan Alfamart yang menghadirkan layanan tarik setor tunai Bank pada seluruh gerai Alfamart dan Alfamidi yang ada di Indonesia. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga telah menghadirkan layanan *Banking as a Service* pada *platform* Alfagift.

Transformasi bisnis yang dilakukan oleh Bank Aladin Syariah dengan tetap menjalankan fungsi intermediasi, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan prinsip syariah. Segmen usaha Bank Aladin Syariah terdiri dari atas segmen Ritel, serta segmen *Small Medium Enterprise* (SME) & Korporasi. Berikut pembahasan dan penjelasan mengenai segmen Ritel, serta segmen *Small Medium Enterprise* (SME) & Korporasi dari Bank Aladin Syariah.

SEGMEN RITEL

Penjelasan dan Perkembangan Segmen

Segmen Ritel dirancang untuk menjadi pilar utama dalam melakukan akuisisi nasabah secara digital melalui aplikasi Bank Aladin Syariah. Pada segmen ritel, Bank Aladin Syariah menyasar nasabah individu termasuk di dalamnya kepada segmen *underbanked* dan *unbanked* dengan menawarkan produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito berjangka, serta layanan perbankan seperti menu pembayaran, pembelian, donasi hingga transaksi tarik dan setor tunai di gerai Alfamart yang merupakan mitra strategis Bank Aladin Syariah.

Berikut adalah produk-produk penghimpunan dana dari segmen ritel Bank.

1. Ala Dompet
   Produk Ala Dompet adalah bentuk tabungan yang didasarkan pada prinsip Akad *Mudharabah*. Produk ini dirancang untuk memenuhi keperluan transaksi perbankan sehari-hari dan dapat dihubungkan dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh Bank.
2. Ala Impian
   Ala Impian adalah produk tabungan berdasarkan Akad *Mudharabah* yang bertujuan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan mereka. Nasabah dapat membuat hingga 20 rekening yang berbeda, hingga menetapkan target waktu, atau jumlah tabungan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bank Aladin Syariah Syariah, a company engaging in digital-based sharia, continuously strive to meet all customers' needs by providing a variety of the best sharia banking products. In addition to focusing on providing superior products and services, Bank Aladin Syariah also expands its market coverage to all regions in Indonesia through the use of Aladin technology and applications. In addition, to provide optimal service to customers, Bank Aladin Syariah also continues to expand partnership cooperation. This includes the partnership with Alfamart which provides the Bank's cash withdrawal and deposit services at all Alfamart and Alfamidi outlets in Indonesia. In addition, Bank Aladin Syariah has also provided Banking as a Service services on the Alfagift platform.

Business transformation is carried out by Bank Aladin Syariah while still carrying out the intermediary function, both for fund accumulation and fund disbursement with sharia principles. Bank Aladin Syariah's business segments consist of the Retail segment, as well as the Small Medium Enterprise (SME) & Corporate segments. The following is a discussion and explanation of the Retail segment, as well as the Small Medium Enterprise (SME) & Corporate segments of Bank Aladin Syariah.

RETAIL SEGMENT

Segment Explanation and Development

The Retail segment is designed to be the main pillar in acquiring customers digitally through the Bank Aladin Syariah application. In the retail segment, Bank Aladin Syariah targets individual customers including the underbanked and unbanked segments by offering fund accumulation products such as savings and time deposits, as well as banking services such as payment menus, purchases, donations to cash withdrawal and deposit transactions at Alfamart outlets which are strategic partners of Bank Aladin Syariah.

The following are fund accumulation products from the Bank's retail segment.

1. Ala Dompet
   Ala Dompet product is a form of savings based on the Mudharabah Agreement principle. This product is designed to meet daily banking transaction needs and can be linked to a Debit Card issued by the Bank.
2. Ala Impian
   Ala Impian is a savings product based on the Mudharabah Agreement that aims to help customers plan their finances. Customers can create up to 20 different accounts, set time targets, or savings amounts according to their needs.

3. Ala Deposito
   Ala Deposito adalah produk simpanan berjangka berbasis syariah dengan sistem bagi hasil (nisbah) yang kompetitif. Dengan tenor fleksibel 1, 3, 6, dan 12 bulan, produk ini membantu nasabah dalam perencanaan keuangan untuk berbagai kebutuhan seperti haji, pendidikan, dan dana darurat.
4. Ala Impian Qurban
   Ala Impian Qurban adalah solusi tabungan terpisah yang memudahkan nasabah dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk ibadah qurban. Nasabah dapat menentukan jenis hewan qurban yang diinginkan sejak awal pembukaan rekening sehingga proses perencanaan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan.
5. Ala Gen
   Ala Gen adalah tabungan khusus untuk anak berusia 12–17 tahun yang dirancang untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini. Dengan Aladin Gen, anak dapat belajar mengelola uang dengan lebih bijak dan orang tua juga bisa memantau transaksi anak dengan mudah.
6. Ala Berbagi
   Ala Berbagi adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat yang telah menjalin kemitraan dengan Bank dan dikenal sebagai lembaga tepercaya melalui aplikasi *mobile* Aladin.
7. Layanan *Bill Payment*
   Layanan *Bill Payment* atau Bayar & Beli adalah layanan yang menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi harian. Di dalam layanan ini terdapat berbagai pilihan, yaitu pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, pembelian paket data, pembelian token listrik, hingga *top up saldo e-Wallet*.
8. Tarik dan Setor Tunai
   Layanan Tarik dan Setor Tunai membantu nasabah untuk menarik dan menyetor uang tunai tanpa perlu menggunakan kartu debit. Layanan ini dapat diakses melalui seluruh outlet Alfamart di seluruh Indonesia.

Tantangan dan Strategi Tahun 2024

Upaya melakukan pengembangan, Bank Aladin Syariah pada segmen Ritel dalam rangka meningkatkan kinerja, meski terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi Bank Aladin Syariah terkait segmen Ritel di tahun 2024, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan di industri Perbankan dalam memberikan imbal hasil di tengah tren kenaikan suku bunga di pasar.
2. Semakin banyaknya Bank berinvestasi pada pengembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai pilihan produk dan layanan digital sehingga nasabah ritel dapat merubah preferensi Bank dengan cepat.

Di tengah tantangan tersebut, Bank Aladin Syariah telah menetapkan berbagai kebijakan strategis terkait segmen Ritel, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi kerjasama mitra bisnis Bank dalam menjangkau nasabah ritel

3. Ala Deposito
   Ala Deposito is a sharia-based term deposit product offering a competitive profit-sharing (nisbah) system. With flexible tenors of 1, 3, 6, and 12 months, this product supports customers in financial planning for various needs such as Hajj, education, and emergency funds.
4. Ala Impian Qurban
   Ala Impian Qurban is a separate savings solution that makes it easier for customers to plan and accumulate funds for qurban worship. Customers can determine the type of qurban animal they want from the start of opening the account so that the planning process becomes easier and according to their needs.
5. Aladin Gen
   Aladin Gen is a special savings for children aged 12-17 years old that is designed to build the habit of saving and managing finances from an early age. With Aladin Gen, children can learn to manage money more wisely and parents can also monitor their children's transactions easily.
6. Ala Berbagi
   Ala Berbagi is a service that allows customers to donate through the Zakat Institution that has partnered with the Bank and is known as a trusted institution through the Aladin mobile application.
7. Bill Payment Service
   Bill Payment or Pay & Buy Service is a service that offers convenience for customers to carry out various daily transactions. In this service there are various options, namely paying electricity bills, buying credit, buying data packages, buying electricity tokens, to topping up e-Wallet balances.
8. Withdraw and Deposit Cash
   The Withdraw and Deposit Cash service helps customers to withdraw and deposit cash without having to use a debit card. This service can be accessed through all Alfamart outlets throughout Indonesia.

Challenges and Strategies in 2024

Efforts to develop has been carried out by Bank Aladin Syariah in the Retail segment to improve performance, although there are several challenges faced. The challenges faced by Bank Aladin Syariah related to the Retail segment in 2024, include the following:

1. Competition in the Banking industry in providing returns amidst the trend of rising interest rates in the market.
2. The increasing number of Banks investing in the development of digital technology that presents a variety of digital product and service choices so that retail customers can change bank preferences quickly.

Amid these challenges, Bank Aladin Syariah has established various strategic policies related to the Retail segment, namely as follows:

1. Optimizing cooperation with Bank business partners in reaching retail customers

2. Memperluas melakukan pengembangan dan inovasi berkelanjutan atas produk dan layanan perbankan ritel yang ditawarkan oleh Bank, baik melalui aplikasi digital Bank maupun pelayanan kepada nasabah secara langsung oleh *Relationship Manager*

SEGMEN UMKM & KORPORASI

Penjelasan dan Perkembangan Segmen

Segmen UMKM dan Korporasi merupakan pilar utama dalam membangun portofolio pendanaan dan juga pembiayaan Aladin Bank. Pada segmen ini, Bank Aladin Syariah menyasar nasabah pengusaha atau badan usaha baik yang berasal dari segmen mikro, kecil, menengah maupun korporasi besar dengan menawarkan produk penghimpun dana seperti tabungan dan deposito berjangka, serta layanan rekening *payroll* karyawan. Di samping produk pendanaan, Bank juga menawarkan produk pembiayaan syariah yang bertujuan mendukung pertumbuhan usaha nasabah.

Tantangan dan Strategi Tahun 2024

Di tahun 2024, Bank Aladin Syariah terus melakukan ekspansi kemitraan untuk menciptakan awareness pada target segmen, dan diharapkan akan memudahkan proses akuisisi atas nasabah UMKM & Korporasi. Adapun kemitraan strategis yang dilakukan oleh Bank Aladin Syariah juga menyasar ke seluruh ekosistem yang terkait, mulai dari karyawan, jaringan *supplier*, dan ekosistem lainnya untuk dapat menikmati produk dan layanan perbankan syariah Bank Aladin Syariah. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Alain Bank terkait segmen UMKM & Korporasi di tahun 2024, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan di industri perbankan baik dari sisi penghimpunan dana maupun pembiayaan di tengah tren kenaikan suku bunga dan likuiditas tinggi di pasar
2. Gap atas kapasitas segmen UMKM terhadap pemenuhan persyaratan standar produk dan layanan keuangan perbankan.
3. Kebutuhan sektor korporasi yang komprehensif akan solusi keuangan menyeluruh bagi perusahaan

Adapun strategi yang dilakukan Bank Aladin Syariah dalam rangka mengembangkan segmen UMKM & Korporasi, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan informasi produk dan layanan Bank Aladin Syariah yang lebih efektif bagi segmen UKM dan Korporasi melalui Sosialisasi Produk dan Layanan Bank Aladin Syariah terutama kepada calon nasabah dari ekosistem mitra.
2. Menambah ragam produk dan akad pembiayaan yang ditawarkan Bank, diantaranya dengan peluncuran produk pembiayaan dengan akad Musyarakah.
3. Melengkapi produk pendanaan dan layanan perbankan yang ditawarkan Bank, diantaranya melalui layanan Corporate Internet Banking dan penyediaan rekening payroll Karyawan bagi nasabah.

2. Expanding Conducting continuous development and innovation of retail banking products and services offered by the Bank, both through the Bank's digital application and direct customer service by Relationship Managers

MSME & CORPORATE SEGMENT

Explanation and Development of Segment

The MSME and Corporate segment is the main pillar in building Aladin Bank's funding and financing portfolio. In this segment, Bank Aladin Syariah targets business customers or business entities from the micro, small, medium and large corporate segments by offering fund-accumulation products such as savings and time deposits, as well as employee payroll account services. In addition to funding products, the Bank also offers sharia financing products that aim to support customer business growth.

Challenges and Strategies for 2024

In 2024, Bank Aladin Syariah continued to expand partnerships to create awareness in target segments, and was expected to facilitate the acquisition process for MSME & Corporate customers. The strategic partnerships carried out by Bank Aladin Syariah also targeted the entire related ecosystem, starting from employees, supplier networks, and other ecosystems to be able to enjoy Bank Aladin Syariah's sharia banking products and services. However, there were several challenges faced by Alain Bank related to the MSME & Corporate segment in 2024, including the following:

1. Competition in the banking industry both in terms of fund accumulation and financing amidst the trend of rising interest rates and high liquidity in the market
2. Gap in the capacity of the MSME segment to meet the requirements of banking financial product and service standards.
3. The need for a comprehensive corporate sector for comprehensive financial solutions for companies.

The strategies carried out by Bank Aladin Syariah in order to develop the MSME & Corporate segment are as follows:

1. Providing more effective information on Bank Aladin Syariah products and services for the SME and Corporate segment through the Socialization of Bank Aladin Syariah Products and Services, especially to prospective customers from the partner ecosystem.
2. Increasing the variety of products and financing contracts offered by the Bank, including by launching financing products with Musyarakah contracts.
3. Complementing the funding products and banking services offered by the Bank, including through Corporate Internet Banking services and providing Employee payroll accounts for customers.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini telah mengacu kepada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP *Ernst & Young*) dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

The analysis and discussion of financial performance in this Annual Report refer to the Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) with an unqualified opinion in all material respects for the years ended December 31, 2024 and 2023.

Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Bank Aladin Syariah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, serta peraturan-peraturan yang berlaku.

The presentation and disclosure of Bank Aladin Syariah's Financial Statements were prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), including the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), the Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI), and Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.7, as attached to the Bapepam and LK Chairman Decree No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, as well as other applicable regulations.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION STATEMENT

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2023-2024
Table of Financial Position for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset Assets	**9.362.085**	7.092.120	2.269.965	32,01%	^
Liabilitas Liabilities	**813.461**	751.880	61.581	8,19%	^
Dana *Syirkah* Temporer Temporary Syirkah Funds	**5.410.031**	3.254.999	2.155.032	66,21%	^
Ekuitas Equity	**3.138.593**	3.085.241	53.352	1,73%	^
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds, and Equity	**9.362.085**	**7.092.120**	**2.269.965**	**32,01%**	^

Berdasarkan tabel di atas, jumlah aset Bank di tahun 2024, tercatat meningkat 32,01% dibanding tahun sebelumnya, sementara jumlah liabilitas mengalami peningkatan 8,19%. Adapun jumlah dana *syirkah* temporer di tahun 2024, tercatat meningkat 66,21% dibanding tahun sebelumnya, dan jumlah ekuitas mengalami peningkatan 1,73%.

Based on the table above, the Bank's total assets in 2024 increased by 32.01% compared to the previous year, while total liabilities rose by 8.19%. Meanwhile, temporary syirkah funds grew by 66.21% in 2024, and total equity increased by 1.73%.

Aset

Assets

Tabel Aset Tahun 2023-2024
Table of Assets for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas Cash	**233**	1.013	(780)	-76,99%	∨
Giro pada Bank Indonesia Current Account with Bank Indonesia	**307.476**	423.910	(116.434)	-27,46%	∨
Giro pada Bank Lain - Neto Current Accounts with Other Banks – Net	**1.157**	13.353	(12.196)	-91,33%	∨
Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia	**1.892.700**	1.752.700	140.000	7,98%	∧
Investasi pada Surat Berharga - Neto Investment in Securities – Net	**2.082.160**	1.403.362	678.798	48,36%	∧
Piutang *Murabahah* - Neto Murabaha Receivables – Net	**38.847**	790.645	(751.798)	-95,08%	∨
Pinjaman Qardh - Neto Qardh Financing - Net	**597.995**	815.623	(217.628)	-26,68%	∨
Pembiayaan Musyarakah - Neto Musyarakah Loans - Net	**4.050.086**	1.449.932	2.600.154	179,32%	∧
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto Fixed Assets and Right of Use Assets – Net	**34.744**	47.367	(12.623)	-26,64%	∨
Aset Tak Berwujud - Neto Intangible Assets – Net	**102.469**	77.339	25.130	32,49%	∧
Aset Lain-Lain Other Assets	**254.218**	316.876	(62.658)	-19,77%	∨
Total Aset Total Assets	**9.362.085**	**7.092.120**	**2.269.965**	**32,01%**	∧

Per 31 Desember 2024, jumlah aset Bank tercatat sebesar Rp9.362.085 juta mengalami peningkatan 32,01% atau Rp2.269.965 juta dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp7.092.120 juta. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan dana syirkah temporer yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan musyarakah dan investasi pada surat berharga.

As of December 31, 2024, the Bank's total assets amounted to Rp9,362,085 million, reflecting an increase of 32.01% or Rp2,269,965 million compared to the previous year's total of Rp7,092,120 million. This increase was driven by additional musyarakah financing in 2024 amounting to Rp2.6 million.

Kas
Jumlah kas di tahun 2024, tercatat sebesar Rp233 juta, mengalami penurunan 76,99% atau Rp780 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.013 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya aktivitas operasional Bank.

Cash
Total Cash in 2024 was recorded at Rp233 million, showing a decrease of 76.99% or Rp780 million compared to Rp1,013 million in 2023. This decrease was due to the Bank's operational activities.

Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank Indonesia, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp307.476 juta, mengalami penurunan 27,46% atau Rp116.434 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp423.910 juta. Penurunan ini disebabkan oleh insentif KLM dari Bank Indonesia yang lebih besar di tahun 2024 karena kontribusi Bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Current Account with Bank Indonesia
Current Account with Bank Indonesia as of December 31, 2024, amounted to Rp307,476 million, decreasing by 27.46% or Rp116,434 million compared to Rp423,910 million in the previous year. The decrease was due to higher KLM incentives from Bank Indonesia in 2024, resulting from the Bank's contribution in disbursing financing to priority sectors to support economic growth.

Giro pada Bank Lain – Neto

Giro pada Bank lain - neto, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp1.157 juta, mengalami penurunan 91,33% atau Rp12.196 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp13.353 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penempatan nostro pada bank lain.

Penempatan pada Bank Indonesia

Per 31 Desember 2024, penempatan pada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp1.892.700 juta, mengalami peningkatan 7,98% atau Rp140.000 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.752.700 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada penempatan instrumen FASBIS.

Investasi pada Surat Berharga – Neto

Investasi pada surat berharga – neto, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp2.082.160 juta, mengalami peningkatan 48,36% atau Rp678.798 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.403.362 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana Bank yang disalurkan pada instrumen surat berharga.

Piutang Murabahah – Neto

Piutang murabahah – neto, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp38.847 juta, mengalami penurunan 95,08% atau Rp751.798 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp790.645 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan pembiayaan pada akad murabahah.

Pinjaman Qardh – Neto

Pinjaman qardh – neto, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp597.995 juta, mengalami penurunan 26,68% atau Rp217.628 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp815.623 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan pembiayaan pada akad qardh.

Pembiayaan Musyarakah – Neto

Pembiayaan musyarakah – neto, per 31 Desember 2024, tercatat Rp4.050.086 juta, mengalami peningkatan 179,32% atau Rp2.600.154 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.449.932 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya nasabah pembiayaan pada akad musyarakah.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna – Neto

Aset tetap dan aset hak guna – neto, per 31 Desember 2024, tercatat Rp34.744 juta, mengalami penurunan 26,64% atau Rp12.623 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp47.367 juta. Penurunan ini disebabkan oleh depresiasi aset tetap pada tahun berjalan.

Aset Tak Berwujud – Neto

Aset tak berwujud – neto, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp102.469 juta, mengalami peningkatan 32,49% atau Rp25.130 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp77.339 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan aset tak berwujud sejalan dengan pengembangan bisnis bank digital.

Current Account with Other Banks – Net

Current Account with other banks – Net, as of December 31, 2024, amounted to Rp1,157 million, decreasing by 91.33% or Rp12,196 million from Rp13,353 million in 2023. This decline was due to a decrease in nostro placements at other banks.

Placements with Bank Indonesia

As of December 31, 2024, placements with Bank Indonesia were recorded at Rp1,892,700 million, increasing by 7.98% or Rp140,000 million from Rp1,752,700 million in 2023. The increase was due to a rise in placements in FASBIS instruments.

Investment in Marketable Securities - Net

Investment in Marketable securities – net, as of December 31, 2024, amounted to Rp2,082,160 million, showing an increase of 48.36% or Rp678,798 million compared to Rp1,403,362 million in 2023. The increase was due to the Bank's higher fund accumulation, which was allocated to securities instruments.

Murabahah Receivables - Net

Murabahah Receivables – Net, as of December 31, 2024, amounted to Rp38,847 million, reflecting a decrease of 95.08% or Rp751,798 million compared to Rp790,645 million in 2023. This decrease was due to the settlement of financing under the murabahah agreement.

Funds of Qardh - Net

Funds of Qardh – Net, as of December 31, 2024, amounted to Rp597,995 million, a decrease of 26.68% or Rp217,628 million from Rp815,623 million in 2023. This decrease was due to the settlement of financing under the qardh agreement.

Musyarakah Financing – Net

Musyarakah Financing – Net, as of December 31, 2024, amounted to Rp4,050,086 million, showing a significant increase of 179.32% or Rp2,600,154 million compared to Rp1,449,932 million in 2023. This increase was due to the growth in financing customers under the musyarakah agreement.

Fixed Assets and Right of Use Assets - Net

Fixed Assets and Right-of-Use Assets – Net, as of December 31, 2024, amounted to Rp34,744 million, a decrease of 26.64% or Rp12,623 million compared to Rp47,367 million in 2023. This decrease was due to depreciation of fixed assets in the current year.

Intangible Assets – Net

Intangible Assets – Net, as of December 31, 2024, amounted to Rp102,469 million, an increase of 32.49% or Rp25,130 million compared to Rp77,339 million in 2023. This increase was due to the addition of intangible assets in line with the development of the digital banking business.

Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2024, aset lain-lain tercatat sebesar Rp254.218 juta, mengalami penurunan 19,77% atau Rp62.658 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp316.876 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya biaya dibayar dimuka dan pajak dibayar dimuka sebesar RpNihil pada tahun berjalan.

Other Assets

As of December 31, 2024, other assets totaled Rp254,218 million, decreasing by 19.77% or Rp62,658 million compared to Rp316,876 million in 2023. This decline was due to a decrease in prepaid expenses and prepaid taxes, amounting to RpNil in the current year.

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas Tahun 2023-2024
Table of Liabilities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Segera Liabilities due immediately	**32.612**	69.839	(37.227)	-53,30%	∨
Simpanan Wadiah Wadiah Deposits	**5.073**	1	5.072	507.200,00%	∧
Surat Berharga yang Diterbitkan Securities issued	**600.000**	-	600.000	100,00%	∧
Liabilitas pada Bank Indonesia Liabilities to Bank Indonesia	**-**	584.248	(584.248)	-100,00%	∨
Utang Pajak Taxes payable	**7.853**	6.973	880	12,62%	∧
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Estimated Losses on Commitments and Contingencies	**1.873**	2.822	(949)	-33,62%	∨
Liabilitas Lain-Lain Other Liabilities	**166.050**	87.997	78.053	88,69%	∧
Total Liabilitas Total Liabilities	**813.461**	**751.880**	**61.581**	**8,19%**	∧

Per 31 Desember 2024, jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp813.461 juta, mengalami peningkatan 8,19% atau Rp61.581 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp751.880 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya transaksi pada surat berharga yang diterbitkan (SIPA *Borrowing*) dan bertambahnya liabilitas lain-lain atas pencatatan pendapatan diterima dimuka.

As of December 31, 2024, total liabilities were recorded at Rp813,461 million, an increase of 8.19% or Rp61,581 million compared to 2023 which amounted to Rp751,880 million. This increase was due to transactions in securities issued (SIPA Borrowing) and the increase in other liabilities from the recognition of deferred income.

Liabilitas Segera

Liabilitas segera, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp32.612 juta, mengalami penurunan 53,30% atau Rp37.277 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp69.839 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya kewajiban ATM dan Alfamart.

Liabilities due immediately

Liabilities due immediately, as of December 31, 2024, were recorded at Rp32,612 million, a decrease of 53.30% or Rp37,277 million compared to 2023 which amounted to Rp69,839 million. This decline was due to the decrease in ATM and Alfamart liabilities.

Simpanan Wadiah

Per 31 Desember 2024, simpanan dari nasabah berupa tabungan wadiah tercatat sebesar Rp5.073 juta, mengalami peningkatan 507.200,00% atau Rp5.072 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tabungan wadiah *corporate* di tahun berjalan.

Wadiah Deposits

As of December 31, 2024, Wadiah deposits from customers in the form of wadiah current accounts were recorded at Rp5,073 million, an increase of 507,200.00% or Rp5,072 million compared to 2023 which amounted to Rp1 million. This increase was due to the existence of corporate wadiah savings in the current year.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp600.000 juta, mengalami peningkatan 100,00% dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar RpNihil. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerbitan SIPA *Borrowing*.

Securities Issued

Securities issued, as of December 31, 2024, was recorded at Rp600,000 million, an increase of 100.00% or Rp600,000 million compared to 2023 which was recorded at RpNil. This increase was due to the issuance of SIPA Borrowing.

Liabilitas pada Bank Indonesia

Liabilitas pada Bank Indonesia, per 31 Desember 2024, tercatat RpNihil, mengalami penurunan 100,00% atau Rp584.248 juta dari tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh jatuh tempo fasilitas PaSBI pada tanggal 24 Januari 2024. Bank telah melunasi liabilitas tersebut sesuai tanggal jatuh temponya.

Liabilities due to Bank Indonesia

Liabilities due to Bank Indonesia, as of December 31, 2024, was recorded at nil, decreased by 100.00% or Rp584,248 million from 2023. This decrease was due to the maturity of the PaSBI facility on January 24, 2024. The Bank has paid off the liability according to the maturity date.

Utang Pajak

Per 31 Desember 2024, utang pajak tercatat sebesar Rp7.853 juta, mengalami peningkatan 12,62% atau Rp880 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp6.973 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan PPH Pasal 4 ayat 2, disertai dengan penurunan PPH Pasal 21.

Taxes Payable

As of December 31, 2024, tax payable was recorded at Rp7,853 million, an increase of 12.62% or Rp880 million compared to 2023 which amounted to Rp6,973 million. This increase was due to an increase in Article 4 paragraph 2 of Income Tax, accompanied by a decrease in Article 21 Income Tax.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp1.873 juta, mengalami penurunan 33,62% atau Rp949 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp2.822 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan fasilitas kelonggaran tarik akad murabahah.

Estimated Loss on Commitments and Contingencies

Estimated loss on commitments and contingencies, as of December 31, 2024, was recorded at Rp1,873 million, a decrease of 33.62% or Rp949 million compared to 2023 which amounted to Rp2,822 million. This decline was due to a decrease in the murabahah contract withdrawal relaxation facility.

Liabilitas Lain-Lain

Per 31 Desember 2024, liabilitas lainnya tercatat sebesar Rp166.050 juta, mengalami peningkatan 88,69% atau Rp78.053 juta dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp87.997 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan diterima dimuka pada tahun berjalan.

Other Liabilities

As of December 31, 2024, other liabilities were recorded at Rp166,050 million, an increase of 88.69% or Rp78,053 million compared to 2023 which amounted to Rp87,997 million. This increase was due to the rise in unearned revenue in the current year.

Dana *Syirkah* Temporer

Temporary Syirkah Funds

Tabel Dana *Syirkah* Temporer Tahun 2023-2024
Table of Temporary Syirkah Funds for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Giro *mudharabah* Mudharabah Current Account	**678**	-	678	100,00%	^
Tabungan *Mudharabah* Mudharabah Savings	**665.213**	510.651	154.562	30,26%	^
Deposito *Mudharabah* Mudharabah time deposits	**4.744.140**	2.744.348	1.999.792	72,86%	^
Total Dana *Syirkah* Temporer Total Temporary Syirkah Funds	**5.410.031**	**3.254.999**	**2.155.032**	**66,20%**	^

Jumlah dana *syirkah* temporer, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp5.410.031 juta, mengalami peningkatan 66,20% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp3.254.999 juta. Peningkatan dikarenakan oleh kenaikan nominal deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan giro *mudharabah*.

Giro Mudharabah

Giro *mudharabah* tercatat sebesar Rp678 juta, mengalami peningkatan 100,00% dibanding tahun 2023 yang tercatat Nihil. Peningkatan dikarenakan adanya produk baru di tahun 2024 berupa giro *mudharabah*.

Tabungan Mudharabah

Per 31 Desember 2024, tabungan *mudharabah* tercatat sebesar Rp665.213 juta, mengalami peningkatan 30,26% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp510.651 juta. Peningkatan dikarenakan oleh bertambahnya penempatan dana oleh nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah.

Deposito Mudharabah

Per 31 Desember 2024, deposito *mudharabah* tercatat sebesar Rp4.744.140 juta, mengalami peningkatan 72,86% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp2.744.348 juta. Peningkatan dikarenakan oleh bertambahnya penempatan dalam bentuk deposito mudharabah oleh nasabah korporasi dan ritel.

Total Temporary syirkah Funds, as of December 31, 2024, was recorded at Rp5,410,031 million, an increase of 66.20% compared to 2023 which was Rp3,254,999 million. This increase was due to the rise in the nominal value of mudharabah time deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah demand deposits.

Mudharabah Demand Deposits

mudharabah demand deposits was recorded at Rp678 million, reflecting a 100.00% increase compared to 2023, which was recorded as Nihil. The increase was due to the introduction of a new product in 2024, the mudharabah demand deposits.

Mudharabah Savings Deposits

As of December 31, 2024, mudharabah savings were recorded at Rp665,213 million, an increase of 30.26% compared to 2023 which was Rp510,651 million. The increase was due to the rise in fund placements by customers, in line with the growing number of customers.

Mudharabah Time Deposits

As of December 31, 2024, Mudharabah Time Deposits were recorded at Rp4,744,140 million, an increase of 72.86% compared to 2023 which was Rp2,744,348 million. The increase was due to the rise in placements in the form of mudharabah deposits by corporate and retail customers.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2023-2024
Table of Equity for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully paid-in capital	**1.391.848**	1.391.838	10	0,01%	^
Tambahan Modal Disetor Additional paid-in capital	**965.670**	965.669	1	0,01%	^
Dana Setoran Modal Capital deposit funds	**1.635.502**	1.512.501	123.001	8,13%	^
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of defined benefit plan	**7.464**	4.761	2.703	56,77%	^
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga dalam Kelompok Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Unrealized Gains on Marketable Securities at Fair Value through Other Comprehensive Income	**3.484**	2.120	1.364	64,33%	^
Saldo Laba Retained earnings					
Saldo Laba dari Kegiatan Konvensional Retained earnings from conventional activities	**29.541**	29.541	-	0,00%	^
Saldo Rugi dan Kegiatan Syariah Deficit from sharia activities	**(894.916)**	(821.189)	(73.727)	8,97%	^
Total Ekuitas Total Equity	**3.138.593**	**3.085.241**	**53.352**	**1,72%**	^

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp1.391.848 juta, mengalami peningkatan 0,01% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.391.838 juta. Peningkatan dikarenakan oleh adanya pelaksanaan waran.

Tambahan Modal Disetor

Per 31 Desember 2024, tambahan modal disetor tercatat sebesar Rp965.670 juta, mengalami peningkatan 0,01% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp965.669 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan agio saham.

Dana Setoran Modal

Dana setoran modal, per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp1.635.502 juta, mengalami peningkatan 8,13% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.512.501 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan dana setoran dari PT Aladin Global Ventures sepanjang tahun 2024 senilai Rp123.000 juta.

Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti

Hingga 31 Desember 2024, pengukuran kembali atas program imbalan pasti tercatat sebesar Rp7.464 juta, mengalami peningkatan 56,77% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp4.761 juta. Peningkatan disebabkan oleh keuntungan/kerugian aktuaria sesuai dengan PSAK 219.

Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga dalam Kelompok Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tercatat sebesar Rp3.484 juta, mengalami peningkatan 64,33% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp2.120 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan investasi pada surat berharga dalam unit reksadana syariah serta pergerakan nilai aktiva bersih.

Saldo Laba

Saldo laba merupakan akumulasi atas saldo laba dari kegiatan konvensional serta saldo rugi dari kegiatan syariah, per 31 Desember 2024 tercatat sebesar minus Rp894.916 juta, mengalami peningkatan 8,97% dibanding tahun 2023 yang sebesar minus Rp821.189 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib dan pendapatan operasional, yang diimbangi dengan kenaikan beban operasional Bank.

Issued and Fully Paid-in Capital

Issued and fully paid-in capital, as of December 31, 2024, was recorded at Rp1,391,848 million, an increase of 0.01% compared to 2023 which was Rp1,391,838 million. The increase was due to the warrants exercise.

Issued and fully paid

As of December 31, 2024, additional paid-in capital was recorded at Rp965,670 million, an increase of 0.01% compared to 2023 which was Rp965,669 million. The increase was due to the addition of share premiums.

Capital Deposit Funds

Capital deposit funds, as of December 31, 2024, were recorded at Rp1,635,502 million, an increase of 8.13% compared to 2023 which was Rp1,512,501 million. The increase was due to the additional deposit funds from PT Aladin Global Ventures throughout 2024, amounting to Rp123,000 million.

Remeasurement of Defined Benefit Plan

As of December 31, 2024, remeasurement of defined benefit plan was recorded at Rp7,464 million, an increase of 56.77% compared to 2023 which was Rp4,761 million. This increase was due to actuarial gains/losses in accordance with PSAK 219.

Unrealized Gains on Marketable Securities at Fair Value through Other Comprehensive Income

Unrealized Gains on Marketable Securities at Fair Value through Other Comprehensive Income was recorded at Rp3,484 million, an increase of 64.33% compared to Rp2,120 million in 2023. This increase was due to a rise in investments in sharia mutual fund securities as well as movements in net asset value.

Retained Earnings

Retained earnings is the accumulation of retained earnings from conventional activities and retained losses from sharia activities, as of December 31, 2024 was recorded at minus Rp894,916 million, an increase of 8.97% compared to 2023 which amounted to minus Rp821,189 million. The increase was due to an increase in fund management income by the Bank as mudharib and operating income, which was offset by an increase in the Bank's operating expenses.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2023-2024

Table of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Income from Funds Managed By Bank as Mudharib					
Pendapatan dari jual beli, bagi hasil dan ujrah Pendapatan dari jual beli, bagi hasil dan ujrah	**446.069**	201.056	245.013	121,86%	^
Pendapatan Usaha Utama Lainnya Other main operating income	**167.373**	133.446	33.927	25,42%	^
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* Total income from fund managed by Bank as Mudharib	**613.442**	334.502	278.940	83,38%	^
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Third Parties' Rights on Return of Temporary Syirkah Funds	**(308.801)**	(121.047)	(187.754)	155,10%	^
Hak Bagi Hasil Milik Bank Bank's Share in Profit Sharing	**304.641**	213.455	91.186	42,71%	^
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Income					
Laba Selisih *Kurs* - Neto Gain on foreign exchange - net	**44**	(11)	55	500,00%	^
Lain-Lain Others	**179.242**	36.804	142.438	387,02%	^
Total Pendapatan Usaha Lainnya Total Other Operating Income	**179.286**	36.793	142.493	387,28%	^
(Pembentukan) Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif (Establishment) Reversal of allowance for impairment losses on earning assets	**(20.548)**	(15.724)	4.824	30,68%	^
Beban Operasional Operating Expenses					
Umum dan Administrasi General and administrative	**(190.734)**	(137.667)	(53.067)	38,54%	^
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and employees' benefits	**(205.203)**	(194.251)	(10.952)	5,63%	^
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and amortization	**(30.562)**	(24.070)	(6.492)	26,97%	^
Promosi Promotion	**(95.165)**	(105.799)	10.634	-10,05%	v
Iuran Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority contributions	**(4.250)**	(3.282)	(968)	29,50%	^
Lain-Lain Others	**(10.952)**	(12.597)	1.643	-13,06%	v
Total Beban Operasional Total Operating Expenses	**(536.866)**	(477.666)	(59.200)	12,39%	^
Laba (Rugi) Operasional Profit (loss) from Operations	**(73.487)**	(243.141)	169.654	69,77%	^
Pendapatan Non Operasional - Neto Non-Operating Income - Net	**(240)**	16.403	(16.643)	-101,46%	v
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Profit (loss) Before Tax Expense	**(73.727)**	(226.738)	153.011	67,48%	^

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2023-2024

Table of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Beban Pajak - Neto Tax expenses - net	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan Profit (loss) – Net for the Current Year	(73.727)	(226.738)	153.011	67,48%	V
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income					
Pos-Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Item that will not be reclassified to profit or loss:					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of defined benefit plan	2.703	2.041	662	32,43%	^
Pajak Penghasilan Terkait Related income tax	-	-	-	-	-
Pos-Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Item that will be reclassified to profit or loss:					
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Unrealized gain on available-for-sale marketable securities	1.364	1.757	(393)	-22,36%	V
Pajak Penghasilan Terkait Related income tax	-	-	-	-	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income (Loss) for the Year	4.067	3.798	269	7,08%	^
Total Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	(69.660)	(222.940)	153.280	68,75%	V
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Profit (Loss) per Share (Full Rupiah)	(5)	(16)	11	68,75%	V

Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Di Tahun 2024, Bank membukukan total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib sebesar Rp613.442 juta, mengalami peningkatan 83,38% atau Rp278.940 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp334.502 juta. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan portofolio pembiayaan musyarakah yang berdampak pada kenaikan pendapatan bagi hasil musyarakah.

Total Income from Funds Managed by the Bank as Mudharib

In 2024, the Bank recorded Total Income from Funds Managed by the Bank as Mudharib of Rp613,442 million, an increase of 83.38% or Rp278,940 million compared to 2023 of Rp334,502 million. The increase was due to the growth in the musyarakah financing portfolio, which led to a rise in musyarakah profit-sharing income.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Per 31 Desember 2024, Bank mencatatkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer, sebesar Rp308.801 juta, mengalami peningkatan 155,10% atau Rp187.754 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp121.047 juta. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan pada tabungan dan deposito mudharabah yang berdampak pada kenaikan bagi hasil dana syirkah temporer.

Third Party Rights on Return of Temporary Syirkah Funds

As of December 31, 2024, the Bank recorded Third Party Rights on Return of Temporary Syirkah Funds, amounting to Rp308,801 million, an increase of 155.10% or Rp187,754 million compared to 2023 amounting to Rp121,047 million. The increase was due to the rise in mudharabah savings and deposits, which led to an increase in profit-sharing for temporary syirkah funds.

Hak Bagi Hasil Milik Bank

Hak bagi hasil milik Bank, adalah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer, di mana per 31

Bank's Share in Profit Sharing

The Bank's Share in Profit Sharing from managing funds by the Bank as mudharib minus third party rights to profit sharing from temporary syirkah funds, as of December 31,

Desember 2024, tercatat sebesar Rp304.641 juta, mengalami peningkatan 42,71% atau Rp91.186 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp213.455 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan pengelolaan dana oleh mudharib.

Total Pendapatan Usaha Lainnya

Di tahun 2024, total pendapatan usaha lainnya tercatat sebesar Rp179.286 juta, mengalami peningkatan 387,28% atau Rp142.493 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp36.793 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pada *fee* dan komisi atas ATM Bersama, Setor dan Tarik Tunai Alfamart serta pendapatan dari BI-FAST.

(Pembentukan) Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

Per 31 Desember 2024, Bank mencatatkan pembentukan Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif, sebesar Rp20.548 juta, mengalami peningkatan 30,68% atau Rp4.824 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp15.724 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan pencadangan pada pembiayaan musyarakah sejalan dengan meningkatnya pembiayaan musyarakah.

Total Beban Operasional

Per 31 Desember 2024, total beban operasional tercatat mencapai Rp536.866 juta, meningkat 12,39% atau Rp59.200 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp477.666 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban operasional transfer antar bank, premi penjamin simpanan, jasa tenaga ahli dan asuransi.

Laba (Rugi) Operasional

Di tahun 2024, Bank membukukan rugi operasional sebesar Rp73.487 juta, menurun 69,77% atau Rp169.654 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp243.141 juta. Penurunan disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan pengelolaan dana oleh mudharib pada tahun berjalan.

Pendapatan Non Operasional – Neto

Per 31 Desember 2024, Bank mencatatkan rugi non-operasional- neto, sebesar Rp240 juta, menurun 101,46% atau Rp16.643 juta dibanding tahun 2023 yang mencatatkan pendapatan non operasional - neto sebesar Rp16.403 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya reversal atas cadangan estimasi tagihan pajak di tahun 2023.

Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak

Di tahun 2024, Bank membukukan rugi sebelum pajak sebesar Rp73.727 juta, menurun 67,48% atau Rp153.011 juta bila dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp226.738 juta. Penurunan disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan pengelolaan dana oleh mudharib pada tahun berjalan.

Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan

Di tahun 2024, Bank membukukan rugi bersih periode berjalan sebesar Rp73.727 juta, menurun 67,48% atau Rp153.011 juta bila dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp226.738 juta. Penurunan disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan pengelolaan dana oleh mudharib pada tahun berjalan.

2024, reached Rp304,641 million, an increase of 42,71% or Rp91,186 million compared to Rp213,455 million in 2023. The increase was due to the rise in fund management income earned by the mudharib.

Total Other Operating Income

In 2024, total other operating income was recorded at Rp179,286 million, an increase of 387.28% or Rp142,493 million compared to 2023 amounting to Rp36,793 million. The increase was due to higher fees and commissions from ATM Bersama, cash deposit and withdrawal services at Alfamart, as well as income from BI-FAST.

(Provision) Reversal of Allowance for Impairment Losses on Earning Assets

As of December 31, 2024, the Bank recorded the (Establishment) Reversal of Allowance for Impairment Losses on Earning Assets, amounting to Rp20,548 million, an increase of 30.68% or Rp4,824 million compared to 2023 amounting to Rp15,724 million. The increase was due to additional provisioning for musyarakah financing in line with the growth of the musyarakah financing portfolio.

Total Operating Expenses

As of December 31, 2024, total operating expenses were recorded at Rp536,866 million, an increase of 12.39% or Rp59,200 million compared to 2023 of Rp477,666 million. The increase was due to the rise in operational expenses for interbank transfers, deposit insurance premiums, expert services, and insurance.

Profit (loss) from Operations

In 2024, the Bank's non-operating income- net was Rp73,487 million, a decrease of 69.77% or Rp169,654 million compared to 2023 of Rp243,141 million. The decrease was due to the rise in fund management income earned by the mudharib in the current year.

Non-Operating Income - Net

As of December 31, 2024, the Bank recorded non-operating loss-net of Rp240 million, a decrease of 101.46% or Rp16,643 million compared to 2023 which recorded non-operating income - net, amounting to Rp 16,403 million. The decrease was due to the reversal of estimated tax receivable provisions in 2023.

Profit (Loss) Before Tax Expense

In 2024, the Bank recorded a loss before tax of Rp73,727 million, a decrease of 67.48% or Rp153,011 million compared to Rp226,738 million in 2023. The decrease was due to the rise in fund management income earned by the mudharib in the current year.

Net Profit (Loss) for the Current Period

In 2024, the Bank recorded a net loss for the current period of Rp73,727 million, a decrease of 67.48% or Rp153,011 million compared to 2023 of Rp226,738 million. The decrease was due to the rise in fund management income earned by the mudharib in the current year.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan

Per 31 Desember 2024, Bank mencatatkan penghasilan komprehensif lain periode berjalan sebesar Rp4.067 juta, mengalami peningkatan 7,08% atau Rp269 juta dibanding tahun 2023 sebesar Rp3.798 juta. Hal ini dikarenakan kenaikan pada keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar dan pengukuran kembali program imbalan pasti.

Total Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Total laba (rugi) penghasilan komprehensif periode berjalan merupakan akumulasi dari laba (rugi) neto periode berjalan, dan penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan. Di mana per 31 Desember 2024, Bank membukukan total rugi penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar Rp69.660 juta, mengalami penurunan 68,75% atau Rp153.280 juta dibanding total rugi penghasilan komprehensif periode berjalan di tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp222.940 juta. Penurunan rugi penghasilan komprehensif dikarenakan oleh adanya kenaikan pendapatan pengelolaan dana oleh mudharib pada tahun berjalan.

Laba (Rugi) per Saham Dasar

Per 31 Desember 2024, Bank mencatatkan rugi per saham dasar sebesar Rp5,- mengalami penurunan 68,75% atau Rp11,- dibanding rugi per saham dasar yang tercatat sebesar Rp16,- di tahun 2023. Penurunan dikarenakan oleh adanya kenaikan pendapatan pada tahun berjalan, sehingga rugi per saham dasar menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Other Comprehensive Income (Loss) for the Current Period

As of December 31, 2024, the Bank recorded other comprehensive income for the current period of Rp4,067 million, an increase of 7.08% or Rp269 million compared to Rp3,798 million in 2023. This is due to the increase in unrealized gains on securities classified as fair value through profit or loss and the remeasurement of the defined benefit plan.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Current Period

Total comprehensive income (loss) for the current period is the accumulation of net income (loss) for the current period, and other comprehensive income (loss) for the current period. As of December 31, 2024, the Bank recorded a total loss on comprehensive income for the current period of Rp69,660 million, a decrease of 68.75% or Rp153,280 million compared to the total loss on comprehensive income for the current period in 2023 which was recorded at Rp222,940 million. The decrease in comprehensive income loss was due to the rise in fund management income earned by the mudharib in the current year.

Basic Profit (Loss) per Share

As of December 31, 2024, the Bank recorded basic loss per share of a decrease Rp5, a 68.75% or Rp11 compared to basic loss per share of Rp16 in 2023. The decrease was due to the rise in income during the current year, which resulted in a smaller basic loss per share compared to the previous year.

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

Tabel Arus Kas Tahun 2023-2024
Table of Cash Flows for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities					
Penerimaan Piutang, Bagi Hasil dan Usaha Utama Lainnya Proceeds of Receivables, Profit Sharing and Other Main Operating Businesses	**606.252**	336.092	270.160	80,38%	^
Pembayaran Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Payment of profit sharing for temporary syirkah funds	**(302.717)**	(115.011)	(187.706)	163,21%	^
Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya Receipt of other operating income	**179.242**	36.805	142.437	387,00%	^
Penerimaan Non Operasional – Neto Proceeds of Non Operating - Net	**(1.167)**	(487)	(680)	139,63%	^
Pembayaran Beban Operasional Proceeds of Non Operating - Net	**(408.208)**	(345.060)	(63.148)	18,30%	^

Tabel Arus Kas Tahun 2023-2024
Table of Cash Flows for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Laba (Rugi) Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi Profit (Loss) before changes in operating assets and liabilities	**73.402**	(87.661)	161.063	183,73%	^
Penurunan Aset Operasi Decrease in operating assets:	**(1.672.061)**	(1.891.557)	219.496	-11,60%	v
Kenaikan Liabilitas Operasi Increase in operating liabilities:	**2.221.185**	2.421.834	(200.649)	-8,28%	v
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net cash (used in) provided by operating activities	**622.526**	442.616	179.910	40,64%	^
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities					
Perolehan Investasi dalam Surat Berharga Acquisition of investment in marketable securities classified at cost and available-for-sale	**(19.607.936)**	(842.993)	(18.764.943)	2.225,99%	^
Perolehan Aset Tetap, Aset Hak Guna dan Piranti Lunak Acquisitions of fixed assets, right to use asset and software	**(39.337)**	(35.673)	(3.664)	10,27%	^
Penerimaan Dari Penjualan Surat Berharga Proceed from sale of marketable securities	**2.499.084**	326.000	2.173.084	666,59%	^
Penerimaan dari Investasi dalam Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo Proceed from investment in matured marketable securities	**16.425.813**	328.674	16.097.139	4.897,60%	^
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net cash used in investing activities	**(722.376)**	(223.992)	(498.384)	222,50%	^
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities					
Penerimaan Dana Setoran Modal dari Pemegang Saham Pengendali Proceeds capital of ultimate shareholder	**123.000**	152.500	(29.500)	-19,34%	v
Pelaksanaan Waran Exercise of warrants	**12**	12.405	(12.393)	-99,90%	v
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of lease liabilities	**(12.726)**	(12.376)	(350)	2,82%	^
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net cash provided by financing activities	**110.286**	152.529	(42.243)	-27,69%	v
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Increase in Cash and Cash Equivalents	**10.436**	371.153	(360.717)	-97,18%	v
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**2.191.111**	1.819.974	371.137	20,39%	^
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang pada Kas dan Setara Kas Effects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	**31**	(16)	47	293,75%	^
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	**2.201.578**	2.191.111	10.467	0,48%	^

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Di tahun 2024, Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp622.526 juta, mengalami peningkatan 40,65% atau Rp179.910 juta dibandingkan tahun 2023 di mana Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp442.616 juta. Peningkatan dikarenakan oleh adanya kenaikan pada penerimaan jual beli, bagi hasil dan usaha utama lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2024, Bank mencatatkan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi, sebesar Rp722.376 juta, mengalami peningkatan 222,50% atau Rp498.384 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp223.992 juta. Peningkatan dikarenakan oleh adanya perolehan dari efek-efek reksadana dan dari investasi pada surat berharga seperti SIMA, SIPA dan Sukuk Korporasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Di tahun 2024, Bank mencatatkan kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp110.286 juta, mengalami penurunan 27,69% atau Rp42.243 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp152.529 juta. Penurunan dikarenakan oleh penerimaan modal dari pemegang saham pengendali yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas

Kenaikan neto kas dan setara kas merupakan akumulasi atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, yang per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp10.436 juta, mengalami penurunan 97,19% atau Rp360.717 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp371.153 juta. Hal ini dikarenakan oleh adanya kenaikan pada aktivitas operasi dan pendanaan yang diimbangi dengan penggunaan arus kas pada aktivitas investasi.

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun

Kas dan setara kas pada awal tahun 2024, tercatat sebesar Rp2.191.111 juta, mengalami peningkatan 20,39% atau Rp371.137 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.819.874 juta. Peningkatan dikarenakan oleh adanya kenaikan penempatan pada bank Indonesia (FASBIS) serta pemenuhan GWM yang lebih besar.

Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang pada Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2024, pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas, tercatat sebesar Rp31 juta, mengalami peningkatan 293,75% atau Rp47 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp16 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya revaluasi pada mata uang asing sepanjang tahun 2024.

Cash Flow from Operating Activities

In 2024, the Bank recorded net cash obtained from (used for) operating activities of Rp622,526 million, an increase of 40.65% or Rp179,910 million compared to 2023 where the Bank recorded net cash obtained from operating activities of Rp442,616 million. The increase was due to the rise in income from sales transactions, profit-sharing, and other core business activities.

Cash Flow from Investing Activities

As of December 31, 2024, the Bank recorded net cash obtained from (used for) investing activities of Rp722,376 million, an increase of 222.50% or Rp498,384 million compared to 2023 of Rp223,992 million. The increase was due to gains from mutual fund securities and investments in securities such as SIMA, SIPA, and corporate Sukuk.

Cash Flow from Financing Activities

In 2024, the Bank recorded net cash obtained from (used for) financing activities of Rp110,286 million, a decrease of 27.69% or Rp42,243 million compared to 2023 of Rp152,529 million. The decrease was due to lower capital contributions from the controlling shareholders compared to the previous year.

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

The net increase (decrease) in cash and cash equivalents is an accumulation of cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and cash flows from financing activities, which as of December 31, 2024, were recorded at Rp10,436 million, a decrease of 97.19% or Rp360,717 million compared to 2023 of Rp371,153 million. This is due to the increase in operating and financing activities, which was offset by cash outflows from investing activities.

Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year

Cash and cash equivalents at the beginning of 2024 were recorded at Rp2,191,111 million, an increase of 20.39% or Rp371,137 million compared to Rp1,819,874 million in 2023. The increase was due to higher placements with Bank Indonesia (FASBIS) and a larger fulfillment of the Minimum Reserve Requirement (GWM).

Effects of Currency Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents

As of December 31, 2024, the Effects of Currency Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents were recorded at Rp31 million, an increase of 293.75% or Rp47 million compared to Rp16 million in 2023. The increase was due to the revaluation of foreign currencies throughout 2024.

Kas dan Setara Kas pada akhir Tahun

Kas dan setara kas pada akhir tahun 2024, tercatat sebesar Rp2.201.578 juta, mengalami peningkatan 0,48% atau Rp10.467 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.191.111 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pada penempatan pada Bank Indonesia.

Adapun rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, adalah sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

Cash and Cash Equivalents at the end of the Year

Cash and cash equivalents at the end of 2024 were recorded at Rp2,201,578 million, an increase of 0.48% or Rp10,467 million compared to 2023 of Rp2,191,111 million. The increase was due to the rise in placements with Bank Indonesia.

The details of cash and cash equivalents as of December 31, 2024 and December 31, 2023, are as attached in the table below.

Tabel Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2023-2024
Table of Details of Cash and Cash Equivalents for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas Cash	233	1.013	(780)	-77,00%	∨
Giro pada Bank Indonesia Current accounts with Bank Indonesia	307.476	423.910	(116.434)	-27,47%	∨
Giro pada Bank Lain Current accounts with other Banks	1.169	13.488	(12.319)	-91,33%	∨
Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia	1.892.700	1.752.700	140.000	7,99%	∧
Total Kas dan Setara Kas Total cash and cash equivalents	**2.201.578**	**2.191.111**	**10.467**	**0,48%**	∨

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING

Tabel Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Tahun 2023-2024
Table of Reconciliation of Income and Revenue Sharing for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Usaha Operating Income	613.442	334.502	278.940	83,39%	∧
Total Pengurang Total deduction	16.005	8.815	7.190	81,57%	∧
Total Penambah Total addition	8.815	10.406	(1.591)	-15,29%	∨
Pendapatan Usaha yang Tersedia untuk Bagi Hasil Available operating income for profit sharing	606.252	336.093	270.159	80,38%	∧
Bagi Hasil yang Menjadi Hak Bank Profit sharing attributable to Bank	297.451	215.049	82.405	38,32%	∧
Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana: Profit sharing attributable to depositors:	308.801	121.047	187.754	155,11%	∧

Pendapatan Usaha yang Tersedia untuk Bagi Hasil

Per 31 Desember 2024, pendapatan usaha yang tersedia untuk bagi hasil tercatat sebesar Rp613.442 juta, mengalami peningkatan 83,39% atau Rp278.940 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp334.502 juta. Peningkatan dikarenakan

Operating Income Available for Profit Sharing

As of December 31, 2024, operating income available for profit sharing was recorded at Rp613,442 million, an increase of 83.39% or Rp278,940 million compared to Rp334,502 million in 2023. The increase was due to the growth in

adanya kenaikan portofolio pembiayaan musyarakah yang berdampak pada kenaikan pendapatan bagi hasil musyarakah.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Bank

Di tahun 2024, bagi hasil yang menjadi hak Bank tercatat sebesar Rp297.451 juta, mengalami peningkatan 38,32% atau Rp82.405 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp215.046 juta. Peningkatan dikarenakan adanya kenaikan portofolio giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah yang berdampak pada kenaikan bagi hasil dana syirkah temporer.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana

Per 31 Desember 2024, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana yang merupakan hak pemilik dana atas hasil dana *Syirkah* temporer yang sudah didistribusikan tercatat sebesar Rp308.801 juta, mengalami peningkatan 155,11% atau Rp187.754 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp121.047 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan pengelolaan dana oleh mudharib.

the musyarakah financing portfolio, which led to a rise in musyarakah profit-sharing income.

Profit Sharing Attributable to the Bank

In 2024, Profit Sharing Attributable to the Bank was recorded at Rp297,451 million, an increase of 38.32% or Rp82,405 million compared to Rp215,046 million in 2023. The increase was due to the growth in mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits, which led to a rise in profit-sharing for temporary syirkah funds.

Profit Sharing Attributable to Depositors

As of December 31, 2024, the Profit Sharing Attributable to Depositors who have rights to the proceeds of temporary syirkah funds distributed was recorded at Rp308,801 million, an increase of 155.11% or Rp187,754 million compared to 2023 of Rp121,047 million. The increase was due to the rise in fund management income earned by the mudharib.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS

Tabel Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2023-2024
Table of Sources and Distribution of Zakat Funds for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Saldo Awal Dana Zakat Opening Balance of Zakat Funds	-	-	-	-	-
Sumber Dana Zakat Sources of Zakat funds	-	-	-	-	-
Zakat dari Bank Zakat from banks	-	-	-	-	-
Zakat dari Pihak Luar Bank Zakat from non-bank parties	411	357	54	15,13%	^
Penyaluran Dana Zakat Distribution of Zakat funds	(411)	(357)	(54)	15,13%	^
Kenaikan Dana Zakat Increase in Zakat funds	-	-	-	-	-
Saldo Akhir Dana Zakat Ending balance of Zakat funds	-	-	-	-	-

Saldo Awal Dana Zakat

Per 31 Desember 2024 dan 2023, Bank tidak mencatatkan saldo awal dana zakat, disebabkan karena zakat yang diterima langsung disalurkan oleh bank kepada lembaga amil zakat.

Sumber Dana Zakat

Sumber dana zakat Bank per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp411 juta, yang terdiri atas zakat dari Bank sebesar RpNihil, dan zakat dari pihak luar Bank sebesar Rp411 juta, mengalami peningkatan 15,13% atau Rp54 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp357 juta. Peningkatan disebabkan oleh adanya pembayaran zakat profesi, zakat mal dan zakat fitrah dari nasabah.

Opening Balance of Zakat Funds

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank did not record an opening balance of zakat funds, because the zakat received was directly distributed by the bank to zakat amil agencies.

Sources of Zakat Funds

As of December 31, 2024, the Bank's zakat fund sources amounted to Rp411 million, consisting of zakat from the Bank of RpNil and zakat from external parties of Rp411 million. This reflects an increase of 15.13% or Rp54 million compared to Rp357 million in 2023. The increase was due to zakat payments from customers, including professional zakat (zakat profesi), zakat mal, and zakat fitrah.

Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat per 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp411 juta, mengalami peningkatan 15,13% atau Rp54 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp357 juta. Peningkatan disebabkan oleh bertambahnya penerimaan zakat profesi, zakat mal dan zakat fitrah dari nasabah yang langsung disalurkan kepada lembaga amil zakat.

Distribution of Zakat Funds

As of December 31, 2024, the distribution of zakat funds amounted to Rp411 million, an increase of 15.13% or Rp54 million compared to Rp357 million in 2023. The increase was due to higher receipts of professional zakat (zakat profesi), zakat mal, and zakat fitrah from customers, which were directly distributed to zakat amil agencies.

Kenaikan Dana Zakat

Per 31 Desember 2024 dan 2023, Bank mencatatkan kenaikan saldo dana zakat sebesar RpNihil, karena zakat yang diterima langsung disalurkan oleh Bank kepada lembaga amil zakat.

Increase in Zakat Funds

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank recorded an increase in zakat fund balance of RpNil, as all zakat received was directly distributed by the Bank to zakat amil agencies.

Saldo Akhir Dana Zakat

Per 31 Desember 2024 dan 2023, Bank mencatatkan kenaikan saldo dana zakat sebesar RpNihil, karena zakat yang diterima langsung disalurkan oleh Bank kepada lembaga amil zakat.

Ending Balance of Zakat Funds

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank recorded an increase in zakat fund balance of RpNil, as all zakat received was directly distributed by the Bank to zakat amil agencies.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS

Tabel Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Tahun 2023-2024
Table of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Sumber Dana Kebajikan Sources of qardhul hasan funds					
Denda Penalties	381	2	379	18.950,00%	^
Lainnya Others	5	5	-	0,00%	-
Penggunaan Dana Kebajikan Uses of qardhul hasan funds	355	416	(61)	-14,66%	v
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan Increase (Decrease) in qardhul hasan funds	31	(409)	440	107,58%	^
Saldo Awal Dana Kebajikan Beginning balance of qardhul hasan funds	584	993	(409)	-41,19%	v
Saldo Akhir Dana Kebajikan Ending balance of qardhul hasan funds	615	584	31	5,31%	^

Sumber Dana Kebajikan

Sumber dana kebajikan merupakan penerimaan pendapatan denda dari nasabah dan pendapatan dari transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp386 juta dan Rp7 Juta. Terdapat peningkatan sumber dana kebajikan pada tahun berjalan dikarenakan bertambahnya penerimaan pendapatan denda dari nasabah.

Sources of Qardhul Hasan Funds

The source of qardhul hasan funds is the receipt of fined from customers and income from sharia transactions that do not fulfill the provisions and limitations (rukun and/or conditions). For the years ending December 31, 2024 and 2023, it reached Rp386 million and Rp7 million, respectively. There was an increase in sources of qardhul hasan funds during the current year due to higher receipt of penalty income from customers.

Penggunaan Dana Kebajikan

Penggunaan dana kebajikan, per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp355 juta dan Rp416 juta.

Use of Qardhul Hasan Funds

The use of qardhul hasan funds, as of December 31, 2024 and 2023 were Rp355 million and Rp416 million respectively.

Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan

Per 31 Desember 2024, Bank mencatatkan kenaikan dana kebajikan sebesar Rp31 juta, sementara di tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp409 juta.

Saldo Awal Dana Kebajikan

Saldo awal dana kebajikan, per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp584 juta, mengalami penurunan 41,19% atau Rp409 juta dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp993 juta. Penurunan disebabkan oleh penyaluran dana kebajikan pada tahun 2024 dan 2023.

Saldo Akhir Dana Kebajikan

Saldo akhir dana kebajikan, per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp615 juta, mengalami peningkatan 5,31% atau Rp31 juta dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp584 juta.

Increase (Decrease) in Qardhul Hasan Funds

As of December 31, 2024, the Bank recorded an increase in Qardhul Hasan funds of Rp31 million, while in 2023 there was a decrease of Rp409 million.

Beginning Balance of Qardhul Hasan Funds

Beginning balance of Qardhul Hasan funds, as of December 31, was recorded at Rp584 million, a decrease of 41.19% or Rp409 million compared to 2023 which was recorded at Rp993 million. The decrease was due to the disbursement of qardhul hasan funds in 2024 and 2023.

Ending Balance of Qardhul Hasan Funds

Ending balance of Qardhul Hasan funds, as of December 31, was recorded at Rp615 million, an increase of 5.31% or Rp31 million compared to 2023 which was recorded at Rp584 million.

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN

ANALYSIS OF EARNING ASSET QUALITY AND FINANCIAL RATIOS

Tabel Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan Tahun 2023-2024
Table of Earning Asset Quality and Financial Ratios for 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)	Perubahan Changes (%)	
Rasio Kinerja Performance Ratio				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)	**64,96**	96,17	(32,45)	∨
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Earning Assets and Non-Performing Non-Earning Assets to Total Assets	**0,02**	0,00	100,00	∧
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets	**0,02**	0,00	100,00	∧
CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif Allowance for Financial Assets to Earning Assets	**0,85**	0,84	1,19	∧
NPF *Gross*	**0,04**	0,00	100,00	∧
NPF *Net*	**0,03**	0,00	100,00	∧
Return on Assets (ROA)	**(0,90)**	(4,22)	78,67	∧
Return on Equity (ROE)	**(2,43)**	(7,55)	67,81	∧
Net Imbalan (NI) Net Rewards (NI)	**4,42**	4,56	(3,07)	∨
Net Operating Margin (NOM)	**(0,99)**	(4,77)	79,25	∧
Biaya Operasional terhadap Pendapatan (BOPO) Operating Cost to Operating Income (BOPO)	**109,29**	128,65	(15,05)	∨
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan Profit Sharing Financing to Total Financing	**110,98**	47,20	135,13	∧
Financing to Deposit Ratio (FDR)	**87,72**	95,31	(7,96)	∨
Cost to Income Ratio (CIR)	**110,98**	186,04	(40,35)	∨
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	**198,28**	129,87	52,68	∧
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Liabilities to Total Assets Ratio	**66,48**	56,50	17,66	∧

Tabel Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan Tahun 2023-2024

Table of Earning Asset Quality and Financial Ratios for 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)	Perubahan Changes (%)	
Rasio Kepatuhan Compliance Ratio				
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BPMD) Percentage of Violations of the Maximum Funding Limit (BPMD)				
Pihak Terkait Related parties	**0,00**	0,00	0,00	-
Pihak Tidak Terkait Unrelated Parties	**0,00**	0,00	0,00	-
Persentase Pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BPMD) Percentage of Exceeding the Maximum Funding Limit (BPMD)				
Pihak Terkait Related parties	**0,00**	0,00	0,00	-
Pihak Tidak Terkait Unrelated Parties	**0,00**	0,00	0,00	-
Giro Wajib Minimum Statutory Reserve Requirement				
GWM Rupiah	**5,53**	13,46	(58,92)	⋁
GWM Valuta Asing GWM Foreign Currency	**157,73**	157,73	0,00	-
Posisi Devisa Neto Secara Keseluruhan Overall Net Open Position	**0,03**	0,03	0,00	-

Selama tahun 2024, kualitas aset produktif Bank masih terjaga dengan baik. Bank juga telah membentuk pencadangan sesuai dengan ketentuan regulasi atas aset produktif yang dimiliki oleh Bank. Sementara rasio keuangan Bank yang meliputi rasio kinerja keuangan pada tahun 2024 masih tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), penurunan *Cost to Income Ratio* (CIR), NPF *Gross* dan *Nett* yang masih terjaga, rasio CAR yang masih di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko, serta pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan yang terus meningkat sejalan dengan rencana bisnis bank. Dari segi kepatuhan, Bank tidak melanggar atau melampaui Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Throughout 2024, the quality of the Bank's productive assets remained well-maintained. Bank consistently maintains the quality of its productive assets. As shown in the table above, there were no non-performing productive assets in 2024. Meanwhile, the Bank's financial ratios, including performance and compliance ratios, generally demonstrated solid performance in 2024. This is reflected in the decline of the Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio and the Cost to Income Ratio (CIR). The Gross and Net NPF (Non-Performing Financing) ratios remained under control, the CAR (Capital Adequacy Ratio) stayed above the minimum requirement in line with the risk profile, and the profit-sharing financing ratio to total financing continued to increase in line with the Bank's business plan. From a compliance perspective, the Bank did not violate or exceed the Maximum Limit for Fund Distribution (BMPD).

Komitmen dan Kontinjensi
Commitments And Contingencies

Pada tahun 2024, Bank membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi") sebesar Rp1.873 juta atas fasilitas pembiayaan akad murabahah yang belum ditarik. Perubahan Cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi atas fasilitas yang tidak ditarik adalah sebagai berikut:

In 2024, the Bank established a reserve (presented under the account "Estimated Loss on Commitments and Contingencies") of Rp1,873 million for murabahah financing facilities that have not been utilized. The changes in the reserve for impairment losses on estimated commitments and contingencies for the unutilized facilities are as follows:

Tabel Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi Tahun 2023-2024
Table of Estimated Losses on Commitments and Contingencies for 2023-2024

Uraian Description	2024	2023
Perubahan Estimasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontijensi Changes in Estimated Allowance for Impairment Losses on Commitments and Contingencies		
Saldo Awal Tahun Beginning of the Year Balance	**2.822**	1.752
Pembentukan pada Periode/Tahun Berjalan Provision in Current Period/Year	**(949)**	1.070
Saldo Akhir Ending balance	**1.873**	2.822

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debts and Collectibility of Receivables

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank Aladin Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Bank. Kemampuan membayar utang juga tercermin dari terdaftarnya Bank Aladin Syariah sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

ABILITY TO PAY DEBTS

Bank Aladin Syariah's ability to fulfill its short term and long-term obligations is reflected in the Bank's liquidity and solvency. The ability to pay debts is also reflected in Bank Aladin Syariah's participation as an insurance program participant at the Deposit Insurance Corporation (IDIC).

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS BANK)

Untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo Bank menggunakan rasio likuiditas, berupa rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang merupakan rasio hasil perbandingan antara pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain), serta surat berharga korporasi yang dimiliki Bank (tidak termasuk dana antarbank), surat berharga yang diterbitkan Bank, dan pinjaman yang diterima Bank.

Adapun rasio likuiditas Bank di tahun 2024 dibanding tahun 2023 adalah sebagai berikut.

ABILITY TO PAY SHORT TERM DEBT (BANK LIQUIDITY)

To fulfill short-term obligations that are due, the Bank uses liquidity ratios, in the form of financing to third party funds ratios or Financing to Deposit Ratio (FDR) and macroprudential intermediation ratios (RIM), which are ratios resulting from comparisons between financing to third parties (excluding financing to other banks), as well as corporate securities owned by the Bank against DPK (excluding interbank funds), securities issued by the Bank, and loans received by the Bank.

The Bank's liquidity ratio in 2024 compared to 2023 is as follows.

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2023-2024
Table of Liquidity Ratio for 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)	Perubahan Perubahan (%)
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Macroprudential Intermediation Ratio (RIM)	**88,65**	95,31	(6,99) ▼

Di tahun 2024, likuiditas Bank berdasarkan rasio Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) tercatat sebesar 88,65%, mengalami penurunan 6,99% dari tahun 2023 yang tercatat 95,31%. Penurunan tersebut mengindikasikan kemampuan Bank dalam menjalankan peran intermediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

IIn 2024, the Bank established a reserve (presented under the account "Estimated Loss on Commitments and Contingencies") of Rp1,873 million for murabahah financing facilities that have not been utilized. The changes in the reserve for impairment losses on estimated commitments and contingencies for the unutilized facilities are as follows:

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS BANK)

Dalam mengukur kemampuan Bank dalam membayar utang jangka panjang, Bank Aladin Syariah menggunakan rasio solvabilitas dengan memastikan kecukupan modal dalam memenuhi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
Adapun rasio solvabilitas Bank di tahun 2024 dibanding tahun 2023 adalah sebagai berikut.

ABILITY TO PAY LONG TERM DEBT (BANK SOLVENCY)

In measuring the Bank's ability to pay long-term debt, Bank Aladin Syariah uses solvency ratios to ensure capital adequacy to meet financing risks, market risks and operational risks. This can be seen from the minimum capital requirement ratio or Capital Adequacy
Ratio (CAR).

The Bank's solvency ratio in 2024 compared to 2023 was as follows.

Tabel Rasio Solvabilitas Tahun 2023-2024
Table of Solvency Ratio for 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)	Perubahan Changes (%)
Capital Adequacy Ratio (CAR)	**64,96**	96,17	(32,45) ⋁

Di tahun 2024, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank tercatat sebesar 64,96% atau mengalami penurunan 32,45% dibanding tahun 2023 yang mencapai 96,17%. Penurunan dikarenakan oleh meningkatnya aktiva tertimbang menurut risiko kredit seiring dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Rasio CAR masih tetap terjaga diatas ketentuan minimum profil risiko Bank.

In 2024, the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) was recorded at 64.96% or decreased by 32.45% compared to 2023 which reached 96.17%. The decrease was due to the increase in risk-weighted assets in line with the growth in financing disbursement. The CAR ratio remained well above the minimum requirement in accordance with the Bank's risk profile.

Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Berdasarkan Penilaian yang dilakukan secara internal (*self assessment*), profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah peringkat 3 (*Moderate*). Atas dasar ini, KPMM minimum yang ditetapkan sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%.

The Bank implements Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.03/2014 concerning the Minimum Capital Adequacy Requirement for Sharia Commercial Banks. Based on the internal assessment (self-assessment), the Bank's risk profile as of December 31, 2024 was ranked 3 (Moderate). On this basis, the minimum KPMM set is 10% to less than 11%.

Dengan rasio kecukupan Bank Aladin Syariah sebesar 64,96% di tahun 2024, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan modal minimum sesuai ketentuan OJK. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Aladin Syariah telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

With a capital adequacy ratio of 64.96% in 2024, Bank Aladin Syariah's capital structure has the capability to offset financing risks, market risks, and operational risks, as this ratio exceeds the minimum capital adequacy requirement set by the OJK. This indicates that Bank Aladin Syariah has effectively managed its capital and has sufficient capital to protect against solvency risks.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas piutang mencerminkan kemampuan Bank dalam meminimalisir terjadinya piutang macet. Bank Aladin Syariah mengukur kelancaran pembiayaan bank melalui total pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).

Adapun tingkat kolektibilitas Perusahaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

Collectibility of receivables reflects the Bank's ability to minimize the occurrence of bad debts. Bank Aladin Syariah measures the smoothness of bank financing through total non-performing financing (NPF).

The Company's collectibility level in 2024 was as follows.

Tabel Kolektibilitas Piutang Tahun 2023-2024
Table of Receivables Collectibility for 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)	Perubahan Changes (%)
Non-Performing Financing (NPF) Gross	**0,04**	-	100,00 ⋀
Non-Performing Financing (NPF) Net	**0,03**	-	100,00 ⋀

Sepanjang tahun 2024, *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* dan *Non-Performing Financing* (NPF) *Net* Bank masing-masing adalah sebesar 0,04% dan 0,03%. Bank tetap menjaga rasio pembiayaan bermasalah, sehingga rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross dan Non-Performing Financing (NPF) Net masih berada dibawah rata-rata industri perbankan syariah.

Throughout 2024, the Bank's Non-Performing Financing (NPF) Gross and Non-Performing Financing (NPF) Net were 0.040% and 0.30%, respectively. This is because...

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko
Capital Structure and Risk Management Practices

STRUKTUR PERMODALAN

Kebijakan Struktur Modal
Bank Aladin Syariah menyusun rencana permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan kondisi ekonomi terkini. Secara rutin, Bank Aladin Syariah telah melakukan evaluasi dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan Bank memiliki modal kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan usaha Bank pada masa yang akan datang, serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha dan kebutuhan likuiditas Bank.

Dasar Pemilihan Struktur Modal
Struktur modal yang diterapkan Bank bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha agar tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham, bermanfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga melakukan perencanaan kebutuhan permodalan dengan mendiskusikan secara rutin dan didukung dengan data analisis.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan perubahan POJK No.34/OJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, serta POJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, di mana bank wajib membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) yaitu *Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Banks*.

Berdasarkan Penilaian yang dilakukan secara internal (*self assessment*), profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah peringkat 2 (*Low To Moderate*). Atas dasar ini, KPMM minimum yang ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Sementara itu, penilaian yang dilakukan secara internal (*self assessment*) terhadap profil risiko Bank per 31 Desember 2024 adalah peringkat 3 (*Moderate*). Atas dasar ini, KPMM minimum yang ditetapkan sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%.

CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Policy
Bank Aladin Syariah prepares a capital plan based on an assessment and review of the required capital requirements and combines them with the latest economic conditions. Routinely, Bank Aladin Syariah has evaluated and managed the capital structure to ensure the Bank has strong capital to support the Bank's current business development strategy, and to maintain the Bank's business continuity in the future, as well as to meet the capital adequacy set by the regulator.

Capital is structured by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and approved by the Board of Commissioners. The Bank's capital plan is prepared based on an assessment of the adequacy of the capital requirements, business development plans and the Bank's liquidity needs.

Basis for Selection of Capital Structure
The Bank's capital structure is designed to ensure business continuity, deliver returns to shareholders, provide value to other stakeholders, and maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital. In addition, Bank Aladin Syariah also conducts capital planning through regular discussions supported by analytical data.

The Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) on December 31, 2022 and December 31, 2021 was calculated based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and amendments to POJK No.34/OJK.03/2016 dated September 22, 2016, and POJK No. 21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Sharia Commercial Banks, where banks are required to form additional minimum capital according to the risk profile that functions as a buffer, namely Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer and Capital Surcharge for Domestic Systematically Important Banks.

Based on an internal assessment (self-assessment), the Bank's risk profile as of December 31, 2023 was rated at level 2 (Low to Moderate). Accordingly, the minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) was set at 9% to less than 10%. Meanwhile, the internal assessment (self-assessment) of the Bank's risk profile as of December 31, 2024 was rated at level 3 (Moderate). Based on this, the minimum CAR was set at 10% to less than 11%.

Rincian Struktur Modal

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Struktur permodalan Bank Aladin Syariah terdiri dari Modal Inti (*Tier* 1) dan Modal Pelengkap (*Tier* 2). Struktur permodalan Bank dan rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhatikan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut.

Capital Structure Details

In accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), the capital structure of Bank Aladin Syariah consists of Core Capital (Tier 1) and Supplementary Capital (Tier 2). The Bank's capital structure and its Capital Adequacy Ratio (CAR), which takes into account credit risk, operational risk, and market risk as of December 31, 2024 and December 31, 2023, are presented as follows.

Struktur Permodalan Bank Tahun 2023-2024

Bank Capital Structure for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Modal Inti (*Tier* 1) Core Capital (Tier 1)					
Modal Inti Utama (*CET* 1) Main Core Capital (CET 1)	**3.028.660**	3.003.141	25.519	0,84%	^
Modal Inti Tambahan (*AT*-1) Additional Core Capital (AT-1)	**-**	-	-	-	^
Total Modal Inti Total Core Capital	**3.028.660**	3.003.141	25.519	0,84%	^
Modal Pelengkap (*Tier*2) Supplementary Capital (Tier 2)	**56.175**	36.997	19.178	51,83%	^
Total Modal Total Capital	**3.084.835**	**3.040.138**	**44.697**	**1,47%**	^
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risk Weighted Assets (RWA)					
ATMR untuk Risiko Kredit RWA for Credit Risk	**4.494.024**	3.048.909	1.445.115	47,39%	^
Sisa Cadangan Umum PPA atas Aset Produktif Remaining General Allowance for Earning Assets (PPA)	**(1.899)**	-	(1.899)	-100,00%	v
ATMR untuk Risiko Pasar RWA for Market Risk	**1.020**	969	51	5,26%	^
ATMR untuk Risiko Operasional RWA for Operational Risk	**255.179**	111.447	143.732	128,96%	^
Total ATMR Total RWA	**4.748.324**	**3.161.325**	**1.586.999**	**50,20%**	^

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Bank Tahun 2023-2024

Bank Capital Adequacy Ratio for 2023-2024

Uraian Description	2024	2023
Rasio CAR CAR Ratio		
Rasio CET 1 CET Ratio 1	**63,78%**	95,00%
Rasio Tier 1 CET Ratio 2	**63,78%**	95,00%
Rasio Tier 2 CET Ratio 2	**1,18%**	1,17%
Rasio Total Total Ratio	**64,96%**	96,17%
Rasio Minimum Tier 1 Tier 1 Minimum Ratio	**6,00%**	6,00%
Rasio Minimum CET 1 CET 1 Minimum Ratio	**4,50%**	4,50%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko Minimum CAR Based on Risk Profile	**10,00% - 11,00%**	9,00-10,00%

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk rasio kecukupan modal. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, tidak terdapat pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) oleh Bank.

As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Bank complied with the capital adequacy ratio requirements set by Bank Indonesia (BI). In addition, as of those dates, there was no exceedance of the Maximum Fund Distribution Limit (BMPD) by the Bank.

Adapun rincian struktur modal Bank untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut.

The details of the Bank's capital structure as of December 31, 2024 and December 31, 2023 are presented as follows.

Struktur Modal Bank Tahun 2023-2024
Bank Capital Structure for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
					Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Liabilities	**813.461**	**8,69%**	751.880	10,60%	61.581	8,19% ^
Dana *Syirkah* Temporer Temporary Syirkah Funds	**5.410.031**	**57,79%**	3.254.999	45,90%	2.155.032	66,21% ^
Ekuitas Equity	**3.138.594**	**33,52%**	3.085.241	43,50%	53.353	1,73% ^
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds, and Equity	**33,52%**	**100,00%**	**7.092.120**	**100,00%**	**2.269.965**	**32,01%** ^

PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko

Bank menyusun strategi manajemen risiko searah dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), kecukupan perangkat organisasi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator maupun ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan atau praktik perbankan yang sehat.

Bank secara berkesinambungan mengevaluasi strategi penerapan manajemen risiko agar dapat secara efektif mengelola risiko Bank sesuai dengan visi, misi, strategi dan rencana bisnis Bank, serta berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.

Strategi manajemen risiko diterjemahkan secara terstruktur dan sistematis melalui kerangka kerja manajemen risiko.

RISK MANAGEMENT PRACTICES

Implementation of Risk Management

The Bank formulates its risk management strategy in alignment with its risk appetite and risk tolerance, the adequacy of organizational structures including clear authorities and responsibilities, as well as the adequacy of policies, procedures, and limit settings.

The risk management strategy is developed to ensure the Bank's risk exposure is managed in a controlled manner in accordance with prevailing laws and regulations, regulatory provisions, Sharia Principles, and/or sound banking practices.

The Bank continuously evaluates its risk management implementation strategy to ensure it effectively manages risks in alignment with the Bank's vision, mission, strategy, and business plans, with a long-term orientation aimed at ensuring business continuity by taking into account economic conditions or cycles.

The risk management strategy is translated in a structured and systematic manner through a risk management framework.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Framework)

Kerangka Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Framework)

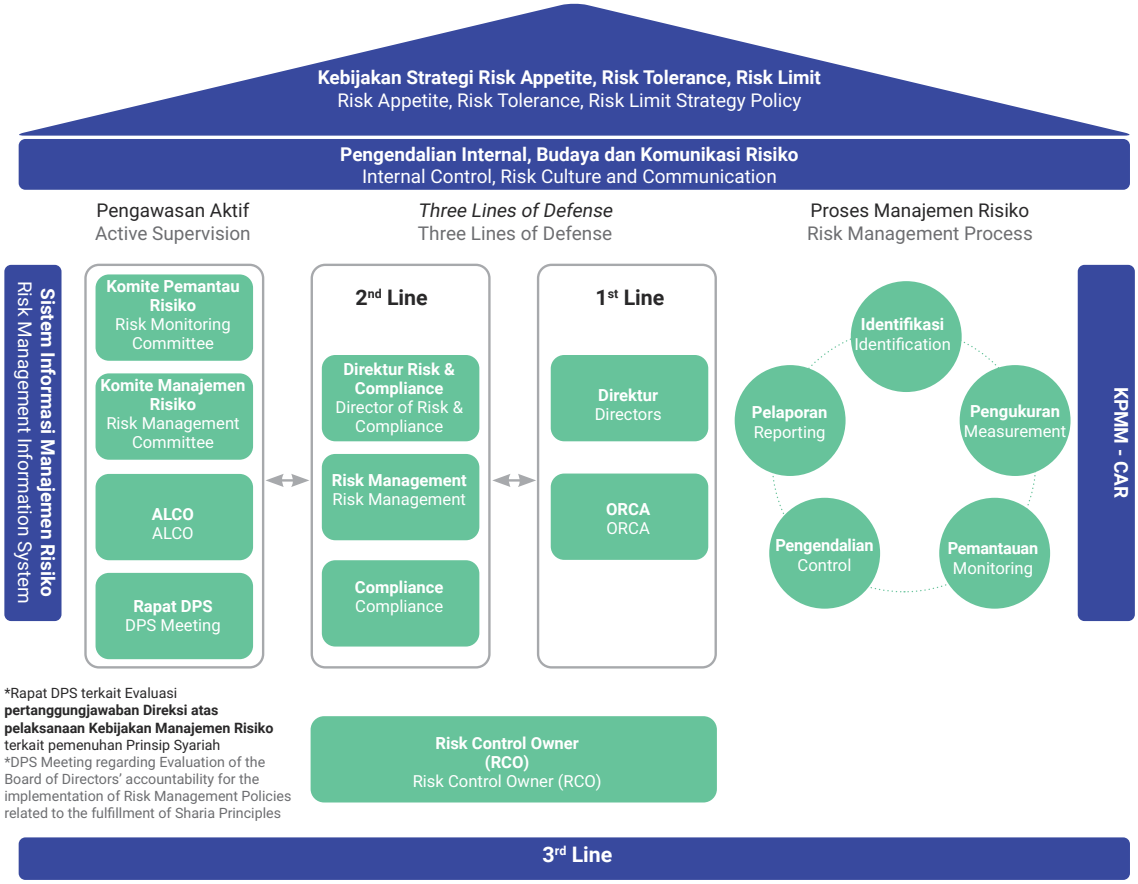

Kerangka kerja manajemen risiko terdiri atas:

1. Tata Kelola Manajemen Risiko
   Tata kelola manajemen risiko Bank terdiri atas pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta serangkaian Komite terkait manajemen risiko. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank. Untuk itu, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus memahami risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank. Direksi menjalankan fungsi pelaksana kebijakan manajemen risiko dan pengawasan aktif di antaranya melalui Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Asset & Liabilities Committee (ALCO). Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko di antaranya melalui Komite Pemantau Risiko (KPR). DPS menjalankan fungsi pengawasan aktif di antaranya melalui Rapat DPS terkait evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko
   Kebijakan dan prosedur manajemen risiko memuat arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite)

The risk management framework consists of:

1. Risk Management Governance
   The Bank's risk management governance comprises the active oversight of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (DPS), as well as a series of committees related to risk management. The Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS are responsible for the effectiveness of risk management implementation at the Bank. Therefore, they must understand the risks faced by the Bank, provide clear direction, actively monitor and mitigate those risks, and foster a risk management culture within the Bank. The Board of Directors implements risk management policies and exercises active oversight through, among others, the Risk Management Committee (KMR) and the Asset & Liabilities Committee (ALCO). The Board of Commissioners performs supervisory functions through, among others, the Risk Monitoring Committee (KPR). The Sharia Supervisory Board exercises active oversight through DPS meetings, including evaluations of the Board of Directors' accountability in implementing risk management policies related to compliance with Sharia Principles.
2. Policies, Procedures, and Risk Limit Setting
   Risk management policies and procedures provide written guidance on implementing risk management and must align with the Bank's vision, mission, and business strategy. Risk appetite and risk tolerance must

dan toleransi risiko (risk tolerance) harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit.

Kebijakan dan prosedur, termasuk limit risiko, harus diimplementasikan sesuai dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan praktik perbankan yang sehat.

Bank menyusun limit risiko yang sesuai dengan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, dan kemampuan SDM.

Bank mengatur tata kelola dan mekanisme eskalasi dan persetujuan pelampauan risk appetite, risk tolerance, dan risk limit berdasarkan akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dan mendokumentasikannya ke dalam pedoman internal terkait limit.

Kaji ulang kebijakan dan prosedur manajemen risiko, risk appetite, risk tolerance, dan risk limit dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau dalam hal diperlukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar yang mendasari penyusunan. Dalam melakukan kaji ulang, Bank mempertimbangkan praktek-praktek terbaik (best practices) yang ada dan relevan. Seiring dengan perubahan bisnis Bank, Bank akan merevisi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada saat ini sesuai dengan prioritas.

3. Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko harus dapat memastikan bahwa Bank secara sistematik dan terstruktur dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan melaporkan eksposur risiko.

Bank mengembangkan perangkat manajemen risiko demi mendukung proses manajemen risiko dengan efektif. Perangkat manajemen risiko akan senantiasa dikinikan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank, eksposur risiko, dan praktek-praktek terbaik (best practices) yang ada dan relevan.

Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank membentuk suatu siklus yang berkesinambungan.
a. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh eksposur risiko yang melekat pada Bank secara berkala.

Identifikasi risiko di antaranya dilakukan terhadap produk dan kegiatan usaha baru sebelum produk atau kegiatan usaha diterbitkan.

be considered in the formulation of risk management policies, including in the setting of limits.

The policies and procedures, including risk limits, must be implemented in accordance with the characteristics, size, and complexity of the business activities, the level of risk to be taken (risk appetite), the Bank's risk tolerance, applicable laws and regulations, Sharia Principles, and sound banking practices.

The Bank establishes risk limits aligned with its overall strategy, considering the Bank's capital capacity to absorb risk exposures or losses, historical loss experience, and human resource capabilities.

The Bank also regulates governance and the escalation and approval mechanisms for any breaches of risk appetite, risk tolerance, and risk limits, based on clear accountability and delegation of authority, and documents them in internal guidelines related to limit setting.

A review of risk management policies and procedures, risk appetite, risk tolerance, and risk limits is conducted at least once a year and/or whenever adjustments are necessary due to changes in laws, regulations, or the Bank's Articles of Association. In conducting these reviews, the Bank considers applicable and relevant best practices. As the Bank's business evolves, the Bank will revise its current risk management policies and procedures in accordance with its priorities.

3. Risk Management Process
The risk management process must ensure the Bank can systematically and structurally identify, measure, monitor, control, and report risk exposures.

The Bank develops risk management tools to effectively support the risk management process. These tools are continuously updated in line with the Bank's business development, risk exposures, and relevant best practices.

The risk management process implemented by the Bank forms a continuous cycle.
a. Risk Identification
Risk identification is carried out regularly on all inherent risk exposures within the Bank.

Risk identification is also conducted for new products and business activities prior to their launch.

Bank senantiasa mengembangkan metode dan perangkat identifikasi manajemen risiko menyesuaikan dengan eksposur risiko, tren risiko baru, perkembangan kondisi Bank, perubahan ketentuan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan best practice.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank, baik berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.

Bank mengembangkan di antaranya skala pengukuran risiko (risk grading matrix) yang digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Bank sebagai acuan dalam menentukan prioritas eskalasi dan mitigasi risiko. Skala pengukuran risiko disusun dalam skala dampak dan kemungkinan keterjadian.

Penyusunan skala pengukuran risiko akan mempertimbangkan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, risk appetite, risk tolerance, dan risk limit.

Skala pengukuran risiko akan dievaluasi dan disempurnakan oleh Bank secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, misalnya dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala terhadap semua eksposur risiko yang melekat pada Bank, di antaranya pada saat penyusunan laporan profil risiko secara triwulanan. Di mana Bank juga akan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Pengukuran risiko dilakukan juga terhadap seluruh risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha baru.

Stress testing dapat dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap Portofolio Bank. Bank melakukan Stress Testing secara berkala dan mengkaji ulang hasil Stress Testing tersebut, serta mengambil langkah-langkah

The Bank continuously develops methods and tools for risk identification in accordance with risk exposures, emerging risk trends, the Bank's condition, changes in laws and regulations, other applicable provisions, and best practices.

b. Risk Measurement

Risk measurement may use quantitative and/or qualitative approaches, adjusted to the Bank's objectives, business complexity, and capabilities. These approaches include methods determined by regulators for risk assessment and capital calculation, as well as internally developed methods.

The Bank has developed, among other things, a risk grading matrix used to measure the Bank's risk exposures as a reference for prioritizing risk escalation and mitigation. This matrix includes scales for impact and likelihood of occurrence.

The development of this risk scale takes into consideration the Bank's overall strategy, capital capacity to absorb potential losses, historical loss experience, risk appetite, risk tolerance, and risk limits.

The risk measurement scale is reviewed and refined periodically or as needed, particularly in the event of material changes to business activities, products, transactions, or risk factors that may impact the Bank's financial condition.

Risk measurement is conducted regularly on all inherent risk exposures, including during the preparation of quarterly risk profile reports. The Bank also evaluates the suitability of assumptions, accuracy, data integrity, data sources, and procedures used in risk measurement.

Risk measurement is also applied to all risks related to new products and business activities.

Stress testing may be conducted to complement the risk measurement system by estimating potential losses under abnormal market conditions using specific scenarios. This helps assess the sensitivity of the Bank's performance to changes in risk factors and identify any significant impact on the Bank's portfolio. Stress testing is conducted regularly, and results are reviewed to determine whether further action is required if projected conditions exceed acceptable tolerance levels. The results are also

yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit risiko Bank.

c. Pemantauan Risiko

Bank mengembangkan sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, risk appetite, risk tolerance, kepatuhan limit risiko internal, hasil stress testing, serta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan risiko dilakukan baik oleh masing-masing pemilik risiko maupun SKMR.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS dalam rangka mitigasi risiko dan pengambilan keputusan atas penanganan yang diperlukan. Khususnya risiko yang bersifat material atau berdampak terhadap kondisi permodalan Bank.

Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan di antaranya melalui pemantauan dan pelaporan melalui penilaian potensi risiko berdasarkan tren historis.

Penyempurnaan proses pelaporan dan pengembangan metode maupun sistem pelaporan akan senantiasa dilakukan, di antaranya dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.

d. Pengendalian Risiko

Bank menyusun sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengendalian risiko yang diterapkan oleh Bank disesuaikan dengan risk appetite, risk tolerance, risk limit, serta Prinsip Syariah.

Pengendalian Risiko antara lain dengan melakukan 4 jenis penanganan sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Menghindari Risiko (risk avoidance).
- Mitigasi Risiko (risk reduction).
- Transfer Risiko kepada pihak lain (risk transfer).
- Menerima Risiko (risk acceptance).

Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat (four eyes principles), Three Lines of Defense, memperbaiki proses end-to-end, melaksanakan kajian risiko, hukum, dan kepatuhan, melakukan Review dan pengkinian pedoman internal sesuai

used as input for setting or adjusting the Bank's risk policies and limits.

c. Risk Monitoring

The Bank develops monitoring systems and procedures that include monitoring of risk exposures, risk appetite, risk tolerance, compliance with internal risk limits, stress testing results, and consistency with established policies and procedures.

Risk monitoring is conducted by both risk owners and the Risk Management Work Unit (SKMR).

Monitoring results are presented in periodic reports submitted to the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board as a basis for risk mitigation and decision-making, particularly for material risks or those affecting the Bank's capital condition.

Risk exposure evaluation is also conducted through monitoring and reporting using potential risk assessments based on historical trends.

Reporting processes and methods or systems are continuously improved, especially when there are material changes in business activities, products, transactions, risk factors, information technology, or the Bank's risk management information system.

d. Risk Control

The Bank establishes an adequate risk control system referring to the established policies and procedures.

Risk control implemented by the Bank is aligned with risk appetite, risk tolerance, risk limits, and Sharia Principles.

Risk control may include four types of actions:

- Risk avoidance
- Risk reduction (mitigation)
- Risk transfer to other parties
- Risk acceptance

Risk control is carried out, among others, through the implementation of the four-eyes principle, the Three Lines of Defense model, end-to-end process improvements, risk, legal, and compliance assessments, and the review and updating of internal guidelines in line with the development of laws,

perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan regulasi, ketentuan lain yang berlaku serta Prinsip Syariah, serta memastikan eskalasi dan pelaporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai masukan kepada Manajemen.

regulations, and Sharia Principles. The Bank also ensures accurate, complete, and timely escalation and reporting as input to Management.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
Untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Bank.

4. Risk Management Information System
To support the processes of risk identification, measurement, monitoring, and control, the Bank develops a management information system tailored to the characteristics, size, and complexity of the business. This system provides accurate and informative reports on financial conditions, the performance of functional activities, and the Bank's risk exposures.

5. Three Lines Of Defense
Untuk memastikan proses manajemen risiko berjalan lebih efektif dalam menjaga profil risiko Bank dalam risk appetite, risk tolerance, dan risk limit, Bank mengembangkan dan memperkuat Three Lines of Defence.

Pada setiap lapis pertahanan, dideskripsikan sejumlah tanggung jawab spesifik untuk pengendalian dan manajemen risiko.

Three Lines of Defence membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis Bank, yang membedakan antara fungsi bisnis dan operasional sebagai fungsi pemilik risiko (*risk owner/ risk taking unit*) dengan fungsi yang menangani risiko (risk control owner), dan antara fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*) dengan fungsi yang menyediakan pemastian independen (*independent assurance*).

Bank menetapkan *Three Lines of Defense*, di mana Fungsi Manajemen Risiko sebagai Lini Kedua terpisah dan independen dari fungsi bisnis dan operasional Bank yang merupakan Lini Pertama. Adapun Lini Ketiga adalah Audit Internal yang secara independen melakukan *review* dan evaluasi terhadap kerangka dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.

Three lines of Defense menyediakan pendekatan yang holistik atas manajemen risiko. Di mana setiap lapis pertahanan tersebut dibangun dan saling berhubungan satu sama lain.

5. Three Lines of Defense
To ensure the risk management process functions more effectively in maintaining the Bank's risk profile within its defined risk appetite, risk tolerance, and risk limits, the Bank has developed and strengthened the Three Lines of Defense model.

Each line of defense outlines specific responsibilities for risk control and management.

The Three Lines of Defense establish risk management capabilities throughout all levels and business processes of the Bank, distinguishing between the business and operational functions as risk owners/risk-taking units, the functions handling risk (risk control owners), and those overseeing risk and providing independent assurance.

The Bank implements the Three Lines of Defense, wherein the Risk Management Function serves as the Second Line, separate and independent from the Bank's business and operational functions, which constitute the First Line. The Third Line is the Internal Audit Unit (SKAI), which independently conducts reviews and evaluations of the overall risk management framework and its implementation.

The Three Lines of Defense offer a holistic approach to risk management, with each line of defense built to support and interconnect with the others.

6. Eksposur Risiko
Klasifikasi dari eksposur risiko membantu Bank dalam proses identifikasi risiko. Manajemen Risiko diterapkan untuk masing-masing eksposur Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan 10 (sepuluh) jenis Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

6. Risk Exposure
The classification of risk exposures supports the Bank in its risk identification process. Risk management is applied to each type of risk exposure, covering the implementation of risk management across all ten (10) types of risk, namely: Financing Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Rate of Return Risk, Investment Risk.

Bank akan memastikan ter *up-to date* dengan tren risiko terbaru/emergent risk (misalnya *cyber risks, climate risk, data breach*, dan sebagainya) dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis maupun perkembangan ketentuan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku maupun Prinsip Syariah.

The Bank remains up to date with emerging risks such as cyber risks, climate risks, data breaches, and others, in order to anticipate changes in the business environment and developments in laws, regulations, and Sharia Principles.

Bank akan secara reguler me-*review* dan mengkinikan kerangka kerja manajemen risiko mengikuti perkembangan tersebut. Bank memastikan relevansi dari setiap metode, proses, perangkat identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, maupun pelaporan risiko.

The Bank regularly reviews and updates its risk management framework in response to these developments, ensuring the relevance and effectiveness of its risk identification, measurement, monitoring, control, and reporting methods and tools.

7. Lingkungan Pengendalian Internal
Lingkungan pengendalian adalah suatu kondisi yang mencakup aspek tata kelola Bank, aspek kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan Limit Manajemen Risiko; aspek data, infrastruktur dan sistem informasi manajemen Risiko serta aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko.

7. Internal Control Environment
The internal control environment encompasses aspects of Bank governance, the adequacy of policies, procedures, and risk limit setting; data quality, infrastructure, and risk management information systems; and the adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and reporting processes.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu manajemen Bank dalam menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Effective risk management must be supported by a robust internal control system. An effective internal control system assists the Bank's management in safeguarding Bank assets, ensuring reliable financial and managerial reporting, enhancing compliance with prevailing laws, regulations, and Sharia Principles, and mitigating the risk of losses, irregularities, and breaches of prudential principles.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh lini organisasi.

The implementation of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all organizational levels.

8. Budaya Risiko, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Komunikasi Risiko
Bank mengembangkan budaya Manajemen Risiko meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi mengenai prinsip, kerangka kerja, dan strategi Manajemen Risiko, serta pentingnya sistem Pengendalian internal yang efektif.

8. Risk Culture, Human Capital (HR), and Risk Communication
The Bank develops a Risk Management culture that includes adequate communication across all organizational levels regarding the principles, framework, and strategies of Risk Management, as well as the importance of an effective internal control system.

Bank juga memastikan kebijakan, prosedur, Risk Appetite, Risk Tolerance, dan limit dikomunikasikan dan diimplementasikan di seluruh jenjang organisasi Bank secara efektif.

The Bank also ensures that policies, procedures, Risk Appetite, Risk Tolerance, and limits are communicated and implemented effectively across all organizational levels of the Bank.

Bank menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif untuk memastikan proses eskalasi dan pelaporan Risiko berjalan dengan efektif dan tepat waktu.

The Bank establishes an effective communication mechanism to ensure that the risk escalation and reporting processes operate effectively and in a timely manner.

Budaya risiko adalah serangkaian nilai, perilaku, aktivitas, maupun tindakan untuk menciptakan lingkungan kerja dengan standar etika dan integritas yang berpanduan pada nilai dan visi Bank, budaya organisasi yang

Risk culture refers to a set of values, behaviors, activities, and actions aimed at creating a work environment grounded in ethical standards and integrity, guided by the Bank's values and vision. It fosters an

sesuai dengan asas perbankan yang menerapkan prinsip kehatian-hatian serta kesadaran risiko pada seluruh tingkat organisasi, dan seluruh karyawan dapat mengerti mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko.

Budaya risiko merupakan hal penting yang memastikan berjalannya tata kelola manajemen risiko dan berperan sebagai landasan bagi terciptanya pengelolaan risiko secara keseluruhan Bank (enterprise risk management).

Budaya risiko dapat dibentuk melalui contoh perilaku (role models) atas perilaku yang dikehendaki terhadap risiko, ataupun melalui program-program training yang terstruktur untuk menciptakan pemahaman atas risiko-risiko yang dihadapi Bank dan cara pengelolaannya. Pengembangan budaya risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif. Pelaksanaan budaya risiko perlu dilakukan dalam setiap aspek pekerjaan sehari-hari dan perlu adanya sistem pengendalian internal untuk memastikan efektivitas budaya risiko pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Bank memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), sistem dan infrastruktur untuk pelaksanaan manajemen risiko yang efektif. Bank memastikan Tim Manajemen Risiko memiliki akses terhadap informasi yang terkini, kredibel dan bisa diandalkan untuk memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko berjalan dengan baik. Sistem dan infrastruktur diperlukan untuk menyediakan informasi risiko secara tepat waktu untuk mendukung keputusan Manajemen.

Bank memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola Risiko. SDM yang ada harus memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen risiko. SDM yang dimiliki setidaknya memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, jasa keuangan, dan/atau sistem pembayaran. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Unit dan tim manajemen risiko di Bank telah dituangkan ke dalam standar prosedur atau kebijakan internal Bank. Kualitas SDM senantiasa diasah dengan berbagai workshop atau training yang relevan. Bank menyusun secara berkala dan terstruktur program-program training untuk meningkatkan budaya risiko di lingkungan Bank.

9. Pengelolaan Kecukupan Modal (capital management)
Sehubungan dengan semakin meningkatnya risiko Bank yang diakibatkan oleh meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank, serta sejalan dengan perkembangan metode dan teknik pengukuran risiko pada industri perbankan, maka penilaian kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional

organizational culture aligned with prudent banking principles, promoting risk awareness at all organizational levels, where all employees understand their roles and responsibilities in managing risks.

Risk culture is crucial for ensuring the effectiveness of risk management governance and serves as the foundation for establishing comprehensive enterprise risk management across the Bank.

This culture can be developed through role modeling of desired risk-related behaviors and structured training programs enhancing understanding of the risks faced by the Bank and how to manage them appropriately. Risk culture development includes adequate communication across all organizational levels regarding the importance of effective internal controls. Implementing risk culture requires integrating it into daily activities, supported by an internal control system to ensure its effectiveness throughout the organization.

The Bank ensures the availability of human capital, systems, and infrastructure necessary for effective risk management implementation. The Bank ensures the Risk Management Team has access to timely, credible, and reliable information to ensure proper risk identification, measurement, monitoring, and control processes. Systems and infrastructure are required to provide timely risk information supporting management decision-making.

The Bank also ensures adequate quantity and quality of human capital for managing risks. Employees must possess sufficient competencies to perform risk management functions, with experience in banking, financial services, and/or payment systems. The duties and responsibilities of each unit and risk management team have been outlined in the Bank's internal policies or standard procedures. To continuously enhance human capital quality, the Bank conducts various workshops and relevant training programs. These training programs are regularly and systematically developed to strengthen the Bank's risk culture.

9. Capital Adequacy Management (Capital Management)
In response to the increasing risks arising from the growing complexity of the Bank's products, services, and business activities—along with the evolving risk measurement methods and techniques in the banking industry—capital adequacy assessment needs to be adjusted. This adjustment ensures the capital is sufficient not only to absorb potential losses arising from Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk

namun juga dari risiko lain yang bersifat material. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain Risiko Konsentrasi, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book), Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, dan Risiko Reputasi, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario stress test terhadap kecukupan modal Bank.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dimaksud, Bank memiliki dan menerapkan proses penilaian kecukupan modal secara internal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Pendekatan pengelolaan modal disesuaikan dengan tujuan stratejik Bank dan ketentuan kecukupan modal oleh regulator. Untuk mendukung strategi bisnis yang kompetitif, pengelolaan modal harus dapat memastikan kecukupan modal dan struktur modal yang efisien agar dapat menutup risiko yang berpotensi muncul dari aktivitas bisnis Bank.

but also from other material risks. To anticipate such developments, the Bank maintains minimum capital in accordance with its risk profile.

Maintaining minimum capital based on the risk profile aims to anticipate potential losses arising from Risk-Weighted Assets (RWA), which incorporate Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk, as well as to address potential future losses from risks not fully captured in the RWA calculation. These risks include, but are not limited to, Concentration Risk, Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), Legal Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, and Reputational Risk. Additionally, it anticipates the impact of stress test scenarios on the Bank's capital adequacy.

To meet the minimum capital requirements based on the risk profile, the Bank implements an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

The Bank's capital management approach is aligned with its strategic objectives and regulatory capital adequacy requirements. To support a competitive business strategy, capital management ensures sufficient capital and an efficient capital structure to cover potential risks arising from the Bank's business activities.

Pengungkapan Eksposure Risiko
Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan nasabah penerima fasilitas, Risiko Konsentrasi Penyaluran Dana, Counterparty Credit Risk, Settlement Risk, dan akibat Country Risk.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini adalah:

1. Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit;
2. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan, *Risk Appetite Statement*, *Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Pembiayaan secara konsisten;
3. Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai, Tim *Collection* dengan sistem yang mendukung, serta pembukuan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah berupa PPAP dan/atau CKPN sesuai dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan.
4. Bank menetapkan batas Pembiayaan, termasuk BMPD, *financing line*, wewenang pemutus pembiayaan dan portofolio berdasarkan sektor ekonomi guna mengelola risiko kredit.

Risk Exposure Disclosure
Credit Risk

Credit Risk refers to the risk arising from the failure of customers or other counterparties to fulfill their obligations to the Bank in accordance with agreed terms. This includes Credit Risk from the failure of facility recipients, Concentration Risk in fund distribution, Counterparty Credit Risk, Settlement Risk, and Country Risk.

The following are general measures taken to manage and mitigate this risk:

1. The Bank has established and implemented credit risk governance, frameworks, processes, and controls;
2. The Bank consistently applies Financing Policies and Procedures, the Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria, and Financing Committees;
3. The Bank has documented standard procedures and infrastructure related to the financing process, which include adequate financing procedures, a dedicated Collection Team supported by relevant systems, and the recognition of provisions for potential financing losses through PPAP and/or CKPN in accordance with the type of financing contract used;
4. The Bank establishes Financing limits, including BMPD, financing lines, financing decision-making authorities, and portfolio allocation based on economic sectors to manage credit risk.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar meliputi antara lain risiko *benchmark* suku bunga dan risiko nilai tukar.

1. Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk) adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.
2. Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk) adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini adalah:

1. Menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian risiko pasar;
2. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Treasury, serta Risk Appetite Frameworks;
3. Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank antara lain melalui Asset & Liabilities Management dan Asset and Liabilities Committee (ALCO);
4. Melakukan pemantauan dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar, serta limitasi risiko pasar;
5. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat *margin* di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank;
6. Melakukan pemantauan dan pengukuran risiko pasar termasuk pemantauan limit dealer (limit utilisasi dan batas kerugian transaksi) yang dijalankan oleh Treasury.
7. Melakukan perhitungan *stress testing* risiko pasar secara berkala.

Risiko Likuiditas

Risiko ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya Bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini adalah:

1. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas;
2. Melakukan *Review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas;

Market Risk

Market Risk is the risk arising from balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices. This includes risks from fluctuations in the value of tradable or leasable assets.

Market risk encompasses, among others, interest rate benchmark risk and foreign exchange risk.

1. Interest Rate Risk is the potential loss resulting from market interest rate movements that are unfavorable to the Bank's interest rate-sensitive positions or transactions;
2. Foreign Exchange Risk is the potential loss caused by adverse movements in exchange rates when the Bank holds an open position.

The following are general measures taken to manage and mitigate this risk:

1. Implementing governance, frameworks, processes, and controls for market risk;
2. Applying Treasury Policies and Procedures as well as the Risk Appetite Frameworks;
3. Managing the Bank's assets and liabilities through Asset & Liability Management and the Asset and Liability Committee (ALCO);
4. Regular monitoring and measurement of market price trends, potential market stress, and market risk limits;
5. Monitoring market margin rate developments and analyzing their impact on the Bank's performance;
6. Monitoring and measuring market risk, including monitoring dealer limits (utilization limits and transaction loss limits) by the Treasury function;
7. Conducting periodic market risk stress testing.

Liquidity Risk

The risk from the Bank's inability to fulfill maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged as collateral, without disrupting the Bank's activities and financial condition. Liquidity risk arises due to a mismatch in maturity between liabilities and claims/financing owned by the Bank. This is because banks generally have short-term funding and channel it into longer-term financing.

The following are general measures taken to manage and mitigate this risk:

1. Continuously measuring the Bank's liquidity risk profile to reflect its position and trends, serving as an early warning indicator if liquidity problems begin to emerge;
2. Conducting reviews of policies and standard operating procedures related to liquidity risk management;

3. Mengatur dan menjaga likuiditas Bank secara keseluruhan dan sesuai ketentuan Regulator dalam hal pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
4. Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank;
5. Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, Prosedur Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan.*

Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko operasional adalah peningkatan kontrol diseluruh unit kerja melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/ otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini adalah:
1. Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan oleh Bank;
2. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*;
3. Melakukan *Review* terhadap ketentuan baik itu kebijakan maupun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional;
4. Bank telah memiliki dan menerapkan pedoman internal di antaranya *Risk Appetite Statement*, Prosedur *Anti Fraud*, Prosedur Risiko Operasional,dan *Business Continuity Plan.*

Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Mitigasi yang dijalankan untuk mengelola risiko ini adalah:
1. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Hukum dan *Risk Appetite Statement* untuk risiko hukum;
2. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat;

3. Regulating and maintaining the Bank's overall liquidity and in accordance with Regulator provisions in terms of fulfilling the Minimum Statutory Reserve (GWM), RIM (Macroprudential Intermediation Ratio) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM);
4. Maintaining the Bank's access to the money market through interbank placements and loans;
5. The Bank has established and implemented a Risk Appetite Statement, Liquidity Risk Procedures, and a Contingency Funding Plan.

Operational Risk

The risk of losses resulting from inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures and/or external events affecting the Bank's operations.

One of the efforts made to manage operational risk is increasing control in all work units through separation of duties and responsibilities, dual control mechanisms in the transaction functions, deviation/authorization, limiting access system authority, increasing employee competency, including fulfilling human capital (HC) adequacy, and internal audits.

The mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk are:
1. Conducting operational risk analysis for proposed new products and/or activities to be launched by the Bank;
2. Developing risk management policies including procedures for information technology including data communication networks and software standardization, access system management, development of electronic banking services in terms of accessibility security and Disaster Recovery Plan;
3. Reviewing the provisions, both policies and procedures related to operational risk management;
4. The Bank has implemented internal guidelines including a Risk Appetite Statement, Anti-Fraud Procedures, Operational Risk Procedures, and Business Continuity Plan.

Legal Risk

The risk of lawsuits and/or weaknesses in juridical aspects. Legal risk can originate from weaknesses in the juridical aspects caused by weaknesses in the engagements carried out by the Bank, the absence or changes in statutory provisions that may cause a transaction carried out by the Bank to be inconsistent with the provisions of statutory regulations, and the litigation process or resolving disputes arising from third party lawsuits against the Bank or the Bank against third parties.

The mitigations implemented to manage this risk are:
1. The Bank has instigated a Legal Policy and Risk Appetite Statement for legal risks;
2. Examining all agreements to be made between the Bank and third parties and carrying out periodic checks on the agreements that have been made;

3. Menerapkan standardisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu;
4. Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru,serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut;
5. Memberikan opini hukum atas permintaan unit kerja lain guna memitigasi adanya potensi hukum bagi Bank.

Risiko Reputasi

Risiko menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Bank Aladin Syariah, mencakup:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media;
2. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Bank apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media;
3. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank.

Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik.

Selain itu, timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko stratejik yang dijalankan oleh Bank Aladin Syariah, mencakup:

1. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi,misi, strategi serta kemampuan Bank;
2. Mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi;
3. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap strategi dan rencana bisnis bank untuk memastikan apakah masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini serta melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis bank.

3. Standardizing contracts and cooperation agreements for certain financing programs;
4. Carrying out legal analysis of new products and/or activities, as well as creating standard legal documents related to these products and/or activities;
5. Providing legal opinions at the request of other work units to mitigate legal potential for the Bank.

Reputational Risk

The risk of decreasing levels of stakeholder trust stemming from negative perceptions of the Bank. This risk arises, due to negative media reports and/or rumors about the Bank as well as ineffective bank communication strategies.

Risk mitigation and management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Supervising media reports to monitor negative publications or customer complaints appearing in the media;
2. Clarifying and responding in accordance with the best steps taken by the Bank if there are negative news and customer complaints appearing in the media;
3. Analyzing reputational risks that may arise, as well as strategies to anticipate risks when launching new Bank products/services/programs.

Strategic Risk

The risk resulting from inaccuracies in making and/or implementing strategic decisions as well as failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises due to the Bank adopting a strategy that is not in line with the Bank's vision and mission, conducts an analysis of the strategic environment that is not comprehensive and/or there is a mismatch between strategic plans and strategic levels.

In addition, this risk arises from a failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate technological changes, changes in macroeconomic conditions, dynamics of market competition and changes in relevant authority policies.

The strategic risk mitigation or management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Identifying and quantifying strategic risks from the start of preparing the Bank's business plan, guided by the Bank's vision, mission, strategy and capabilities;
2. Managing strategic risks through a collective and comprehensive consideration and decision-making process within the Risk Management Committee, to be submitted to the Board of Directors;
3. Conducting regular reviews of the Bank's business strategy and plan to ensure whether they are still relevant to the current situation and conditions, and assessing the level of success in achieving the Bank's business plan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan internal bank, dan penerapan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

Untuk memitigasi risiko ini, Bank Aladin Syariah menjalankan beberapa inisiatif, yakni:

1. Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan/*Review* kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru;
2. Melakukan *Review* terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;
3. Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada unit kerja terkait sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku;
4. Menjadi Liaison Dewan Pengawas Syariah guna memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.
5. Melaksanakan program-program kepatuhan, antara lain pelatihan secara berkala untuk memastikan seluruh karyawan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan bisnis dan operasional.

Compliance Risk

This is a risk resulting from the Bank not complying with and/or not implementing statutory regulations, other applicable provisions, internal bank regulations, and the application of Sharia Principles. When carrying out business activities in the banking industry, Banks are required to always comply with banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the National Sharia Council. The Bank's inability to follow and comply with all laws and regulations related to its banking business activities can have an impact on the Bank's business continuity.

The risk mitigation or management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Identifying and managing compliance risks from the start by providing input/reviews to business units and operational units regarding the development of new products and/or activities;
2. Reviewing the internal policy guidelines and procedures to ensure all external regulations are have been accommodated and are complied with in their implementation;
3. Conducting socialization on applicable regulations to related work units therefore each work unit can carry out duties and responsibilities in accordance with applicable regulations;
4. Acting as a Liaison with the Sharia Supervisory Board to ensure compliance of the Bank's operations with sharia principles.
5. Implementing compliance programs, including regular training to ensure all employees implement the precautionary principle when carrying out business and operational activities.

Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

Mitigasi dan pengelolaan risiko Imbal Hasil yang dilakukan Bank Aladin Syariah, mencakup:

1. *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan *pricing* secara berkala atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko bank;
2. Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap portofolio DPK dan pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil serta sensitivitas terhadap perubahan *pricing* di pasar;
3. Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar;
4. Bank telah memiliki dan menerapkan standar prosedur risiko imbal hasil.

Yield Risk

This risk arises due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from channeling funds, which can affect the behavior of third party fund customers.

Yield risk mitigation and management carried out by Bank Aladin Syariah includes:

1. Monitoring and measuring through ALCO meetings the pricing policy regularly or as needed if market pressure occurs that can increase Bank risk;
2. Setting adequate limits and an adequate review process for the TPF portfolio and financing with profit sharing based contracts as well as sensitivity to changes in pricing in the market;
3. Estimating the Bank's potential economic losses regularly during abnormal market conditions to see the sensitivity of the Bank's performance to changes in benchmark interest rates and market ratios;
4. The Bank has implemented standard return risk procedures.

Risiko Investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan yang dilakukan, mencakup:

1. Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif;
2. Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan Keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil;
3. *Monitoring* terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank.
4. Secara efektif mengawasi dan mengendalikan tipe, karakteristik, dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil serta melakukan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah untuk memitigasi risiko investasi.

Investment Risk

This risk results from the Bank sharing part of the losses of customers' businesses financed through profit sharing based financing, using the net revenue sharing method or using the profit and loss sharing method.
Some of the mitigation and management steps taken include:

1. Identifying the risks of investment activities with profit sharing based contracts on existing portfolios or potential risks that may arise, to facilitate the preparation and implementation of investment policies with clear and careful profit sharing based contracts, therefore these risks can be managed and controlled effectively;
2. Implementing an investment approval process with effective profit sharing-based contracts, including establishing limits of authority and investment decision-making mechanisms for profit-sharingbased contracts;
3. Monitoring the concentration of channeling funds using profit sharing based contracts therefore it is in line with the Bank's risk appetite.
4. Effectively monitoring and controlling the type, characteristics and quality of investments with profit sharing based contracts and reserve losses for possible problematic financing to mitigate investment risks.

Deklarasi Transaksi Material

Material Transaction Declaration

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Per 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal sehingga Bank Aladin Syariah tidak menyajikan informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Bank untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Article 3 paragraph (1) states that a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to 20% or more of a Public companies equity.

As of December 31, 2024, Bank Aladin Syariah had no material commitments for capital goods investments therefore Bank Aladin Syariah has no information to report on the names of parties making the bond, the purpose of the bond, the source of funds expected to fulfill the bond, the currency in which the bond is denominated and the steps taken by the Bank to hedge the risk of foreign currency positions.

Informasi atau Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik

Material Information or Facts Occurred After the Date of the Public Accountant's Report

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2024 hingga laporan audit diterbitkan pada 17 April 2025, yakni antara lain:

1. Permodalan
   a. Sejak awal diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2021 hingga tanggal 31 Desember 2024, jumlah waran yang telah di ekskusi adalah sejumlah 221.160.140 lembar waran atau sebesar Rp24,327,626,400 (nilai penuh) dimana 221.140.192 lembar waran atau sebesar Rp24.325.421.120 (nilai penuh) telah dicatat sebagai modal ditempatkan dan disetor dan untuk sisa waran yang telah di eksekusi namun belum diaktakan sejumlah 20,048 lembar waran, masih dicatat sebagai dana setoran modal. Sisa waran yang belum di eksekusi sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan adalah sejumlah 2.578.839.760 lembar waran.
   b. Untuk menambah permodalan Bank, pada tanggal 28 Maret 2024, Bank telah menerima dana setoran modal dari pemegang saham pengendali sebesar Rp45.000.000.000 (nilai penuh).

The following is related to material information and facts occurred from the end of the reporting period December 31, 2024 until the accountant's report was published on April 17, 2025 and includes:

1. Capital
   a. Since its initial issuance on August 2, 2021, until December 31, 2024, a total of 221,160,140 warrants have been exercised, amounting to Rp24,327,626,400 (full value), of which 221,140,192 warrants, or Rp24,325,421,120 (full value), have been recorded as issued and paid-up capital. The remaining warrants that have been exercised but not yet formalized total 20,048 warrants, which are still recorded as capital deposit funds. The remaining unexercised warrants as of the financial statement issuance date total 2,578,839,760 warrants.
   b. To increase the Bank's capital, on March 28, 2024, the Bank received capital deposits from controlling shareholders amounting to Rp45,000,000,000 (full amount).

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan

Comparison between Targets and Realization and Projections for the Next 1 (One) Year

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Bank Aladin Syariah telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan industri. Adapun perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan berdasarkan RBB Tahun 2024 dengan realisasi tahun buku 2024, adalah sebagai berikut.

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATION

Bank Aladin Syariah set a number of targets to be achieved in the 2024 Bank Business Plan (RBB), which had been adjusted to economic and industrial conditions. The comparison of the targets set based on the 2024 RBB with the realization in the 2024 fiscal year was as follows.

Tabel Perbandingan antara Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Tahun 2024

Tabel Perbandingan antara Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Tahun 2024

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-juta) 2024 Realization (Rp-million)	Target 2024 (Rp-juta) 2024 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Realization Accomplishment against 2024 Target (%)	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* Fund Management Income by Bank as Mudharib	613.442	564.674	8,64%	^
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan Net Profit (Loss) for the Period	(73.727)	(272.204)	72,91%	^

Tabel Perbandingan antara Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Tahun 2024

Tabel Perbandingan antara Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Tahun 2024

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-juta) 2024 Realization (Rp-million)	Target 2024 (Rp-juta) 2024 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Realization Accomplishment against 2024 Target (%)	
Aset Assets	9.362.085	8.150.537	14,86%	^
Dana Pihak Ketiga Third-party funds	5.410.031	4.726.688	14,46%	^
Pembiayaan Financing	4.749.053	4.317.830	9,99%	^

Di tahun 2024, Bank Aladin Syariah mencatatkan pencapaian melampaui target keuangan yang ditargetkan pada Rencana Bisnis Bank. Bank Aladin Syariah membukukan rugi sebesar Rp73,7 miliar, lebih baik dari yang diproyeksikan sebelumnya. Pencapaian ini sejalan dengan beban operasional yang dapat dijaga di bawah target sampai dengan akhir tahun 2024. Dari sisi penyaluran pembiayaan, di tahun 2024 Bank berhasil mencatatkan pencapaian yang melebihi target dengan total pembiayaan sebesar Rp4,75 triliun atau lebih tinggi 9,99% dari target. Sementara itu dari sisi penghimpunan, Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp5,4 triliun per akhir tahun atau lebih tinggi 14,46% dari target.

In 2024, Bank Aladin Syariah recorded financial accomplishments exceeding the targets set in the Bank's Business Plan. The Bank posted a loss of Rp73.7 billion, which was better than previously projected. This accomplishment was in line with the Bank's ability to keep operating expenses below the target through the end of 2024. In terms of financing distribution, the Bank surpassed its 2024 target by recording total financing of Rp4.75 trillion, 10% higher than the initial target. Meanwhile, in terms of fundraising, the Bank successfully raised third-party funds amounting to Rp5.4 trillion by year-end, exceeding the target by 14%.

PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Untuk 1 (tahun) ke depan, Bank Aladin Syariah telah menetapkan sejumlah proyeksi yang tertuang dalam RBB Tahun 2025 yang juga telah disesuaikan dengan kondisi industri dan ekonomi. Di tahun 2025, Bank akan melanjutkan pengembangan bisnis yang telah berlangsung di tahun sebelumnya serta terus melengkapi produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah, baik produk pendanaan maupun pembiayaan. Produk dan layanan yang dikembangkan ditujukan untuk menggarap potensi yang ada pada segmen ritel, UMKM dan Korporasi. Pengembangan bisnis Bank utamanya akan melalui ekosistem mitra, baik mitra eksisting maupun mitra baru. Melalui kerja sama kemitraan, Bank memproyeksikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tahun 2025.

PROJECTION FOR THE NEXT ONE (1) YEAR

For the upcoming year, Bank Aladin Syariah has set several projections as outlined in the 2025 Bank Business Plan (RBB), which has also been adjusted in line with industry and economic conditions. In 2025, the Bank will continue the business development initiatives carried out in the previous year and will further enhance its product and service offerings for customers, including both funding and financing products. The products and services being developed are aimed at tapping into the potential of the retail, MSME, and corporate segments. The Bank's business development will primarily be driven through partner ecosystems, including both existing and new partners. Through these strategic partnerships, the Bank projects sustainable business growth in 2025.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal tersebut diperbolehkan dalam Anggaran Dasar, tidak menyebabkan aset bersih Bank menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta cadangan wajib Bank. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Bank. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim, Bank mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Bank. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh Pemegang Saham.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Manajemen Bank dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas. Pemegang Saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh Pemegang Saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Informasi Pembagian Dividen dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Bank Aladin Syariah belum melakukan pembagian dividen selama 2 (dua) tahun terakhir disebabkan saat ini Bank masih dalam tahap pengembangan bisnis seiring dengan transformasi bisnis Bank Aladin Syariah. Berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan di tahun 2023 untuk kinerja Tahun Buku 2022 dan RUPS di tahun 2024 untuk kinerja Tahun Buku 2023, Bank Aladin Syariah memutuskan tidak melakukan pembayaran dividen.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Dividend Policy

Dividend distribution is carried out based on the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions, as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Before the end of the financial year, interim dividends can be distributed as long as this is permitted in the Articles of Association, and does not cause the Bank's net assets to become less than the issued and fully paid-up capital and the Bank's mandatory reserves. The distribution of interim dividends must not interfere with the Bank activities. The interim dividends distribution is determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. If after the end of the financial year in which interim dividends are distributed, the Bank suffers a loss, then the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Bank. The Board of Commissioners and Board of Directors will be jointly and severally responsible for the return if the interim dividend is not returned by the Shareholders.

Determining the amount and distribution of dividends for these shares will depend on recommendations from Bank Management after considering the following factors: retained earnings, financial condition, liquidity condition, future business prospects and cash requirements. Shareholders on the recording date will receive the right to dividends in the full amount and will be subject to income taxes applicable in Indonesian taxation provisions. Cash dividends received by Shareholders from outside Indonesia will be subject to income taxes in accordance with tax regulations in Indonesia.

Information on Dividend Distribution in the Last 2 (Two) Years

Bank Aladin Syariah has not distributed dividends in the past two (2) years as the Bank is currently in the business development stage in line with its ongoing business transformation. Based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) held in 2023 for the 2022 Fiscal Year performance and in 2024 for the 2023 Fiscal Year performance, Bank Aladin Syariah decided not to distribute dividends.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)

Program kepemilikan saham bagi karyawan (Employee Stock Option Program/ESOP), maupun bagi manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP) adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atau manajemen atas kepemilikan saham sebuah perusahaan. Hingga 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah belum memiliki program ESOP, maupun MSOP. Sehingga tidak terdapat informasi terkait jumlah saham dan/atau opsi, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga pelaksanaan.

Stock ownership programs for employees (Employee Stock Option Program/ESOP), and for management (Management Stock Option Program/MSOP) are programs granting employees or management the right to own shares in a company. As of December 31, 2024, Bank Aladin Syariah has not implemented an Employee Stock Ownership Program (ESOP) or a Management Stock Option Program (MSOP). Accordingly, there is no information available regarding the number of shares and/or options, exercise period, eligibility requirements for employees and/or management, or exercise price.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Public Offering Proceeds

Pada tanggal 22 Januari 2021, Bank Aladin Syariah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No. S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 1 Februari 2021, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BANK.

Dari hasil penawaran umum saham perdana, Bank berhasil mencatat penambahan modal disetor sebesar Rp500.000.000.000 dan tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp15.000.000.000,- sebelum dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp4.612.334.741,-. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum saham perdana ini adalah sebesar Rp510.387.665.259,-.

Penawaran umum perdana saham ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperkuat modal kerja Bank, di mana sebagian digunakan untuk modal kerja dan sebagian lagi digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan IT & penunjangnya.

Berikut realisasi penggunaan dana dari hasil penawaran umum perdana saham, per 31 Desember 2022, yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S.043.BOD/01.2025 tanggal 14 Januari 2025.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2024
Realization of Use of Funds from Initial Public Offering of Shares as of December 31, 2024

Jenis Penawaran Umum Type of Public Offering	Tanggal Efektif Effective date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			
		Jumlah Hasil Penawaran Umum (Rp) Total Public Offering Results (Rp)	Biaya Penawaran Umum (Rp) Public Offering Fee (Rp)	Hasil Bersih (Rp) Net Yield (Rp)	
IPO Saham	1 Februari 2021	515.000.000.000	4.612.334.741	510.387.665.259	



On January 22 2021, Bank Aladin Syariah received an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) through letter No. S-8/D.04/2021 to conduct an initial public offering of 5,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (full value) per share at an offering price of Rp103 (full value) per share. On February 1, 2021, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) with the share code BANK.

From the results of the initial public offering, the Bank managed to record additional paid-in capital of Rp500,000,000,000 and additional paid-in capital in the form of premiums of Rp15,000,000,000 before deducting share issuance costs of Rp4,612,334,741. The net proceeds from this initial public offering amounted to Rp510,387,665,259.-.

This initial public offering of shares was carried out in order to improve performance and strengthen the Bank's working capital, where part of it was used for working capital and part was used to finance IT maintenance & support.

The following shows the realization of the use of funds from the initial public offering of shares, as of December 31, 2022, as reported to the Financial Services Authority (OJK) via letter No. S.043.BOD/01.2025 dated January 14, 2025.

	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (Rp) Funds from the Public Offering (Rp)
	Biaya Pemeliharaan IT & Penunjangnya (Rp) Cost of IT maintenance & Support (Rp)	Modal Kerja Lainnya (Rp) Other Working Capital (Rp)	Biaya Pemeliharaan IT & Penunjangnya (Rp) Cost of IT maintenance & Support (Rp)	Modal Kerja Lainnya (Rp) Other Working Capital (Rp)	
	306.232.599.155	204.155.066.104	306.232.599.155	204.155.066.104	0

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang Modal

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Mergers/Consolidation, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

Bank Aladin Syariah senantiasa menggunakan jasa pihak ketiga untuk menilai kewajaran transaksi investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal, yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

Adapun informasi material yang terdapat di sepanjang tahun 2024, adalah terkait dengan investasi, sebagaimana terlampir berikut ini.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI

Adapun Bank Aladin Syariah melakukan kegiatan investasi pada surat berharga yang per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp2.094.295 juta, mengalami peningkatan sebesar 48,54% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.409.892 juta.

Bank Aladin Syariah always uses third party services to assess the fairness of investment transactions, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, and debt/capital restructuring, which are carried out in accordance with applicable provisions in the capital market sector.

The material information throughout the year 2024 is related to investments, as outlined below.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENTS

Bank Aladin Syariah made investments in securities, which as of December 31, 2024, were recorded at Rp2,094,295 million, reflecting an increase of 48.54% compared to the previous year, which amounted to Rp1,409,892 million.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information On Material Transactions Containing Conflicts Of Interest And/Or Transactions With Affiliated Parties

KEBIJAKAN SERTA MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Bank Aladin Syariah memiliki kebijakan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, yang dilakukan Bank Aladin Syariah, senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang

POLICIES AND REVIEW MECHANISMS FOR TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

Bank Aladin Syariah has policies related to material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliates/related parties. Material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliates/related parties conducted by Bank Aladin Syariah always adhere to the principle of prudence in accordance with general business practices

berlaku umum dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Mekanisme *Review* atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisiaris.

Sepanjang tahun 2024, Bank Aladin Syariah tidak memiliki pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi.

KOMITMEN BANK ATAU MANAJEMEN ATAS TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Dalam melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Bank Aladin Syariah melalui Dewan Komisaris dan Komite Audit juga telah melakukan *Review* untuk memastikan bahwa transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*), dan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah melakukan seluruh transaksi secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal, serta atas dasar alasan kebutuhan Bank dan bebas dari konflik kepentingan. Bank Aladin Syariah melakukan transaksi dengan pihak afiliasi/ pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:
1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

and comply with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflicts of Interest Transactions, as well as PSAK 224 concerning Disclosure of Related Parties.

The review mechanism for material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliates/ related parties is carried out through an audit process by the Audit Committee, and the results are then reported to the Board of Commissioners.

Throughout 2024, Bank Aladin Syariah did not have any violations of laws and regulations related to material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliates/related parties.

BANK OR MANAGEMENT COMMITMENT FOR MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

When carrying out material transactions that may contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated/ related parties, the Board of Directors ensures all transaction activities have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. Bank Aladin Syariah, through the Board of Commissioners and the Audit Committee, also carries out reviews to ensure the material transactions containing conflicts of interest and/ or transactions with affiliated/related parties are carried out in accordance with generally accepted business practices and meet the principles of fair transactions (arms-length principle), and are in accordance with applicable regulations.

POLICY ON AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

In 2024, Bank Aladin Syariah carried out all transactions fairly (arm's length) and in accordance with normal commercial requirements, as well as based on the Bank's needs and free from conflicts of interest. Bank Aladin Syariah transactions with affiliated/related parties are regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosures of Related Parties.

A party is considered a related party to the Bank if:
1. The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
   a. Has control or joint control of the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Represents key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam laporan keuangan Bank.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI BERELASI

Berikut disampaikan nama-nama pihak berelasi, sifat hubungan dan sifat transaksi yang dilakukan Bank Aladin Syariah.

2. An entity is related to the reporting entity if it fulfills one of the following:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning the parent entity, subsidiary entity and subsequent subsidiaries are related to another entity);
   b. One entity is an associated entity or joint venture of another entity (or an associated entity or joint venture that is a member of a business group, in which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate entity of a third entity;
   e. The entity is a post-employment benefits program for employee benefits from one of the reporting entities or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity organizing the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
   f. Entities controlled or jointly controlled by the person identified in point (1);
   g. The person identified in point (1) (a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity).

Transactions with related parties are carried out with terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as transactions with third parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the relevant financial reports and the details are presented in the Bank's financial reports.

NAMES AND NATURE OF RELATIONSHIP OF AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

The names of related parties, the nature of affiliation and the nature of transactions carried out by Bank Aladin Syariah are shown below.

Tabel Pihak Berelasi
Table of Related Parties

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Affiliation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
John Dharma J. Kusuma	Pemilik Manfaat Terakhir Ultimate Beneficial Owner	Tabungan *Mudharabah* Mudharabah Demand Saving
PT Aladin Global Ventures	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	Tabungan *Mudharabah* Mudharabah Demand Saving
Direksi, Dewan Komisaris, dan Manajemen Kunci Lainnya Board of Directors, Board of Commissioners, and Other Key Management	Manajemen Kunci Key Management	Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Mudharabah demand saving and time deposits

KEWAJARAN TRANSAKSI DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perjalanan transaksi pada tahun 2024 dan 2023 dengan pihak berelasi merupakan transaksi yang wajar yang tercerminkan dari persentase terkait transaksi dengan pihak berelasi bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya tidak memberikan dampak yang signifikan. Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan usaha Bank.

FAIRNESS OF TRANSACTIONS AND REASONS FOR CONDUCTING TRANSACTIONS

Transactions in 2024 and 2023 with related parties are normal transactions as reflected in the percentage of transactions with related parties compared to the total amount, and they do not have a significant impact. In normal business activities, the Bank carries out transactions with affiliated/related parties, due to ownership and/or management relationships. All transactions with affiliated/related parties have been carried out with mutually agreed policies and conditions. All transactions with affiliated/related parties are necessary to support the smooth running of the Bank's business activities.

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

Tabel Transaksi dan Saldo dengan Pihak-Pihak Berelasi Tahun 2023-2024
Table of Transactions and Balances with Related Parties for 2023-2024

Uraian Description	2024	2023
Dana *Syirkah* Temporer Temporary Syirkah Fund		
Tabungan *Mudharabah* Pemegang Saham Utama Mudharabah Savings of the Company's Major Shareholders	**Rp8.446 juta**	Rp8.377 juta
Tabungan *Mudharabah* Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders' Mudharabah Savings	**Rp67 juta**	Rp65 juta
Tabungan *Mudharabah* Manajemen Kunci Key Management's Mudharabah Savings	**Rp3.805 juta**	Rp9.145 juta
Deposito *Mudharabah* Manajemen Kunci Mudharabah Time Deposits Key Management	**Rp3.916 juta**	Rp9.230 juta
Persentase terhadap Dana *Syirkah* Temporer Percentage of Temporary Syirkah Funds	**0,30%**	0,82%
Beban Expenses		
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Third Party Rights on Profit Sharing of Temporary Syirkah Funds	**Rp380 juta**	Rp312 juta
Persentase terhadap Total Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Percentage of Total Rights of Third Parties on Profit Sharing of Temporary Syirkah Funds	**0,12%**	0,26%

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada Bank dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*. Adapun bagi hasil dana *Syirkah* temporer adalah bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berasal dari pihak-pihak berelasi dengan Bank.

Mudharabah demand deposits are deposits of funds from other parties who receive a profit sharing reward from the Bank's income for the use of these funds based on a previously agreed ratio. The profit sharing of temporary syirkah funds is the profit sharing of temporary syirkah funds originating from parties related to the Bank.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Bank

Changes in Laws and Regulations with Significant Impact on the Bank

Di tahun 2024, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Bank. Adapun perubahan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Bank Aladin Syariah di tahun 2024, dan dampaknya terhadap Bank khususnya pada laporan keuangan adalah sebagai berikut.

In 2024, there were changes in laws and regulations that had a significant impact on the Bank. The following outlines the regulatory changes with a significant impact on Bank Aladin Syariah in 2024 and their effects, particularly on the Bank's financial statements.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions.	Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. To maintain a digital space in Indonesia that is clean, healthy, ethical, productive, and fair, the use of Information Technology and Electronic Transactions must be regulated in a way ensuring legal certainty, fairness, and protection of public interests from all forms of disruption caused by the misuse of Electronic Information, Electronic Documents, Information Technology, and/or Electronic Transactions of which may disturb public order.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank has adjusted its internal guidelines to align with the provisions set out in this regulation. However, this regulation has no significant impact on the financial statements for the current or prior reporting periods.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units	POJK ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan Pilar ke-3 dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yaitu Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah khususnya untuk strategi Penguatan Tata Kelola Syariah, serta pilar ke-5 mengenai Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah khususnya untuk strategi Pengaturan yang Berorientasi pada Ketahanan, Daya Saing dan Dampak *Socio-Economic*, dengan memperhatikan *best practice* dan/atau standar internasional. POJK ini juga diterbitkan dalam rangka melengkapi *framework* tata kelola di BUS/UUS (Bank) yang akan mencakup tata kelola umum dan tata kelola syariah. Ketentuan mengenai tata kelola yang sifatnya umum akan mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, sedangkan ketentuan tata kelola syariah akan mengacu pada POJK Tata Kelola Syariah ini. This regulation was issued to support the third pillar of the 2023–2027 Roadmap for the Development and Strengthening of Sharia Banking, namely the Strengthening of Sharia Banking Characteristics, particularly the strategy to Enhance Sharia Governance. It also supports the fifth pillar concerning the Strengthening of Regulation, Licensing, and Supervision of Sharia Banking, particularly through a regulatory approach focused on resilience, competitiveness, and socio-economic impact, while taking into account best practices and/or international standards. This regulation also aims to complete the governance framework within Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (the Bank), encompassing both general and sharia governance. General governance provisions refer to FSA Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, while sharia governance provisions refer to this Sharia Governance Regulation.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank has adjusted its internal guidelines to align with the provisions set out in this regulation. However, this regulation has no significant impact on the financial statements for the current or prior reporting periods.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2024 on Reporting of Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reporting of Share Pledging Activities of Public Companies	Penerbitan POJK ini untuk menyelaraskan ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham yang diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham yang semula wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan saham menjadi disampaikan sesegera mungkin paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham. Penerbitan POJK ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan pengawasan yang dilakukan terhadap laporan kepemilikan saham, penyesuaian dengan standar internasional/hasil studi komparasi di negara lain dan memperluas cakupan pengaturan sehingga mencakup jenis transaksi lain yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Terbuka seperti aktivitas menjaminkan saham. The issuance of this regulation aims to align the provisions on the reporting period for share ownership or any changes in share ownership with Article 87 paragraph (3) of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. The amendment shortens the reporting period from a maximum of 10 (ten) days after the occurrence of share ownership to as soon as possible, but no later than 5 (five) working days after gaining voting rights over the shares. This regulation also seeks to enhance the quality of information disclosure by certain shareholders and strengthen supervision of share ownership reporting. It introduces adjustments based on international standards and comparative studies from other countries, while expanding the scope of regulation to include other types of transactions conducted by public company shareholders, such as share pledging activities.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The Bank has adjusted its internal guidelines to align with the provisions set out in this regulation. However, this regulation has no significant impact on the financial statements for the current or prior reporting periods.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum Financial Services Authority Regulation No. 5 of 2024 on the Determination of the Supervisory Status and Handling of Issues of Commercial Banks.	POJK ini diterbitkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan bank, tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi antar lembaga. Tujuan penerbitan POJK ini adalah mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. POJK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). POJK ini disusun dengan memperhatikan kondisi terkini dari aspek pengawasan dan penanganan permasalahan Bank. This OJK Regulation is issued as a strategic step to strengthen the supervision of banks, follow-up on supervision, handling of banking issues, and improve coordination between institutions. The purpose of issuing this OJK Regulation is to realize a robust financial system stability through the development and strengthening of the financial sector in Indonesia. This OJK Regulation is also issued in the context of harmonization and as a follow-up to the mandate in Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (Law on P2SK). This OJK Regulation is drafted by taking into account the current conditions in terms of supervision and handling of banking issues.	Bank melakukan penyesuaian pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini serta melakukan penyusunan dan pelaporan rencana aksi pemulihan (*recovery plan*) kepada OJK. The bank makes adjustments to its internal guidelines to align with the provisions set forth in this OJK Regulation and prepares and reports a recovery plan to the OJK.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Financial Services Authority Regulation No. 11 of 2024 on the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2017 on Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information Services System.	Penyusunan POJK tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif melalui penambahan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana, meliputi pertanggungan/ pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh sektor perasuransian, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. The preparation of the OJK Regulation on the Second Amendment to OJK Regulation No. 18/POJK.03/2017 on Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information Services System is driven by the need to provide more comprehensive debtor information through the addition of supporting information on funding provision activities, including risk coverage/management, guarantees, and technology-based joint funding services provided by the insurance sector, venture capital, microfinance institutions, financing institutions, and other financial services institutions.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set forth in this OJK Regulation. However, this OJK Regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation No. 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions.	Penyusunan POJK ini dilatarbelakangi antara lain: 1. Seiring dengan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan semakin terpapar eksposur risiko terjadinya Fraud yang berdampak kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah dan/atau kepada masyarakat. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menilai OJK berperan penting dalam pencegahan dan penanganan praktik korupsi, penyuapan dan/atau gratifikasi di LJK terutama sektor swasta. 3. Diperlukan integrasi ketentuan OJK terkait penerapan strategi anti Fraud yang telah berlaku di beberapa sektor jasa keuangan dan perluasan cakupan menjadi berlaku bagi seluruh LJK. The preparation of this OJK Regulation is driven by, among others: 1. In line with the increasing complexity of business activities in the financial services sector, financial services institutions are increasingly exposed to the risk of fraud, which can result in losses to the financial services industry, the government, and/or society. 2. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia considers OJK to play a crucial role in the prevention and handling of corruption, bribery, and/or gratification practices in financial services institutions, especially in the private sector. 3. There is a need to integrate OJK provisions related to the implementation of anti-fraud strategies that have been in effect in several financial services sectors and to expand the coverage to apply to all financial services institutions.	Bank telah memiliki pedoman Strategi Anti Fraud serta menerapkan dan mematuhi peraturan tersebut, yakni dengan mengimplementasikan: 1. Menyesuaikan ketentuan internal terkait Strategi Anti Fraud. 2. Menyampaikan pelaporan terkait Strategi Anti Fraud. The bank has established an Anti-Fraud Strategy guideline and implements and complies with the regulation by: 1. Adjusting internal provisions related to the Anti-Fraud Strategy. 2. Submitting reports related to the Anti-Fraud Strategy.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting.	Penyusunan POJK ini dilatarbelakangi oleh: 1. penekanan atas pentingnya perilaku berintegritas dari pegawai Bank, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan setiap orang lainnya dalam penyusunan laporan keuangan sejalan dengan UU Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK; 2. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan atau internal *control over financial reporting* (ICOFR) pada beberapa negara untuk mendorong laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan; dan 3. *working paper* dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang menemukan bahwa terdapat praktek *window dressing* yang dilakukan oleh *Global Systemically Important Bank* (G-SIB). The preparation of this OJK Regulation is driven by: 1. Emphasis on the importance of integrity in the behavior of bank employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and any other individuals involved in the preparation of financial statements in accordance with the Banking Law as amended by the P2SK Law. 2. The implementation of internal control over financial reporting (ICOFR) in the financial reporting process in several countries to encourage reliable financial statements in compliance with financial accounting standards. 3. Working papers from the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) which found practices of window dressing conducted by Global Systemically Important Banks (G-SIBs).	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini, membentuk unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank Umum. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set forth in this OJK Regulation, establishing a work unit responsible for preventing fraud or manipulation in financial information and/ or the financial statements of commercial banks. However, this OJK Regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan	Penyusunan POJK ini dilatarbelakangi antara lain: 1. Sebagai tindak lanjut terhadap penerbitan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan amanat: a. penyesuaian regulasi terkini untuk mendukung kolaborasi Bank Umum dengan perusahaan non LJK melalui kegiatan penyertaan modal; dan b. perluasan kegiatan usaha BPR atau BPR Syariah melalui penyertaan modal kepada lembaga penunjang, pengalihan piutang Bank, dan pengelola wakaf bagi Bank yang menjalankan prinsip syariah, 2. sebagai bentuk dukungan OJK terhadap kebutuhan industri dan harmonisasi ketentuan menyesuaikan perkembangan terkini maka diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, yaitu: a. penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) sebagai pengganti tanda tangan basah dan implementasi perjanjian elektronik; b. pengaturan yang lebih bersifat principle terkait dengan penjaminan oleh Bank Umum agar selaras dengan perkembangan standar/praktik internasional yang berlaku saat ini 3. pengaturan mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) oleh Bank.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Financial Services Authority Regulation No. 26 of 2024 on the Expansion of Banking Business Activities.	The preparation of this OJK Regulation is driven by, among others: 1. As a follow-up to the issuance of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, which mandates: a. The adjustment of current regulations to support collaboration between commercial banks and non-financial services institutions through equity participation activities; and b. The expansion of business activities for Rural Banks (BPR) or Sharia Rural Banks (BPR Syariah) through equity participation in supporting institutions, the transfer of bank receivables, and the management of waqf for banks operating under sharia principles. 2. As a form of support from the OJK to meet the needs of the industry and harmonize provisions in line with current developments, adjustments are needed in several provisions, including: a. The use of electronic signatures (TTE) as a substitute for wet signatures and the implementation of electronic agreements; b. More principle-based regulations regarding guarantees by commercial banks to align with the current international standards/practices. 3. Regulations concerning the Foreign Exchange Business Activities (KUPVA) by banks.	The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set forth in this OJK Regulation. However, this OJK Regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation No. 28 of 2024 on the Management of Record Information of Actors Through the Actor Information System in the Financial Services Sector.	Penyusunan POJK ini dilatarbelakangi antara lain: 1. Seiring dengan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan (LJK) semakin terpapar eksposur risiko terjadinya fraud yang berdampak kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah dan/atau kepada masyarakat; 2. Untuk mendukung penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan integritas sektor jasa keuangan, diperlukan penyediaan data dan informasi Rekam Jejak Pelaku di sektor jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU); 3. Diperlukan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar hukum penyediaan data dan informasi Rekam Jejak Pelaku melalui SIPELAKU. The preparation of this OJK Regulation is driven by, among others: 1. Along with the increasing complexity of business activities in the financial services sector, financial services institutions (LJK) are increasingly exposed to the risk of fraud, which can result in losses to the financial services industry, the government, and/or society. 2. To support the strengthening of supervision, law enforcement, and the enhancement of integrity in the financial services sector, it is necessary to provide data and information on the Record Information of Actors in the financial services sector through the Actor Information System in the Financial Services Sector (SIPELAKU). 3. There is a need for provisions from the Financial Services Authority as the legal basis for providing data and information on the Record Information of Actors through SIPELAKU.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada SEOJK ini. Namun, SEOJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set forth in this OJK Regulation. However, this OJK Regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank Financial Services Authority Regulation No. 44 of 2024 on Bank Secrecy.	POJK ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 40A ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 41A ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK. Selain itu, perlu dilakukan pengkinian ketentuan terkait Rahasia Bank mengingat ketentuan yang sebelumnya berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. POJK Rahasia Bank ini disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini antara lain kepentingan pembukaan Rahasia Bank dalam kasus harta bersama sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012. This OJK Regulation is issued as a follow-up to the mandate of Article 40A paragraph (2) of Law No. 7 of 1992 on Banking as amended several times, most recently by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, and Article 41A paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking as amended by the P2SK Law. Additionally, an update to the provisions on Bank Secrecy is necessary, as the previous regulation in effect was Bank Indonesia Regulation No. 2/19/PBI/2000 on the Requirements and Procedures for Issuing Orders or Written Permits to Disclose Bank Secrets. This Bank Secrecy of OJK Regulation is drafted with consideration of the current developments, including the interest in disclosing Bank Secrets in cases of joint assets as stipulated in Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/2012.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada POJK ini. Namun, POJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set forth in this OJK Regulation. However, this OJK Regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Circular Letter of the Financial Services Authority No. 11/SEOJK.01/2024 on Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information Services System.	Penyempurnaan SEOJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dilatarbelakangi oleh: 1. Kebutuhan industri, yakni penyediaan informasi debitur secara lebih komprehensif melalui penambahan informasi pertanggungan/ pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang diberikan oleh industri asuransi, penjaminan, dan LPBBTI sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko industri. 2. Penambahan referensi dengan memperhatikan perkembangan ketentuan yang berlaku. 3. Mengakomodir pedoman yang sebelumnya diatur melalui Surat Kepala Eksekutif. The improvement of the SEOJK on Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Services System is driven by: 1. a. The needs of the industry, namely the provision of more comprehensive debtor information through the addition of information on risk coverage/management, guarantees, and technology-based joint funding services (LPBBTI) provided by the insurance, guarantee, and LPBBTI industries, in order to improve the quality of risk management in the industry. 2. b. The addition of references by considering the development of applicable provisions. 3. c. Accommodating guidelines that were previously regulated through the Executive Head's Letter.	Bank menyesuaikan pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada SEOJK ini. Namun, SEOJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set forth in this SEOJK. However, this SEOJK does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.08/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.08/2024 on the Preparation and Submission of Financial Literacy and Financial Inclusion Plan Reports and Realization Reports.	Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, dan dalam rangka menjalankan amanat Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi literasi keuangan dan inklusi keuangan, termasuk mengenai bentuk, penyusunan, dan tata cara penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan. In connection with the issuance of Financial Services Authority Regulation No. 3 of 2023 on the Enhancement of Financial Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public, and in order to implement the mandate of Article 13 paragraph (6) of Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, it is necessary to regulate the preparation and submission of financial literacy and financial inclusion plan reports and realization reports, including the format, preparation, and procedures for submitting financial literacy and inclusion reports.	Bank telah melakukan penyesuaian komponen laporan pada Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan dan Laporan Realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan sesuai dengan SEOJK ini. Namun, SEOJK ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank has made adjustments to the components of the Financial Literacy and Financial Inclusion Plan Report and the Financial Literacy and Financial Inclusion Realization Report in accordance with this SEOJK. However, this SEOJK does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.08/2024 tentang Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Circular Letter of the Financial Services Authority No. 18/SEOJK.08/2024 on Self-Assessment of Compliance with Consumer and Public Protection Provisions in the Financial Services Sector.	SEOJK ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 87 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK ini mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Terdapat kebutuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai petunjuk pelaksanaan tentang penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. This SEOJK is a follow-up to the mandate of Article 87 paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. This SEOJK further regulates provisions regarding self-assessment of compliance with consumer and public protection provisions in the financial services sector. There is a need for financial services industry players regarding implementation guidelines for self-assessment of compliance with consumer and public protection provisions in the financial services sector.	

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Bank Indonesia No. 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain Yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia Bank Indonesia Regulation No. 2 of 2024 on Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Providers, Money Market and Foreign Exchange Market Participants, and Other Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia.	Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah: 1. Kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kepada Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dan Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dalam memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 2. Upaya Bank Indonesia memitigasi Risiko Siber pada sektor keuangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan mengganggu stabilitas Sistem Keuangan, sebagai dampak peningkatan digitalisasi dalam sektor keuangan. 3. Mendorong upaya penguatan pengawasan dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan Insiden Siber di sektor keuangan. The background for the issuance of this Bank Indonesia Regulation is as follows: 1. Bank Indonesia's authority to regulate and supervise Financial Sector Business Actors (PUSK) and the implementation of Financial Sector Technology Innovations to ensure information system security and cyber resilience, as emphasized in Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). 2. Bank Indonesia's efforts to mitigate Cyber Risk in the financial sector, which may cause financial losses and disrupt the stability of the Financial System, as a result of the increasing digitization in the financial sector. 3. Encouraging efforts to strengthen supervision and collaboration in the prevention and handling of Cyber Incidents in the financial sector.	Bank menyesuaikan penerapan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber Bank agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada PBI ini. Namun, PBI ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts the implementation of information system security and cyber resilience to align with the provisions set forth in this Bank Indonesia Regulation. However, this regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Bank Indonesia No. 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran	Penerbitan PBI ini didasari pertimbangan sebagai berikut: 1. Arah kebijakan sistem pembayaran serta perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang sistem pembayaran tidak terlepas dari berbagai risiko antara lain berupa fraud, kejahatan siber, dan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Risiko-risiko dimaksud perlu dimitigasi salah satunya dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri SP melalui penerapan standardisasi kompetensi Sistem Pembayaran (SK SP). Penerapan SK SP bertujuan untuk guna mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Penerbitan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain mengatur mengenai penguatan kualitas sumber daya manusia pada sektor keuangan termasuk sistem pembayaran yang merupakan kewenangan Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menyesuaikan Peraturan Bank Indonesia tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran.	Bank perlu memastikan kepemilikan sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran SDM serta mengadakan pelatihan kompetensi Sistem Pembayaran dan pelaporan sesuai PBI ini. Namun, PBI ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.
Bank Indonesia Regulation No. 5 of 2024 on Competency Standardization in the Payment System Field.	The issuance of this Bank Indonesia Regulation is based on the following considerations: 1. The direction of payment system policies, along with developments in technology and information systems in the payment system field, are not without various risks, including fraud, cybercrime, and money laundering and/or terrorism financing crimes. These risks need to be mitigated, one of which is through the enhancement of human capital competency in the payment system industry by implementing Payment System Competency Standards (SK SP). The implementation of SK SP aims to create a payment system that is fast, easy, cheap, secure, reliable, and ensures the availability of high-quality and trustworthy rupiah currency across the entire territory of the Republic of Indonesia. 2. The issuance of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, which among other things, regulates the strengthening of human capital quality in the financial sector, including the payment system, which is under the authority of Bank Indonesia. Based on this, Bank Indonesia needs to adjust the Bank Indonesia Regulation on Competency Standardization in the Payment System Field.	The bank needs to ensure the possession of Payment System Competency-Based Training (PBK) certificates and/or Payment System Competency Certificates for human capital, as well as conduct Payment System competency training and reporting in accordance with this Bank Indonesia Regulation. However, this regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 22 Tahun 2024 tentang Laporan Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia Board of Governors Member Regulation No. 22 of 2024 on the Report on the Implementation of Competency Standardization in the Payment System Field.	Arah kebijakan sistem pembayaran serta perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang sistem pembayaran tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu dimitigasi antara lain berupa fraud, kejahatan siber, dan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Untuk itu, penyelenggara sistem pembayaran harus senantiasa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar dapat mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta memastikan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah NKRI. The direction of payment system policies, along with developments in technology and information systems in the payment system field, are not without various risks that need to be mitigated, including fraud, cybercrime, and money laundering and/or terrorism financing crimes. Therefore, payment system providers must continuously enhance the competencies of human capital (HC) to achieve a payment system that is fast, easy, cheap, secure, reliable, and ensures the availability of high-quality and trustworthy rupiah currency throughout the Republic of Indonesia's territory.	Bank perlu memastikan pelaporan atas kepemilikan sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran SDM telah dilaksanakan sesuai PADG ini. Namun, PADG ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank needs to ensure the reporting on the possession of Payment System Competency-Based Training (PBK) certificates and/or Payment System Competency Certificates for human capital has been carried out in accordance with this PADG. However, this PADG does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia Bank Indonesia Board of Governors Member Regulation No. 24 of 2024 on Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Providers, Money Market and Foreign Exchange Market Participants, and Other Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia.	Latar belakang dikeluarkannya PADG ini adalah: 1. mendukung penerbitan PBI Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS), diperlukan ketentuan pelaksanaan yang akan mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat operasional; dan 2. memperjelas pengaturan penerapan KKS bagi Penyelenggara. The background for the issuance of this PADG is as follows: 1. To support the issuance of the Bank Indonesia Regulation (PBI) on Information System Security and Cyber Resilience (KKS), implementation provisions are needed to further regulate operational matters; and 2. To clarify the regulations regarding the application of KKS for Providers.	Bank menyesuaikan penerapan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber Bank agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada PADG ini. Namun, PADG ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts the implementation of information system security and cyber resilience to align with the provisions set out in this PADG. However, this PADG does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Latar Belakang/Penjelasan Latar Belakang/Penjelasan	Pengaruhnya terhadap Bank,dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Their influence on the Bank, and impact on the Bank's Financial Statements
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan Deposit Insurance Corporation Regulation No. 1 of 2024 on the Premium for the Banking Restructuring Program.	PLPS ini merupakan pengaturan atas upaya penanganan krisis sistem keuangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang diberikan mandat sebagai lembaga yang menyelenggarakan program restrukturisasi perbankan yang merupakan program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. This IDIC regulation is a framework for addressing the financial system crisis by the Deposit Insurance Corporation, which is entrusted with the mandate to implement the banking restructuring program, a program designed to address banking issues posing a threat to the national economy.	Bank melakukan pembayaran program restrukturisasi perbankan sebagaimana diatur pada PLPS ini. Namun, PLPS ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank makes payments for the banking restructuring program as regulated in this IDIC regulation. However, this IDIC regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum Deposit Insurance Corporation Regulation No. 2 of 2024 on the Resolution Plan for Commercial Banks.	Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan perlu mendapatkan Rencana Resolusi yang memuat antara lain rincian karakteristik Bank dan strategi tindakan resolusi yang diutamakan untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekonomi penting Bank tanpa menyebabkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan jika Bank dilakukan tindakan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. In order to improve the effectiveness of handling banks designated as Banks in Resolution, the Deposit Insurance Corporation needs to obtain a Resolution Plan including, among other things, details of the bank's characteristics and the resolution action strategies prioritized to maintain the continuity of the bank's critical economic functions without causing disruption to the stability of the financial system when the bank is subject to resolution actions by the Deposit Insurance Corporation.	Bank melakukan penyesuaian pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada PLPS ini serta melakukan penyusunan dan pelaporan rencana resolusi (*resolution plan*) kepada LPS. Namun, PLPS ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set out in this IDIC regulation and prepares and reports the resolution plan to the Deposit Insurance Corporation (IDIC). However, this IDIC regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 3 Tahun 2024 tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan Deposit Insurance Corporation Regulation No. 3 of 2024 on the Reports of Deposit Insurance Scheme Participating Banks.	Untuk mendukung pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan penangan Bank, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mendapatkan data simpanan bank dan laporan keuangan bank secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. To support the implementation of deposit insurance for customers and the handling of banks, the Deposit Insurance Corporation is authorized to obtain complete, accurate, up-to-date, comprehensive, and timely bank deposit data and financial statements.	Bank melakukan penyesuaian pedoman internal agar sejalan dengan ketentuan yang diatur pada PLPS ini serta melakukan penyusunan dan pelaporan berkala kepada LPS. Namun, PLPS ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. The bank adjusts its internal guidelines to align with the provisions set out in this IDIC regulation and prepares and submits periodic reports to the Deposit Insurance Corporation (IDIC). However, this IDIC regulation does not have a significant impact on the financial statements for the current period or the previous year.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Bank

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Bank

Bank Aladin Syariah telah menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Adapun efektif 1 Januari 2024, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") revisi yang relevan untuk Bank, yaitu Amandemen PSAK No. 116, "Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik". Dalam hal ini, penerapan dari standar revisi tersebut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

Bank Aladin Syariah has prepared accounting policies in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) published by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Accountants Association (DSAK-IAI), which are effective for the fiscal year starting January 1, 2024 to December 31, 2024.

As of January 1, 2024, the bank applies the relevant revised Financial Accounting Standards Statement ("PSAK"), namely the Amendment to PSAK No. 116, "Lease Liabilities in Sale and Leaseback." In this case, the implementation of this revised standard does not result in substantial changes to the bank's accounting policies and does not have a significant impact on the amounts reported in the current period or the previous period.

Tingkat Kesehatan Bank
Bank Health Level

Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kondisiBank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk based Bank Rating*. Pada posisi Desember 2024, peringkat tingkat kesehatan Bank Aladin Syariah yang dinilai secara *self assessment*, mencapai Peringkat Komposit 2 (PK-2). Hal tersebut mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan Good Corporate Governance, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

The Bank's Health Level is based on an assessment of the Bank's condition and is carried out based on risks including risks related to sharia principles and the Bank's performance, and is referred to as a Risk-based Bank Rating. As of December 2024, the health rating of Bank Aladin Syariah, assessed through self-assessment, achieved a Composite Rating of 2 (PK-2). This reflects the bank's generally healthy condition, indicating it is capable of facing significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors. This is reflected in the assessment of factors such as risk profile, implementation of Good Corporate Governance, profitability, and capitalization, which are generally strong. If there are any weaknesses, they are generally not significant

Prospek Usaha Dan Strategi Ke Depan

Business Prospects and Future Strategy

Pertumbuhan perekonomian sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan ekonomi Indonesia masih mengalami pertumbuhan 5,03% (yoy) di tahun 2024. Pertumbuhan terjadi di berbagai jenis lapangan usaha, termasuk pada industri Perbankan. Peningkatan peran intermediasi perbankan terus berlanjut ampai dengan akhir Desember 2024. Pada Desember 2024, OJK mencatat pertumbuhan kredit mencapai sebesar 10,39% (yoy) dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 13,62% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2024 meningkat sebesar 4,48% (yoy) dengan kontribusi terbesar dari Deposito yang tumbuh sebesar 3,5% (yoy). Begitupun industri perbankan syariah beserta unit usaha syariah menunjukkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,92% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 12,84% (yoy). Likuiditas industri perbankan pada Desember 2024 dalam level yang memadai dengan risiko kredit serta kualitas kredit yang terjaga dengan rasio Alat Likuid/DPK (AL/DPK) berada pada 25,59%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) net perbankan sebesar 0,75% dan NPL gross sebesar 2,2%. Memasuki tahun 2025, perekonomian nasional diprediksikan akan terus tumbuh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,7-5,5% (yoy). Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, peran intermediasi perbankan pun diprediksi akan terus menguat dengan pertumbuhan kredit diprakirakan di level 9-11% (yoy). Adapun industri perbankan syariah beserta unit usaha syariah tercatat membukukan total aset sebesar Rp980,3 triliun per Desember 2024, dengan total pembiayaan sebesar Rp 643,55 triliun atau tumbuh 9,92% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut ditopang oleh pertumbuhan DPK perbankan syariah yang mencapai Rp753,6 triliun atau tumbuh sekitar 10% (yoy).

Economic growth slowed slightly compared to the previous year, with Indonesia's economy still experiencing a growth of 5.03% (yoy) in 2024. Growth occurred in various sectors, including the banking industry. The role of banking intermediation continued to strengthen until the end of December 2024. In December 2024, OJK recorded credit growth of 10.39% (yoy), with the highest growth in investment credit at 13.62% (yoy). On the other hand, the growth of Third Party Funds (DPK) in December 2024 increased by 4.48% (yoy), with the largest contribution from Deposits, which grew by 3.5% (yoy). Similarly, the sharia banking industry and sharia business units recorded a financing growth of 9.92% (yoy) and a DPK growth of 12.84% (yoy). Liquidity in the banking industry as of December 2024 remained at adequate levels, with credit risk and credit quality maintained, as evidenced by the Liquid Assets/DPK ratio (AL/DPK) standing at 25.59%. Meanwhile, credit quality remained stable, with the net Non-Performing Loan (NPL) ratio at 0.75% and the gross NPL ratio at 2.2%. Entering 2025, the national economy is expected to continue growing. Bank Indonesia predicts economic growth to be in the range of 4.7-5.5% (yoy). In this context, Bank Indonesia will continue optimizing its policy mix to maintain stability and support sustainable economic growth. In line with national economic growth, the role of banking intermediation is also expected to continue strengthening, with credit growth projected to be between 9-11% (yoy). The sharia banking industry and sharia business units recorded total assets of Rp980.3 trillion as of December 2024, with total financing of Rp643.55 trillion, growing 9.92% (yoy). The growth of Sharia banking assets was supported by the growth of DPK in Sharia banking, which reached Rp753.6 trillion, growing by about 10% (yoy).

Setelah mencatat pertumbuhan bisnis yang baik di tahun 2024, Bank Aladin Syariah tetap optimis bahwa di tahun 2025 perkembangan bisnis Bank akan terus berlanjut. Hal ini mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan internal Bank yang meliputi kesiapan infrastruktur dan kelengkapan produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank. Di tahun 2025, Bank akan mengedepankan pertumbuhan berbasis kerja sama kemitraan, dengan memperdalam kerja sama dengan mitra yang telah ada. Untuk mendukung terjalinnya kerja sama ini, Bank akan terus menyempurnakan produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Penyempurnaan ini tentunya meliputi inovasi berkelanjutan pada aplikasi mobile banking Bank yang sampai dengan akhir Desember 2024 telah diunduh oleh lebih dari 9,3 juta nasabah dan digunakan oleh lebih dari 3,4 juta pengguna. Dalam melakukan pengembangan bisnis, tentunya Bank akan senantiasa memastikan penerapan manajemen risiko yang baik dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bank Menutup tahun 2024 dengan mencatatkan kelanjutan pertumbuhan kinerja yang positif dimana total pembiayaan tumbuh sebesar 53% dibandingkan dengan posisi Desember 2023 . Di samping itu, DPK Bank Aladin Syariah pun juga mengalami pertumbuhan sebesar 66% bila dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Pertumbuhan DPK ini didorong oleh pertumbuhan dana yang dihimpun baik dari nasabah ritel maupun non ritel.

After recording strong business growth in 2024, Bank Aladin Syariah remains optimistic that business development will continue in 2025. This optimism considers the potential for economic growth and internal developments at the Bank, including infrastructure readiness and the completeness of products and services offered by the Bank. In 2025, the Bank will prioritize growth based on partnerships, strengthening cooperation with existing partners. To support these partnerships, the Bank will continue to refine the products and services offered to customers. This refinement will certainly include continuous innovation in the Bank's mobile banking application, which, by the end of December 2024, had been downloaded by more than 9.3 million customers and used by more than 3.4 million users. In developing its business, the Bank will always ensure the implementation of good risk management and prioritize prudence. The Bank closed 2024 by recording continued positive performance growth, with total financing increasing by 53% compared to the position in December 2023. Additionally, Bank Aladin Syariah's DPK also experienced growth of 66% compared to the position in December 2023. This growth in DPK was driven by the increase in funds collected from both retail and non-retail customers.

Aladin Bank Syariah
Masa Depan



05

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

Bank Aladin Syariah mencatatkan pencapaian penting dengan meraih sertifikasi ISO 27001 dari CBQA Global atas sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Pencapaian ini mempertegas komitmen Bank dalam memperkuat pengelolaan dan pengembangan SDI—sebagai aset utama—guna mendorong inisiatif strategis dan menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah.
Bank Aladin Syariah recorded an important achievement by obtaining ISO 27001 certification from CBQA Global for its information security management system (ISMS). This achievement emphasizes the Bank's commitment to strengthening the management and development of HC—as a key asset—to drive strategic initiatives and provide the best service to customers.

Tata Kelola Sumber Daya Insani

Human Capital Governance



KOMITMEN SERTA KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI

Ditengah tantangan yang semakin dinamis pada industri perbankan, khususnya bank digital syariah ditambah tuntutan akselerasi digital yang kian mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja menuntut Bank Aladin Syariah untuk senantiasa melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) yang adaptif dan efektif yang berdampak tidak hanya pada produktivitas pekerja dan profitabilitas, namun juga *sustainability* Bank.

Bank Aladin Syariah tetap berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani yang kuat dan berkelanjutan serta mengembangkan talenta yang kompeten dan berkualitas tinggi yang mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis. Bank Aladin Syariah terus mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan Sumber

COMMITMENT AND POLICY FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Amidst the increasingly dynamic challenges in the banking industry, especially digital sharia banks, coupled with the demands for increasingly digital acceleration driven by changes in public expectations for fast, efficient and safe financial services that can be done from anywhere, Bank Aladin Syariah is required to continuously manage and develop adaptive and effective Human Capital (HC) that have an impact not only on employee productivity and profitability, but also on the Bank's sustainability.

Bank Aladin Syariah remains committed to ensuring the management and development of strong and sustainable Human Capital and developing competent and high-quality talents who are able to adapt to every change in the business environment. Bank Aladin Syariah continuously develops and improves various aspects and functions to meet the needs of competent and quality Human Capital as expected. This

Daya Insani yang kompeten dan berkualitas seperti yang diharapkan. Hal ini selain untuk menjawab tantangan industri perbankan juga untuk mewujudkan visi Menjadi Bank Syariah Digital terdepan.

Pelaku industri perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki karakteristik khusus, yakni wajib menjaga kepercayaan nasabah yang mana tingkat kepercayaan dan reputasi Bank diukur dari kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini Bank Aladin Syariah menjadikan kepercayaan nasabah sebagai prinsip yang fundamental dan senantiasa mendorong seluruh SDI berkomitmen untuk menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkup Bank Aladin Syariah, dengan tujuan menjaga kepercayaan nasabah terhadap Bank Aladin Syariah dalam hal pengelolaan keuangan dan layanan berdasarkan syariat Islam.

Ketersedian talenta perbankan yang andal merupakan tantangan yang dihadapi industri perbankan di Tanah Air. Mengembangkan SDI dan mempertahankan talenta terbaik secara berkesinambungan merupakan keharusan dan telah menjadi salah satu agenda strategis Bank Aladin Syariah. Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah melanjutkan upaya pembentukan SDI yang kompeten, berintegritas tinggi, serta menjunjung sikap dan perilaku yang luhur melalui 2 (dua) pendekatan, yakni meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal; dan mengikutsertakan pegawai dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan. Hal ini selaras dengan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PENGELOLA SDI BANK ALADIN SYARIAH

Struktur organisasi yang kuat dan solid perlu didukung oleh pengelolaan *Human Capital* yang baik serta diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Aladin Syariah telah memiliki organisasi pengelolaan *Human Capital* yang berada di bawah Direktur Kepatuhan. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkup Bank Aladin Syariah, dilaksanakan oleh Direktorat *Human Capital* sesuai Kebijakan Sumber Daya Manusia No. KB-O/010/2021/PRESDIR pada 25 November 2021 dimana Direktorat Human Capital memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait SDI.

Jumlah pegawai Direktorat *Human Capital* per 31 Desember 2024 berjumlah 10. Adapun tugas dan tanggung jawab *Human Capital Division* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan SDI, adalah sebagai berikut:

1. Menyadari dan melakukan kebutuhan rekrutmen saat ini dan yang mendatang;
2. Memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Mendapatkan dan mempertahankan pegawai berpotensi;
4. Mengelola kompensasi dan *benefit* pegawai;

is not only to answer the challenges of the banking industry but also to realize the vision of Becoming a Leading Digital Sharia Bank.

In carrying out their business activities, banking industry players have special characteristics, namely they are required to maintain customer trust where the level of trust and reputation of the Bank is measured by the quality of human capital. In this case, Bank Aladin Syariah makes customer trust a fundamental principle and always encourages all employees to commit to maintaining attitudes and behaviors in accordance with applicable principles and standards both within and outside the scope of Bank Aladin Syariah, with the aim of maintaining customer trust in Bank Aladin Syariah in terms of financial management and services based on Islamic law.

The availability of reliable banking talents is a challenge faced by the banking industry in the country. Developing HC and sustainably retaining the best talents is a must and has become one of Bank Aladin Syariah's strategic agenda. In 2024, Bank Aladin Syariah continued its efforts to form HC that is competent, has high integrity, and upholds noble attitudes and behaviors through 2 (two) approaches, namely increasing togetherness from all members of the organization and teamwork ethic for the purpose of achieving business results and maximum profits; and involving employees in seminars and education and training. This is in line with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT OF BANK ALADIN SYARIAH

A strong and solid organizational structure needs to be supported by good Human Capital management and filled by competent people in their fields. To support this, Bank Aladin Syariah has a Human Capital management organization that is under the Compliance Director. Management and development of human Capital within Bank Aladin Syariah is carried out by the Human Capital Directorate in accordance with Human Capital Policy No. KB-O/010/2021/PRESDIR on November 25, 2021 where the Human Capital Directorate has the authority to determine policies related to Human Capitals.

The number of employees in the Human Capital Directorate as of December 31, 2024 was 10. The duties and responsibilities of the Human Capital Division in managing and developing Human Capital are as follows:

1. Recognizing and implementing current and future recruitment needs;
2. Ensuring compliance with applicable employment laws;
3. Acquiring and retaining potential employees;
4. Managing employee compensation and benefits;

5. Memastikan efektivitas hubungan pegawai;
6. Mengelola *onboarding*, pelatihan, *learning and development* untuk memaksimalkan performa kerja;
7. Menerapkan tindakan yang mendukung kesehatan dan keselamatan;
8. Mengelola tugas administrasi seperti data pegawai, *payroll*, hingga perpajakan;
9. Menyelenggarakan evaluasi performa;
10. Memastikan data karyawan yang tersimpan di Bank Aladin Syariah, akurat dan paling *update*.

PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2024

Sebagai aset penting, Bank Aladin Syariah mempunyai komitmen untuk mengembangan SDI dalam upaya mendukung implementasi inisiatif strategis secara efektif, sekaligus untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah. Untuk itu, Bank Aladin Syariah telah menetapkan program strategis pengelolaan dan pengembangan SDI di tahun 2024. Program tersebut berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Pada tahun 2024, Bank telah menjalankan program pelatihan sebagai berikut:
   a. Mandatory Training: Training yang diharuskan oleh regulator dan wajib diambil sesuai dengan job rolenya.
   b. Non Mandatory Training: Training yang diajukan oleh karyawan dan masih berhubungan dengan pekerjaan agar karyawan dapat memperbaharui kemampuan mereka sesuai dengan trend saat ini.
   c. Personal Development Training: Training yang diberikan oleh Bank untuk pengembangan diri secara personal.
   d. Internal Division Training: Training yang diinisiasi oleh divisi masing-masing untuk pengembangan divisi dalam berbentuk soft skill training, maupun technical skill training, yang berhubungan dengan pekerjaan maupun tidak berhubungan dengan pekerjaan.
2. Bank juga terus melakukan proses rekrutmen untuk memenuhi karyawan di setiap level.
3. Dalam rangka proses internalisasi budaya perusahaan yaitu Bantu, Bangun, Tumbuh (BABAT) Bank merencanakan dan melaksanakan beberapa program antara lain peluncuran logo BABAT serta karakteristik perilaku yang mencerminkan BABAT, serta meningkatkan kesadaran terkait budaya perusahaan.

MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI

Bank Aladin Syariah senantiasa berupaya untuk mengelola Sumber Daya Insani yang dimiliki secara terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai tujuan dan arah bank yang telah ditetapkan Manajemen. Dalam pelaksanaannya, Bank Aladin Syariah menerapkan Program Pengelolaan dan Pengembangan SDI sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan Bank berdasarkan nasihat Direksi dan bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja Bank.

5. Ensuring the effectiveness of employee relations;
6. Managing onboarding, training, learning and development to maximize work performance;
7. Implementing actions that support health and safety;
8. Managing administrative tasks such as employee data, payroll, and taxation;
9. Conducting performance evaluations;
10. Ensuring employee data stored at Bank Aladin Syariah is accurate and up-to-date.

STRATEGIC PROGRAM 2024

As an important asset, Bank Aladin Syariah is committed to developing HC in an effort to support the implementation of strategic initiatives effectively, as well as to provide the best service to all customers. For this reason, Bank Aladin Syariah has established a strategic program for HR management and development in 2024. The program is based on the Bank's Business Plan (RBB) for 2024, including:

1. In 2024, the Bank carried out the following training programs:
   a. Mandatory Training: Training required by regulators and must be taken according to the job role.
   b. Non-Mandatory Training: Training proposed by employees and still related to work so that employees can update their skills according to current trends.
   c. Personal Development Training: Training provided by the Bank for personal self-development.
   d. Internal Division Training: Training initiated by each division for division development in the form of soft skill training, or technical skill training, which is related to work or not related to work.
2. The Bank also continuously conducted recruitment processes to meet employees at every level.
3. In the framework of the internalization process of the Company's culture, namely Help, Build, Grow or Bantu, Bangun, Tumbuh (BABAT), the Bank planed and implemented several programs including the launch of the BABAT logo and behavioral characteristics reflecting BABAT, as well as increasing awareness of corporate culture.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Bank Aladin Syariah always strives to manage its Human Capital in an integrated and sustainable manner with a view to achieving the Bank's goals and directives determined by the Management. In its implementation, Bank Aladin Syariah carries out the Human Capital Management and Development Program in line with the Bank's development and needs based on the advice of the Board of Directors and aims to continuously improve the Bank's performance.

MANPOWER PLANNING

Manpower Planning yang dilakukan Bank Aladin Syariah merupakan proses berkelanjutan terkait perencanaan sistematis untuk mengoptimalkan Sumber Daya Insani. Dalam perencanaan SDI, Bank Aladin Syariah tidak hanya untuk jangka pendek melainkan untuk jangka panjang dan berulang. Bank Aladin Syariah senantiasa melakukan *monitoring* untuk menjaga pemenuhan kebutuhan SDI tetap dalam koridor kebutuhan bisnis di lingkup Bank.

MANPOWER PLANNING

Manpower Planning conducted by Bank Aladin Syariah is a continuous process related to systematic planning to optimize Human Capital. Bank Aladin Syariah not only makes HC planning for the short term but also for the long term and repeatedly. Bank Aladin Syariah always monitors to ensure that HC needs are met within the corridor of business needs within the Bank's scope.

***Manpower Planning* Bank Aladin Syariah Tahun 2024**
Manpower Planning of Bank Aladin Syariah in 2024

Direktorat **Directorate**	**Jumlah (orang)** Total Number (persons)
Commissioner	3
Compliance	44
Digital and Product	69
Financing	20
Information and Technology	108
Operations	69
President Directorate	50
Total	**358**

REKRUTMEN

Direktorat *Human Capital* secara konsisten melakukan proses rekrutmen dalam rangka pemenuhan SDI yang kompeten, berintegritas, profesional dan unggul, sesuai dengan kebutuhan dalam proses transformasi. Dalam memperoleh SDI yang sesuai kebutuhan, Direktorat *Human Capital* menjalankan program rekrutmen yang baik dan profesional. Bank Aladin Syariah memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh calon pegawai untuk mengikuti proses rekrutmen, selama memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi dan posisi yang dibutuhkan guna mendukung keberlangsungan operasional Bank.

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah melakukan perekrutan sebanyak 65 orang. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2023 yang berjumlah 84 orang. Sementara itu, jumlah keseluruhan pegawai Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2024, adalah mencapai 290 orang, mengalami penurunan sebesar 0.34% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 291 orang.

Dalam proses rekrutmen, Bank Aladin Syariah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dimana, Bank tidak membedakan calon pegawai berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan jenis kelamin. Bank Aladin Syariah mempertimbangkan calon pegawai berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

RECRUITMENT

The Human Capital Directorate consistently carries out the recruitment process in order to fulfill competent, integrated, professional and superior human capital, in accordance with the needs in the transformation process. In obtaining human capital that meet the needs, the Human Capital Directorate runs a good and professional recruitment program. Bank Aladin Syariah provides ample opportunities for all prospective employees to take part in the recruitment process, as long as they meet the administrative, competency and position requirements needed to support the sustainability of the Bank's operations.

In 2024, Bank Aladin Syariah has recruited 65 persons. This number decreased compared to 2023 of 84 persons. Meanwhile, the total number of Bank Aladin Syariah employees as of December 31, 2024, reached 290 employees, a decrease of 0.34% compared to the previous year's total employees of 291 employees.

In the recruitment process, Bank Aladin Syariah always upholds the values of Human Rights. The Bank does not differentiate prospective employees based on Tribe, Religion, Race and Inter-Group (SARA) and gender. Bank Aladin Syariah considers prospective employees based on their abilities and competencies.

Adapun pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal yang dilakukan dengan jalur atau program, di antaranya:

1. *Online recruitment platform*;
2. *Employee Referral Program*;
3. *Executive Search/HeadHunter*;
4. *Career Website* di Bank Aladin Syariah *website*.

PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Sebagai upaya dalam mempersiapkan Insan SDI Bank Aladin Syariah yang berkualitas sekaligus demi meningkatkan produktivitas SDI, Bank Aladin Syariah senantiasa mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal.

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dalam hal peningkatan *Skill* Pekerja. Pengembangan kompetensi juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Bank tanpa memandang level jabatan maupun gender dari Pegawai.

Sepanjang tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah mengeluarkan investasi anggaran sebesar untuk program pendidikan atau pelatihan sebesar Rp3.714.275.99,- dengan rincian sebagai berikut:

The fulfillment of employee needs is carried out through internal and external sources which are carried out through channels or programs, including:

1. Online recruitment platform;
2. Employee Referral Program;
3. Executive Search/HeadHunter;
4. Career Website at Bank Aladin Syariah website.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT AND POLICY PROGRAM

In an effort to prepare qualified Bank Aladin Syariah HC, as well as to increase HC productivity, Bank Aladin Syariah involves its employees in internal and external education and training.

Bank Aladin Syariah is committed to providing competency development to all employees in terms of improving employee skills. Competency development will also have a positive impact on Bank Aladin Syariah's business growth. Bank Aladin Syariah provides equal opportunities for all employees to take part in competency development programs held by the Bank regardless of the employee's position level or gender.

In 2024, Bank Aladin Syariah's budget investment for the education or training programs was Rp3,714,275.99 with the following details:

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training - CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor	Karyawan Employee	1	08 - 12 Januari 2024 January 8-12, 2024	PT BSI Group Indonesia	13,431,000
Mandatory Training - ISO/IEC 27001:2022 Internal Auditor Training Course	Karyawan Employee	1	17 - 18 Januari 2024 January 17-18, 2024	PT BSI Group Indonesia	5,106,000
Personal Development Training - Firm Ganache (Hands On)	Karyawan Employee	1	09 Desember 2024 December 9, 2024	Kleyo Sugarpaste	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	01 Desember 2024 December 1, 2024	Archilles Fitness Club	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	09 Januari 2024 January 9	FTL Gym	1,000,000
Personal Development Training - ELSA Pro	Karyawan Employee	1	23 Oktober 2024	Elsa Company Limited	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	28 Desember 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000
Non Mandatory Training - Presentation Skill (Logistik)	Karyawan Employee	12	23 Januari 2024 January 23, 2024	Hotel Sahid Jaya International	9,750,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training - Basic Sharia Banking (Batch 14)	PE dan Karyawan PE and Employees	12	10 - 11 Januari 2024 January 10-11, 2024	Yayasan Muamalat Institute	9,000,000
Non Mandatory Training - Additional 1 Person for Presentation Skill	Karyawan Employee	1	23 Januari 2024 January 23, 2024	PT Latih Wacana Reformasi	3,928,571
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	02 Januari 2024 January 2, 2024	Doogether	1,000,000
Mandatory Training - Certification in Audit Committee Practices	Dewan Komisaris Board of Commissioners (BOC)	1	23 - 25 dan 29 Januari 2024 January 23-25 and 29, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia	9,183,673
Non Mandatory Training - Financial Risk Manager Level 1	Karyawan Employee	1	6 Februari - 18 April 2024 February 6 – April 18, 2024	Binus Executive Dev Program	7,225,000
Non Mandatory Training - APU-PPT & PPPSPM Non Mandatory Training - AML-CFT & PPPSPM	Karyawan Employee	1	02 - 03 Februari 2024 February 2-3, 2024	PT Genesis Inti Utama	6,500,000
Non Mandatory Training - Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI Non Mandatory Training - Basics of Muamalah Maliyah and DSN-MUI Fatwa	Karyawan Employee	1	08 - 16 Februari 2024 February 8-16, 2024	Majelis Ulama Indonesia	3,500,000
Mandatory Training - Personal Data Protection (Logistic)	Karyawan Employee	51	29 Februari - 1 Maret 2024 February 29 – March 1, 2024	PT Hotel Sahid Jaya International	65,000,000
Personal Development Training - Filbert Gameplan 12 Editions	Karyawan Employee	1	12 Februari 2024 February 12, 2024	Filbert Ferdinand	1,000,000
Non Mandatory Training - Serial Pendidikan PROPAMI Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran (WPPE-P) Non Mandatory Training - PROPAMI Education Series for Marketing Securities Trading Intermediary Representatives (WPPE-P)	Karyawan Employee	1	26 - 28 Februari 2024 February 26-28, 2024	PROPAMI	300,000
Mandatory Training - Personal Data Protection	PE dan Karyawan PE and Employees	51	29 Februari - 1 Maret 2024 February 29 – March 1, 2024	Alta Advocates	51,020,408
Mandatory Training - Certification in Audit Committee Practices	Dewan Komisaris BOC	2	5 - 7 Maret 2024 March 5-7, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia	18,367,347
Non Mandatory Training - Certified Contact Center Manager	Karyawan Ecployees	1	5 - 7 Maret 2024 March 5-7, 2024	PT Telexindo Bizmart	12,765,000
Non Mandatory Training - Refreshment Treasury Dealer Level Advance dan Intermediate	Direktur, PR dan Karyawan Director, PR and Employees	3	8 Maret 2024 March 8, 2024	Yayasan Muamalat Institute dan IIGMA	14,000,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Provision Level 6	Karyawan Employee	1	7 Maret 2024 March 7, 2024	PT Bintang Solusi Laras	25,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	19 Februari 2024 February 19, 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000
Mandatory Training - Penerapan UU PDP di Bank Umum Mandatory Training - Implementation of PDP Law in Commercial Banks	Karyawan Employees	2	28 Maret 2024 March 28, 2024	DIGIFORBANKERS	1,000,000
Non Mandatory Training - Penilaian dan Evaluasi Proyek Non-Mandatory Training - Project Assessment and Evaluation	Karyawan Employees	15	23 - 24 April 2024 April 23-24, 2024	PT Bina Mitra Globalindo	33,744,000
Non Mandatory Training - Penilaian dan Evaluasi Proyek (Logistik) Non Mandatory Training - Project Assessment and Evaluation (Logistics)	Karyawan Employees	15	23 - 24 April 2024 April 23-24, 2024	PT Hotel Sahid Jaya International	23,400,000
Non Mandatory Training - Design System 101 (Reimbursement)	PE PR	1	04 April 2024 April 4, 2024	Design System University	917,257
Mandatory Training - PBK SPPUR SPPUR Jenjang 4 Pengelolaan Uang Tunai (Publik) Mandatory Training - PBK SPPUR SPPUR Level 4 Cash Management (Public)	Karyawan Employee	1	2 - 4 April 2024 April 2-4, 2024	Ikatan Bankir Indonesia – BCC Indonesian Bankers Association - BCC	1,100,000
Mandatory Training - Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 (Publik) Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Level 6 (Public)	Karyawan Employee	1	27 Maret 2024 March 27, 2024	PT LSP BSMR	750,000
Non Mandatory Training - Pembekalan Persiapan Ujian Klarifikasi (Fit & Proper) OJK - Calon Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk Non Mandatory Training - Preparation for the OJK Clarification Exam (Fit & Proper) - Candidate for Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk	Direktur Director	1	29 - 30 April 2024 April 29-30, 2024	PT Dakaratama Global Kreasi	22,448,980
Non Mandatory Training - The Power of Well-being	Karyawan Employee	1	29 April 2024 April 29, 2024	PT Cahaya Santosa Lestari	350,000
Non Mandatory Training - Time and Stress Management	Karyawan Employee	3	2 - 3 Mei 2024 May 2-3, 2024	CV Nisbi Indonesia	7,800,000
Personal Development Training - Online English Course	Karyawan Employee	1	25 April 2024 April 25, 2024	PT Golden Internasional Lingua	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	01 April 2024 April 1, 2024	Fitness First	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	17 April 2024 April 17, 2024	Osbond Gym	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	29 April 2024 April 29, 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Personal Development Training – Pilates	Karyawan Employee	1	1 Mei 2024 May 1, 2024	Strong Pilates	1,000,000
Personal Development Training - Sepatu Roda	Karyawan Employee	1	14 Mei 2024 May 14, 2024	Satu Sepatu Roda	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	9 Mei 2024 May 9, 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	8 Mei 2024 May 8, 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	4 Mei 2024 May 4, 2024	ClassPass	1,000,000
Mandatory Training - Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Provision Level 7	Direktur Director	1	10 Mei 2024 May 10, 2024	PT Dakaratama Global Kreasi	10,712,286
Mandatory Training - Basic Sharia Banking (Batch 15)	Karyawan Employee	14	15 - 16 Mei 2024 May 15-16, 2024	Yayasan Muamalat Institute	11,900,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	10 Mei 2024 May 10, 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	17 Mei 2024 May 17, 2024	Anytime Fitness	1,000,000
Personal Development Training - IELTS Academic	Karyawan Employee	1	21 Mei 2024 May 21, 2024	British Council	1,000,000
Non Mandatory Training - Local Due YPO Indonesia FY2024 - 2025 (July 2024 - June 2025)	Direktur Director	1	5 Juni 2024 June 5, 2024	YPO Indonesia	35,000,000
Non Mandatory Training - Workshop QA (Reimbursement)	Karyawan Employees	2	31 Mei 2024 May 31, 2024	Internal Aladin	1,132,690
Mandatory Training - Add Payment for Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Mandatory Training - Add Payment for Banking Risk Management Recertification Provision Level 7	Direktur Director	1	10 Mei 2024 May 10, 2024	PT Dakaratama Global Kreasi	2,000,000
Personal Development Training - Sekolah Mengemudi Personal Development Training - Driving School	Karyawan Employee	1	2 Juni 2024 June 2, 2024	Talenta Jaya	835,000
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	22 Mei 2024 May 22, 2024	Celebrity Fitness	1,000,000
Mandatory Training - Scan Buku Manajemen Risiko Mandatory Training - Scan Risk Management Book	Karyawan Employee	59	16 Juni 2024 June 16, 2024	Fotokopi Kompas	216,000
Mandatory Training - Pembekalan Sertifikasi & Pengkinian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5 Mandatory Training - Certification Provision & Banking Risk Management Certification Update Level 5	Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Karyawan Director, Executive Officers, and Employees	7	27 - 28 Mei 2024 May 27-28, 2024	PT Raharja Duta Solusindo	38,850,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training - Pembekalan & Ujian Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 1 Mandatory Training - Provision & Certification Exam for Banking Risk Management Level 4 Batch 1	Karyawan Employee	36	20 - 21 Mei 2024 May 20-21, 2024	Yayasan Muamalat Institute	67,750,000
Mandatory Training - Pembekalan & Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 2 Mandatory Training - Provision & Certification Exam for Banking Risk Management Level 4 Batch 2	Karyawan Employee	38	21 - 22 Mei 2024 May 21-22, 2024	Yayasan Muamalat Institute	73,150,000
Mandatory Training - Pembekalan & Ujian Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Batch 3 Mandatory Training - Provision & Certification Exam & Recertification of Banking Risk Management Level 4 Batch 3	Karyawan Employee	46	27 - 28 Mei 2024 May 27-28, 2024	Yayasan Muamalat Institute	87,850,000
Non Mandatory Training - Townhall Aladin (Logistics)	Karyawan Employee	90	26 Juni 2024 June 26, 2024	Lumpang Emas	6,602,000
Non Mandatory Training - Additional Outing Payment	Karyawan Employee	1	7 Juni 2024 June 7, 2024	PT Produta Promosindo	56,166,000
Non Mandatory Training - Refund Outing Payment	Karyawan Employee	1	7 Juni 2024 June 7, 2024	PT Produta Promosindo	934,108
Mandatory Training - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Mandatory Training - Provision of Risk Management Certification Level 7	Direksi dan Pejabat Eksekutif Directors and Executive Officers	5	19 Juni 2024 June 19, 2024	PT Raharja Duta Solusindo	44,400,000
Mandatory Training - PBK SPPUR Jenjang 4 Setelmen Transaksi Tresuri (Publik) Mandatory Training - PBK SPPUR Level 4 Treasury Transaction Settlement (Public)	Karyawan Employee	1	20 - 22 Juni 2024 June 20-22, 2024	LPK Praveena - BCC	1,417,000
Mandatory Training - Buku Manajemen Risiko Jenjang 5 - Jenjang 7 Mandatory Training - Risk Management Book Level 5 - Level 7	Karyawan Employee	1	4 Juli 2024 July 4, 2024	Banker Association for Risk Management	R980,000
Non Mandatory Training - Refreshment Anti Fraud Training (Reimbursement Logistik)	Karyawan Employee	18	6 Juni 2024 dan 3 Juli 2024 June 6, 2024 and July 3, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	250,000
Non Mandatory Training - Communication & Business Presentation (Reimbursement Logistics)	Karyawan Employee	18	20 Juni 2024 June 20, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	2,585,000
Mandatory Training - Scan Buku Manajemen Risiko Mandatory Training - Scan Risk Management Book	Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Karyawan BOC, Executive Officers, and Employee	1	12 Juli 2024 July 12, 2024	Fotokopi Kompas	606,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Personal Development Training – Fitness	Karyawan Employee	1	11 Juli 2024 July 11, 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000
Mandatory Training - Pemahaman Dasar Perbankan Syariah Mandatory Training - Basic Understanding of Sharia Banking	Pejabat Eksekutif dan Karyawan Executive Officers and Employees	7	16 Juli 2024 July 16, 2024	Muamalat Institute	5,950,000
Mandatory Training - Refreshment dan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (Publik) Mandatory Training - Refreshment and Recertification of Risk Management Level 4 (Public)	Karyawan Employee	1	22 - 23 Juni 2024 June 22-23, 2024	Muamalat Institute	3,000,000
Non Mandatory Training - Enterprise Analytic Workshop	Karyawan Employee	1	7 Agustus 2024 August 7, 2024	PT Supertype Teknologi Nusantara	1,500,000
Mandatory Training - Refreshment Retake Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (Logistik) Mandatory Training - Refreshment Retake Risk Management Certification Level 4 (Logistics)	Karyawan Employee	25	27 Juli 2024 July 27, 2024	PT Hotel Sahid Jaya International	18,850,000
Non Mandatory Training - Breakthrough Communication and Human Relation (Logistics)	Karyawan Employee	23	7 - 8 Agustus 2024 August 7-8, 2024	Wisata Triloka Buana	44,800,000
Non Mandatory Training - Breakthrough Communication and Human Relation	Karyawan Employee	23	7 - 8 Agustus 2024 August 7-8, 2024	PT Dasindo Media	77,700,000
Non Mandatory Training - Tax Training House Bimbel USKP A	Karyawan Employee	1	17,18, 24 dan 25 Agustus 2024 August 17, 18, 24 and 25, 2024	PT Cipta Bina Parama	2,553,000
Non Mandatory Training - Townhall Aladin (Logistik) Non Mandatory Training - Aladin Townhall (Logistics)	Karyawan Employee	285	6 Agustus 2024 August 6, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	5,940,000
Mandatory Training - Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 (Logistik) Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Exam Level 7 (Logistics)	Dewan Komisaris BOC	1	6 Agustus 2024 August 6, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	588,800
Non Mandatory Training - Workshop Aladin Vol.3	Karyawan Employees	290	23 Agustus 2024 August 23, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	111,466,826
Non Mandatory Training - Refreshment Anti Fraud Training (Reimbursement Logistics)	Karyawan Employees	10	1 Agustus 2024 August 1, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	215,000
Mandatory Training - CAFM Certification & CAFM Examination	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	26-28 Agustus 2024 August 26-28, 2024	PT Asia Anti Fraud Manajemen	14,950,000
Mandatory Training - Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Exam Level 7	Direktur Director	1	6 Juli 2024 July 6, 2024	LSP Keuangan Syariah	2,040,816

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training - Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Exam Level 7	Dewan Komisaris BOC	1	19 Juni 2024 June 19, 2024	LSP Keuangan Syariah	2,091,837
Personal Development - Fitness	Karyawan Employee	1	14 Maret 2024 March 14, 2024	FIT HUB Indonesia	1,000,000
Personal Development - Pilates	Karyawan Employee	1	15 Agustus 2024 August 15, 2024	The Body Project Sampoerna	1,000,000
Personal Development - Pilates	Karyawan Employee	1	15 Agustus 2024 August 15, 2024	T he Body Project Sampoerna	1,000,000
Personal Development - Pilates	Karyawan Employee	1	15 Agustus 2024 August 15, 2024	The Body Project Sampoerna	1,000,000
Personal Development - Fitness	Karyawan Employee	1	12 Agustus 2024 August 12, 2024	Urban Fitness	850,000
Personal Development - Pilates	Karyawan Employee	1	15 Agustus 2024 August 15, 2024	The Body Project Sampoerna	1,000,000
Non Mandatory Training - Coffee Session with Our CEO		290	26, 27 dan 30 September 2024 September 26, 27 and 30, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	13,635,000
Mandatory Training - Program Penyelarasan Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Mandatory Training - Banking Risk Management Alignment Program Level 7	Direktur dan Pejabat Eksekutif Directors and Executive Officers	4	13 - 14 Agustus 2024 August 13-14, 2024	Indonesia Risk Professional Association	50,000,000
Mandatory Training - Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Mandatory Training - Banking Risk Management Alignment Seminar Level 7	Dewan Komisaris BOC	1	7, 8, 9 Agustus 2024 August 7, 8, 9, 2024	Banker Association for Risk Management	9,693,877
Mandatory Training - Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Mandatory Training - Banking Risk Management Certification Exam Level 4	Karyawan Employees	24	17 - 18 Juli 2024 July 17-18, 2024	LSP Keuangan Syariah	31,632,653
Non Mandatory Training - Audit Aspek Syariah atas Pembiayaan (Logistik) Non Mandatory Training - Audit of Sharia Aspects of Financing (Logistics)	Pejabat Eksekutif dan Karyawan Executive Officers and Employees	5	29 Agustus 2024 August 29, 2024	PT Hotel Sahid Jaya International	5,850,000
Non Mandatory Training - Recovery Plan and Resolution Plan (Logistics)	Pejabat Eksekutif dan Karyawan Executive Officers and Employees	30	2 - 3 September 2024 September 2-23, 2024	PT Hotel Sahid Jaya International	45,500,000
Mandatory Training - Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 (Logistik) Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Exam Level 7 (Logistics)	Direktur dan Pejabat Eksekutif Directors and Executive Officers	4	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	602,400

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training - Pembekalan Sertifikasi Tresuri Jenjang 5 Mandatory Training - Treasury Certification Provision Level 5	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	31 Agustus - 1 September 2024 August 31 – September 1, 2024	APUVINDO	2,000,000
Mandatory Training - Pembekalan Sertifikasi Tresuri Jenjang 7 Mandatory Training - Treasury Certification Provision Level 7	Direktur Director	1	24 Agustus 2024 August 24, 2024	APUVINDO	5,500,000
Mandatory Training - Pembekalan Audit Intern Bank Level Auditor Mandatory Training - Bank Internal Audit Provision for Auditor Level	Karyawan Employee	1	20 - 21 Agustus 2024 August 20-21, 2024	Ikatan Auditor Inten Bank	2,500,000
Non Mandatory Training - Recovery Plan and Resolution Plan	Pejabat Eksekutif dan Karyawan Executive Officers and Employees	30	2 - 3 September 2024 September 2-3, 2024	PT Rintisan Manajemen Gagas	49,700,000
Non Mandatory Training - Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Non Mandatory Training - Workshop on Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Year 2024	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	2	11 September 2024 September 11, 2024	Dewan Syariah Nasional MUI	4,000,000
Mandatory Training - Refreshment dan Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 Mandatory Training - Refreshment and Recertification Exam for Banking Risk Management Level 6	Komite dan Pejabat Eksekutif Committee and Executive Officers	2	21 Agustus 2024 August 21, 2024	JMS Education	12,244,898
Mandatory Training - Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Mandatory Training - Provision and Exam for Banking Risk Management Certification Level 4	Karyawan Employees	11	30 - 31 Juli 2024 July 30-31, 2024	JMS Education	37,244,898
Mandatory Training - Refreshment dan Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Mandatory Training - Refreshment and Recertification Exam for Banking Risk Management Level 4	Pejabat Eksekutif dan Karyawan Executive Officers and Employees	13	30 Juli 2024 July 30, 2024	JMS Education	36,479,592
Mandatory Training - Refreshment dan Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5 Mandatory Training - Refreshment and Recertification Exam for Banking Risk Management Level 5	Pejabat Eksekutif dan Karyawan Executive Officers and Employees	11	1 - 2 Agustus 2024 August 1-2, 2024	JMS Education	34,948,980
Mandatory Training - Perpanjangan Sertifikat Treasury Dealer Mandatory Training - Treasury Dealer Certificate Extension	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	3 September 2024 September 3, 2024	ACI Financial Market Association Indonesia	800,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training - Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Mandatory Training - Banking Risk Management Recertification Exam Level 7	Direktur dan Pejabat Eksekutif Directors and Executive Officers	4	30 Agustus 2024 August 30, 2024	LSP Keuangan Syariah	6,122,449
Non Mandatory Training - Audit Aspek Syariah atas Pembiayaan Non Mandatory Training - Audit of Sharia Aspects of Financing	Pejabat Eksekutif dan Karyawan Executive Officers and Employees	5	29 Agustus 2024 August 29, 2024	Muamalat Institute	14,500,000
Personal Development - Pilates	Karyawan Employee	1	30 Agustus 2024 August 30, 2024	The Body Project Sampoerna	1,000,000
Personal Development - Pilates	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	15 Agustus 2024 August 15, 2024	The Body Project Sampoerna	1,000,000
Mandatory Training - CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor	Karyawan Employee	1	09 - 13 September 2024 September 9-13, 2024	PT BSI Group Indonesia	13,431,000
Non Mandatory Training - Refreshment of Anti Fraud Training (Reimbursement Logistics)	Karyawan Employees	13	10 September 2024 Seotember 10, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	235,000
Personal Development - Fitness	Karyawan Employee	1	14 September 2024 September 14, 2024	Awesomegym	1,000,000
Mandatory Training-Basic Sharia Banking Batch October 2024	Karyawan Employees	17	16 Oktober 2024 October 16, 2024	Muamalat Institute	12,750,000
Mandatory Training-Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko J5 Batch Desember 2024 Mandatory Training-Risk Management Provision and Certification J5 Batch December 2024	Dewan Komisaris BOC	1	13 Desember 2024 December 13, 2024	Muamalat Institute	27,000,000
Mandatory Training-Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko J7 Batch Desember 2024 Mandatory Training-Risk Management Provision and Certification J7 Batch December 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Muamalat Institute	40,500,000
Mandatory Training-Pembekalan Manajemen Risiko J7 Batch Desember 2024 – Logistik Mandatory Training-Risk Management Briefing J7 Batch December 2024 – Logistics	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	1,052,715
Mandatory Training-Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko J4 Batch Agustus 2024 Mandatory Training-Provision of Risk Management Certification J4 Batch August 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officer	4	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Muamalat Institute	26,000,000
Mandatory Training-Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko J4 Batch Desember 2024 Mandatory Training-Provision of Risk Management Certification J4 Batch December 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	3 Desember 2024 December 3, 2024	Muamalat Institute	3,000,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Mandatory Training-Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko J5 Batch Desember 2024 Mandatory Training-Provision of Risk Management Certification J5 Batch December 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officers	24	19-20 November 2024 Novembe 19-20, 2024	Muamalat Institute	69,600,000
Mandatory Training-Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko J6 Batch Agustus 2024 Mandatory Training-Risk Management Alignment Seminar J6 Batch August 2024	Dewan Komisaris BOC	2	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Banker Association for Risk Management	22,448,979
Mandatory Training-Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko J6 Batch November 2024 Mandatory Training-Risk Management Recertification Exam J6 Batch November 2024	Dewan Komisaris BOC	1	4 November 2024 November 4, 2024	LSP Keuangan Syariah	2,040,816
Mandatory Training-Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko J6 Batch September 2024 Mandatory Training-Risk Management Recertification Exam J6 Batch September 2024	Dewan Komisaris BOC	1	12 September 2024 September 12, 2024	LSP Keuangan Syariah	2,040,816
Mandatory Training-Ujian Sertifikasi J4 DPS – Logistik Mandatory Training-J4 Certification Exam for DPS-Logistic	Pejabat Eksekutif Executive Officers	2	11 Oktober 2024 October 11, 2024	LSP Keuangan Syariah	474,000
Mandatory Training-Ujian Sertifikasi J4 Sholahudin Al Aiyub – Logistik Mandatory Training-J4 Certification Exam for Sholahudin Al Aiyub – Logistics	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	11 Oktober 2024 October 11, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	219,000
Mandatory Training-Ujian Sertifikasi J6 Andreas Soesanto – Logistik Mandatory Training-Certification Exam J6 for Andreas Soesanto – Logistics	Pejabat Eksekutif Executive Officers	2	11 Oktober 2024 October 11, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	226,929
Mandatory Training-Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko J4 & J6 Batch Oktober 2024 Mandatory Training-Risk Management Certification Exam J4 & J6 Batch October 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officers	4	11 Oktober 2024 October 11, 2024	LSP Keuangan Syariah	6,122,449
Mandatory Training-Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko J4 DPS Batch September 2024 Mandatory Training-J4 DPS Risk Management Certification Exam Batch September 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officers	2	30 September 2024 September 30, 2024	LSP Keuangan Syariah	8,163,265
Non Mandatory Training-Aladin Workshop Vol 4 ; Aladin MemBABAT – Logistik	Karyawan Employees	300	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	1,471,398,248
Non Mandatory Training-ATM Bersama : Members Meeting & Awarding Night ATM Bersama 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officer	2	15-17 Oktober 2024 October 15-17, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	5,975,010

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Non Mandatory Training-Bank Indonesia : Undangan Forum Koordinasi Strategi Koordinasi Pemenuhan Uang Rupiah di Masyarakat dan Sosialisasi Penggunaan Bisilk Gen 2 Non Mandatory Training-Bank Indonesia: Invitation to the Strategy Coordination Forum for the Fulfillment of Rupiah Currency in the Community and Socialization of the Use of Bisilk Gen 2	Karyawan Employee	1	1-3 November 2024 November 1-3, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	1,344,400
Non Mandatory Training-Bank Indonesia : Undangan Pertemuan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) 2024 Non Mandatory Training-Bank Indonesia: Invitation to the 2024 National Blacklist Management Office (KPDHN) Meeting	Karyawan Employee	1	26 Oktober 2024 October 26, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	3,870,724
Non Mandatory Training-BPKH Hajj Run 2024 – Logistics	Karyawan Employee	2	2-3 November 2024 November 2-3, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	8,288,703
Non Mandatory Training-Climate Risk Management System Training	Karyawan Employees	30	29 November 2024 November 29, 2024	Tri Hita Karana Consultant	220,347,000
Non Mandatory Training-Corporate Culture Training : The Catalyst Effect	Karyawan Employees	30	5 November 2024 November 5, 2024	PT Dasindo Media	42,180,000
Non Mandatory Training-Disaster Recovery Planning November 2024	Karyawan Employee	1	3 November 2024 November 3, 2024	Andalan Teknologi Solusi	7,215,000
Non Mandatory Training-Idecision and Credit Scoring Development – Logistics	Karyawan Employees	10	2 Oktober 2024 October 2, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	851,383
Non Mandatory Training-Internal Training Divisions Dec 2024	Karyawan Employees	300	30 Desember 2024 December 30, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	98,000,000
Non Mandatory Training-Lead Auditor Training Course	Karyawan Employee	1	18-22 November 2024 November 18-22, 2024	Andalan Teknologi Solusi	13,431,000
Non Mandatory Training-Lembaga Penjamin Keuangan (LPS) : Undangan Workshop Pelaporan SCV LPS kepada Bank Umum 21 November 2024 Non Mandatory Training-Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC): Invitation to IDIC's SCV Reporting Workshop to Commercial Banks 21 November 2024	Karyawan Employees	2	15-17 November 2024 November 15-17, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	8,904,690
Non Mandatory Training-Modern IT Asset Management	Karyawan Employee	1	5 November 2024 November 5, 2024	Andalan Teknologi Solusi	5,550,000
Non Mandatory Training-Monthly Alignment October – Logistics	Pejabat Eksekutif Executive Officers	45	5 Oktober 2024 October 5, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	3,094,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Non Mandatory Training-Otoritas Jasa Keuangan : International Research Forum 18 November 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officer	1	17-18 November 2024 November 17-18, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	5,131,893
Non Mandatory Training-Otoritas Jasa Keuangan : Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri Non Mandatory Training-Financial Services Authority: 2024 Annual Meeting of Islamic Banking Accelerating the Development of Islamic Banking to Build the Country	Direksi Board of Directors (BOD)	4	24-26 Oktober 2024 October 24-26, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	18,668,501
Non Mandatory Training-Pemahaman Konsep dan Implementasi Bagi Hasil Training Non Mandatory Training-Understanding the Concept and Implementation of Profit Sharing Training	Karyawan Employees	3	23-24 Desember 2024 December 23-24, 2024	Muamalat Institute	17,000,000
Non Mandatory Training-Pembekalan Fit n Proper Test - Desember 2024 Non Mandatory Training-Fit n Proper Test Provision - December 2024	Pejabat Eksekutif Executive Officers	2	23 Desember 2024 December 23, 2024	Muamalat Institute	17,285,000
Non Mandatory Training-Refreshment Anti Fraud 18 Des 2024 – Logistik Non Mandatory Training- Anti Fraud Refreshment of December 18, 2024 – Logistics	Karyawan Employees	15	18 Desember 2024 December 18, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	428,000
Non Mandatory Training-Refreshment Anti Fraud 22 Okt 2024 – Logistik Non Mandatory Training- Anti Fraud Refreshment of October 22, 2024 – Logistics	Karyawan Employees	6	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	428,000
Non Mandatory Training-Refreshment Anti Fraud 25 Sept 2024 – Logistik Non Mandatory Training- Anti Fraud Refreshment of September 25, 2024 – Logistics	Karyawan Employees	13	25 September 2024 September 25, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	220,000
Non Mandatory Training-Refreshment Anti Fraud 9 Okt 2024 – Logistik Non Mandatory Training- Anti Fraud Refreshment of October 9, 2024 – Logistics	Karyawan Employees	13	9 Oktober 2024 October 9, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	453,000
Non Mandatory Training-Riad Moyager Publishing : Sun Gazer Books	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Internal Aladin Aladin Internal	3,810,000
Non Mandatory Training-Sharia Restricted Investment Account Training	Karyawan Employee	1	28 November 2024 November 28, 2024	TAHA Institute	1,225,000

Jenis Pendidikan/Pelatihan Type of Education/ Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date	Lembaga Penyelengara Organizer	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Non Mandatory Training-Teknik Identifikasi dan Penulisan LTKM TPA Perjudian, Korupsi, Penipuan dan Narkotika Bagi Analis Bank Non Mandatory Training-Identification Techniques and Writing of LTKM TPA Gambling, Corruption, Fraud and Narcotics for Bank Analysts	Karyawan Employee	1	18-19 Oktober 2024 October 18-19, 2024	PT Citra Prestasi Gemilang	7,215,000
Personal Development-Bake Class ABC	Karyawan Employees	3	30 November 2024 November 30, 2024	Bake Class ABC	1,155,000
Personal Development-Canva Subscription	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Canva Indonesia	769,000
Personal Development-Capcut Pro Subcription	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Capcut Pro	999,000
Personal Development-Clarkia Floristy	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Clarkia Floristy	1,000,000
Personal Development-Coursera Plus	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Coursera Plus	1,000,000
Personal Development-Croschet Workshop	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Rajut Class	495,000
Personal Development-English Spesific Purposes	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Jago Bahasa	1,000,000
Personal Development-Fitness	Karyawan Employees	30	30 November 2024 November 30, 2024	Prime Fitness	29,890,000
Personal Development-Google Book Subscription	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Google Book	910,528
Personal Development-IELTS Certification	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	IDP Education	1,000,000
Personal Development-Kerja.id Subscription	Karyawan Employee	1	20 Desember 2024 December 20, 2024	Kerja.id	198,000
Personal Development-Kursus Mengemudi Personal Development-Driving Course	Karyawan Employees	2	20 Desember 2024 December 20, 2024	Astraco	2,000,000
Personal Development-Mini Bouquet Class	Karyawan Employee	1	30 November 2024 November 30, 2024	Sarah Annisa Mini Bouquet Class	1,000,000
Personal Development-Open AI Subsciption	Karyawan Employee	1	30 November 2024 November 30, 2024	OPEN AI	931,020
Personal Development-Purwadhika Digital Technology School	Karyawan Employee	1	30 November 2024 November 30, 2024	Purwadhika Digital Technology School	1,000,000
Personal Development-Studio Membership	Karyawan Employee	2	20 Desember 2024 December 20, 2024	Studio Satu	1,800,000
Personal Development-WMII Membership Fee	Karyawan Employee	1	30 November 2024 November 30, 2024	Wakil Manajer Investasi Indonesia Indonesian Investment Manager Representative	1,000,000

Sementara itu, dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah sekaligus untuk memberikan kontribusi terbaik bagi para pemangku kepentingan, Bank memiliki sejumlah SDI yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Berikut daftar SDI Bank Aladin Syariah yang Memiliki Keahlian Khusus atau Memiliki Sertifikasi dan Masih Berlaku sampai dengan akhir tahun 2024, yakni sebagaimana terlampir di bawah ini.

Meanwhile, to strengthen and improve services to customers as well as to provide the best contribution to stakeholders, the Bank employs HC who have special expertise in their fields. The following lists Bank Aladin Syariah HC that have special skills or certification and were still valid until the end of 2024.

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Type of Education/Training	Tahun Diperoleh	Masa Berlaku Sertifikasi	Penyelenggara
1	Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	Sertifikasi Treasury Level Advance Advanced Level Treasury Certification	2022	3 Tahun 3 Years	LSPP
2	Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	2024	3 Tahun 3 Years	LSPKS
3	Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	2024	3 Tahun 3 Years	LSPKS
4	Firdila Sari	Direktur Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	2024	3 Tahun 3 Years	LSPKS
5	Jo, Anula Putra	Direktur Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	2024	3 Tahun 3 Years	LSPKS
6	Hery Suiwinata	Group Head Banking Operations	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	2025	3 Tahun 3 Years	LSPKS
7	Hery Suiwinata	Group Head Banking Operations	Sertifikasi SPPUR - Pengelolaan Transfer Dana SPPUR Certification - Fund Transfer Management	2022	3 Tahun 3 Years	BNSP
8	Triana Yulianti	Head of Treasury	Refreshment Sertifikasi Treasury Level Advance	2024	3 Tahun 3 Years	IIGMA

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Penilaian Kinerja Pegawai merupakan evaluasi sistematis terhadap kemampuan dan kinerja pegawai secara berkala. Hasil penilaian kinerja nantinya akan digunakan oleh manajemen sebagai acuan dalam merencanakan pengembangan SDI di Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah melaksanakan program evaluasi pegawai berdasarkan *Objective & Key Results* (OKR) dan kompetensi yang ditetapkan. Penyelenggaraan penilaian pegawai

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

Employee Performance Assessment is a systematic evaluation of employee capabilities and performance on a regular basis. The performance assessment results are later used by management as a reference for planning HC development at Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah's employee evaluation program is based on Objective & Key Results (OKR) and specified competencies. The employee assessments are used as a means of determining personal

ini merupakan sarana pengembangan pribadi pegawai sekaligus berfungsi untuk menilai efektivitas sistem dan pedoman yang ada di bank. *Review* pegawai menghasilkan rekomendasi yang menjadi acuan bagi pegawai dan bank untuk mencapai hasil yang lebih baik.

development for employees, and also serve to assess the effectiveness of existing systems and guidelines at the Bank. Employee reviews produce recommendations that become a reference for employees and the Bank to achieve better results.

Dalam pengelolaan kinerja, bank menggunakan tujuan dan metode *Objective & Key Results (OKR)*. OKR Bank Aladin Syariah diperoleh secara bertahap dari Direksi dan kemudian dikomunikasikan kepada individu terkait di bank. Sasaran kinerja dan OKR memastikan pegawai dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya, membuat tindakan mereka lebih percaya diri, dan mencapai hasil akhir yang diharapkan.

For performance management, the Bank uses the Objective & Key Results (OKR) method. Bank Aladin Syariah OKR's are obtained in stages from the Board of Directors and then communicated to relevant individuals at the Bank. Performance OKRs and goals ensure employees can concentrate on their work, make their actions more confident, and achieve the desired end results.

Penilaian Kinerja Pegawai adalah upaya Bank Aladin Syariah untuk menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas pegawai maupun Bank. Penilaian kinerja dapat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui *feedback* yang diberikan oleh Bank.

Employee Performance Assessments reflects Bank Aladin Syariah's effort to assess achievements with the aim of increasing employee and Bank productivity. Performance appraisals will provide opportunities for employees to take corrective actions with the aim of improving their performance through feedback provided by the Bank.

Selain memiliki tujuan, penilaian kinerja ini juga memiliki kegunaan yaitu sebagai media ukur yang digunakan Bank Aladin Syariah untuk menaikkan jabatan pegawai, menentukan gaji pegawai, memberikan prestasi kerja pegawai, dan mengembangkan karier pegawai. Bank melaksanakan remunerasi pegawai secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Additionally, these performance assessments are also used as a measuring medium by Bank Aladin Syariah to determine employee promotions, salaries, work performance, and career development. The Bank's employee remuneration is fair and transparent in accordance with applicable regulations.

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah melaksanakan program penilaian kinerja terhadap 271 pegawai dengan hasil pegawai dengan hasil mayoritas karyawan (50% populasi) memenuhi target yang ditetapkan.

In 2024, Bank Aladin Syariah conducted performance assessments for 271 employees that showed the majority of employees (more than 50%) met the set targets.

Hasil penilaian kerja ini menjadi dasar untuk pengembangan pegawai di tahun selanjutnya, dan juga dasar untuk memberikan penghargaan kepada pegawai. Hal ini memperlihatkan bahwa Bank telah menerapkan pengelolaan kinerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

The work assessment results become the basis for employee development in the following year, and also the basis for giving awards to employees. This shows that the Bank's performance management is in accordance with what has been determined.

Penilaian kinerja yang dilakukan bank telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam penilaian kinerja pegawai Bank Aladin Syariah menggunakan metode skala rating. Dimana skala penilaian tersebut kemudian akan diubah ke dalam bentuk angka seperti dalam tabel berikut ini

The performance assessments were carried out by the Bank in accordance with what has been determined. In assessing employee performance, Bank Aladin Syariah uses a rating scale method. The assessment scale will then be converted into numbers as in the following table.

Skala *Rating* yang Digunakan
Rating Scale Used

Skala Rating Rating Scale	Keterangan
1	Secara konsisten menunjukan kinerja luar biasa Consistently showing outstanding performance
2	Secara konsisten melebihi target Consistently exceeding targets
3	Memenuhi target Meeting targets

Skala *Rating* yang Digunakan
Rating Scale Used

Skala Rating Rating Scale	Keterangan
4	Memenuhi sebagian target Meeting some targets
5	Tidak memenuhi target Not meeting targets

MANAJEMEN KARIR

Program pengembangan karier yang dilakukan di tahun 2024 untuk seluruh pegawai Bank adalah *on the job training*, yaitu program pengembangan yang dilengkapi dengan pelatihan wajib sesuai level dan posisi masing-masing pegawai. *On the job training* dan program pengelolaan kinerja akan menjadi dasar pengembangan karier serta untuk mewujudkan visi juga misi Bank.

PROGRAM PENSIUN

Bank Aladin Syariah telah menetapkan batas usia kerja maksimum yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. Dengan begitu, pekerja yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun akan memasuki masa purna karya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan loyalitas pegawai, Bank Aladin Syariah mempersiapkan berbagai program masa purna karya. Program ini diharapkan dapat membekali para pegawai yang menghadapi masa pensiun dengan persiapan mental dan emosional sekaligus memfasilitasi kesejahteraan pensiun pegawai. Per 31 Desember 2024, terdapat 0 pegawai yang memasuki masa pensiun.

KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA

Dalam proses rekrutmen, Bank Aladin Syariah memberikan hak yang sama kepada setiap calon pegawai yang memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Bank juga mengimplementasikan prinsip kesetaraan, yaitu dengan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin pada program pendidikan atau pelatihan dan remunerasi serta program kesejahteraan pegawai. Selama calon pegawai memiliki kompetensi dan integritas untuk menempati posisi strategis tersebut, maka Bank akan memberikan hak kesempatan kerja yang sama.

Adapun komposisi pegawai Bank berdasarkan jenis kelamin untuk tahun 2022 dan 2024 adalah sebagai berikut:

CAREER MANAGEMENT

The career development program carried out in 2024 for all the Bank's employees was on the job training, a development program that includes mandatory training based on the level and position of each employee. On the job training and performance management programs form the basis for career development, and also to realize the Bank's vision and mission.

PENSION PROGRAM

Bank Aladin Syariah has set a maximum working age limit of 56 (fifty six) years. Thus, employees who have reached the age of 56 (fifty six) years will enter retirement. As a form of appreciation for employee dedication and loyalty, Bank Aladin Syariah has developed retirement programs to equip employees facing retirement with mental and emotional preparation while facilitating employee retirement welfare. Up until December 31, 2024, no employees entered retirement.

GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

In its recruitment process, Bank Aladin Syariah provides the same rights to every prospective employee who meets the pre determined administrative requirements. The Bank also applies the principle of equality, by not differentiating based on gender in its education or training and remuneration programs, and its employee welfare programs. So long as prospective employees have the competencies and integrity to occupy strategic positions, the Bank will provide equal employment opportunities.

Composition of the Bank's employees based on gender for 2023 and 2024 is as follows:

Komposisi Pegawai Bank Berdasarkan Gender 2023-2024
Composition of the Bank's Employees based on Gender 2023-2024

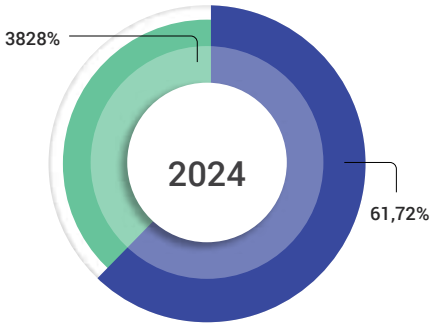

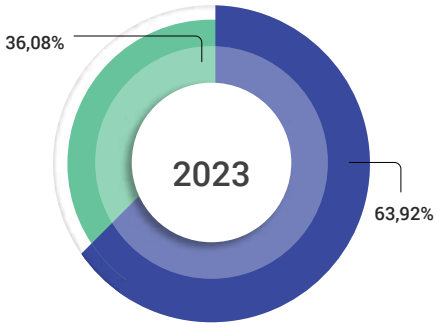

PROGRAM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setiap SDI merupakan prioritas bagi Bank Aladin Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya Bank dalam menyediakan beberapa fasilitas alat keselamatan kerja seperti APAR, yaitu alat untuk mengantisipasi kebakaran. Bank Aladin Syariah, terus menghimbau partisipasi semua pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan budaya K3 yang menjadi kunci terwujudnya lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan produktif.

Dari aspek kesehatan, Bank Aladin Syariah memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh pegawai. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut merupakan pemenuhan amanat undang-undang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bagi seluruh pegawai. Dalam hal ini, Bank telah mendaftarkan seluruh pegawai beserta keluarganya untuk mengikuti Program Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Bank melindungi pegawai dengan mengikutsertakan mereka pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Mengacu kepada peraturan undang-undang di bidang ketenagakerjaan, Bank Aladin Syariah telah memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh pegawai, pembayaran lembur diberikan kepada pegawai pada tingkat pelaksana, dan pemberian hak-hak cuti pegawai telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT PROGRAM

Occupational Health and Safety (OHS) for HC is a priority for Bank Aladin Syariah when carrying out operational activities. This can be seen in the Bank's efforts to provide work safety equipment facilities such as APAR (portable fire extinguishers). Bank Aladin Syariah encourages all parties to adopt an OHS culture, which is the key to creating a safe, comfortable, healthy and productive working environment.

From the health aspect, Bank Aladin Syariah provides health services insurance to all employees. These health service facilities fulfill the statutory mandate to ensure safety and health for all employees. To do so, the Bank has registered all employees and their families in the Health Social Security Administering Agency (BPJS Kesehatan) Membership Program, and the Bank further protects employees by including them in the Employment Social Security Administering Agency (BPJS Ketenagakerjaan) Program.

For the statutory employment regulations, Bank Aladin Syariah has complied with the minimum wage requirements, on time payment of salaries and THR, the Jamsostek program for all employees, overtime payments for employees at the executive level, and employee leave rights, which have been laid down in the Company Regulations book.

PROGRAM KESEJAHTERAAN

Bank Aladin Syariah senantiasa memperhatikan dan mengedepankan kesejahteraan pegawai. Bank Aladin Syariah tidak hanya fokus pada tingkat remunerasi, Bank juga memberikan pegawai berbagai macam fasilitas dan program kesejahteraan. Kesejahteraan pegawai merupakan prioritas utama, selain demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif Bank menghubungkan dan mengorelasikannya dengan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, juga strategi Bank. Adapun fasilitas dan program yang diberikan bank di antaranya:

WELFARE PROGRAM

Bank Aladin Syariah always pays attention to and prioritizes employee welfare. Bank Aladin Syariah does not only focus on remuneration levels, the Bank also provides employees with other facilities and welfare programs. Employee welfare is a top priority, apart from creating a safe, comfortable and conducive work environment, the Bank connects and correlates it with success in achieving the Bank's vision, mission and strategy. The facilities and programs provided by the Bank include:

Jenis Program Kesejahteraan Type of Welfare Program	Pegawai Tetap Permanent Employees	Pegawai Kontrak Contract-Based Employees
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	✓	✓
BPJS Kesehatan BPJS Health	✓	✓
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Financial Institution Pension Fund	✓	x

✓ : Tersedia/Available
x : Tidak Tersedia/Not Available

Pengupahan Bank Aladin Syariah disusun untuk mendorong Pegawai menyelaraskan diri dengan visi, misi, strategi, dan budaya Bank sehingga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian tujuan bisnis Bank Aladin Syariah. Dalam rangka memberikan daya tarik, motivasi dan mempertahankan pegawai terbaiknya, Bank menyusun pemberian gaji dan upah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan/*fairness* dan kompetitif/*competitiveness* yang telah disesuaikan dengan peraturan pengupahan pegawai, yang mengacu pada ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) wilayah masing-masing unit kerja Bank yang ditentukan oleh Pemerintah setempat. Berikut jumlah remunerasi yang diberikan kepada pegawai untuk tahun 2023 dan tahun 2024.

Bank Aladin Syariah's remuneration is designed to encourage employees to align themselves with the Bank's vision, mission, strategy and culture so that they will provide their best contribution in achieving Bank Aladin Syariah's business goals. To attract, motivate and retain the best employees, the Bank prepares salaries and wages by considering the principles of fairness and competitiveness, and adjusting them to employee remuneration regulations, which refers to the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) provisions in the area of each Bank work unit, as determined by the local Government. The following shows the remuneration given to employees in 2023 and 2024.

Jumlah Remunerasi yang diberikan kepada pegawai 2023-2024
Total Remuneration given to employees 2023-2024

Jumlah Remunerasi Pegawai Tahun 2024 Total Employee Remuneration in 2024 **Rp196.482.919.725,-**	:	**Diberikan untuk** Given to **290 pegawai**/employees
Jumlah Remunerasi Pegawai Tahun 2023 **Total Employee Remuneration in 2023** **Rp 160.764.734.574.-**	:	**Diberikan untuk** **Given to** **291 pegawai/employees**

Selain itu, sesuai Pasal 19 UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bank telah mendaftarkan semua pegawai dalam Program Jaminan Sosial. Berikut Jaminan Sosial yang diberikan kepada masing-masing pegawai:

1. Jaminan Hari Tua (JHT);
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
3. Jaminan Kematian (JKM);
4. Jaminan Pensiun (JP); dan
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selaras dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Bank Aladin Syariah senantiasa menjaga komitmen dalam membangun serta memelihara Hubungan Industrial yang harmonis, transparan, dan berkeadilan antara pegawai dan Bank. Hal tersebut dilakukan dalam menjaga keberlangsungan operasional Bank. Selama tahun 2024, Hubungan Industrial yang baik dinilai telah menghasilkan suasana kerja yang kondusif.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

Bank Aladin Syariah menilai program kerja tahun 2024 yang meliputi *Leadership Training, Mandatory Training, Non Mandatory Training, Personal Development Training* telah berjalan dengan baik. Sementara itu, dalam upaya untuk menyusun rencana program kerja tahun 2025 yang lebih berkualitas Bank Aladin Syariah mempertimbangkan kondisi pertumbuhan bisnis yang akan semakin menantang yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi perkembangan global dan nasional.

Adapun pada tahun 2025, Bank berencana melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani sebagai berikut:

1. Sejumlah 60 karyawan dan direksi akan melakukan penyelarasan, pemeliharaan dan ujian sertifikasi Manajemen Risiko sesuai Jenjang yang ditentukan oleh internal Bank.
2. Sejumlah sedikitnya 2 karyawan akan melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran (SPI), dan 7 karyawan akan melakukan pemeliharaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran (SPI).
3. Sejumlah sedikitnya 50 karyawan yang difokuskan kepada karyawan baru Bank akan melakukan pembekalan Dasar Perbankan Syariah, APU PPT, dan Anti Fraud.
4. Sejumlah sedikitnya 200 karyawan akan melakukan pelatihan *soft skill/technical skill* internal divisi.
5. Sejumlah 80 karyawan akan melakukan pelatihan kepemimpinan (*leadership*).

Additionally, in accordance with Article 19 of Law 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the Bank has registered all employees in the Social Security Program. The following shows the Social Security provided to each employee:

1. Old Age Security (JHT);
2. Work Accident Insurance (JKK);
3. Life Insurance (JKM);
4. Pension Insurance (JP); And
5. Health Care Insurance (JPK).

INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT

In line with Law No. 13 of 2003 and Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Laws concerning Employment, Bank Aladin Syariah always maintains its commitment to building and maintaining harmonious, transparent and fair Industrial Relations between employees and the Bank. This is done to maintain the continuity of the Bank's operations. During 2024, having the proper industrial relations helped produce a conducive working atmosphere.

FUTURE HC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PROGRAM

Bank Aladin Syariah assesses that the 2024 work program which includes Leadership Training, Mandatory Training, Non Mandatory Training, Personal Development Training has been running well. Meanwhile, in an effort to prepare a better quality 2025 work program plan, Bank Aladin Syariah considers the increasingly challenging business growth conditions influenced by various global and national development conditions.

In 2025, the Bank plans to manage and develop Human Capital as follows:

1. A total of 60 employees and directors will conduct alignment, maintenance and certification exams for Risk Management according to the Level determined by the Bank internally.
2. A minimum of 2 employees will conduct Competency-Based Training for Payment Systems (SPI), and 7 employees will conduct maintenance of Competency-Based Training for Payment Systems (SPI).
3. A minimum of 50 employees, with the focus on the Bank's new employees, will conduct basic training in Sharia Banking, AML CFT, and Anti-Fraud.
4. A minimum of 200 employees will conduct internal division soft skill/technical skill training.
5. A minimum of 80 employees will conduct leadership training.

Teknologi Informasi
Information Technology



Diperkuat dengan basis teknologi yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir, Bank memasuki fase penting untuk melanjutkan pengembangan teknologi, dimana unsur pemenuhan kebutuhan Bank Aladin Syariah dan nasabah semakin dominan. Modal yang sangat penting untuk mendukung rencana bisnis bank adalah ketersediaan infrastruktur *hybrid* dan *core banking* dengan fungsionalitas *API First*.

Strengthened by the technological base built in recent years, the Bank is entering an important phase of continuing technological development, where the element of meeting the needs of Bank Aladin Syariah and customers is increasingly dominant. A very important asset to support the Bank's business plan is the availability of a hybrid and core banking infrastructure with API First functionality.

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah berhasil meraih sertifikasi ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) yang dikeluarkan oleh CBQA Global selaku badan sertifikasi. ISMS merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.

In 2024, Bank Aladin Syariah successfully achieved ISO 27001 certification for its information security management systems (ISMS) from the CBQA Global certification body. ISMS is a set of interrelated elements within an organization or company that are used to manage and control information security risks, and to protect and maintain the confidentiality, integrity and availability of information.

Sertifikasi ISO 27001 yang diterima oleh Bank Aladin Syariah merupakan komitmen Bank untuk terus meningkatkan keamanan informasi sesuai dengan standar yang ada. Harapannya, capaian yang ada saat ini bisa ditingkatkan

The ISO 27001 certification received by Bank Aladin Syariah reflects the Bank's commitment to continue improving information security in line with existing standards. The hope is that the current achievements can be further improved

dengan lingkup yang lebih luas lagi. Terlebih lagi, Bank Aladin Syariah adalah bank yang berbasis digital maka keamanan informasi bagi nasabah merupakan poin yang sangat penting. Selain itu, perhatian utama Bank Aladin Syariah adalah nasabah dapat bertransaksi melalui aplikasi Bank secara aman dan nyaman.

Bank terus memperkuat tata kelola seraya melanjutkan penguatan terhadap sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk mendukung visi dan misi TI Bank Aladin Syariah, untuk meningkatkan kinerja Bank.

to cover a wider scope. Moreover, Bank Aladin Syariah is a digital-based bank, so information security for customers is a very important point. Additionally, Bank Aladin Syariah's main concern is that customers can make transactions via the Bank applications safely and comfortably.

The Bank continues to strengthen its governance while continuing to strengthen its HC and organizational structure to support Bank Aladin Syariah's IT vision and mission, and to improve the Bank's performance.

Visi dan Misi TI Bank Aladin Syariah

VISI
Menjadi mitra bagi seluruh *stakeholder* dengan mengedepankan teknologi tepat guna dan layanan berkelas dunia
MISI
Mendorong secara aktif budaya internal dalam inovasi teknologi **Menjadi pendorong terdepan dalam meningkatkan daya saing produk dan daya saing Bank secara umum dengan penerapan teknologi tepat guna** **Partisipasi aktif dalam meningkatkan literasi perbankan serta adopsi teknologi digital dalam perbankan Syariah**

PENGELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Bank Aladin Syariah dijalankan oleh *Chief Technology Officer* yang berada di bawah supervisi langsung dari Presiden Direktur, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SRT.011.HCD/08.2021 tanggal 2 Agustus 2021. *Chief Technology Officer* menyusun rencana strategis hingga tersedianya solusi TI yang selaras dengan kebutuhan di sisi bisnis. Tren teknologi dan prinsip GCG juga diperhatikan dalam membuat rencana solusi TI.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Chief Technology Officer* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan TI Bank, adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT

Bank Aladin Syariah's Information Technology System management is carried out by the Chief Technology Officer under the direct supervision of the President Director, in accordance with Directors' Decree No. SRT.011.HCD/08.2021 dated August 2, 2021. The Chief Technology Officer prepares strategic plans for IT solutions that are in line with business needs. Technology trends and GCG principles are also considered when preparing IT solution plans.

The Chief Technology Officer's duties and responsibilities for managing and developing the Bank's IT are as follows:

1. Preparing an Information Technology Strategic Plan in line with the Bank's strategic plan for business activities;
2. Formulating key Information Technology policies, standards and procedures;
3. Ensuring conformity between approved Information Technology projects and the Information Technology Strategic Plan;
4. Ensuring conformity between the implementation of Information Technology projects and the agreed project plan (project charter);

5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.

Sebagai Bank dengan layanan perbankan digital, teknologi informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam seluruh aktivitas Bank. Menyadari akan hal ini, Bank berkomitmen untuk turut serta dalam perkembangan ini dengan terus menambah besaran belanja modal untuk pengembangan teknologi informasi dan memperkuat Departemen Teknologi Informasi Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah memiliki jumlah pegawai Departemen Teknologi Informasi sebanyak 79 pegawai.

PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2024

Melanjutkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, program strategis tahun 2024 adalah sebagai:

1. Pengembangan *Digital Banking*
   a. Pengembangan transaksi digital pada *platform Mobile Banking* dengan memperkenalkan fitur-fitur baru, seperti pembayaran digital dan integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga
   b. Penyediaan layanan API Terbuka (*Open Banking*) untuk mitra eksternal yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan
   c. Penggunaan *platform customer engagement* untuk meningkatkan keterlibatan, retensi, dan konversi pelanggan, serta untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan menyeluruh kepada pelanggan
   d. Pengembangan fungsi transaksi secara *bulk* process, produk baru untuk korporasi serta peningkatan informasi dan pelaporan yang dibutuhkan
   e. Pengembangan aplikasi untuk mendukung kegiatan promosi produk dan layanan

2. Penguatan Keamanan Informasi
   a. Penguatan Keamanan Jaringan untuk meningkatkan perlindungan terhadap ancaman siber dengan mengimplementasikan *firewall* canggih, deteksi intrusi, dan sistem proteksi jaringan lainnya.
   b. Peningkatan Keamanan Digital dengan penerapan metode otentikasi yang lebih kuat, deteksi kecurangan yang lebih canggih, dan perlindungan data yang lebih ketat untuk melindungi informasi sensitif pelanggan

5. Ensuring conformity between Information Technology and the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities;
6. Taking effective steps to minimize risks in Bank investments in the Information Technology sector so that they contribute to achieving the Bank's business objectives;
7. Monitoring Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.

As a bank that uses digital banking services, information technology plays a very important role in all Company activities. To realize this, the Bank is committed to participating in its development by continuing to increase the amount of capital expenditure for information technology development, and for strengthening the Information Technology Department. As of December 31, 2024, Bank Aladin Syariah's Information Technology Department had a total of 79 employees.

STRATEGIC PROGRAM FOR 2024

Continuing the previously established strategic plan, the strategic program for 2024 is as follows:

1. Digital Banking Development
   a. Development of digital transactions on the Mobile Banking platform by introducing new features, such as digital payments and integration with third-party payment systems.
   b. Provision of Open API services (Open Banking) for external partners that enables integration with third-party applications and services to increase added value for customers
   c. Use of customer engagement platforms to increase customer engagement, retention, and conversion, as well as to provide a more personalized and comprehensive experience to customers
   d. Development of bulk process transaction functions, new products for corporations and improvements to the information and reporting needed.
   e. Application development to support product and service promotion activities.

2. Strengthening of Information Security
   a. Strengthening of Network Security to improve protection against cyber threats by implementing advanced firewalls, intrusion detection, and other network protection systems.
   b. Improvement of Digital Security by implementing stronger authentication methods, more sophisticated fraud detection, and tighter data protection to protect sensitive customer information

c. Penyusunan Kebijakan Keamanan dengan merevisi dan memperkuat kebijakan keamanan informasi perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan yang berlaku.

3. Penguatan Infrastruktur dan Arsitektur TI
   a. Peningkatan Kapasitas Jaringan dengan meningkatkan kapasitas dan kinerja jaringan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mengakomodasi proses transaksi serta permintaan data yang meningkat
   b. Pengembangan Sistem Big Data dengan menerapkan infrastruktur dan teknologi big data untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara efisien guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai bank yang menawarkan layanan perbankan digital, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas bisnis Bank Aladin Syariah. Mulai dari mendukung pengembangan produk bisnis digital, layanan kepuasan pelanggan, aktivitas operasional sehari-hari hingga aktivitas pendukung internal lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan nasabah. Selain itu, tren yang berkembang menuju perbankan digital dan teknologi keuangan lainnya telah menyebabkan banyak gangguan pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, Bank Aladin Syariah berupaya untuk berpartisipasi dalam perkembangan tersebut dengan terus meningkatkan tingkat investasi dalam pengembangan teknologi informasi melalui penyertaan teknologi dan metode baru yang dapat meningkatkan daya saing Bank secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, selain melanjutkan transformasi teknologi dan infrastruktur dasar yang mampu menunjang percepatan pengembangan produk dan layanan digital, IT terus melakukan pengembangan berkelanjutan antara lain melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Kebijakan Teknologi Informasi
2. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan
3. Standar Prosedur Pengembangan dan Pengadaan IT
4. Standar Prosedur Operasional Teknologi Informasi
5. Standar Prosedur IT Change Management
6. Standar Prosedur Penanganan Insiden Teknologi Informasi
7. Standar Prosedur Penanganan Insiden Siber
8. Standar Prosedur Backup dan Restore
9. Standar Prosedur Pengujian Keamanan Siber

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah meraih Sertifikat ISO 27001. Sertifikasi ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Aladin Syariah untuk merealisasikan regulasi Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Bank Aladin Syariah memastikan setiap proses yang dilaksanakan dalam pengembangan dan implementasi

c. Preparation of Security Policy by revising and strengthening the Company's information security policy and ensuring compliance with applicable regulations and security standards.

3. Strengtheningof IT Infrastructure and Architecture
   a. Enhancement of Network Capacity by increasing network capacity and performance to support business growth and accommodate increasing transaction processes and data requests
   b. Development of Big Data Systems by implementing big data infrastructure and technology to collect, store, and analyze data efficiently to support better decision making.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT STRATEGY AND POLICY

As a bank offering digital banking services, information technology plays a very important role in all Bank Aladin Syariah business activities. This ranges from supporting digital business product development, customer satisfaction services, daily operational activities to other internal support activities directly or indirectly related to customers. Additionally, the growing trend towards digital banking and other financial technologies has caused numerous disruptions to technology, processes and human capital. Realizing this, Bank Aladin Syariah strives to participate in these developments by continuing to increase its level of investment in information technology development that includes new technology and methods that can increase the Bank's overall competitiveness.

In 2024, in addition to continuing its technology and basic infrastructure transformation to support the accelerated development of digital products and services, IT continued to carry out sustainable development through the following policies and strategies:

1. Information Technology Policy
2. Security Management System Policy
3. IT Development and Procurement Standard Procedures
4. Information Technology Operational Standard Procedures
5. IT Change Management Standard Procedures
6. Handling Information Technology Incidents Standard Procedures
7. Handling Cyber Incidents Standard Procedures
8. Backup and Restore Standard Procedures
9. Cyber Security Testing Standard Procedures

In 2024, Bank Aladin Syariah received the ISO 27001 Certificate. This certification is a concrete manifestation of Bank Aladin Syariah's commitment to realizing Bank Indonesia regulation No. 23/6/ PBI/2021 concerning Payment Service Providers. Bank Aladin Syariah ensures that every process carried out in the development and

ISO 27001 memberikan dampak signifikan terhadap bisnis bank, nasabah, dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, ISO 27001 ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis Bank Aladin Syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan ekspansi bisnis berkaitan dengan produk layanan perbankan digital dengan prinsip syariah.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Bank Aladin Syariah melaksanakan manajemen risiko secara efektif dan bertahap sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggara Teknologi Informasi oleh Bank Umum, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum, serta Standar Standar ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System *Information Security Management System* (Sistem Manajemen Keamanan Informasi). Bank senantiasa melakukan beberapa langkah dalam menerapkan manajemen risiko tersebut:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pengembangan TI;
2. Mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan, standar, dan prosedur TI;
3. Mengembangkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan TI;
4. Melakukan sistem pengendalian intern atas penggunaan TI;
5. Membangun dan mengembangkan perangkat pendukung manajemen risiko;
6. Melakukan evaluasi profil risiko teknologi informasi secara berkala; dan
7. Perancangan dan penerapan Program IT *Risk and Security Awareness* yang menjadi semakin penting sejalan dengan rencana bisnis.

Bank Aladin Syariah membentuk Departemen Infosec & GRC sebagai komitmennya dalam melaksanakan Tata Kelola TI dan sistem pengawasan lainnya. Bank menyadari pentingnya kerahasiaan dan pengamanan informasi, maka dari itu Bank Aladin Syariah menetapkan beberapa program strategis. Salah satunya adalah menentukan penguatan keamanan informasi yang dijalankan seiring dengan program-program strategis lainnya.

Dalam meyakinkan pengembangan TI berjalan sesuai dengan rencana strategis, kebijakan, standar, dan prosedur yang telah ditentukan, Bank menyelenggarakan pertemuan IT *Steering Committee* (ITSC) sebagai bagian dari Komite Eksekutif secara rutin.

implementation of ISO 27001 will have a significant impact on the Bank's business, customers and stakeholders. Thus, ISO 27001 is expected to be one of Bank Aladin Syariah's strategic steps to increase trust and business expansion related to digital banking service products with sharia principles.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Bank Aladin Syariah's risk management is carried out effectively and in stages in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 concerning Information Technology Providers by Commercial Banks, and OJK Circular Letter (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management when Using Information Technology by Commercial Banks, Financial Services Authority Circular Letter No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks, as well as the ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System Standards. The Bank has instigated the following steps when implementing risk management:

1. Actively supervised IT development by the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Development and enhancement of IT policies, standards and procedures;
3. Development of processes for identifying, measuring, monitoring and controlling IT use risks;
4. Implementation of an internal control system for IT use;
5. Building and development of risk management supporting tools;
6. Regular evaluation of information technology risk profiles; and
7. Designing and implementation of the IT Risk and Security Awareness Program, which is becoming increasingly important in line with the business plan.

Bank Aladin Syariah established the Infosec & GRC Department as a commitment to IT Governance and other supervisory systems implementation. The Bank is aware of the importance of confidentiality and security of information, therefore it has established several strategic programs. One of which is strengthening of information security to be carried out in line with other strategic programs.

To ensure that IT development runs in accordance with pre-determined strategic plans, policies, standards and procedures, the Bank regularly holds IT Steering Committee (ITSC) meetings as part of the Executive Committee.

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Setiap tahunnya Bank Aladin Syariah senantiasa melakukan investasi di bidang TI dalam rangka peningkatan dan pengembangan sistem teknologi informasi. Bank Aladin Syariah menyadari bahwa pengoptimalan penggunaan TI dapat mengakselerasi percepatan dan pertumbuhan kinerja Bank. Maka dari itu, Bank menyediakan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengelolaan dan pengembangan TI. Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah menganggarkan dana sebesar Rp95,43 Miliar untuk investasi dan biaya di bidang TI.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Each year Bank Aladin Syariah invests in the IT sector to improve and develop the information technology systems. Bank Aladin Syariah understands that optimizing the use of IT can accelerate and increase the Bank's performance. Therefore, the Bank provides a special budget for IT management and development. In 2024, Bank Aladin Syariah budgeted Rp95.43 billion for investments and costs in the IT sector.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Sejalan dengan meningkatnya peranan teknologi informasi bagi Bank Aladin Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal ini membuat Teknologi Informasi tidak hanya berperan sebagai alat pendukung melainkan dapat menjadi elemen utama atau pendorong bagi Bank untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk itu, Bank Aladin Syariah telah menyusun rencana pengembangan Teknologi Informasi untuk tahun 2024.

Rencana pengembangan Teknologi Informasi menyelaraskan dengan rencana bisnis bank dengan mengedepankan inovasi dan digitalisasi.adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pembayaran digital dengan berbagai platform pembayaran digital baru maupun integrasi dengan pihak ketiga lainnya.
2. Pengembangan ekosistem perbankan melalui kolaborasi strategis dengan mitra untuk menciptakan layanan perbankan yang terintegrasi, handal dan berkualitas.
3. Pengembangan sistem pembiayaan dengan teknologi digital dan analitik canggih untuk meningkatkan efisiensi, akurasi risiko, dan transparansi pelayanan pembiayaan syariah.
4. Pengembangan tata kelola data (data governance) melalui kerangka kerja komprehensif dan teknologi berbasis AI, memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan data sesuai regulasi OJK dan standar internasional.
5. Pengembangan sistem RM (Sales) dengan solusi berbasis teknologi seperti CRM dan analitik prediktif untuk meningkatkan *engagement* nasabah, personalisasi layanan, dan identifikasi peluang bisnis.
6. Pengembangan ekosistem *fintech* dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan *fintech* untuk menyediakan layanan tambahan seperti pinjaman *online* atau manajemen keuangan pribadi yang lebih komprehensif.

FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLANS

In line with the increasing role of information technology in Bank Aladin Syariah's operational activities, Information Technology now not only act as a supporting tool but also as the main element or driving force for the Bank to achieve its business goals. Therefore, Bank Aladin Syariah has prepared an Information Technology development plan for 2024.

The Information Technology development plan will align with the Bank's business plan by prioritizing the following innovation and digitalization:

1. Development of digital payments with new digital payment platforms and integrating with other third parties.
2. Development of the banking ecosystem through strategic collaboration with partners to create integrated, reliable and quality banking services.
3. Development of a financing system with digital technology and advanced analytics to improve efficiency, risk accuracy, and transparency of sharia financing services.
4. Development of data governance through a comprehensive framework and AI-based technology, ensuring data quality, security, and compliance according to OJK regulations and international standards.
5. Development of an RM (Sales) system with technology-based solutions such as CRM and predictive analytics to improve customer engagement, service personalization, and identification of business opportunities.
6. Development of a fintech ecosystem by collaborating with fintech companies to provide additional services such as online loans or more comprehensive personal financial management.

7. Peningkatan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku dan preferensi pelanggan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih disesuaikan dan memuaskan.

8. Melanjutkan penguatan infrastruktur TI dengan mengedepankan prinsip *high availability*, *scalability* dan *resiliency*.
9. Melanjutkan penguatan pengamanan informasi serta *resilience* terhadap potensi *cyber-attack*.

7. Improvement of data analysis to gain deeper insights into customer behavior and preferences, so that more tailored and satisfying services can be provided.

8. Continuing to strengthen IT infrastructure by prioritizing the principles of high availability, scalability and resiliency.

9. Continuing to strengthen information security and resilience against potential cyber-attacks.

06

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Bank Aladin Syariah senantiasa konsisten dalam merealisasikan komitmennya terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Bagi Bank, penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik bukan hanya sebagai fondasi utama, akan tetapi menjadi landasan penting dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Bank Aladin Syariah is always consistent in realizing its commitment to the implementation of Good Corporate Governance. For the Bank, the implementation of Good Governance principles is not only the main foundation, but also an important foundation in creating sustainable added value.



Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Statement Of Good Corporate Governance Implementation



PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank") berupaya kuat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam seluruh aspek kegiatan usaha dan operasional serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan guna memastikan efektivitas dan relevansi penerapan GCG terhadap dinamika bisnis dan regulasi yang terus berkembang. Penerapan GCG dilakukan secara konsisten sebagai landasan dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat daya saing, serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sepanjang tahun 2024, Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

PT Bank Aladin Syariah Tbk (the "Bank") strives to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all aspects of business and operational activities and conducts evaluations and improvements to ensure the effectiveness and relevance of GCG implementation to the dynamics of business and regulations that continue developing. GCG implementation is carried out consistently as a foundation for building stakeholder trust, strengthening competitiveness, and supporting healthy, sustainable business growth in accordance with sharia principles.

Throughout 2024, the Bank has implemented GCG principles comprehensively based on applicable provisions, in particular the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 dated February 16, 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated April 30, 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance.

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas
3. Tanggung Jawab
4. Independensi
5. Kewajaran

Bank telah membentuk dan mengoptimalkan peran organ-organ tata kelola yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite Pendukung seperti Dewan Komisaris serta Direksi. Selain itu, pelaksanaan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan audit eksternal dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh proses dan keputusan bisnis berada dalam koridor kepatuhan dan prinsip kehati-hatian.

Bank juga terus memperkuat budaya tata kelola melalui pengembangan sistem, kebijakan internal, dan program pelatihan bagi seluruh Insan Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, implementasi GCG tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja seluruh insan Bank.

LANDASAN DASAR PENERAPAN GCG DI LINGKUP BANK ALADIN SYARIAH

Penerapan GCG di Bank Aladin Syariah berdasarkan pada ketentuan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta pedoman yang telah ditetapkan, yaitu:

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
11. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

1. Transparency
2. Accountability
3. Responsibility
4. Independency
5. Fairness

The Bank has formed and optimized the role of governance organs consisting of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Supporting Committees such as the Board of Commissioners' Committees and the Board of Directors' Committees. In addition, the implementation of compliance function, risk management, internal audit, and external audit are carried out in an integrated manner to ensure that all business processes and decisions are within the corridor of compliance and the principle of prudence.

The Bank also continues to strengthen the culture of governance through the development of systems, internal policies, and training programs for all Bank Aladin Syariah personnel. Thus, the implementation of GCG is not only the responsibility of top management, but also becomes part of the work culture of all Bank personnel.

BASIC FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE IN BANK ALADIN SYARIAH

GCG implementation at Bank Aladin Syariah is based on legal provisions that refer to laws and regulations and established guidelines, namely:

6. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
7. Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2004 as amended by Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation;
8. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which has been enacted as Law based on Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
9. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
10. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering;
11. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
12. Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.03/2014 dated June 11, 2014 concerning the Assessment of the Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units Soundness Level;

13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

13. Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 dated June 11, 2014 concerning the Assessment of the Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units Soundness Level;
14. Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 dated June 25, 2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies;
15. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;
16. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies;
17. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Companies;
18. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions;
19. Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 dated July 29, 2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies;
20. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
21. Financial Services Authority Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 dated September 13, 2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Directors, and Prospective Board of Commissioners Members of Banks;
22. Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning the Implementation of Compliance Function in Commercial Banks;
23. Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 dated July 18, 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
24. Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated December 18, 2017 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
25. Financial Services Authority Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 dated June 6, 2017 concerning Risk Management Implementation in the Use of Information Technology by Commercial Banks;
26. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.03/2018 dated December 27, 2018 as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.03/2021 dated July 30, 2021 concerning Reassessment of Main Parties in Financial Services Institutions;

27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
32. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran;
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah;
36. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
38. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
39. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
40. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;
41. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
42. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
43. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
44. Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
45. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20 Tahun 2023

27. Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks;
28. Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 concerning Bank Report Transparency and Publication;
29. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies;
30. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies;
31. Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Material Transactions and Business Activity Changes;
32. Bank Indonesia Regulation No. 22/23/PBI/2020 dated December 29, 2020 concerning Payment Systems;
33. Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 dated July 1, 2020 concerning Transparency and Publication of Reports by Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
34. Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 dated February 22, 2021 concerning the Organization of Activities in the Capital Market Sector;
35. Financial Services Authority Regulation No. 26/POJK.03/2021 dated December 17, 2021 concerning the Maximum Fund Distribution Limit and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks;
36. Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 dated July 1, 2021 concerning Payment Service Providers;
37. Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 dated June 29, 2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
38. Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 dated July 6, 2022 concerning Information Technology Implementation by Commercial Banks;
39. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 dated August 30, 2022 concerning Sharia Commercial Banks;
40. Board of Governor Members' Regulation No. 24/7/PADG/2022 concerning the Operation of Payment Systems by Payment Service Providers and Payment System Infrastructure Providers;
41. Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
42. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks;
43. Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 dated December 22, 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector;
44. Bank Indonesia Regulation No. 3 of 2023 concerning Bank Indonesia Consumer Protection;
45. Board of Governor Members' Regulation No. 20 of 2023

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
46. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tanggal 1 Januari 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

47. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

48. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
49. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut perubahannya;
50. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah – Komite Nasional Kebijakan *Governance*;
51. Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan – Komite Nasional Kebijakan *Governance*;
52. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan *Code of Ethics and Conduct* yang berlaku di PT Bank Aladin Syariah Tbk.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di Bank Aladin Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan keputusan strategis dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan utama penerapan GCG di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Bank (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
7. Memperbaiki budaya kerja Bank.
8. Meningkatkan citra atau *image* Bank menjadi semakin baik.

concerning Procedures for the Implementation of Bank Indonesia Consumer Protection;
46. Financial Services Authority Circular Letter No. 25/SEOJK.03/2023 dated January 1, 2024 concerning Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;

47. Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 dated February 16, 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
48. Fatwa of the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council;
49. Articles of Association of PT Bank Aladin Syariah Tbk including the amendments;
50. General Guidelines for Sharia Business Good Governance – National Committee for Governance Policy;
51. Guidelines for Good Corporate Governance in Banking – National Committee for Governance Policy;
52. Good Corporate Governance Policy and Code of Ethics and Conduct that apply at PT Bank Aladin Syariah Tbk.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG in Bank Aladin Syariah aims to ensure that all operational activities and strategic decisions are carried out professionally, transparently, and responsibly, in accordance with sharia principles and applicable laws and regulations. The main objectives of GCG implementation in the Bank's environment are as follows:

1. Control and direct relationships between Bank Organs (Shareholders, Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board), employees, customers, work partners, as well as the community and environment so that Bank is run well in accordance with GCG principles.

2. Encourage and support the development of Bank.
3. Manage resources more reliably.
4. Manage risks better.
5. Increase accountability to stakeholders.

6. Prevent irregularities in Bank management.

7. Improve the Bank's work culture.
8. Improve the image of the Bank for the better.

Governance Framework

Sebagai wujud komitmen Bank Aladin Syariah dalam menerapkan prinsip GCG, telah ditetapkan kerangka kerja tata kelola (*governance framework*) yang terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. *Governance Commitment* yakni wujud komitmen dari seluruh elemen Bank untuk menerapkan dan menegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Aladin Syariah Syariah secara konsisten dan berkelanjutan.
2. *Governance Structure* yakni organ internal dan pihak regulator Bank Aladin Syariah yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Bank, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
3. *Governance Process* yakni serangkaian *soft structure* yang digunakan untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Aladin Syariah, telah diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.
4. *Governance Outcome* yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG Bank Aladin Syariah yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*Value Creation*) dan keberlangsungan bisnis (*Sustainability*). Dalam penerapan GCG di lingkungan Bank, Bank Aladin Syariah berpedoman pada *soft structure*, yaitu struktur manajemen dan dokumen-dokumen yang mengatur hal yang bersifat strategis, teknis, dan terperinci berupa kebijakan serta prosedur.

Sebagai bagian dari komitmen Bank Aladin Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan kaidah yang berlaku, Bank juga telah menyusun *Governance Mechanism*. Mekanisme ini diimplementasikan secara terstruktur dan sistematis yang diperkuat oleh *Governance Soft-Structure*.

GOVERNANCE COMMITMENT

Sebagai upaya untuk mencapai kesuksesan usaha yang etis, sah, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Untuk memastikan keberlanjutan implementasi GCG, Bank Aladin Syariah membentuk komite, sistem, dan unit kerja yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut secara berkesinambungan.

Penerapan prinsip GCG di Bank Aladin Syariah didasarkan pada 5 (lima) nilai utama, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan/Kewajaran. Dalam mewujudkan hal tersebut, Bank Aladin Syariah memulai dengan proses internalisasi yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman terkait penerapan GCG di seluruh unit organisasi, dengan harapan prinsip GCG dapat diterapkan secara konsisten di semua aspek operasional Bank.

As a form of the Bank's commitment to implementing GCG principles, Bank Aladin Syariah has established a governance framework consisting of 4 pillars, namely::

1. Governance Commitment, which is a form of commitment from all elements of Bank to implement and uphold Good Corporate Governance at Bank Aladin Syariah Syariah consistently and sustainably.
2. Governance Structure, namely the internal organs and regulators of Bank Aladin Syariah which have the authority to carry out the mandate of carrying out their duties and supervisory functions over Bank, namely the GMS, Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.
3. Governance Process, namely a series of soft structures used to ensure the implementation and enforcement of Good Corporate Governance at Bank Aladin Syariah, has been implemented consistently and sustainably.
4. Governance Outcome, namely the manifestation of the implementation and enforcement of Bank Aladin Syariah's GCG which has a positive impact on value creation (Value Creation) and business continuity (Sustainability). In implementing GCG within Bank, Bank Aladin Syariah is guided by soft structure, namely the management structure and documents that regulate strategic, technical and detailed matters in the form of policies and procedures.

As part of Bank Aladin Syariah's commitment to implementing GCG principles in accordance with applicable rules, the Bank has also developed a Governance Mechanism. This mechanism is implementing in a structured and systematic manner and is strengthened by Governance Soft-Structure.

GOVERNANCE COMMITMENT

In an effort to realize business success ethically, legally, sustainably, and provide optimal benefits for stakeholders, Bank Aladin Syariah is committed to implementing GCG principles consistently. To ensure the sustainability of GCG implementation, Bank Aladin Syariah has formed committees, systems and work units that can support the continuous implementation of these principles.

The implementation of GCG within Bank Aladin Syariah is based on five principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Equality/Fairness. In this case, Bank Aladin Syariah began implementing these principles with an internalization process which aims to instill an understanding regarding the implementation of GCG in each organizational unit, with a hope that the application of GCG principles can run consistently in all aspects of the Bank's operations.

GOVERNANCE STRUCTURE

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Namun, karena Bank Aladin Syariah berprinsip syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dianggap sebagai pihak utama diatur dalam POJK 2/2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Secara rinci, struktur organisasi Bank Aladin Syariah mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengangkatan anggota-anggota tersebut dilakukan melalui tahapan penilaian oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan mengutamakan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Dengan demikian, Bank Aladin Syariah didukung oleh anggota yang kompeten dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris juga telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif. Sementara itu, Direksi juga membentuk 5 (lima) komite untuk mendukung kelancaran operasional, yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Pembiayaan, dan Komite Keberlanjutan. Kelima komite tersebut berfungsi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Bank Aladin Syariah.

Untuk mendukung keberhasilan penerapan GCG, Direksi juga memperkuat struktur organisasi dengan menambah Satuan Kerja Audit, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan yang independen dari satuan kerja operasional. Dua lini pertahanan ini berfokus pada prinsip kehati-hatian dan GCG untuk memastikan operasional Bank berjalan dengan baik.

GOVERNANCE PROCESS

Bank Aladin Syariah secara konsisten melaksanakan prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan prinsip kehati-hatian. Penunjukan atau pergantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

GOVERNANCE STRUCTURE

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, company organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. However, since Bank Aladin Syariah is based on sharia principles, the role of the Sharia Supervisory Board is considered the main party regulated in POJK 2/2024 concerning Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

In detail, Bank Aladin Syariah is supported by an organizational structure consisting of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Sharia Supervisory Board (DPS), Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit, and Compliance Work Unit. The number and composition of members of the Bank's Board of Commissioners, the Board of Directors and DPS are already in accordance with prevailing regulations. The process of appointing these members is carried out through an assessment stage by the Nomination and Remuneration Committee, by prioritizing factors of integrity, competence, and financial reputation. Thus, Bank Aladin Syariah is supported by competent members and in accordance with their duties and responsibilities.

The Board of Commissioners has also formed and completed the membership of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee to carry out their duties and responsibilities. Meanwhile, the Board of Directors has also formed 5 (five) committees, namely the Assets and Liabilities Committee, Information Technology Steering Committee, Risk Management Committee, Human Resources Committee, Financing Committee and Sustainability Committee. The five committees are expected to be able to make effective and appropriate decisions in facing the dynamics and business challenges of Bank Aladin Syariah.

To support the successful implementation of GCG, the Board of Directors has also strengthened the organizational structure by adding Audit, Risk Management, and Compliance Work Units that are independent from operational work units. These two lines of defense focus on the principles of prudence and GCG to ensure that the Bank's operations run smoothly.

GOVERNANCE PROCESS

Bank Aladin Syariah consistently implements structured and systematic procedures and mechanisms in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the principle of prudence. The process of appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board (DPS) carried out in accordance with applicable regulations and considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee with due observance of integrity, competency, and financial reputation.

Seluruh organ di Bank Aladin Syariah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dengan benar, didukung oleh komunikasi rutin antara Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi. Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. RBB ini kemudian menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan tugasnya melalui rapat bulanan dan diwajibkan melakukan rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris paling tidak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hal tersebut diatur dalam POJK 2/2024 tentang Tata Kelola Syariah untuk memastikan bahwa produk, jasa, dan program yang diusulkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga dibantu oleh *Liaison Officer* yang berada di bawah pengawasan Satuan Kerja Kepatuhan. Laporan hasil pengawasan dari DPS disampaikan secara rutin kepada OJK, DSN-MUI, dan Direksi.

Direksi bertanggung jawab penuh atas operasional Bank dan memastikan bahwa RBB yang telah disetujui dilaksanakan dengan baik. Seluruh karyawan Bank Aladin Syariah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan secara berkala guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mendukung keberhasilan operasional Bank.

GOVERNANCE OUTCOME

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tercermin dari hasil nyata yang dicapai oleh Bank Aladin Syariah. *Governance Outcome* yang berhasil diraih menunjukkan dampak positif dari penerapan GCG terhadap pemangku kepentingan dan berkontribusi pada penciptaan nilai serta kelangsungan bisnis yang berkelanjutan.

Bank Aladin Syariah terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan proses tata kelola dan memperkuat struktur yang mendukungnya dengan tujuan mencapai *outcome* yang bermanfaat bagi pertumbuhan Bank. *Governance Outcome* yang dicapai diperkuat dengan peraturan internal yang terus diperbarui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

GOVERNANCE MECHANISM

Governance Mechanism dapat dipahami sebagai serangkaian pedoman, kebijakan, prosedur, dan hubungan yang terorganisir dengan jelas antara pengambil keputusan dan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan keputusan tersebut.

All organs at Bank Aladin Syariah carry out their duties and responsibilities in accordance with their functions properly, supported by regular communication between the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors. The Board of Commissioners plays a role in supervising and providing advice to the Board of Directors, as well as ensuring the achievement of the Bank Business Plan (RBB) which has been prepared by considering internal and external factors. This RBB then becomes a guideline for the Board of Directors in carrying out its duties and achieving the goals that have been set.

The Sharia Supervisory Board (DPS) carries out its duties through monthly meetings and is required to hold meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months. This is regulated in POJK 2/2024 concerning Sharia Governance to ensure that the proposed products, services, and programs are in accordance with sharia principles. The DPS is also assisted by a Liaison Officer who is under the supervision of the Compliance Work Unit. Reports on the results of supervision from the DPS are submitted routinely to OJK, DSN-MUI, and the Board of Directors.

The Board of Directors is fully responsible for the Bank's operations and ensures that the approved RBB is implemented properly. All employees of Bank Aladin Syariah are given the opportunity to participate in regular training to improve their knowledge and skills in supporting the success of the Bank's operations.

GOVERNANCE OUTCOME

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is reflected in the real results achieved by Bank Aladin Syariah. The Governance Outcome that has been achieved shows the positive impact of GCG implementation on stakeholders and contributes to value creation and sustainable business continuity.

Bank Aladin Syariah continuously strives to improve the implementation of governance processes and strengthen the structures that support them with the aim of achieving outcomes that are beneficial to the Bank's growth. The Governance Outcome achieved is strengthened by internal regulations that are continuously updated in accordance with applicable laws and sharia principles.

GOVERNANCE MECHANISM

Governance Mechanism can be can be understood as a series of clearly organized guidelines, policies, procedures, and relationships between decision makers and those responsible for overseeing those decisions.

Bank Aladin Syariah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara berkelanjutan yang menjadi pedoman dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Implementasi GCG terwujud melalui kolaborasi antara berbagai lembaga dalam Bank Aladin Syariah dengan struktur GCG yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Untuk meningkatkan efektivitas dari organ-organ utama dalam struktur GCG, Bank didukung oleh berbagai Komite yang berada di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Perusahaan, serta Internal Audit.

Di tingkat Dewan Komisaris, komite-komite dibentuk untuk memperkuat dan mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Adapun komite-komite tersebut terdiri dari:
1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sementara itu, Direksi bersama jajaran manajemen Bank Aladin Syariah bertanggung jawab untuk mengelola, mengendalikan, dan memastikan implementasi GCG berjalan dengan baik. Direksi dibantu oleh komite-komite di tingkat Direksi, yang meliputi:
1. Komite Aset dan Liabilitas;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
3. Komite Manajemen Risiko;
4. Komite Pembiayaan; dan
5. Komite Keberlanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Aladin Syariah senantiasa menjaga hubungan kerja yang harmonis antara semua organ yang ada, agar setiap organ dapat beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Setiap organ diharapkan untuk menghormati dan mematuhi peran serta fungsinya berdasarkan ketentuan hukum dan Anggaran Dasar Bank Aladin Syariah.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Bank Aladin Syariah memiliki kerangka Arsitektur Pedoman Internal yang menggambarkan struktur hierarki atau tata urutan yang jelas meliputi:
1. Anggaran Dasar (AD)
   Merupakan ketentuan pada urutan tertinggi dalam struktur Pedoman Internal Bank yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan Anggaran Dasar merupakan wewenang Pemegang Saham dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

2. Kebijakan dan Piagam/Level 1
   Kebijakan merupakan ketentuan mengenai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana perbankan secara menyeluruh (bank wide), yang mencerminkan strategi dan tujuan jangka panjang Bank agar beroperasi secara efisien, efektif dan sesuai

Bank Aladin Syariah implements GCG principles sustainably as guidelines in all its operational activities. GCG implementation is realized through collaboration between various institutions within Bank Aladin Syariah with a GCG structure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest organ, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors. To improve the effectiveness of the main organs in the GCG structure, the Bank is supported by a range of Committees at the Board of Commissioners and Board of Directors levels, the Corporate Secretary, and Internal Audit.

At the Board of Commissioners level, committees are formed to strengthen and support the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. The committees consist of:
1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; and
3. Nomination and Remuneration Committee.

Meanwhile, the Board of Directors together with the management of Bank Aladin Syariah are responsible for managing, controlling, and ensuring that the implementation of GCG runs well. The Board of Directors is assisted by committees at the Board of Directors level, which include:
1. Asset and Liability Committee;
2. Information Technology Steering Committee;
3. Risk Management Committee;
4. Financing Committee; and
5. Sustainability Committee.

To achieve these goals, Bank Aladin Syariah always maintains a harmonious working relationship between all existing organs, so that each organ can operate effectively and efficiently in accordance with their respective functions and responsibilities. Each organ is expected to respect and comply with its role and function based on the provisions of the law and the Articles of Association of Bank Aladin Syariah.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Bank Aladin Syariah has an Internal Guideline Architecture framework that describes a clear hierarchical structure or sequence consisting of:
1. Articles of Association (AD)
   This is the highest order provision in Bank's Internal Guidelines structure which is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS). Changes to the Articles of Association are under the authority of Shareholders with the mechanism as regulated in Bank's Articles of Association.

2. Policy and Charter/Level 1
   Policies are provisions concerning a series of concepts and principles that serve as guidelines and the basis for comprehensive (bank-wide) banking plans, reflecting the Bank's long-term strategies and objectives to operate efficiently, effectively, and in accordance with

dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan Prinsip Syariah yang berlaku serta mengikuti prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank dan Piagam merupakan dokumen formal yang mengatur tata tertib, kerangka kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pedoman operasional dari suatu komite.

3. Standar Prosedur Produk dan Standar/Level 2
   ketentuan yang mengatur secara detail suatu mekanisme atas suatu produk dan/atau aktivitas perbankan. Standar Prosedur, Standar, Standar Prosedur Produk merupakan penjabaran dari Kebijakan yang mengatur mengenai aktivitas kegiatan secara end to end proses dan wajib menerapkan fungsi four eyes principle serta fungsi pengendalian internal yang memadai.
4. Petunjuk Teknis/Level 3
   Penjabaran lebih lanjut dari Prosedur yang mengatur tahapan proses atau step by step teknis pelaksanaan suatu sistem/aplikasi secara lebih detail, diantaranya memuat tata cara penginputan/pengisian data pada setiap screen dan field. Selain itu, Petunjuk Teknis juga mengatur teknis pelaksanaan suatu proses kerja di luar sistem/aplikasi.

prevailing laws and regulations, provisions, and Sharia Principles, as well as adhering to the principles of Good Governance at the Bank. A Charter is a formal document that governs the rules of procedure, framework, authorities, responsibilities, and operational guidelines of a committee.

3. Standard Product Procedure and Standards/Level 2
   Provisions that regulate in detail a mechanism for a banking product and/or activity. Standard Procedure, Standard, Standard Product Procedure is an elaboration of the Policy which regulates end to end process activities and must implement the four eyes principle function and adequate internal control functions.
4. Technical Instructions/Level 3
   Further elaboration of procedures that regulate the stages of the process or step by step technical implementation of a system/application in more detail, including containing procedures for inputting/filling data on each screen and field. In addition, Technical Guidelines also regulate the technical implementation of a work process outside the system/application.

Penerapan GCG Secara Berkelanjutan
SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GCG

Bank Aladin Syariah terus mendorong seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bank untuk mengimplementasikan dan menjalankan GCG di setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, Bank dapat meraih keunggulan daya saing yang berkelanjutan.

Bank Aladin Syariah continues to encourage all Human Capital (HC) within the Bank to implement and carry out GCG in every activity. With this approach, the Bank can achieve sustainable competitive advantage.

STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG

Sebagai wujud komitmen Bank dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bank Aladin Syariah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG. Penerapan GCG di Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 yang mengatur tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), khususnya Pasal 62 dan Pasal 63. Kedua pasal tersebut menjelaskan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dan para pemangku kepentingan lainnya.

QUALITY STANDARDS FOR IMPLEMENTING GCG

As a form of the Bank's commitment to implementing Good Corporate Governance, Bank continuosly strive to improve the quality of GCG implementation. The implementation of GCG at Bank Aladin Syariah is guided by Bank Indonesia Regulation no. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 and Bank Indonesia Circular Letter (SE) No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS), especially Article 62 and Article 63 concerning Bank's obligation to submit GCG Implementation Reports to Bank Indonesia (BI) (now Financial Services Authority or OJK) and other stakeholders

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GCG

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Bank Aladin Syariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa pelaksanaan GCG oleh Bank mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

In implementing GCG principles, Bank Aladin Syariah is guided by Bank Indonesia Regulation no. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 and Bank Indonesia Circular Letter no. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units that the implementation of GCG by Bank refers to 5 (five) basic principles, namely:

Prinsip-Prinsip GCG Bank Aladin Syariah
GCG Principles of Bank Aladin Syariah

Keterbukaan (Transparency)	Akuntabilitas (Accountability)	Tanggung Jawab (Responsibility)	Independensi (Independency)	Kewajaran (Fairness)

Secara lebih rinci, komitmen dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Bank Aladin Syariah dijelaskan melalui tabel berikut:

In more detail, the commitment and implementation of GCG principles at Bank Aladin Syariah is explained in the following table:

Prinsip Principle	Makna Prinsip Principle Meaning	Komitmen Aladin Aladin's Commitmen
Keterbukaan (Transparency)	Keterbukaan atau transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Openness or transparency contains elements of disclosure and the provision of information in a timely, adequate, clear, accurate manner that can be compared and is easily accessible to stakeholders and the public.	Bank dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mudah diakses oleh stakeholders. Bank and all levels of Management always strive to ensure openness in conveying material and relevant information as well as openness in carrying out the decision-making process and that it is easily accessible to stakeholders.
Akuntabilitas (Accountability)	Kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepada pemegang saham Bank Aladin Syariah sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Clarity of duties and implementation of accountability to Bank Aladin Syariah shareholders so that management runs effectively.	Manajemen Bank Aladin Syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Aladin Syariah harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan. Bank Aladin Syariah management must be able to account for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, Bank Aladin Syariah's business must be managed correctly, measurably, and in accordance with the interests of business actors while still considering the interests of stakeholders.
Tanggung Jawab (Responsibility)	Kesesuaian pengelolaan Bank Aladin Syariah dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Compliance with the management of Bank Aladin Syariah with applicable laws and regulations and the principles of healthy bank management.	Bank Aladin Syariah dan segenap jajaran Bank Aladin Syariah dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Aladin Syariah dan jajaran Bank Aladin Syariah harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan. Bank Aladin Syariah and all levels of Bank Aladin Syariah in their actions always adhere to the principle of prudence and conformity of bank management with applicable laws and regulations and the principles of sound bank management, while remaining aware of all risks and negative implications that may arise from their actions. . Bank Aladin Syariah and the ranks of Bank Aladin Syariah must always remember the interests of all stakeholders in carrying out their functions and determining policies or making decisions.
Independensi (Independency)	Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank Aladin Syariah. Have competence, be able to act objectively and be free from influence/ pressure from any party (independent) and have a high commitment to developing the business of Bank Aladin Syariah.	Bank Aladin Syariah dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa Bank Aladin Syariah dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bank Aladin Syariah and all levels of management guarantee that Bank Aladin Syariah is managed professionally without any conflict of interest and can avoid influence/pressure from any party (independent) which is not in accordance with applicable laws and regulations and healthy corporate principles.

Prinsip Principle	Makna Prinsip Principle Meaning	Komitmen Aladin Aladin's Commitmen
Kewajaran (Fairness)	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Justice and equality in fulfilling stakeholder rights based on applicable agreements and legislation.	Bank Aladin Syariah senantiasa menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (equal treatment) di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Aladin Syariah always applies the principle of fairness which is implemented as justice and equality (equal treatment) in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and applicable laws and regulations and guarantees that each stakeholder will receive equal treatment without discrimination in accordance with applicable laws and regulations.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Bank secara berkala melaksanakan penilaian melalui mekanisme *self-assessment* untuk memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan secara optimal. Penilaian tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 terkait Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Self-assessment GCG yang dilaksanakan Bank meliputi 17 aspek penilaian yang telah ditentukan oleh regulator, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
11. Pemberian remunerasi;
12. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal;

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Bank regularly carries out assessments through self-assessment to ensure that GCG principles have been implemented properly, The assessment refers to several regulations, such as Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation no. 2 of 2024 dated 16 February 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The GCG self-assessment carried out by Bank includes 17 assessment aspects determined by the Regulator, including:

1. Implementation of the duties, responsibilities and authority of the Board of Directors;
2. Implementation of the duties, responsibilities and authority of the Board of Commissioners;
3. Completeness and implementation of the Committee's duties;
4. Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;
5. Implementation of sharia principles in fund collection and distribution activities as well as service delivery;
6. Conflicts of interest handling;
7. Implementation of bank compliance functions;
8. Implementation of the internal audit function;
9. Implementation of the external audit function;
10. Implementation of risk management including an internal control system;
11. Provision of remuneration;
12. Provision of funds to related parties and provision of large funds;
13. Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting;

14. Rencana strategis Bank;
15. Aspek pemegang saham;
16. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan; dan
17. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

14. Bank strategic plan;
15. Shareholder aspect;
16. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery; And
17. Implementation of sustainable finance, including implementation of social and environmental responsibility.

PELAKSANAAN ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah melaksanakan *self assessment* terkait penerapan GCG dengan hasil penilaian keseluruhan menunjukkan peringkat faktor GCG Bank sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION ASSESSMENT IN 2024

In 2024, Bank Aladin Syariah conducted a self-assessment regarding GCG implementation with the overall assessment results showing the Bank's GCG factor ranking as follows:

***Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* Periode Tahun 2024**
Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance Periode Tahun 2024

No.	Faktor Factor	Peringkat Rating (Semester I)	Peringkat Rating (Semester II)
1	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi Implementation of the duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors	2	2
2	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris Implementation of the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners	2	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Completeness and implementation of the Committee's duties	2.	2
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board	2	2
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Implementation of sharia principles in Fundraising and Distributing Funds and Services	2	2
6	Penanganan benturan kepentingan Conflicts of interest Handling	2	2
7	Penerapan fungsi kepatuhan Implementation of compliance functions	3	3
8	Penerapan fungsi audit intern Implementation of the internal audit function	2	2
9	Penerapan fungsi audit ekstern Implementation of the external audit function	2	2
10	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal Implementation of risk management including an internal control system	3	3
11	Pemberian remunerasi Provision of Remuneration	2	2
12	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar Provision funds to related parties and provision of large funds	3	3
13	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (Tata Kelola yang Baik) serta pelaporan internal Transparency of BUS financial and non-financial conditions, GCG implementation reports and internal reporting	2	2
14	Rencana strategis Bank Bank strategic plan	2	2
15	Aspek pemegang saham Shareholder aspect	2	2
16	Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery	2	2

Self Assessment Penerapan *Good Corporate Governance* Periode Tahun 2024

Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance Periode Tahun 2024

No.	Faktor Factor	Peringkat Rating (Semester I)	Peringkat Rating (Semester II)
17	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Implementation of sustainable finance, including implementation of social and environmental responsibility	2	2
Peringkat Rating		**3**	**2**

Pada semester I tahun 2024 Bank melakukan *self assessment* pada 17 faktor penilaian GCG. Adapun pada semester II tahun 2024 terdapat penambahan faktor penilaian GCG sebagaimana tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Self assessment implementasi GCG Bank selama tahun 2024 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat *self assessment* GCG Bank pada secara individual pada semester I tahun 2024 adalah 3 (tiga) dengan definisi peringkat yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Selanjutnya, pada semester II tahun 2024 hasil peringkat *self assessment* GCG Bank secara individual mengalami perbaikan menjadi 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dengan memperhatikan kertas kerja *self assessment* secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik governance *structure*, governance *process*, dan governance *outcome* dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root cause*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. *Governance Structure*
   Struktur organisasi Bank telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank dan secara reguler telah di*review* dan dievaluasi menyesuaikan kebutuhan Bank. Bank juga telah melengkapi struktur Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) secara memadai sehingga masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

In the first semester of 2024, Bank conducted a self-assessment on 17 GCG assessment factors. Meanwhile, in the second semester of 2023, there was additional GCG assessment factors as stated in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated 14, September 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

The self-assessment of Bank's GCG implementation throughout 2024 has been carried out comprehensively with the results of Bank's individual GCG self-assessment rating in the Semester I 2024 being 3 (three), reflecting that the Bank's management has implemented GCG quite well. This is reflected in the implementation of adequate GCG principles. If there are weaknesses in the implementation of GCG principles, then in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.

Furthermore, in the Semester II 2024, the results of the Bank's individual GCG self-assessment rating improved to 2 (two) with a rating definition that reflects that the Bank's management has implemented GCG generally well. This is reflected in the implementation of adequate GCG principles. If there are weaknesses in the implementation of GCG principles, then in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's management.

By considering the self-assessment work paper in a comprehensive and structured manner, covering both governance structure, governance process, and governance outcome, problems in the form of weaknesses and their causes (root causes) and strengths in the implementation of Good Corporate Governance can be identified as follows:

1. Governance Structure
   The Bank's organizational structure has been aligned with the Bank's business focus and has been regularly reviewed and evaluated to suit the Bank's needs. The Bank has also completed the structure of the Board of Commissioners, Board of Directors, DPS, Internal Audit Work Unit (SKAI), Risk Management Work Unit (SKMR) and Compliance Work Unit (SKK) adequately so that each function can carry out its duties and responsibilities

dengan baik. Demikian juga komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS juga telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis serta kebutuhan Bank. Terkait persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/PKK (*fit and proper*) dan seluruh anggota DPS juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

properly. Likewise, the compositions of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS are also in accordance with the regulations and business scale and needs of the Bank. Regarding approval from the Financial Services Authority (OJK) or Bank Indonesia (BI), the Board of Commissioners and all members of the Board of Directors have passed the Fit and Proper Test/PKK and all members of the DPS have also received approval from OJK.

Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, telah memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

In appointing members of the Board of Commissioners, Board of Directors and DPS, integrity, competence, and financial reputation factors have been taken into account so that members of the Board of Commissioners, Board of Directors and DPS have adequate competence and are relevant to their positions to carry out their duties and responsibilities and are able to implement the competence they have in carrying out their duties and responsibilities.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko (KPR) dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sehingga sesuai dengan regulasi dan kebutuhan Bank. Direksi juga telah membentuk 6 (enam) komite yaitu Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC), Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Pembiayaan, Komite Eksekutif Keberlanjutan. Adapun guna membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan, maka KMR juga menjalankan fungsi sebagai Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP). Pada prinsipnya komite-komite tersebut dibentuk guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan secara efektif dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini Bank dan tantangan bisnis ke depan.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has formed and completed the membership of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee (KPR) and Remuneration and Nomination Committee (KRN) so that they are in accordance with the regulations and needs of the Bank. The Board of Directors has also formed 6 (six) committees, namely the Risk Management Committee (KMR), Information Technology Steering Committee (ITSC), Asset and Liability Committee (ALCO), Financing Committee, Sustainability Executive Committee. In order to assist the Board of Directors in formulating policies, supervising the implementation of policies, monitoring the development and condition of the financing portfolio and providing suggestions for improvement steps, the KMR also functions as the Financing Policy Committee (KKP). In principle, these committees are formed to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors and are expected to be able to make decisions effectively and appropriately in facing the Bank's current conditions and future business challenges.

Selain kelima Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dari satuan kerja operasional. Satuan kerja yang merupakan *2nd & 3rd line of defense* tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan GCG. Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

In addition to the five Committees, the Board of Directors has also equipped the organization with Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit and Compliance Work Unit that are independent from the operational work units. The work units that are the 2nd & 3rd line of defense are expected to be able to support the Bank's operational activities by paying attention to the principles of prudence and GCG. The Bank's governance infrastructure in the form of Bank policies and procedures, main tasks and functions of each organizational structure are adequate and support the Bank's business activities.

2. *Governance Process*

Bank selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank sesuai dengan GCG dan prinsip kehati-hatian. Proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Semua organ Bank menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing secara *proper.* Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah melakukan rapat koordinasi untuk saling memberikan informasi, berdiskusi dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga bisnis Bank berjalan dengan baik.

Pada level Dewan Komisaris, untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank ("RBB") yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris membentuk komite yang dapat membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan. Komite-Komite yang dibentuk telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait proses perbaikan yang perlu dilakukan oleh Bank.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara rutin telah menyelenggarakan rapat bulanan guna memastikan antara lain usulan produk, jasa dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibantu oleh 2 (dua) orang Liaison Officer yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran kepada OJK, DSN-MUI dan Direksi.

Untuk mendukung pengawasan aktif DPS, Bank menyediakan fungsi yang mendukung penerapan manajemen risiko terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, yakni fungsi kepatuhan syariah dan fungsi manajemen risiko syariah yang saat ini dilakukan oleh unit kerja yang berada di bawah Direktur Kepatuhan dan fungsi audit intern syariah yang dilakukan oleh unit kerja yang berada di bawah Presiden Direktur. Direktur Kepatuhan dan Presiden Direktur bersama dengan Direksi lainnya di Bank telah melakukan pembahasan terkait pemenuhan prinsip syariah termasuk implementasi ketiga fungsi dimaksud dengan DPS melalui rapat DPS setiap bulannya.

2. Governance Process

The Bank always strives to ensure that the running of its business activities and operational processes is in accordance with GCG and the principle of prudence. The process of appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners, Board of Directors and DPS has been carried out in accordance with applicable provisions and taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee by considering the assessment of integrity, competence and financial reputation factors. All organs of the Bank carry out their duties and responsibilities in accordance with their respective functions properly. The Board of Commissioners, DPS and Board of Directors have held coordination meetings to provide information to each other, discuss and make decisions needed to keep the Bank's business running smoothly.

At the Board of Commissioners level, to support its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has approved the Bank Business Plan ("RBB") which has been prepared by taking into account the Bank's external and internal factors. The Board of Commissioners has also supervised the realization of the RBB that has been set. As an effort to improve the supervisory function of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has formed committees that can assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties. The committees that have been formed have submitted recommendations to the Board of Commissioners regarding the improvement process that needs to be carried out by the Bank.

The Sharia Supervisory Board (DPS) has routinely held monthly meetings to ensure, among other things, that product, service and program proposals are in accordance with sharia principles as stipulated in the DSN-MUI Fatwa. In order to carry out its duties and responsibilities, it is assisted by 2 (two) Liaison Officers who are under the supervision of the Compliance Work Unit. The results of supervision by the DPS have been reported semi-annually to the OJK, DSN-MUI and the Board of Directors.

To support active supervision of DPS, the Bank provides functions that support the implementation of risk management related to the fulfillment of sharia principles, namely the sharia compliance function and sharia risk management function which are currently carried out by the work unit under the Compliance Director, and the sharia internal audit function carried out by the work unit under the President Director. The Compliance Director and the President Director together with other Directors at the Bank have discussed the fulfillment of sharia principles including the implementation of the said three functions by DPS through monthly DPS meetings.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan prinsip syariah. RBB yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menjadi panduan dan fokus bagi Direksi untuk dapat direalisasikan dengan baik.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors, without intervention from shareholders, is fully responsible for the implementation of the Bank's management based on the principles of prudence, GCG and sharia principles. The RBB which has been approved by the Board of Commissioners, becomes a guide and focus for the Board of Directors to be realized properly.

Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan Bank dan karyawan. Secara reguler juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Employees also have the opportunity to receive flexible training based on the needs of the Bank and employees. Regular training is also conducted to improve employee skills and knowledge to support employees in carrying out their duties and responsibilities properly.

Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian ketentuan internal secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah.

The Bank has also periodically evaluated and updated internal provisions in order to maintain the effectiveness, adequacy, and conformity of internal provisions with applicable laws and regulations and sharia principles.

3. *Governance Outcome*
Hasil proses penerapan prinsip GCG terlihat dari Governance *Outcome* yang diperoleh dan merupakan manifestasi dari penerapan GCG Bank terhadap *stakeholders* yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

3. Governance Outcome
The results of the GCG principle implementation process can be seen from the Governance Outcome obtained and is a manifestation of the Bank's GCG implementation towards stakeholders that has a positive impact on value creation and business sustainability.

Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan penerapan governance *process* dan dukungan yang memadai dari governance *structure* agar tercapainya *outcome* yang membantu Bank untuk berkembang. Selain itu, governance *outcome* yang diperoleh Bank juga didukung dengan ketentuan internal Bank yang terus dilakukan pengkinian dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

The Bank is committed to continuously improving and perfecting the implementation of the governance process and receives adequate support from the governance structure to achieve outcomes that help the Bank to grow. In addition, the governance outcome obtained by the Bank is also supported by the Bank's internal provisions which are continuously updated and adjusted to applicable regulations.

ROADMAP GCG BANK ALADIN SYARIAH

Bank Aladin Syariah telah merumuskan *Roadmap* GCG sejalan dengan standar peraturan yang berlaku. *Roadmap* ini dirancang untuk mendukung implementasi praktik GCG guna meningkatkan daya saing dan kredibilitas Bank.

BANK ALADIN SYARIAH GCG ROADMAP

Bank Aladin Syariah has formulated a GCG Roadmap that is in accordance with applicable regulatory standards. This Roadmap is used to support GCG implementation practices in increasing Bank's competitiveness and credibility.

***Roadmap* GCG Bank Aladin Syariah**
Bank Aladin Syariah GCG Roadmap



Sebagai langkah awal, Bank Aladin Syariah memulai penerapan GCG dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan *good compliance corporation*. Untuk mendukung implementasi tersebut, Bank didukung oleh kebijakan tata kelola perusahaan yang secara jelas mengatur tugas dan tanggung jawab setiap elemen dalam struktur organisasinya. Selain itu, Bank berkomitmen untuk terus memperbarui kebijakan dan prosedur agar tetap selaras dengan peraturan yang berlaku.

As an initial step, Bank Aladin Syariah began the implementation of GCG by implementing the principles of Good Corporate Governance, based on laws and regulations that aim to realize a good compliance corporation. To support this implementation, the Bank is supported by a corporate governance policy that clearly regulates the duties and responsibilities of each element in its organizational structure. In addition, the Bank is committed to continuously updating policies and procedures to remain in line with prevailing regulations.

Dengan menjadikan kepatuhan sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas, Bank Aladin Syariah optimis dapat meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *professionalism* (profesionalisme) dan *fairness* (keadilan).

By making compliance the main principle in every activity, Bank Aladin Syariah is optimistic that it can improve the implementation of GCG principles. These principles include transparency, accountability, responsibility, professionalism and fairness.

Selain itu, penerapan GCG di Bank Aladin Syariah didukung oleh kode etik perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku. Kode etik ini menjadi acuan bagi seluruh elemen perusahaan, termasuk organ perusahaan dan karyawan, dalam menjalankan nilai-nilai perusahaan secara konsisten sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Dengan internalisasi prinsip-prinsip GCG yang terintegrasi ke dalam nilai-nilai perusahaan, Bank Aladin Syariah optimis dapat mencapai keberhasilan dalam implementasi GCG.

In addition, the implementation of GCG at Bank Aladin Syariah is supported by the Company's code of conduct which functions as a guideline for behavior. This code of conduct is a reference for all elements of the Company, including company organs and employees, in implementing company values consistently so that they become part of the Company's culture. By internalizing GCG principles that are integrated into Company's values, Bank Aladin Syariah is optimistic that it can achieve success in implementing GCG.

Struktur Dan Organ GCG
GCG Structure And Organs

Struktur GCG Bank mencakup organ utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Dalam pelaksanaannya, organ utama didukung oleh berbagai organ pendukung, termasuk komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, serta Internal Audit.

Untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk beberapa komite, yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Sementara itu, Direksi juga memiliki sejumlah komite yang bertugas membantu pelaksanaan tanggung jawabnya, di antaranya:
1. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Pembiayaan
6. Komite Keberlanjutan

The Bank's GCG structure includes the main organs comprising the General Meeting of Shareholders (GMS) which has the highest position, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. In its implementation, the main organ is assisted by supporting organs consisting of committees at the level of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Risk Management and Internal Audit.

To strengthen the performance of its supervisory duties and functions, the Board of Commissioners formed several committees, namely:
1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Nomination and Remuneration Committee

Meanwhile, the Board of Directors also has committees to assist with their duties, including:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Information Technology Steering Committee
3. Risk Management Committee
4. Human Resources Committee
5. Financing Committee
6. Sustainability Committee

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting Of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Bank, yang berfungsi sebagai forum bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan perusahaan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. RUPS juga menjadi sarana bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, RUPS dilakukan dalam 2 (dua) macam, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Lebih jauh, RUPS memiliki hak untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui atau menolak laporan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengangkat auditor eksternal, menentukan keseimbangan antara remunerasi dan dividen, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar Bank, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Bank's structure, which functions a forum for shareholders to obtain information about company management carried out by the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners. The GMS is also a place for shareholders to make strategic decisions that cannot be delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners as regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association.

In its implementation, GMS is held in 2 (two) types, namely Annual GMS and Extraordinary GMS. Furthermore, the GMS has the right to appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approve or reject reports submitted by the Board of Commissioners and the Board of Directors, appoint external auditors, determine the balance between remuneration and dividends, evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approve changes to Bank's articles of association, approve Financial Statements, and determine remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

JENIS RUPS

1. RUPS Tahunan
   Pelaksanaan RUPS tahunan diselenggarakan oleh Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham untuk membahas serta meminta persetujuan terkait Laporan Tahunan, untuk membahas dan meminta persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank, penetapan penggunaan laba bersih Bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, perubahan alamat Bank dan perubahan susunan Pengurus Bank.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
   RUPS Luar Biasa adalah RUPS lainnya yang dapat diadakan yang dapat diadakan kapan pun sesuai kebutuhan dan kepentingan Bank. Agenda RUPSLB melibatkan diskusi mengenai perubahan nama Bank, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank. Selain itu, RUPSLB juga memberikan persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

TYPE OF GMS

1. Annual GMS
   The implementation of the annual GMS is held by the Board of Directors by inviting the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Shareholders to discuss and request approval regarding the Annual Report, to discuss and request approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Duties Report of the Bank's Board of Commissioners, determining the appropriation of the Bank's net profit, appointment of a Public Accountant Firm, determination of remuneration packages including allowances, bonuses and facilities provided to the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board, reporting on the realization of the use of proceeds from the Public Offering, changes to Bank's address and changes to the composition of Bank Management.
2. Extraordinary GMS (EGMS)
   Extraordinary GMS is another GMS that can be held at any time according to the needs and interests of Bank. The EGMS agenda involves discussions regarding changing the Bank's name, appointing and dismissing the Bank's Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors. Apart from that, the EGMS also gives approval for additional capital by issuing new shares with Pre-emptive Rights (HMETD), gives authority and power to the Bank's Board of Directors with

(HMETD), memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal, memberikan kuasa kepada Direksi Bank untuk merubah anggaran dasar Bank dalam rangka peningkatan modal.

substitution rights to carry out all necessary actions in order to increase capital, gives power of attorney to the Bank's Board of Directors to amend the Bank's articles of association in order to increase capital.

PENYELENGGARAAN RUPS

Pelaksanaan RUPS diawali dengan proses pengumuman dan pemanggilan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua informasi terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan pemanggilan. Namun, jika informasi tersebut belum tersedia saat pengumuman, maka akan disampaikan selama RUPS berlangsung.

Secara umum, pemanggilan RUPS dilakukan kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dengan pengecualian tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dari perhitungan. Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat, yang mencantumkan informasi tentang tanggal, waktu, tempat, serta mata acara rapat. Selain itu, undangan juga mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan rapat yang akan dibahas dalam RUPS tersedia di kantor Bank Aladin Syariah sejak tanggal pemanggilan hingga hari pelaksanaan RUPS.

Agenda RUPS dapat ditambah sesuai kebutuhan, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank Aladin Syariah dan tambahan tersebut harus mendapat persetujuan dari peserta RUPS. Selama jalannya rapat, seluruh acara dipimpin oleh Pemegang Saham.

GMS IMPLEMENTATION

The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) begins with the process of announcing and calling for a GMS in accordance with applicable regulations. All necessary information related to the implementation of the GMS will be submitted simultaneously with the invitation to the GMS. However, if this information is not yet available at the time of the GMS announcement, the information will be provided during the GMS.

In general, a GMS summons will be sent to shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS, without considering the date of the summons and the date of the GMS. The summons for the GMS shall be made by registered letter including the date, time, place and agenda of the meeting. Apart from that, the invitation also includes information that the materials to be discussed at the GMS are available at Bank Aladin Syariah office from the date the invitation for the GMS is made until the date the GMS is held.

The GMS agenda can be added as needed as long as it does not conflict with the interests of Bank Aladin Syariah. This can be done if approved by the GMS participants. During the GMS, the event is chaired by the Shareholders.

PELAKSANAAN RUPS DI TAHUN 2024

Di tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yakni RUPS Tahunan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 26 Juni 2024 Wednesday, June 26, 2024
Waktu Time	:	Pukul 09.00 WIB – selesai 09.00 WIB – onwards
Tempat Venue	:	Ruang Candi Prambanan Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta Jl. Jendral Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Pihak-pihak yang Hadir Attendees	:	1. Dewan Komisaris I Board of Commissioners a. Rudy Hamdani (Presiden Komisaris/Independen) b. Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) c. Ationo Teguh Basuki (Komisaris) 2. Direksi I Board of Directors a. Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur) b. Firdila Sari (Direktur) c. Mayang Ekaputri (Direktur) d. Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) 3. Dewan Pengawas Syariah I Sharia Supervisory Board a. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)

GMS IMPLEMENTATION IN 2024

In 2024, Bank Aladin Syariah held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS with the following details:

RUPS Tahunan ini akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan ini, Bank Aladin Syariah menggunakan pihak independen yakni Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia untuk melakukan penghitungan suara.

This Annual GMS was also held electronically, using eASY. KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. In implementing this Annual GMS, Bank Aladin Syariah used an independent party, namely the share registrar PT Sharestar Indonesia to count the votes

Adapun keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

The resolutions of the Annual GMS are as follows:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen	Resolutions of Annual GMS on June 26, 2024 and Follow-up by the Management
Mata Acara Rapat ke-1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (”volledig acquit et de charge”) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023	**1st Meeting Agenda:** Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year ending 31 December 2023 as well as granting full repayment and release of responsibility ("volledig acquit et de charge") to members of the Board of Directors for their actions in managing the Company and members of the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2023 Fiscal Year, as long as their actions are stated in the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year
Hasil keputusan: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan laporan berkelanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (”volledig acquit et de charge”) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	**Resolutions:** Approve and ratify the Annual Report, Financial Statements and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand and twenty-three) as well as granting full repayment and release of responsibility ("volledig acquit et de charge”) to members of the Board of Directors for their management actions of the Company and Members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which have been carried out during the 2023 Fiscal Year (two thousand and twenty three), as long as their actions are stated in the Company's Financial Statements for the 2023 (two thousand twenty three) Fiscal Year.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi	**Follow-up on Resolution:** Has been realized
Mata Acara Rapat ke-2: Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	**2nd Meeting Agenda:** Determination of the appropriation of the Company's net profit/ loss for the Fiscal Year ending on December 31, 2023
Hasil keputusan: Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2023.	**Resolution:** Did not distribute Dividend for the 2023 Fiscal Year (two thousand twenty three).
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi	**Follow-up on Resolution:** Has been realized

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen	Resolutions of Annual GMS on June 26, 2024 and Follow-up by the Management
Mata Acara Rapat ke-3: Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan	**3rd Meeting Agenda:** Approval of Changes to the Company's Management
Hasil keputusan: 1. a Menerima pengunduran diri tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI dari Presiden Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan; b. Menerima pengunduran diri nyonya MAYANG EKAPUTRI dari Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan; c. Mengangkat kembali tuan RUDY HAMDANI sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan; d. Mengangkat kembali nyonya FIRDILA SARI sebagai Direktur Perseroan; e. Mengangkat tuan KOKO TJATUR RACHMADI sebagai Presiden Direktur Perseroan*; f. Mengangkat tuan JO ANULA PUTRA sebagai Direktur Perseroan;	**Resolutions:** 1. a Accept the resignation of Mr. DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI as President Director of the Company by granting full release and discharge (acquit et de charge) for his management actions, as long as such actions are reflected in the Company's books; b. Accept the resignation of Mrs. MAYANG EKAPUTRI as Director of the Company by granting full release and discharge (acquit et de charge) for her management actions, as long as such actions are reflected in the Company's books; c. Reappoint Mr. RUDY HAMDANI as President Commissioner (Independent) of the Company; d. Reappoint Mrs. FIRDILA SARI as Director of the Company; e. Appoint Mr. KOKO TJATUR RACHMADI as President Director of the Company*; f. Appoint Mr. JO ANULA PUTRA as Director of the Company;
Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:	Thus, from the closing of the Meeting, the composition of the Company's Management will be as follows:
Dewan Komisaris Presiden Komisaris (Independen): Bapak Rudy Hamdani; Komisaris: Bapak Ationo Teguh Basuki; Komisaris Independen: Ibu Fransisca Ekawati;	**Board of Commissioners** President Commissioner (Independent): Mr. Rudy Hamdani; Commissioner: Mr. Ationo Teguh Basuki; Independent Commissioner: Ms. Fransisca Ekawati;
Direksi Presiden Direktur: Bapak Koko Tjatur Rachmadi* Direktur: Ibu Firdila Sari; Direktur: Bapak Jo, Anula Putra; Direktur Kepatuhan: Ibu Baiq Nadea Dzurriatin;	**Board of Directors** President Director: Mr. Koko Tjatur Rachmadi* Director: Ms. Firdila Sari; Director: Mr. Jo, Anula Putra; Director of Compliance: Ms. Baiq Nadea Dzurriatin;
Dewan Pengawas Syariah Ketua: Bapak Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA; Anggota: Bapak Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	**Sharia Supervisory Board** Chairman: Mr. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA; Member: Mr. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si
*) Untuk pengangkatan Bapak Koko Tjatur Rachmadi sebagai Presiden Direktur Perseroan akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)	*) The appointment of Mr. Koko Tjatur Rachmadi as President Director of the Company will be effective after receiving approval from the OJK for the assessment of capability and propriety (fit and proper test).
2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.	2. Grant power of attorney to one of the Company's Directors to declare this resolution in a notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above purpose without any exceptions and at the same time notify the changes to the authorized party.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi	**Follow-up on Resolution:** Has been realized

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen	Resolutions of Annual GMS on June 26, 2024 and Follow-up by the Management
Mata Acara Rapat ke-4: Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024	**4th Meeting Agenda:** Delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2024 fiscal year
Hasil keputusan: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau Peraturan OJK.	**Resolution:** Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to: 1. Appoint and determine the Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one), 2024 (two thousand twenty-four). 2. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant; and 3. Appoint a replacement Public Accountant Firm if the said Public Accountant Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector and/or OJK Regulations.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi	**Follow-up on Resolution:** Has been realized
Mata Acara Rapat ke-5: Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	**5th Meeting Agenda:** Determination of salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for Members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board
Hasil keputusan: Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	**Resolution:** Grant and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners and delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board by taking into account the Company's financial condition.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi	**Follow-up on Resolution:** Has been realized
Mata Acara Rapat ke-6: Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum	**6th Meeting Agenda:** Reporting on the realization of the use of funds from the Public Offering
Hasil keputusan: Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).	**Resolution:** The Board of Directors has reported the Realization of the Appropriation of Proceeds from the Company's Public Offering as of December 31 (thirty-first) 2023 (two thousand twenty-three) at the Annual General Meeting of Shareholders held today, Wednesday, June 26 (twenty-six), 2024 (two thousand twenty-four).
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi	**Follow-up on Resolution:** Has been realized

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen	Resolutions of Annual GMS on June 26, 2024 and Follow-up by the Management
Mata Acara Rapat ke-7: Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	**7th Meeting Agenda:** Approval of Amendments to the Company's Articles of Association
Hasil keputusan: 1. Menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK Tata Kelola"); dan c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK Tata Kelola Syariah"). 2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.	**Resolutions:** 1. Adjust the Company's articles of association to the following Regulations: a. Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector; b. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks ("POJK on Governance"); and c. Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units ("POJK on Sharia Governance "). 2. Approve to appoint and grant power of attorney with the right of substitution, to one of the Company's Directors to state this decision in a Notarial Deed including re-drafting the entire Company's Articles of Association, and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary to achieve the above purpose without any exceptions while requesting approval for the amendments to these articles of association to the authorized agency.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi	**Follow-up on Resolutions:** Have been realized

KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2023

Di tahun 2023, Bank menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS dengan rincian yakni RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023. Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa tersebut, telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa di tahun 2023, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

1. Mata Acara Rapat Pertama
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et de charge"*) kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

2. Mata Acara Rapat Kedua
   Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2022.
3. Mata Acara Rapat Ketiga
   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
   a. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP OF OF THE 2023 GMS RESOLUTIONS

In 2023, the Bank held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS on June 21, 2023. All the resolutions of the Annual GMS have been followed up in 2024.

The resolutions of the Annual GMS and Extraordinary GMS in 2023 are as follows:

1. 1st Meeting Agenda
   Approve and ratify the Annual Report, Financial Statements and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one) 2022 (two thousand and twenty-two) as well as granting full repayment and release of responsibility ("volledig acquit et de charge") to members of the Board of Directors for their management actions of the Company and Members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which have been carried out during the 2022 Fiscal Year (two thousand and twenty two).
2. 2nd Meeting Agenda
   Not to distribute Dividend for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty two)
3. 3rd Meeting Agenda
   Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
   a. Appoint and determine a Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand and twenty-three);

b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

4. Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

5. Mata Acara Rapat Kelima
Menyesuaikan pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca dan laporan laba rugi dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

6. Mata Acara Rapat Keenam
a. Menyetujui:
- Mengangkat kembali tuan ATIONO TEGUH BASUKI sebagai Komisaris Perseroan;
- Mengangkat kembali nyonya FRANSISCA EKAWATI sebagai Komisaris (Independen) Perseroan;
- Mengangkat kembali nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;
- Mengangkat kembali tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
- Mengangkat kembali tuan SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.AG, M.SI sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

b. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant; and

c. Appoint a replacement Public Accountant Firm if the Public Accountant Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable statutory provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and/or OJK Regulations.

4. 4th Meeting Agenda
Approve the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Remuneration package along with the Allowances and Facilities provided to the Company's Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year ending December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand and twenty three) considering the Company's financial condition;

5. 5th Meeting Agenda
Adjust article 24 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the balance sheet and profit and loss statements on the PT Bursa Efek Indonesia website and the Company website, considering the provisions of applicable laws in the Capital Market sector.

Agree to appoint and grant power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors or appointed proxies to state this decision in a Notarial Deed including re-drafting Article 24 of the Company's Articles of Association, and to do so be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters letter, as well as doing everything necessary to achieve the above objectives without exception, as well as requesting approval for changes to these articles of association from the competent authority

6. 6th Meeting Agenda
a. Approve:
- To reappoint Mr. ATIONO TEGUH BASUKI as Commissioner of the Company;
- To reappoint Mrs. FRANSISCA EKAWATI as Commissioner (Independent) of the Company;
- To reappoint Mrs BAIQ NADEA DZURRIATIN as Company Director of Compliance;
- To reappoint Mr. DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A as Chairman of the Sharia Supervisory Board of the Company;
- To reappoint Mr. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.AG, M.SI as Member of Sharia Supervisory Board of the Company;

So that henceforth the composition of the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company will be as follows:

Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris (Independen): Bapak RUDY HAMDANI
- Komisaris: Bapak ATIONO TEGUH BASUKI
- Komisaris Independen: Ibu FRANSISCA EKAWATI

Direksi
- Presiden Direktur: Bapak DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
- Direktur: Ibu FIRDILA SARI
- Direktur: Ibu MAYANG EKAPUTRI
- Direktur Kepatuhan: Ibu BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah
- Ketua: Bapak Prof. DR H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A
- Anggota: Bapak SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si

b. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

7. Mata Acara Rapat Ketujuh
Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2022 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Juni 2023.

Board of Commissioners
- President Commissioner (Independent): Mr. RUDY HAMDANI
- Commissioner : Mr. ATIONO TEGUH BASUKI
- Independent Commissioner: Mrs. FRANSISCA EKAWATI

Board of Directors
- President Director : Mr. DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
- Director: Mrs. FIRDILA SARI
- Director: Mrs. MAYANG EKAPUTRI
- Director of Compliance: Mrs. BAIQ NADEA DZURRIATIN

Sharia Supervisory Board
- Chairman: Mr. Prof. DR H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A
- Member: Mr. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si

b. To authorize a member of the Company's Board of Directors to state this resolution, either in a notarial deed and for this to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters and to do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions. at the same time notify the change to the competent authority.

7. 7th Meeting Agenda
The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering as of 31 (thirty-first) December 2022 (two thousand and twenty-two) at the Annual General Meeting of Shareholders which was held today, Wednesday, 21 (twenty-first) June 2023 (two thousand twenty three).

Dewan Komisaris
The Board Of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Bank, Rencana Bisnis Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tindakan ini dilakukan demi kepentingan Bank Aladin Syariah dan sejalan dengan visi serta tujuan yang telah ditetapkan.

The Board of Commissioners is responsible for carrying out the supervisory function over the management policies out by the Board of Directors. Additionally, the Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors related to the implementation of the Bank's Long Term Plan, Bank Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as statutory regulations. All these actions are carried out in the interests of Bank Aladin Syariah and in line with the vision and objectives that have been set.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Bank apabila memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank. Kriteria atau persyaratan tersebut antara lain:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan dan perbankan, terutama perbankan syariah.
4. Mampu bekerja sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
6. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau Direktur lainnya.
9. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
10. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
11. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Komisaris.
12. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
13. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
14. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
15. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

An individual may be appointed as a member of the Bank's Board of Commissioners if they meet the criteria and requirements specified in the Bank's Articles of Association. The criteria or requirements include:

1. Able to carry out legal actions.
2. Have dedication, understand company management problems.
3. Have adequate knowledge in the fields of finance and banking, especially sharia banking.
4. Able to work together with other members of the Board of Commissioners.
5. Never been declared bankrupt by the Court.
6. Never been a Director or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
7. Never been convicted of committing a criminal act that was detrimental to state finances within 5 (five) years prior to his appointment.
8. Has no blood family relationship up to the second degree, with Controlling Shareholders, members of the Board of Commissioners and/or other Directors.
9. Have a commitment to provide adequate time.
10. Have integrity and a good reputation, that is, never directly or indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, breach of contract and other acts that are detrimental to the company where the person concerned works or has worked.
11. Have competence, namely ability and experience in fields relevant to the duties and obligations of the Commissioner.
12. Have the ability to consider a problem adequately.
13. Have the ability to discuss problems without management interference.
14. Posses good behavior and morals
15. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations.

16. Memiliki pengalaman di bidang perbankan, terutama perbankan Syariah.
17. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari otoritas yang berwenang.
18. Bagi Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan umum seperti tersebut di atas, juga berlaku syarat independensi dan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peraturan Perundangan lainnya.

KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS untuk masa jabatan yang dimulai sejak tanggal pelaksanaan RUPS tersebut hingga berakhir pada penutupan RUPS ketiga setelah tanggal pengangkatannya. Namun, RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya selesai.

Jabatan seorang anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila:
1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
4. Pengunduran dirinya efektif;
5. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan;
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH, KOMPOSISI, SUSUNAN DAN DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2024

Dewan Komisaris Bank Aladin Syariah terdiri atas 3 (tiga) anggota, dengan 2 (dua) di antaranya menjabat sebagai Komisaris Independen. Komposisi ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023, tertanggal 14 September 2023 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hingga 31 Desember 2024 dan saat Laporan Tahunan ini ditandatangani, jumlah, komposisi, serta susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan. Namun, terdapat pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada 26 Juni 2024. Dalam RUPS tersebut, para pemegang saham memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Rudy Hamdani sebagai Presiden Komisaris (Independen).

16. Have experience in Banking sector, especially Sharia banking.
17. Pass the Fit and Proper Test from the competent authority.
18. For Independent Commissioners, apart from having to fulfill the general requirements as mentioned above, independence requirements and other criteria as intended in Bank Indonesia Regulation on Good Corporate Governance (GCG) and other Legislative Regulations also apply.

TERMS OF OFFICE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to Bank's Articles of Association, the Board of Commissioners is appointed by the GMS for a period starting from the date of the GMS that appoints them and ending at the close of the third GMS after the date of appointment without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends.

The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:
1. Passed Away;
2. His term of office ends;
3. Dismissed based on the GMS;
4. His resignation is effective;
5. Declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision;
6. No longer meets applicable statutory requirements.

NUMBER, COMPOSITION, STRUCTURE AND BASIS FOR APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS THROUGHOUT 2024

The Board of Commissioners of Bank Aladin Syariah consists of 3 (three) members, with 2 (two) of them serving as Independent Commissioners. This composition has met the provisions as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023, dated September 14, 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Until December 31, 2024 and when this Annual Report was signed, the number, composition, and structure of the Board of Commissioners did not changed. However, there was a reappointment of members of the Board of Commissioners whose terms of office had ended. This was decided at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2024 Fiscal Year held on June 26, 2024. In the GMS, the shareholders decided to extend Rudy Hamdani's term of office as President Commissioner (Independent).

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

The composition and structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2024 is as follows:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024
Composition and Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	• RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 56 tanggal 29 Juli 2021. • RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa melalui No. 38 tanggal 10 Februari 2022. • RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris No. 3 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan. • Annual GMS dated July 29, 2021 as stated in the Deed of Annual GMS Resolution Statement No. 56 dated July 29, 2021. • Extraordinary GMS dated February 10, 2022 as stated in the Deed of Extraordinary GMS Resolution Statement No. 38 dated February 10, 2022. • Annual GMS dated June 26, 2024 and has been notarized in the Notarial Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024 which was passed before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.
Ationo Teguh Basuki	Komisaris Commissioner	• RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. • RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. • Circular GMS on May 28, 2020 with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. • Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Resolutions Statement No. 12 dated July 6, 2023.
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	• RUPS Sirkuler tanggal 31 Januari 2020 yang telah diaktakan melalui Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2020. • RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. • Circular GMS on January 31, 2020 which was notarized in the Notarial Deed No. 19 dated January 31, 2020. • Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Resolutions Statement No. 12 dated July 6, 2023.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* yang menjadi panduan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang terkait pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi mengenai kebijakan serta pengelolaan Bank. Dewan Komisaris telah memiliki *Board Manual* sebagai pedoman kerja, yang berupa Standar Prosedur Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk, terakhir diperbarui pada 11 November 2024.

Penyusunan *Board Manual* dilakukan dengan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi dari *Board Manual* mencakup prinsip-prinsip hukum korporasi dan ketentuan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta peraturan internal Bank Aladin Syariah yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES

In the implementation of its duties and functions, the Board of Commissioners refers to the Board Manual, which is a guide to the implementation of its duties and authority related to supervision and provision of advice to the Board of Directors regarding the policies and management of the Bank. The Board of Commissioners has in place Board Manual as the work guide in the form of the Standard Procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Bank Aladin Syariah Tbk which was last updated on November 11, 2024.

The preparation of the Board Manual for the Board of Commissioners is adjusted to the applicable laws and regulations. The Board Manual contains a collection of corporate legal principles and provisions that refer to statutory regulations, the Articles of Association and Bank Aladin Syariah's internal regulations which regulate the work procedures of the Board of Commissioners.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Pengungkapan mengenai hubungan afiliasi Dewan Komisaris mencakup hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga hingga derajat kedua. Hubungan ini melibatkan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama. Pengungkapan ini bertujuan untuk mencegah potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan yang merugikan Bank.

Per 31 Desember 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham. Hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dijelaskan sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS' AFFILIATED RELATIONSHIP

Disclosure regarding the Board of Commissioners' affiliated relationships includes financial relationships, management, share ownership, and/or family relationships up to the second degree. These relationships involve fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, as well as controlling shareholders or major shareholders. This disclosure aims to prevent potential conflicts of interest that could influence the decision-making process that are detrimental to the Bank.

As of December 31, 2024, all serving members of the Board of Commissioners have no affiliated relationship with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or shareholders. The affiliated relationships between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders are explained as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan dengan Financial Relarionship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen) President Commissioner (Independent)	x	x	x	x	x	x
Ationo Teguh Basuki	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	x	x	x	x	x	x

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh aktivitas Bank, mencakup semua tingkatan dan jenjang dalam organisasi. Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is responsible for ensuring the implementation of GCG principles throughout the Bank's activities, covering all levels and ranks within the organization. In accordance with the Bank's Articles of Association, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners include the following:

1. The Board of Commissioners is tasked with supervising and is responsible for supervising management policies, the course of management in general, both regarding Bank and Bank's business, and providing advice to the Board of Directors and is responsible for such supervision, in accordance with the Bank's goals and objectives as stipulated in the provisions of laws and regulations, articles of association and GMS Resolutions.

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
6. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
9. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan -untuk hadir guna membela diri.

2. The Board of Commissioners is obliged to carry out its duties and responsibilities independently in accordance with the principles of Good Corporate Governance and ensure the implementation of Good Corporate Governance in every Bank business activity at all levels of the organization.
3. Each member of the Board of Commissioners cannot act independently, but rather based on the decision of the Board of Commissioners.
4. In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities in supervision, the Board of Commissioners is obliged to form and determine the composition of the audit committee and other committees as determined by the laws and regulations in force in the capital market, and is obliged to evaluate the performance of the committees at the end of each Fiscal Year of the Company.

5. The Board of Commissioners at any time during Bank office working hours has the right to enter buildings and grounds or other places used or controlled by Bank and has the right to inspect all books, letters and other evidence, inventory of goods, check and check the condition of cash (for purposes verification) and other securities and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors, in such cases the Board of Directors and each member of the Board of Directors are obliged to provide explanations regarding all matters asked by members of the Board of Commissioners or experts who assist them.
6. The Board of Directors and each member of the Board of Directors are obliged to provide explanations regarding all matters asked by the Board of Commissioners.

7. The segregation of work among the members of the Board of Commissioners is regulated by the members of the Board of Commissioners themselves, and to carry out their duties smoothly the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense.
8. The Board of Commissioners has the right at any time to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their positions, if the members of the Board of Directors are deemed to have acted contrary to Bank's articles of association and applicable laws and regulations or neglected their obligations or there are urgent reasons for the Company.
9. The temporary suspension must be notified in writing to the person concerned, including the reasons.

10. Within 90 days after the date of the temporary dismissal, the Board of Commissioners is obliged to hold a GMS to revoke or confirm the temporary dismissal, while the members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are given the opportunity to attend to defend themselves.

RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
12. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
14. Dewan Komisaris wajib memastikan dan melakukan pengawasan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku);
15. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan/atau Bank Indonesia (sesuai dengan peraturan yang berlaku) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
    a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
    b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
16. Anggota Dewan Komisaris dilarang:
    a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset, merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan
    b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS; dan

The GMS is chaired by the President Commissioner and in the event that the President Commissioner is absent or not available, which does not need to be proven to a third party, the GMS will be chaired by another member of the Board of Commissioners, and in the event that no member of the Board of Commissioners is present or is absent, whichever does not need to be proven to a third party, the GMS is chaired by a person selected by and from the shareholders or their proxies who are present at the GMS.

If the GMS as referred to in paragraph 10 of this Article is not held within 90 (ninety) days after the date of the temporary suspension, the temporary dismissal becomes null and void and the person concerned returns to his/her position.

11. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissedand the Company does not have any members of the Board of Directors, then the Board of Commissioners is temporarily obliged to manage the Company, so that temporary authority is given to one or more of them on joint responsibility.
12. Under certain conditions, the Board of Commissioners is obliged to hold an Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as regulated in the articles of association and statutory regulations.
13. The Board of Commissioners may take action to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time, as stipulated in the articles of association or GMS resolutions.
14. The Board of Commissioners is obliged to ensure and supervise that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, the results of supervision by the OJK, Bank Indonesia, the Sharia Supervisory Board and/or the results of supervision by other authorities (in accordance with applicable regulations);
15. The Board of Commissioners is obliged to notify the OJK and/or Bank Indonesia (in accordance with applicable regulations) in writing no later than 5 (five) working days after the discovery of:
    a. violation of laws and regulations in the field of finance and banking, and those related to the Company's business activities; and/or
    b. circumstances or estimated circumstances that may endanger the continuity of the Company's business.
16. Members of the Board of Commissioners are prohibited from:
    a. Utilizing the Company for personal, family and/or other party interests which can reduce assets or reduce the Company's profit; and
    b. Taking and/or receiving personal benefits from the Company, in addition to remuneration and other facilities determined by the GMS.

c. Merangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
    a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik kepada Perseroan yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
    b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (sampai derajat kedua) dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan; dan
    c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima Perseroan, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dewan Komisaris akan meneliti dan mengesahkan hal-hal dibawah ini:
    a. Setiap tahun, suatu rencana kegiatan 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun yang akan datang;
    b. Sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum akhir tahun buku Perseroan: suatu rencana pemasaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang; dan suatu anggaran tahunan termasuk modal dan biaya operasional.
19. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
    a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
    b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.

    Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di sini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
20. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:
    a. Waktu kerja;
    b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
    c. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
    d. Pengaturan kewenangan dan prosedur Keputusan Dewan Komisaris;
    e. Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
    f. Larangan terhadap Dewan Komisaris;
    g. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
    h. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Holding concurrent positions, as regulated in applicable laws and regulations.

17. Members of the Board of Commissioners are required to disclose:
    a. Share ownership reaching 5% (five percent) or more, both in the Company and in other banks and companies domiciled at home and abroad;
    b. Financial and family relationships (up to the second degree) with members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of Bank;
    c. Remuneration and facilities received from the Company, in the Good Corporate Governance implementation report as regulated in applicable laws and regulations.
18. The Board of Commissioners shall examine and ratify the following matters:
    a. Every year, a 5 (five) year activity plan that will commence in the coming year;
    b. At least 30 (thirty) calendar days before the end of the Company's fiscall year: an annual marketing plan for the coming fiscal year; and an annual budget including capital and operating costs.
19. The Board of Commissioners in supervising the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is prohibited from being involved in decision-making on the Company's operational activities, except:
    a. Provision of funds to related parties in accordance with the OJK Regulation regarding the maximum limit for fund distribution and large fund distribution for sharia commercial banks; and
    b. Other matters stipulated in the Company's Articles of Association or applicable laws and regulations.

    Decision-making by the Board of Commissioners as referred to herein does not eliminate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of the Company's management.
20. The Board of Commissioners is required to have binding guidelines and rules for each member of the Board of Commissioners which at least include:
    a. Working time;
    b. Arrangement of the Board of Commissioners meetings;
    c. Duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners;
    d. Arrangement of authority and procedures for Board of Commissioners Decisions;
    e. Arrangement of work ethics of the Board of Commissioners;
    f. Prohibitions against the Board of Commissioners;
    g. Evaluation of the performance of the Board of Commissioners; and
    h. Pattern of working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

21. Dalam hal ini hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
22. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada anggota Dewan Komisaris, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait bank yang disampaikan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Hak dan wewenang anggota Dewan Komisaris antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunanbangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank.
3. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Bank kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Bank.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Bank, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

21. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities granted to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in Bank's Articles of Association also apply to him.
22. The criteria, mechanisms and procedures for the appointment, replacement, dismissal, and/or resignation of members of the Board of Commissioners, including the authority inherent in members of the Board of Commissioners, which have not been regulated in these articles of association are subject to the prevailing laws and regulations.
23. The Board of Commissioners is obliged to maintain all data and information related to the bank submitted by the Board of Directors and in accordance with the provisions of laws and regulations.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Rights and authorities of the Board of Commissioners members are as follows:

1. Members of the Board of Commissioners, both jointly and individually, have the right to audit books, documents of evidence, inventories of goods, audit and check the condition of cash (for verification purposes) and other securities and to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
2. Members of the Board of Commissioners, both together and individually, have the right to enter buildings and grounds or other places used or controlled by Bank at any time.
3. Members of the Board of Commissioners have the right to request all information relating to Bank from the Board of Directors and the Board of Directors must provide all information relating to Bank as required by members of the Board of Commi ssioners.
4. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors.
5. Request the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend the Board of Commissioners meetings.
6. Appoint and dismiss a Secretary to the Board of Commissioners.
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.
8. Establish an Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and other Committees if deemed necessary considering Bank's capabilities.
9. Use experts for certain matters and within a certain period of t ime at Bank's expense, if deemed necessary and considering applicable regulations.
10. Carry out Bank management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association.

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan atau keputusan RUPS.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan fasilitas/tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS.
14. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Bank.
15. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
16. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Bank, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
17. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
18. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
19. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
20. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
21. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
22. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya.
23. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
24. Melakukan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

PROGRAM ORIENTASI/PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Program Orientasi wajib diselenggarakan bagi anggota Dewan Komisaris yang pertama kali menjabat di Bank. Program ini dirancang untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Dewan Komisaris dengan materi yang mencakup presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, perkenalan dengan pimpinan serta karyawan, serta program lainnya sesuai kebutuhan.

11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed.
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.
13. Each member of the Board of Commissioners has the right to receive an honorarium and facilities/benefits whose amount and type are determined by the GMS.
14. Advise the Board of Directors in managing Bank.
15. Provide opinions and approval for the Company's Long Term Plan and the Company's Annual Work Plan and Budget, as well as other plans prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
16. Keep abreast of, supervise the development of Bank's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of Bank.
17. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining Company performance along with suggestions regarding corrective steps that must be taken.
18. Propose to the GMS the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books.
19. Research and review and provide responses to periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.
20. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
21. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep a copy.
22. Report to the Company regarding his or her family's share ownership in the Company and other Companies.
23. Provide a report on the supervisory tasks that have been carried out during the previous Fiscal Year to the GMS.
24. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with provisions, laws and regulations, the Articles of Association and GMS Resolutions.

ORIENTATION/INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

An orientation program must be provided to members of the Board of Commissioners who are serving at Bank for the first time. In this case, this Orientation Program is designed with the aim of improving the performance and effectiveness of the Board of Commissioners, with materials presented in this program includes presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank leaders and employees and other programs as needed.

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah tidak menyelenggarakan program orientasi atau pengenalan Bank karena tidak ada anggota Dewan Komisaris baru yang dilantik.

In 2024, Bank Aladin Syariah did not carry out an orientation or introduction program to Bank because there is no new Board of Commissioners.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Aladin Syariah secara konsisten mengikuti pelatihan atau pendidikan untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta fungsinya. Program peningkatan kompetensi berupa seminar atau pelatihan dan pendidikan. Berikut daftar kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris per 31 Desember 2024, yaitu:

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The Board of Commissioners of Bank Aladin Syariah consistently follows training or education to support and optimize the implementation of its duties and functions. The competency improvement program is in the form of seminars or training and education. The following is a list of competency development activities followed by the Board of Commissioners as of December 31, 2024, namely:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris/ Independen) (President Commissioner/ Independent)	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6 Level 6 Risk Management Alignment Seminar	Memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan risiko di tingkat strategis dan tata kelola bank. Seminar ini bertujuan agar komisaris bank dapat memahami dan mengawasi implementasi kebijakan manajemen risiko yang efektif, serta memastikan bahwa bank menjalankan praktik manajemen risiko yang sesuai dengan regulasi dan standar internasional. Providing deeper understanding and insight into risk management at the strategic level and bank governance. This seminar aims to enable bank commissioners to understand and oversee the implementation of effective risk management policies, as well as ensure that bank implement risk management practices in accordance with international regulations and standards.	Jakarta, 21-23 Agustus 2024 Jakarta, August 21-23, 2024	Banking Association for Risk Management (BARa)
	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Exam Level 6	Memastikan bahwa komisaris memiliki pemahaman dan keterampilan yang terus diperbarui terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam industri perbankan. Ensuring that commissioners have an understanding and skills that are continuously updated regarding risk management and good governance in the banking industry.	Jakarta, 12 September 2024 Jakarta, September 12, 2024	LSP Keuangan Syariah

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Ationo Teguh Basuki (Komisaris)	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Alignment Seminar	Tujuan seminar penyelarasan manajemen risiko jenjang 7 bagi komisaris independen bank adalah untuk memperkuat peran komisaris independen dalam mengawasi dan memberikan panduan terkait pengelolaan risiko di bank. The objective of the level 7 risk management alignment seminar for bank independent commissioners is to strengthen the role of independent commissioners in supervising and providing guidance on risk management in banks.	Jakarta, 17-18 Juli 2024 Jakarta, July 17-18, 2024	Banker Association for Risk Management
	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Banking Risk Management Recertification Exam Level 7	Tujuan ujian resertifikasi manajemen risiko jenjang 7 bagi komisaris bank adalah untuk memastikan bahwa komisaris memiliki pengetahuan dan kompetensi yang terus berkembang dalam bidang manajemen risiko, serta kemampuan yang lebih mendalam dalam mengawasi dan mengelola risiko di tingkat strategis. The purpose of the level 7 risk management recertification exam for bank commissioners is to ensure that commissioners have continuously developed knowledge and competencies in the field of risk management, as well as deeper capabilities in supervising and managing risks at a strategic level.	Jakarta, 6 Juli 2024 Jakarta, July 6, 2024	LSP Keuangan Syariah
	Otoritas Jasa Keuangan : Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri Financial Services Authority: 2024 Annual Meeting of Islamic Banking Accelerating Development of Sharia Banking to Build the Country	Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan dialog antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan terkait, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna mendorong pertumbuhan dan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. This meeting aims to create a dialogue between regulators, industry players, and relevant stakeholders, as well as formulate strategic steps to encourage the growth and contribution of Sharia banking to the national economy.	Jakarta, 24-26 Oktober 2024 Jakarta, October 24-26, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Certification in Audit Committee Practices	Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota komite audit dalam menjalankan tugasnya secara efektif, khususnya dalam mengawasi laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta proses audit eksternal dan internal. Providing the knowledge and skills needed by audit committee members to carry out their duties effectively, especially in overseeing financial statements, internal control system, as well as external nd internal audit processes.	Jakarta, 23-25 dan 29 Januari 2024 Jakarta, January 23-25 and 29, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6 Level 6 Risk Management Alignment Seminar	Memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan risiko di tingkat strategis dan tata kelola bank. Seminar ini bertujuan agar komisaris bank dapat memahami dan mengawasi implementasi kebijakan manajemen risiko yang efektif, serta memastikan bahwa bank menjalankan praktik manajemen risiko yang sesuai dengan regulasi dan standar internasional. Providing deeper understanding and insight into risk management at the strategic level and bank governance. This seminar aims to enable bank commissioners to understand and oversee the implementation of effective risk management policies, as well as ensure that banks implement risk management practices in accordance with international regulations and standards.	Jakarta, 21-23 Agustus 2024 Jakarta, August 21-23, 2024	Banking Association for Risk Management (BARa)
	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Exam Level 6	Memastikan bahwa komisaris memiliki pemahaman dan keterampilan yang terus diperbarui terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam industri perbankan. Ensuring that commissioners have an understanding and skills that are continuously updated regarding risk management and good governance in the banking industry.	Jakarta, 4 November 2024 Jakarta, November 4, 2024	LSP Keuangan Syariah

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui saran, rekomendasi, dan surat keputusan. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup penyelenggaraan rapat untuk membahas berbagai isu terkait pengelolaan Bank serta evaluasi kinerja Bank. Proses pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan baik secara formal melalui rapat maupun secara informal. Rapat-rapat tersebut mencakup rapat komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Penilaian kinerja komite-komite tersebut dilakukan setidaknya sekali dalam 1 (satu) tahun dengan tujuan untuk memetakan sasaran dan program kerja di tahun berikutnya.

Penilaian kinerja komite dilakukan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat kehadiran dalam rapat, kontribusi terhadap Dewan Komisaris, serta peran aktif dan inisiatif dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah direncanakan, yang dilaporkan dalam bentuk laporan komite kepada Dewan Komisaris. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Dewan Komisaris untuk memutuskan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota komite pada periode jabatan berikutnya.

Di tahun 2024, Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Komite-komite tersebut dinilai memberikan dukungan positif yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat kemampuannya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Per 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah memiliki

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

Throughout 2024, the Board of Commissioners has carried out its supervisory duties and provided advice to the Board of Directors through suggestions, recommendations, and decision letters. The implementation of these duties includes holding meetings to discuss various issues related to the management of the Bank and evaluating the Bank's performance. The process of supervision and providing advice is carried out both formally through meetings and informally. These meetings included committee meetings under the supervision of the Board of Commissioners and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In supporting the implementation of its supervisory duties, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee. Performance assessments of these committees are conducted at least once a year with the aim of mapping out targets and work programs for the following year.

The committees' performance assessment is conducted based on several aspects, such as the attendance rate at meetings, contribution to the Board of Commissioners, and active role and initiative in carrying out assigned tasks. In addition, the assessment also takes into account the realization and completion of planned work programs, which are reported in the form of committee reports to the Board of Commissioners. The results of this assessment are used as a basis for consideration by the Board of Commissioners to decide on the reappointment or dismissal of committee members for the next term of office.

In 2024, the Board of Commissioners concluded that the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee had carried out their duties and responsibilities well. These committees were considered to have provided significant positive support in supporting the implementation of the supervisory function by the Board of Commissioners.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have any financial, management, share ownership and/or family relationships with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Company that may hinder or inhibit their ability to act independently in accordance with the principles of GCG. As of December 31, 2024, Bank

Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) anggota dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris. Jumlah ini telah memenuhi persyaratan POJK No.33/POJK.04/2014 yaitu sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Anggota Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank wajib telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen;
2. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
      - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen Bank Aladin Syariah telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aladin Syariah has 2 (two) Independent Commissioners out of 3 (three) members of the Board of Commissioners. This number has met the requirements of POJK No.33/POJK.04/2014, which is 50% of the total members of the Board of Commissioners.

Criteria for Independent Commissioner Members

Independent Commissioners of the Bank must have met the following criteria:

1. Members of the Board of Commissioners who come from outside the Issuer or Public Company and meet the requirements as Independent Commissioners;
2. Posses good behavior, morals and integrity;
3. Capable of carrying out legal actions;
4. Within 5 (five) years before appointment and during office:
   a. Never declared bankruptcy;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and
   d. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners during his tenure:
      - Never held an Annual GMS;
      - His accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or he has never provided his accountability as a member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners to the GMS;
      - Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or Financial Statements to the Financial Services Authority;
      - Have a commitment to comply with laws and regulations; and
      - Have knowledge and/or expertise in the fields required by issuers or public companies.

Statement on the Independence of Independent Commissioners

All members of the Independent Commissioners of Bank Aladin Syariah have signed a Statement Letter stating that they fulfill all criteria and the independence of their positions in accordance with the criteria required by applicable laws and regulations.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertanggung jawab dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip GCG.

The Sharia Supervisory Board (DPS) is a board responsible for providing advice and suggestions to the Board of Directors as well as supervising the Bank's activities so that they run in accordance with Sharia principles while always being guided by applicable laws and regulations including GCG principles.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan jumlah, susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah. Adapun komposisi dan susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah consists of 2 (two) persons consisting of a chairman and a member. Throughout 2024 until this Annual Report is signed, there was no changes to the number, structure and composition of the Sharia Supervisory Board. The composition and structure of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 is as follows:

Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2024
Composition and Structure of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Penugasan Term of Office
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Ketua Chairman	• RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. • RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. • Circular GMS on May 28, 2020 with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. • Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023	3 tahun 3 years.
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Anggota Member	• RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. • RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023. • Circular GMS on May 28, 2020 with minutes in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. • Annual GMS dated June 21, 2023 which was notarized through the Deed of Meeting Decision Statement No. 12 dated July 6, 2023	3 tahun 3 years

Berkaitan dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait jumlah anggota DPS paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi akan dipenuhi Bank sebagaimana waktu pemberlakuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

In connection with the provisions contained in Article 10 of Financial Services Authority Regulation no. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units regarding the number of DPS members of at least 3 (three) persons or a maximum of 50% (fifty percent) of the number of members of the Board of Directors will be fulfilled by the Bank according to the implementation time that has been determined in the Financial Services Authority Regulation.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan prinsip Syariah, di antaranya:

1. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada Bank;
2. Mengawasi produk dan kegiatan usaha Bank agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Membuat Opini Syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan aspek syariah di Bank;
4. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
6. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
7. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
8. Membuat laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan wewenang DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain: kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI dan OJK. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan GCG, AD/ART DSN-MUI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 2 (dua) karyawan sebagai petugas yang menjalankan fungsi *liaison officer* dan melakukan fungsi kesekretariatan serta pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (*Syariah Management*).

INTEGRITAS, KOMPETENSI, DAN REPUTASI KEUANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pada tahun 2024, seluruh anggota DPS Bank Aladin Syariah telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh anggota DPS telah lulus *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil Kelulusan *Fit and Proper Test* melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah Bank yang pada saat itu masih bernama PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Sharia Supervisory Board has duties and responsibilities that have been adjusted to Sharia principles, including:

1. As a DSN-MUI representative assigned to Bank;
2. Supervise Bank's products and business activities so that the products and activities comply with Sharia Principles;
3. Create a Sharia Opinion based on requests/questions and/or findings on sharia aspects in Bank;
4. Assess and ensure compliance with Sharia Principles for operational and product guidelines issued by Bank;
5. Oversee Bank's new product development process so that it complies with Sharia Principles;
6. Request a fatwa from DSN-MUI for new Bank products for which there is no fatwa;
7. Conduct regular reviews on the fulfillment of Sharia Principles on the mechanism for collecting funds and channeling funds as well as Bank services;
8. Prepare a semi-annual report on the results of DPS supervision containing the results of the implementation of DPS duties and authority for 1 (one) semester, which includes, among other things: supervision work papers on Bank's new product development process; and supervisory working papers on Bank activities and submit these reports to the Board of Directors, Board of Commissioners, DSN-MUI and OJK. The report must be submitted to the OJK no later than 2 (two) months after the semester period in question ends.

DPS is guided by the Company's Articles of Association, GCG Policy, AD/ART DSN-MUI in carrying out its duties and responsibilities. Furthermore, to support the implementation of DPS duties, Bank appoints 2 (two) employee functioning as liaison officers and carrying out secretarial functions and archive management/administration for DPS (Syariah Management).

INTEGRITY, COMPETENCE AND FINANCIAL REPUTATION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS)

In 2024, all DPS members of Bank Aladin Syariah have adequate integrity, competence and financial reputation. In this regard, all DPS members have passed the fit and proper test (fit and proper test) and have obtained a Letter of Approval from BI and/or OJK as stated in the Fit and Proper Test Pass Results via letter No.12/5/DpG/ DPbS dated 23 September 2010 regarding Decisions on Candidates for Members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah in the Context of Changing Business Activities to Become a Sharia Commercial Bank and approval letter from the Financial Services Authority No.SR-33/PB.13/2016 dated December 9, 2016 regarding the Decision on the Nomination of Candidates for Bank's Sharia Supervisory Board which at that time was still called PT Bank Maybank Syariah Indonesia, as mentioned above.

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN

Berikut ini adalah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah, yaitu:

CONCURRENT POSITION AS MEMBER OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AT OTHER SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS

The followings are the concurrent positions held by members of the Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah:

Nama Name	Jabatan Lain di Luar Jabatan Anggota DPS Bank Other Positions Outside the Position of the Bank's DPS Member	Perusahaan Company
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	Ketua DPS DPS Chairman	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah PT FWD Insurance
	Anggota DPS DPS Member	PT Pegadaian (Persero)
	▯ Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ▯ Ketua Bidang Fatwa ▯ Wakil Sekretaris Badan Pengurus ▯ Deputy for Youth Development ▯ Head of Fatwa Division ▯ Deputy Secretary of the Board of Directors	Kementerian Pemuda dan Olahraga Majelis Ulama Indonesia (MUI) DSN MUI Ministry of Youth and Sports Indonesian Ulema Council (MUI) DSN MUI
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si	Ketua DPS DPS Chairman	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	Anggota DPS DPS Member	PT Indomobil Finance Syariah PT Reasuransi Syariah Indonesia
	▯ Ketua Dewan Penasihat Syariah ▯ Direktur Eksekutif Chairman of the Sharia Advisory Board Executive Director	BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)

Dengan demikian, rangkap jabatan di atas belum memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non Bank. Di samping itu, DPS tidak diperkenankan rangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Thus, the concurrent position above does not meet the provisions of the Sharia Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 dated February 16, 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which limits concurrent positions as DPS member to a maximum of 2 (two) banking sharia financial institutions and 2 (two) non-bank sharia financial institutions. In addition, the DPS is not permitted to hold concurrent positions as public official.

MEKANISME DAN FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam menjalankan tugasnya, DPS diwajibkan melakukan rapat setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Adapun setiap hasil rapat akan dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Hingga akhir 31 Desember 2024, DPS telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali rapat sebagaimana terlampir berikut ini:

MECHANISM AND FREQUENCY OF SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETINGS

In carrying out its duties, DPS is required to hold meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month. The results of each meeting will be stated in the DPS Meeting Minutes and properly documented. All DPS decisions outlined in the Minutes of DPS Meetings are joint decisions of all DPS members. As of December 31, 2024, DPS held 14 (fourteen) meetings as below:

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Reasons for the absence of the Sharia Supervisory Board at the Meeting
Senin, 15 Januari 2024 Monday, January 15, 2024 10 Rajab 1445 H	*Online, Google Meet*	1. Usulan Skema Baru untuk Pricing/Ujrah/ Fee Dompet Ekstra 2. Penyusunan Rencana Jadwal Rapat DPS dan Uji Petik Periode Tahun 2024 1. Proposed New Scheme for Pricing/ Ujrah/Extra Wallet Fee 2. b. Preparation of DPS Meeting Schedule Plan and Spot Test for the 2024 Period	Peserta rapat terdiri dari 23 orang. The meeting participants consisted of 23 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.
Kamis, 15 Februari 2024 M Thursday, February 15, 2024 5 Sya'ban 1445 H	*Online, Google Meet*	Perubahan Skema Akad Dompet Ekstra Changes to the Dompet Ekstra Contract Scheme	Peserta rapat terdiri dari 20 orang. The meeting participants consisted of 20 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat All DPS members were present at the meeting.
Jumat, 15 Maret 2024 M Friday, March 15, 2024 4 Ramadhan 1445 H	*Online, Google Meet*	Permohonan Opini DPS Atas Pengenaan Ujrah Wakalah Bagi Nasabah Request for DPS Opinion on the Imposition of Ujrah Wakalah for Customer	Peserta rapat terdiri dari 22 orang The meeting participants consisted of 22 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat All DPS members were present at the meeting.
Selasa, 23 April 2024 Tuesday, April 23, 2024 14 Syawal 1445 H	*Online (Circuler)*	Permohonan Biaya Layanan atas Produk Ala Dompet Ekstra Request for Service Fee for Ala Dompet Ekstra Product	Peserta rapat terdiri dari 7 orang. The meeting participants consisted of 7 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat All DPS members were present at the meeting.
Selasa, 30 April 2024 Tuesday, April 30, 2024 21 Syawal 1445 H	*Boardroom* Lt. 7, Gedung MCC Boardroom, MCC Building. 7th Floor	Pembukaan Rekening Deposito untuk Nasabah Korporasi Opening a Deposit Account for Corporate Customers	Peserta rapat terdiri dari 20 orang. The meeting participants consisted of 20 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat All DPS members were present at the meeting.
Selasa, 21 Mei 2024 Tuesday, May 21, 2024 12 Dzulqaidah 1445 H	*Online, Google Meet*	1. Laporan Dana Yang Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Pendapatan (TBDSP) 2. Exit Meeting Uji Petik DPS Semester I Tahun 2024 1. Report on Funds That Should Not Be Used as Income (TBDSP) 2. Exit Meeting of DPS Spot Test Semester I 2024	Peserta rapat terdiri dari 26 orang. The meeting participants consisted of 26 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Reasons for the absence of the Sharia Supervisory Board at the Meeting
Rabu, 12 Juni 2024 M Wednesday, June 12, 2024 5 Dzulhijjah 1445 H	Boardroom Lt. 7, Gedung MCC Boardroom, MCC Building. 7th Floor	1. Permohonan Opini DPS atas Skema Pembiayaan Al-Qardh Dengan Sumber Pengembalian Berupa Piutang dan/ atau Cash/Uang Tunai 2. Proposal Pengajuan Penggunaan Dana TBDSP 1. Request for DPS Opinion on Al-Qardh Financing Scheme with Refund Source in the Form of Receivables and/or Cash 2. b. Proposal for Submission of Use of TBDSP Funds	Peserta rapat terdiri dari 20 orang. The meeting participants consisted of 20 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.
Rabu, 10 Juli 2024 M Wednesday, July 10, 2024 4 Muharram 1446 H	Online, Google Meet	Permohonan Opini DPS atas Pengkinian Produk Ala Pensiun Request for DPS Opinion on Ala Pensiun Product Updates	Peserta rapat terdiri dari 20 orang. The meeting participants consisted of 20 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.
Kamis, 11 Juli 2024 M Thursday, July 11, 2024 5 Muharram 1446 H	Online, Google Meet	1. Permohonan Opini Perihal Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah Dengan Menggunakan Skema Akad *Musyarakah*. 2. Skema Pembiayaan Umrah 1. Request for Opinion Regarding the Provision of Financing to CustomerUsing the Musyarakah Contract Scheme. 2. Umrah Financing Scheme	Peserta rapat terdiri dari 24 orang. The meeting participants consisted of 24 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.
Kamis, 1 Agustus 2024 M Thursday, August 1, 2024 26 Muharram 1446 H	Online, Google Meet	Tabungan Super Flip (Co Branding Aladin x Flip) Super Flip Savings (Co Branding Aladin x Flip)	Peserta rapat terdiri dari 26 orang. The meeting participants consisted of 26 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Reasons for the absence of the Sharia Supervisory Board at the Meeting
Kamis, 26 September 2024 M Thursday, September 26, 2024 22 Rabiul Awal 1446 H	Boardroom Lt. 7, Gedung MCC Boardroom, MCC Building. 7th Floor	1. Risk Management Update 2. Pembiayaan Voucher Paket Umrah 3. Permohonan Opini DPS atas Pembiayaan Nasabah. 4. Penyampaian informasi Laporan Bagi Hasil Nasabah di atas Ekuivalen Rate Global (ERG) Bank. 1. Risk Management Update 2. Umrah Package Voucher Financing 3. Request for DPS Opinion on the Financing for Customer. 4. Submission of Customer Profit Sharing Report information on the Bank's Global Equivalent Rate (ERG).	Peserta rapat terdiri dari 23 orang. The meeting participants consisted of 23 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.
Rabu, 23 Oktober 2024 M Wednesday, October 23, 2024 20 Rabiul Akhir 1446 H	Boardroom Lt. 7, Gedung MCC Boardroom, MCC Building. 7th Floor	1. Giro Ala Bisnis Mudharabah. 2. Giro Ala Bisnis Wadiah 3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 1. Ala Bisnis Mudharabah Current Account 2. Ala Bisnis Wadiah Current Account 3. Internal Audit Work Unit (SKAI)	Peserta rapat terdiri dari 10 orang. The meeting participants consisted of 10 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Reasons for the absence of the Sharia Supervisory Board at the Meeting
Senin, 25 November 2024 Monday, November 25, 2024 23 Jumadil Awal 1446 H	Boardroom Lt. 7, Gedung MCC Boardroom, MCC Building. 7th Floor	1. Penghentian Imbal Hasil atas Rekening Terindikasi Fraud dan/atau Tindak Kejahatan/Penipuan AML 2. Risk Management Update - Profil Risiko - Perubahan TKB 3. Permohonan Persetujuan Rencana Perbaikan (Recovery Plan) 1. Termination of Returns on Accounts Indicated as Fraud and/or AML Crime/ Fraud 2. Risk Management Update - Risk Profile - TKB Changes 3. Request for Approval of Recovery Plan	Peserta rapat terdiri dari 12 orang. The meeting participants consisted of 12 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.
Jumat, 27 Desember 2024 Friday, December 27, 2024 25 Jumadil Akhir 1446 H	Online, Google Meet	1. Permohonan Opini DPS terkait Mekanisme Penagihan Wakalah bil Ujrah Invoice Financing 2. Agenda Rapat Bulan DPS 2025 dan Rapat Gabungan BOD, BOC, dan DPS 1. Request for DPS Opinion regarding the Wakalah bil Ujrah Invoice Financing Collection Mechanism 2. DPS Monthly Meeting Agenda 2025 and Joint Meeting of BOD, BOC, and DPS	Peserta rapat terdiri dari 10 orang. The meeting participants consisted of 10 persons.	Seluruh DPS hadir dalam rapat. All DPS members were present at the meeting.

Adapun rekapitulasi kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada rapat internal terlampir pada tabel berikut ini:

The recapitulation of the Sharia Supervisory Board's attendance at internal meetings is attached in the following table:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Internal
Recapitulation of the Sharia Supervisory Board's Attendance at Internal Meetings

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board (DPS)	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Ketua DPS)(DPS Chairman)	12	14	116,67%
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si (Anggota DPS) (DPS Member)	12	14	116,67%
Rata-rata Average			**116,67%**

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, wajib disampaikan kepada manajemen Bank setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I 2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.185.BOD/8.2024 tanggal 30 Agustus 2024 M/25 Shafar 1446 H dan Laporan Dewan Pengawas Syariah Semester II 2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.047.BOD/02.2024 tanggal 28 Februari 2024.

Aktivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Syariah *Compliance Officer* yang sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank. Dari pengawasan tersebut, produk-produk Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Syariah *Compliance Officer* juga telah melakukan kajian dan pembahasan atas usulan produk/aktivitas baru sebagai berikut:

1. Produk Ala Deposito
2. Fasilitas Pembiayaan Ala Pensiun
3. Fitur Transfer dan Tarik Setor Tunai pada BaaS
4. Kerja sama Mitra Bayar Taspen
5. Kerja sama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank antara PT Bank Aladin Syariah Tbk dengan PT Zurich General Takaful Indonesia
6. Ala Dompet Ekstra Qardh
7. Tabungan Perantara Pembiayaan
8. Produk Tabungan Super Flip
9. Produk Pembiayaan Qardh dengan Sumber Pengembalian Berupa Piutang dan/atau *Cash*/Uang Tunai
10. Produk Giro Ala Bisnis Mudharabah
11. Produk Giro Ala Bisnis Wadiah

Produk/aktivitas baru tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI.

IMPLEMENTATION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD'S DUTIES

The Sharia Supervisory Board Supervision Report must be submitted to Bank management every 6 (six) months. Next, the report is submitted to DSN-MUI and the Financial Services Authority. The Sharia Supervisory Board's Supervision Report for Semester I 2024 was already submitted to the Financial Services Authority via Letter No. S.185.BOD/8.2024 dated August 30, 2024 and the Report of the Sharia Supervisory Board Semester II 2024 was already submitted to the Financial Services Authority via Letter No. S.047.BOD/02.2024 dated 28 February 2024.

The supervisory activities of the Sharia Supervisory Board include supervision of the implementation of sharia principles in fund collection and distribution activities as well as service delivery. In carrying out supervision, the Sharia Supervisory Board is assisted by Sharia Compliance Officers who have adequate knowledge and/or understanding of sharia banking operations.

Throughout 2024, the Sharia Supervisory Board conducted supervision on fund collection products, fund distribution and Bank services. From this supervision, the Bank's products were generally in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

The Sharia Supervisory Board, assisted by the Sharia Compliance Officer, has also conducted studies and discussions on proposed new products/activities as follows:

1. Ala Deposito Products
2. Ala Pensiun Financing Facilities
3. Cash Transfer and Withdrawal Features on BaaS
4. Cooperation with Taspen Payment Partners
5. Bancassurance Cooperation Reference Business Model in the Framework of Bank Products between PT Bank Aladin Syariah Tbk and PT Zurich General Takaful Indonesia
6. Extra Qardh Ala Dompet
7. Financing Intermediary Savings
8. Super Flip Savings Products
9. Qardh Financing Products with Refund Sources in the Form of Receivables and/or Cash
10. Ala Bisnis Mudharabah Current Accounts Products
11. Ala Bisnis Wadiah Current Accounts Products

The new products/activitieas are already in accordance with and does not conflict with sharia principles as stipulated in the DSN-MUI Fatwa.

Direksi
Board Of Directors

Direksi adalah organ GCG yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan atas Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank Aladin Syariah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam hal ini, Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Anggota Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

KRITERIA DIREKSI

Anggota Direksi Bank merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank. Berikut adalah kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
      - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

The Board of Directors is a GCG organ that is tasked and collectively responsible for managing THE Bank for the interests and objectives of Bank Aladin Syariah in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and implementing GCG at all levels or levels of the organization. In this case, the Board of Directors can represent the Bank, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association and manage the Company as intended in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In addition, members of the Board of Directors are required to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability and fairness.

BOARD OF DIRECTORS' CRITERIA

Members of Bank's Board of Directors are individuals who meet the criteria and requirements as stated in Bank's Articles of Association. The following are the criteria or requirements that must be met by someone to serve as a member of the Company's Board of Directors:

1. Posses good behavior, morals and integrity;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office:
   a. Never declared bankruptcy;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and
   d. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners during his tenure:
      - Once did not hold an annual GMS;
      - His accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided his accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS;
      - Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or Financial Statements to the Financial Services Authority;
      - Have a commitment to comply with laws and regulations; and
      - Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company.

KETENTUAN MASA JABATAN DIREKSI

Sebagaimana yang dimuat dalam Anggaran Dasar Bank, Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Adapun jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
4. Pengunduran dirinya efektif;
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH, KOMPOSISI, SUSUNAN DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2024

Direksi Bank Aladin Syariah terdiri atas 4 (empat) anggota dengan komposisi yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tertanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hingga 31 Desember 2024, serta pada saat Laporan Tahunan ini ditandatangani, terjadi perubahan pada jumlah, komposisi, dan susunan Direksi. Selain itu, terdapat pengangkatan kembali salah satu anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir. Hal ini sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada 26 Juni 2024. Dalam RUPS Tahunan tersebut, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat Koko Tjatur Rachmadi sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Jo, Anula Putra sebagai Direktur, serta mengangkat kembali Firdila Sari sebagai Direktur. Adapun komposisi dan susunan Direksi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

TERMS OF OFFICE FOR THE BOARD OF DIRECTORS

As stated in the Bank's Articles of Association, the Board of Directors is appointed by the GMS for a period starting from the date of the GMS that appointed them and ending at the close of the third GMS after the date of appointment without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Directors at any time before their term of office ends. The position of a member of the Board of Directors may end in the event of:

1. Demise;
2. His term of office ends;
3. Dismissed based on the GMS;
4. His resignation is effective;
5. No longer meets applicable statutory requirements.

NUMBER, COMPOSITION, STRUCTURE AND BASIS FOR APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS THROUGHOUT 2024

The Board of Directors of Bank Aladin Syariah consists of 4 (four) members, which the composition of the Board of Directors is in accordance with the provisions in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Until December 31, 2024, and at the time this Annual Report is signed, there have been changes in the number, composition, and structure of the Board of Directors. In addition, there was a reappointment of one of the members of the Board of Directors whose term of office had ended. This is in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 Fiscal Year held on June 26, 2024. In the Annual GMS, the shareholders decided to appoint Koko Tjatur Rachmadi as President Director of the Company and Jo, Anula Putra as Director, and to reappoint Firdila Sari as Director. The composition and structure of the Board of Directors as of December 31, 2024 are as follows:

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2024
Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dengan berita acara dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan. Annual GMS on June 26, 2024 with minutes in the Deed of Meeting Resolutions Statement No. 3 dated July 1, 2024 passed before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.
Firdila Sari	Direktur Director	• RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021. • RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dengan berita acara dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan. • Extraordinary GMS dated April 7, 2021 as stated in the Deed of Extraordinary GMS Resolutions Statement No. 11 dated April 7, 2021. • Annual GMS on June 26, 2024 with minutes in the Deed of Meeting Resolutions Statement No. 3 dated July 1, 2024 passed before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.
Jo, Anula Putra	Direktur Director	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dengan berita acara dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan. Annual GMS on June 26, 2024 with minutes in the Deed of Meeting Resolutions Statement No. 3 dated July 1, 2024 passe before Notary Yulia SH, Notary in South Jakarta.
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	• RUPS Sirkuler tanggal 31 Januari 2020 yang telah diaktakan melalui Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2020. • RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 12 tanggal 6 Juli 2023. • Circular GMS dated January 31, 2020, which was notarized through Deed No. 19 dated January 31, 2020. • Annual GMS dated June 21, 2023 as stated in the Deed of Annual GMS Resolution Statement No. 12 dated July 6, 2023.

INTEGRITAS, KOMPETENSI DAN REPUTASI KEUANGAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* serta telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:
    a. Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-18/PB.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Koko Tjatur Rachmadi Selaku Calon Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
    b. Firdila Sari (Direktur Digital Banking), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 167/D.03/2021 tanggal 11 November

INTEGRITY, COMPETENCE AND FINANCIAL REPUTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

All members of Bank's Board of Directors have fulfilled several criteria in accordance with applicable regulations, including:

1. The President Director comes from a party who is independent from the controlling shareholder.
2. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.
3. All members of the Board of Directors have passed the Fit & Proper Test and have obtained a letter of approval from Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority, namely as follows:
    a. Koko Tjatur Rachmadi (President Director), the result of passing the Fit & Proper Test is based on the Copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-18/PB.02/2024 dated August 23, 2024 concerning the Results of the Capability and Properness Assessment of Mr. Koko Tjatur Rachmadi as a Candidate for President Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
    b. Firdila Sari (Director of Digital Banking), the result of passing the Fit & Proper Test is based on a copy of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Firdila Sari Selaku Calon Direktur Digital Banking PT Bank Aladin Syariah Tbk.

c. Jo, Anula Putra (Direktur), dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor KEPR-5/PB.02/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Jo, Anula Putra Selaku Calon Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
d. Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah di mana Ibu Baiq Nadea Dzurriatin disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang perbankan.
5. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai berikut:
   a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
   b. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
   c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.
   d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan.
7. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

No. Kep 167/D.03/2021 dated November 11, 2021 regarding the Result of the Fit and Proper Test of Ms. Firdila Sari as Candidate for Digital Banking Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

c. Jo, Anula Putra (Director), has been declared to have passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Copy of the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-5/PB.02/2024 dated June 11, 2024 concerning the Result of the Fit and Proper Test for Mr. Jo, Anula Putra as a Candidate for Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
d. Baiq Nadea Dzurriatin (Director of Compliance), result of passing Bank Indonesia Fit & Proper Test based on Bank Indonesia letter No. 12/5/DpG/DPbS dated 23 September 2010 concerning Decisions on Candidates for Members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of Bank Brothers in the Context of Changing Business Activities to become a Sharia Commercial Bank where Mrs. Baiq Nadea Dzurriatin has been approved by Bank Indonesia as Director of Compliance of PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

4. The majority of members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in Banking sector.
5. All Directors do not hold concurrent positions as follows:
   a. As a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board, or executive officer at a bank, company and/or other institution.
   b. In the area of functional duties at Bank financial institutions and/or non-Bank financial institutions located at home or abroad.
   c. In other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out their duties as a member of the Board of Directors.
   d. In other positions in accordance with statutory provisions.
6. Members of the Board of Directors, individually or collectively, do not own shares in other companies amounting to 25% (twenty f ive percent) or more of the company's paid-up capital.
7. The majority of members of the Board of Directors do not have family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Bank Aladin Syariah telah memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) Direksi, yakni Standar Prosedur Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang terakhir diperbarui pada 28 Juli 2023. Pedoman Kerja Direksi ini merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Bank telah memiliki ketentuan internal terkait tata tertib Direksi dan Dewan Komisaris yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Organisasi dan Kewenangan
3. Pelaksanaan Waktu Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
4. Ketentuan Alternate
5. Ketentuan Rapat
6. Keterbukaan Informasi
7. Kode Etik Dewan Komisaris dan Direksi
8. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi
9. Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi
10. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (job description), Terms of Reference (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

BOARD OF DIRECTORS' WORK GUIDELINES

Bank Aladin Syariah has a Board Manual for Board of Directors, namely the Standard Procedures for the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Aladin Syariah Tbk, which was last updated on July 28 2023. This Board of Directors Work Manual is a reference for the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities optimally, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations. Bank has internal provisions related to the rules of conduct for the Board of Directors and Board of Commissioners which regulate the following matters:

1. Introduction
2. Organization and Authority
3. Implementation of Working Hours for the Board of Commissioners and Directors
4. Alternate Terms
5. Meeting Terms
6. Information Disclosure
7. Code of Conducts for the Board of Commissioners and Directors
8. Enhancement of the Competency of the Board of Commissioners and the Board of Directors
9. Official Travel of the Board of Commissioners and Directors
10. Closing

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties for the benefit of the Bank in achieving its aims and objectives based on prudential principles and Sharia Principles. The Board of Directors also implements GCG principles in every business activity of the Bank at all levels and ranks of the organization. The Board of Directors has in place work guidelines and rules listed in the Articles of Association, segregation of duties and responsibilities of the Board of Directors (job description), Terms of Reference (TOR) for BOD Meetings, and GCG Policy.

1. The Board of Directors is responsible for managing the Bank and is accountable for the Bank's operations in the interest of the Bank, in accordance with the objectives and purposes as stipulated in prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. The Board of Directors must carry out its duties, authorities, and responsibilities in good faith and with prudence.
3. The Board of Directors is authorized to represent the Bank in accordance with prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.
4. The Board of Directors implements good governance, risk management, and compliance in an integrated manner, adjusted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.

5. Dalam rangka melaksanakan *Good Corporate Governance*, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
   a. Audit Intern (SKAI).
   b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
   c. Kepatuhan.

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya.

1. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
2. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
   a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
   b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Untuk proyek bersifat khusus;
   b. Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
   c. Dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada poin no 1);
   d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
   e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
4. Berkaitan dengan tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud di dalam peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan OJK.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan regulator, audit intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
9. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

5. In carrying out Good Corporate Governance, the Board of Directors must establish at least the following functions:
   a. Internal Audit (SKAI);
   b. Risk Management and the Risk Management Committee;
   c. Compliance.

These functions operate independently and are separate from other operational units.

1. The Board of Directors must disclose strategic internal policies related to human resources to employees.
2. In managing the Bank's data and information, the Board of Directors is required to:
   a. Possess and provide accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board; and
   b. Manage data and information in accordance with good governance principles and applicable laws and regulations.
3. The Board of Directors may only assign consultants, advisors, or similar parties if the following criteria are met:
   a. For specific projects;
   b. Based on a clear work contract;
   c. Conducted by independent parties possessing specific technical knowledge and adequate professional qualifications to carry out the specific project referred to in point a;
   d. Conducted by parties not holding structural positions within the Bank; and
   e. Conducted by parties who do not have authority to make operational decisions for the Bank.
4. In relation to actions classified as material transactions and/or conflicts of interest as referred to in OJK regulations, the Board of Directors must comply with the requirements set out therein.
5. The Board of Directors must follow up on audit findings and/or recommendations resulting from regulatory supervision, internal audits, the Sharia Supervisory Board, and/or external auditors.
6. The Board of Directors is accountable to shareholders for the performance of its duties through the GMS.
7. Members of the Board of Directors are prohibited from granting general powers of attorney to other parties that would result in the delegation of the Board's duties and functions.
8. Every decision made by the Board of Directors is binding and becomes the collective responsibility of all members of the Board.
9. The Board of Directors is responsible for implementing risk management policies and overseeing the Bank's overall risk exposure. In this regard, the Board has established and implemented a transaction approval mechanism, evaluated and decided on transactions requiring Board approval, and fostered a risk management culture across all organizational levels.

10. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, antara lain melalui forum town-hall dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
11. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

WEWENANG DIREKSI

Di samping tugas dan tanggung jawab Direksi, Bank juga telah mengatur kewenangan Direksi pada ketentuan internal yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Bank sejumlah uang yang nilainya melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Bank di Bank).
   b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
   c. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap.
   d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Bank.
   e. Mengikat Bank sebagai penjamin.
2. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS:
   a. Mengalihkan kekayaan Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Bank yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Bank dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
   c. Harus mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Berikut ini merupakan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing Direksi, yaitu:

10. The Board of Directors has developed the Bank's Business Plan (RBB) in a realistic, comprehensive, and measurable manner, considering the principles of prudence and responsiveness to internal and external changes. The Board has also communicated the RBB to the Bank's shareholders and all organizational levels, including through town-hall forums and regular staff meetings.
11. The Board of Directors has provided training programs for all employees to continuously enhance their skills and competencies.

BOARD OF DIRECTORS' AUTHORITIES

In addition to the duties and responsibilities of the Board of Directors, Bank has also regulated the authorities of the Board of Directors in internal regulations which regulate several matters as follows:

1. Authority of the Board of Directors which must be approved by the Board of Commissioners:
   a. Borrowing or lending money on behalf of Bank in an amount whose value exceeds the authority of the Board of Directors which will from time to time be determined in writing by the Board of Commissioners (in this case it does not include taking Bank money at Bank).
   b. Establishing a business or participating in other companies both at home and abroad.
   c. Purchasing or otherwise obtaining right to fixed assets.
   d. Selling or otherwise relinquishing rights to fixed assets and companies or encumbering Bank's assets.
   e. Binding Bank as guarantor.
2. Authority of the Board of Directors which must obtain approval from the GMS:
   a. Transfer Bank assets within a period of 1 (one) Fiscal Year; or
   b. Serve as collateral for debts of Bank's assets which constitute more than 50% of the total net assets of Bank in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other;
   c. Must obtain approval from the GMS which meets the attendance quorum of at least ¾ (three-quarters) of the total shares with valid voting rights and is approved by more than ¾ (three-quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS.

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH DIRECTOR

The following is the scope of work and responsibilities of each Director, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	Membawahi seluruh direktorat serta membawahi unit kerja yang berada langsung di bawahnya yaitu: Anti Fraud Management dan Internal Audit Supervises all directorates and supervises the work units directly below them, namely: Anti Fraud Management and Internal Audit
Firdila Sari	Direktur Director	Membawahi Unit Kerja sebagai berikut: Information & Technology, Digital Product Management, Digital Product Design, Digital Product Financing, Commercial dan Product Performance Supervises the following Work Units: Information & Technology, Digital Product Management, Digital Product Design, Digital Product Financing, Commercial and Product Performance
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Membawahi Unit Kerja sebagai berikut: Business Risk Control, Compliance & Legal, Enterprise & Operational Risk Management, Risk Analytic dan Financing Risk Management Supervises the following Work Units: Business Risk Control, Compliance & Legal, Enterprise & Operational Risk Management, Risk Analytics and Financing Risk Management
Jo, Anula Putra	Direktur Director	Membawahi Unit Kerja sebagai berikut: Treasury, Corporate Secretary & Investor Relations, Business Finance. Supervises the following Work Units: Treasury, Corporate Secretary & Investor Relations, Business Finance.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah saham pada Bank, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri. Anggota Direksi, baik secara sendiri atau bersama sama, dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

BOARD OF DIRECTORS' SHARE OWNERSHIP

All Directors do not have share ownership that reaches 5% (five percent) or more of the paid-up capital, including the type and number of shares in Bank, as well as banks and other companies domiciled at home or abroad. Members of the Board of Directors, either individually or together, are prohibited from owning shares of more than 25% of the paid-up capital in other companies.

RANGKAP JABATAN

Bank telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selama tahun 2023 tidak ada Direksi yang memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/instansi lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Berikut merupakan tabel rangkap jabatan dari anggota Direksi Bank:

CONCURRENT POSITIONS

Bank has fulfilled the provisions for concurrent positions for members of the Board of Directors as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. During 2024, no Directors held concurrent positions in other companies/instituions which could give rise to potential conflicts of interest. The following is a table of concurrent positions of members of Bank's Board of Directors:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Institutions	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies/Institutions
Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Does not hold position in other companies/institutions	-
Firdila Sari	Direktur Director	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Does not hold position in other companies/institutions	-
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Does not hold position in other companies/institutions	-
Jo, Anula Putra	Direktur Director	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain Does not hold position in other companies/institutions	-

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Dalam pemenuhan pelaksanaan GCG anggota Direksi mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih;
2. Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.
3. Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
4. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

BOARD OF DIRECTORS' AFFILIATED RELATIONSHIP

In fulfilling the implementation of GCG, members of the Board of Directors have expressed several things as follows:

1. Share ownership reaching 5% (five percent) or more;
2. All members of the Board of Directors do not have share ownership that reaches 5% (five percent) or more of the paid-up capital, including the type and number of shares in Bank or in other Banks and/or companies domiciled at home or abroad.
3. Financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of Bank; and
4. Family relationships up to the second degree with other Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of Bank.

Berkaitan dengan poin b dan c di atas dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Regarding points b and c above, it can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholder	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholder
Koko Tjatur Rachmadi	Presiden Direktur President Director	x	x	X	X	x	x
Firdila Sari	Direktur Director	x	x	X	X	x	x
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	x	x	X	X	x	x
Jo, Anula Putra	Direktur Director	x	x	x	X	x	x

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Direksi yang baru pertama kali menjabat di Bank Aladin Syariah diwajibkan untuk mengikuti program orientasi yang dirancang guna meningkatkan fungsi serta efektivitas kerja mereka. Program ini mencakup materi seperti presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, perkenalan dengan pimpinan dan pegawai, serta berbagai program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyiapkan materi program orientasi, termasuk Program Pengenalan Bank mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam Bank;
2. Visi, misi, strategi, risiko, posisi kompetitif, kinerja keuangan dan operasional;
3. Kewenangan Komite, Audit Internal dan Eksternal dan Sistem Pengendalian Internal.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

Members of the Board of Directors who are serving for the first time at Bank Aladin Syariah are required to take part in an induction program which aims to improve the function and effectiveness of the work of the Board of Directors. This program includes materials such as presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to leaders and employees, and various other programs tailored to the needs.

In its implementation, the Corporate Secretary is responsible for preparing introduction program materials which include Bank Introduction Program covering:

1. Implementation of GCG principles within the Bank;
2. Vision, mission, strategy, risks, competitive position, financial and operational performance;
3. Authorities of Committees, Internal and External Audits, and Internal Control System.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kapabilitas serta fungsi Direksi, Bank Aladin Syariah senantiasa mengikutsertakan Direksi dalam program peningkatan kompetensi baik berupa seminar atau pelatihan. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF DIRECTORS' COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

In order to improve and optimize the capabilities and functions of the Board of Directors, Bank Aladin Syariah always involves the Board of Directors in competency improvement programs in the form of seminars or training. The competency improvement activities that the Board of Directors participated in throughout 2024 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/ Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur) (President Director)	Otoritas Jasa Keuangan : Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri Financial Services Authority: 2024 Annual Meeting of Islamic Banking Accelerating Development of Sharia Banking to Build the Country	Meningkatkan pemahaman bersama mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Increasing shared understanding of the potential and challenges faced by Sharia banking in Indonesia, and encouraging collaboration between various parties, including banking institutions, government, academics, and the community.	24-26 Oktober 2024 October 24-26, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Provision Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	19 Juni 2024 June 19, 2024	PT Raharja Duta Solusindo
	Program Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Alignment Program	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	13 - 14 Agustus 2024 August 13-14, 2024	Indonesia Risk Professional Association

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/ Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Exam Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	30 Agustus 2024 August 30, 2024	LSP Keuangan Syariah
Firdila Sari (Direktur) (Director)	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Provision Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	19 Juni 2024	PT Raharja Duta Solusindo
	Program Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Alignment Program	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	13 - 14 Agustus 2024 August 13-14, 2024	Indonesia Risk Professional Association
	Pembekalan Sertifikasi Tresuri Jenjang 7 Treasury Certification Provision Level 7	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional di bidang manajemen treasury, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko perusahaan. Improving professional skills and competencies in the field of treasury management, especially for those who have important roles in managing corporate finance and risk.	24 Agustus 2024 August 24, 2024	APUVINDO

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/ Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Recertification Exam Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	30 Agustus 2024 August 30, 2024	LSP Keuangan Syariah
Jo Anula Putra (Direktur) (Director)	Climate Risk Management System Training	Mengetahui kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Understanding the integrated framework that includes aspects of governance, strategy, risk management, and disclosure to assess the resilience of the bank's business model and strategy in facing climate change in the short, medium and long terms.	3-4 Desember 2024 December 3-4, 2024	Tri Hita Karana Consulting
	Pemahaman Konsep dan Implementasi Bagi Hasil Training Understanding the Concept and Implementation of Training Profit Sharing	Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan mekanisme bagi hasil dalam konteks keuangan dan perbankan syariah. Providing an in-depth understanding of the principles and mechanisms of profit sharing in the context of Sharia finance and banking.	23-24 Desember 2024 December 23-24, 2024	Muamalat Institute

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/ Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Banking Risk Management Recertification Exam Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	19 Juni 2024 June 19, 2024	LSP Keuangan Syariah
	Pembekalan Persiapan Ujian Klarifikasi (Fit & Proper) OJK - Calon Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk Provision on the Preparation for the OJK Clarification Test (Fit & Proper) - Candidate for Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk	Mempersiapkan calon direktur dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan guna memenuhi standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam ujian Fit & Proper Test. Preparing prospective directors with the knowledge, skills and understanding needed to meet the standards set by the Financial Services Authority (OJK) in the Fit & Proper Test.	29 - 30 April 2024 April 29-30, 2024	PT Dakaratama Global Kreasi
	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 Banking Risk Management Recertification Provision Level 7	Memastikan bahwa para profesional di industri perbankan memiliki pemahaman yang mutakhir dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko secara efektif sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that professionals in the banking industry have the latest understanding and skills needed to manage risk effectively in accordance with the latest developments in the banking industry and applicable regulations.	10 Mei 2024 May 10, 2024	PT Dakaratama Global Kreasi

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

1. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:
   a. Audit Intern (SKAI).
   b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
   c. Kepatuhan.

   Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut ditetapkan dalam peraturan internal Bank.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS' DUTIES

1. In order to implement GCG, the Board of Directors has established the following functions:
   a. Internal Audit (SKAI).
   b. Risk Management and Risk Management Committee.
   c. Compliance.

   These functions have operated independently and separately from other operational units. Furthermore, the implementation of these functions is stipulated in Bank's internal regulations.

2. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
3. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, antara lain melalui forum *town-hall* dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
4. Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dasar penilaian terhadap Komite di bawah Direksi adalah dengan mempertimbangkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam rencana kerja dan dilaporkan kepada Direksi dalam laporan komite. Sepanjang tahun 2024, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik, serta memberikan dukungan yang positif dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengurusan oleh Direksi.

2. The Board of Directors is responsible for the implementation of Risk Management policies and risk exposure taken by Bank as a whole. Within this framework, the Board of Directors has developed and established a transaction approval mechanism, evaluated and decided on transactions that require approval from the Board of Directors, and developed a risk management culture at all levels of the organization.
3. The Board of Directors has prepared a realistic, comprehensive and measurable Bank Business Plan (RBB) by considering the principles of prudence and being responsive to internal and external changes. The Board of Directors has also communicated the RBB to Bank's shareholders and all levels of organizations in Bank, including through town-hall forums and staff meetings which are held regularly.
4. The Board of Directors has followed up and monitored every finding and recommendation from SKAI, external audits, and results of supervision by the Financial Services Authority, Sharia Supervisory Board, and/or results of supervision by other authorities.
5. The Board of Directors has provided training programs for all employees in order to continuously improve employee skills and abilities.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The basis for evaluating committees under the Board of Directors is by considering the realization and completion of the work program stated in the work plan and reported to the Board of Directors in the committee report. Throughout 2024, the Board of Directors assesses that the Committees under the Board of Directors have carried out their respective duties and responsibilities properly, as well as providing positive support in the implementation of management and management functions by the Board of Directors.

Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris Dan Direksi

Transparency Of Information Related To The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah belum menetapkan kebijakan terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun kewenangan untuk mengangkat Komisaris dan Direktur Bank merupakan hak dari Pemegang Saham dalam RUPS. Namun, Bank menyadari bahwa keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Dengan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Bank Aladin Syariah diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Bank.

POLICY ON DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2024, Bank Aladin Syariah has not yet established a policy regarding the diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The authority to appoint Bank Commissioners and the Board of Directors is the right of Shareholders at the GMS. However, Bank realizes that diversity of expertise, experience and educational background will support the effective implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

With the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Aladin Syariah, it is hoped that it can provide alternative problem solving and encourage more objective, comprehensive, optimal decision making and have a positive impact on the supervision and management of the Bank.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Dewan Komisaris						
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris Independen) (President Commissioner (Independent)	Indonesia Indonesian	Laki-laki Male	62	Bachelor of Science in Economics and Business Administration dari St. Mary College of California (1987) Bachelor of Science in Economics and Business Administration from St. Mary College of California (1987)	• Komisaris Utama PT Danakita Investama (2013-sekarang) • Vice President Director PT Sequis Life Insurance Indonesia (2017-2018) • Direktur Perbankan di PT Bank OCBC NISP Tbk (2000-2007) • Direktur Perbankan di Bank International Indonesia (BII) (2000-2013) • Account Officer di Bank International Indonesia (BII) (1989-2000) • President Commissioner of PT Danakita Investama (2013-2022) • Vice President Director of PT Sequis Life Insurance Indonesia (2017-2018) • Banking Director at PT Bank OCBC NISP Tbk (2000-2007) • Banking Director at Bank International Indonesia (BII) (2000-2013) • Account Officer at Bank International Indonesia (BII) (1989-2000)	Perbankan Banking

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia Indonesian	Laki-laki Male	64	Sarjana Teknik Elektro dari ITB Bandung, Jawa Barat (1985) Bachelor of Electrical Engineering from ITB Bandung, West Java (1985)	• Direktur Kepatuhan Index (2018- 2019) • Direktur IT & E-Channel Bank Index (2015-2018) • Direktur Pengembangan Bisnis Bank Index (2011-2015) • Direktur Bisnis Support Bank Index (2008-2011) • Advisor untuk Direksi di Bidang Operasional Bank Index (2008-2008) • Kepala Bidang Operasi di Panin Bank (2004-2007) • Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU di Panin Bank (1997-2003) • Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di Panin Bank (1996- 1997) • Pemimpin KCP Tanah Abang di Panin Bank (1994-1995) • Koordinator Marketing KCU Senayan di Panin Bank (1993-1994) • Director of Compliance of Bank Index (2018 2019) • Director of IT & E-Channel of Bank Index (2015 2018) • Director of Business Development of Index Bank (2011-2015) • Business Support Director of Bank Index (2008 2011) • Advisor to the Board of Directors in the Field of Bank Index Operations (2008-2008) • Head of Operations at Panin Bank (2004-2007) • Head of KCU Services at Panin Bank (1997 2003) • Head of Operations Administration Section of KCU Senayan at Panin Bank (1996-1997) • Head of KCP Tanah Abang at Panin Bank (1994-1995) • Marketing Coordinator for KCU Senayan at Panin Bank (1993-1994)	Perbankan Banking

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia Indonesian	Perempuan Female	59	Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia (1988) Bachelor of Economics Majoring in Management from Universitas Kristen Indonesia (1988)	• Direktur PT Sippa Kemasan Internasional (April 2020-September 2021) • General Manager Treasury PPA (2019-2020) • General Manager Business Advisory & Asset Management PPA (2014-2019) • General Manager Monitoring and Administration of Equity Management PT PPA (2004-2014) • Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank pada Unit Restrukturisasi Bank di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004) • Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang PT Bank Pesona Kriyadana (1989) • Director of PT Sippa Kemasan Internasional (April 2020 - September 2021) • General Manager Treasury of PPA (2019-2020) • General Manager Business Advisory & Asset Management of PPA (2014-2019) • General Manager Monitoring and Administration of Equity Management of PT PPA (2004-2014) • Group Head of Bank Management Analysis and Review at Bank Restructuring Unit at the National Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2004) • Head of Branch Development Sub Division of PT Bank Pesona Kriyadana (1989)	Perbankan Banking
Direksi Board of Directors						

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur) (President Director)	Indonesia Indonesian	Laki-laki Male	54	Sarjana Matematika dari Universitas Gadjah Mada (1995) Bachelor of Mathematics from Gadjah Mada University (1995)	• CEO PT Bank KB Bukopin Syariah (2023 – 2024) • Business Director di PT Bank BJB Syariah (2021 – 2023) • Executive Vice President – Head of Sharia Business Unit di PT Bank OCBC NISP Tbk (2006 – 2021) • Senior Assistant Vice President, Liability Product Development Head di PT Bank OCBC NISP Tbk (2006 - 2010); • Liabilities Product Department Head di PT Bank Mega Tbk (2004 - 2006); • Time Deposit & Support Manager PT di Bank Permata Tbk (2003 - 2004) • CEO of PT Bank KB Bukopin Syariah (2023 – 2024) • Business Director of PT Bank BJB Syariah (2021 – 2023) • Executive Vice President – Head of Sharia Business Unit at PT Bank OCBC NISP Tbk (2006 – 2021) • Senior Assistant Vice President, Liability Product Development Head at PT Bank OCBC NISP Tbk (2006 - 2010); • Liabilities Product Department Head at PT Bank Mega Tbk (2004 - 2006); • Time Deposit & Support Manager at PT Bank Permata Tbk (2003 - 2004)	Perbankan Banking

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Firdila Sari (Direktur) (Director	Indonesia Indonesian	Perempuan Female	39	Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007) Bachelor of Economics from Universitas Indonesia (2007)	• Digital Banking Group Head di PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021) • Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) • Vice President, Head of Mobile Products di PT Bank Commonwealth (2017-2018) • Head of Product di PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017) • Senior Manager, Business Development, Product, & Content Management di PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015) • Senior Manager, Office of CEO di PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012-2013) • Product Management-Global Payments & Cash Management (PCM) di PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012) • Digital Banking Group Head at PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (2020-2021) • Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2018-2020) • Vice President, Head of Mobile Products at PT Bank Commonwealth (2017-2018) • Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO) (2015-2017) • Senior Manager, Business Development, Product, & Content Management at PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) (2013-2015) • Senior Manager, Office of CEO at PT Digital Media Asia (VivaPlus) (2012-2013) • Product Management-Global Payments & Cash Management (PCM) at PT Bank HSBC Indonesia (2008-2012)	Perbankan Banking

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	Indonesia Indonesian	Perempuan Female	53	• Sarjana Hukum- Universitas Airlangga (1993) • Master Bidang Hukum (LLM) Jurusan International Comparative Law dari Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, Amerika Serikat (1999) • Bachelor of Laws - Universitas Airlangga (1993) • Master of Law (LLM) International Comparative Law Department from Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, United States (1999)	• Direktur Kepatuhan di PT Maybank Syariah Indonesia (Okt 2010-Jan 2020) • Direktur Kepatuhan di PT Bank Maybank Indocorp (Feb 2009-Okt 2010) • Direktur Kepatuhan di Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Jakarta (Juli 2005-Nov 2008) • Head of Compliance Department di The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Jakarta (Sep 2001-Juli 2005) • Direktorat Hukum di Bank Indonesia (Juni 1995-Juni 2001) • Director of Compliance of PT Maybank Syariah Indonesia (Oct 2010-Jan 2020) • Director of Compliance of PT Bank Maybank Indocorp (Feb 2009-Oct 2010) • Director of Compliance of Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Jakarta (July 2005-Nov 2008) • Head of Compliance Department at Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Jakarta (Sep 2001-July 2005) • Legal Directorate at Bank Indonesia (June 1995-June 2001)	Perbankan Banking
Jo, Anula Putra	Indonesia Indonesian	Laki-laki Male	57	• S1 - Ekonomi Manajemen - Universitas Diponegoro Semarang (1994) • S2 - Manajemen Keuangan - Universitas Tarumanegara Jakarta (2024) • Bachelor's Degree in Management Economics from Diponegoro University, Semarang (1994) • Master's Degree in Financial Management from Tarumanegara University Jakarta (2024)	• Group Head Credit Management, Group Head Corporate Credit Analyst, Group Head Retail Banking, Kepala Kanwil V KC Tanah Abang, Branch Manager KCU Thamrin, Head Credit di PT Bank Sinarmas Tbk (2005 - 2024) • Manager di PT Sinarmas Multifinance Cabang Solo (2004 – 2005) • Account Officer di PT Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Semarang (1995 – 2004) • Group Head Credit Management, Group Head Corporate Credit Analyst, Group Head Retail Banking, Head of Regional Office V KC Tanah Abang, Branch Manager KCU Thamrin, Head Credit at PT Bank Sinarmas Tbk (2005 - 2024) • Manager at PT Sinarmas Multifinance Solo Branch (2004 - 2005) • Account Officer at PT Bank Internasional Indonesia (BII) Semarang Branch (1995 - 2004)	Perbankan Banking

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara kolegial melalui beberapa jenis prosedur, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS
   Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS, berdasarkan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan fungsi, serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024 adalah sebagaimana yang terlampir berikut ini:

   a. Efektivitas Peran Komisaris dan Direksi

   b. Efektivitas Pelaksanaan Strategi dan Pengelolaan Bank
   c. Efektivitas Rapat, Etika Kerja dan Dinamika Direksi

   d. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Keberlanjutan
   e. Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

2. Penilaian Berdasarkan *Self Assessment* GCG
   Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan juga berdasarkan *self assessment* yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024 adalah sebagaimana yang terlampir berikut ini:

   a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memperoleh peringkat 1.
   b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris memperoleh peringkat 1.

Secara komprehensif, Dewan Komisaris dan Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dengan baik, bertanggung jawab, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku demi kepentingan Bank. Adapun fokus pengawasan dan pemberian nasihat yang diberikan mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank. Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance,* melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank, dan memberikan nasihat serta rekomendasi kepada Direksi guna memastikan

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out collegally through several types of procedures, including the following:

1. Assessment by the GMS
   The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by Shareholders at the GMS, based on accountability reports regarding the implementation of functions, as well as the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Directors for 2024 are below:
   a. Effectiveness of the Roles of the Board of Commissioners and the Board of Directors
   b. Effectiveness of Strategy Implementation and Bank Management
   c. Effectiveness of Meetings, Work Ethics, and the Board of Directors' Dynamics
   d. Implementation of Good Corporate Governance and Sustainability Principles
   e. Effectiveness of Risk Management and Internal Control Implementation

2. Assessment Based on GCG Self Assessment The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is also carried out based on a self-assessment which refers to the Financial Services Authority Circular Letter No. 10/ SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Directors for 2024 are as attached below:
   a. The performance of duties and responsibilities by the Board of Directors received a rating of 1.
   b. The performance of duties and responsibilities by the Board of Commissioners received a rating of 1.

Comprehensively, the Board of Commissioners and the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities well. Throughout 2024, the Board of Commissioners has supervised and provided advice to the Board of Directors in a good, responsible manner and referring to applicable regulations in the interests of the Bank. The focus of supervision and providing advice includes holding meetings related to discussing issues related to Bank management and evaluating Bank's performance. The Board of Commissioners also provides recommendations for implementing the principles of Good Corporate Governance, carries out supervisory actions on Bank's management policies, and provides advice and recommendations to the Board of Directors to ensure that Bank's business and

bahwa bisnis dan usaha Bank berjalan dengan baik. Adapun penilaian kinerja Direksi, tercermin dari hasil kinerja Bank di tahun buku, di mana Bank Aladin Syariah mampu mencatatkan hasil yang positif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

operations run well. The performance assessment of the Board of Directors is reflected in Bank's performance results in the Fiscal Year, where Bank Aladin Syariah was able to record positive results to achieve sustainable growth.

REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA BAGI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI

Kebijakan Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Tahun 2024

Adapun jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION AND OTHER FACILITIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS AS WELL AS THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Remuneration Determination Policy

Remuneration policies and other facilities determined at the General Meeting of Shareholders (GMS), include:

1. Remuneration, namely income in the form of money (non-kind), including salary, benefits, compensation in the form of shares, bonuses and other forms of remuneration, and
2. Other facilities, namely facilities received that are not in the form of money (in kind), include housing facilities, transportation facilities, health insurance facilities, telecommunications facilities, and other facilities that may or may not be owned.

Structure and Amount of Remuneration in 2024

The total amount of remuneration and other facilities as of December 31, 2024 is as follows

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
	Orang Persons	Rp	Orang Persons	Rp	Orang Persons	Rp
Remunerasi Remuneration	3	3.175.164.988	4	7.146.105.70	2	875.771.413
Fasilitas lainnya*): Yang dapat dimiliki Yang tidak dapat dimiliki Other facilities*): 1. What can be owned 2. What cannot be owned	-	-	-	-	-	-
Total Total	**3**	**3.175.164.988**	**4**	**7.146.105.70**	**2**	**875.771.413**

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah
*) Valued in Rupiah equivalent

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini.

The number of members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board who receive remuneration in one year are grouped into a range of income levels, as in the table below.

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun Amount of Remuneration *) per person in 1 year	Jumlah Dewan Komisaris Number of the Board of Commissioners	Jumlah Direksi Number of the Board of Directors	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of the Sharia Supervisory Board
Di atas Rp2 miliar Above Rp 2 billion	0	1	0
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above Rp1 billion up to Rp2 billion	2	3	0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million up to Rp1 billion	1	0	1

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Informasi mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

Ratio of Highest Salary and Lowest Salary

Information regarding the ratio of the highest and lowest salaries on a comparison scale is as follows:

Perihal Subject	2024	2023	2022
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Employee Salaries	**29,9 : 1**	40,5 : 1	40,34 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah Ratio of Highest and Lowest Directors' Salaries	**1,5 : 1**	1,9 : 1	2,4 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Commissioner Salary Ratio	**1,3 : 1**	2,7 : 1	2,2 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Salary Ratio of Highest Directors and Highest Employees	**1,2 : 1**	1,2 : 1	1,1 : 1

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan internal terkait Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana pada butir a dan b di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Board of Commissioners Meetings

In accordance with internal regulations related to the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors' Rules of Conduct, the implementation of Board of Commissioners meetings is regulated as follows:

1. The Board of Commissioners is required to hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months.
2. The Board of Commissioners is required to hold physical meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.
3. Meetings of the Board of Commissioners can also be held if deemed necessary by the President Commissioner or by 1/3 (one third) of the total members of the Board of Commissioners or upon written request from the Board of Directors Meeting or upon request from 1 (one) or more shareholders. has at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights, to which meetings the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. All members of the Board of Commissioners must physically attend meetings of the Board of Commissioners at least 2 (two) times a year.
4. All members of the Board of Commissioners must physically attend meetings at least 2 (two) times in 1 (one) year.
5. The Board of Commissioners must schedule meetings as in points a and b above for the following year before the end of the Fiscal Year.

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Presiden Komisaris akan memimpin rapat. Jika Presiden Komisaris berhalangan untuk memimpin rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis diselenggarakan di tempat dan waktu yang sama 14 hari setelah tanggal dan usulan rapat Dewan Komisaris pertama yang akan membahas hal yang sama. Dalam rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang sama untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang sah disyaratkan. Jika kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan komisaris kedua, maka 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dapat memanggil RUPS Luar Biasa yang akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
11. Putusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
12. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
14. Keputusan tertulis dan keputusan yang diedarkan adalah suatu keputusan yang dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Dewan Komisaris diperlakukan sama seperti sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Dewan

6. At the meeting that has been scheduled as referred to in point d, the meeting materials are delivered to the participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in point d, the meeting materials are delivered to the Meeting Participants no later than before the meeting is held.
8. At each meeting of the Board of Commissioners, the President Commissioner will chair the meeting. If the President Commissioner is unable to chair the meeting, which does not need to be proven to a third party, then the Board of Commissioners meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners selected by and from the members of the Board of Commissioners who are present and/or represented at the relevant Board of Commissioners meeting.
9. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
10. A meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to make binding decisions if more than 2/3 (two thirds) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting of the Board of Commissioners. In the event that a quorum is not reached at a meeting of the Board of Commissioners, another meeting of the Board of Commissioners is automatically held at the same place and time 14 days after the date and proposal of the first Board of Commissioners meeting which will discuss the same matter. In the second Board of Commissioners meeting, the same quorum to convene a valid Board of Commissioners meeting is required. If a quorum is not reached at the second Board of Commissioners meeting, then 1 (one) member of the Board of Commissioners can call an Extraordinary GMS which will discuss matters that should be discussed at the Board of Commissioners meeting.
11. Decisions at meetings of the Board of Commissioners must be taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a deliberative decision to reach consensus is not reached, then the decision is taken based on the affirmative vote of more than ½ (one-half) of the number of valid votes cast at the meeting. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast one vote.
12. If the number of votes agreeing and disagreeing is equal, then the chairman of the Board of Commissioners meeting will decide.
13. All decisions taken by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of Bank's Articles of Association are binding and the responsibility of all members of the Board of Commissioners.
14. Written decisions and circulated decisions are decisions made in written form, signed or approved by a majority of the Board of Commissioners, treated the same as a decision taken at a meeting of the Board of Commissioners and may consist of several

Komisaris dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih Dewan Komisaris. Istilah dalam "bentuk tertulis" dan "ditandatangani" meliputi persetujuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui e-mail atau bentuk komunikasi elektronik lainnya yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk tujuan tersebut dari waktu ke waktu dan apabila dipandang perlu menggunakan prosedur keamanan dan/atau identifikasi dan peralatan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

15. Ketentuan mengenai risalah rapat di antaranya adalah sebagai berikut:
    a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

    b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

    c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir nomor 1 dan 2 di atas yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Apabila risalah rapat dibuat oleh notaris, menandatangani tersebut tidak disyaratkan.
16. Risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Bank.

17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

18. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris menggelar rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

documents in this form, each of which is signed by one or more Board of Commissioners. The terms "written form" and "signed" include approval conveyed by the Board of Commissioners via e-mail or other forms of electronic communication approved by the Board of Commissioners for this purpose from time to time and ifdeemed necessary using security and/or identification procedures and equipment approved by the Board of Commissioners.

15. Provisions regarding meeting minutes include the following:
    a. The results of the Board of Commissioners meetings must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.
    b. The results of meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors must be included in the minutes of the meeting, signed by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors present, and submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
    c. In the event that there are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors who do not sign the results of the meeting as referred to in points 1 and 2 above, they are required to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting. If the minutes of the meeting are prepared by a notary, signing them is not required.
16. Minutes of meetings of the Board of Commissioners and minutes of meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors must be documented by Bank. 1
17. Dissenting opinions that occur in meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners and Directors must be stated clearly in the minutes of meetings of the Board of Commissioners and minutes of meetings of the Board of Commissioners and Directors along with the reasons for the differences of opinion.
18. The Attendance of members of the Board of Directors at meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors must be disclosed in Bank's annual report.

During 2024, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings with the total attendance of the Board of Commissioners members as follows:

Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Commissioners at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners at the Meeting
26 Januari 2024 January 26, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah – Offline Bank Aladin Syariah Head Office – Offline	1. Jadwal Rapat Dewan Komisaris 2024; 2. Aktivitas / Laporan Dewan Komisaris 2024; 3. Kinerja Bank per 31 Desember 2024 1. Board of Commissioners Meeting Schedule 2024; 2. Board of Commissioners Activities / Reports 2024; 3. Bank Performance as of December 31, 2024	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh Basuki 3. Fransisca Ekawati	-
16 Februari 2024 February 16, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah – Offline Bank Aladin Syariah Head Office – Offline	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II 2023 Business Plan Monitoring Report of Semester II 2023	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh Basuki 3. Fransisca Ekawati	-
20 Maret 2024 March 20, 2024	Hybrid	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk per 31 Desember 2023 Approval and Ratification of Financial Statements of PT Bank Aladin Syariah Tbk as of December 31, 2023	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh Basuki 3. Fransisca Ekawati	-
29 Juli 2024 July 29, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah – Offline Bank Aladin Syariah Head Office – Offline	1. Laporan Realisasi RBB Q2 2024 2. Hasil Pemeringkatan Bank 1. RBB Realization Report of Q2 2024 2. Bank Ranking Results	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh Basuki 3. Fransisca Ekawati	-
19 Agustus 2024 August 19, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah – Offline Bank Aladin Syariah Head Office – Offline	1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I 2024 2. Update Progress KHP OJK 2023 1. Business Plan Supervision Report of Semester I 2024 2. OJK KHP Progress Update 2023	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh Basuki 3. Fransisca Ekawati	-
20 November 2024 November 20, 2024	Hybrid	Pemaparan Rencana Bisnis Bank ("RBB") 2025 - 2027; Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") 2025; Pemaparan Rencana Strategis Teknologi Informasi ("RSTI") Presentation of Bank Business Plan ("RBB") 2025 - 2027; Presentation of Sustainable Finance Action Plan ("RAKB") 2025; Presentation of Information Technology Strategic Plan ("RSTI")	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh Basuki 3. Fransisca Ekawati	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of the Board of Commissioners members at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal
Recapitulation of Board of Commissioners Attendance at Internal Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris Independen) (President/Independent Commissioner	6	6	100%
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	6	6	100%
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	6	100%
Rata-rata Average			**100%**

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2024, rapat gabungan diadakan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Joint meetings of the Board of Commissioners and Directors are held as needed. During 2024, joint meetings were held 4 (four) times with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan
Minutes and Attendance of the Board of Commissioners (BOC) and the Board of Directors (BOD) at Joint Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/ Direksi dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners/ Board of Directors at the Meeting
26 Januari 2024 January 26, 2024	Hybrid (Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Google Meet) Hybrid (Bank Aladin Syariah Head Office and Google Meet)	Pembahasan Rencana Bisnis Bank 2024-2026 Discussion of Bank Business Plan 2024-2026	Komisaris / BOC: Rudy Hamdani; Ationo Teguh Basuki; Fransisca Ekawati Direksi / BOD: Dyota M. Marsudi*; Firdila Sari; Mayang Ekaputri*; Baiq Nadea Dzurriatin	-
30 April 2024 April 30, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah Head Office	1. Laporan Keuangan Q124 dan Realisasi RBB TW 1 2. Update Pemenuhan KHP OJK 3. Update Syariah Compliance 4. Update dari Commercial 1. Financial Report Q1 2024 and Realization of RBB of Q1 2. Update on Fulfillment of OJK KHP 3. Update on Sharia Compliance 4. Update from Commercial	Komisaris / BOC: Rudy Hamdani; Ationo Teguh Basuki; Fransisca Ekawati Direksi / BOD: Dyota M. Marsudi*; Firdila Sari; Mayang Ekaputri*; Baiq Nadea Dzurriatin	-

Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Minutes and Attendance of the Board of Commissioners (BOC) and the Board of Directors (BOD) at Joint Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/ Direksi dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners/ Board of Directors at the Meeting
25 Juni 2024 June 25, 2024	Hybrid (Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Google Meet) Hybrid (Bank Aladin Syariah Head Office and Google Meet)	1. Resolution Plan & Recovery Plan 2. Persetujuan Revisi RBB 2024-2026 3. Mata Acara RUPS Tahunan 2024 1. Resolution Plan & Recovery Plan 2. Approval of Revised RBB 2024-2026 3. Agenda of 2024 Annual GMS	Komisaris / BOC Rudy Hamdani; Ationo Teguh Basuki; Fransisca Ekawati Direksi / BOD Dyota M. Marsudi*; Firdila Sari; Mayang Ekaputri*; Baiq Nadea Dzurriatin..	-
25 Januari 2024 January 25, 2024	Hybrid (Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Google Meet) Hybrid (Bank Aladin Syariah Head Office and Google Meet)	1. Pemaparan Resolution Plan & Recovery Plan; 2. Pemaparan Rencana Bisnis Bank (“RBB”) 2025-2027 3. Persetujuan Laporan yang akan disampaikan selambatnya 30 November 2024 4. Monthly Management Report per 31 Oktober 2024 & Proyeksi FY24 5. Penerapan Program APU, PPT dan PPPSM 1. Presentation of Resolution Plan & Recovery Plan; 2. Presentation of Bank Business Plan (“RBB”) 2025-2027 3. Approval of Report to be submitted no later than November 30, 2024 4. Monthly Management Report as of October 31, 2024 & FY24 Projection 5. Implementation of AML, CFT and PPPSM Programs	Komisaris / BOC Rudy Hamdani Ationo Teguh Basuki Fransisca Ekawati Direksi / BOD Koko Tjatur Rachmadi ** Firdila Sari Jo, Anula Putra** Baiq Nadea Dzurriatin	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of members of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Joint Meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan
Recapitulation of the Attendance of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Joint Meetings

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris Independen) (President / Independent Commissioner)	4	4	100%
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	4	4	100%
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	4	4	100%
Direksi Board of Directors			
Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur)** (President Director)**	1	1	100%
Firdila Sari (Direktur) (Director)	4	4	100%
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	4	4	100%
Jo, Anula Putra (Direktur)** (Director)**	1	1	100%
Dyota M. Marsudi (Presiden Direktur)* (President Director)*	3	3	100%
Mayang Ekaputri (Direktur)* (Director)*	3	3	100%
Rata-rata Average			**100%**

* Beliau mengundurkan diri dari jabatan beliau yang disahkan pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024
** Beliau dicalonkan menjadi anggota Direksi Bank pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024
* Has resigned from his/her position which was ratified at the Company's Annual GMS on June 26, 2024
** Nominated as a member of the Bank's Board of Directors at the Company's Annual GMS on June 26, 2024

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan internal terkait Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada 15 Februari 2024 menyebutkan pada Pasal 31 sebagai bahwa:

1. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

JOINT MEETINGS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS) WITH THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with internal provisions related to the Rules of Procedure of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors, the implementation of the Board of Commissioners meeting is regulated as follows:

Based on POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Units which has been in effect since its enactment on February 15, 2024, Article 31, stating that:

1. Banks are required to hold a DPS meeting with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.

2. Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi.
3. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Direksi dan Komisari diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2024, rapat gabungan diadakan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

2. The DPS meeting as referred to in paragraph (1) is held if attended by the majority of DPS members and the majority of the Board of Directors members.
3. Banks are required to hold a DPS meeting with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
4. The DPS meeting as referred to in paragraph (3) is held if attended by the majority of DPS members and the majority of Board of Commissioners members.

The Sharia Supervisory Board meeting with the Board of Directors and the Board of Commissioners is held as needed. During 2024, joint meetings were held 3 (three) times with the following agenda and frequency of attendance:

Risalah dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi
Minutes and Attendance of the Sharia Supervisory Board Meeting with the Board of Commissioners and the Board Directors

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/ Direksi dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners/ Board of Directors at the Meeting
30 April 2024 April 30, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	1. Laporan Keuangan 1Q24 dan Realisasi RBB TW 1 2. Update Pemenuhan KHP OJK 3. Update Syariah Compliance 4. Update dari Commercial 1. Financial Report Q1-24 and Realization of RBB Q1 2. Update on Fulfillment of OJK KHP 3. Update on Sharia Compliance 4. Update from Commercial	Komisaris / BOC Rudy Hamdani; Ationo Teguh Basuki; Fransisca Ekawati Direksi / BOD Dyota M. Marsudi*; Firdila Sari; Mayang Ekaputri*; Baiq Nadea Dzurriatin	-
25 Juni 2024 June 25, 2024	Hybrid (Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Google Meet) Hybrid (Bank Aladin Syariah's Head Office and Google Meet)	1. Resolution Plan & Recovery Plan 2. Persetujuan Revisi RBB 2024-2026 3. Mata Acara RUPS Tahunan 2024 1. Resolution Plan & Recovery Plan 2. Approval of Revised RBB 2024-2026 3. Agenda of 2024 Annual GMS	Komisaris / BOC: Rudy Hamdani; Ationo Teguh Basuki; Fransisca Ekawati Direksi / BOD: Dyota M. Marsudi*; Firdila Sari; Mayang Ekaputri*; Baiq Nadea Dzurriatin	-

Risalah dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Minutes and Attendance of the Sharia Supervisory Board Meeting with the Board of Commissioners and the Board Directors

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/ Direksi dalam Rapat Reasons for the absence of the Board of Commissioners/ Board of Directors at the Meeting
25 Januari 2024 January 25, 2024	Hybrid (Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan Google Meet) Hybrid (Bank Aladin Syariah's Head Office and Google Meet)	1. Pemaparan Resolution Plan & Recovery Plan; 2. Pemaparan Rencana Bisnis Bank ("RBB") 2025-2027 3. Persetujuan Laporan yang akan disampaikan selambatnya 30 November 2024 4. Monthly Management Report per 31 Oktober 2024 & Proyeksi FY24 5. Penerapan Program APU, PPT dan PPPSM 1. Presentation of Resolution Plan & Recovery Plan; 2. Presentation of Bank Business Plan ("RBB") 2025-2027 3. Approval of Report to be submitted no later than November 30, 2024 4. Monthly Management Report as of October 31, 2024 & FY24 Projection 5. Implementation of AML, CFT and PPPSM Programs	Komisaris / BOC: Rudy Hamdani Ationo Teguh Basuki Fransisca Ekawati Direksi / BOD: Koko Tjatur Rachmadi ** Firdila Sari Jo, Anula Putra** Baiq Nadea Dzurriatin	-

Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Recapitulation of the Sharia Supervisory Board's Meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board (DPS)			
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Ketua DPS) (DPS Chairman)	3	3	100 %
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si (Anggota DPS) (DPS Member)	3	3	100 %

Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Recapitulation of the Sharia Supervisory Board's Meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Rudy Hamdani (Presiden Komisaris - Independen) (President – Independent Commissioner)	3	3	100 %
Ationo Teguh Basuki (Komisaris) (Commissioner)	3	3	100 %
Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	3	3	100 %
Direksi **Board of Director**			
Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur)** (President Director)**	1	1	100%
Firdila Sari (Direktur) (Director)	3	3	100%
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	3	3	100%
Jo, Anula Putra (Direktur)** (Director)**	1	1	100 %
Dyota M. Marsudi (Presiden Direktur)* (President Director)*	2	2	100 %
Mayang Ekaputri (Direktur)* (Director)*	2	2	100 %
Rata-rata Average			**100 %**

* Beliau mengundurkan diri dari jabatan beliau yang disahkan pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024
** Beliau dicalonkan menjadi anggota direksi bank pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024
* Has resigned from his/her position which was ratified at the Company's Annual GMS on June 26, 2024
** Nominated as a member of the Bank's Board of Directors at the Company's Annual GMS on June 26, 2024

RAPAT DIREKSI

Sesuai dengan ketentuan internal terkait Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur mengenai pelaksanaan rapat Direksi sebagai berikut:

1. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, rapat Direksi juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada butir a dan b untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
5. Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Direksi dipimpin/diketuai oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat Direksi.
11. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

In accordance with internal regulations related to Bank's Board of Commissioners and Board of Directors' Rules of Conduct, the implementation of Board of Directors meetings is regulated as follows:

1. Board of Directors meetings are held periodically at least 1 (one) t ime in 1 (one) month.
2. The Board of Directors is obliged to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
3. Apart from the meetings as referred to in points a and b above, Board of Directors meetings can also be held if deemed necessary by one member of the Board of Directors or at the written request of one or more members of the Board of Commissioners or at the request of 1 (one) or more shareholders who are together. equally representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
4. The Board of Directors must schedule meetings as referred to in points a and b for the following year before the end of the Fiscal Year. The schedule (setting of dates) for meetings within 1 (one) year must be received by all members of the Board of Directors no later than the beginning of January.
5. Calls for meetings and procedures, as well as places for holding Board of Directors meetings refer to Bank's Articles of Association.
6. At a scheduled meeting, meeting materials are delivered to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared, the meeting materials are delivered to the participants no later than before the meeting is held.
8. The Board of Directors meeting is chaired/chaired by the President Director. In the event that the President Director is unable to attend a Board of Directors meeting, which does not need to be proven to a third party, the Board of Directors meeting is chaired by a member of the Board of Directors who is elected by and from among the members of the Board of Directors present.
9. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
10. A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total number of members of the Board of Directors are present or represented at the Board of Directors meeting.
11. Decision making at Board of Directors meetings is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision for deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the affirmative votes of more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting.
12. If the number of votes agreeing and disagreeing is equal, the chairman of the Board of Directors meeting will decide.

13. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
14. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan tata tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
15. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi dibuat risalah rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat Direksi. Risalah rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Direksi. Apabila risalah rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
16. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
18. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.
19. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

Sepanjang tahun 2024, Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

13. Every strategic policy and decision must be decided through a Board of Directors meeting with due regard to supervision in accordance with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
14. All decisions taken by the Board of Directors are in accordance with Bank's Articles of Association and Work Guidelines and regulations, are binding and the responsibility of all members of the Board of Directors.
15. All matters discussed and decided at the Board of Directors meeting are made into minutes of the Board of Directors meeting which must be drawn up by someone present at the Board of Directors meeting appointed by the chairman of the Board of Directors meeting and must then be signed by all members of the Board of Directors present at the Board of Directors meeting to ensure the completeness and correctness of the minutes of the Board of Directors meeting. . The minutes of the Board of Directors meeting are valid evidence for all members of the Board of Directors and third parties regarding decisions and everything that occurs at the Board of Directors meeting. If the minutes of the Board of Directors meeting are drawn up by a Notary, signing is not required.
16. Dissenting opinions that occur at Board of Directors meetings must be stated clearly in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the difference of opinion.
17. The Board of Directors can also make valid decisions without holding a board of directors' meeting provided that all members of the Board of Directors who are serving give their approval by signing the proposed decision. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions legally taken at a Board of Directors meeting.
18. Minutes of Board of Directors meetings and minutes of meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners must be documented by Bank.
19. The Attendance of members of the Board of Directors at Board of Directors meetings and meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners must be disclosed in Bank's annual report.

Throughout 2024, the Bank's Board of Directors held 12 (twelve) meetings with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reasons for the absence
25 Januari 2024 January 25, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat : • Direktorat HC • Direktorat IT • Direktorat Operations • Direktorat Finance • President Directorate • Direktorat Kepatuhan Monthly Updates from the directorates: • HC Directorate • IT Directorate • Operations Directorate • Finance Directorate • President Directorate • Compliance Directorate	Dyota M. Marsudi; Firdila Sari; Mayang Ekaputri; Baiq Nadea Dzurriatin	-
29 Februari 2024 February 29, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat : • Direktorat Kepatuhan • Direktorat Finance • Direktorat Operations • Direktorat IT • President Directorate Monthly Updates from the directorates: • Compliance Directorate • Finance Directorate • Operations Directorate • IT Directorate • President Directorate	Dyota M. Marsudi; Firdila Sari; Mayang Ekaputri; Baiq Nadea Dzurriatin	-
21 Maret 2024 March 21, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat : • Direktorat Kepatuhan • Direktorat Finance • Direktorat Operations • President Directorate • Direktorat IT Monthly Updates from the directorates: • Compliance Directorate • Finance Directorate • Operations Directorate • President Directorate • IT Directorate	Dyota M. Marsudi; Firdila Sari; Mayang Ekaputri; Baiq Nadea Dzurriatin	-
24 April 2024 April 24, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat : • Direktorat Kepatuhan • Direktorat IT • Direktorat Finance • Direktorat Operations • President Directorate Monthly Updates from the directorates: • Compliance Directorate • IT Directorate • Finance Directorate • Operations Directorate • President Directorate	Dyota M. Marsudi; Firdila Sari; Mayang Ekaputri; Baiq Nadea Dzurriatin	-
31 Mei 2024 May 31, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat : • Direktorat Kepatuhan • Direktorat Finance • Direktorat Tech • Direktorat Operations • President Directorate Monthly Updates from the directorates : • Compliance Directorate • Finance Directorate • Tech Directorate • Operations Directorate • President Directorate	Dyota M. Marsudi; Firdila Sari; Mayang Ekaputri; Baiq Nadea Dzurriatin	-

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reasons for the absence
24 Juni 2024 June 24, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat : • Direktorat IT • Direktorat Operations • President Directorate • Direktorat Finance • Direktorat Kepatuhan Monthly Updates from the directorates: • IT Directorate • Operations Directorate • President Directorate • Finance Directorate • Compliance Directorate	Dyota M. Marsudi; Firdila Sari; Mayang Ekaputri;	Baiq Nadea Dzurriatin - cuti Baiq Nadea Dzurriatin was on leave
25 Juli 2024 July 25, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat: • Direktorat Finance • Direktorat IT • Direktorat Operations • Direktorat Kepatuhan • President Directorate • Direktorat Digital Banking Monthly Updates from the directorates: • Finance Directorate • IT Directorate • Operations Directorate • Compliance Directorate • President Directorate • Digital Banking Directorate	Firdila Sari; Jo, Anula Putra; Baiq Nadea Dzurriatin	-
29 Agustus 2024 August 29, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	Update Bulanan dari direktorat : • Direktorat Finance & Digital Banking • Direktorat IT • Direktorat Operations • Direktorat Kepatuhan • President Directorate Monthly Update from the directorates: • Finance & Digital Banking Directorate • IT Directorate • Operations Directorate • Compliance Directorate • President Directorate	Koko Tjatur Rachmadi; Firdila Sari; Jo, Anula Putra; Baiq Nadea Dzurriatin	-
26 September 2024 September 26, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	• Pembahasan Kinerja Bank Agustus 2024 dari unit kerja Finance; • Monthly Management Report Agustus 2024 dari unit kerja Digital • Banking; • Permohonan Persetujuan dari unit kerja IT, Procurement, & GA; • Update dari unit kerja Anti-Fraud Management • Discussion of Bank Performance in August 2024 from Finance work unit; • Monthly Management Report in August 2024 from Digital Banking work unit; • Request for Approval from IT, Procurement, & GA work unit; • Update from Anti-Fraud Management work unit	Koko Tjatur Rachmadi; Jo, Anula Putra; Baiq Nadea Dzurriatin	Firdila Sari – cuti Firdilla Sari was on leave

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reasons for the absence
31 Oktober 2024 October 31, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	• Pembahasan Laporan Realisasi RBB Q3 2024 dan Kinerja Keuangan Bank September dan proyeksi Oktober 2024 dari unit kerja Finance; • Permohonan Persetujuan Payment Authorization dari unit kerja IT, Procurement, & GA; • Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSM dari unit kerja Compliance; • Update dari unit kerja Anti-Fraud Management • Discussion of RBB Realization Report of Q3-2024 and Bank Financial Performance of September and October 2024 projection from Finance work unit; • Request for Payment Authorization Approval from IT, Procurement, & GA work unit; • Implementation of AML, CFT, and PPPSM Program from Compliance work unit; • Update from Anti-Fraud Management work unit	Koko Tjatur Rachmadi; Firdila Sari; Jo, Anula Putra; Baiq Nadea Dzurriatin	-
29 November 2024 November 29, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	• Pembahasan Kinerja Bank Oktober 2024 • Update Penerapan Strategi Anti Fraud dan Fraud Trend • Discussion on the Bank's Performance of October 2024 • Update on Implementation of Anti-Fraud Strategy and Fraud Trend	Koko Tjatur Rachmadi; Firdila Sari; Baiq Nadea Dzurriatin	Jo, Anula Putra – cuti Jo, Anula Putra was on leave
19 Desember 2024 December 19, 2024	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Head Office	• Pembahasan Kinerja Bank November 2024; • Persetujuan Logo & Creative Bank Aladin Syariah; • Update Penerapan Strategi Anti Fraud dan Fraud Trend; • Hasil Penilaian Financial Integrity Rating (FIR) on ML/TF Tahun 2024 • Discussion of the Bank's Performance of November 2024; • Approval of Logo & Creative of Bank Aladin Syariah; • Update on Implementation of Anti-Fraud Strategy and Fraud Trend; • Results of Financial Integrity Rating (FIR) Assessment on ML/TF 2024	Koko Tjatur Rachmadi; Firdila Sari; Jo, Anula Putra; Baiq Nadea Dzurriatin	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Direksi pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of the attendance of members of the Board of Directors at internal meetings can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Recapitulation of the Attendance of Members of the Board of Directors at Internal Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur)** (President Director)**	5	5	100%
Firdila Sari (Direktur) (Director)	12	11	91,6%

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Recapitulation of the Attendance of Members of the Board of Directors at Internal Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)	12	11	91,6%
Jo, Anula Putra (Direktur)** (Director)**	6	5	83,3%
Dyota M. Marsudi (Presiden Direktur)* (Presedent Director)*	6	6	100%
Mayang Ekaputri (Direktur)* (Director)*	6	6	100%
Rata-rata Average			**94,4%**

*Beliau mengundurkan diri dari jabatan beliau yang disahkan pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024
**Beliau mencalonkan menjadi anggota Direksi Bank pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2024
* Has resigned from his/her position which was ratified at the Company's Annual GMS on June 26, 2024
** Nominated as a member of the Bank's Board of Directors at the Company's Annual GMS on June 26, 2024

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs For The Board Of Commissioners

Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung yang dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Pembentukan Komite Audit Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
7. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Piagam Komite Audit

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit atau *Audit Committee Charter* disusun sebagai acuan dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee to support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a supporting organ formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in supporting the effective implementation of its duties and supervisory functions on matters related to Financial Statements, internal and external control systems. The formation of Bank Audit Committee was carried out based on Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.

Legal Basis

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
4. Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2022 dated August 31, 2022 concerning Sharia Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation no. 55/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.
6. Bank's Articles of Association concerning the duties and authority of the Board of Commissioners.
7. Audit Committee Charter.

Audit Committee Charter

The Audit Committee Work Guidelines/Charter or Audit Committee Charter is prepared as a clear reference and framework for carrying out the duties and responsibilities of each member of the Audit Committee. This enables the Audit Committee to operate independently, objectively, autonomously, and transparently, with full accountability in accordance with prevailing regulations.

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 29 November 2023 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Kriteria Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank;
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

The Bank's Audit Committee has a Charter outlining its structure and membership, membership requirements, duties and responsibilities, authorities, meetings, term of service, working hours, and reporting mechanisms. The latest update to the Audit Committee Charter was made on November 29, 2023 and will be revised in line with regulatory developments and the Bank's current circumstances.

Audit Committee Criteria

The membership requirements for the Audit Committee, comprising Independent Commissioners and Independent Parties as outlined in the Audit Committee Charter, include the following:

1. Member of Audit Committee must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and be able to communicate well;
2. Must have an expertise competency certificate supporting the implementation of the Audit Committee's functions and responsibilities;
3. Must understand Financial Statements, Bank business, especially those related to Bank services or business activities, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other related laws and regulations;
4. Must comply with the Audit Committee code of ethics established by the Bank;
5. Willing to continuously improve competence through education and training;
6. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Services Firm or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to Bank within the last 6 (six) months;
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise Bank activities within the last 6 (six) months except for Independent Commissioners;
8. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Bank; and
9. Has no direct or indirect business relations related to the Bank's business activities.

Terms of Office for the Audit Committee

The term of office for members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association and can only be re-elected for one further period.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2024

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Komite Audit wajib seluruhnya berasal dari pihak independen paling sedikit terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi.
3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
4. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite audit.

Adapun pada tahun 2024, susunan Komite Audit Bank, yaitu:

Number, Composition and Structure of the Audit Committee in 2024

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning the implementation of Governance for Commercial Banks, all members of the Audit Committee must come from independent parties consisting of at least:

1. 1 (one) Independent Commissioner.
2. 1 (one) person from an Independent Party who has expertise in finance or accounting.
3. 1 (one) person from an Independent Party who has expertise in the field of sharia banking.
4. 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board can be a member of the audit committee.

As for 2024, the composition of Bank's Audit Committee will be as follows:

Susunan Komite Audit Bank per 31 Desember 2024
Composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020. The Company's Audit Committee Appointment Letter No. 164/SK.BOC/NET/2020 dated July 9, 2020
Rudy Hamdani	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Surat Keputusan Direksi No: SK.002.BOD/03.2022 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 7 Maret 2022. Board of Directors Decision Letter No: SK.002.BOD/03.2022 concerning Members of the Risk Monitoring Committee, Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee dated March 7, 2022.
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020. The Company's Audit Committee Appointment Letter No. 164/SK.BOC/NET/2020 dated July 9, 2020.
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Surat Keputusan Direksi No: SK.003.BOD/11.2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tanggal 1 Desember 2022. Board of Directors Decision Letter No: SK.003.BOD/11.2022 concerning the Appointment of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee Members dated December 1, 2022.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Fransisca Ekawati

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Fransisca Ekawati dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Fransisca Ekawati, Chairman of the Audit Committee, is presented in the Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Rudy Hamdani

Anggota Komite Audit/Presiden Komisaris (Independen)
Member of Audit Committee/President Commissioner (Independent)

Profil Anggota Komite Audit Rudy Hamdani dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Rudy Hamdani, Member of the Audit Committee, is presented in the Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Andreas Danny Soesanto Anggota Komite Audit/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	Periode dan Masa Jabatan: 2020– 2024 Period and Term of Office : 2020-2024
Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 70 tahun Kelahiran Jakarta, 8 Agustus 1954/	**Personal Data** Indonesian Citizenship 70 years old was born in Jakarta, August 8, 1954
Domisili Indonesia	**Domicile** Indonesia
Pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Djaja (1986)	**Education** Bachelor of Management Economics from Kristen Djaja University (1986)
Pengalaman Kerja • Komite Audit dan Risk Management di PT Bank Index Selindo (2018—Saat ini) • Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan di PT Bank Index Selindo (2008—2018) • Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (2001—2008) • Direktur Operasional di PT Bank Patriot (2000—2001) • Tim Penyelesaian DPK di BPPN (1999—2000) • Kepala Divisi Operasional di PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999) • Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (1991—1997) • PT Overseas Express Bank (1979—1991) • Customer Support di PT Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia (1975—1979)	**Work Experiences** • Audit and Risk Management Committee at PT Bank Index Selindo (2018—Present) • Operations Director & Compliance Director at PT Bank Index Selindo (2008—2018) • Operations Director & Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (2001—2008) • Operations Director at PT Bank Patriot (2000—2001) • TPF Settlement Team at IBRA (1999—2000) • Head of Operations Division at PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999) • Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (1991—1997) • PT Overseas Express Bank (1979—1991) • Customer Support at PT Bank Pembangunan Pelayaran Indonesia (1975—1979)
Rangkap Jabatan Komite Audit dan Risk Management di PT Bank Index Selindo	**Concurrent Position** Audit and Risk Management Committee at PT Bank Index Selindo

Jeffri Sugiarto Anggota Komite Audit/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	Periode dan Masa Jabatan: 2022—2025 Period and Term of Office: 2022-2025
Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 37 tahun Kelahiran Jakarta, 5 Maret 1987	**Personal Data** Indonesian Citizenship 37 years old was born in Jakarta, March 5, 1987
Domisili Indonesia	**Domicile** Indonesia
Pendidikan • Sarjana (S1) Accounting, San Fransisco State University (2010) • Sarjana (S2) Business Administration, Argosy University (2015)	**Education** • Bachelor of Accounting, San Francisco State University (2010) • Bachelor of Business Administration, Argosy University (2015)
Pengalaman Kerja • Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Saat ini) • Senior Tax Associate, PBTaxand Consulting (2015—2016) • Staff Akunting & Auditor, Van Sloten & Laranang CPAs, California Amerika (2013—2015) • Tax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California Amerika (2008)	**Work Experiences** • Tax and Accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Present) • Senior Tax Associate, PBTax and Consulting (2015—2016) • Accounting & Auditor Staff, Van Sloten & Laranang CPAs, California America (2013—2015) • Tax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California America (2008)
Rangkap Jabatan Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting	**Concurrent Position** Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independensi.

Audit Committee Independency

All members of the Audit Committee who are Independent Parties have no financial, management, share ownership and/or family relations with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relations with the Bank, which could affect their ability to act independently.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with			Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relations with Other Companies
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	
Fransisca Ekawati	x	x	x	x	x	x	x
Rudy Hamdani	x	x	x	x	x	x	x
Andreas Danny Soesanto	x	x	x	x	x	x	x
Jeffri Sugiarto	x	x	x	x	x	x	x

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan paling sedikit terhadap:
   a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:
      i) Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.
      ii) Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan.
      iii) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
2. Memberikan rekomendasi terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
3. Memastikan SKAI bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities, including the following:

1. The Audit Committee monitors and evaluates the planning and implementation of both internal and external audits, as well as the follow-up on audit findings, in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process, at a minimum with regard to the following aspects:
   a. Implementation of the Internal Audit Work Unit (SKAI) duties.
   b. In accordance with the implementation of external audits by Public Accounting Firms with applicable audit standards, at a minimum the Committee carries out the following matters:
      i) Evaluating the criteria for the Public Accountant and Public Accounting Firm appointed to carry out the audit.
      ii) Evaluating audit coverage and other matters related to financial statement audit planning.
      iii) Evaluating the suitability of audit implementation by Public Accountants and Public Accounting Firms with applicable audit standards, adequacy of field work time, assessment of the scope of services provided and adequacy of sampling tests as well as recommendations for improvements provided by AP and/or KAP.
2. Providing recommendations regarding the preparation of the audit plan, scope and budget of SKAI.
3. Ensuring the SKAI works independently and upholds integrity in carrying out its duties.
4. Reviewing compliance with laws and regulations relating to Bank activities.

5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
7. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independen untuk melakukan kajian ulang terhadap kinerja Unit Audit Internal.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
12. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

Wewenang Komite Audit

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
5. Memberikan rekomendasi penunjukkan maupun pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur beberapa hal terkait tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketentuan rapat Komite Audit yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali baru terlaksana semenjak bulan November 2023 sampai dengan saat

5. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant regarding the services provided.
6. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independency, scope of assignment and fees.
7. Reviewing audit reports and ensuring the Board of Directors takes necessary corrective actions quickly to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws and regulations, or other problems identified and reported by SKAI.
8. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an independent external party to conduct a review of the Internal Audit Unit performance.
9. Maintaining the confidentiality of documents, data and Bank information.
10. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Head of SKAI.
11. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of overall SKAI annual remuneration and performance awards.
12. Evaluating the implementation of audit services for annual historical financial information by AP and/or KAP.

Audit Committee Authorities

1. Accessing required documents, data and information about employees, funds, assets and Bank resources;
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out internal audit, risk management and Accountant functions regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Involving independent parties outside the Member of Audit Committee who are needed to assist in carrying out their duties (if necessary); And
4. Conducting other authorities granted by the Board of Commissioners;
5. Providing recommendations for the appointment or dismissal of Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) auditing the Bank's Financial Statements.

Audit Committee Meeting

Based on the Audit Committee Charter, which has been aligned with the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, several provisions regarding the procedures and conduct of meetings are stipulated as follows:

1. Audit Committee meetings will be held as needed, which is at least 1 (one) time in 1 (one) month. The provisions for Audit Committee meetings to be held once every 1 (one) month have only been implemented since November 2023 until now, after adjustments to

ini, setelah adanya penyesuaian dengan ketentuan POJK No 17 Tahun 2023.
2. Agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota komite lainnya.
3. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
4. Apabila ada perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Setiap rapat komite audit dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

the provisions of POJK No. 17 of 2023.

2. The agenda or events to be discussed at each meeting and gathering are prepared by the Committee Chairman on the basis of suggestions from other committee members.
3. Audit Committee meetings can only be held if attended by the majority of Audit Committee Members or at least 51% (fifty one percent) of the total number of the Audit Committee Members including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party.
4. If there is a difference of opinion (dissenting opinion) at a committee meeting, it must be stated clearly in the minutes of meeting along with the reasons for the difference of opinion.
5. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation to reach consensus.
6. In the event the consensus deliberation does not occur, the decision is taken based on the majority vote.
7. Decisions taken by majority vote are based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.
8. Every audit committee meeting is recorded in minutes, properly documented, signed by the Chairman of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.

Selama tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

During 2024, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit
Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal Date	**Tempat** Place	**Agenda** Agenda	**Peserta** Participants	**Alasan Ketidakhadiran Komite Audit dalam Rapat** Reasons for the Audit **Committee's Absence from Meetings**
18 Januari 2024 January 18, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on Audit Committee Minutes of Meeting • Updates on the implementation of audit and non-audit activities • Internal audit results • Monitoring of audit findings follow-up actions	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-
16 Februari 2024 February 16, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on Audit Committee Minutes of Meeting • Updates on the implementation of audit and non-audit activities • Internal audit results • Monitoring of audit findings follow-up actions	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit
Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal **Date**	**Tempat** **Place**	**Agenda** Agenda	**Peserta** Participants	**Alasan Ketidakhadiran Komite Audit dalam Rapat** Reasons for the Audit **Committee's Absence from Meetings**
18 Maret 2024 March 18, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Hasil Quality Assurance Review penugasan audit • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Pemberhentian dan pegangkatan Kepala SKAI • Follow-up on Audit Committee Minutes of Meeting • Updates on the implementation of audit and non-audit activities • Internal audit results • Quality Assurance Review results of audit assignments • Monitoring of audit findings follow-up actions • Dismissal and appointment of the Head of Internal Audit Unit (SKAI)	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-
24 April 2024 April 24, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit • Hasil audit internal • • Follow-up on Audit Committee Minutes of Meeting • Updates on the implementation of audit activities • Internal audit results	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-
15 Mei 2024 May 15, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Usulan perubahan rencana audit 2024 • Timeline pelaksanaan kaji ulang SKAI oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on Audit Committee Minutes of Meeting • Updates on the implementation of audit and non-audit activities • Proposed revisions to the 2024 audit plan • Timeline for the SKAI review by the Public Accounting Firm (KAP) • Monitoring of audit findings follow-up	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-
21 Juni 2024 June 21, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on Audit Committee Minutes of Meeting • Updates on the implementation of audit and non-audit activities • Internal audit results • Monitoring of audit findings follow-up	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit
Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Komite Audit dalam Rapat Reasons for the Audit Committee's Absence from Meetings
29 Juli 2024 July 29, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil Quality Assurance Review penugasan audit • Kaji Ulang Fungsi SKAI • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on Audit Committee minutes of meeting • Updates on the implementation of audit and non-audit activities • Results of the Quality Assurance Review on audit assignments • Review of the Internal Audit Function • Monitoring of follow-up on audit findings	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-
19 Agustus 2024 August 19, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Usulan dan penyesuaian aktivitas audit Q3 - Q4 tahun 2024 • Persiapan audit OJK • Hasil sementara kaji ulang fungsi SKAI • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on Audit Committee minutes of meeting • Proposed and adjusted audit activities for Q3 – Q4 2024 • Preparation for OJK audit • Preliminary results of the Internal Audit Function review • Monitoring of follow-up on audit findings	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto 4. Jeffri Sugiarto	-
20 September 2024 September 20, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Progress pelaksanaan aktivitas audit • Highlight Hasil Audit IT • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on Audit Committee minutes of meeting • Progress of audit activity implementation • Highlights of IT audit results • Monitoring of follow-up on audit findings	1. Fransisca Ekawati 2. Rudy Hamdani 3. Andreas D. Soesanto	Jeffri Sugiarto berhalangan hadir karena perubahan jadwal rapat komite audit. Jeffri Sugiarto was unable to attend due to a change in the audit committee meeting schedule.
30 Oktober 2024 October 30, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Progress pelaksanaan aktivitas audit • Highlight Proposal Rencana Audit Tahun 2025 • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on the audit committee minutes of meeting • Progress of audit activities • Highlight of the 2025 Audit Plan Proposal • Monitoring the follow-up on audit findings	Fransisca Ekawati Rudy Hamdani Andreas D. Soesanto Jeffri Sugiarto	-
20 November 2024 November 20, 2024	Board Room MCC lt. 7	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Progress pelaksanaan aktivitas audit • Highlight Hasil Audit Interna • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up on the audit committee minutes of meeting • Progress of audit activities • Highlight of Internal Audit Results • Monitoring the follow-up on audit findings	Fransisca Ekawati Rudy Hamdani Andreas D. Soesanto Jeffri Sugiarto	-

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit
Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Komite Audit dalam Rapat Reasons for the Audit Committee's Absence from Meetings
20 Desember 2024 December 20, 2024	Board Room MCC lt. 7		Fransisca Ekawati Rudy Hamdani Andreas D. Soesanto Jeffri Sugiarto	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

Recapitulation of the Audit Committee members attendance at the internal meetings is provided below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Internal
Recapitulation of Audit Committee Attendance at Internal Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Fransisca Ekawati (Ketua/Chairman)	12	12	100%
Rudy Hamdani (Anggota/Member)	12	12	100%
Andreas Danny Soesanto (Anggota/Member)	12	12	100%
Jeffri Sugiarto (Anggota/Member)	12	11	92%
Rata-rata Average			**98%**

Program Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Bank senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas dengan berpedoman kepada piagam Komite Audit dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Adapun peran yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Reviu Terhadap Sistem Pengendalian Internal Bank
   Melakukan reviu terhadap rancangan dan implementasi dari sistem pengendalian internal Bank dengan memperhatikan kecukupan kontrol dan ketersediaan ketentuan Internal yang salah satunya melalui Laporan Hasil Audit Internal. Hasil reviu tersebut sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada Manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal maupun melaksanakan operasional Bank secara efektif dan efisien serta memperhatikan ketentuan Regulator.
2. Reviu Terhadap Fungsi Internal Audit
   Komite Audit telah melakukan reviu dan proses penilaian terhadap peran dan pelaksanaan fungsi Internal Audit dalam mengevaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola Bank.

Audit Committee Competency Development Program

The Bank consistently encourages the Audit Committee to enhance its competencies through various training programs. The competency development undertaken by the Audit Committee throughout 2024 is presented in the Corporate Governance section.

Implementation of the Audit Committee Duties

The Audit Committee performs its duties based on the Audit Committee Charter and functions to assist the Board of Commissioners in fulfilling its responsibilities. The roles carried out in 2024 are as follows:

1. Review of the Bank's Internal Control System
   The Committee conducted a review of the design and implementation of the Bank's internal control system, focusing on the adequacy of controls and the availability of internal provisions, one of which is through the Internal Audit Report. The results of this review serve as input to the Board of Commissioners to guide Management in designing and implementing an effective and efficient internal control system while ensuring compliance with regulatory requirements.

2. Review of the Internal Audit Function
   The Audit Committee has conducted a review and assessment of the role and implementation of the Internal Audit function in evaluating the design and implementation of the internal control system, risk management, and the the Bank' governance process.

Proses reviu terhadap pelaksanaan fungsi Internal Audit diawali dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran Internal Audit tahun 2024 yang dilakukan saat rapat Komite Audit. Rencana kerja dan anggaran Internal Audit tersebut disusun secara risk based dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pihak Regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen untuk area-area yang akan dilakukan audit. Pada rencana kerja tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) objek yang harus dilakukan audit dimana aktivitasnya melekat kepada Unit Kerja dan sistem/aplikasi.

Selain proses penyusunan rencana kerja, Komite Audit juga melakukan reviu terhadap pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah sesuai yang tercantum di dalam POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum. Pada tahun 2024, dari 10 (sepuluh) objek audit yang telah ditetapkan terdapat 2 (dua) objek audit yang di *carry over* ke tahun 2025 dan 3 (tiga) objek audit dilakukan berdasarkan permintaan dari Regulator dengan mempertimbangkan beberapa hal dan proses tersebut telah disampaikan dalam rapat Komite Audit.

Selain aktivitas tersebut, Komite Audit juga telah melaksanakan seluruh aktivitas yang telah terlaksana pada tahun 2024, yaitu:

a. Pemberian rekomendasi dan persetujuan Annual Audit Plan tahun 2024 kepada Dewan Komisaris.
b. Kelemahan yang ditemukan dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak Manajemen untuk segera dilakukan tindak lanjut.
c. Tindak lanjut hasil audit agar selalu dilakukan monitoring pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
d. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses penunjukan KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Review Kepatuhan SKAI (secara 3 tahunan) Tahun 2024.
e. Pemberian evaluasi atas kinerja KAP audit Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada Dewan Komisaris.
f. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses pemberhentian dan pengangkatan Kepala SKAI PT Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2024.
g. Komite Audit melakukan meeting secara periodik sesuai peraturan Regulator dengan agenda pembahasan antara lain terkait reviu pelaksanaan audit, monitoring tindak lanjut temuan audit dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kecukupan sistem pengendalian internal Bank.

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Eksternal Audit
Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal melalui proses pemberian evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan 2023 kepada Dewan Komisaris dan pemberian

The review process of the Internal Audit function begins with the preparation of the Internal Audit work plan and budget for 2024, which is conducted during the Audit Committee meeting. The Internal Audit work plan and budget are developed based on a risk-based approach, considering recommendations from the Regulator, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Management for areas to be audited. The 2024 work plan includes 10 (ten) audit objects, each attached to specific units and systems/applications.

In addition to the preparation of the work plan, the Audit Committee also conducts reviews of the audit implementation. The audits performed by the Internal Audit Unit (IAU) have been carried out in accordance with the provisions outlined in POJK No. 1/POJK.03/2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks. In 2024, out of the 10 (ten) audit objects that were established, 2 (two) audit objects were carried over to 2025, and 3 (three) audit objects were conducted at the request of the Regulator, considering several factors. This process has been presented in the Audit Committee meetings.

Apart from these activities, the Audit Committee also carried out all planned activities implemented in 2024, which include:

a. Providing recommendations and approval of the 2024 Annual Audit Plan to the Board of Commissioners.
b. Ensuring any weaknesses identified through audit findings are promptly communicated to Management for immediate follow-up.
c. Monitoring the implementation of follow-up actions on audit findings to ensure they add value to the Bank's goal achievement.
d. Providing recommendations to the Board of Commissioners the appointment process of the Public Accounting Firm (KAP) for the 2024 Financial Statement Audit and the 2024 Triennial Compliance Review of the Internal Audit Unit (SKAI).
e. Providing an evaluation of the KAP performance for the 2023 Financial Statement Audit to the Board of Commissioners.
f. Providing recommendations to the Board of Commissioners the process of dismissal and appointment of the Head of Internal Audit Unit (SKAI) of PT Bank Aladin Syariah Tbk for the year 2024.
g. Conducting periodic Audit Committee meetings in accordance with regulatory provisions, with agendas including audit implementation reviews, monitoring of audit findings follow-up, and other matters related to the adequacy of the Bank's internal control system.

3. Supervision of the External Audits Implementation
The Audit Committee supervises the implementation of the External Audit through the process of providing an evaluation of the External Auditor performance on the 2023 Financial Statements audit to the Board of

rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses Penunjukan KAP atas audit Laporan Keuangan Tahun 2024 Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (E&Y Indonesia).

4. Reviu Penyajian Laporan Keuangan Publikasi
   Komite Audit secara periodik melakukan reviu terhadap laporan keuangan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan reviu tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran figure yang disajikan.
5. Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2024
   Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2024 adalah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan materi pembahasan yang dapat dilihat pada bagian Agenda Kegiatan Komite Audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank") membentuk Komite Pemantau Risiko dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada Bank. Adapun Piagam ini disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas sehingga pelaksanaan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001.BOC/01.2024 tanggal 31 Januari 2024. Piagam ini mengatur tentang:

1. Dasar hukum
2. Pembentukan Komite
3. Struktur dan keanggotaan
4. Persyaratan keanggotaan
5. Masa tugas
6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
7. Rapat Komite, kuorum dan pengambilan keputusan
8. Benturan kepentingan
9. Sekretariat, dan
10. Mekanisme evaluasi kinerja

Piagam Komite akan dikinikan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Commissioners and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the process of Appointing a KAP for the audit of the 2024. Financial Statements. The Bank Financial Statements for the year ended December 31, 2024 has been audited by Public Accounting FirmPurwantono, Sungkoro & Surja (E&Y Indonesia).

4. Review of the Presentation of Published Financial Statements
   The Audit Committee periodically reviews Financial Statements prior to publication. The review is intended to assess the fairness of the figures presented.
5. Realization of Audit Committee Meetings during 2024
   The Audit Committee held 12 (twelve) meetings in 2024, with the discussion materials presented in the Audit Committee Activity Agenda section.

RISK MONITORING COMMITTEE

In order to assist and support the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities, PT Bank Aladin Syariah Tbk ("the Bank") has established a Risk Monitoring Committee based on the prevailing laws and regulations.

The Risk Monitoring Committee is established by and accountable to the Board of Commissioners to support the effectiveness of the Board's duties and responsibilities related to the implementation and oversight of risk management within the Bank. This Charter is prepared to provide the Risk Monitoring Committee with a clear reference and framework in carrying out its duties and responsibilities, thereby ensuring accountability in accordance with applicable regulations

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee performs its duties and responsibilities in accordance with the Risk Monitoring Committee Charter, which was established and ratified through the Board of Commissioners' Decision No. SK.001.BOC/01.2024 dated January 31, 2024. This Charter regulates the following:

1. Legal basis
2. Establishment of the Committee
3. Structure and membership
4. Membership requirements
5. Term of office
6. Duties, responsibilities, and authority
7. Committee meetings, quorum, and decision-making
8. Conflict of interest
9. Secretariat
10. Performance evaluation mechanism

The Charter will be maintained and updated in accordance with the development of applicable regulations and the Bank's current conditions.

Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua KPR merangkap anggota.
   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
2. Mayoritas lebih dari 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan pihak Independen.
3. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak 1 (satu) komite lainnya pada Bank.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko. Masa tunggu sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan (direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko) atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
7. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

Structure of the Risk Monitoring Committee Membership

1. Members of the Risk Monitoring Committee shall consist of at least:
   a. One Independent Commissioner as the Chairman of the Committee, concurrently serving as a member.
   b. One Independent Party with expertise in risk management.
   c. One Independent Party with expertise in Islamic banking.
2. The majority of more than 51% (fifty-one percent) of the Risk Monitoring Committee members must consist of Independent Commissioners and Independent Parties.
3. Members from Independent Parties shall be recommended by the Nomination and Remuneration Committee.
4. The Chairman of the Risk Monitoring Committee may only concurrently serve as chairman of a maximum of 1 (one) other committee within the Bank.
5. Members of the Board of Directors are prohibited from serving as members of the Risk Monitoring Committee.
6. Former members of the Board of Directors, Executive Officers, or parties who have a relationship with the Bank that may affect their ability to act independently must undergo a waiting period of at least 6 (six) months before becoming an Independent Party in the Risk Monitoring Committee. The waiting period as referred to does not apply to former members of the Board of Directors in charge of supervisory functions (directors in charge of compliance functions or directors in charge of risk management functions) or Executive Officers who perform supervisory functions at the Bank.
7. The Risk Monitoring Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fransisca Ekawati	Ketua (Anggota) Komite Pemantau Risiko Chairman (Member) of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002. BOD/04.2021 tanggal 7 April 2021. Board of Commissioners Decision Letter No. SK.002. BOD/04.2021 dated April 7, 2021.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002.BOD/03.2022 tanggal 7 Maret 2022. Board of Commissioners Decision Letter No. SK.002. BOD/03.2022 dated March 7, 2022.
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. SK.002. BOD/03.2022 tanggal 9 Maret 2022. Board of Directors Decision Letter No. SK.002. BOD/03.2022 dated March 9, 2022.
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. SK.003. BOD/11.2022 tanggal 1 Desember 2022. Board of Directors Decision Letter No. SK.003. BOD/11.2022 dated December 1, 2022.

MASA TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
3. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai anggaran dasar Bank.
4. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
5. Dalam hal terjadi kelowongan dalam Komite Pemantau Risiko, yakni jumlah anggota Komite Pemantau Risiko kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko wajib dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadi lowongan.

TERM OF OFFICE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

1. The term of office for members of the Risk Monitoring Committee who are members of the Board of Commissioners shall be the same as their term as determined by the General Meeting of Shareholders.
2. Members of the Risk Monitoring Committee who are also members of the Board of Commissioners shall automatically cease to serve in the Committee once their term as members of the Board of Commissioners ends.
3. The term of office for members of the Risk Monitoring Committee who are Independent Parties shall not exceed the term of the Board of Commissioners as stipulated in the Bank's Articles of Association.
4. The Chairman of the Risk Monitoring Committee is entitled to propose the replacement of a committee member if the member's term ends, resigns, or is dismissed.
5. In the event of a vacancy in the Risk Monitoring Committee—when the number of committee members falls below the required minimum due to permanent incapacity or resignation for any reason—the appointment of a new member must be made within 90 (ninety) days from the occurrence of the vacancy.

Profil Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Profile

Fransisca Ekawati

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Fransisca Ekawati dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Fransisca Ekawati, Chairman of the Audit Committee, is presented in the Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Rudy Hamdani

Anggota Komite Audit/Presiden Komisaris (Independen)
Member of Audit Committee/President Commissioner (Independent)

Profil Anggota Komite Audit Rudy Hamdani dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Rudy Hamdani, Member of the Audit Committee, is presented in the Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Andreas Danny Soesanto Anggota Komite Audit/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	 **Periode dan Masa Jabatan: 2020— 2024** Period and Term of Office : 2020-2024
Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 70 tahun Kelahiran Jakarta, 8 Agustus 1954/	**Personal Data** Indonesian Citizenship 70 years old was born in Jakarta, August 8, 1954
Domisili Indonesia	**Domicile** Indonesia
Pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Djaja (1986)	**Education** Bachelor of Management Economics from Kristen Djaja University (1986)
Pengalaman Kerja • Komite Audit dan Risk Management di PT Bank Index Selindo (2018—Saat ini) • Direktur Operasional & Direktur Kepatuhan di PT Bank Index Selindo (2008—2018) • Direktur Operasional & Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (2001—2008) • Direktur Operasional di PT Bank Patriot (2000—2001) • Tim Penyelesaian DPK di BPPN (1999—2000) • Kepala Divisi Operasional di PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999) • Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni International (1991—1997) • PT Overseas Express Bank (1979—1991) • Customer Support di PT Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia (1975—1979)	**Work Experiences** • Audit and Risk Management Committee at PT Bank Index Selindo (2018—Present) • Operations Director & Compliance Director at PT Bank Index Selindo (2008—2018) • Operations Director & Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (2001—2008) • Operations Director at PT Bank Patriot (2000—2001) • TPF Settlement Team at IBRA (1999—2000) • Head of Operations Division at PT Bank Metropolitan Raya (1997—1999) • Head of Operations Division at PT Bank Harmoni International (1991—1997) • PT Overseas Express Bank (1979—1991) • Customer Support at PT Bank Pembangunan Pelayaran Indonesia (1975—1979)
Rangkap Jabatan Komite Audit dan Risk Management di PT Bank Index Selindo	**Concurrent Position** Audit and Risk Management Committee at PT Bank Index Selindo

Jeffri Sugiarto Anggota Komite Audit/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	 **Periode dan Masa Jabatan: 2022—2025** Period and Term of Office: 2022-2025
Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 37 tahun Kelahiran Jakarta, 5 Maret 1987	**Personal Data** Indonesian Citizenship 37 years old was born in Jakarta, March 5, 1987
Domisili Indonesia	**Domicile** Indonesia
Pendidikan • Sarjana (S1) Accounting, San Fransisco State University (2010) • Sarjana (S2) Business Administration, Argosy University (2015)	**Education** • Bachelor of Accounting, San Francisco State University (2010) • Bachelor of Business Administration, Argosy University (2015)
Pengalaman Kerja • Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Saat ini) • Senior Tax Associate, PBTaxand Consulting (2015—2016) • Staff Akunting & Auditor, Van Sloten & Laranang CPAs, California Amerika (2013—2015) • Tax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California Amerika (2008)	**Work Experiences** • Tax and Accounting, Partner Evinco Mulia Consulting (2016—Present) • Senior Tax Associate, PBTax and Consulting (2015—2016) • Accounting & Auditor Staff, Van Sloten & Laranang CPAs, California America (2013—2015) • Tax Preparer, Volunteer Income Tax Assistance, California America (2008)
Rangkap Jabatan Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting	**Concurrent Position** Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Independensi Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mewujudkan praktik *Good Corporate Governance* yang sesuai prosedur, Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dalam bentuk opini dan rekomendasi yang objektif, independen dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak di bawah tekanan pihak manapun dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap potensi risiko.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independency of the Risk Monitoring Committee

In realizing Good Corporate Governance practices in accordance with the established procedures, the Risk Monitoring Committee must perform its duties and responsibilities professionally and independently, delivering objective, accountable, and impartial opinions and recommendations, without influence or pressure from any party during the evaluation and oversight of potential risks.

All members of the Risk Monitoring Committee are independent parties, with no financial, managerial, shareholding, or family relations to members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders, and no business relations with the Bank which could impair their ability to act independently.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with			Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relations with Other Companies
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	
Fransisca Ekawati	x	x	x	x	x	x	x
Rudy Hamdani	x	x	x	x	x	x	x
Andreas Danny Soesanto	x	x	x	x	x	x	x
Jeffri Sugiarto	x	x	x	x	x	x	x

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan tugas dan tanggung jawab yang paling kurang meliputi:
   a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
   b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
3. Komite Pemantau Risiko dapat menambahkan risiko yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:
   a. Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, pejabat, maupun karyawan Bank dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Risk Monitoring Committee

1. To provide recommendations to the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee carries out duties and responsibilities which at least include:
   a. Evaluating risk management policies and guidelines and implementing the Bank policies.
   b. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.
2. The Risk Monitoring Committee is obliged to supervise the implementation of risk management related to country risk and transfer risk carried out by the Bank, including the implementation of evaluation and testing (stress testing).
3. The Risk Monitoring Committee can add risks related to the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee in accordance with the needs and/or complexity of the Bank.
4. In carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee has the following authorities:
   a. Request and obtain information from the Board of Directors, officers and employees of Bank and parties carrying out risk management functions, regarding the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee.

b. Memperoleh informasi dari auditor internal maupun eksternal.
c. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen, data dan Sistem Informasi Manajemen (MIS) serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan Pemantau Risiko

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko diatur beberapa hal terkait tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat sebagai berikut:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Ketua dan/atau Anggota Komite Pemantau Risiko.
2. Agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atas dasar usul pendapat dari anggota lainnya pada Komite Pemantau Risiko.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
4. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen lainnya apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
5. Apabila dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan Rapat Komite Pemantau Risiko untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko.
6. Materi dan seluruh dokumen terkait Rapat Komite Pemantau Risiko disiapkan, dikumpulkan, dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
7. Setiap keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko.
8. Setiap Rapat Komite Pemantau Risiko dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko kepada Ketua Komite Pemantau Risiko untuk ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
9. Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang telah ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko/ Ketua Pengganti Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Komite Pemantau Risiko selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris sebagai laporan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, kepada anggota dan unit kerja terkait.
10. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko yang terkait dengan seluruh unit kerja ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja dengan diketahui oleh Direksi. Hasil tindak lanjut keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko oleh unit kerja terkait disampaikan dalam Rapat Komite Pemantau Risiko periode selanjutnya.

b. Obtain information from internal and external auditors.
c. Full, free and unlimited access to documents, data and Management Information Systems (MIS) as well as other resources belonging to Bank related to the implementation of its duties.
d. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Meetings, Quorum, and Decision-Making

In accordance with the Risk Monitoring Committee Charter, several matters related to the procedures and procedures for holding meetings are regulated as follows:

1. The Risk Monitoring Committee must hold meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month, or at any time deemed necessary by the Chairman and/or members of the Committee.
2. The agenda or events to be discussed in each meeting and gathering are prepared by the Chairman of the Risk Monitoring Committee based on suggestions and opinions from other committee members.
3. The Risk Monitoring Committee meetings may only be held if attended by at least 51% of the total number of the committee members, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party.
4. The Risk Monitoring Committee Meetings are chaired by the Chairman of the Committee, or by another Independent Party member if the Chairman is unavailable.
5. If necessary, the Risk Monitoring Committee may invite other relevant parties to attend the meeting.
6. Meeting materials and related documents are prepared, compiled, and documented by the Secretary of the Risk Monitoring Committee.
7. All decisions made in the meetings are binding on all members of the Risk Monitoring Committee.
8. Each meeting and its outcomes are recorded in the Minutes of Meeting, prepared and submitted by the Secretary of the Risk Monitoring Committee and signed by both the Chairman and the Secretary.
9. Signed minutes are then distributed by the Secretary to the Board of Commissioners as a report on the Committee's activities, as well as to members and relevant work units.
10. Decisions involving all work units must be followed up by the respective units, with the Board of Directors' knowledge. The follow-up results must be reported in the next Committee meeting.

11. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Pemantau Risiko selain melalui forum rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sirkulasi, dengan ketentuan:
    a. Keputusan untuk mengajukan pengambilan keputusan secara sirkulasi ditentukan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang disampaikan melalui Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
    b. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko menyetujui usul yang diajukan secara tertulis (termasuk melalui email) dengan memberikan persetujuan tertulis secara elektronik.
12. Rapat dapat dilakukan dengan tatap muka baik secara langsung maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, atau kombinasi antara keduanya.
13. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
15. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip satu orang satu suara.

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

11. Decision-making by the Risk Monitoring Committee, aside from formal meetings, may also be conducted through a circular resolution mechanism, subject to the following provisions:
    a. Decision to proceed via circular resolution is determined by the Chairman and conveyed through the Secretary.
    b. Chairman and Committee members approve the proposal in writing (including by email), providing written electronic consent.
12. Meetings may be conducted in person or virtually via teleconference or other media allowing all participants to see, hear, and interact with each other, or through a combination of both methods.
13. Any dissenting opinions expressed during the meeting must be clearly recorded in the Minutes of Meeting along with the reasoning behind them.
14. Decisions are primarily made based on deliberation and consensus.
15. If consensus cannot be reached, decisions are made by majority vote, applying the principle of one person, one vote.

In 2024, the Risk Monitoring Committee held 12 meetings, with agenda details and attendance frequencies as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
18 Januari 2024 January 18, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya • Informasi Monitoring Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance Sektor Ekonomi Financing Portfolio • Informasi Rasio Risiko per 31 Desember 2023 • Informasi Struktur Organisasi Risk Management • Informasi Pengkinian Piagam Komite Risiko • Opening • Review of Minutes from the Previous Risk Monitoring Committee Meeting • Update on Monitoring of Risk Appetite and Risk Tolerance Limits for the Economic Sector Financing Portfolio • Risk Ratio Information as of December 31, 2023 • Information on the Risk Management Organization Structure • Update on the Risk Committee Charter	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
16 Februari 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet	• Pembukaan • Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya • Informasi Monitoring Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance Sektor Ekonomi Financing Portofolio • Proposal Pengkinian Risk Appetite dan Risk Tolerance Sektor Ekonomi • Informasi Perubahan Struktur Komposisi Komite Pembiayaan dan Batasan Pemegang Kewenangan Persetujuan Pembiayaan Komersial • Informasi Perubahan Batasan Pemegang Kewenangan Persetujuan Pembiayaan Konsumer • Informasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2023 • Informasi KPMM – ICAAP • Informasi Struktur Organisasi Risk Management • Informasi Roadmap Risk Management	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)
February 16, 2024	MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Opening • Review of Minutes from the Previous Risk Monitoring Committee Meeting • Update on Monitoring of Risk Appetite and Risk Tolerance Limits for the Economic Sector Financing Portfolio • Proposal for Updating Risk Appetite and Risk Tolerance for the Economic Sector • Information on Changes in the Composition Structure of the Financing Committee and Approval Authority Limits for Commercial Financing • Information on Changes in Approval Authority Limits for Consumer Financing • Information on the Bank’s Financial Health Report for the Second Semester of 2023 • Information on Capital Adequacy Ratio (CAR) – ICAAP • Information on the Risk Management Organization Structure • Information on the Risk Management Roadmap	
18 Maret 2024 March 18, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya • Informasi Monitoring Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance Sektor Ekonomi Financing Portofolio RAS 2024 • Informasi Perubahan Batasan Kewenangan Persetujuan Pembiayaan Konsumer • Informasi Tambahan Perubahan Pada Penamaan Sektor Ekonomi Aktivitas Rumah Sakit dan Biro Perjalanan Wisata • Informasi Rasio Risiko per 31 Januari 2024 • Informasi Roadmap Risk Management • Opening • Review of Minutes from the Previous Risk Monitoring Committee Meeting • Update on Monitoring of Risk Appetite and Risk Tolerance Limits for the Economic Sector Financing Portfolio – RAS 2024 • Information on Revisions to Approval Authority Limits for Consumer Financing • Additional Information on Renaming of Economic Sector Categories: Hospital Activities and Travel Agencies • Risk Ratio Information as of January 31, 2024 • Information on the Risk Management Roadmap	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)
24 April 2024 April 24, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya • Hasil Sosialisasi Monitoring Limit Financing RAS 2024 Sektor Ekonomi • Informasi Rasio Risiko per 29 Februari 2024 • Informasi Roadmap Risk Management • Opening • Review of Minutes from the Previous Risk Monitoring Committee Meeting • Results of the Dissemination on Monitoring of 2024 RAS Financing Limits by Economic Sector • Risk Ratio Information as of February 29, 2024 • Information on the Risk Management Roadmap	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
15 Mei 2024 May 15, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan. • Minutes from previous meeting • Laporan Profil Risiko Triwulan I 2024 • Risk Appetite dan Risk Tolerance per Sektor Ekonomi per Maret 2024 • Rasio Risiko Per 31 Maret 2024 • Business Impact Analysis • Organization Structure Risk Management • Roadmap Risk Management • Opening • Minutes from the previous meeting • Risk Profile Report for Q1 2024 • Risk Appetite and Risk Tolerance per Economic Sector as of March 2024 • Risk Ratio as of March 31, 2024 • Business Impact Analysis • Organization Structure of Risk Management • Risk Management Roadmap	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)
21 Juni 2024 June 21, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Minutes from previous meeting • Update Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank 2024 • Rasio Risiko Per 30 April 2024 • Roadmap Risk Management • Opening • Minutes from the previous meeting • Update on the Bank's Risk Appetite and Risk Tolerance for 2024 • Risk Ratio as of April 30, 2024 • Risk Management Roadmap	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)
29 Juli 2024 July 29, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Minutes from previous meeting • Laporan TKB Semester I 2024 dan Profil Risiko Triwulan II 2024 • KPMM – ICAAP • Update Rasio Risiko per 30 Juni 2024 • Approval Sektor Ekonomi RAS Breach • Roadmap Risk Management per Juli 2024 • ORM & BRC Update • Minutes from the previous meeting • TKB Report for the First Semester of 2024 and Risk Profile for Q2 2024 • KPMM – ICAAP • Update on Risk Ratio as of June 30, 2024 • Approval of Economic Sector RAS Breach • Risk Management Roadmap as of July 2024 • ORM & BRC Update	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)
19 Agustus 2024 August 19, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Minutes from previous meeting • Update Rasio Risiko per 31 Juli 2024 • Hasil stress testing Risiko Kredit, Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 2024 • Roadmap Risk Management per Agustus 2024 • Opening • Minutes from previous meeting • Update on Risk Ratio as of July 31, 2024 • Results of Credit Risk, Market Risk, and Liquidity Risk Stress Testing for 2024 • Risk Management Roadmap as of August 2024	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
20 September 2024 September 20, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Minutes from previous meeting • Update Rasio Risiko per 31 Agustus 2024 • Pengkinian Risk Appetite dan Risk Tolerance • Pengkinian Piagam Komite Pembiayaan dan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan • Pengkinian Piagam KMR dan ALCO • Roadmap Risk Management per September 2024 • Update ORM • Opening • Minutes from previous meeting • Update on Risk Ratio as of August 31, 2024 • Update on Risk Appetite and Risk Tolerance • Update on the Charter of the Financing Committee and the Authority Limit for Financing Decisions • Update on the Charter of the KMR and ALCO • Risk Management Roadmap as of September 2024 • ORM Update	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”)
30 Oktober 2024 October 30, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Minutes from previous meeting • Laporan Profil Risiko Triwulan III 2024 • Proposal Perubahan Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Risk Limit Triwulan III 2024 • Nasabah Watchlist • Update Rasio Risiko per 30 September 2024 • Pengesahan hasil Stress Testing untuk Recovery dan Resolution Plan • Roadmap Risk Management per September 2024 • Update ORM • Opening • Minutes from previous meeting • Risk Profile Report for Q3 2024 • Proposal for Changes in Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits for Q3 2024 • Customer Watchlist • Update on Risk Ratio as of September 30, 2024 • Approval of Stress Testing Results for Recovery and Resolution Plan • Risk Management Roadmap as of September 2024 • ORM Update	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)
21 November 2024 November 21, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Minutes from previous meeting • Penyesuaian Laporan TKB Semester I 2024 • Update Rasio Risiko per 31 Oktober 2024 • Update Risk Limit Risiko Pasar – Ekuitas Kategori AFS • Update Final Model Credit Scoring Retail Payroll SAT • Monitoring Nasabah Watchlist • Roadmap Risk Management per November 2024 • Update ORM • Opening • Minutes from previous meeting • Adjustment of TKB Report for Semester I 2024 • Update on Risk Ratio as of October 31, 2024 • Update on Market Risk Limit – AFS Equity Category • Update on Final Model for Retail Payroll Credit Scoring SAT • Monitoring of Customer Watchlist • Risk Management Roadmap as of November 2024 • ORM Update	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
20 Desember 2024 December 20, 2024	Gedung MCC Lantai 7, Ruang Board Meeting dan Online - Aplikasi Google Meet MCC Building 7th Floor, Board Meeting Room and Online - Google Meet Application	• Pembukaan • Minutes from previous meeting • Update Rasio Risiko per 30 November 2024 • Monitoring Nasabah Watchlist • Laporan Pelaksanaan Komite Risiko Tahun 2024 • Roadmap Risk Management per Desember 2024 • Update ORM • Sosialisasi Internal Control over • Financial Reporting (POJK 15/2024) • Opening • Minutes from previous meeting • Update on Risk Ratio as of November 30, 2024 • Monitoring of Customer Watchlist • Report on Risk Committee Activities for 2024 • Risk Management Roadmap as of December 2024 • ORM Update • Dissemination of Internal Control over • Financial Reporting (POJK 15/2024)	1. Fransisca Ekawati (“FE”) 2. Rudy Hamdani (“RH”) 3. Andreas Danny Soesanto (“ADS”) 4. Jeffri Sugiarto (“JS”)

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di bawah ini.

Attendance Recapitulation of the Risk Monitoring Committee members can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Internal
Attendance Recapitulation of the Risk Monitoring Committee at the internal meeting.

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	PersentaseKehadiran Attendance Percentage
Fransisca Ekawati (Ketua/Anggota/Chairman/Member)	12	12	100%
Rudy Hamdani (Anggota/Member)	12	12	100%
Andreas Danny Soesanto (Anggota/Member)	12	12	100%
Jeffri Sugiarto (Anggota/Member)	12	11	91%
Rata-rata Average			**98%**

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Bank Aladin Syariah senantiasa mendorong dan memfasilitasi Komite Pemantau Risiko untuk melakukan pengembangan kompetensi. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.

Competency Development Program for the Risk Monitoring Committee

Bank Aladin Syariah continuously encourages and facilitates the Risk Monitoring Committee to enhance their competencies. The training programs attended by members of the Risk Monitoring Committee throughout 2024 are presented in the Corporate Governance chapter.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2024 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di antaranya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Implementation of Duties of the Risk Monitoring Committee

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities, including the following:

1. Conducting evaluations of risk management policies and guidelines, as well as the implementation of the Bank’s policies.
2. Monitoring and evaluating the implementation of duties by the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Lebih jauh, Komite Remunerasi dan Nominasi akan menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan sistem nominasi dan remunerasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Aladin Syariah telah memiliki Piagam Komite yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman tersebut telah disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

Per 31 Desember 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota. Adapun susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners to carry out the Board's functions and duties related to the nomination and remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Furthermore, the Nomination and Remuneration Committee is tasked with assessing, monitoring, evaluating, and ensuring the implementation of the nomination and remuneration systems in accordance with the Bank's Articles of Association and applicable regulations.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee of Bank Aladin Syariah has adopted a Committee Charter serving as a guideline in carrying out its duties and responsibilities. This guideline has been developed in accordance with prevailing laws and regulations.

Number, Composition, and Structure of the Nomination and Remuneration Committee in 2024

As of December 31, 2024, the Nomination and Remuneration Committee of the Bank consists of three (3) members, comprising of one (1) Chairman and two (2) members. The composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rudy Hamdani	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. M.005/HCD/03.2022 tanggal 7 Maret 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. M.005/HCD/03.2022 dated March 7, 2022
Ationo Teguh Basuki	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. M.017.HCA/02.2021 tanggal 5 Februari 2021 Board of Commissioners Decision Letter No. M.017.HCA/02.2021 dated February 5, 2021
Christine	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001/BOD/07.204 Board of Commissioners Decision Letter No. SK.001/BOD/07.204

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Nomination and Remuneration Committee Profile

Rudy Hamdani

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi/Presiden Komisaris (Independen)
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/President Commissioner (Independent)

Profil Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Rudy Hamdani dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Rudy Hamdani, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, is presented in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Ationo Teguh Basuki

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/Komisaris
Member of the Nomination and Remuneration Committee/Commissioner

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ationo Teguh Basuki dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Ationo Teguh Basuki, Member of the Nomination and Remuneration Committee, is presented in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Christine
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan: 2 Juli 2024
Period of Office: July 2, 2024

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun per 31 Desember 2024

Domisili
Indonesia

Pendidikan
Sarjana Psikologi, Universitas Indonesia (2010)

Pengalaman Kerja
- Fintech as Head of Human Resources & General Affairs (2020 – 2024)
- Traveloka (2016 – 2020)
- Head of People Operations Airyrooms (2019 – 2020)
- Human Resources Business Partner Customer Operations & Airyrooms (2016 – 2018) Recruitment Associate Manager Airyrooms (2016)
- JAC Recruitment as Senior Recruitment Consultant (2012 – 2016)
- Bright Consulting as Senior Executive Search Consultant (2010 – 2012)

Rangkap Jabatan
Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Personal Data
Indonesian Citizenship
36 years old as of December 31, 2024

Domicile
Indonesia

Education
Bachelor of Psychology, University of Indonesia (2010)

Work Experiences
- Fintech as Head of Human Resources & General Affairs (2020 – 2024)
- Traveloka (2016 – 2020)
- Head of People Operations Airyrooms (2019 – 2020)
- Human Resources Business Partner Customer Operations & Airyrooms (2016 – 2018) Recruitment Associate Manager Airyrooms (2016)
- JAC Recruitment as Senior Recruitment Consultant (2012 – 2016)
- Bright Consulting as Senior Executive Search Consultant (2010 – 2012)

Concurrent Position
Tax dan accounting, Partner Evinco Mulia Consulting

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait Kebijakan Remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
2. Terkait Kebijakan Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

1. Regarding Remuneration Policy:
   a. Evaluate remuneration policies.
   b. Evaluate the suitability of remuneration policies with the implementation of these policies.
   c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Officers and employees as a whole.
2. Regarding Nomination Policy:
   a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board.
   b. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding prospective members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Sharia Supervisory Board.
   c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding independent party candidates who will become members of the Committee.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Secara periodik, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, Ketua Komite yang akan mengambil keputusan terakhir. Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali di tahun 2024 dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee MeetingS

Periodically, the Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least 1 (one) time every 3 (three) months with a minimum attendance quorum of 50% of all members of the Nomination and Remuneration Committee. Every decision on Remuneration and Nomination is taken based on deliberation to reach consensus. In the event there are equal votes, the Committee Chairman will make the final decision. The Audit Committee has held 8 (eight) meetings in 2024 with detailed agendas and frequency of attendance as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Minutes and Attendance of the Nomination and Remuneration Committee Meetings

Tanggal **Date**	**Tempat** **Place**	**Agenda** Agenda	**Peserta** Participants	**Alasan Ketidakhadiran Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat** Reasons for the Absence of the Nomination and Remuneration Committee at the Meeting
15 Februari 2024 February 15, 2024	Daring Online	• Persetujuan Bonus Tahunan 2023 untuk Pengurus Bank • Persetujuan Bonus Tahunan 2023 Karyawan Bank • Approval of 2023 Annual Bonus for the Bank Management • Approval of 2023 Annual Bonus for the Bank Employees	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh 3. Basuki 4. Linda Setiawan	-
21 Maret 2024 March 21, 2024	Daring Online	Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2024 untuk Karyawan dan Pegurus Bank Approval of 2024 Annual Salary Adjustment for the Bank Employees and Management	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh 3. Basuki 4. Linda Setiawan	-
19 April 2024 April 19, 2024	Daring Online	Rekomendasi calon anggota baru Direksi Bank Recommendation of New Candidate for the Bank's Board of Directors	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh 3. Basuki 4. Linda Setiawan	-
7 Mei 2024 May 7, 2024	Daring Online	Melengkapi rekomendasi calon pengurus Bank baru sesuai umpan balik OJK Completion of Recommendation for New Bank Management Candidates Based on OJK Feedback	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh 3. Basuki 4. Linda Setiawan	-
25 Juni 2024 June 25, 2024	Daring Online	Rekomendasi calon anggota baru Direksi Bank Recommendation of New Candidate for the Bank's Board of Directors	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh 3. Basuki 4. Linda Setiawan	-
2 Juli 2024 July 2, 2024	Daring Online	Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Replacement of the Remuneration and Nomination Committee Members	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh 3. Basuki 4. Linda Setiawan 5. Christine	-
20 November 2024 November 20, 2024	Kantor office	Rekomendasi calon anggota baru Direksi Bank Recommendation of Additional New Candidate for the Bank's Board of Directors	1. Rudy Hamdani 2. Ationo Teguh 3. Basuki 4. Christine	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat internal dapat dilihat di bawah ini.

The attendance recapitulation of the Nomination and Remuneration Committee members at internal meetings is presented below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi pada Rapat Internal
Recapitulation of the Nomination and Remuneration Committee Attendance at Internal Meetings

Komite Remunerasi dan Nominasi Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Meeting Percentage
Rudy Hamdani (Ketua/Chairman)	7	7	100%
Ationo Teguh Basuki (Anggota/Member)	7	7	100%
Christine (Anggota/Member)	2	2	100%
Rata-rata Average			**100%**

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank senantiasa mendorong dan memfasilitasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pengembangan kompetensi. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2024 dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi direalisasikan melalui penyelenggaraan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda yang telah disampaikan dalam pembahasan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah menjalankan kegiatan dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk calon pengurus Bank yang baru; Direksi
2. Perubahan Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Aladin Syariah Tbk
3. Persetujuan Bonus Tahunan 2023 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit, dan DPS)
4. Konfirmasi Bonus Tahunan 2023 Karyawan Bank
5. Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2024 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit dan DPS)
6. Konfirmasi dan Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2024 Karyawan Bank

Competency Development Program of the Nomination and Remuneration Committee

The Bank continuously encourages and facilitates the Nomination and Remuneration Committee to pursue competency development. The training programs attended by members of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2024 are presented in the Corporate Governance chapter.

Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee were carried out through the convening of 7 (seven) meetings with agendas as detailed in the Committee's meeting discussions in this Annual Report. Additionally, the Committee has performed the following activities and provided the following recommendations:

1. Recommendation for new members of the Bank's management; Board of Directors
2. Changes in the composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Aladin Syariah Tbk
3. Approval of the 2023 Annual Bonus for the Bank Management (Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board)
4. Confirmation of the 2023 Annual Bonus for the Bank Employees
5. Approval of the 2024 Annual Salary Adjustment for the Bank Management (Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board)
6. Confirmation and Approval of the 2024 Annual Salary Adjustment for the Bank Employees.

Komite-Komite Di Bawah Direksi
Committees Under The Board Of Directors

Direksi Bank membentuk 5 Komite Eksekutif dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Bank, yaitu:
1. Komite Pengarah Teknologi Informasi/*Information Technology Steering Committee* (ITSC);
2. Komite Aset dan Liabilitas/*Assets & Liabilities Committee* (ALCO);
3. Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC);
4. Komite Pembiayaan/*Credit Committee* (CC); dan
5. Komite Eksekutif Keberlanjutan/*Sustainability Executive Committee* (SEC).

The Bank's Board of Directors formed 5 Executive Committees with the aim of supporting the implementation of duties and responsibilities in managing the Bank, namely:
1. Information Technology Steering Committee (ITSC);
2. Assets and Liabilities Committee (ALCO);
3. Risk Management Committee (RMC);
4. Financing Committee/Credit Committee (CC); and
5. Sustainability Executive Committee (SEC).

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI/INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)

Direksi membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi atau *Information Technology Steering Committee* (ITSC) dengan tujuan memastikan keselarasan penerapan sistem teknologi informasi (TI) dengan rencana strategis Bank. Selain itu, Komite ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Bank dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)

The Board of Directors established the Information Technology Steering Committee (ITSC) to ensure the alignment of the information technology (IT) systems implementation with the Bank's strategic plans. In addition, the Committee aims to enhance the Bank's competitiveness through the optimal utilization of information technology.

Legal Basis

1. Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law.
2. Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
4. 4Financial Services Authority Regulation no. 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation no. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Circular No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Utilization of Information Technology by Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Circular No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks.

8. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Term of Reference (TOR) ITSC

ITSC memiliki Term of Reference yang mengatur susunan keanggotaan, tanggung jawab dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat. Adapun *Term of Reference* (TOR) ITSC telah diperbarui pada September 2024 dan akan senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur ITSC

Ketua Merangkap Anggota **Chairman concurrently Member**	Presiden Direktur President Director
Ketua Pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir **Substitute Chairman in the absence of the Chairman.**	Pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja penyelenggara TI Top Executive Leading the Information Technology Work Unit
Anggota ITSC **ITSC Members**	1. Direktur yang membawahi satuan kerja penyelenggara TI. 2. Direktur yang membawahi bidang satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan. 3. Direktur yang membawahi keuangan. 4. Pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja penyelenggara TI. 5. Pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja pengguna TI. 1. Director overseeing the information technology (IT) work unit 2. Director overseeing the risk management and compliance work unit 3. Director overseeing finance 4. Top executive leading the IT work unit 5. Top executive leading the IT user work units
Undangan Tidak Tetap **Not Fixed Invitation**	Divisi lainnya apabila diperlukan Other divisions as needed
Sekretaris **Secretary**	Divisi yang membawahkan IT Governance Risk Compliance (GRC). 1. Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat ITSC. 2. Membuat, mendokumentasikan, dan mensirkulasi risalah rapat. Risalah rapat minimal harus ditandatangani oleh ketua ITSC dan mendistribusikan hasil keputusan Rapat ITSC Division responsible for IT Governance, Risk, and Compliance (GRC) 1. The Secretary shall inform members of the ITSC meeting schedule. 2. Prepare, document, and circulate the minutes of meeting. The minutes must be signed, at a minimum, by the ITSC Chairman, and the ITSC meeting decisions must be distributed accordingly.

Tugas dan Tanggung Jawab ITSC

ITSC bertanggung jawab dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Kebijakan, standar, dan prosedur TI.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan Rencana Strategis TI.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI.
5. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
6. Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
7. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.

8. Information Technology Steering Committee Charter.

ITSC Terms of Reference (TOR)

ITSC has Terms of Reference which regulate the composition of membership, responsibilities and authority, provisions and mechanisms for holding meetings. The ITSC Terms of Reference (TOR) have been updated in September 2024 and will continue to be updated in accordance with the developments in applicable regulations and the latest conditions of the Bank.

ITSC Structure

Duties and Responsibilities of ITSC

The Information Technology Steering Committee (ITSC) is responsible for and provides recommendations to the Bank's Board of Directors, including the following:

1. Information Technology (IT) Strategic Plans aligning with the Bank's overall business strategy.
2. IT policies, standards, and procedures.
3. Alignment between IT development plans and the IT Strategic Plan.
4. Alignment between the implementation of IT development and the approved IT development plan.
5. Effectiveness of measures taken to minimize risks associated with the Bank's IT investments to ensure these investments contribute to the achievement of the Bank's business objectives.
6. Evaluation of IT cost-effectiveness in relation to the achievement of the planned benefits.
7. Monitoring of IT performance and efforts to improve IT performance.
8. Resolution of IT-related issues of which cannot be effectively, efficiently, and promptly resolved by IT user and provider units.

9. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.

Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC

ITSC melakukan rapat dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

1. Rapat ITSC dipimpin oleh Ketua ITSC atau ketua pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir.
2. Rapat ITSC dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Apabila sekretaris ITSC berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota), maka dapat digantikan oleh kepala dari unit kerja lain yang ditunjuk oleh ketua ITSC.
4. Rapat ITSC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 3 peserta undangan.
5. Materi rapat ITSC disiapkan dan dikumpulkan oleh sekretaris ITSC.
6. Pengambilan keputusan rapat ITSC hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota yang hadir.
7. Setiap rapat ITSC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ITSC yang disusun dan disampaikan oleh Sekretaris ITSC kepada Ketua ITSC untuk ditandatangani oleh ketua ITSC dan sekretaris ITSC.
8. Risalah rapat yang telah ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ITSC kepada anggota ITSC dan unit kerja terkait yang menghadiri rapat ITSC.
9. Seluruh dokumen rapat ITSC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ITSC.
10. Rapat dapat dihadiri oleh ketua ITSC dan anggota ITSC secara tatap muka atau daring.

Dalam hal ini, ITSC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda sebagai berikut:

9. Adequacy and allocation of the Bank's IT-related resources.

Provisions and Mechanism for ITSC Meeting Implementation

ITSC conducts meetings based on the following provisions and mechanisms:

1. ITSC meetings are chaired by the ITSC Chairman or an appointed substitute when the Chairman is unable to attend.
2. Meetings are held at least once a month or whenever deemed necessary.
3. If the ITSC Secretary is unable to attend due to illness, annual leave, or official duties outside the city, they may be replaced by the head of another work unit appointed by the ITSC Chairman.
4. A meeting is considered valid if attended by more than three invited participants.
5. Meeting materials are prepared and compiled by the ITSC Secretary.
6. Decisions are made only when approved by at least 51% (fifty-one percent) of all members present.
7. Each meeting and its decisions are documented in ITSC minutes of meeting, which are prepared and submitted by the ITSC Secretary to the Chairman for signature by both the Chairman and the Secretary.
8. Signed minutes of meeting are then distributed by the Secretary to ITSC members and relevant work units attended the meeting.
9. All ITSC meeting documents are compiled and archived by the Secretary.
10. Meetings may be attended either in person or virtually by the ITSC Chairman and members.

In this regard, the ITSC has held 12 (twelve) meetings with the following agenda details:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	26/01/2024	IT Dashboard periode Desember 2023 IT Dashboard for the period of December 2023
2	16/02/2024	IT Dashboard periode Januari 2024 IT Dashboard for the period January 2024
3	14/03/2024	IT Dashboard periode Februari 2024 IT Dashboard for the period of February 2024
4	23/04/2024	IT Dashboard periode Maret 2024 IT Dashboard for the period of March 2024
5	17/05/2024	IT Dashboard periode April 2024 IT Dashboard for the period of April 2024
6.	14/06/2024	IT Dashboard periode Mei 2024 IT Dashboard for the period of May 2024
7	19/07/2024	IT Dashboard periode Juni 2024 IT Dashboard for the period of June 2024
8	16/08/2024	IT Dashboard periode Juli 2024 IT Dashboard for the period of July 2024
9	13/09/2024	IT Dashboard periode Agustus 2024 IT Dashboard for the period of August 2024

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
10	18/10/2024	IT Dashboard Periode September 2024 IT Dashboard for the period of September 2024
11	29/11/2024	IT Dashboard Periode Oktober 2024 IT Dashboard for the period of October 2024
12	18/12/2024	IT Dashboard Periode November 2024 IT Dashboard for the period of November 2024

KOMITE ASET DAN LIABILITAS/ ASSETS & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas/Asset and Liability Committee ("ALCO") dibentuk sebagai salah satu tata kelola PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank") dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan asset and liability Bank dan penetapan formulasi kebijakan dan strategi Bank supaya memastikan bisnis Bank yang berkelanjutan.

ALCO dibentuk oleh Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan maupun strategi bisnis Bank.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.

ASSETS & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

The Asset and Liability Committee ("ALCO") is established as part of PT Bank Aladin Syariah Tbk's ("the Bank") governance framework to oversee and manage the Bank's assets and liabilities, as well as to formulate policies and strategies supporting sustainable business operations.

Formed by the Board of Directors, ALCO plays a key role in maintaining a sound balance sheet structure, including the analysis and formulation of policies and strategies, decision-making, and oversight of liquidity risk, market risk, and capital management. These responsibilities are carried out in alignment with the regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), as well as the Bank's business strategy.

Legal Basis

1. Law No. 7 of 1992 on Banking, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority, as amended by Law No. 4 of 2023.
4. Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
5. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
6. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies.
7. OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 on Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
8. OJK Regulation No. 42/POJK.03/2017 on the Obligation to Prepare and Implement Credit or Financing Policies for Commercial Banks.
9. OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
14. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk.

10. OJK Regulation No. 17 of 2023 on Governance Implementation for Commercial Banks.
11. OJK Regulation No. 2 of 2024 on Sharia Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
12. OJK Circular Letter No. 25/SEOJK.03/2023 on Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
13. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010, on Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
14. Articles of Association of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Piagam ALCO

ALCO menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam ALCO No: SK.006.BOD/09.2024 yang telah ditetapkan tanggal 20 September 2024. Piagam ini mengatur tentang:

- Dasar hukum;
- Struktur dan keanggotaan;
- Masa tugas;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
- Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
- Benturan kepentingan;
- Sekretariat, dan
- Mekanisme evaluasi kinerja.

Piagam ALCO akan dikinikan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

ALCO Charter

ALCO carries out its duties and responsibilities in accordance with the ALCO Charter No. SK.006.BOD/09.2024, issued on September 20, 2024. The Charter outlines the following:

- Legal basis
- Structure and membership
- Term of office
- Duties, responsibilities, and authority
- Committee meetings, quorum, and decision-making
- Conflict of interest
- Secretariat
- Performance evaluation mechanism

The ALCO Charter will be updated periodically to reflect regulatory developments and the Bank's current conditions.

Struktur ALCO

ALCO Structure

Ketua **Chairman**	Presiden Direktur – merangkap anggota (memiliki hak voting) President Director – concurrently Member (with voting rights)
Pengganti Ketua **Substitute Chairman**	Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan – merangkap anggota dan dapat berperan sebagai ketua pengganti merangkap anggota dalam hal belum terisinya posisi ketua atau ketika ketua berhalangan (memiliki hak voting) The Director overseeing the Finance function – concurrently serves as a member and may act as a substitute chairman while retaining member status, either when the chairman position is vacant or the chairman is unavailable (with voting rights).
Anggota **Member**	1. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (memiliki hak voting); 2. Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan (memiliki hak voting); 3. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management; 4. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Central Finance; 5. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. 1. Director overseeing Compliance and Risk Management functions (with voting rights); 2. Director overseeing Financing function (with voting rights); 3. Group Head/Division Head in charge of Enterprise Risk Management; 4. Group Head/Division Head in charge of Central Finance; 5. Group Head/Division Head in charge of Treasury.
Sekretaris **Secretary**	Divisi yang membawahi fungsi Enterprise Risk Management Division overseeing the Enterprise Risk Management function.
Terundang **Invited**	1. Chief yang membawahkan fungsi IT dan Operasional; 2. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Business Planning and Revenue Assurance (BPRA); 3. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Pembiayaan; dan 4. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Funding. 1. Chief overseeing IT and Operations functions; 2. Group Head/Division Head overseeing Business Planning and Revenue Assurance (BPRA); 3. Group Head/Division Head overseeing Financing functions; and 4. Group Head/Division Head overseeing Funding functions.
Frekuensi Rapat **Meeting Frequency**	ALCO wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan ALCO meetings must be held at least 1 (one) time every month or whenever deemed necessary.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang ALCO

1. Kewajiban ALCO meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertera di bawah ini:
   a. Menyusun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan manajemen aktiva dan pasiva, termasuk pengaturan portofolio aktiva dan pasiva.
   b. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen modal, juga melakukan pemantauan dampak perubahan modal pada aktiva dan pasiva.
   c. Membuat, memantau dan melakukan analisa laporan manajemen likuiditas secara berkala dan memformulasikan strategi manajemen likuiditas.
   d. Membuat, memantau dan melakukan analisa laporan pemantauan risiko pasar, seperti pergerakan suku bunga dan mata uang pasar secara berkala.
   e. Menyusun kebijakan dan strategi suku bunga dasar pembiayaan dan produk pendanaan.
   f. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan portofolio *Treasury*.
   g. Memantau profil risiko dan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan manajemen aktiva dan pasiva, penetapan *risk appetite and risk tolerance*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dan kecukupan modal.
   h. Mengevaluasi penyusunan kerangka, strategi, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen aktiva dan pasiva.
   i. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stres dalam pengukuran risiko dan contingency plan.
   j. Mengevaluasi penyusunan kerangka, strategi, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen aktiva dan pasiva.
2. Hak Anggota ALCO
   a. Mengajukan proposal ke ALCO.
   b. Mengetahui kondisi yang berhubungan dengan proposal.
   c. Memeriksa ulang proposal yang diajukan ke rapat ALCO.
   d. Anggota ALCO yang memiliki hak voting mempunyai hak suara untuk membuat keputusan.
   e. Memonitor pelaksanaan dan penyelesaian hasil keputusan rapat ALCO.
3. Kewajiban Anggota ALCO
   a. Menghadiri rapat tepat waktu berdasarkan pemberitahuan sekretaris. Anggota ALCO harus mempunyai perwakilan dari Direktorat atau Divisi terkait dalam rapat apabila berhalangan hadir.
   b. Memberikan usulan dan menguraikan opini untuk masing-masing pengajuan proposal.
   c. Melaksanakan keputusan rapat ALCO dan merealisasikan pekerjaan yang telah diatur oleh ALCO.
   d. Memberikan saran untuk memperkuat manajemen *asset* dan *liability* Bank.
   e. Mengembangkan, memeriksa, dan memodifikasi strategi ALCO.

Duties, Responsibilities, and Authorities of ALCO

1. ALCO's Obligations include, but are not limited to, the following:
   a. Formulating policies and strategies related to asset and liability management, including asset and liability portfolio arrangements.
   b. Developing capital management policies and strategies, as well as monitoring the impact of capital changes on assets and liabilities.
   c. Preparing, monitoring, and analyzing liquidity management reports on a regular basis and formulating liquidity management strategies.
   d. Preparing, monitoring, and analyzing market risk monitoring reports on a regular basis, such as interest rate and currency fluctuations.
   e. Formulating policies and strategies for the basic lending rate and funding products.
   f. Formulating policies and strategies for Treasury portfolio management.
   g. Monitoring risk profiles and risk management related to asset and liability management, including setting risk appetite and risk tolerance, integrated risk management strategies, and capital adequacy.
   h. Evaluating the development of frameworks, strategies, policies, and guidelines for the implementation of asset and liability management.
   i. Establishing methodologies, scenarios, and evaluations, including stress conditions in risk measurement and contingency planning.
   j. Evaluating the development of frameworks, strategies, policies, and guidelines for the implementation of asset and liability management.
2. Rights of ALCO Members:
   a. Submit proposals to ALCO.
   b. Obtain information related to the proposals.
   c. Review proposals submitted to ALCO meetings.
   d. ALCO members with voting rights are entitled to vote in decision-making.
   e. Monitor the implementation and resolution of ALCO meeting decisions.
3. Obligations of ALCO Members:
   a. Attend meetings punctually based on the notice from the secretary. If unable to attend, members must ensure representation from the relevant Directorate or Division.
   b. Provide suggestions and express opinions regarding each submitted proposal.
   c. Implement ALCO meeting decisions and carry out tasks as determined by ALCO.
   d. Provide recommendations to strengthen the Bank's asset and liability management.
   e. Develop, review, and revise ALCO strategies.

f. Mengevaluasi posisi risiko suku bunga Bank dan strategi ALCO untuk mendapatkan hasil yang tepat agar risiko Bank konsisten dengan objektivitas dari manajemen risiko suku bunga.
g. Memeriksa kebijakan suku bunga dari aktiva dan pasiva untuk mencapai hasil yang optimal dalam penempatan dana, menjaga *cost of fund*, dan laporan neraca Bank agar sesuai dengan strategi ALCO.
h. Memeriksa deviasi dari hasil aktual dengan proyeksi *budgeting* dari rencana bisnis Bank.
i. Menginformasikan kepada Direktur mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan, Ketentuan lain yang berlaku, serta prinsip syariah yang mempengaruhi strategi dan peraturan ALCO.

Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan ALCO

ALCO melakukan rapat dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

1. Rapat ALCO wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh ketua dan/atau anggota ALCO.
2. Setiap anggota ALCO dari masing-masing Divisi diwajibkan untuk menghadiri rapat ALCO.
3. Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota ALCO. Kehadiran ketua atau ketua pengganti ALCO diwajibkan.
4. Rapat ALCO dipimpin oleh ketua atau ketua pengganti apabila ketua berhalangan hadir.
5. Apabila dipandang perlu, rapat dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam rapat ALCO.
6. Setiap keputusan rapat ALCO bersifat mengikat bagi seluruh anggota ALCO.
7. Setiap rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat yang dibuat dan disampaikan oleh sekretaris kepada ketua untuk ditandatangani oleh ketua dan sekretaris ALCO.
8. Risalah rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh ketua atau ketua pengganti dan sekretaris ALCO merupakan laporan pelaksanaan tugas ALCO, selanjutnya didistribusikan oleh sekretaris kepada:
   a. Presiden Direktur
   b. Anggota dan Direktorat atau Divisi terkait.
9. Hasil keputusan rapat ALCO yang terkait dengan seluruh Direktorat atau Divisi ditindaklanjuti oleh seluruh Direktorat atau Divisi dengan diketahui oleh Direksi. Hasil tindak lanjut keputusan rapat oleh Direktorat atau Divisi terkait disampaikan dalam rapat ALCO periode selanjutnya.
10. Mekanisme pengambilan keputusan oleh ALCO selain melalui forum rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sirkulasi, dengan ketentuan:
    a. Keputusan untuk mengajukan pengambilan keputusan secara sirkulasi ditentukan oleh ketua ALCO yang disampaikan melalui sekretaris ALCO.
    b. Ketua dan anggota ALCO menyetujui usul yang diajukan secara tertulis (termasuk melalui email) dengan memberikan persetujuan tertulis secara elektronik.

f. Evaluate the Bank's interest rate risk position and ALCO strategies to ensure appropriate outcomes consistent with the objectives of interest rate risk management.
g. Review interest rate policies on assets and liabilities to achieve optimal fund placement, maintain cost of funds, and align the Bank's balance sheet with ALCO strategies.
h. Review deviations between actual results and the Bank's business plan budget projections.
i. Inform the Board of Directors regarding developments in applicable laws and regulations, other prevailing provisions, and Sharia principles affecting ALCO strategies and regulations.

ALCO Meetings, Quorum, and Decision-Making

ALCO holds meetings in accordance with the following provisions and mechanisms:

1. ALCO meetings must be held at least 1 (one) time every month or at any time as deemed necessary by the Chairman and/or ALCO members.
2. Each ALCO member from the respective Divisions is required to attend ALCO meetings.
3. ALCO meetings can only be conducted if attended by at least 51% of ALCO members. The presence of the Chairman or their appointed representative is mandatory.
4. ALCO meetings are chaired by the Chairman or their appointed representative if the Chairman is unable to attend.
5. When necessary, the meeting may invite other relevant parties to attend the ALCO meeting.
6. All ALCO meeting decisions are binding for all ALCO members.
7. Every ALCO meeting and its decisions must be documented in meeting minutes prepared and submitted by the Secretary to the Chairman, and signed by both the Chairman and the Secretary.
8. ALCO minutes of meeting signed by the Chairman or the Substitute Chairman and the Secretary of ALCO constitute a report on the implementation of ALCO's duties, then distributed by the Secretary to:
   a. The President Director
   b. Relevant members and Directorates or Divisions
9. ALCO meeting decisions involving all Directorates or Divisions must be followed up by all such units, with acknowledgment by the Board of Directors. The follow-up results must be presented in the subsequent ALCO meeting.
10. The decision-making mechanism by ALCO, apart from formal meetings, may also be carried out through a circular resolution process, subject to the following provisions:
    a. The decision to proceed with a circular decision is determined by the ALCO Chairman and conveyed through the ALCO Secretary.
    b. The Chairman and ALCO members approve the proposal in writing (including via email) by providing electronic written consent.

11. Materi dan seluruh dokumen terkait rapat ALCO disiapkan, dikumpulkan, dan didokumentasikan oleh sekretaris ALCO. Materi antara lain berisikan informasi makro ekonomi, tren pergerakan aktiva dan pasiva, update aktivitas *treasury*, penilaian profil risiko, dan realisasi bisnis dibandingkan target.
12. Rapat ALCO dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat ALCO saling melihat atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, atau kombinasi antara keduanya.
13. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat ALCO, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat ALCO beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Keputusan rapat ALCO terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
15. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota Direksi dengan hak suara (*voting rights*).
16. Berdasarkan kebutuhan yang membutuhkan tenaga profesional di luar anggota ALCO, ALCO dapat mengundang pegawai atau spesialis yang bersangkutan untuk menghadiri rapat dengan atau tanpa melalui pemungutan suara.
17. Anggota ALCO yang hadir pada waktu rapat harus merahasiakan tentang data-data, informasi, maupun hal yang berhubungan dengan rapat ALCO kepada pihak yang tidak bersangkutan/tidak berkepentingan.
18. Setiap Divisi yang bersangkutan harus melaksanakan hasil dari rapat ALCO.
19. Sekretaris bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari hasil rapat ALCO. Berdasarkan risalah, sekretaris dapat meminta semua Direktorat atau Divisi yang bersangkutan untuk menyerahkan laporan mencakup jadwal pelaksanaan dan efeknya secara tepat waktu.
20. Berdasarkan situasi aktual, jika hasil rapat ALCO membutuhkan perubahan selama proses pelaksanaan, perubahan/penyesuaian tersebut harus diberikan ke ALCO untuk diperiksa berdasarkan prosedur ALCO.

Pada tahun 2024, ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali dengan rincian agenda dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

11. The materials and all documents related to ALCO meetings are prepared, compiled, and documented by the ALCO Secretary. These materials include macroeconomic information, trends in asset and liability movement, treasury activity updates, risk profile assessments, and actual performance compared to targets.
12. ALCO meetings may be held either in person or virtually via teleconference or other media allowing all participants to see or hear one another and actively participate, or through a hybrid approach.
13. Any dissenting opinions expressed during the ALCO meeting must be clearly documented in the minutes of meeting along with the reasoning for such opinions.
14. ALCO meeting decisions are primarily made based on deliberation and consensus.
15. In the event the consensus cannot be reached, decisions shall be made by majority vote among members of the Board of Directors who have voting rights.
16. If deemed necessary, ALCO may invite employees or specialists from outside the ALCO membership to attend the meeting, with or without voting rights.
17. ALCO members attending meetings must maintain the confidentiality of data, information, and all matters related to the ALCO meeting from unauthorized or unrelated parties.
18. Each relevant Division is responsible for implementing the decisions made in ALCO meetings.
19. The Secretary is responsible for monitoring the implementation of ALCO meeting outcomes. Based on the minutes of meeting, the Secretary may request all relevant Directorates or Divisions to submit reports including implementation schedules and their respective impacts in a timely manner.
20. Based on actual conditions, if ALCO meeting decisions require adjustments during the implementation process, such changes must be submitted to ALCO for review in accordance with ALCO procedures.

In 2024, ALCO convened a total of 12 meetings with the following agendas and attendance summary:

Agenda dan Peserta Rapat ALCO
ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	24 Januari 2024 January 24, 2024	• Minutes from previous ALCO • Finance Update • Treasury Update • Informasi lain/Other information	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief Commercial Officer • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director in charge of the Finance function • Director in charge of the Compliance and Risk Management function • Director in charge of the Digital and Product function • Chief Commercial Officer • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Group Head overseeing the Central Finance function • Division Head overseeing the Treasury function • Invitees
2.	21 Februari 2024 February 21, 2024	• Minutes from previous ALCO • Finance Update • Treasury Update • Informasi lain/Other information	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief Operating Officer • Chief Commercial Officer • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director in charge of the Finance function • Director in charge of the Compliance and Risk Management function • Director in charge of the Digital and Product function • Chief Operating Officer • Chief Commercial Officer • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Group Head overseeing the Central Finance function • Division Head overseeing the Treasury function • Invitees
3.	20 Maret 2024 March 20, 2024	• Minutes from previous ALCO • Finance Update • Treasury Update • Informasi lain/Other information	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief Operating Officer • Chief Commercial Officer • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director overseeing the Finance function • Director overseeing the Compliance and Risk Management function • Director overseeing the Digital and Product function • Chief Operating Officer • Chief Commercial Officer • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Group Head overseeing the Central Finance function • Division Head overseeing the Treasury function • Invitees

Agenda dan Peserta Rapat ALCO
ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4.	26 April 2024 April 26, 2024	• Minutes from previous ALCO • Proposal pengajuan perpanjangan lines dan limit Manajer Investasi • Finance Update • Treasury Update • Informasi lain • Minutes from the previous ALCO meeting • Proposal for the extension of investment manager lines and limits • Finance Update • Treasury Update • Other information	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief Operating Officer • Chief Commercial Officer • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director responsible for the Finance function • Director responsible for the Compliance and Risk Management function • Director responsible for the Digital and Product function • Chief Operating Officer • Chief Commercial Officer • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees
5.	29 Mei 2024 May 29, 2024	• Minutes from previous ALCO • Finance Update • Proposal pengajuan lines dan limit baru Manajer Investasi • Treasury Update • Informasi Penerimaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) • Minutes from the previous ALCO meeting • Finance Update • Proposal for new investment manager lines and limits • Treasury Update • Information on the Receipt of Macroprudential Liquidity Incentive Policy (KLM)	• Presiden Direktur (diwakilkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan) • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director (represented by the Director responsible for the Finance function) • Director responsible for the Finance function • Director responsible for the Compliance and Risk Management function • Director responsible for the Digital and Product function • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees
6.	21 Juni 2024	• Minutes from previous ALCO • Finance Update • Proposal BFR • Proposal pengajuan untuk pemenuhan likuiditas • Proposal pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) AFS • Treasury Update • Infromasi Penerimaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)	• Presiden Direktur (diwakilkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan) • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan

Agenda dan Peserta Rapat ALCO
ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
6.	June 21, 2024	• Minutes from the previous ALCO meeting • Finance Update • BFR Proposal • Proposal for liquidity fulfillment • Proposal for the purchase of Sharia Government Securities (SBSN) – Available for Sale (AFS) • Treasury Update • Information on the Receipt of Macroprudential Liquidity Incentive Policy (KLM)	• President Director (represented by the Director responsible for the Finance function) • Director responsible for the Finance function • Director responsible for the Compliance and Risk Management function • Director responsible for the Digital and Product function • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees
7.	24 Juli 2024 July 24, 2024	• Minutes from previous ALCO • Proposal pengajuan baru counterparty lines dan limit Manajer Investasi • Market update • Treasury Update • Finance Update • Minutes from the previous ALCO meeting • Proposal for new counterparty lines and investment manager limits • Market Update • Treasury Update • Finance Update	• Presiden Direktur (diwakilkan oleh Direktur Digital and Product) • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan (diwakilkan oleh Direktur Digital and Product) • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director (represented by the Director of Digital and Product) • Director responsible for the Finance function (represented by the Director of Digital and Product) • Director responsible for the Compliance and Risk Management function • Director responsible for the Financing function • Chief responsible for the Operations function • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees
8.	21 Agustus 2024 August 21, 2024	• Minutes from previous ALCO • Market update • Treasury Update • Finance Update • Risk Updates	• Presiden Direktur (diwakilkan oleh Direktur Digital and Product) • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan (diwakilkan oleh Direktur Digital and Product) • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director (represented by the Director of Digital and Product) • Director responsible for the Finance function (represented by the Director of Digital and Product) • Director responsible for the Compliance and Risk Management function • Director responsible for the Financing function • Chief responsible for the Operations function • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees

Agenda dan Peserta Rapat ALCO
ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9.	27 September 2024 September 27, 2024	• Minutes from previous ALCO • Proposal produk pendanaan • Proposal pengajuan perpanjangan counterparty lines dan limit BUS, UUS, dan Manajer Investasi • Market update • Treasury Update • Finance Update • Rencana proyeksi Pendanaan dan Pembiayaan • Risk Updates • Minutes from the previous ALCO meeting • Funding product proposal • Proposal for the extension of counterparty lines and limits for BUS, UUS, and Investment Managers • Market Update • Treasury Update • Finance Update • Projected Funding and Financing Plan • Risk Updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director responsible for the Finance function • Director responsible for the Compliance and Risk Management function • Director responsible for the Financing function • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees
10.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	• Minutes from previous ALCO • Proposal pengajuan Nisbah • Proposal pengajuan perpanjangan counterparty lines dan limit BUK, Sekuritas dan Manajer Investasi • Proposal BFR • Market update • Treasury Update • Finance Update • Rencana proyeksi Pendanaan dan Pembiayaan • Risk Updates • Minutes from the previous ALCO meeting • Proposal for the submission of profit-sharing ratios (Nisbah) • Proposal for the extension of counterparty lines and limits for BUK, Securities, and Investment Managers • BFR Proposal • Market Update • Treasury Update • Finance Update • Projected Funding and Financing Plan • Risk Updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director responsible for the Finance function • Director responsible for the Compliance and Risk Management function • Director responsible for the Financing function • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees

Agenda dan Peserta Rapat ALCO
ALCO Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
11.	26 November 2024 November 26, 2024	• Minutes from previous ALCO • Proposal pengajuan baru dan perpanjangan counterparty lines dan limit BUS, UUS • Market update • Treasury Update • Finance Update • Rencana proyeksi Pendanaan dan Pembiayaan • Risk Updates • Minutes from the previous ALCO meeting • Proposal for new and extended counterparty lines and limits for BUS and UUS • Market Update • Treasury Update • Finance Update • Projected Funding and Financing Plan • Risk Updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (diwakilkan oleh Kepala Divisi ERM) • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director responsible for the Finance function • Director responsible for the Compliance and Risk Management function (represented by the Head of the ERM Division) • Director responsible for the Financing function • Division Head responsible for the Enterprise Risk Management function • Group Head responsible for the Central Finance function • Division Head responsible for the Treasury function • Invitees
12.	18 Desember 2024 December 18, 2024	• Minutes from previous ALCO • Proposal pengajuan baru counterparty lines dan limit BUK • Market update • Treasury Update • Finance Update • Rencana proyeksi Pendanaan dan Pembiayaan • Risk Updates • Minutes from the previous ALCO meeting • Proposal for the new counterparty lines and BUK limit • Market update • Treasury update • Finance update • Funding and Financing projection plan • Risk updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management, diwakilkan oleh ERM Manager • Group Head yang membawahkan fungsi Central Finance • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Treasury. • Undangan • President Director • Director overseeing the Finance function • Director overseeing the Compliance and Risk Management function • Director overseeing the Financing function • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function, represented by the ERM Manager • Group Head overseeing the Central Finance function • Division Head overseeing the Treasury function • Invitees

Pelaksanaan Tugas ALCO
Pada tahun 2024, kegiatan yang dilaksanakan oleh ALCO adalah sebagai berikut:
1. Memberikan usulan dan menguraikan opini untuk masing-masing pengajuan proposal.
2. Melaksanakan keputusan rapat ALCO dan merealisasikan pekerjaan yang telah diatur oleh ALCO.
3. Memberikan saran untuk memperkuat manajemen *asset* dan *liability* Bank.

Implementation of ALCO Duties
In 2024, the activities carried out by ALCO are as follows:

1. Providing proposals and elaborating opinions on each proposal submission.
2. Implementing the ALCO meeting decisions and realizing the duties set by ALCO.
3. Providing recommendations to strengthen the Bank's asset and liability management.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank") membentuk Komite Manajemen Risiko ("KMR") dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan, maka KMR juga menjalankan fungsi sebagai Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In assisting and supporting the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities and implementing an effective risk management process and system, PT Bank Aladin Syariah Tbk ("the Bank") has established a Risk Management Committee ("RMC") based on applicable laws and regulations. In order to assist the Board of Directors in formulating policies, overseeing policy implementation, monitoring the development and condition of financing portfolios, and providing improvement recommendations, the RMC also functions as the Financing Policy Committee (KKP).

Legal Basis

1. Law No. 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
4. Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
5. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
6. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies.
7. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
8. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 on the Obligation to Prepare and Implement Credit or Financing Policies for Commercial Banks.
9. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks.
10. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
11. Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
12. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 25/SEOJK.03/2023 on the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
13. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010, on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

14. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Piagam Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam KMR No: SK.005.BOD/09.2024 yang telah ditetapkan tanggal 20 September 2024. Piagam ini mengatur tentang:

- Dasar hukum;
- Struktur dan keanggotaan;
- Masa tugas;
- Tugas dan wewenang;
- Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
- Benturan kepentingan;
- Sekretariat, dan
- Mekanisme evaluasi kinerja.

Piagam KMR akan dikinikan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR)

14. Articles of Association of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Risk Management Committee (RMC) Charter

The RMC carries out its duties and responsibilities based on the RMC Charter No: SK.005.BOD/09.2024, which was established on September 20, 2024. This Charter governs the following:

- Legal basis
- Structure and membership
- Term of office
- Duties and authorities
- Committee meetings, quorum, and decision-making
- Conflicts of interest
- Secretariat, and
- Performance evaluation mechanism

The RMC Charter will be updated in accordance with the evolving regulations and the Bank's current conditions.

Risk Management Committee (RMC) Structure

Ketua **Chairman**	Presiden Direktur sebagai ketua merangkap anggota (memiliki hak voting) President Director as Chairman concurrently Member (with voting rights)
Pengganti Ketua **Substitute Chairman**	Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan dapat berperan sebagai ketua pengganti merangkap anggota dalam hal belum terisinya posisi ketua atau ketika ketua berhalangan (memiliki hak voting) Director overseeing the Compliance and Risk Management function, who may serve as the substitute chairman concurrently member in the event the chairman position is vacant or when the chairman is unavailable (with voting rights).
Anggota **Member**	1. Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan dan/atau fungsi Operasional yang terkait dengan pembiayaan (memiliki hak voting); 2. Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan (memiliki hak voting); 3. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management; 4. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management; 5. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics; dan 6. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit. 1. Director overseeing the Finance function and/or the Operational function related to financing (with voting rights); 2. Director overseeing the Financing function (with voting rights); 3. Group Head/Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function; 4. Group Head/Division Head overseeing the Financing Risk Management function; 5. Group Head/Division Head overseeing the Risk Analytics function; and 6. Group Head/Division Head overseeing the Internal Audit Unit function.
Undangan Tetap **Fixed Invitees**	1. Chief/Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi IT dan/atau fungsi Operasional yang terkait dengan pembiayaan; 2. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Hukum; 3. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan Syariah; 4. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management; 5. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Central Finance; dan 6. Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Human Capital. 7. Apabila dipandang perlu, pada rapat KMR dapat diundang pihak lain yang terkait dengan agenda rapat. 1. Chief/Group Head/Division Head overseeing the IT function and/or the Operational function related to financing; 2. Group Head/Division Head overseeing the Compliance and Legal function; 3. Group Head/Division Head overseeing the Sharia Compliance function; 4. Group Head/Division Head overseeing the Anti-Fraud Management function; 5. Group Head/Division Head overseeing the Central Finance function; and 6. Group Head/Division Head overseeing the Human Capital function. 7. If deemed necessary, other relevant parties may be invited to the RMC meeting based on the meeting agenda.
Frekuensi Rapat **Meeting Frequency**	Rapat Komite Manajemen Risiko wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan The Risk Management Committee meetings must be held at least once a month or as needed.
Sekretaris **Secretary**	Divisi Enterprise Risk Management Enterprise Risk Management Division

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab kepada Direksi dan Presiden Direktur yang paling sedikit meliputi:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko, serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Mengevaluasi penyusunan kerangka, strategi, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.
3. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dan kecukupan modal.
5. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stres dalam pengukuran risiko dan *contingency plan*.
6. Mengevaluasi penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
7. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal, antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi eksposur risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.
8. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan bank bagi bank umum.
9. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan kebijakan pembiayaan. Selanjutnya KMR juga melakukan kajian berkala terhadap kebijakan pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan kebijakan pembiayaan.
10. Memantau dan mengevaluasi:
    a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
    b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
    c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
    d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum penyaluran dana.

Duties and Authorities of the Risk Management Committee

The Risk Management Committee has the authority and is accountable to the Board of Directors and the President Director, with at least the following responsibilities:

1. Evaluating and providing recommendations on the formulation of policies, strategies, and guidelines for the implementation of risk management and its changes, including the level of risk to be taken, risk tolerance, risk management framework, and contingency plans to anticipate abnormal conditions.
2. Evaluating the development of the risk management framework, strategy, policy, and guidelines.
3. Making improvements or enhancements to the implementation of risk management periodically or incidentally, based on the results of evaluating the implementation of risk management as a follow-up to changes in internal and external conditions affecting the Bank's capital adequacy and risk profile.
4. Monitoring the risk profile and the management of all risks in order to establish risk appetite, an integrated risk management strategy, and capital adequacy.
5. Establishing methodologies, scenarios, evaluations, including stress conditions in risk measurement and contingency plans.
6. Evaluating the establishment of policies and/or business decisions.
7. Determining issues related to business decisions of which do not comply with normal procedures, such as exceeding significant business expansion compared to the Bank's business plan and taking risk exposure positions of which do not align with the established limits.
8. Providing input to the Board of Directors in the development of financing policies, particularly those related to the formulation of prudence principles in financing as stipulated in the Financial Services Authority Regulation on the obligation to prepare and implement financing policies for commercial banks.
9. Supervising the implementation of financing policies to ensure they are applied consistently and formulating solutions when obstacles or challenges arise in policy implementation. The RMC will also conduct periodic reviews of financing policies and provide suggestions to the Board of Directors when changes or improvements are needed.
10. Monitoring and evaluating:
    a. The development and quality of the overall financing portfolio.
    b. The correctness of the authority exercised in financing decisions.
    c. The correctness of the process for granting, developing, and the quality of financing provided to related parties and large debtors.
    d. The correctness of implementing the maximum funding allocation limits.

e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan pembiayaan.
g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan.

11. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
    a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan.
    b. Hasil pemantauan poin 10 di atas.
12. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan poin 11 di atas.
13. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Rapat Komite, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat KMR wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh ketua dan/atau anggota KMR.
2. Rapat KMR hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota KMR. Kehadiran ketua dan ketua pengganti KMR diwajibkan.
3. Rapat KMR dipimpin oleh ketua atau ketua pengganti apabila ketua berhalangan hadir.
4. Apabila dipandang perlu, rapat dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam rapat KMR.
5. Setiap keputusan rapat KMR bersifat mengikat bagi seluruh anggota KMR.
6. Materi dan seluruh dokumen terkait rapat KMR disiapkan, dikumpulkan, dan didokumentasikan oleh sekretaris KMR.
7. Setiap rapat KMR dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat yang dibuat dan disampaikan oleh sekretaris kepada ketua untuk ditandatangani oleh ketua dan sekretaris KMR.
8. Risalah rapat yang telah ditandatangani oleh ketua atau ketua pengganti dan sekretaris merupakan laporan pelaksanaan tugas KMR, selanjutnya didistribusikan oleh sekretaris kepada:
    a. Presiden Direktur
    b. Anggota dan Direktorat atau Divisi terkait.
9. Hasil keputusan rapat KMR yang terkait dengan seluruh Direktorat atau Divisi ditindaklanjuti oleh seluruh Direktorat atau Divisi dengan diketahui oleh Direksi. Hasil tindak lanjut keputusan rapat KMR oleh Direktorat atau Divisi terkait disampaikan dalam rapat KMR periode selanjutnya.
10. Mekanisme pengambilan keputusan oleh KMR selain melalui forum rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sirkulasi, dengan ketentuan:

e. Compliance with laws, regulations, and other rules in the implementation of financing.
f. The resolution of problematic financing in accordance with the established financing policy.
g. The Bank's efforts in meeting the adequacy of provisions for the write-off of financing.

11. Submitting periodic written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:
    a. The results of supervision over the application and implementation of financing policies.
    b. The results of monitoring point 10 above.
12. Providing recommendations for corrective actions to the Board of Directors, with a copy to the Board of Commissioners, on matters related to point 11 above.
13. In the event of deviations in the implementation of financing policies related to Sharia compliance, the report shall also be submitted to the Sharia Supervisory Board.

Committee Meetings, Quorum, and Decision-Making

1. RMC meetings must be held at least 1 (one) time every month or at any time as deemed necessary by the chairman and/or members of the RMC.
2. RMC meetings can only take place if at least 51% of the RMC members are present. The presence of the chairman and substitute chairman is mandatory.
3. RMC meetings are led by the chairman or the substitute chairman in the event the chairman is unavailable.
4. If deemed necessary, the meeting may invite other relevant parties to attend the RMC meeting.
5. Each decision made in the RMC meeting is binding for all members of the RMC.
6. The agenda and all documents related to the RMC meeting are prepared, collected, and documented by the RMC secretary.
7. Each RMC meeting and its resulting decisions shall be documented in minutes of meeting, which are prepared and submitted by the secretary to the chairman for signature by both the chairman and the RMC secretary.
8. The signed minutes of meeting, once signed by the chairman or substitute chairman and the secretary, serve as the report on the implementation of the RMC's duties. The minutes are then distributed by the secretary to:
    a. President Director
    b. Members and relevant Directorates or Divisions.
9. The decisions of the RMC involving the entire Directorate or Division must be followed up by the respective Directorate or Division, with the Board of Directors being informed. The follow-up results are presented in the next RMC meeting.
10. The decision-making mechanism of the RMC outside of meetings may be conducted through circulation, under the following conditions:

a. Keputusan untuk mengajukan pengambilan keputusan secara sirkulasi ditentukan oleh ketua KMR yang disampaikan melalui sekretaris KMR.
b. Ketua dan anggota KMR menyetujui usul yang diajukan secara tertulis (termasuk melalui email) dengan memberikan persetujuan tertulis secara elektronik.

11. Rapat KMR dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, atau kombinasi antara keduanya.
12. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat KMR, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat KMR beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
13. Keputusan rapat KMR terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
14. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota dengan hak suara (voting rights), dengan prinsip ketua KMR memiliki dua hak suara dan DIreksi lain dengan masing-masing satu hak suara.
15. Berdasarkan kebutuhan yang membutuhkan tenaga profesional di luar anggota KMR, KMR dapat mengundang pegawai atau spesialis yang bersangkutan untuk menghadiri rapat dengan atau tanpa melalui pemungutan suara.
16. Anggota KMR yang hadir pada waktu rapat harus merahasiakan tentang data-data, informasi, maupun hal yang berhubungan dengan rapat KMR kepada pihak yang tidak bersangkutan/tidak berkepentingan.
17. Setiap Divisi yang bersangkutan harus melaksanakan hasil dari rapat KMR.
18. Sekretaris bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari hasil rapat KMR. Berdasarkan risalah, sekretaris dapat meminta semua Direktorat atau Divisi yang bersangkutan untuk menyerahkan laporan mencakup jadwal pelaksanaan dan efeknya secara tepat waktu.
19. Berdasarkan situasi aktual, jika hasil rapat KMR membutuhkan perubahan selama proses pelaksanaan, perubahan/penyesuaian tersebut harus diberikan ke KMR untuk diperiksa berdasarkan prosedur KMR.

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah diselenggarakan sebanyak 12 kali dengan rincian agenda dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

a. The decision to proceed with circulation is determined by the RMC chairman and communicated through the RMC secretary.
b. The chairman and RMC members approve the proposal in writing (including via email) by providing electronic written consent.

11. RMC meetings may be held either in person or virtually via teleconference or other media platforms allowing all participants to see or hear each other directly and participate in the meeting, or a combination of both.
12. Any dissenting opinions in the RMC meeting must be clearly stated in the minutes of meeting, along with the reasons for the disagreement.
13. RMC decisions should first be made through consensus.
14. If consensus is not reached, decisions are made based on the majority vote of all members with voting rights, with the chairman having two votes and other directors having one vote each.
15. If professional expertise is needed outside the RMC members, the RMC may invite the relevant employees or specialists to attend the meeting, with or without voting.
16. RMC members attending the meeting must maintain confidentiality regarding data, information, or matters related to the RMC meeting with parties who are not involved or concerned.
17. Each relevant Division must implement the results of the RMC meeting.
18. The secretary is responsible for following up on the implementation of RMC decisions. Based on the meeting minutes, the secretary may request all relevant Directorates or Divisions to submit reports including the implementation schedule and its impact in a timely manner.
19. If changes are required during the implementation process of RMC decisions due to actual circumstances, these changes/adjustments must be presented to the RMC for review according to RMC procedures.

In 2024, the Risk Management Committee held 12 meetings, with the following agenda and attendance recap:

Agenda dan Peserta Rapat RMC
RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	• Minutes from previous KMR • Proposal persetujuan hasil self assessment tingkat kesehatan bank semester II tahun 2023 • Proposal persetujuan hasil self assessment KPMM Sesuai Profil Risiko (ICAAP) semester II tahun 2023 • Update lainnya • Minutes from the previous RMC meeting • Proposal for approval of the Bank's self-assessment results on the soundness level for the second semester of 2023 • Proposal for approval of the self-assessment results of ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) for the second semester of 2023 • Other updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan • Undangan • President Director • Director overseeing the Finance function • Director overseeing the Compliance and Risk Management function • Director overseeing the Digital and Product function • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Division Head overseeing the Financing Risk Management function • Division Head overseeing the Risk Analytics function • Division Head overseeing the Compliance function • Invitees
2.	29 Februari 2024 February 29, 2024	• Minutes from previous KMR • Pemantauan risk appetite dan risk tolerance • Update struktur organisasi manajemen risiko • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management • Minutes from the previous RMC meeting • Monitoring of risk appetite and risk tolerance • Update on the risk management organization structure • Update on risk ratios • Risk management roadmap and updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Undangan • President Director • Director overseeing the Finance function • Director overseeing the Compliance and Risk Management function • Director overseeing the Digital and Product function • Chief overseeing the Operations function • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Division Head overseeing the Financing Risk Management function • Division Head overseeing the Risk Analytics function • Division Head overseeing the Anti-Fraud Management function • Group Head overseeing the Financial Controller function • Invitees
3.	21 Maret 2024	• Minutes from previous KMR • Pemantauan risk appetite dan risk tolerance • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan • Undangan

Agenda dan Peserta Rapat RMC
RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
	March 21, 2024	• Minutes from the previous RMC meeting • Monitoring of risk appetite and risk tolerance • Update on risk ratios • Risk management roadmap and updates	• President Director • Director overseeing the Finance function • Director overseeing the Compliance and Risk Management function • Director overseeing the Digital and Product function • Chief overseeing the Operations function • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Division Head overseeing the Financing Risk Management function • Division Head overseeing the Risk Analytics function • Division Head overseeing the Anti-Fraud Management function • Group Head overseeing the Financial Controller function • Division Head overseeing the Compliance function • Invitees
4.	29 April 2024 April 29, 2024	• Minutes from previous KMR • Proposal persetujuan hasil self assessment profil risiko triwulan I tahun 2024 • Pemantauan risk appetite dan risk tolerance • Update Business Impact Analysis tahun 2024 • Update struktur organisasi manajemen risiko • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management • Minutes from the previous Risk Management Committee (KMR) meeting • Proposal for approval of the results of the Q1 2024 Risk Profile Self-Assessment • Monitoring of risk appetite and risk tolerance • 2024 Business Impact Analysis (BIA) update • Update on the risk management organization structure • Risk ratio update • Risk management roadmap and update	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan • Undangan • President Director • Director overseeing the Finance function • Director overseeing the Compliance and Risk Management functions • Director overseeing the Digital and Product functions • Chief overseeing the Operations function • Division Head responsible for Enterprise Risk Management • Division Head responsible for Financing Risk Management • Division Head responsible for Risk Analytics • Division Head responsible for Anti-Fraud Management • Group Head responsible for Financial Controller • Division Head responsible for Compliance • Invitees
5.	31 Mei 2024 May 31, 2024	• Minutes from previous KMR • Pemantauan risk appetite dan risk tolerance • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management • Minutes from the previous Risk Management Committee (KMR) meeting • Monitoring of risk appetite and risk tolerance • Update on risk ratios • Roadmap and updates on risk management	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan • Undangan • President Director • Director overseeing Finance • Director overseeing Compliance and Risk Management • Director overseeing Digital and Product • Chief overseeing Operations • Division Head overseeing Enterprise Risk Management • Division Head overseeing Financing Risk Management • Division Head overseeing Risk Analytics • Division Head overseeing Anti-Fraud Management • Group Head overseeing Financial Controller • Division Head overseeing Compliance • Invitees

Agenda dan Peserta Rapat RMC
RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
6.	24 Juni 2024 June 24, 2024	• Minutes from previous KMR • Pemantauan risk appetite dan risk tolerance • Proposal CKPN Tarif • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management • Minutes from previous KMR • Monitoring of risk appetite and risk tolerance • Proposal on CKPN Tariff • Risk ratio update • Risk management roadmap and updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (diwakilkan oleh Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management) • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan • Undangan • President Director • Director overseeing the Finance function • Director overseeing Compliance and Risk Management (represented by the Division Head of Enterprise Risk Management) • Director overseeing Digital and Product functions • Director overseeing the Financing function • Chief overseeing Operations • Division Head of Enterprise Risk Management • Division Head of Financing Risk Management • Division Head of Risk Analytics • Division Head of Anti-Fraud Management • Group Head of Financial Controller • Division Head of Compliance • Invitees
7.	26 Juli 2024 July 26, 2024	• Minutes from previous KMR • Proposal persetujuan hasil self assessment tingkat kesehatan bank semester I tahun 2024 • Proposal persetujuan hasil self assessment KPMM Sesuai Profil Risiko (ICAAP) semester I tahun 2024 • Pemantauan risk appetite dan risk tolerance • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management • Minutes from previous KMR • Proposal for approval of the Bank Soundness Level Self-Assessment results for the first semester of 2024 • Proposal for approval of ICAAP Self-Assessment results according to Risk Profile for the first semester of 2024 • Monitoring of risk appetite and risk tolerance • Risk ratio update • Risk management roadmap and updates	• Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Chief yang membawahkan fungsi Operations • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan • Undangan • Director overseeing Compliance and Risk Management functions • Director overseeing Digital and Product functions • Director overseeing Financing function • Chief overseeing Operations function • Division Head overseeing Enterprise Risk Management • Division Head overseeing Financing Risk Management • Division Head overseeing Risk Analytics • Division Head overseeing Anti-Fraud Management • Group Head overseeing Financial Controller • Division Head overseeing Compliance • Invitees

Agenda dan Peserta Rapat RMC
RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8.	19 Agustus 2024 August 19, 2024	• Minutes from previous KMR • Penyampaian haisl stress testing risiko • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management • Minutes from previous KMR • Presentation of risk stress testing results • Risk ratio update • Roadmap and risk management update	• Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan • Undangan • Director overseeing Compliance and Risk Management functions • Director overseeing Digital and Product functions • Director overseeing Financing functions • Division Head overseeing Enterprise Risk Management • Division Head overseeing Financing Risk Management • Division Head overseeing Risk Analytics • Division Head overseeing Anti-Fraud Management • Group Head overseeing Financial Controller • Division Head overseeing Compliance • Invitees
9.	19 September 2024 September 19, 2024	• Minutes from previous KMR • Proposal pengkinian risk appetite dan risk tolerance • Proposal persetujuan piagam komite pembiayaan, komite manajemen risiko dan ALCO • Update rasio risiko • Roadmap dan update risk management • Minutes from the previous KMR meeting • Proposal for updating risk appetite and risk tolerance • Proposal for the approval of the financing committee charter, risk management committee charter, and ALCO • Update on risk ratios • Roadmap and update on risk management	• Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti Fraud Management • Group Head yang membawahkan fungsi Financial Controller • Undangan • Director overseeing the Compliance and Risk Management functions • Director overseeing the Digital and Product functions • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Division Head overseeing the Financing Risk Management function • Division Head overseeing the Risk Analytics function • Division Head overseeing the Anti-Fraud Management function • Group Head overseeing the Financial Controller function • Invitees
10.	29 Oktober 2024	• Minutes from previous KMR • Proposal persetujuan hasil self assessment profil risiko triwulan iii tahun 2024 • Proposal pengkinian risk appetite dan risk tolerance • Proposal persetujuan hasil stress testing untuk keperluan Laporan Recovery Plan dan Resolution Plan • Update rasio risiko • Monitoring nasabah watchlist • Roadmap dan update risk management	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan dan/atau fungsi Operasional yang terkait dengan pembiayaan • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit • Undangan

Agenda dan Peserta Rapat RMC
RMC Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
	October 29, 2024	• Minutes from the previous KMR meeting • Proposal for the approval on the self-assessment results for the Q3 2024 risk profile • Proposal for updating risk appetite and risk tolerance • Proposal for the approval of stress testing results for the purposes of the Recovery Plan and Resolution Plan report • Update on risk ratios • Monitoring of the customer watchlist • Roadmap and update on risk management	• President Director • Director overseeing the Compliance and Risk Management functions • Director overseeing the Finance and/or Operations functions related to financing • Director overseeing the Financing function • Director overseeing the Digital and Product functions • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Division Head overseeing the Financing Risk Management function • Division Head overseeing the Risk Analytics function • Division Head overseeing the Internal Audit Unit • Invitees
11.	20 November 2024 November 20, 2024	• Minutes from previous KMR • Update rasio risiko • Update Risk Limit • Update final model credit scoring • Monitoring nasabah watchlist • Roadmap dan update risk management • Update lain • Minutes from the previous KMR meeting • Update on risk ratios • Update on risk limits • Update on the final credit scoring model • Monitoring of the customer watchlist • Roadmap and update on risk management • Other updates	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (diwakilkan oleh Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management) • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan dan/atau fungsi Operasional yang terkait dengan pembiayaan • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Risk Analytics dan • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit • Undangan • President Director • Director overseeing the Compliance and Risk Management functions (represented by the Head of the Enterprise Risk Management Division) • Director overseeing the Finance and/or Operations functions related to financing • Director overseeing the Financing function • Director overseeing the Digital and Product functions • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Division Head overseeing the Financing Risk Management function • Division Head overseeing the Risk Analytics function • Division Head overseeing the Internal Audit Unit • Invitees
12.	19 Desember 2024 December 19, 2024	• Minutes from previous KMR • Update rasio risiko • Monitoring nasabah watchlist • Evaluasi dan laporan pelaksanaan komite risiko tahun 2024 • Roadmap dan update risk management • Minutes from the previous KMR meeting • Update on risk ratios • Monitoring of the customer watchlist • Evaluation and report on the implementation of the Risk Committee for 2024 • Roadmap and update on risk management	• Presiden Direktur • Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan dan/atau fungsi Operasional yang terkait dengan pembiayaan • Direktur yang membawahkan fungsi Pembiayaan • Direktur yang membawahkan fungsi Digital and Product • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Enterprise Risk Management • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Financing Risk Management dan Analytics dan • Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit • Undangan • President Director • Director overseeing the Compliance and Risk Management functions • Director overseeing the Finance and/or Operations functions related to financing • Director overseeing the Financing function • Director overseeing the Digital and Product functions • Division Head overseeing the Enterprise Risk Management function • Division Head overseeing the Financing Risk Management and Analytics functions • Division Head overseeing the Internal Audit Unit • Invitees

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, kegiatan yang dilaksanakan oleh KMR adalah sebagai berikut:

1. Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada Bank.
2. Menjalankan fungsi sebagai Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dengan membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

KOMITE PEMBIAYAAN/ CREDIT COMMITTEE (CC)

Komite Pembiayaan atau *Credit Committee* (CC) dibentuk oleh Direksi untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pembiayaan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/ POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/ POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. Piagam Credit Committee.

Implementation of the Risk Management Committee's Duties

The activities carried out by the Risk Management Committee (KMR) in 2024, are as follows:

1. Supporting the effectiveness of the Board of Directors' duties and responsibilities related to the implementation and oversight of risk management at the Bank.
2. Performing the function of the Financing Policy Committee (KKP) by assisting the Board of Directors in formulating policies, overseeing policy implementation, monitoring the development and condition of the financing portfolio, and providing recommendations for corrective actions.

FINANCING COMMITTEE/ CREDIT COMMITTEE (CC)

The Financing Committee or Credit Committee (CC) was formed by the Board of Directors to assist in carrying out supervisory functions related to financing.

Legal Basis

1. Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law.
2. Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Financial Services Authority Regulation no. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation Number 2/ POJK.03/2022 concerning Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. Financial Services Authority Regulation Number 26/ POJK.03/2021 concerning Maximum Limits for Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation Number 42/ POJK.03/2017 concerning Obligations for Preparing and Implementing Bank Financing or Financing Policies for Commercial Banks.
7. Financial Services Authority Regulation Number 65/ POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
8. Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
9. Credit Committee Charter.

Piagam Credit Committee

Term of Reference yang dimiliki CC mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, ketentuan limit kewenangan dan sekretariat. Piagam Komite akan dikinikan dan akan diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Credit Committee Charter

The Terms of Reference (ToR) of the Credit Committee (CC) govern, among other things, the structure and membership, duties and responsibilities, authority limits, and secretariat. The Charter will be updated and revised in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.

Struktur Komite Credit Committee

Credit Committee Structure

Ketua (Voting Member) **Chairman (Voting Member)**	Direktur yang membawahkan satuan kerja Bisnis/Komersial Director overseeing the Business/Commercial unit
Anggota (Voting Member) **Member (Voting Member)**	1. Head yang membawahkan satuan kerja Financing Operations. 2. Head yang membawahkan satuan kerja BPRA Financing. 1. Head overseeing the Financing Operations unit. 2. Head overseeing the BPRA Financing unit.
Undangan **Invitees**	Sekretaris Komite Pembiayaan dapat menentukan undangan rapat Komite Pembiayaan sesuai dengan materi dan agenda rapat. The Secretary of the Financing Committee may determine the meeting invitees based on the meeting materials and agenda.
Sekretaris **Secretary**	Unit Kerja yang membidangi Financing Analyst. Unit in charge of Financing Analyst functions.

Tugas dan Tanggung Jawab Credit Committee

1. Memberikan *review* independen dan persetujuan/penolakan pembiayaan sesuai limit kewenangan yang dimiliki.
2. Melakukan koordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban/*Asset and Liability Committee* (ALCO).
3. Memberi persetujuan pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat serta seksama.
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan untuk memberikan persetujuan Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
5. Tunduk dan patuh terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku PT Bank Aladin Syariah Tbk (d/h PT Bank Net Indonesia Syariah).
6. Memastikan setiap saat kehati-hatian dan analisa yang mendalam dalam memberikan persetujuan pembiayaan dengan tetap memperhatikan target pertumbuhan pembiayaan serta standard dan kebijakan risiko pembiayaan yang berlaku.
7. Mendukung bisnis untuk membentuk praktik manajemen risiko pembiayaan dalam proses persetujuan, pengukuran, pelaporan, monitoring, pembatasan dan analisa risiko.
8. Mendukung bisnis dalam melakukan identifikasi, klarifikasi dan pengelolaan pembiayaan bermasalah.

Duties and Responsibilities of the Credit Committee

1. Provide independent reviews and approve or reject financing proposals in accordance with the authorized limit.
2. Coordinate with the Asset and Liability Committee (ALCO).
3. Approve financing decisions with integrity, objectivity, thoroughness, and prudence.
4. Reject any requests or influence from parties affiliated with financing applicants aiming to secure approval based solely on formality.
5. Comply with the Code of Ethics and Code of Conduct of PT Bank Aladin Syariah Tbk (formerly PT Bank Net Indonesia Syariah).
6. Ensure prudence and in-depth analysis are maintained in financing approvals, while considering financing growth targets and adhering to the applicable financing risk standards and policies.
7. Support business functions in establishing sound financing risk management practices in the areas of approval, measurement, reporting, monitoring, limitation, and risk analysis.
8. Support business units in identifying, clarifying, and managing non-performing financing.

Wewenang Komite Credit Committee

Adapun wewenang Komite *Credit Committee* adalah sebagai berikut:

Authorities of the Credit Committee

The Credit Committee's authorities are as follows:

	Wewenang Authorities	Limit Limit
a.	Menyetujui fasilitas pembiayaan sebagai berikut: 1. Baru 2. Penambahan 3. Perpanjangan 4. Review Approve financing facilities as follows: 1. New 2. Additional 3. Extension 4. Review	1. Pemilik wewenang untuk memutus pembiayaan adalah ketua dan anggota komite voting member 2. Dalam memutuskan pembiayaan memperhatikan batas BMPK/BMPD. 1. The authority to decide on financing lies with the Chairman and voting members of the Committee. 2. Financing decisions must take into account the Legal Lending Limit (LLL/BMPK) and Regional Lending Limit (RLL/BMPD).
b.	Menyetujui Restrukturisasi Pembiayaan Approve Financing Restructuring	
c.	Menyetujui Investasi kepada Surat Berharga Korporasi Approve Investment in Corporate Securities	
d.	Menyetujui Pemberian Limit Transaksi Penempatan Antar Bank Approve Interbank Placement Transaction Limits	
e.	Menyetujui Fasilitas Transaksi Trade Finance sebagai berikut: 1. Letter of Credit (L/C) 2. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) 3. Bank Garansi Approve Trade Finance Transaction Facilities, including: 1. Letter of Credit (L/C) 2. Domestic Letter of Credit (SKBDN) 3. Bank Guarantee	
f.	Menyetujui Action Plan dan Proposal untuk pembiayaan bermasalah (macet dan hapus buku) Approve Action Plans and Proposals for problematic financing (bad debts and write-offs)	
g.	Mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian pemutusan pembiayaan yang diatur dalam ketentuan dan atau dokumen tersendiri. Delegating authority in granting termination of financing as regulated in separate provisions and/or documents.	

Ketentuan Limit Kewenangan Credit Committee

1. Limit memutus adalah per nasabah dan/atau per kelompok nasabah tergantung pada limit keseluruhan nasabah/kelompok nasabah. *Standalone facilities* (contoh: fasilitas yang dijamin penuh dengan jaminan likuid) tetap dapat disetujui atas dasar *standalone basis*.
2. Fasilitas pembiayaan yang melampaui wewenang Direksi (tidak tercantum dalam daftar di atas) wajib tunduk pada Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Wewenang limit yang diatur berlaku untuk semua fasilitas pembiayaan kecuali ditentukan berbeda berdasarkan ketentuan tersendiri.
4. Seluruh proposal pembiayaan dan restrukturisasi wajib melalui proses *review* oleh Departemen Independen (selain Departemen Pengusul) sebelum disetujui oleh Komite Pembiayaan.
5. Pembiayaan (baru, penambahan, perpanjangan, *review* dan restrukturisasi) kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris agar tidak melanggar ketentuan BMPD.
6. Persetujuan pemberian pembiayaan harus memenuhi kuorum anggota komite pembiayaan yang memiliki kewenangan limit pemutus pembiayaan.

Provisions for Credit Committee Authority Limits

1. The cut off limit is per customer and/or per customer group depending on the overall limit of the customer/customer group. Standalone facilities (for example: facilities of which are fully guaranteed by liquid collateral) can still be approved on a standalone basis.
2. Financing facilities exceeding the authority of the Board of Directors (not listed above) must be subject to the Company's Articles of Association.
3. The regulated limit authority applies to all financing facilities unless determined differently based on separate provisions.
4. All financing and restructuring proposals must go through a review process by an Independent Department (other than the Proposing Department) before being approved by the Financing Committee.
5. Financing (new, additional, extension, review and restructuring) to related parties must obtain approval from the Board of Commissioners so as not to violate BMPD provisions.
6. Approval for providing financing must meet the quorum of financing committee members who have the authority to decide financing limits.

Ketentuan dan Mekanisme Credit Committee

Mekanisme Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan dapat dilakukan melalui forum rapat atau sirkulasi (termasuk melalui *e-mail*) yang ditetapkan oleh Sekretaris Komite Pembiayaan.
2. Rapat komite adalah rapat yang wajib dihadiri (secara langsung/*online*) oleh ketua komite dan anggota komite sesuai kuorum untuk membahas materi dalam rapat komite.
3. Peserta rapat komite adalah ketua komite, anggota komite, sekretaris komite, dan undangan bilamana dianggap perlu sesuai undangan khusus yang disampaikan oleh ketua atau sekretaris komite.
4. Rapat komite dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri ketua dan seluruh anggota komite.
5. Rapat dipimpin oleh ketua komite pembiayaan. Apabila Ketua berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) maka rapat komite diagendakan kembali oleh sekretaris komite, atau ketua komite menunjuk *alternate* yang merupakan Direktur atau *chief* lainnya selain anggota komite.

Mekanisme pengambilan keputusan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing ketua dan anggota komite memiliki satu hak suara dalam pengambilan keputusan.
2. Apabila salah satu anggota komite berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya, maka anggota komite dengan hak suara (*voting member*) dapat digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh ketua komite berdasarkan bukti penunjukan, untuk menjalankan fungsi sebagai *voting member* komite pembiayaan.
3. Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah mufakat. Dalam hal diperlukan *voting*, maka keputusan dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak. Mekanisme pengambilan keputusan Komite Pembiayaan, yaitu:

Credit Committee Terms and Mechanisms

The Financing Committee mechanism is as follows:

1. The decision-making mechanism by the Financing Committee can be carried out through meetings or circulation forums (including via e-mail) determined by the Secretary of the Financing Committee.
2. A committee meeting is a meeting that must be attended (in person/online) by the committee chairman and committee members according to the quorum to discuss material in the committee meeting.
3. Committee Meeting Participants are the committee chairman, committee members, committee secretary, and invitees if deemed necessary according to the special invitation sent by the committee chairman or secretary.
4. Committee meetings can be held and decisions can be made if there is a quorum, namely attended by the chairman and all committee members.
5. The meeting is chaired by the chairman of the financing committee. If the Chairman is unable to attend (sick, annual leave, out of town service) then the committee meeting is rescheduled by the committee secretary, or the committee chairman appoints an alternate who is a Director or chief other than the committee members.

The Financing Committee's decision-making mechanism is as follows:

1. Each committee chairman and member has one vote in decision making.
2. If one of the committee members is unable to attend (sick, annual leave, out of town service) therefore he cannot cast his vote, then the committee member with voting rights (voting member) can be replaced by an official appointed by the committee chairman based on proof of appointment, to performs the function as a voting member of the financing committee.
3. Decision making is attempted through deliberation and consensus. In the event the voting is required, the decision is considered valid if it is supported by the majority of votes. Financing Committee decision-making mechanism:

Total Limit Total Limits	Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Decision Making
≤ Rp 50 Miliar ≤ Rp 50 Billion	Dapat dilakukan melalui mekanisme rapat (offline/online) atau sirkulasi Can be done through meeting mechanisms (offline/online) or circulation
> Rp 50 Miliar > Rp 50 Billion	Wajib dilakukan dengan mekanisme rapat (offline/online) Must be carried out using a meeting mechanism (offline/online)

Rapat Credit Committee

Secara rutin *Credit Committee* mengadakan rapat dengan frekuensi rapat bulanan atau jika diperlukan sesuai ketentuan kuorum kehadiran dari seluruh anggota *Credit Committee*. Adapun sepanjang tahun 2023, *Credit Committee* telah melakukan rapat 29 kali dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat sebagai berikut:

Credit Committee Meeting

The Credit Committee regularly holds meetings with a monthly meeting frequency or if necessary according to the provisions on the attendance quorum of all Credit Committee members. Throughout 2024, the Credit Committee has held 29 meetings with the minutes and recapitulation of meeting attendance as follows:

Agenda dan Peserta Rapat *Credit Committee*

Credit Committee Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat/ Sirkulasi Meeting Agenda/Circulation	Peserta Rapat/Sirkulasi Meeting Participants/Circulation
1	8 Jan 2024 Jan 8, 2024	Pengajuan Perpanjangan dan Penetapan Interbank/ Counterparty Limit unit kerja Treasury Submission for the extension and determination of Interbank/ Counterparty Limits by the Treasury unit	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto SH 3. Mayang Ekaputri 4. Triana Yulianti 5. Fibrian Aditia Widiansah 6. Hery Suiwinata 7. Eko Setiawan Parikesit 8. Hendri Sandhi Putra
2	26 Feb 2024 Feb 26, 2024	Pengajuan Perubahan Struktur Fasilitas Pembiayaan Nasabah Submission for the amendment of the financing facility structure for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Hery Suiwinata 3. Eko Setiawan Parikesit 4. Robbianto 5. Arief Mediadianto 6. M Ari Adriansyah 7. Anthony Handoko
3	23 Feb 2024 Feb 23, 2024	Permohonan penetapan line dan limit baru Perusahaan Manajemen Investasi dan Sekuritas untuk transaksi fixed income/ capital market syariah divisi Treasury Submission for the establishment of new lines and limits for Investment Management and Securities Sekuritas for fixed income/ capital market sharia transactions by the Treasury division	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto SH 3. Mayang Ekaputri 4. Triana Yulianti 5. Fibrian Aditia Widiansah 6. Hery Suiwinata 7. Eko Setiawan Parikesit 8. Hendri Sandhi Putra
4	14 Mar 2024 Mar 14, 2024	Permohonan Persetujuan Pengajuan Pembiayaan Investasi Nasabah Submission for the approval of the investment financing application for Customer	1. Purwanto SH 2. Ichsandy Kusuma 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. M Ari Adriansyah 9. Anthony Handoko
5	14 Mar 2024 Mar 14, 2024	Permohonan Persetujuan Pengajuan Pembiayaan Investasi Nasabah Submission for the approval of the investment financing application for Customer	1. Purwanto SH 2. Ichsandy Kusuma 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. Ibnu Fajar Nur Hakim 9. Anthony Handoko
6	18 Mar 2024 Mar 18, 2024	Permohonan Persetujuan Pengajuan Pembiayaan Investasi Nasabah Submission for the approval of the investment financing application for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. Muhammad Ayyub Aulia, SH 9. Anthony Handoko 10. Fibrian Aditia

Agenda dan Peserta Rapat *Credit Committee*

Credit Committee Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat/ Sirkulasi Meeting Agenda/Circulation	Peserta Rapat/Sirkulasi Meeting Participants/Circulation
7	23 Apr 2024 Apr 23, 2024	Permohonan Persetujuan Pengajuan Top Up Fasilitas Pembiayaan Investasi Nasabah Submission for the approval of the top-up investment financing facility application for Customer	1. Purwanto SH 2. Ichsandy Kusuma 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. Ibnu Fajar N. Hakim 9. Fibrian A. Widiansah
8	3 Mei 2024 May 3, 2024	Permohonan Persetujuan Pengajuan Top Up Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Nasabah Submission for the approval of the top-up working capital financing facility application for Customer	1. Purwanto SH 2. Hery Suiwinata 3. Eko Setiawan Parikesit 4. Hendri Sandhi Putra 5. Robbianto 6. Arief Mediadianto 7. Ibnu Fajar N. Hakim 8. Anthony Handoko 9. Fibrian A. Widiansah 10. Yanti Budiman 11. Suwandi Iskak 12. Ichsandy Kusuma (absence)
9	20 Mei 2024 May 20, 2024	Permohonan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja - Musyarakah Nasabah Submission for the working capital financing facility – Musyarakah for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. Muhammad Ayyub Aulia 9. Fibrian Aditia
10	11 Juni 2024 June 11, 2024	Permohonan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Nasabah Submission for the working capital financing facility (Musyarakah) for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. M. Ari Ardiansyah 9. Anthony Handoko 10. Fibrian Aditia
11	11 Juni 2024 June 11, 2024	Permohonan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Nasabah Submission for the working capital financing facility (Musyarakah) for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. Harfi Maulana 9. Anthony Handoko 10. Fibrian Aditia
12	11 Juni 2024 June 11, 2024	Permohonan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Nasabah Submission for the working capital financing facility (Musyarakah) for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. M. Ayyub Aulia 9. Anthony Handoko 10. Fibrian Aditia
13	14 Juni 2024 June 14, 2024	Pengajuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Invoice Financing Nasabah Submission for the extension of the invoice financing facility for Customer	1. Purwanto SH 2. Ichsandy Kusuma 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. M Ari Adriansyah

Agenda dan Peserta Rapat *Credit Committee*

Credit Committee Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat/ Sirkulasi Meeting Agenda/Circulation	Peserta Rapat/Sirkulasi Meeting Participants/Circulation
14	25 Juni 2024 June 25, 2024	Permohonan Fasilitas Pembiayaan Investasi (Musyarakah) Nasabah Submission for the investment financing facility (Musyarakah) for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. Harfi Maulana 9. Anthony Handoko 10. Fibrian Aditia
15	22 Jul 2024 Jul 22, 2024	Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Nasabah Submission for the financing facility for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Hery Suiwinata 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Arief Mediadianto 8. Harfi Maulana 9. Fibrian Aditia Widiansah 10. Anthony Handoko
16	12 Jul 2024 Jul 12, 2024	Pengajuan Line dan Limit Sukuk Korporasi Nasabah Submission for Sukuk Line and Limit for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Eko Setiawan Parikesit 3. Triana Yulianti 4. Hendri Sandhi Putra 5. Robbianto 6. Fibrian Aditia W. 7. Diah Muharrominingsih (online)
17	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Nasabah Submission for the financing facility for Customer	1. Jo Anula Putra 2. Ichsandy Kusuma 3. Purwanto 4. Hery Suiwinata 5. Eko Setiawan Parikesit 6. Hendri Sandhi Putra 7. Robbianto 8. Arief Mediadianto 9. Harfi Maulana 10. Fibrian Aditia Widiansah 11. Anthony Handoko
18	9 Sep 2024 Sep 9, 2024	Pengajuan Fasilitas Pembiayaan Nasabah Submission for the financing facility for Customer	1. Jo Anula Putra 2. Ichsandy Kusuma 3. Purwanto 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Muhammad Ayyub Aulia 8. Fibrian Aditia Widiansah 9. Anthony Handoko
19	24 Sep 2024 Sep 24, 2024	Pengajuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Nasabah Submission for the extension of the financing facility for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Jo Anula Putra 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Anthony Handoko 8. Fibrian Aditia Widiansah
20	9 Sep 2024 Sep 9, 2024	Permohonan Persetujuan Perpanjangan dan Kenaikan limit Perusahaan Manajemen Aset Request for approval of the extension and increase of the limit for Asset Management Company	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto SH 3. Triana Yulianti 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto

Agenda dan Peserta Rapat *Credit Committee*

Credit Committee Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat/ Sirkulasi Meeting Agenda/Circulation	Peserta Rapat/Sirkulasi Meeting Participants/Circulation
21	11 Oct 2024 Oct 11, 2024	Pengajuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Nasabah Submission for the extension of the financing facility for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Jo Anula Putra 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Anthony Handoko 8. Fibrian Aditia Widiansah
22	4 Oct 2024 Oct 4, 2024	Permohonan perpanjangan line&limit Bank rekanan dan Manajemen Investasi Request for the extension of line and limit for Bank partners and investment managenent	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto SH 3. Jo Anula Putra 4. Triana Yulianti 5. Nicolas Bayu Adam 6. Eko Setiawan Parikesit 7. Hendri Sandhi Putra 8. Robbianto
23	24 Oct 2024 Oct 24, 2024	Permohonan Kenaikan Limit Perusahaan Asset Management Request for the increase of limit for Asset Management	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto SH 3. Jo Anula Putra 4. Triana Yulianti 5. Nicolas Bayu Adam 6. Eko Setiawan Parikesit 7. Hendri Sandhi Putra 8. Robbianto
24	20 Nov 2024 Nov 20, 2024	Permohonan Perpanjangan Line dan Limit Bank rekanan dan perusahaan investasi Request for the extension of line and limit for Bank pertners and investment company	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto SH 3. Jo Anula Putra 4. Triana Yulianti 5. Nicolas Bayu Adam 6. Eko Setiawan Parikesit 7. Hendri Sandhi Putra 8. Robbianto
25	7 Nov 2024 Nov 7, 2024	Proposal Renewal Fasilitas Pembiaaan Invoice Financing Nasabah Proposal for the renewal of Invoice Financing facility for Costumer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Jo Anula Putra 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Ibnu Fajar Nur Hakim 8. Arief Mediadianto 9. Anthony Handoko 10. Fibrian Aditia Widiansah
26	26 Nov 2024 Nov 26, 2024	Permohonan Perpanjangan (Renewal) Fasilitas Pembiayaan Nasabah Request for the renewal of financing facility for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Jo Anula Putra 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hendri Sandhi Putra 6. Robbianto 7. Ibnu Fajar Nur Hakim 8. Arief Mediadianto 9. Anthony Handoko 10. Fibrian Aditia Widiansah
27	13 Dec 2024 Dec 13, 2024	Perpanjangan Line dan Limit Bank Rekanan Extension of Bank Line and Limit For Bank Partners	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto SH 3. Jo Anula Putra 4. Triana Yulianti 5. Nicolas Bayu Adam 6. Eko Setiawan Parikesit 7. Hendri Sandhi Putra 8. Robbianto

Agenda dan Peserta Rapat *Credit Committee*
Credit Committee Meeting Agenda and Participants

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat/ Sirkulasi Meeting Agenda/Circulation	Peserta Rapat/Sirkulasi Meeting Participants/Circulation
28	18 Dec 2024 Dec 18, 2024	Pengajuan Line (Baru) Bank Rekanan Submission of Line (New) proposals for Bank Partners	1. Purwanto SH 2. Jo Anula Putra 3. Triana Yulianti 4. Nicolas Bayu Adam 5. Eko Setiawan Parikesit 6. Hendri Sandhi Putra 7. Robbianto
29	6 Dec 2024 Dec 6, 2024	Pengajuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Nasabah Submission for extension of financing facility for Customer	1. Ichsandy Kusuma 2. Purwanto 3. Jo Anula Putra 4. Eko Setiawan Parikesit 5. Hery Suiwinata 6. Fibrian Aditia Widiansah 7. Robbianto

Pelaksanaan Tugas Credit Committee

Sepanjang tahun 2024, tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan direalisasikan melalui penyelenggaraan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan agenda yang telah disampaikan dalam pembahasan rapat Komite Pembiayaan pada Laporan Tahunan ini. Selain itu, Komite Pembiayaan juga telah memberikan keputusan terkait pembiayaan di luar agenda rapat tersebut (secara sirkuler) antara lain:

1. Permohonan perubahan kondisi pembiayaan
2. Permohonan penyimpanan teknis realisasi pembiayaan

KOMITE EKSEKUTIF KEBERLANJUTAN

Komite Eksekutif Keberlanjutan atau Sustainability Executive Committee (SEC) dan Kelompok Kerja (*Working Group/Champions*) Keberlanjutan dibentuk dengan tujuan memastikan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek operasional Bank sesuai dengan strategi dan rencana kerja keberlanjutan. Hal ini juga bertujuan untuk mencapai target-target keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta lampiran-lampirannya.

Implementation of the Credit Committee Duties

Throughout the year 2024, the duties and responsibilities of the Financing Committee were realized through the conduct of 29 (twenty-nine) meetings with agendas presented in the Financing Committee discussions in this Annual Report. In addition, the Financing Committee also made decisions related to financing outside of the meeting agendas (via circulation), including:

1. Request for changes in financing conditions
2. Request for technical storage of financing realization

SUSTAINABILITY EXECUTIVE COMMITTEE

The Sustainability Executive Committee (SEC) and the Sustainability Working Group/Champions were formed with the aim of ensuring the implementation of sustainability principles in all operational aspects of the Bank, in line with the sustainability strategy and work plan. This also aims to achieve the established sustainability targets.

Legal Basis

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which was enacted into Law under Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
2. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.
4. OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, along with its annexes.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 Tahun 2022.
9. Kerangka Kerja Sustainability UN Global Compact dan UN Principles for Responsible Banking.
10. *Sustainability Roadmap* PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab SEC

1. Memastikan terintegrasinya prinsip keberlanjutan di seluruh aktivitas operasional dan komunikasi Bank.
2. Mengevaluasi program-program keberlanjutan di seluruh Unit Kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.
3. Mengevaluasi indikator-indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) dan target keberlanjutan yang telah ditetapkan, dan memutuskan penyesuaian bilamana dianggap perlu.
4. Mengevaluasi pencapaian target untuk setiap indikator keberlanjutan pada setiap triwulan dan tahun.
5. Mengusulkan pembuatan/pengkinian pedoman internal bank untuk mencapai target-target keberlanjutan yang sudah ditetapkan.
6. Melakukan upaya penyelesaian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan aspek keberlanjutan yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja terkait.
7. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank untuk pelaksanaan program-program keberlanjutan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.
8. Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan perubahan strategi, serta pemenuhan atau perubahan target pencapaian kinerja berkelanjutan.

Struktur SEC

Ketua Merangkap Anggota **Chairman Concurrently serves as Member**	Presiden Direktur President Director
Anggota **Members**	1. Direktur Kepatuhan / Director of Compliance 2. Direktur Digital Banking / Director of Digital Banking 1. Chief Strategy & Operating Officer 2. Chief Technology Officer
Sekretaris **Secretary**	Unit Kerja Sustainability Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat, membuat, mendokumentasikan dan mensirkulasi notulen rapat. Notulen rapat harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau anggota Komite lainnya apabila Ketua Komite berhalangan. Sustainability Work Unit The secretary will inform the meeting schedule, create, document and circulate meeting minutes. Meeting minutes must be signed by the Committee Chairman or other Committee members if the Committee Chairman is absent.

5. OJK Regulation No. 60/POJK.04/2017 concerning the Issuance and Requirements for Environmental Impact Debt Securities (Green Bonds).
6. OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
7. OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
8. Indonesia Green Taxonomy Edition 1.0, 2022.
9. UN Global Compact Framework and UN Principles for Responsible Banking.
10. Sustainability Roadmap of PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Duties and Responsibilities of SEC

1. Ensuring the integration of sustainability principles across all operational activities and communications of the Bank.
2. Evaluating sustainability programs across all Work Units according to the work plan approved by the Board of Directors.
3. Evaluating the established Key Performance Indicators (KPIs) and sustainability targets and deciding on adjustments when necessary.
4. Evaluating the achievement of targets for each sustainability indicator quarterly and annually.
5. Proposing the creation/updating of internal bank guidelines to achieve the established sustainability targets.
6. Resolving sustainability-related issues that cannot be addressed by the respective work units.
7. Ensuring the adequacy and allocation of resources owned by the Bank for implementing sustainability programs in line with the work plan approved by the Board of Directors.
8. Providing direction and recommendations related to changes in strategy, as well as the fulfillment or adjustment of sustainable performance targets.

SEC Structure

Ketentuan dan Mekanisme SEC

1. Rapat SEC dipimpin oleh Ketua atau anggota SEC lain yang ditunjuk oleh Ketua sebagai wakil apabila Ketua berhalangan.
2. Rapat SEC dilaksanakan baik secara langsung maupun *online* paling sedikit sekali dalam setiap triwulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Rapat SEC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota SEC.
4. Apabila salah seorang anggota berhalangan hadir dalam rapat SEC, maka yang bersangkutan dapat menunjuk orang lain untuk mewakili dalam rapat tersebut.
5. Materi rapat SEC disiapkan dan dikumpulkan oleh sekretaris SEC.
6. Hasil rapat SEC berupa antara lain rekomendasi yang akan diputuskan oleh Direksi melalui mekanisme musyawarah mufakat. Apabila konsensus tidak tercapai maka ketua komite berhak mengambil keputusan akhir.
7. Hasil keputusan rapat SEC dianggap sah jika diputuskan oleh mayoritas (di atas 50%) anggota SEC yang hadir pada rapat SEC.
8. Setiap rapat SEC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat SEC yang disusun dan disampaikan oleh sekretaris SEC kepada ketua komite untuk ditandatangani oleh ketua (atau anggota SEC lainnya apabila ketua berhalangan) dan sekretaris SEC.
9. Risalah rapat SEC yang telah ditandatangani oleh ketua (atau anggota lain yang ditunjuk sebagai wakil apabila ketua berhalangan) dan sekretaris SEC selanjutnya diserahkan kepada Direksi untuk persetujuan.
10. Risalah rapat SEC yang telah disetujui oleh Direksi selanjutnya didistribusikan oleh sekretaris SEC kepada seluruh anggota SEC, undangan tetap dan unit kerja terkait yang menghadiri rapat SEC.
11. Seluruh dokumen rapat SEC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh sekertaris SEC.

Rapat SEC

Komite Eksekutif Keberlanjutan telah mengadakan rapat atau sirkulasi sebanyak 4 (empat) di tahun 2024 dengan risalah sebagai berikut:

SEC Provisions and Mechanisms

1. SEC meetings are chaired by the Chairman or another SEC member appointed by the Chairman as a representative in the absence of the Chairman.
2. SEC meetings are held either in person or online at least once every quarter or can be held at any time if necessary.
3. SEC meetings are held if attended by at least more than 50% (fifty percent) of the total number of SEC members.
4. If one of the members is unable to attend the SEC meeting, the person concerned can appoint another person to represent them at the meeting.
5. SEC meeting materials are prepared and collected by the SEC secretary.
6. The results of the SEC meeting include, among other things, recommendations which will be decided by the Board of Directors through a consensus deliberation mechanism. If consensus is not reached, the committee chairmqn has the right to make the final decision.
7. The results of SEC meeting decisions are considered valid if they are decided by the majority (above 50%) of SEC members present at the SEC meeting.
8. Each SEC meeting and the results of its decisions are stated in the minutes of the SEC meeting which are prepared and submitted by the SEC secretary to the chairman of the committee to be signed by the chairman (or another member of the SEC if the chairman is absent) and the SEC secretary.
9. The minutes of the SEC meeting which have been signed by the chairman (or another member appointed as a representative if the chairman is absent) and the SEC secretary are then submitted to the Board of Directors for approval.
10. Minutes of SEC meetings that have been approved by the Board of Directors are then distributed by the SEC secretary to all SEC members, permanent invitees and related work units who attend SEC meetings.
11. All SEC meeting documents are collected and documented by the SEC secretary.

SEC Meetings

The Sustainability Executive Committee has held meetings orcirculations 4 (four) times in 2024 with the following minutes:

Agenda dan Peserta Rapat SEC
Agenda and Participants of SEC Meeting

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	21 Maret 2024 March 21, 2024	• Update terkait proses Sustainability Report 2023, UNGC & UNPRB Annual Reportings, dan Sustainability Awards • Update terkait kegiatan CSR dan penggunaan Dana Kebajikan yang akan dilakukan di Q1-Q4 2024 • Update terkait THI Inegration Project dengan PwC supported by UNEP FI • Tindak Lanjut • Updates on the 2023 Sustainability Report process, UNGC & UNPRB Annual Reports, and Sustainability Awards • Updates on CSR activities and use of the Charity Fund to be carried out in Q1-Q4 2024 • Updates on the THI Integration Project with PwC supported by UNEP FI • Follow-up

Agenda dan Peserta Rapat SEC
Agenda and Participants of SEC Meeting

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
2.	24 Juni 2024 June 24, 2024	• Update terkait progress dari Proyek Bantuan UNEP FI untuk Integrasi THI dengan PwC • Update terkait Roadmap OJK mengenai Climate Risk Stress Testing • Update terkait pelaporan dan kebijakan • Update terkait Sustainability Awards dan Kampanye topik-topik Sustainability di bulan Juni • Update on progress of UNEP FI Assistance Project for THI Integration with PwC • Update on OJK Roadmap on Climate Risk Stress Testing • Update on reporting and policies • Update on Sustainability Awards and Sustainability Campaign topics in June
3.	29 Agustus 2024 August 29, 2024	• Sharing terkait Roadmap Pengembangan Sustainable Finance OJK sampai dengan 2026 dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) • Update terkait program-program Sustainability • Update terkait Sustainability Communications • Tindak Lanjut • Sharing related to OJK's Sustainable Finance Development Roadmap until 2026 and Taxonomy for Sustainable Finance in Indonesia (TKBI) • Update related to Sustainability programs • Update related to Sustainability Communications • Follow-up
4.	14 November 2024 November 14, 2024	• Presentasi mengenai Roadmap Keberlanjutan 2022 – 2026 • Presentasi mengenai Pencapaian terhadap target-target RAKB 2024 • Presentasi mengenai RAKB 2025 • Tindak lanjut • Presentation on Sustainability Roadmap 2022 – 2026 • Presentation on Achievement of RAKB 2024 targets • Presentation on RAKB 2025 • Follow-up

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs Of The Board Of Directors

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bank Aladin Syariah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu organ tata Kelola yang membantu Dewan Direksi dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan juga berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya. Selain itu, tugas Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal.

Dasar Hukum

Sekretaris Perusahaan Bank Aladin Syariah dibentuk dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait penunjukkan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Terbuka. Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tugas-tugas Direksi dan memastikan Bank telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Pejabat dan Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan hingga 31 Desember 2024 dijabat oleh Indira Indah Prameshwari.

CORPORATE SECRETARY

Bank Aladin Syariah has a Corporate Secretary, which is a governance organ that assists the Board of Directors in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). In this case, the Corporate Secretary also functions as a liaison between the Bank and Shareholders and other Stakeholders. In addition, the Corporate Secretary's duty is to ensure the Bank's compliance with regulations and legislation, especially in the capital markets sector.

Legal Basis

The Corporate Secretary of Bank Aladin Syariah was formed with reference to the applicable provisions and regulations, namely Article 103 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") regarding the appointment of Corporate Secretary in Public Companies. The Board of Directors may appoint a Corporate Secretary to support the Board of Directors' duties and ensure that Bank complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles.

Officer and Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary as of December 31, 2024, was held by Indira Indah Prameshwari.



Indira Indah Prameshwari

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 38 tahun

Domisili
Indonesia

Pendidikan
- Bachelor of Business in Marketing & International Trade, Victoria University (2007)
- Master of Science (MSc) in International Business Management, The University of Nottingham (2009)

Pengalaman Kerja
- Head of Corporate Secretary di Mandiri Manajemen Investasi (2018—2021)
- Corporate Secretary Manager di Bakrie & Brothers Tbk. (2013—2018)
- Investor Relations Manager di Adhi Karya (Persero) Tbk. (2011—2013)
- Business Development di Pemeringkat Efek Indonesia (2009—2011)

Personal Data
Indonesian citizens
Aged 38

Domicile
Indonesia

Education
- Bachelor of Business in Marketing & International Trade, Victoria University (2007)
- Master of Science (MSc) in International Business Management, The University of Nottingham (2009)

Work Experience
- Head of Corporate Secretary at Mandiri Investment Management (2018— 2021)
- Corporate Secretary Manager at Bakrie & Brothers Tbk. (2013—2018)
- Investor Relations Manager at Adhi Karya (Persero) Tbk. (2011—2013)
- Business Development at Indonesian Securities Ratings (2009—2011)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dengan berlandaskan pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Bank;
   b. Penyampaian laporan-laporan kepada Regulator secara tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Based on Article 5 POJK no. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, the function of the Corporate Secretary is to carry out duties that at least include:

1. Keep abreast of capital market developments, especially applicable laws and regulations in the capital market sector.
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with statutory provisions in the capital markets sector.
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
   a. Information disclosure to the public, including the availability of information on Bank Website;
   b. Submission of reports to the Regulator in a timely manner;
   c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
   d. Organizing and documenting Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; and
4. As a liaison between Bank and shareholders, OJK and other stakeholders.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Aladin Syariah juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
   a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
   b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
   c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
   d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank
   e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
   f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
   a. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra
   b. Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/ *stakeholders* bank.
   c. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi.
   d. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. event/acara/sponsorship) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan
   a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
   b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
   c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
   a. Bersama Unit *Sustainability* menetapkan strategi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di Bank Aladin Syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Bank senantiasa mendorong dan memfasilitasi Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2024, yaitu:

In line with the OJK Regulations, the Corporate Secretary of Bank Aladin Syariah also has Policies and Standard Guidelines as the basis for the Corporate Secretary in carrying out his functions and duties. Activities within the scope of responsibility of the Corporate Secretary include:

1. The Bank's Activities as a Public Company:
   a. Implement Information Disclosure including reporting to Regulators regarding Bank's status as a public company.
   b. Organize and document the General Meeting of Shareholders.
   c. Carry out reporting in accordance with other statutory provisions which are the authority of the Corporate Secretary work unit.
   d. Manage the administration of the Bank's shareholders
   e. Organizing other activities related to Corporate Actions and/ or other information disclosure.
   f. Carry out the Bank's compliance function with regulations in the capital market sector.
2. Corporate Communication Activities
   a. Determine strategies and organize corporate communications that present an image
   b. the Company to all stakeholders of the Bank.
   c. Carry out reputation risk management functions.
   d. Organize and carry out certain activities (e.g. events/ events/sponsorship) as the implementation of corporate communication strategies.
3. Secretarial Activities
   a. Organizing and documenting Board of Directors Meetings and Board of Commissioners Meetings.
   b. Administering company documents including arranging or establishing regulations regarding correspondence and management of company documents.
   c. Carry out activities to support the functions and work activities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4. Social and Environmental Responsibility Activities
   a. Together with the Sustainability Unit, establish strategies and implement social and environmental responsibility activities.

Corporate Secretary Structure

The Corporate Secretary at Bank Aladin Syariah is directly responsible to the President Director for the implementation of her duties and responsibilities.

Corporate Secretary's Competency Improvement Program

Bank always encourages and facilitates the Corporate Secretary to carry out competency development. The training attended by the Corporate Secretary throughout 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program
Indira Indah Prameshwari	Head of Corporate Secretary	1. Resolution & Recovery Plan 2. BILIF Islamic Leaders Conference (ILC) 3. Menggiatkan Kompetensi Unggul Investor Relations 4. Series Webinar Penyegaran POJK - POJK Terkait Laporan Berkala 5. Series Webinar Penyegaran POJK - POJK Keterbukaan Informasi dan Laporan Insidentil 6. A Cutting - Edge Approach to Sustainability Reporting 7. Catalyst Effect - Influence Training for Cultural Agents 8. Climate Risk Management System Training 9. The Greenwashing Trap 1. Resolution & Recovery Plan 2. BILIF Islamic Leaders Conference (ILC) 3. Encouraging Superior Competence of Investor Relations 4. POJK Refresher Webinar Series - POJK Related to Periodic Reports 5. POJK Refresher Webinar Series - POJK Information Disclosure and Incidental Reports 6. A Cutting - Edge Approach to Sustainability Reporting 7. Catalyst Effect - Influence Training for Cultural Agents 8. Climate Risk Management System Training 9. The Greenwashing Trap

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi & Dewan Komisaris serta membuat seluruh risalah hasil Rapat tersebut.
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank.
3. Melaksanakan Paparan Publik Tahunan sesuai peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Aksi Korporasi.
4. Bersama unit kerja *Sustainability* menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility*.
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi perusahaan kepada media massa & masyarakat 6. Berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham.

Hubungan Investor

Setiap investor atau calon investor diberikan akses untuk mengirimkan pertanyaan kepada Divisi *Investor Relations & Corporate Secretary*. Pertanyaan juga dapat ditujukan kepada Bank melalui situs *website* https://aladinbank.id/ Hubungi Kami atau melalui info di bawah ini:

Investor Relations & Corporate Secretary

Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25.
Jakarta Selatan, Indonesia. Kode Pos: 12920
Telp. : +62 21 39708008
Fax : +62 21 39708007
Email : ir@aladinbank.id
Email Corsec : corsec@aladinbank.id

Implementation of Corporate Secretary 's Duties

Throughout 2024, the Corporate Secretary has carried out several activities as follows:

1. Organized and attended Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings of the Board of Directors & Board of Commissioners, and prepared all minutes of these meetings.
2. Organized the Bank's Annual General Meeting of Shareholders
3. Carried out Annual Public Exposes in accordance with applicable regulations and was responsible for organizing Corporate Actions.
4. Together with the Sustainability work unit, organized Corporate Social Responsibility activities
5. Managed Company information and communications to the mass media & the public Acted as a liaison between the Company and shareholders.

Investor Relations

Every investor or prospective investor is granted access to submitinquiries to the Investor Relations & Corporate Secretary Division. Inquiries can also be directed to the Company through the website https://aladinbank.id/. Contact Us or via the info below:

Investor Relations & Corporate Secretary

Millennium Centennial Center Building, 7th Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25. South Jakarta, Indonesia.
Postal Code: 12920
Phone : +62 21 39708008
Fax : +62 21 39708007
Email : ir@aladinbank.id
Corsec Email : corsec@aladinbank.id

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki fungsi untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan usaha Bank berjalan secara efektif melalui adanya proses audit yang meliputi seluruh aspek keuangan dan operasional di dalam Bank. Selain itu, SKAI Bank dibentuk untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian Intern yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dengan mengidentifikasi potensi risiko internal yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank. SKAI juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja dan keamanan Bank.

Internal Audit Charter

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi pengendalian internal, SKAI memiliki pedoman kerja yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Bank dengan nomor No. KB-O/014/PRESDIR, telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 05 Agustus 2022.

Piagam Audit ini mencerminkan tekad Perseroan untuk secara konsisten menerapkan Tata Kelola Perusahaan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Piagam Audit juga merupakan pedoman dan acuan akan kedudukan Internal Audit, visi dan misi, ruang lingkup dan tujuan, wewenang, tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh staf satuan Unit Internal Audit.

INTERNAL AUDIT WORK UNIT

The Internal Audit Work Unit (SKAI) has the function of ensuring that the implementation of the internal control system in the Bank's business environment runs effectively through an audit process that covers all financial and operational aspects within Bank. In addition, the Bank's SKAI has been established to audit the effectiveness of the Internal control system which focuses on significant business risks by identifying potential internal risks that could affect Bank's performance, including compliance with applicable laws and regulations, adequacy of governance processes, risk management and control systems. Bank internal. SKAI is also responsible for providing recommendations for improvements to improve the Bank's performance and security.

Internal Audit Charter

To support the implementation of duties and internal control functions, SKAI has work guidelines prepared based on Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks. Bank Internal Audit Charter with number No. KB-O/014/PRESDIR, has been approved and signed by the Board of Directors and has been approved and signed by the Board of Commissioners on August 5, 2022.

This Audit Charter reflects the Company's determination to consistently implement Corporate Governance to achieve the stated vision and mission. The Audit Charter is also a guideline and reference for the position of Internal Audit, vision and mission, scope and objectives, authority, duties and responsibilities that must be carried out by the Internal Audit Unit staff.

Visi dan Misi SKAI

SKAI Vision and Mission

Visi **Vision**	Menjadi mitra kerja Direksi yang independen, objektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarannya. Become a working partner of the Board of Directors who is independent, objective, trustworthy and responsive in its efforts to support the Board of Directors' duties in achieving its targets.
Misi **Mission**	1. Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional Perseroan. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan agar prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dapat terlaksana. 3. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi secara independen, transparan, accountable, responsible untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan kualitas pengelolaan operasional Perseroan. 4. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional. 1. Carry out internal audits of the Company's activities and operational activities. 2. Carry out inspections and evaluations of operational and financial management control processes so that the principles of good corporate governance can be implemented. 3. Provide independent, transparent, accountable, responsible consulting and recommendation services to increase the effectiveness and efficiency of performance and provide added value to improve the quality of the Company's operational management. 4. Continuously improve competence in order to become a professional internal auditor.

Dasar Hukum dan Pengangkatan

SKAI dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Presiden Direktur sesuai Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. S.048.BOD/04/2024 tanggal 5 April 2024, Bank telah menetapkan Tony Prima Witono sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Emiten, serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. Srt.541/HCD/04/2024 tanggal 26 April 2024. Bank telah membentuk Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Legal Basis and Appointment

SKAI was formed in accordance with the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks. The Head of SKAI is appointed by the President Director in accordance with the Internal Audit Unit Appointment Letter No. S.048. BOD/04/2024 dated April 5, 2024, the Bank has appointed Tony Prima Witono as Chairman of the Issuer's Internal Audit Unit, and has reported this to the Financial Services Authority with letter No. Srt.541/HCD/04/2024 dated April 26, 2024. The Bank has established an Internal Audit Charter in accordance with POJK No. 56/201 regarding the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Kepala SKAI dilakukan atas pertimbangan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SKAI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris bilamana Kepala SKAI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor SKAI dan/atau gagal atau tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Party Who Appoints and Dismisses the Head of Internal Audit

The President Director appoints and dismisses the Head of SKAI based on the consideration of the Board of Commissioners. In practice, the President Director can dismiss the Head of SKAI after obtaining approval from the Board of Commissioners if the Head of SKAI does not fulfill the requirements as an SKAI Auditor and/or fails or is incompetent in carrying out his duties and responsibilities.

Profil dan Pejabat Kepala SKAI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. S.048. BOD/04/2024 tanggal 5 April 2024 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. Srt.541/HCD/04/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Laporan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Aladin Syariah, Kepala SKAI dijabat oleh Tony Prima Witono.

Profile and Officials of the Head of SKAI

Based on the Board of Directors' Decree No. S.048. BOD/04/2024 dated April 5, 2024 and has been reported to the Financial Services Authority with letter Srt.541/HCD/04/2024 dated April 26, 2024 concerning Report on the Appointment of the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) PT Bank Net Indonesia Syariah, the Head of SKAI is held by Tony Prima Witono.



Tony Prima Witono

Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 35 tahun

Domisili
Indonesia

Pendidikan
Bachelor of Communications, Arnhem Business School, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2011)

Pengalaman Kerja
- Head of Internal Audit, PT Bank Aladin Syariah Tbk (2024 - saat ini)
- Head of Business Audit, PT Bank Jago Tbk (2020 - 2024)
- Head of Marketing and Partnership, PT Brodo Ganesha Indonesia (2018 - 2020)
- Retail Banking Audit Dept. Head, PT Bank Commonwealth (2016 - 2018)
- Core & Support Auditor, PT Bank Commonwealth (2014 - 2015)
- Graduate Development Program, PT Bank Commonwealth (2012 - 2014)

Personal Data
Indonesian Citizen
Aged 35

Domicile
Indonesia

Education
Bachelor of Communications, Arnhem Business School, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2011)

Work Experience
- Head of Internal Audit, PT Bank Aladin Syariah Tbk (2024 - present)
- Head of Business Audit, PT Bank Jago Tbk (2020 - 2024)
- Head of Marketing and Partnership, PT Brodo Ganesha Indonesia (2018 - 2020)
- Retail Banking Audit Department Head, PT Bank Commonwealth (2016 - 2018)
- Core & Support Auditor, PT Bank Commonwealth (2014 - 2015)
- Graduate Development Program, PT Bank Commonwealth (2012 - 2014)

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Sebagaimana yang termuat dalam Piagam Audit Intern Bank Tahun 2023, tugas dan tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
2. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
3. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
4. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
5. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
6. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
7. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
8. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
9. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.

SKAI Duties and Responsibilities

As contained in the Bank's 2023 Internal Audit Charter, SKAI's duties and responsibilities are as follows:

1. Have adequate competence and ability in leading an independent and objective internal audit function.
2. Ensure the implementation of the internal audit function in accordance with the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Conduct.
3. Select competent human resources according to the needs in carrying out SKAI duties.
4. Ensure that SKAI members participate in ongoing professional development and other training in accordance with the development of the complexity and business activities of the Bank.
5. Prepare and review the Internal Audit Charter periodically.
6. Prepare an annual audit plan and budget allocation for the implementation of the internal audit function.
7. Ensure the implementation of internal audits in accordance with the internal audit plan.
8. Report significant findings to the Board of Directors for corrective action in a timely manner.
9. Monitor corrective actions on significant findings.

10. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
    a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
    b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
    c. Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern PT Bank Aladin Syariah Tbk.
12. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan dan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
13. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.

10. Report the results of monitoring the follow-up to improvements on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function.
11. Ensure that in the event of the use of external party services for internal audit activities:
    a. There is a transfer of knowledge between external parties to SKAI members and considers the use of external expert services to be temporary.
    b. The use of external party services does not affect the independence and objectivity of the SKAI function.
    c. External parties comply with the Internal Audit Charter of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
12. Submit findings related to the implementation and fulfillment of sharia principles to the Sharia Supervisory Board.
13. Prepare written policies and procedures as guidelines for Auditors in carrying out their duties.

Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Auditor memerlukan keahlian dan kompetensi yang mumpuni. Oleh karena itu, sertifikasi profesi baik yang diakui secara internasional maupun nasional menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami lebih jauh perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki SKAI hingga akhir tahun 2024.

Certification as Internal Audit Professionals

Auditors need qualified skills and competencies. Therefore, professional certification, both internationally and nationally recognized, is an important aspect for auditors to understand further audit developments, especially regarding compliance with regulations and industry developments. The following is a presentation of the professional certification held by SKAI until the end of 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal Type of Internal Audit Professional Certification
Tony Prima Witono (Kepala SKAI) (Head of SKAI)	Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Qualifications for 5 Fields of Banking Risk Management
	Certified Lead Auditor ISO 27001
Budi Rezki Wijayanti (Manager General and Sharia Audit) Manager of General and Sharia Audit	Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Qualifications for 5 Fields of Banking Risk Management
	Internal Audit Bank Level Supervisor
Rhiza Ayuningtyas (General and Sharia Auditor)	Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Qualifications for 5 Fields of Banking Risk Management
	Internal Audit Bank Level Auditor

Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI bertanggung jawab langsung kepada kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Dalam hal ini, penunjukan dan pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama Bank, disertai persetujuan Dewan Komisaris melalui rekomendasi dari Komite Audit. Proses ini selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Structure and Position of SKAI

SKAI is directly responsible to the President Director and can communicate with the Board of Commissioners directly or through the Audit Committee to provide information on various matters relating to the implementation of audits and in carrying out supervisory functions to realize Bank's vision and mission. In this case, the appointment and dismissal of the Head of SKAI is carried out by the President Director of Bank, accompanied by approval from the Board of Commissioners through recommendations from the Audit Committee. This process is then reported to the Financial Services Authority (OJK).

Program Pengembangan Kompetensi

Bank Aladin Syariah senantiasa mendukung dan memfasilitasi SKAI untuk melakukan pengembangan kompetensi sehingga dapat mengikuti isu-isu seputar audit dan gungsi-fungsi di bawah SKAI. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota SKAI sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

Bank Aladin Syariah always supports and facilitates SKAI to develop competencies so that it can keep abreaast of the issues surrounding audits and functions under SKAI. The training attended by SKAI members throughout 2024 is as follows:

No.	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Pelaksanaan Place	Penyelenggara Organizer
1.	CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor	9 Januari 2024 January 9, 2024	Jakarta	PT BSI Group Indonesia
2.	ISO/IEC 27001:2022 Internal Auditor Training Course	9 Januari 2024 January 9, 2024	Jakarta	PT BSI Group Indonesia
3.	Personal Data Protection	29 Februari - 1 Maret 2024 February 29 – March 1, 2024	Jakarta	Alta Advocates
4.	Pembekalan Pengkinian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5 Banking Risk Management Certification Update Provision Level 5	27 - 28 Mei 2024 May 27-28, 2024	Jakarta	PT Raharja Duta Solusindo
5.	Refreshment Anti Fraud Training	6 Juni 2024 June 6, 2024	Jakarta	Internal Aladin Aladin Internal
6.	Pemahaman Dasar Perbankan Syariah Basic Understanding of Sharia Banking	16 Juli 2024 July 16, 2024	Jakarta	Muamalat Institute
7.	Audit Aspek Syariah atas Pembiayaan Sharia Aspect Audit in Financing	29 Agustus 2024 August 29, 2024	Jakarta	Muamalat Institute
8.	Pembekalan Audit Intern Bank Level Auditor Bank Internal Audit Provision of Auditor Level	20 - 21 Agustus 2024 August 20-21, 2024	Jakarta	Ikatan Auditor Inten Bank Bank Internal Auditors Association
9.	Climate Risk Management System Training	3-4 Desember 2024 December 3-4, 2024	Jakarta	Tri Hita Karana Consulting
10.	Lead Auditor Training Course	18-22 November 2024 November 18-22, 2024	Jakarta	Andalan Teknologi Inovasi
11	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko J5 Batch Desember 2024 Risk Management Provision and Certification J5 Batch December 2024	4 Desember 2024 December 4, 2024	Jakarta	Muamalat Institute

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Satuan Kerja Audit Internal

SKAI memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat secara berkala dan insidential dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah. Adapun rapat yang telah diselenggarakan SKAI di sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 16 kali rapat, 3 kali rapat dengan Direksi, 12 kali rapat dengan Komite Audit yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, dan 1 kali rapat dengan Dewan Pengawas Syariah. Adapun rapat SKAI, dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Policy and Implementation of Internal Audit Work Unit Meetings

SKAI has the authority to hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee and Sharia Supervisory Board. The Total Meetings held by SKAI throughout 2024 is 16 times of meetings, 3 times of meetings with the Board of Directors, 12 meetings with the Audit Committee attended by the Board of Commissioners, and 1 meeting with the Sharia Supervisory Board .The SKAI meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board are as follows:

Agenda dan Peserta Rapat SKAI
Agenda and Participants of SKAI Meetings

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Rapat Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	18 Januari 2024 January 18, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of Audit Committee Meeting Minutes • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Internal audit results • Monitoring of follow-up of audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, Board of Directors (BOD), Chief Executive, Board of Commissioners (BOC), Audit Committee
2.	25 Januari 2024 January 24, 2024	Direksi Board of Directors	• Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Monitoring of the follow-up of audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, BOD, Chief Executive
3.	16 Februari 2024 February 16, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of Audit Committee Meeting Minutes • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Internal audit results • Monitoring of follow-up of audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
4.	29 Februari 2024 February 29, 2024	Direksi Board of Directors	• Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Monitoring of the follow-up of audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, BOD, Chief Executive
5.	18 Maret 2024 March 18, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Hasil Quality Assurance Review penugasan audit • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Pemberhentian dan pegangkatan Kepala SKAI • Follow-up of Audit Committee Meeting Minutes • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Internal audit results • Results of Quality Assurance Review of audit assignments • Monitoring of follow-up of audit findings • Dismissal and appointment of the Head of SKAI	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
6.	21 Maret 2024 March 21, 2024	Direksi Board of Directors	• Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Monitoring of the follow-up of audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive SKAI, BOD, Chief Executive
7.	24 April 2024 April 24, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit • Hasil audit internal • Follow-up of Audit Committee Meeting Minutes • Update on implementation of audit activities • Internal audit results	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee

Agenda dan Peserta Rapat SKAI
Agenda and Participants of SKAI Meetings

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Rapat Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8.	15 Mei 2024 May 15, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Usulan perubahan rencana audit 2024 • Timeline pelaksanaan kaji ulang SKAI oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of Audit Committee Meeting Minutes • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Proposed changes to the 2024 audit plan • Timeline for the implementation of the SKAI review by the Public Accountant Firm (KAP) • Monitoring of the follow-up to audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
9.	21 Juni 2024 June 21, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • Hasil audit internal • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of Audit Committee Meeting Minutes • Update on the implementation of audit activities and non-audit activities • Internal audit results • Monitoring of follow-up of audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
10.	29 Juli 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Update pelaksanaan aktivitas audit dan aktivitas non audit • • Hasil Quality Assurance Review penugasan audit • Kaji Ulang Fungsi SKAI • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of audit committee meeting minutes • Update on implementation of audit activities and non-audit activities • Results of Quality Assurance Review of audit assignments • Review of SKAI Functions • Monitoring of follow-up of audit findings	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
11.	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Usulan dan penyesuaian aktivitas audit Q3 - Q4 tahun 2024 • Persiapan audit OJK • Hasil sementara kaji ulang fungsi SKAI • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of audit committee meeting minutes • Proposal and adjustment of audit activities Q3 - Q4 2024 • Preparation of OJK audit • Interim results of SKAI function review • Monitoring of audit findings follow-up	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
12.	20 September 2024 September 20, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Progress pelaksanaan aktivitas audit • Highlight Hasil Audit IT • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of audit committee meeting minutes • Progress of audit activity implementation • Highlight of IT Audit Results • Monitoring of audit findings follow-up	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
13.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	DPS	• Struktur dan program kerja SKAI • Penyampaian Opini DPS terkait pemeriksaan aspek syariah • SKAI work structure and program • Submission of DPS Opinion regarding the examination of sharia aspects	SKAI, Direksi, DPS SKAI, BOD, DPS

Agenda dan Peserta Rapat SKAI
Agenda and Participants of SKAI Meetings

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Rapat Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
14.	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Komite Audit Audit Committee	Tindak lanjut risalah rapat komite audit Progress pelaksanaan aktivitas audit Highlight Hasil Audit Internal Monitoring tindak lanjut temuan audit Follow-up of audit committee meeting minutes Progress of audit activity implementation Highlight of Internal Audit Results Monitoring of audit findings follow-up	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
15.	20 November 2024 November 20, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Progress pelaksanaan aktivitas audit • Highlight Proposal Rencana Audit Tahun 2025 • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of audit committee meeting minutes • Progress of audit activity implementation • Highlight of 2025 Audit Plan Proposal • Monitoring of audit findings follow-up	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee
16.	20 Desember 2024 December 20, 2024	Komite Audit Audit Committee	• Tindak lanjut risalah rapat komite audit • Progress pelaksanaan aktivitas audit • Highlight Hasil Audit Internal • Monitoring tindak lanjut temuan audit • Follow-up of audit committee meeting minutes • Progress of audit activity implementation • Highlight of Internal Audit Results • Monitoring of audit findings follow-up	SKAI, Direksi, Chief Executive, Komisaris, Komite Audit SKAI, BOD, Chief Executive, BOC, Audit Committee

Pelaksanaan Tugas SKAI
Hingga akhir tahun 2024, SKAI telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:
1. Pelaksanaan proses *special* audit Validasi Kelengkapan Dokumen Pembiayaan Nasabah.
2. Pelaksanaan proses audit Surveillance ISO 27001:2013.
3. Pelaksanaan proses audit Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan KPDHN Bank Indonesia.
4. Pelaksanaan proses *special* audit Validasi Struktur Usaha Nasabah dan Proses Autodebet Angsuran Multiguna Nasabah.
5. Pelaksanaan proses audit IT Vulnerability Management.
6. Pelaksanaan proses audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
7. Pelaksanaan proses audit *Financing Business Process*.

Implementation of SKAI Duties
Until the end of 2024, SKAI carried out several activities including:
1. Implementation of the special audit process for Validation of Completeness of Customer Financing Documents.
2. Implementation of the ISO 27001:2013 Surveillance audit process.
3. Implementation of the audit process for the Compliance Assessment Report (LHPK) of the Payment System and Bank Indonesia's KPDHN.
4. Implementation of the special audit process for Validation of Customer Business Structure and Customer Multipurpose Installment Autodebit Process.
5. Implementation of the IT Vulnerability Management audit process.
6. Implementation of the Financial Information Service System (SLIK) audit process.
7. Implementation of the Financing Business Process audit process.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal terkait Standar Implementasi Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tanggung jawab Kepala SKAI adalah merancang dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen. *Monitoring* terhadap tindak lanjut temuan auditor adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur oleh SKAI, di mana hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, m*onitoring* tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan *auditee*.

Adapun kegiatan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor dilaksanakan di sepanjang tahun 2023 dengan melakukan reminder tindak lanjut kepada auditee secara bulanan jika ada temuan audit yang akan jatuh tempo pada bulan tersebut. Kemudian secara berkala, laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Monitoring Activities and Deviation Correction Actions

Based on the Internal Supervisory Unit Work Guidelines regarding Follow-up Monitoring Implementation Standards, one of the responsibilities of the Head of SKAI is to design and supervise the implementation of follow-up actions to the results of assignments that have been submitted to management. Monitoring the follow-up to auditor findings is a series of activities carried out in a structured manner by SKAI, where the aim is to ensure that the audit object (auditee) has implemented the recommendations from the audit results, both from internal auditors and external auditors, within the specified time limits. previously agreed.

In this case, follow-up monitoring aims to objectively assess the extent to which recommendations for findings have been implemented and ensure the correctness of both written and physical data in the field on follow-up reports submitted by the auditee.

Monitoring activities to follow up on auditor findings was carried out throughout 2024 by providing follow-up reminders to auditees on a monthly basis if there were audit findings due in that month. Then periodically, the report was submitted to the Board of Directors, the Board of Commissioners and Audit Committee.

Akuntan Publik
Public Accountant

Akuntan Publik berperan penting dalam memberikan opini mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Akuntan Publik menjadi bagian dari sistem pengendalian internal Bank yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait validitas/audit laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal.

KEBIJAKAN PENUNJUKAN

Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, ketentuan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaporan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

NAMA DAN TAHUN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SERTA AKUNTAN PUBLIK

Pada tahun 2024, Bank Aladin Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai bentuk komitmen dalam penerapan prinsip GCG khususnya transparansi. Berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode 6 (enam) tahun terakhir, yaitu:

Public Accountants play an important role in providing opinions regarding the suitability of Bank's Financial Statements presentation with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. In carrying out their duties, Public Accountants are part of Bank's internal control system which aims to provide adequate assurance regarding the validity/audit of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, compliance with laws and regulations, and the internal control system.

APPOINTMENT POLICY

The process for appointing a Public Accountant Firm (KAP) to audit Bank's Financial Statements is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS), considering the recommendations provided by the Board of Commissioners.

In this case, the provisions for the services of Public Accountants (AP) and Public Accountant Firm (KAP) in Reporting Financial Statements and Annual Reports are regulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Accounting Firms Public In Financial Services Activities who will provide audit services for annual historical financial information is decided by the General Meeting of Shareholders of Parties Carrying Out Financial Services Activities by considering the Board of Commissioners' proposal.

NAME AND YEAR OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT

In 2024, Bank Aladin Syariah has appointed the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja as a form of commitment to implementing GCG principles, especially transparency. The following is a list of Public Accountant Firms, Accountants for auditing Bank's financial statements for the last 6 (six) year period, as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Nama Akuntan Name of Accountant	Penugasan Assignment
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2020	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Sutomo	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.
2019	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Muhammad Kurniawan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Carry out Financial Statements audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants.

Manajemen Risiko
Risk Management

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Bank menyusun strategi manajemen risiko searah dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kecukupan perangkat organisasi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator maupun ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan atau praktik perbankan yang sehat.

Bank secara berkesinambungan mengevaluasi strategi penerapan manajemen risiko agar dapat secara efektif mengelola risiko Bank sesuai dengan visi, misi, strategi dan rencana bisnis Bank, serta berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.

Strategi manajemen risiko diterjemahkan secara terstruktur dan sistematis melalui kerangka kerja manajemen risiko.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The Bank develops a risk management strategy in line with the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, the adequacy of organizational devices including clarity of authority and responsibility, and the adequacy of policies, procedures, and limit determination.

The risk management strategy is developed to ensure that the Bank's risk exposure is managed in a controlled manner in accordance with the provisions of laws and regulations, regulatory provisions and other applicable provisions, Sharia Principles, and/or healthy banking practices.

The Bank continuously evaluates the risk management implementation strategy in order to effectively manage the Bank's risks in accordance with the Bank's vision, mission, strategy and business plan, and is long-term oriented to ensure the Bank's business continuity by considering economic conditions or cycles.

The risk management strategy is translated in a structured and systematic manner through a risk management framework.

Kerangka Manajemen Risiko
Risk Management Framework

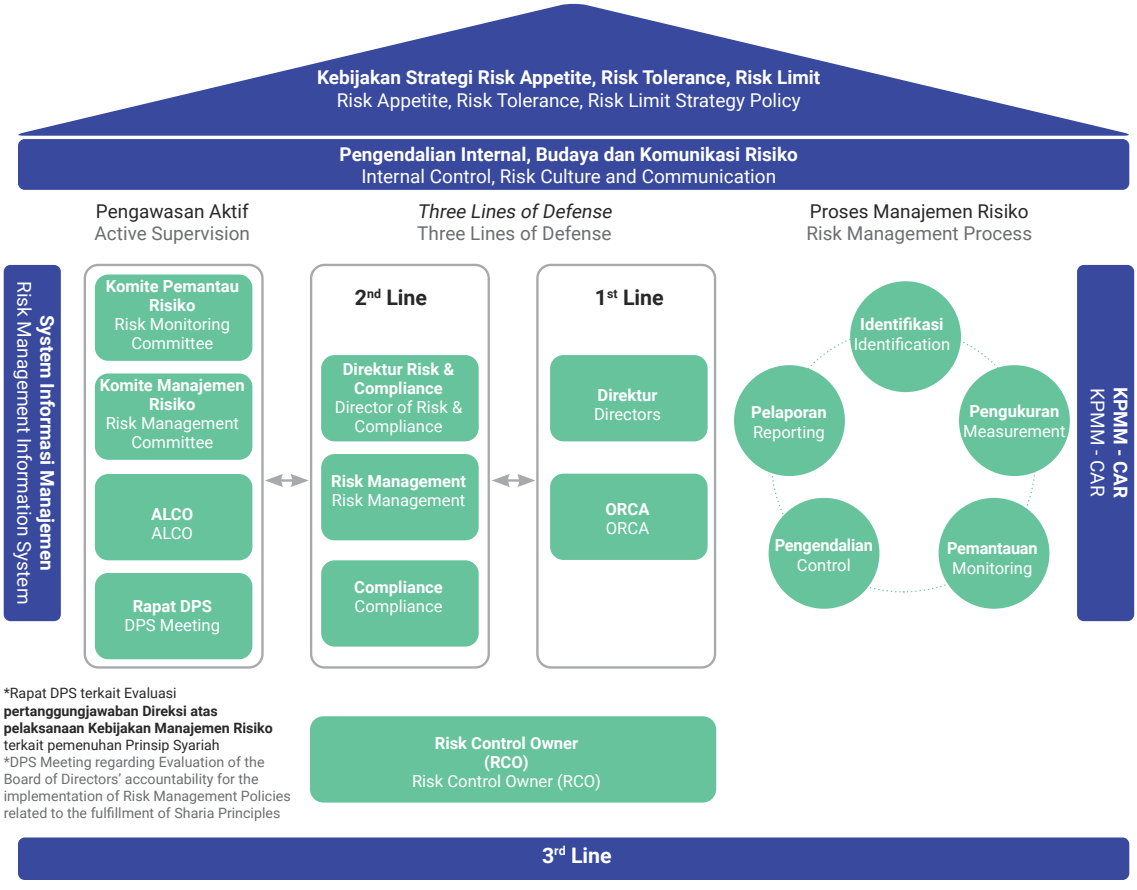

Kerangka Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Framework)

Kerangka kerja manajemen risiko terdiri atas:

1. **Tata Kelola Manajemen Risiko**
   Tata kelola manajemen risiko Bank terdiri atas pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta serangkaian Komite terkait manajemen risiko.

   Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank. Untuk itu, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus memahami risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank.

   Direksi menjalankan fungsi pelaksana kebijakan manajemen risiko dan pengawasan aktif diantaranya melalui Komite Manajemen Risiko (KMR) dan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO).

   Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko diantaranya melalui Komite Pemantau Risiko (KPR).

   DPS menjalankan fungsi pengawasan aktif diantaranya melalui Rapat DPS terkait evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

2. **Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko**
   Kebijakan dan prosedur manajemen risiko memuat arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit.

   Kebijakan dan prosedur, termasuk limit risiko, harus diimplementasikan sesuai dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, Prinsip Syariah, dan praktik perbankan yang sehat.

   Bank menyusun limit risiko yang sesuai dengan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, dan kemampuan SDM.

   Bank mengatur tata kelola dan mekanisme eskalasi dan persetujuan pelampauan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit* berdasarkan akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dan mendokumentasikannya ke dalam pedoman internal terkait limit.

The risk management framework consists of:

1. **Risk Management Governance**
   The Bank's risk management governance consists of active supervision by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board, as well as Committees related to risk management.

   The Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS are responsible for the effectiveness of risk management implementation in the Bank. To that end, the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS must understand the risks faced by the Bank and provide clear direction, carry out active supervision and mitigation, and develop a risk management culture in the Bank.

   The Board of Directors carries out the function of implementing risk management policies and active supervision, including through the Risk Management Committee (KMR) and the Asset & Liabilities Committee (ALCO).

   The Board of Commissioners carries out the function of supervising risk management, including through the Risk Monitoring Committee (KPR).

   The DPS carries out active supervision functions, including through DPS Meetings related to the evaluation of the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management policies related to the fulfillment of Sharia Principles.

2. **Policies, Procedures, and Determination of Risk Limits**
   Risk management policies and procedures contain written guidelines for implementing risk management and must be in line with the Bank's vision, mission, and business strategy. The level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance must be considered in the preparation of risk management policies, including in the determination of limits.

   Policies and procedures, including risk limits, must be implemented in accordance with the characteristics, size, and complexity of business activities, the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, as well as provisions of laws and regulations, other applicable provisions, Sharia Principles, and healthy banking practices.

   The Bank prepares risk limits in accordance with the Bank's overall strategy by considering the Bank's capital capacity to absorb risk exposure or losses that arise, past loss experience, and HR capabilities.

   The Bank regulates governance and mechanisms for escalation and approval of risk appetite, risk tolerance, and risk limit exceedances based on clear accountability and levels of delegation of authority and documents them in internal guidelines related to limits.

Kaji ulang kebijakan dan prosedur manajemen risiko, risk appetite, risk tolerance, dan risk limit dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau dalam hal diperlukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar yang mendasari penyusunan. Dalam melakukan kaji ulang, Bank mempertimbangkan praktek-praktek terbaik (*best practices*) yang ada dan relevan. Seiring dengan perubahan bisnis Bank, Bank akan merevisi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada saat ini sesuai dengan prioritas.

Reviews of risk management policies and procedures, risk appetite, risk tolerance, and risk limits are conducted at least once a year and/or if adjustments are required to changes in laws and regulations or the Articles of Association underlying the preparation. In conducting the review, the Bank considers existing and relevant best practices. In line with changes in the Bank's business, the Bank will revise existing risk management policies and procedures according to priority.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko harus dapat memastikan bahwa Bank secara sistematik dan terstruktur dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan melaporkan eksposur risiko.

Bank mengembangkan perangkat manajemen risiko demi mendukung proses manajemen risiko dengan efektif. Perangkat manajemen risiko akan senantiasa dikinikan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank, eksposur risiko, dan praktek-praktek terbaik (best practices) yang ada dan relevan.

Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank membentuk suatu siklus yang berkesinambungan.

a. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh eksposur risiko yang melekat pada Bank secara berkala.

Identifikasi risiko diantaranya dilakukan terhadap produk dan kegiatan usaha baru sebelum produk atau kegiatan usaha diterbitkan.

Bank senantiasa mengembangkan metode dan perangkat identifikasi manajemen risiko menyesuaikan dengan eksposur risiko, tren risiko baru, perkembangan kondisi Bank, perubahan ketentuan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan *best practice*.

b. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank, baik berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.

Bank mengembangkan diantaranya skala pengukuran risiko (*risk grading matrix*) yang digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Bank sebagai acuan dalam menentukan prioritas eskalasi dan mitigasi risiko. Skala pengukuran risiko disusun dalam skala dampak dan kemungkinan keterjadian.

3. Risk Management Process

The risk management process must ensure that the Bank can systematically and structuredly identify, measure, monitor, control, and report risk exposures.

The Bank develops risk management tools to support the risk management process effectively. Risk management tools will be continuously updated to adapt to the Bank's business developments, risk exposures, and existing and relevant best practices.

The risk management process implemented by the Bank forms a continuous cycle.

a. Risk Identification
Risk identification is carried out on all risk exposures inherent in the Bank periodically.

Risk identification is carried out on new products and business activities before the product or business activity is issued.

The Bank continuously develops risk management identification methods and tools to adjust to risk exposures, new risk trends, developments in the Bank's conditions, changes in statutory provisions, other applicable provisions, and best practices.

b. b. Risk Measurement
Risk measurement can use a quantitative and/or qualitative approach that is adjusted to the objectives and complexity of the business and the Bank's capabilities, either in the form of methods determined by the regulator in risk assessment and capital calculation or methods developed by the Bank itself.

The Bank develops, among others, a risk grading matrix that is used to measure the Bank's Risk exposure as a reference in determining the priority of risk escalation and mitigation. The risk measurement scale is arranged in a scale of impact and likelihood of occurrence.

Penyusunan skala pengukuran risiko akan mempertimbangkan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit*.

The preparation of the risk measurement scale will consider the Bank's overall strategy by considering the Bank's capital capacity to absorb risk exposure or losses that arise, past loss experience, risk appetite, risk tolerance, and risk limit.

Skala pengukuran risiko akan dievaluasi dan disempurnakan oleh Bank secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, misalnya dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

The risk measurement scale will be evaluated and enhanced by the Bank periodically or at any time if necessary, for example in the event of changes in business activities, products, transactions, and risk factors, which are material in nature and can affect the Bank's financial condition.

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala terhadap semua eksposur risiko yang melekat pada Bank, diantaranya pada saat penyusunan laporan profil risiko secara triwulanan. Dimana Bank juga akan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Risk measurement is carried out periodically on all risk exposures inherent in the Bank, including when preparing a quarterly risk profile report. Where the Bank will also evaluate the suitability of assumptions, accuracy, fairness and integrity of data, data sources, and procedures used to measure risk.

Pengukuran risiko dilakukan juga terhadap seluruh risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha baru.

Risk measurement is also carried out on all risks inherent in new products and business activities.

Stress testing dapat dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap Portofolio Bank. Bank melakukan Stress Testing secara berkala dan mengkaji ulang hasil Stress Testing tersebut, serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit risiko Bank.

Stress testing can be conducted to complement the risk measurement system by estimating the Bank's potential losses in abnormal market conditions using certain scenarios to see the sensitivity of the Bank's performance to changes in Risk factors and identify influences that have a significant impact on the Bank's Portfolio. The Bank conducts Stress Testing periodically and reviews the results of the Stress Testing, and takes appropriate steps if the estimated conditions that will occur exceed the acceptable tolerance level. The results are used as input when determining or changing the Bank's risk policies and limits.

c. Pemantauan Risiko

Bank mengembangkan sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, risk appetite, risk tolerance, kepatuhan limit risiko internal, hasil *stress testing*, serta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

c. Risk Monitoring

The Bank develops a monitoring system and procedures that include monitoring the magnitude of risk exposure, risk appetite, risk tolerance, compliance with internal risk limits, stress testing results, and consistency of implementation with established policies and procedures.

Pemantauan risiko dilakukan baik oleh masing-masing pemilik risiko maupun SKMR.

Risk monitoring is carried out by both the risk owners and the SKMR.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS dalam rangka mitigasi risiko dan pengambilan keputusan atas penanganan yang diperlukan. Khususnya risiko yang bersifat material atau berdampak terhadap kondisi permodalan Bank.

The monitoring results are presented in periodic reports submitted to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and DPS in order to mitigate risks and make decisions on the necessary handling. Especially risks that are material or have an impact on the Bank's capital conditions.

Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan diantaranya melalui pemantauan dan pelaporan melalui penilaian potensi risiko berdasarkan tren historis.

Penyempurnaan proses pelaporan dan pengembangan metode maupun sistem pelaporan akan senantiasa dilakukan, diantaranya dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.

d. Pengendalian Risiko
Bank menyusun sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengendalian risiko yang diterapkan oleh Bank disesuaikan dengan *risk appetite*, *risk tolerance*, *risk limit*, serta Prinsip Syariah.

Pengendalian Risiko antara lain dengan melakukan 4 jenis penanganan sebagai bahan pertimbangan, yaitu:
i) Menghindari Risiko (*risk avoidance*).
ii) Mitigasi Risiko (*risk reduction*).
iii) Transfer Risiko kepada pihak lain (*risk transfer*).
iv) Menerima Risiko (*risk acceptance*).

Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat (*four eyes principles*), *Three Lines of Defense*, memperbaiki proses *end-to-end*, melaksanakan kajian risiko, hukum, dan kepatuhan, melakukan *review* dan pengkinian pedoman internal sesuai perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan regulasi, ketentuan lain yang berlaku serta Prinsip Syariah, serta memastikan eskalasi dan pelaporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai masukan kepada Manajemen.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Bank.

1. Three Lines Of Defense
Untuk memastikan proses manajemen risiko berjalan lebih efektif dalam menjaga profil risiko Bank dalam risk appetite, risk tolerance, dan risk limit, Bank mengembangkan dan memperkuat *Three Lines of Defence*.

Evaluation of risk exposure is carried out, among others, through monitoring and reporting through risk potential assessments based on historical trends.

Improvement of the reporting process and development of reporting methods and systems will always be carried out, including in the event of changes in business activities, products, transactions, risk factors, information technology, and the bank's risk management information system that are material.

d. Risk Control
The Bank establishes an adequate Risk control system by referring to established policies and procedures.

The risk control implemented by the Bank is adjusted to risk appetite, risk tolerance, risk limit, and Sharia Principles.

Risk control is done by, among others, conducting 4 types of handling as considerations, namely:

i) Risk avoidance
ii) Risk Mitigation (risk reduction).
iii) Transferring Risk to other parties (risk transfer).
iv) Accepting Risk (risk acceptance).

Risk control can be carried out by the Bank, among others by implementing inherent supervision (the four eyes) principles), Three Lines of Defense, improving end-to-end processes, conducting risk, legal and compliance studies, reviewing and updating internal guidelines in accordance with developments in statutory provisions, regulatory provisions, other applicable provisions and Sharia Principles, and ensuring accurate, complete and timely escalation and reporting as input to the Management.

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

To support the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling Risks, the Bank develops a management information system that is tailored to the characteristics, size, and complexity of the business, as well as accurate and informative reports on the Bak's financial condition, functional activity performance, and Risk exposure.

1. Three Lines Of Defense
To ensure that the risk management process runs more effectively in maintaining the Bank's risk profile within risk appetite, risk tolerance, and risk limit, the Bank develops and strengthens the Three Lines of Defense.

Pada setiap lapis pertahanan, dideskripsikan sejumlah tanggung jawab spesifik untuk pengendalian dan manajemen risiko.

Three Lines of Defence membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis Bank, yang membedakan antara fungsi bisnis dan operasional sebagai fungsi pemilik risiko (*risk owner/ risk taking unit*) dengan fungsi yang menangani risiko (*risk control owner*), dan antara fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*) dengan fungsi yang menyediakan pemastian independen (*independent assurance*).

Bank menetapkan *Three Lines of Defense*, di mana Fungsi Manajemen Risiko sebagai Lini Kedua terpisah dan independen dari fungsi bisnis dan operasional Bank yang merupakan Lini Pertama. Adapun Lini Ketiga adalah SKAI yang secara independen melakukan *review* dan evaluasi terhadap kerangka dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.

Three lines of Defense menyediakan pendekatan yang holistik atas manajemen risiko. Dimana setiap lapis pertahanan tersebut dibangun dan saling berhubungan satu sama lain.

2. Eksposur Risiko
   Klasifikasi dari eksposur risiko membantu Bank dalam proses identifikasi risiko. Manajemen Risiko diterapkan untuk masing-masing eksposur Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan 10 (sepuluh) jenis Risiko, yaitu Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

   Bank akan memastikan ter *up-to date* dengan tren risiko terbaru/*emergent risk* (misalnya *cyber risks*, *climate risk*, *data breach*, dan sebagainya) dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis maupun perkembangan ketentuan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku maupun Prinsip Syariah.

   Bank akan secara reguler me-review dan mengkinikan kerangka kerja manajemen risiko mengikuti perkembangan tersebut. Bank memastikan relevansi dari setiap metode, proses, perangkat identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, maupun pelaporan risiko.

3. Lingkungan Pengendalian Internal
   LIngkungan pengendalian adalah suatu kondisi yang mencakup aspek tata kelola Bank, aspek kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan Limit Manajemen Risiko; aspek data, infrastruktur dan sistem informasi manajemen Risiko serta aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko.

At each layer of defense, a number of specific responsibilities for risk control and management are described.

Three Lines of Defense builds risk management capabilities across the Bank's lines and business processes, distinguishing between business and operational functions as risk owner/risk taking unit functions with risk control owner functions, and between risk overseeing functions with independent assurance functions.

The Bank has established Three Lines of Defense, where the Risk Management Function as the Second Line is separate and independent from the Bank's business and operational functions as the First Line. The Third Line is the Internal Audit Unit (SKAI) which independently reviews and evaluates the overall risk management framework and implementation.

The Three lines of Defense provides a holistic approach to risk management, where each layer of defense is built and interconnected with each other.

2. Risk Exposure
   The classification of risk exposure helps the Bank in the risk identification process. Risk Management is applied to each Risk exposure, which includes the application of Risk Management for all 10 (ten) types of Risk, namely Financing Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Return Risk, and Investment Risk.

   The Bank will ensure that it is up-to-date with the latest risk trends/emergent risks (eg cyber risks, climate risk, data breach, and so on) in order to anticipate changes in the business environment and developments in laws and regulations, other applicable provisions and Sharia Principles.

   The Bank will regularly review and update the risk management framework following these developments. The Bank ensures the relevance of each method, process, identification device, measurement, monitoring, control, and risk reporting.

3. Internal Control Environment
   The control environment is a condition that includes aspects of Bank governance, aspects of the adequacy of policies, procedures, and determination of Risk Management Limits; aspects of data, infrastructure and information systems for Risk management as well as aspects of the adequacy of the risk identification, measurement, monitoring, and reporting processes.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu manajemen Bank dalam menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, dan Prinsip Syariah, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh lini organisasi.

4. Budaya Risiko, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Komunikasi Risiko
Budaya risiko adalah serangkaian nilai, perilaku, aktivitas, maupun tindakan untuk menciptakan lingkungan kerja dengan standar etika dan integritas yang berpanduan pada nilai dan visi Bank, budaya organisasi yang sesuai dengan asas perbankan yang menerapkan prinsip kehatian-hatian serta kesadaran risiko pada seluruh tingkat organisasi, dan seluruh karyawan dapat mengerti mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko.

Budaya risiko merupakan hal penting yang memastikan berjalannya tata kelola manajemen risiko dan berperan sebagai landasan bagi terciptanya pengelolaan risiko secara keseluruhan Bank (*enterprise risk management*).

Budaya risiko dapat dibentuk melalui contoh perilaku (*role models*) atas perilaku yang dikehendaki terhadap risiko, ataupun melalui program-program training yang terstruktur untuk menciptakan pemahaman atas risiko-risiko yang dihadapi Bank dan cara pengelolaannya.

Pengembangan budaya risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif. Pelaksanaan budaya risiko perlu dilakukan dalam setiap aspek pekerjaan sehari-hari dan perlu adanya sistem pengendalian internal untuk memastikan efektivitas budaya risiko pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Bank memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), sistem dan infrastruktur untuk pelaksanaan manajemen risiko yang efektif. Bank memastikan Tim Manajemen Risiko memiliki akses terhadap informasi yang terkini, kredibel dan bisa diandalkan untuk memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko berjalan dengan baik. Sistem dan infrastruktur diperlukan untuk menyediakan informasi risiko secara tepat waktu untuk mendukung keputusan Manajemen.

The implementation of effective risk management must be equipped with a reliable internal control system. The implementation of an effective internal control system can assist Bank management in maintaining the Bank's assets, ensuring the availability of reliable financial and managerial reporting, increasing the Bank's compliance with the provisions of laws and regulations, other applicable provisions, and Sharia Principles, and reducing the risk of losses, deviations, and violations of the principle of prudence.

Implementation of a reliable and effective internal control system of the Bank is the responsibility of all organizational lines.

4. Risk Culture, Human Resources (HR), and Risk Communication
Risk culture is a series of values, behaviors, activities, and actions to create a work environment with ethical and integrity standards that are guided by the Bank's values and vision, an organizational culture that is in accordance with banking principles that apply the principle of prudence and risk awareness at all levels of the organization, and all employees can understand their duties and responsibilities in managing risk.

Risk culture is an important thing that ensures the implementation of risk management governance and acts as a foundation for the creation of overall risk management for the Bank (enterprise risk management).

Risk culture can be formed through role models of desired behavior towards risk, or through structured training programs to create an understanding of the risks faced by the Bank and how to manage them.

The development of a risk culture includes adequate communication to all levels of the organization about the importance of effective internal control. The implementation of a risk culture needs to be carried out in every aspect of daily work and an internal control system is needed to ensure the effectiveness of the risk culture in the Bank's organization as a whole.

The Bank ensures the availability of Human Resources (HR), systems and infrastructure for the implementation of effective risk management. The Bank ensures that the Risk Management Team has access to up-to-date, credible and reliable information to ensure that the process of identifying, measuring, monitoring and controlling Risk runs smoothly. Systems and infrastructure are needed to provide timely risk information to support Management decisions.

Bank memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola Risiko. SDM yang ada harus memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen risiko. SDM yang dimiliki setidaknya memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, jasa keuangan, dan/atau sistem pembayaran. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Unit dan tim manajemen risiko di Bank telah dituangkan ke dalam standar prosedur atau kebijakan internal Bank. Kualitas SDM senantiasa diasah dengan berbagai workshop atau training yang relevan. Bank menyusun secara berkala dan terstruktur program-program training untuk meningkatkan budaya risiko di lingkungan Bank.

The Bank ensures sufficient quantity and quality of human resources in managing Risk. Existing human resources must have sufficient competence to carry out risk management functions. The human resources must have at least experience in banking, financial services, and/or payment systems. The duties and responsibilities of each Unit and risk management team at the Bank have been outlined in the Bank's standard procedures or internal policies. The quality of human resources is always honed with various relevant workshops or training. The Bank periodically and structuredly prepares training programs to improve the risk culture within the Bank.

5. Pengelolaan Kecukupan Modal (Capital Management)
Sehubungan dengan semakin meningkatnya risiko Bank yang diakibatkan oleh meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank, serta sejalan dengan perkembangan metode dan teknik pengukuran risiko pada industri perbankan, maka penilaian kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional namun juga dari risiko lain yang bersifat material. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

5. Capital Adequacy Management
In connection with the increasing risk of the Bank caused by the increasing complexity of the Bank's products, services, and business activities, and in line with the development of risk measurement methods and techniques in the banking industry, the assessment of capital adequacy needs to be adjusted so that it is not only able to absorb potential losses arising from Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk but also from other material risks. To anticipate this, the Bank provides minimum capital according to the risk profile.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain Risiko Konsentrasi, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book), Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, dan Risiko Reputasi, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank.

The aims of minimum capital adequacy according to risk profile, in addition to anticipating potential losses arising from Risk Weighted Assets (RWA) that have taken into account Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk, also to anticipate potential losses in the future from risks that have not been fully calculated in the RWA, including Concentration Risk, Liquidity Risk, Interest Rate Risk in Banking Book, Legal Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, and Reputation Risk, as well as to anticipate the impact of the implementation of stress test scenarios on the Bank's capital adequacy.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dimaksud, Bank memiliki dan menerapkan proses penilaian kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

In order to fulfill the obligation to provide minimum capital according to the intended risk profile, the Bank has in place and implements an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Pendekatan pengelolaan modal disesuaikan dengan tujuan stratejik Bank dan ketentuan kecukupan modal oleh regulator. Untuk mendukung strategi bisnis yang kompetitif, pengelolaan modal harus dapat memastikan kecukupan modal dan struktur modal yang efisien agar dapat menutup risiko yang berpotensi muncul dari aktivitas bisnis Bank.

The capital management approach is tailored to the Bank's strategic objectives and the capital adequacy requirements set by regulators. To support a competitive business strategy, capital management must ensure capital adequacy and an efficient capital structure to cover potential risks arising from the Bank's business activities.

PENGUNGKAPAN EKSPSUR RISIKO

1. Risiko Kredit
   Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan nasabah penerima fasilitas, Risiko Konsentrasi Penyaluran Dana, *Counterparty Credit Risk*, *Settlement Risk*, dan akibat *Country Risk*.

   Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:
   a. Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit;
   b. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement*, *Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten;
   c. Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai, Tim Collection dengan sistem yang mendukung, serta pembukuan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah berupa PPAP dan/atau CKPN sesuai dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan.
   d. Bank menetapkan batas kredit, termasuk BMPD, financing line, wewenang pemutus pembiayaan dan portofolio berdasarkan sektor ekonomi guna mengelola risiko kredit.

2. Risiko Pasar
   Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

   Risiko pasar meliputi antara lain risiko benchmark suku bunga dan risiko nilai tukar.
   a. Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk) adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.
   b. Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk) adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka.

   Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:
   a. Menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian risiko pasar;
   b. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Treasury, serta Risk Appetite Frameworks;
   c. Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank antara lain melalui Asset & Liabilities Management dan Asset and Liabilities Committee (ALCO);

RISK EXPOSURE DISCLOSURE

1. Credit Risk
   Credit Risk is the risk resulting from the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank in accordance with the agreed agreement, including Credit Risk resulting from the failure of customers receiving facilities, Concentration Risk of Fund Distribution, Counterparty Credit Risk, Settlement Risk, and due to Country Risk.

   Some general steps taken to manage and mitigate this risk include:
   a. The Bank has established and implemented governance, framework, processes and controls for credit risk management;
   b. The Bank has in place and consistently implemented Credit Policies and Procedures, Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria, and Credit Committees;
   c. Has in place well-documented standard procedures and infrastructure related to the financing process, including adequate financing procedures, a Collection Team with a supporting system, and bookkeeping of loss reserves for possible problematic financing in the form of PPAP and/or CKPN in accordance with the type of financing agreement carried out.
   d. sThe Bank sets credit limits, including BMPD, financing line, financing decision-making authority and portfolios based on economic sectors to manage credit risk.

2. Market Risk
   Market risk is the risk in the balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices, including the risk of changes in the value of tradable or leased assets.

   Market risk includes, among others, interest rate benchmark risk and exchange rate risk.
   a. Interest Rate Risk is the potential loss arising from interest rate movements in the market that are contrary to the Bank's position or transactions that contain interest rate risk.
   b. Foreign Exchange Risk is the risk of loss due to the opposite movement of the exchange rate when the Bank has an open position.

   Some general steps taken to manage and mitigate this risk include:
   a. Implementing governance, framework, process and market risk control;
   b. Implementing Treasury Policies and Procedures, as well as Risk Appetite Frameworks;
   c. Bank asset and liability management strategies including through Asset & Liabilities Management and Asset and Liabilities Committee (ALCO);

d. Melakukan pemantauan dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar, serta limitasi risiko pasar;
e. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank;
f. Melakukan pemantauan dan pengukuran risiko pasar termasuk pemantauan limit dealer (limit utilisasi dan batas kerugian transaksi) yang dijalankan oleh Treasury.
g. Melakukan perhitungan stress testing risiko pasar secara berkala.

3. Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya Bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:
a. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas;
b. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas;
c. Mengatur dan menjaga likuiditas Bank secara keseluruhan dan sesuai ketentuan Regulator dalam hal pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
d. Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank;
e. Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, Prosedur Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan*.

4. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko operasional adalah peningkatan kontrol di seluruh divisi melalui pemisahan tugas dan tanggung

d. Conducting periodic monitoring and measurement of market price change trends, potential market pressures, and market risk limitations;
e. Monitoring the development of margin levels in the market and analyzing their impact on the Bank's performance;
f. Monitoring and measuring market risk including monitoring dealer limits (utilization limits and transaction loss limits) run by Treasury.
g. Conducting periodic market risk stress testing calculations.

3. Liquidity Risk
Liquidity Risk is the risk of the Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's activities and financial condition. Liquidity risk arises due to a mismatch in maturity between liabilities and bills/financing owned by the Bank. This is because in general the Bank has short-term funding and channels it into financing with a longer term.

Some general steps taken to manage and mitigate this risk include:
a. Conducting a measurement of the liquidity risk profile that describes the position and tendency of the Bank's liquidity risk on an ongoing basis, so that it becomes an early warning indicator if the Bank begins to experience liquidity problems;
b. Reviewing policies and standard operating procedures related to liquidity risk management;
c. Regulating and maintaining the Bank's overall liquidity and in accordance with the provisions of the Regulator in terms of fulfilling the Minimum Reserve Requirement (GWM), RIM (Macroprudential Intermediation Ratio) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM);
d. Maintaining the Bank's access to the money market through placement and interbank lending;
e. The Bank has in place and has implemented a Risk Appetite Statement, Liquidity Risk Procedures and a Contingency Funding Plan.

4. Operational Risk
Operational Risk is the risk of loss caused by inadequate internal processes, internal process failures, human error, system failures and/or external events that affect the Bank's operations.

Some efforts made to manage operational risk are increasing control across divisions through separation of duties and responsibilities, dual control/dual custody

jawab, mekanisme *dual control*/*dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override*/otorisasi, pembatasan wewenang akses sistem, peningkatan kompetensi karyawan, termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan fungsi audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini antara lain:

a. Melakukan analisa risiko operasional untuk produk dan/atau layanan baru yang diusulkan oleh Bank;
b. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko, mencakup prosedur untuk risiko teknologi informasi, misalnya pengaturan jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*;
c. Melakukan *review* terhadap ketentuan baik itu kebijakan maupun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional;
d. Bank telah memiliki dan menerapkan pedoman internal diantaranya *Risk Appetite Statement*, Prosedur *Anti Fraud*, Prosedur Risiko Operasional, *Business Continuity Plan*.
e. Mengembangkan perangkat untuk mendukung identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pelaporan risiko operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini antara lain:

a. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Hukum dan *Risk Appetite Statement* untuk risiko hukum;
b. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat;
c. Menerapkan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu;
d. Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau layanan baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau layanan tersebut;

mechanisms in executing transactions, override/authorization functions, limiting system access authority, increasing employee competency, including fulfilling adequate human resources (HR), and implementing internal audit functions.

Mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk include:

a. Conduct operational risk analysis for new products and/or services proposed by the Bank;
b. Develop risk management policies, including procedures for information technology risks, such as data communication network arrangements and software standardization, access system management, development of electronic banking services in terms of accessibility security and Disaster Recovery Plan;
c. Review provisions, both policies and procedures related to operational risk management;
d. The Bank has in place and has implemented internal guidelines including Risk Appetite Statement, Anti-Fraud Procedures, Operational Risk Procedures, Business Continuity Plan.
e. Develop tools to support identification, assessment, monitoring, and reporting of operational risks.

5. Legal Risk

Legal Risk is the risk resulting from lawsuits and/or weaknesses in legal aspects. Legal risk can originate from, among others, weaknesses in legal aspects caused by weaknesses in the obligations made by the Bank, the absence or changes in provisions of laws and regulations that cause a transaction that has been carried out by the Bank to be inconsistent with the provisions of laws and regulations, and litigation or dispute resolution processes arising from lawsuits by third parties against the Bank or the Bank against third parties.

Mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk include:

a. The Bank has in place and has implemented a Legal Policy and Risk Appetite Statement for legal risks;
b. Reviewing all agreements to be made between the Bank and third parties and conducting periodic checks on agreements that have been made;
c. Implementing standardization of contracts and cooperation agreements for certain financing programs;
d. Conducting legal analysis of new products and/or services, and creating standard legal documents related to these products and/or services;

e. Memberikan opini hukum atas permintaan divisi lain guna memitigasi adanya potensi hukum bagi Bank.

6. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan internal bank, dan penerapan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:
a. Mengingatkan seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Bank termasuk penyampaian laporan-laporan kepada regulator;
b. Melaksanakan pelatihan secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko untuk memastikan seluruh karyawan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan bisnis dan operasional;
c. Keikutsertaan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan/ pengembangan, antara lain review pemenuhan aspek kepatuhan termasuk kepatuhan syariah sebelum aktivitas peluncuran produk/layanan baru;
d. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan internal bank, dan Prinsip Syariah dalam rangka memastikan telah diakomodasi dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;
e. Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada seluruh karyawan sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku;
f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.

7. Risiko Stratejik
Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejikstrategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank. melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategi antar level strategi.

e. Providing legal opinions upon request from other divisions to mitigate potential legal issues for the Bank.

6. Compliance Risk
Compliance risk is the risk resulting from the Bank not complying with and/or not implementing laws and regulations, other applicable provisions, internal bank provisions, and the implementation of Sharia Principles. In carrying out business activities in the banking industry, the Bank is required to always comply with banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the National Sharia Council. The Bank's inability to follow and comply with all laws and regulations related to banking business activities can have an impact on the Bank's business continuity.

Some general steps taken to manage and mitigate this risk include:
a. Reminding all employees and existing work units to increase their caution and accuracy in carrying out the Bank's operational activities including submitting reports to regulators;
b. Conducting regular training on compliance and risk management to ensure that all employees always implement the principle of caution in carrying out business and operational activities;
c. Active participation of the Compliance and Risk Management Division in supervision/development, including reviewing the fulfillment of compliance aspects including sharia compliance before launching new products/services;
d. Reviewing internal policies and procedures in order to ensure that all laws and regulations, other applicable provisions, internal bank provisions, and Sharia Principles are accommodated and complied with in their implementation;
e. Disseminating information related to applicable regulations to all employees so that they can carry out their duties and responsibilities in accordance with applicable regulations;
f. Cooperating with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank's operations with sharia principles.

7. Strategic Risk
This risk is a risk resulting from inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises, among others, because the Bank sets a strategy that is not in line with the Bank's vision and mission, conducting a non-comprehensive strategic environmental analysis and/or there is a mismatch of strategic plans between strategic levels.

Risiko strategi juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini antara lain:

a. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi,misi, strategi serta kemampuan Bank;
b. Mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi;
c. Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis Bank masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis Bank.

Strategic risk also arises due to failure to anticipate changes in the business environment including failure to anticipate changes in technology, changes in macroeconomic conditions, dynamics of competition in the market and changes in policies of related authorities.

Mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk include:

a. Identifying and quantifying strategic risks from the beginning of the preparation of the Bank's business plan by referring to the Bank's vision, mission, strategy and capabilities;
b. Managing strategic risks through a collective and comprehensive consideration and decision-making process within the Risk Management Committee, to be submitted to the Board of Directors;
c. Conducting periodic reviews to ensure that the Bank's strategy and business plan are still relevant to the current situation and conditions and to measure the level of success in achieving the Bank's business plan.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis termasuk prinsip Syariah, dan keluhan nasabah.

Bank melakukan penerapan manajemen risiko reputasi dengan melakukan aktivitas *public relation*, CSR (*Corporate Social Responsibility*), respons yang cepat terhadap keluhan nasabah, dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini antara lain:

a. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Bank dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antar unit kerja
b. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media.
c. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Bank apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media.
d. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank.
e. Menerbitkan laporan keuangan Bank melalui media sesuai ketentuan regulator.

8. Reputational Risk

Reputational Risk is the risk of decreasing the level of trust of stakeholders which originates from negative perceptions of the Bank. This risk arises, among others, due to negative news in the mass media, violations of business ethics including Sharia principles, and customer complaints.

The Bank implements reputational risk management by conducting public relations activities, CSR (Corporate Social Responsibility), responding quickly to customer complaints, and implementing consistent Good Corporate Governance.

Mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk include:

a. Delivering open information to the public through the Bank's website and newspapers by coordinating with work units
b. Monitoring media coverage to monitor negative publications or customer complaints that appear in the media.
c. Making clarifications and responses in accordance with the best steps taken by the Bank if there is negative news and customer complaints that appear in the media.
d. Conducting an analysis of potential reputational risks, as well as strategies to anticipate risks when launching new Bank products/services/programs.
e. Publishing the Bank's financial statements through the media in accordance with regulatory provisions.

9. Risiko Imbal Hasil
   Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

   Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini antara lain:
   a. *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan pricing secara berkala atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko bank;
   b. Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap portofolio DPK dan pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil serta sensitivitas terhadap perubahan pricing di pasar;
   c. Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar.

10. Risiko Investasi
    Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

    Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mengelola risiko ini antara lain:
    a. Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif;
    b. Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (*limit*) dan mekanisme pengambilan Keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil;
    c. *Monitoring* terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank.
    d. Secara efektif mengawasi dan mengendalikan tipe, karakteristik, dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil serta melakukan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah untuk memitigasi risiko investasi.

9. Return Risk
   Return Risk is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from the distribution of funds, which can affect the behavior of third-party fund customers.

   Mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk include:
   a. Monitoring and measurement through ALCO meetings of pricing policies periodically or as needed if there is market pressure that can increase the Bank's risk;
   b. Adequate limit setting and adequate review process for TPF portfolios and financing with profit-sharing contracts and sensitivity to changes in pricing in the market;
   c. Periodic estimation of the Bank's potential economic losses in abnormal market conditions to see the sensitivity of the Bank's performance to changes in benchmark interest rates and ratios in the market.

10. Investment Risk
    Investment Risk is the risk resulting from the Bank sharing the losses of the customer's business financed in profit-sharing-based financing, either using the net revenue sharing method or the profit and loss sharing method.

    Mitigation steps taken by Bank Aladin Syariah to manage this risk include:
    a. Identification of the risk of investment activities with profit-sharing-based contracts against existing portfolios or potential risks that may arise, in order to facilitate the preparation and implementation of investment policies with clear and careful profit-sharing-based contracts, so that these risks can be managed and controlled effectively;

    b. Implementing an effective investment approval process with profit-sharing-based contracts, including by setting limits and mechanisms for making investment decisions with profit-sharing-based contracts;
    c. Monitoring the concentration of fund disbursement with profit-sharing based contracts so that it is in accordance with the Bank's risk appetite.
    d. Effectively supervising and controlling the type, characteristics, and quality of investment with profit-sharing based contracts and making reserves for losses on potential non-performing financing to mitigate investment risk.

REVIEW TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi Bank di masa yang akan datang dalam periode tertentu. Berikut merupakan hasil penilaian profil risiko periode Desember 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Bank conducts a self-assessment) of the inherent risks and the quality of risk management implementation in the Bank's operational activities with the aim of providing information to all stakeholders regarding the condition of business risks and potential losses faced by the Bank in the future in a certain period. The following are the results of the risk profile assessment for the period of December 2024 compared to the previous year with the same period.

Penilaian Profil Risiko
Risk Profile Assessment

Profil Risiko Risk Profile	Penilaian Posisi Desember 2024 Position Assessment as of December 2024			Penilaian Posisi Desember 2023 Position Assessment as of December 2023		
	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Quality Rating	Peringkat Risiko Risk Rating	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Quality Rating	Peringkat Risiko Risk Rating
Risiko Kredit Credit Risk	*Moderate*	*Fair*	3	*Moderate*	*Fair*	3
Risiko Pasar Market Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Operasional Operational Risk	*Moderate*	*Fair*	3	*Moderate*	*Fair*	3
Risiko Hukum Legal Risk	*Moderate*	*Fair*	3	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Stratejik Strategic Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	*Moderate*	*Fair*	3	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Reputasi Reputational Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Imbal Hasil Return Risk	*Moderate*	*Satisfactory*	2	*Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Investasi Investment Risk	*Moderate*	*Fair*	3	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2
Predikat Risiko Komposit Bank Keseluruhan Overall Bank Composite Risk Predicate	*Moderate*	*Fair*	3	*Low to moderate*	*Satisfactory*	2

Penilaian Profil Risiko dan Laporan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dilakukan dalam rangka memenuhi peraturan di antaranya:

1. POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. SEOJK No.25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. POJK No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan penilaian, Peringkat Profil Risiko Bank pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah Peringkat *Moderate*, dengan nilai 3 (tiga) untuk Risiko Inheren dan *Fair* untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS TERKAIT SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko secara berkala, meliputi:

1. Kebijakan dan prosedur terkait penilaian risiko;
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
3. Strategi dan kerangka kerja manajemen risiko.

Evaluasi tersebut selalu mempertimbangkan kondisi dan rencana bisnis Bank, termasuk faktor eksternal. Bank diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

Risk Profile Assessment and Risk Management Implementation Quality Assessment Report (KPMR) are conducted in order to comply with regulations including:

1. POJK No.65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
2. SEOJK No.25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. POJK No. 8/POJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on the assessment, the Bank's Risk Profile Rating in Quarter IV of 2024 is Moderate Rating, with a value of 3 (three) for Inherent Risk and Fair for the Quality of Risk Management Implementation (KPMR).

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Bank periodically evaluates the effectiveness of the risk management system, including:

1. Policies and procedures related to risk assessment;
2. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes;
3. Risk management strategy and framework.

This evaluation always considers the Bank's business conditions and plans, including external factors. The Bank is required to be able to adapt to the environment by implementing risk management that prioritizes the principle of prudence and is in accordance with sharia principles.

Perkara Hukum
Legal Cases

PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2024, tidak ada tuntutan hukum baik perdata atau pidana atau hubungan industrial yang ditujukan kepada Bank, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, ataupun Dewan Pengawas Syariah. Bank terlibat dalam litigasi terkait dengan kasus pajak sehubungan dengan tahun pajak 2017, dalam hal ini Bank mengajukan proses banding, berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-012324.15/2022/PP/M.VB Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh banding dari Bank dan berkekuatan hukum tetap dengan jangka waktu Peninjauan Kembali telah terlewati (3 bulan sejak putusan dikirimkan) dan sampai saat ini belum terdapat novum baru.

SANKSI ADMINISTRATIF

Bank senantiasa berupaya menegakkan budaya kepatuhan di seluruh level organisasi Bank dan melakukan pemantauan kepatuhan secara terus-menerus untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga prinsip syariah. Sepanjang tahun 2024 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator dikarenakan pelanggaran kewajiban laporan sebagaimana surat dari regulator sebagai berikut:

1. Surat Bank Indonesia No. 26/55/DPKL-GPLB-PLBP/Srt tanggal 27 Februari 2024 perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT Bank Aladin Syariah Tbk.

2. Surat Bank Indonesia No. 26/10/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 5 Maret 2024 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi Di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).

3. Surat Bank Indonesia No. 26/34/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 25 Maret 2024 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi.
4. Surat Bank Indonesia No. 26/136/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 21 Mei 2024 perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT Bank Aladin Syariah Tbk.

5. Surat Bank Indonesia No. 26/322/DPMA/Srt/Rhs tanggal 6 September 2024 perihal Teguran Tertulis atas Kewajiban Penyampaian Bukti Pendaftaran *Treasury Dealer* Operasi Moneter PT Bank Aladi Syariah Tbk.

LEGAL ISSUES

Throughout 2024, there were no lawsuits, either civil or criminal or industrial relations, directed at the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Sharia Supervisory Board. The Bank was involved in litigation related to tax cases related to the 2017 tax year, in this case the Bank filed an appeal process, based on the Tax Court Decision No. PUT-012324.15/2022/PP/M.VB of 2024 dated February 28, 2024, the Tax Court granted all appeals from the Bank and had permanent legal force with the Review period having passed (3 months since the decision was sent) and until now there has been no new novum.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Bank always strives to uphold a culture of compliance at all levels of Bank's organization and carries out continuous compliance monitoring to ensure policies, provisions, systems and procedures as well as business activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations, including sharia principles. Meanwhile, during 2024 there were still be sanctions imposed by the regulator due to violations of reporting obligations as stated in the letter from the regulators as follows:

1. Bank Indonesia Letter No. 26/55/DPKL-GPLB-PLBP/Srt dated February 27, 2024 concerning Sanction on Integrated Commercial Bank Reports (LBUT) of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
2. Bank Indonesia Letter No. 26/10/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs dated March 5, 2024 concerning Imposition of Sanction of Obligation to Pay for Corrections Outside the Deadline for Submission of Monthly Financial Information Disclosure (KI) Report of Integrated Commercial Bank Reports (LBUT).
3. Bank Indonesia Letter No. 26/34/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs dated March 25, 2024 concerning Imposition of Sanction of Obligation to Pay for Late Submission of Corrections to Monthly Financial KI Report of Integrated Commercial Bank Reports.
4. Bank Indonesia Letter No. 26/136/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B dated May 21, 2024 regarding Sanction on Integrated Commercial Bank Report (LBUT) of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
5. Bank Indonesia Letter No. 26/322/DPMA/Srt/Rhs dated September 6, 2024 regarding Written Warning on the Obligation to Submit Evidence of Registration of Treasury Dealer Monetary Operations of PT Bank Aladi Syariah Tbk.

6. Surat Bursa Efek Indonesia No.S-09818/BEI.PLP/09-2024 tanggal 18 September 2024 perihal Peringatan Tertulis II dan Denda Rp 2 juta.
7. Surat Bursa Efek Indonesia No.S-10822/BEI.PLP/10-2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Peringatan Tertulis III dan Denda Rp 4 juta.
8. Surat Bank Indonesia No.26/289/DPKL-GPLB-PLPB/Srt/B tanggal 3 Desember 2024 perihal Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) KI Risiko dan Permodalan Harian PT Bank Aladin Syariah Tbk.
9. Lampiran sanksi atas Surat No. SR-92/PB.22/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 31 Juli 2024 *Subsequent Event* s.d. 30 September 2024 terkait Pengenaan Sanksi atas Kesalahan Pelaporan SLIK.

6. Indonesia Stock Exchange Letter No.S-09818/BEI.PLP/09-2024 dated September 18, 2024 regarding Written Warning II and a Fine of Rp 2 million.
7. Indonesia Stock Exchange Letter No.S-10822/BEI.PLP/10-2024 dated October 16, 2024 regarding Written Warning III and a Fine of Rp 4 million.
8. Bank Indonesia Letter No.26/289/DPKL-GPLB-PLPB/Srt/B dated December 3, 2024 concerning Integrated Commercial Bank Report (LBUT) KI on Risk and Daily Capital of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
9. Attachment of sanction to Letter No. SR-92/PB.22/2024 dated December 31, 2024 concerning Audit Result Report of PT Bank Aladin Syariah Tbk position July 31, 2024 Subsequent Event until September 30, 2024 concerning Imposition of Sanctions for Errors in SLIK Reporting.

Rincian sanksi Bank periode tahun 2024
Details of the Bank's Sanctions in 2024

No	Keterangan Description	Tanggal Date	Regulator Regulator	Jenis Sanksi Type of Sanction	Nominal Sanksi (Rp) Nominal Amount of Sanction (Rp)
1	Sanksi LBUT LBUT Sanction	27 Februari 2024 February 27, 2024	Bank Indonesia	Denda Fines	100.000
2	Sanksi LBUT LBUT Sanction	5 Maret 2024 March 5, 2024	Bank Indonesia	Denda Fines	4.400.000
3	Sanksi LBUT LBUT Sanction	25 Maret 2024 March 25, 2024	Bank Indonesia	Denda Fines	200.000
4	Sanksi LBUT LBUT Sanction	21 Mei 2024 May 21, 2024	Bank Indonesia	Denda Fines	100.000
5	Teguran Tertulis atas Kewajiban Penyampaian Bukti Pendaftaran Tresuri Dealer Written Warning regarding the Obligation to Submit Proof of Dealer Treasury Registration	6 September 2024 September 6, 2024	Bank Indonesia	Teguran Reprimand	-
6	Sanksi atas Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham Perseroan Sanction for Monthly Report on Registration Activities of Company Share Ownership	18 September 2024 September 18, 2024	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Peringatan Tertulis II dan Denda Written Warning II and Fines	2.000.000
7	Sanksi atas Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham Perseroan Sanction for Monthly Report on Registration Activities of Company Share Ownership	16 Oktober 2024 October 16, 2024	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Peringatan Tertulis III dan Denda Written Warning III and Fines	4.000.000
8	Sanksi LBUT LBUT Sanction	3 Desember 2024 December 3, 2024	Bank Indonesia	Denda Fines	2.000.000
9	Sanksi SLIK SLIK Sanction	31 Desember 2024 December 31, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Denda Fines	350.000

Buy Back Saham Dan/Atau *Buy Back* Obligasi Bank

Buy Backs Of The Bank's Shares And/Or Bonds

Sepanjang tahun 2024, Bank tidak melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.

Throughout 2024, the Bank did not exercise share buyback and/or bond buyback

Program Kepemilikan Saham Karyawan Dan/Atau Manajemen

Employee And/Or Management Stock Option Program

Bank tidak mengeluarkan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) sampai akhir periode tahun 2024.

The Bank did not exercise Employee and/or Management Stock Option Program (ESOP/MSOP) until the end of 2024.

Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Access To Company Information And Data

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Aladin Syariah memiliki tekad untuk menerapkan keterbukaan informasi, baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan keterbukaan yang dimaksud melibatkan penyediaan informasi mengenai Perse Bank roan, seperti Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan juga Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal lainnya yang terkait. Keterbukaan dalam kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk citra Bank di mata publik, termasuk di kalangan *stakeholder*.

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank, yaitu https://aladinbank.id/dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank dan disampaikan kepada OJK dan media massa.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non-keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam *website* Bank yakni https://aladinbank.id/dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Bank, yang dipublikasikan dalam *website* Bank.

Informasi mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal Bank dapat diakses pada situs *website* Bank (https://aladinbank.id/).

In implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), Bank Aladin Syariah is determined to implement information transparency, both internally and externally. The said management and openness involve the provision of information regarding the Bank, such as Transparency of Financial and Non-Financial Conditions as well as GCG Implementation Reports and other related Internal Reporting. Openness in these two aspects has a very important role in shaping Bank's image in the eyes of the public, including among stakeholders.

The Bank has implemented transparency of financial conditions as outlined in:

1. Annual Report, published on Bank's website, namely https:// aladinbank.id/ and submitted to shareholders, OJK and other institutions as specified in the applicable regulations.
2. Quarterly Published Financial Statements, which are published on the Bank's website and submitted to the OJK and mass media.
3. Monthly Published Financial Statements, which are published on the Bank's website.

The Bank has also implemented transparency of non-financial conditions as outlined in:

1. GCG Implementation Report, published on Bank's website, namely https://aladinbank.id/ and submitted to shareholders, OJK and other institutions as specified in the applicable regulations.

2. Information regarding various events and activities of Bank, which are published on Bank's website.

Information regarding Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Bank Reporting can be accessed on Bank's website (https://aladinbank.id/).

Kode Etik Bank

The Bank's Code Of Conduct

Bank Aladin Syariah selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap lini bisnisnya. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan peraturan dasar yang terdokumentasi dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPP). Penyusunan KEPP ini bertujuan sebagai pedoman utama bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas.

Bank Aladin Syariah always strives to apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every line of its business. This commitment is realized by establishing basic regulations documented in the Code of Ethics and Code of Conduct (KEPP). The purpose of preparing this KEPP is as the main guideline for all Bank employees and management, with the hope of creating a healthy, professional and integrity work environment and culture.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi seluruh karyawan dan Manajemen yang telah dikinikan pada tahun 2023. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini ditetapkan berdasarkan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip keberlanjutan Bank Aladin Syariah untuk membantu seluruh Aladiners dalam mengambil keputusan yang tepat dan tindakan yang konsisten sesuai dengan undang-undang, peraturan, standar etika serta kebijakan dan prosedur Bank. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini mencakup berbagai perilaku yang diharapkan yang terbagi dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tanggung jawab seluruh karyawan;
2. Tanggung jawab atasan/manajer;
3. Kenyamanan di lingkungan kerja;
4. Berbisnis secara adil dan jujur;
5. Keamanan dan privasi data;
6. Pencegahan terhadap tindak kejahatan keuangan;
7. Benturan kepentingan;
8. Prinsip keberlanjutan dan hak asasi manusia;
9. *Anti fraud*;
10. Penyampaian kekhawatiran (termasuk *whistleblowing*);
11. Pembuatan keputusan; dan
12. Kekerasan seksual.

CODE OF CONDUCTS PRINCIPLES

The Bank has in place the Code of Ethics and Code of Conduct for all employees and Management which has been updated in 2023. This Code of Ethics and Code of Conduct is established based on the core values and sustainability principles of Bank Aladin Syariah to assist all Aladiners in making the right decisions and consistent actions in accordance with laws, regulations, ethical standards and Bank policies and procedures. This Code of Ethics and Code of Conduct covers various expected behaviors which are divided into the following aspects:

1. Responsibility of all employees;
2. Responsibilities of superiors/managers;
3. Comfort in the work environment;
4. Do business fairly and honestly;
5. Data security and privacy;
6. Prevention of financial crimes;
7. Conflict of interest;
8. Principles of sustainability and human rights;
9. Anti-fraud;
10. Expressing concerns (including whistleblowing);
11. Decision making; and
12. Sexual violence.

PENGUNGKAPAN KEPATUHAN KODE ETIK BERLAKU UNTUK SELURUH LEVEL ORGANISASI

Bukan hanya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan Bank juga harus menitikberatkan pada norma dan nilai etika. Kode etik ini berlaku untuk seluruh insan Bank Aladin Syariah, termasuk Karyawan yang memiliki hubungan kerja langsung, Karyawan tetap, dan karyawan kontrak, baik itu anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

DISCLOSURE OF CODE OF CONDUCT COMPLIANCE APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

Not only based on the provisions of applicable laws and regulations, the Bank's management must also focus on ethical norms and values. This Code of Conduct applies to all Bank Aladin Syariah personnel, including employees who have direct work relationships, permanent employees and contract employees, both members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Bank Aladin Syariah telah melakukan sosialisasi mengenai kode etik kepada seluruh Insan Bank Aladin Syariah, termasuk Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta seluruh karyawan. Bank telah mengungkapkan dan mempublikasikan informasi tersebut melalui situs web resmi Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, anggota Bank serta masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses dan memahami kode etik Bank.

SOCIALIZATION AND DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCTS

Bank Aladin Syariah has conducted socialization regarding the Code of Conduct to all Bank Aladin Syariah personnel, including the Board of Commissioners and its supporting organs, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees. The Bank has disclosed and published the information through the official website of Bank Aladin Syariah. Thus, Bank members and the general public can easily access and understand the Bank's Code of Conduct.

PELANGGARAN KODE ETIK

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran kode etik baik oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun oleh pegawai tetap dan tidak tetap Bank.

VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

Until the end of 2024, there were no violations of the code of conduct by either the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or by the Bank's permanent and non-permanent employees.

Informasi Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah Oleh Dewan Komisaris Dan Direksi

Information On Bank Aladin Syariah Share Ownership By The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

Hingga 31 Desember 2024, Bank Aladin Syariah belum melaksanakan program kepemilikan saham bagi pegawai (*Employee Stock Option Program*/ESOP) atau manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP). Oleh karena itu, tidak ada pegawai atau anggota manajemen termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki kepemilikan saham di Bank Aladin Syariah. Selain itu, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Bank Aladin Syariah. Dengan demikian, tidak ada informasi tentang persentase kepemilikan tidak langsung saham Bank Aladin Syariah oleh Dewan Komisaris atau Direksi pada awal dan akhir tahun buku termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk tujuan kepemilikan tidak langsung oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

As of December 31, 2024, Bank Aladin Syariah has not implemented Employee Stock Option Program/ESOP or Management Stock Option Program/MSOP. Therefore, no employees or members of management, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, have share ownership in Bank Aladin Syariah. In addition, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors have indirect ownership of Bank Aladin Syariah shares. Thus, there is no information on the percentage of indirect ownership of Bank Aladin Syariah shares by the Board of Commissioners or the Board of Directors at the beginning and end of the fiscal year including information on shareholders registered in the shareholder register for the purpose of indirect ownership by members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Penanganan Benturan Kepentingan
Handling Of Conflicts Of Interest

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Bank Aladin Syariah telah menetapkan pedoman terkait penanganan benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap pengurus dan karyawan Bank. Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang melibatkan benturan kepentingan.

In accordance with the provisions outlined in the Code of Ethics and Code of Conduct, Bank Aladin Syariah has established guidelines regarding handling of conflicts of interest that apply to every management and employee of Bank. During 2024, there was no transactions involving conflicts of interest.

Penerapan Fungsi Kepatuhan
Implementation Of Compliance Function

Bank Aladin Syariah telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur Fungsi Kepatuhan. Selanjutnya, Direktur Kepatuhan bersama dengan satuan kerja kepatuhan di Bank berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam konteks Prinsip Syariah.

Bank Aladin Syariah has appointed a Director of Compliance with the aim of ensuring compliance with the provisions set by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and applicable laws and regulations. This appointment is carried out in accordance with OJK regulations governing the Compliance Function. Furthermore, the Compliance Director together with the compliance work unit at Bank is obliged to coordinate with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function in the context of Sharia Principles.

Direktur Kepatuhan Bank telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi, serta telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Bank Indonesia pada tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, Direktur Kepatuhan secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direksi setiap bulan. Laporan tersebut diungkapkan dalam forum Rapat Direksi yang dilaksanakan bulanan dan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu, secara semesteran, Direktur Kepatuhan juga telah menyerahkan laporan pokok mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The Bank's Director of Compliance has fulfilled the independence requirements and criteria set out in regulations, and has effectively passed the Capability and Proper Test from Bank Indonesia in 2010. In its implementation, the Director of Compliance routinely submits reports on the implementation of her duties and responsibilities to the Board of Directors every month. The report is disclosed in the Board of Directors Meeting forum which is held monthly and the Board of Commissioners Meeting which is held every 2 (two) months. Apart from that, on a semi-annual basis, the Director of Compliance has also submitted basic reports regarding the implementation of his duties to the Financial Services Authority (OJK).

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan dibantu oleh unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

In accordance with POJK No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Implementation of Commercial Banks' Compliance Functions, the Director of Compliance is assisted by the Compliance Work Unit in carrying out her duties. The duties and responsibilities of the Director of Compliance include the following:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan,, termasuk prinsip syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
7. Menjalankan peran konsultatif sebagai Strategic Business Partner guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektivitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG;
8. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Unit Kerja Manajemen Risiko terkait risiko kepatuhan yang berpotensi dan berdampak terhadap sanksi kepada Bank secara umum;
9. Bertindak sebagai narahubung bagi Bank dengan pihak otoritas/regulator atau pihak lain yang berwenang membuat peraturan; dan
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2024 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantauan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

1. Budaya Kepatuhan
   Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:
   a. Melakukan sosialisasi ketentuan dan atau peraturan (*sharing information*) dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang baru diterbitkan.

   b. Memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.

1. Take steps to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization;
2. Identify, measure, monitor and control Compliance Risk by referring to the provisions of the Financial Services Authority which regulate the Implementation of Risk Management for sharia commercial banks and sharia business units;
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and conformity of Bank's policies, provisions, systems and procedures with statutory provisions;

4. Review and/or recommend updating and improving policies, provisions, systems and procedures owned by Bank so that they comply with the provisions of the Financial Services Authority and statutory provisions, including sharia principles;

5. systems and procedures, as well as business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and statutory provisions;

6. Conduct outreach to all Bank employees regarding matters related to the Compliance Function, especially regarding applicable regulations;
7. Carry out a consultative role as a Strategic Business Partner to prevent compliance risks and provide recommendations for improvements and increase the effectiveness of compliance, internal control and GCG;

8. Coordinate regularly with the Risk Management Work Unit regarding potential compliance risks that impact sanctions on Bank in general;

9. Act as a contact person for Bank with authorities/ regulators or other parties who have the authority to make regulations; and
10. Perform other tasks related to the Compliance Function.

In order to maintain and improve the implementation of the Compliance Function, compliance activities carried out during 2024 include, among other things, relating to improving compliance culture, managing compliance risks, evaluating internal regulations, monitoring prudential aspects of the Bank, monitoring compliance with commitments made by the Bank and other compliance activities other.

1. Compliance Culture
   Efforts that have been made to support the creation of the Bank's compliance culture include the following:

   a. Carrying out socialization of provisions and/ or regulations (sharing information) in order to safeguard Bank's business activities so that they do not deviate from applicable provisions and regulations as well as newly issued provisions and regulations.
   b. Providing opinions on the implementation of rules and regulations as well as sharia aspects.

c. Melakukan *reminder* atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
d. Melakukan *training* dan *sharing knowledge* salah satunya melalui *Training* APU & PPT.

2. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan muncul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas mitigasi, antara lain:
a. Melakukan pemantauan atas rasio kehati-hatian bank antara lain ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Posisi Devisa Neto (PDN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP/BMPK) dalam rangka prinsip kehati-hatian seperti tabel dibawah ini:

c. Providing reminders of obligations and commitments that must be conveyed and implemented by the Work Unit or Business Unit.
d. Carrying out training and sharing knowledge, one of which is through AML & CFT Training.

2. Management and Mitigation of Compliance Risk
Compliance risk arises when the Bank does not comply with or does not implement the regulations of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia, as well as other applicable laws and regulations. Bank always makes every effort to ensure that all applicable provisions and regulations can be implemented properly and continuously takes steps to improve the quality of risk management, internal control systems and the implementation of good governance as well as paying attention to the principles of prudence and sharia principles in carrying out the Bank's operational activities. In managing compliance risk, the Bank has carried out a series of mitigation activities, including:

a. Monitoring the Bank's prudential ratios, including provisions on Minimum Capital Requirements (KPMM), Net Open Position (PDN), Productive Asset Quality and Maximum Financing Limit (BMPP/BMPK) within the framework of the prudential principle as in the table below:

No	Faktor Factor	Ketentuan Provisions	Semester I/2024 (30 Juni 2024) Semester I/2024 (June 30, 2024)	Semester II/2024 (31 Desember 2024) Semester II/2024 (December 31, 2024)
1.	Rasio Kecukupan Modal (CAR) Capital Adequacy Ratio (CAR)	8% dari ATMR 8% of RWA	92,36%	65,37%
2.	Batas Maksimum Penyal Maximum Fund Distribution Limit uran Dana	1. 10% dari modal (untuk Pihak Terkait dengan Bank). 2. 20% dari modal (untuk satu Peminjam bukan Pihak Terkait). 3. 25% dari modal (untuk satu kelompok Peminjam bukan pihak terkait). 4. 30% dari modal (untuk BUMN). 1. 10% of capital (for Bank Related Parties) 2. 20% of capital (for one non-Related Party Borrower). 3. 25% of capital (for one group of non-related party Borrowers). 4. 30% of capital (for SOE).	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan There are no violations and/ or excesses	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan There are no violations and/or excesses
3.	Giro Wajib Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM)	1. GWM Rp: 7.5% dari DPK Rupiah (sebelum insentif). 2. GWM Valas: 1% dari DPK Valas. 1. IDR GWM: 7.5% of Rupiah TPF (before incentives). 2. Foreign Currency GWM: 1% of Foreign Currency TPF	GWM: 8,87% Valas : 157,73% GWM: 8.87% Forex : 157.73%	GWM: 5,53% Valas : 157,73% GWM: 5.53% Forex : 157.73%
4.	Non Performing Financing (NPF)	5% dari total Pembiayaan 5% of total financing	0% (gross) 0% (net)	0,04% (gross) 0,03% (net)

No	Faktor Factor	Ketentuan Provisions	Semester I/2024 (30 Juni 2024) Semester I/2024 (June 30, 2024)	Semester II/2024 (31 Desember 2024) Semester II/2024 (December 31, 2024)
5.	Posisi Devisa Netto (PDN) Net Foreign Exchange Position (PDN)	20% dari Modal 20% of Capital	0,03%	0,03%
6.	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek Short Term Foreign Loans (PLN).	30% dari Modal 30% of Capital	Tidak ada pelanggaran No violation	Tidak ada pelanggaran No violation

b. Melakukan reviu atas pelaksanaan tata kelola bank melalui *self assessment* GCG yang dilakukan secara periodik.
c. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit bisnis dan/atau unit kerja terkait dalam melakukan penerbitan produk, program, dan layanan operasional.
d. Melakukan sosialisasi (*sharing information*) ketentuan dan/atau peraturan dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.
e. Melakukan *training* dan/atau *sharing knowledge* terkait syariah dan APU-PPT kepada pihak internal Bank.
f. Menyampaikan opini dan reviu terkait kebijakan dan/atau prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.
g. Memastikan pemenuhan seluruh komitmen Bank atas hasil temuan OJK dan pihak regulator lainnya.

b. Carrying out reviews of the implementation of bank governance through periodic GCG self-assessments.
c. Supervising and providing assistance to related business units and/ or work units in publishing products, programs and operational services.
d. Carrying out socialization (information sharing) of provisions and/ or regulations in order to safeguard Bank's business activities so that they do not deviate from the applicable provisions and regulations.
e. Conducting training and/or share knowledge related to sharia and AML-CFT with internal Bank parties.
f. Submitting opinions and reviews regarding policies and/or procedures so that they comply with the provisions of applicable laws and regulations and sharia principles.
g. Ensuring the fulfillment of all commitments of the Bank based on the findings of the OJK and other regulatory parties.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Apu, Ppt, Dan Pppspm)

Anti-Money Laundering, Combating Financing Of Terrorism, And Weapons Of Mass Destruction Proliferation Funding (Aml, Cft, And Pppspm) Program

Bank Aladin Syariah telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif untuk mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM (Petugas APU dan PPT). Petugas APU dan PPT ini akan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
Adapun aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU & PPT, di antaranya:

1. *Review* Pedoman/Kebijakan
   Bank telah memiliki Kebijakan dan Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pedoman APU, PPT dan PPPSPM). Bank juga telah melakukan penyesuaian Kebijakan/Pedoman APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan model bisnis baru Bank di antaranya mengenai mekanisme *Customer Due Diligence* (CDD) Pihak ketiga dan penggolongan nasabah berdasarkan kategori risiko.
2. Pengkinian Data Nasabah
   Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan pengkinian data nasabah ini dilakukan terhadap ada tidaknya perubahan/ pengkinian atas data/informasi/dokumen dari nasabah yang bersangkutan. Adapun nasabah yang dikinikan per periodenya adalah dilakukan berdasarkan kategori risiko dan skala prioritas tertentu sesuai kebutuhan/ kriteria yang ditetapkan.
3. Pelatihan
   Selama periode tahun 2024, Satuan Kerja Kepatuhan khususnya Petugas APU, PPT dan PPPSPM telah menghadiri pelatihan/sosialisasi/seminar/workshop/ webinar yang diselenggarakan oleh Regulator (OJK, BI dan PPATK) maupun lembaga terkait lainnya berkaitan dengan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.
4. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)
   Selama periode Tahun 2023, Bank telah menyampaikan Laporan Transaksi Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun tidak ada transaksi keuangan yang teridentifikasi sebagai Transaksi Keuangan Tunai (TKT). Di samping itu, mengingat saat ini cakupan kegiatan usaha Bank belum meliputi kegiatan dalam valas, maka tidak terdapat Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL). Dengan demikian, tidak ada penyampaian LTKT dan LTKL yang disampaikan kepada PPATK.

Bank Aladin Syariah has appointed an Executive Officer to assume responsibility for implementing the AML and CFT Program (AML and CFT Officer). This AML and CFT officer will report directly to the Director of Compliance.

The activities carried out by AML & CFT officer include:

1. Review Guidelines/Policies
   The Bank has Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Policies and Standard Procedures (AML, CFT & PPPSPM Guidelines). The Bank has also made adjustments to the AML, CFT and PPPSPM Policies/ Guidelines in accordance with the Bank's new business model, including regarding third party's Customer Due Diligence (CDD) mechanisms and customer classification based on risk categories.
2. Updating Customer Data
   The Bank has submitted the 2025 Customer Data Update Plan Report and the 2024 Customer Data Update Plan Realization Report to the Financial Services Authority. This customer data updating activity is carried out to determine whether there are changes/Update to the data/ information/documents of the customer concerned. Customer Update per period are based on certain risk categories and priority scales according to established needs/criteria.
3. Training
   During the 2024 period, the Compliance Work Unit, especially AML, CFT, and PPPSPM Officer, have attended training/socialization/ seminars/workshops/webinars organized by Regulators (OJK and PPATK) and other related institutions related to the Implementation of the AML, CFT and PPPSPM Program.
4. Reporting of Cash Financial Transactions (LTKT), Suspicious Financial Transactions (LTKM), and Financial Transactions Transferring Funds From and to Overseas (LTKL) During the 2024 period, the Bank has submitted Suspicious Transaction Reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), but no financial transactions were identified as Cash Financial Transactions (TKT). In addition, considering that currently the scope of the Bank's business activities does not include activities in foreign currency, there are no Fund Transfer Financial Transactions to and from Overseas (TKL). Thus, no LTKT and LTKL submissions were submitted to PPATK.

5. Aplikasi SIPESAT (Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu) PPATK
   Bank telah menyampaikan laporan data nasabah pada aplikasi SIPESAT PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Aplikasi goAML PPATK
   Berdasarkan surat dari Kepala PPATK Nomor B/120/PN.01.03/XI/2019 dan Nomor R.580/PN.01.03/X/2020 perihal Implementasi Aplikasi goAML pada tanggal 1 Februari 2021, Bank telah melakukan persiapan implementasi aplikasi goAML tersebut dan Bank terus melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi ini dengan menggunakan jasa penyedia jasa aplikasi AML system/pelaporan go-AML.
7. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Pelaporan pada SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT) OJK
   Selama periode Tahun 2024, Bank telah menyampaikan laporan Nihil Pemblokiran Secara Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Detasemen 88. Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.

   Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) dan Pemblokiran Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta Pelaporan pada SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT) OJK.

   Selama periode Tahun 2024, Bank telah menyampaikan Laporan Nihil Pemblokiran Secara Serta Merta atas Harta Kekayaan atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.

8. Tindak Lanjut atas Daftar Perjudian Daring serta Pelaporan pada SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT) OJK
   Selama periode Tahun 2024, Bank telah menyampaikan Laporan Tindak Lanjut atas Daftar Perjudian Daring kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.
9. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPATK
   Bank telah melakukan pendaftaran Aplikasi SIPENDAR yaitu Aplikasi sistem pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme Terintegrasi dan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK, Pemangku Kepentingan dan Penyedia Jasa Keuangan

5. PPATK's SIPESAT (Integrated Service User Information System) application The Bank has submitted customer data reports on the PPATK's SIPESAT application in accordance with applicable regulations.

6. PPATK's GoAML application
   Based on letters from the Head of PPATK No. B/120/PN.01.03/ XI/2019 and No. R.580/PN.01.03/X/2020 regarding the Implementation of the goAML Application on February 1 2021, Bank has made preparations for the implementation of the goAML application and the Bank has continued to make improvements to this application by using the services of the AML system/go-AML reporting application service provider.
7. List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and Immediate Blocking of Assets of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations as well as Reporting to OJK's SIGAP (AML CFT Program Information System) During the 2024 period, the Bank has submitted a report of Zero Immediate Blocking of the Assets of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations to the Head of the National Police of the Republic of Indonesia c.q. Head of Detachment 88. The report has also been submitted via the OJK's Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program Information System (SIGAP) application.

   List of Weapons of Mass Destruction Proliferation Funding (DPPSPM) and Immediate Blocking of Assets Suspected of Funding for Weapons of Mass Destruction Proliferation and Reporting to SIGAP (APU PPT Program Information System) OJK.

   During the period of 2024, the Bank has submitted a Report of Zero Immediate Blocking of Assets for Funds Belonging to Individuals or Corporations Listed on the List of Weapons of Mass Destruction Proliferation Funding to the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The report has also been submitted through the OJK's Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Program Information System (SIGAP) application.

8. Follow-up on the List of Online Gambling and Reporting to OJK's SIGAP (AML CFT Program Information System). During the period of 2024, the Bank has submitted a Follow-up Report on the List of Online Gambling to the Financial Services Authority (OJK). The report has also been submitted through the OJK's Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Program Information System (SIGAP) application.
9. PPATK's Suspected Financing of Terrorism Information System (SIPENDAR)
   The Bank has registered the SIPENDAR Application, namely the Integrated Suspected Financing of Terrorism Information Management System Application and the mechanism for exchanging information between PPATK, Stakeholders and Financial Service Providers

secara elektronis sesuai dengan Peraturan PPATK. Bank telah melaporkan informasi SIPENDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kesesuaian pelaksanaan dengan Kebijakan dan Standar Prosedur yang telah disusun, maka Direksi selalu melakukan pemantauan. Aksi ini dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (BOD *Meeting*) yang dilakukan secara bulanan, di mana Direktur Kepatuhan dan unit kerja APU dan PPT menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU dan PPT. Sementara itu, Dewan Komisaris yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi pada penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. Pengawasan ini dilakukan melalui forum Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (Radirkom). Direksi khususnya Direktur Kepatuhan akan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM pada saat Radirkom tersebut berlangsung.

electronically in accordance with PPATK Regulations. The Bank has reported SIPENDAR information in accordance with applicable provisions.

To maintain the implementation of the Policies and Standard Procedures that have been prepared, the Board of Directors always conducts monitoring. This action is carried out, among others, through the Board of Directors Meeting (BOD Meeting) forum which is held monthly, where the Director of Compliance and the AML and CFT work unit convey the results of the implementation of the AML and CFT Program. Meanwhile, the Board of Commissioners will supervise the implementation of the Board of Directors' responsibilities in the implementation of the AML, CFT and PPPSPM Programs. This supervision is carried out through the Board of Directors Meeting forum with the Board of Commissioners (Radirkom) periodically which is held at least 1 (one) time in 4 (four) months. The Board of Directors, especially the Director of Compliance, will report the main results of the implementation of the AML, CFT and PPPSPM Programs during the Radirkom.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Bank senantiasa membentuk organisasi yang bersih, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Guna mewujudkan komitmen ini, Bank Aladin Syariah berupaya mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko praktik KKN. Bank akan memberlakukan sanksi tegas terhadap setiap bentuk KKN yang melibatkan Insan Bank.

Bank juga secara konsisten menegakkan kebijakan antikorupsi, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga telah menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur aspek anti korupsi dan anti *fraud* di lingkungan Bank.

The Bank always forms a clean organization, free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices. In order to realize this commitment, Bank Aladin Syariah seeks to implement policies that have been established to reduce the risk of KKN practices. Bank will impose strict sanctions on every form of KKN involving the Bank's Personnel.

The Bank also consistently enforces anti-corruption policies, in accordance with Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Apart from that, Bank Aladin Syariah has also implemented a Code of Ethics and Code of Conduct which regulates anti-corruption and anti-fraud aspects within Bank.

Pendapatan Non Halal
Non Halal Income

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Berikut laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank tahun 2024, sebagai berikut:

Reporting related to non-halal income and its use in sharia banks refers to Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS, dated April 30 2010, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The following is a report on the sources and use of Bank's Qardhul Hasan Funds in 2024:

No	Keterangan Description	Tahun 2024 (dalam juta Rupiah) 2024 (in million Rupiah)	Tahun 2023 (dalam juta Rupiah) 2023 (in million Rupiah)
1.	Sumber Dana Kebajikan: Source of Qardhul Hasan Funds:		
	Dana denda (ta'zir). Penalties funds (ta'zir).	381	1
	Penerimaan Non Halal Non-Halal Acceptance	-	1
	Lainnya Others	5	3
2.	Penggunaan Dana Kebajikan Use of Qardhul Hasan Funds	355	414
3.	Penurunan Dana Kebajikan Decrease in Qardhul Hasan Funds	31	(409)
4.	Saldo Awal Dana Kebajikan Beginning Balance of Qardhul Hasan Funds	584	993
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan Ending Balance of Qardhul Hasan Funds	615	584

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Dalam usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, Bank Aladin Syariah memperkenalkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai bagian dari kontrol internal pada tingkat entitas (*entity level control*). Lebih lanjut, Bank Aladin Syariah menyajikan WBS sebagai sarana bagi karyawan untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik, dan/atau tindak pidana yang melibatkan pegawai Bank Aladin Syariah.

Proses ini dirancang untuk melindungi pelapor yang bertindak sebagai pemberi informasi dimana identitas pelapor akan terlindungi dan terjamin keamanannya. Sistem WBS ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan respons serius terhadap masalah-masalah yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari aspek keuangan maupun reputasi Bank, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penipuan/*Fraud*, Ketidakjujuran atau Korupsi.
2. Penggunaan tidak sah atau klaim palsu atas dana bank.
3. Penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi.
4. Aktivitas tidak sah dan/atau perdagangan ilegal dan/atau kelakuan buruk.
5. Pelanggaran hukum, aturan, peraturan dan pedoman seperti UU Perbankan.
6. Kegagalan untuk memenuhi standar professional.
7. Tindakan ilegal atau kriminal (seperti perusakan fisik properti, pembakaran, pencurian, bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menipu bank).
8. Pemalsuan, perubahan/penggantian catatan bank.
9. Pelanggaran serius Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
10. Pelecehan Seksual (baik secara fisik maupun verbal), intimidasi/pengancaman, pemerasan.
11. Penyalahgunaan Informasi yang bersifat rahasia.
12. Menyetujui, mengarahkan atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di atas.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

Pelapor baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan terhadap tanda-tanda pelanggaran yang terjadi. Laporan yang diberikan oleh pelapor harus didukung dengan bukti indikasi pelanggaran. Dalam proses pelaporan ini, pelapor dapat memilih untuk menyertakan identitasnya secara jelas atau memilih untuk tidak mengungkapkannya. Dalam hal ini, Bank Aladin Syariah komitmen kuat dalam mengedepankan prinsip kerahasiaan dengan menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Saluran *Whistleblowing System* Bank Aladin Syariah yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan yaitu melalui email: Whistleblowing@aladinbank.id.

In an effort to create a conducive and comfortable work environment, Bank Aladin Syariah introduced a Whistleblowing System (WBS) as part of internal control at the entity level (entity level control). Furthermore, Bank Aladin Syariah presents WBS as a means for employees to submit complaints regarding alleged violations of the Code of Conduct and/or criminal acts involving Bank Aladin Syariah employees.

This process is designed to protect the reporter who acts as the informant where the reporter's identity will be protected, and its security guaranteed. This WBS system is designed with the aim of providing a serious response to problems that can cause losses, both in terms of finance and the Bank's reputation, but not limited to:

1. Fraud, Dishonesty or Corruption.
2. Unauthorized use or false claims of bank funds.
3. Abuse of position for personal gain.
4. Unauthorized activities and/or illegal trading and/or misconduct.
5. Violation of laws, rules, regulations and guidelines such as Banking Law.
6. Failure to meet professional standards.
7. Illegal or criminal acts (such as physical destruction of property, arson, theft, collaborating with third parties to defraud Bank).
8. Forgery, alteration/alteration of bank records.
9. Serious violation of the Code of Ethics and Code of Conduct.
10. Sexual harassment (both physical and verbal), intimidation/threats, blackmail.
11. Misuse of confidential information.
12. Approve, direct or participate in any of the above activities.

REPORT SUBMISSION MECHANISM

Whistleblowers from both internal and external parties have the opportunity to submit complaints regarding signs of violations that have occurred. The report provided by the reporter must be supported by evidence indicating a violation. In this reporting process, the reporter can choose to include his identity clearly or choose not to reveal it. In this case, Bank Aladin Syariah has a strong commitment to prioritizing the principle of confidentiality by maintaining the confidentiality of the information of the reporter and the party suspected of committing the violation. Bank Aladin Syariah Whistleblowing System channel that can be used to submit reports is via email: Whistleblowing@aladinbank.id.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Bank telah menyediakan saluran pelaporan melalui kanal e-mail yang bersifat independen, bebas, dan rahasia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaporan dapat berjalan dengan aman. Selain itu, Bank akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor untuk memberikan perlindungan kepada pelapor, dari tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pihak terlapor dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai Karyawan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Gugus Tugas Tim Investigasi Bank bertanggung jawab menindaklanjuti laporan dari whistleblower dan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap laporan indikasi pelanggaran, baik pelanggaran fraud maupun kode etik yang dilakukan oleh karyawan Bank serta menerapkan strategi untuk meminimalisir hal tersebut, yang dapat berupa edukasi secara regular, pengawasan aktif pada karyawan, serta pembuatan prosedur penanganan kejadian.

JUMLAH PENGADUAN DI TAHUN 2024

Hingga akhir 31 Desember 2024, terdapat 1 laporan melalui Whistleblowing System mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan ataupun Manajemen Bank.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2024

Sehubungan dengan adanya 1 pengaduan di tahun 2024, maka terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan di tahun 2024.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Bank has provided a reporting channel via e-mail channel that is independent, free and confidential. This aims to ensure that the reporting process can run safely. In addition, Bank will maintain the confidentiality of the identity of the reporter to provide protection to the reporter from retaliatory actions that may be taken by the reported party and/or other parties who have interests. Protection from pressure, rights as an employee, lawsuits, property, and even physical action.

PARTY MANAGING COMPLAINTS

The Bank's Investigation Team Task Force is responsible for following up on reports from whistleblowers and carrying out further investigations into reports of indications of violations, both fraud and code of ethics violations committed by Bank employees as well as implementing strategies to minimize this, which can be in the form of regular education, active supervision of employees, as well as creating incident handling procedures.

NUMBER OF COMPLAINTS IN 2024

Until the end of December 31, 2024, there was 1 report through the Whistleblowing System regarding violations committed by the Bank's employees or Management.

SANCTIONS/FOLLOW UP FOR COMPLAINTS IN 2024

In connection with 1 complaint in 2024, there were sanctions/follow-up actions for the complaint in 2024.

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Implementation Of Corporate Governance Aspects And Principles In Accordance With Financial Services Authority Provisions

Terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mengacu pada Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bank menerapkan ketiga hal tersebut sebagai standar dalam menjalankan prinsip tata kelola.

There are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) recommendations for implementing aspects and principles of Good Corporate Governance, referring to Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines. Based on these recommendations, Bank applies these three things as standards in implementing governance principles.

Adapun uraian penerapan aspek dan prinsip tata kelola yang dijalankan Bank Aladin Syariah dapat disampaikan sebagai berikut:

The description of the implementation of governance aspects and principles implemented by Bank Aladin Syariah can be presented as follows:

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANIES WITH SHAREHOLDERS IN GUARANTEING SHAREHOLDERS' RIGHTS	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 Increase the value of holding a GMS	
Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes (voting) both openly and privately that prioritize independence and the interests of shareholders.	Bank Aladin Syariah telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (voting) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank Aladin Syariah yaitu sebagai berikut: 1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Bank Aladin Syariah has provisions for procedures for making decisions through voting at the GMS, both open and closed, which prioritizes the independence and interests of shareholders. These provisions are regulated in the Articles of Association of Bank Aladin Syariah, namely as follows: 1. GMS Resolutions are taken based on deliberation to reach consensus. 2. In the event that a resolution based on deliberation to reach consensus is not reached, the GMS Resolution is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS, unless the statutory regulations and/or the Articles of Association stipulate that a decision is valid if it is approved by a greater number of affirmative votes
Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Public Companies are present at the Annual GMS.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Juni 2024 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah efektif menjabat. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 26, 2024 was attended by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have effectively served.
Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	Bank Aladin Syariah telah menyusun ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui situs web Bank Aladin Syariah https://aladinbank.id/rapat-umum-pemegang-saham/ selama paling sedikit 1 (satu) tahun. Bank Aladin Syariah has prepared a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and disclosed information to the public 2 (two) working days after the GMS, one of which is via Bank Aladin Syariah website https://aladinbank. id/old/id/rapat- general-shareholder for at least 1 (one) year.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor **Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors**	
Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.	Bank telah memiliki kebijakan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pemegang kepentingan dan secara khusus kepentingan nasabah menjadi fokus dalam operasi bisnis Bank. Pada kebijakan tersebut diatur pula bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari manajemen, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Bank has a corporate governance policy which is implemented based on principles that are oriented towards stakeholders and specifically customer interests are the focus in Bank's business operations. This policy also stipulates that in the GMS forum, shareholders have the right to obtain information relating to the company from management, as long as it is related to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the company.
Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.	Pemegang saham atau investor dapat melakukan komunikasi kepada Bank Aladin Syariah melalui kanal Hubungan Investor di https://aladinbank.id/informasi-investor/ dalam Situs Web PT Bank Aladin Syariah Tbk. Shareholders or investors can communicate with Bank Aladin Syariah via the Investor Relations channel at https://aladinbank.id/old/id/information investor on the PT Bank Aladin Syariah Tbk Website.
FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS FUNCTIONS AND ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners	
Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determining the number of members of the Board of Commissioners considers the conditions of the Public Company.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Bank Aladin Syariah yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, ukuran, pencapaian tujuan dan pemenuhan bisnis serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai Pasar Modal. Determination of the number of the Board of Commissioners members has considered the condition of Bank Aladin Syariah which includes, among other things, characteristics, capacity, size, achievement of objectives and fulfillment of business as well as considering the provisions that apply to Sharia Commercial Banks and the provisions governing the Capital Market.
Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Commissioners members considers the diversity of skills, knowledge and experience required.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan bagi Bank Aladin Syariah. Determination of the composition of the the Board of Commissioners members has considered the diversity of expertise, knowledge and experience required for Bank Aladin Syariah.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	
Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Dewan Komisaris telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja. The Board of Commissioners has carried out a self-assessment to assess performance.
Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank Aladin Syariah. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report of Bank Aladin Syariah.
Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	Dewan Komisaris berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan akan menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku. The Board of Commissioners is committed to complying with statutory provisions and regulations, especially in Banking and sharia banking sector and will accept all OJK decisions and their consequences in accordance with applicable regulations.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter.
FUNGSI DAN PERAN DIREKSI FUNCTIONS AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5 Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.	
Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of the Board of Directors members considers the condition of the Public Company and effectiveness in decision making.	Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank Aladin Syariah. The composition of the Board of Directors is in accordance with regulations and has considered the characteristics, capacity and business scale of Bank Aladin Syariah.
Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Directors members considers the diversity of skills, knowledge and experience required.	Komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank Aladin Syariah. The composition of the members of the Board of Directors has considered the diversity of expertise, knowledge and experience required according to the division of functions, duties and authority of the Board of Directors in achieving the goals of Bank Aladin Syariah.
Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. The Board of Directors member in charge of accounting or finance has the expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang Akuntansi, Operasional, dan Audit. The Director in charge of accounting or finance has the expertise and/or knowledge in the fields of Accounting, Operations and Audit.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities.	
Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Self assessment kinerja Direksi dilakukan secara berkala terhadap governance structure, process, dan outcome di level Direksi. Berdasarkan hasil self assessment tersebut telah dilakukan Upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk kinerja ke depannya. Self-assessment of the Board of Directors' performance is carried out periodically on the governance structure, processes and outcomes at the Directors level. Based on the results of the self-assessment, efforts have been made that need to be improved for future performance.
Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.	Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi akan diungkapkan melalui laporan tahunan Bank Aladin Syariah. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors will be disclosed in Bank Aladin Syariah annual report.
Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.	Direksi berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan akan menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku. The Board of Directors is committed to complying with statutory provisions and regulations, especially in Banking and sharia banking sector and will accept all OJK decisions and their consequences in accordance with applicable regulations.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines of Public Company Governance	Penerapan di Bank Aladin Syariah Implementation at Bank Aladin Syariah
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER PARTICIPATION	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan **Principle 7 Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.**	
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Public Companies have policies to prevent insider trading.	Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur perihal tindakan yang dilarang sebagai insider trading. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct which regulates prohibited actions as insider trading.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai anti korupsi dan anti-fraud. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates anti-corruption and anti-fraud.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates conflicts of interest.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding fulfilling creditor rights.	Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan terhadap fasilitas pembiayaan. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates conflicts of interest regarding financing facilities.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Public Companies have a whistleblowing system policy.	Bank Aladin Syariah telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai whistleblowing. Bank Aladin Syariah has a Code of Ethics and Code of Conduct that regulates whistleblowing.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Directors and employees	Bank Aladin Syariah memiliki Kebijakan Remunerasi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Kebijakan Remunerasi Karyawan. Bank Aladin Syariah has a Remuneration Policy for Directors, Commissioners, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employee Remuneration Policy.
KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.	
Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Companies make wider use of information technology apart from Websites as a medium for information disclosure.	Bank telah menggunakan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web yaitu melalui media sosial dan penyebaran informasi melalui mobile banking Bank. Bank has used information technology more widely apart from the Website, namely through social media and the dissemination of information through Bank's mobile banking.
Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of a Public Company discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the major and controlling shareholders.	Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) atau lebih saham kepada regulator dan masyarakat melalui website Bank. Bank has disclosed the ultimate beneficial owner of Public Company share ownership of at least 5% (five percent) or more shares to regulators and the public via Bank's website.



07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Nilai-nilai keberlanjutan tercermin kuat di setiap kebijakan dan strategi TJSL Bank Aladin Syariah. Hal itu disusun dengan mengedepankan aspirasi pemangku kepentingan serta menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku.
Sustainability values are strongly reflected in every TJSL policy and strategy of Bank Aladin Syariah. It is formulated by prioritizing stakeholder aspirations and upholding compliance with applicable laws and norms.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



Bank Aladin Syariah mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *corporate governance* yang baik di setiap operasional Bank. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya Tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendukung TPB dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Bank Aladin Syariah supports the efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by implementing sustainable finance principles and good corporate governance practices in every Bank operation. The main objective of sustainable development is to maintain environmental quality and inclusive development and the implementation of Governance that can maintain improvements in the quality of life from one generation to the next. The Indonesian Government has stated its commitment to supporting the SDGs by issuing Presidential Regulation No. 59/2017 concerning the Implementation of the Achievement of the Sustainable Development Goals.

Selaras dengan kebijakan pemerintah, Bank Aladin Syariah percaya bahwa sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk turut mendukung percepatan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Aladin Syariah menyatakan dukungannya melalui penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengacu pada implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, sejalan dengan visi dan misi bank, yakni "Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan" dan "Bersama, Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah yang Bermanfaat untuk Seluruh Lapisan Masyarakat," Bank Aladin Syariah mengembangkan strategi dan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang nantinya akan menjadi panduan dalam menjalankan program-program dan aktivitas-aktivitas operasional Bank. Kerangka kerja keuangan berkelanjutan Bank Aladin Syariah bersandar kepada 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Layanan Perbankan secara Bertanggung jawab (*Banking Responsibly*);
2. Tumbuh Bersama Karyawan (*Grow with Our People*);
3. Tidak Meninggalkan Siapapun (*Leave No One Behind*); dan
4. Kesadaran Bertindak untuk Menjaga Kelestarian Bumi (*Act with Conscience for the Planet*).

Bank Aladin Syariah juga telah memformulasikan Komitmen Keberlanjutan yang mana komitmen tersebut memiliki filosofi keberlanjutan sebagai berikut "Sebagai bank syariah masa depan, kami percaya akan adanya masa depan yang lebih baik. Kami juga meyakini bahwa keberlanjutan merupakan prinsip dasar dari cara kami berbisnis. Yang akan kami lakukan tidak hanya sebatas berperilaku secara bertanggung jawab untuk keberlangsungan Bumi sebagai rumah bagi semua, ataupun sebatas pemberian dukungan untuk komunitas dimana kami berada. Kami juga akan berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga memungkinkan adanya transisi yang lebih cepat ke arah masa depan yang berkelanjutan."

Nilai-nilai keberlanjutan direfresentasikan melalui kebijakan dan strategi TJSL Bank Aladin Syariah, dimana kebijakan dan strategi tersebut disusun untuk senantiasa menghargai dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan serta mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku. Bank Aladin Syariah senantiasa berupaya menghindari pelaksanaan program TJSL yang hanya sekadar bertujuan untuk meningkatkan citra Bank dimata masyarakat dan lingkungan bisnis. Pemahaman tujuan program TJSL yang dilaksanakan serta dampak positif yang diharapkan, menjadi tujuan utama Bank Aladin Syariah dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan TJSL yang ideal, objektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan, sejalan dengan konsep tujuan

In line with the government policy, Bank Aladin Syariah believes that the banking sector has a crucial role in supporting the acceleration of the transition towards a low-carbon economy. Therefore, as a form of support for efforts to accelerate the transition towards a low-carbon economy, including the implementation of sustainable finance, Bank Aladin Syariah has expressed its support through the implementation of sustainable finance by referring to the implementation of POJK No. 51/POJK.03/2017 dated July 18, 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. In addition, in line with the Bank's vision and mission, namely " Becoming the Leading Digital Sharia Bank " and " Together, strengthen and create a beneficial sharia financial ecosystem for society," Bank Aladin Syariah has been developing a sustainable finance strategy and framework that will later become a guide in implementing the Bank's programs and operational activities. Bank Aladin Syariah's sustainable finance framework is based on 4 (four) pillars, namely:

1. Banking Responsibly;
2. Grow with Our People;
3. Leave No One Behind; and
4. Act with Conscience for the Planet.

Bank Aladin Syariah has also formulated a Sustainability Commitment with a sustainability philosophy as follows: "As a future sharia bank, we believe in a better future." We also believe that sustainability is a fundamental principle of the way we do business. What we will do is not only limited to behaving responsibly for the sustainability of the Earth as a home for all, or limited to providing support to the communities where we are located. We will also collaborate with all parties to enable a faster transition towards a sustainable future."

Sustainability values are reflected through Bank Aladin Syariah's SER policies and strategies, where these policies and strategies are prepared to always respect and consider stakeholder expectations and comply with applicable laws and norms. Bank Aladin Syariah tries to avoid implementing TJSL programs that simply aim to improve the Bank's image in the eyes of the public and the business world. Understanding the objectives of the SER program being implemented and the expected positive impacts is the main objective of Bank Aladin Syariah to achieve the goals of SER in an ideal, objective, on target and sustainable manner, in line with the concept of sustainable development goals.

pembangunan berkelanjutan.

Hal lain yang menjadi fokus Bank Aladin Syariah dalam melaksanakan program TJSL adalah dengan senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Bank Aladin Syariah mengimplementasikan program TJSL yang memiliki dampak terhadap lingkungan dengan menetapkan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam upaya pelestarian lingkungan. Komitmen Bank Aladin Syariah terhadap lingkungan juga diwujudkan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Prinsip tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan kertas, energi, emisi, air, limbah dan sebagainya.

Another thing becoming Bank Aladin Syariah's focus in the implementation of the SER program is to always increase concern for the community and the environment. Bank Aladin Syariah implements the SER programs that have an impact on the environment by establishing and developing various policies and initiatives in an effort to preserve the environment. Bank Aladin Syariah's commitment to the environment is also realized through environmentally friendly office operations by applying the 3R principle (Reduce, Reuse and Recycle). This principle is implemented in the management of paper, energy, emissions, water, waste and so on.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan selaras dengan komitmen Bank Aladin Syariah dalam mendukung TPB dan penerapan keuangan berkelanjutan. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip *environment, social and governance* (ESG) disajikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

Social and Environmental Responsibility (SER) is carried out in line with Bank Aladin Syariah's commitment to supporting SDGs and implementing sustainable finance. In accordance with Financial Services Authority Circular No. 16 /SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, information on corporate social responsibility, especially for the application of environmental, social and governance (ESG) principles, is presented in a Sustainability Report which is presented separately from this Annual Report.

Adapun informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Bank Aladin Syariah Tahun Buku 2023, disajikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mencakup poin-poin sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup);
3. Profil Singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata Kelola Keberlanjutan;
6. Kinerka Keberlnajutan;
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
8. Lembar Umpan Balik *(feedback)* untuk Pembaca; dan
9. Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

The information disclosed in the Bank Aladin Syariah Sustainability Report for the 2024 Fiscal Year is presented as regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, and includes the following points:

1. Explanation of Sustainability Strategy;
2. Overview of Sustainability Aspects (Economic, Social and Environmental);
3. Brief Profile of the Issuer or Public Company;
4. Explanation from the Board of Directors;
5. Sustainability Governance;
6. Sustainability Performance;
7. Written Verification from an Independent Party;
8. Feedback Sheet for Readers; and
9. Issuer or Public Company Response to Previous Year's Report Feedback.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

08

Laporan Keuangan

Financial Statements

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2024 and
for the year then ended with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3-4	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	5	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	6-7	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	8	*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	9	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	10	*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan Atas Laporan Keuangan	11-115	*Notes to the Financial Statements*

****

SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below:

1.	Nama	:	Koko Tjatur Rachmadi	: *Name*
	Alamat kantor	:	Millennium Centenial Center, 7th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920	: *Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	:	Legenda Wisata Zona Van Gogh S.7/15 004/019. Nagrak, Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat 16967	: *Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	:	(021) 39708008	: *Telephone number*
	Jabatan	:	Presiden Direktur / *President Director*	: *Title*

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Bank's financial statements have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*

   b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 17 April 2025/*Jakarta, April 17, 2025*



Koko Tjatur Rachmadi
Presiden Direktur / *President Director*

PT. Bank Aladin Syariah Tbk
Millennium Centennial Center, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 25
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
T : +6221 3970 8008
F : +6221 3970 8007

aladinbank.id

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk. ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Aladin Syariah Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Aladin Syariah Tbk. (the "Bank") which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying interim financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2024, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants (AAR No. AG.0108.1.0003)
A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Hal audit Utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah*

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 8, 9 dan 10 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar Rp5.845 juta, Rp6.000 juta dan Rp50.280 juta. Lihat ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* yang diungkapkan dalam Catatan 2c dan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan terlampir. Kami berfokus pada area ini karena nilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* adalah signifikan terhadap laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing

Description of the key audit matter:

As described in Note 8, 9 and 10 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2024, the balance of allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing were Rp5,845 million, Rp6,000 million and Rp50,280 million, respectively. Refer to summary of significant accounting policies for allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing as disclosed in Note 2c and use of significant accounting estimates and judgements in Note 3 to the accompanying financial statements. We focused on this area because the amount of allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing are significant to the accompanying financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan)

Selain itu, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi yang mencakup penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai.

Respons audit:

Kami menguji pengendalian utama atas pemberian, penilaian kualitas kredit internal secara regular, serta pencatatan dan pembayaran kembali piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah*. Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model pencadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menguji piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* untuk mengevaluasi identifikasi eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai secara tepat waktu oleh Bank. Kami memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang penurunan nilai atas keseluruhan portofolio. Kami menilai apakah pengungkapan dalam laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Bank terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing (continued)

Description of the key audit matter: (continued)

In addition, determination of allowance for impairment losses requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models.

Audit response:

We tested the key controls over the origination, regular internal credit quality assessments, and recording and repayments of the murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing. We obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, performed validation of allowance for impairment losses models, inputs, bases, and assumptions used by the Bank in calculating the allowance for impairment losses. We tested murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing to evaluate the timely identification by the Bank of exposures with significant deterioration in credit quality or exposures which have been impaired. We checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the impairment losses for the entire portfolio. We assessed whether the financial statement disclosures are adequately and appropriately reflecting the Bank's exposures to credit risk. We involved our auditor's internal experts to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam dalam Laporan Tahunan 2024 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2024 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan interim (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements interim (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan interim (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the interim financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan interim (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00674/2.1032/AU.4/07/0703-4/1/IV/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the interim financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Yasir
Registrasi Akuntan Publik No.: AP.0703/*Public Accountant Registration No.: AP.0703*

17 April 2025/*April 17, 2025*

00674

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
ASET				***ASSETS***
Kas	233	2,4	1.013	*Cash*
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	2.200.176	2,5	2.176.610	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.169		13.488	*Current accounts with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12)		(135)	*Less: Allowance for impairment losses*
	1.157	2,6	13.353	
Investasi pada surat berharga	2.094.295		1.409.892	*Investment in marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.135)		(6.530)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2.082.160	2,7	1.403.362	
Piutang *murabahah*	44.692		814.569	*Murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.845)		(23.924)	*Less: Allowance for impairment losses*
	38.847	2,8,20	790.645	
Pinjaman *qardh*	603.995		823.362	*Funds of qardh*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.000)		(7.739)	*Less: Allowance for impairment losses*
	597.995	2,9,20	815.623	
Pembiayaan *musyarakah*	4.100.366		1.464.378	*Musyarakah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.280)		(14.446)	*Less: Allowance for impairment losses*
	4.050.086	2,10,20	1.449.932	
Aset tetap dan aset hak guna - neto	34.744	2,11	47.367	*Fixed assets and right of use assets - net*
Aset tak berwujud - neto	102.469	2,12	77.339	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain	254.218	2,13	316.876	*Other assets*
TOTAL ASET	**9.362.085**		**7.092.120**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	32.612	2,14	69.839	*Liabilities due immediately*
Simpanan *wadiah*	5.073	2,16	1	*Wadiah deposits*
Surat berharga yang diterbitkan	600.000	2,18	-	*Securities issued*
Utang pajak	7.853	2,15	6.973	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	167.923	2,19	90.819	*Other liabilities*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	2,8,17	584.248	*Liabilities due to Bank Indonesia*
TOTAL LIABILITAS	**813.461**		**751.880**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	678	20	-	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	665.213	20	510.651	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	4.744.140	20	2.744.348	*Mudharabah time deposits*
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**5.410.031**		**3.254.999**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023				*Share capital - par value of Rp100 (full amount) per share as of December 31, 2024 and 2023, respectively*
Modal dasar 50.000.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023				*Authorized - 50,000,000,000 shares as of December 31, 2024 and 2023, respectively*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 13.918.476.817 saham dan 13.918.379.517 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	1.391.848	2,21	1.391.838	*Issued and fully paid - 13,918,476,817 shares and 13,918,379,517 shares as of December 31, 2024 and 2023, respectively*
Tambahan modal disetor	965.670	2,21	965.669	*Additional paid-in capital*
Dana setoran modal	1.635.502	2,21	1.512.501	*Capital deposit funds*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	7.464	2,30	4.761	*Remeasurement of defined benefit plan*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.484	2,7	2.120	*Unrealized gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Saldo laba				*Retained earnings*
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541		29.541	*Retained earnings from conventional activities*
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(894.916)		(821.189)	*Deficit from sharia activities*
TOTAL EKUITAS	**3.138.593**		**3.085.241**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS	**9.362.085**		**7.092.120**	***TOTAL LIABILITAS, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*				***INCOME FROM FUND MANAGED BY BANK AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli, bagi hasil dan *ujrah*	446.069	2,22	201.056	*Income from margin, profit sharing and ujrah*
Pendapatan usaha utama lainnya	167.373	2,22	133.446	*Other main operating income*
Total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*	613.442		334.502	*Total income from fund managed by Bank as mudharib*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	(308.801)	2,23	(121.047)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	**304.641**		**213.455**	***BANK'S SHARE IN PROFIT SHARING***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan imbalan jasa perbankan	154.743	24	32.734	*Fee based income from banking services*
Keuntungan atas penjualan surat berharga	24.498	7	4.070	*Gain from sales of marketable securities*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	44		(11)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Lain-lain	1		1	*Others*
TOTAL PENDAPATAN USAHA LAINNYA	179.286		36.794	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME***
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(20.548)	25	(15.724)	*Additional allowance for impairment losses on earning assets*
BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(205.203)	27	(194.251)	*Salaries and employees' benefits*
Umum dan administrasi	(190.734)	26	(137.667)	*General and administrative*
Promosi	(95.165)		(105.799)	*Promotion*
Penyusutan dan amortisasi	(30.562)	11,12	(24.070)	*Depreciation and amortization*
Lain-lain	(15.202)	28	(15.879)	*Others*
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	**(536.866)**		**(477.666)**	***TOTAL OPERATING EXPENSES***
RUGI OPERASIONAL	**(73.487)**		**(243.141)**	***LOSS FROM OPERATION***
Beban non-operasional - neto	(240)		16.403	*Non-operating expense - net*
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK	**(73.727)**		**(226.738)**	***LOSS BEFORE TAX EXPENSE***
Beban pajak - neto	-	2,15	-	*Tax expenses - net*
RUGI TAHUN BERJALAN	**(73.727)**		**(226.738)**	***CURRENT YEAR LOSS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.703	30	2.041	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.364	7	1.757	*Unrealized gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**4.067**		**3.798**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(69.660)**		**(222.940)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR***
RUGI PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**(5)**	33	**(16)**	***BASIC LOSS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Shares capital issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Dana setoran modal/ *Capital deposits funds*	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Unrealized gain (loss)* on securities *measured at fair value through other comprehensive income*	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefit plan*	Saldo laba dari kegiatan konvensional/ *Retained earnings from conventional activities*	Saldo rugi dari kegiatan syariah/ *Deficit from sharia activities*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2022		**1.377.051**	**964.190**	**1.363.862**	**363**	**2.720**	**29.541**	**(594.451)**	**3.143.276**	***Balance as of December 31, 2022***
Penambahan Modal dari Pemegang Saham Pengendali	21	-	-	152.500	-	-	-	-	152.500	*Additional capital from Ultimate Shareholder*
Pelaksanaan Waran I	21	14.787	1.479	(3.861)	-	-	-	-	12.405	*Warrants I exercise*
Keuntungan komprehensif lain	7,30	-	-	-	1.757	2.041	-	-	3.798	*Other comprehensive income*
Rugi neto tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(226.738)	(226.738)	*Net loss for the year*
Saldo 31 Desember 2023		**1.391.838**	**965.669**	**1.512.501**	**2.120**	**4.761**	**29.541**	**(821.189)**	**3.085.241**	***Balance as of December 31, 2023***
Penambahan Modal dari Pemegang Saham Pengendali	21	-	-	123.000	-	-	-	-	123.000	*Additional capital from Ultimate Shareholder*
Pelaksanaan Waran I	21	10	1	1	-	-	-	-	12	*Warrants I exercise*
Keuntungan komprehensif lain	7,30	-	-	-	1.364	2.703	-	-	4.067	*Other comprehensive income*
Rugi neto tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(73.727)	(73.727)	*Net loss for the year*
Saldo 31 Desember 2024		**1.391.848**	**965.670**	**1.635.502**	**3.484**	**7.464**	**29.541**	**(894.916)**	**3.138.593**	***Balance as of December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan jual beli, bagi hasil dan pendapatan usaha utama lainnya	606.252		336.092	*Proceeds of margin, profit sharing, and other main operating income*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer	(302.717)		(115.011)	*Payment of revenue sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	179.242		36.805	*Receipt of other operating income*
(Pembayaran beban)/penerimaan pendapatan non-operasional - neto	(1.167)		(487)	*Non-operating (expense payment)/ receipt of income - net*
Pembayaran beban operasional	(408.208)		(345.060)	*Payment of operating expense*
Laba (rugi) sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	73.402		(87.661)	*Gain (loss) before changes in operating assets and liabilities*
Kenaikan (penurunan) aset operasi:				*Increase (decrease) in operating assets:*
Piutang *murabahah*	769.877	8	12.429	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	219.367	9	(273.496)	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	(2.635.988)	10	(1.464.378)	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	(25.317)		(166.112)	*Other assets*
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi:				*(Decrease) increase in operating liabilities:*
Liabilitas segera	(37.227)		53.447	*Liabilities due immediately*
Simpanan *wadiah*	(584.248)		-	*Wadiah deposits*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	5.072		584.248	*Liabilities due to Bank Indonesia*
Surat berharga yang diterbitkan	600.000		(684.000)	*Securities issued*
Utang pajak	880	15	907	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	81.676		6.882	*Other liabilities*
Dana *syirkah* temporer	2.155.032	20	2.460.350	*Temporary syirkah funds*
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	**622.526**		**442.616**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan investasi dalam surat berharga	(19.607.936)		(842.993)	*Acquisition of investment in marketable securities*
Perolehan aset tetap, aset hak guna dan piranti lunak	(39.337)	11,12	(35.673)	*Acquisitions of fixed assets, right to use asset and software*
Penerimaan dari penjualan surat berharga	2.499.084		326.000	*Proceed from sale of marketable securities*
Penerimaan dari investasi dalam surat berharga yang telah jatuh tempo	16.425.813		328.674	*Proceed from investment in matured marketable securities*
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(722.376)**		**(223.992)**	***Net cash used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dana setoran modal dari pemegang saham pengendali	123.000		152.500	*Proceeds capital deposit funds from controlling shareholder*
Pelaksanaan waran	12		12.405	*Exercise of warrants*
Pembayaran liabilitas sewa	(12.726)	36	(12.376)	*Payment of lease liabilities*
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	**110.286**		**152.529**	***Net cash provided by financing activities***
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**10.436**		**371.153**	***NET INCREASE CASH AND CASH CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**2.191.111**		**1.819.974**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	31		(16)	*Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**2.201.578**		**2.191.111**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Rincian kas dan setara kas terdiri dari :				*Cash and cash equivalents consist of :*
Kas	233	4	1.013	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	307.476	5	423.910	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.169	6	13.488	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	1.892.700	5	1.752.700	*Placements with Bank Indonesia*
Total kas dan setara kas	**2.201.578**		**2.191.111**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN REKONSILIASI
PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
Pendapatan Usaha	613.442		334.502	*Operating Income*
Pengurangan:				*Deduction:*
Pendapatan tahun berjalan kas atau setara kas yang belum di terima:				*Income during the year in which the cash or cash equivalent has not been received:*
Keuntungan *murabahah*	150		1.212	*Margin murabahah*
Pendapatan *musyarakah*	2		-	*Musyarakah income*
Pendapatan dari Sukuk Negara	7.982		1.191	*Income from Goverment Sukuk*
Pendapatan dari SIMA	71		185	*Income from SIMA*
Pendapatan dari SIPA	102		-	*Income from SIPA*
Pendapatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (SBSN)	7.422		5.460	*Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (SBSN)*
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	276		767	*Sharia Deposit Facility (FASBIS)*
Total pengurang	16.005		8.815	*Total deduction*
Penambah:				*Addition:*
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Income from previous year in which cash has been received in current year:*
Keuntungan *murabahah*	1.212		3.029	*Margin murabahah*
Pendapatan dari Sukuk Negara	1.191		124	*Income from Goverment Sukuk*
Pendapatan dari SIMA	185		-	*Income from SIMA*
Pendapatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (SBSN)	5.460		6.795	*Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (SBSN)*
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	767		458	*Sharia Deposit Facility (FASBIS)*
Total penambah	8.815		10.406	*Total addition*
Pendapatan usaha yang tersedia untuk bagi hasil	606.252		336.093	*Available operating income for profit sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	297.451		215.046	*Revenue sharing attributable to Bank*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	308.801	23	121.047	*Revenue sharing attributable to depositors*
Dirinci atas:				*Details to:*
Hak pemilik dana atas hasil dana *syirkah* temporer yang sudah didistribusikan	295.771		114.101	*Distributed return of temporary syirkah funds attributable to depositors*
Hak pemilik dana atas hasil dana *syirkah* temporer yang belum didistribusikan	13.030	19	6.946	*Undistributed return of temporary syirkah funds attributable to depositors*
Jumlah	**308.801**		**121.047**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Zakat dari bank				*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank	411		357	*Zakat from non-bank parties*
Jumlah sumber dana zakat	**411**		**357**	***Total sources of zakat funds***
Penyaluran dana zakat	411		357	*Distribution of zakat funds*
Kenaikan dana zakat	-		-	*Increase in zakat funds*
Saldo awal periode	**-**		**-**	***Beginning balance of the period***
Saldo akhir periode	**-**		**-**	***Ending balance of the period***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Denda	381	31	2	*Penalties*
Lainnya	5	31	5	*Others*
Jumlah sumber dana kebajikan	**386**		**7**	***Total sources of qardhul hasan funds***
Penggunaan dana kebajikan	(355)		(416)	*Uses of qardhul hasan funds*
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	31		(409)	*Increase (decrease) in qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan	584		993	*Beginning balance of qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan	**615**	2,14	**584**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian bank dan informasi umum

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank"), berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Bank Maybank Nusa International" berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994, No. 433/CN/PDT.P/1944/PN.JKT.PST., dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Notaris No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Bank berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No. C2-15.525. HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2992/A.Not/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994 ("Akta Pendirian").

Pada tanggal 11 September 2000, Bank berganti nama dari yang sebelumnya bernama "PT Maybank Nusa International" menjadi "PT Bank Maybank Indocorp" dengan beralihnya kepemilikan saham Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Bank No. 6 dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22089.HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2001.

1. GENERAL INFORMATION

a. The bank's establishment and general information

PT Bank Aladin Syariah Tbk (the "Bank"), domiciled in Jakarta, is a limited liability company that has been established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia initially under the name "PT Bank Maybank Nusa International" based on Deed of Establishment No. 58, dated September 16, 1994 of Achmad Abid, S.H. based on the Decision Letter No. 433/CN/PDT.P/1944 /PN.JKT.PST., of the Central Jakarta District Court, dated August 22, 1994 of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, and amended by Notarial Deed No. 135 dated October 17, 1994 of Sutjipto, S.H., who was authorized to establish the Bank based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia) No. C2-15.525.HT.01. 01.Th.94 dated October 17, 1994 and the deed has been registered in the registry of the Registrar's Office of South Jakarta District Court No. 2992/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL dated November 2, 1994, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 103 dated December 27, 1994, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 10872 Year 1994 ("Deed of Establishment").

On September 11, 2000, the Bank changed its name from "PT Maybank Nusa International" to "PT Bank Maybank Indocorp" upon transfer of ownership of the Bank's shares to Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) subsequently to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), based on the Deed of Decision Statement outside the Bank's Meeting No. 6 of Arman Lany, S.H., Notary in Jakarta, the change has been approved by the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia based on Decree No. C-22089.HT.01.04-TH.2000 dated October 9, 2000 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1 dated January 2, 2001, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 25 Year 2001.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Bank kembali berganti nama dari "PT Bank Maybank Indocorp" menjadi "PT Bank Maybank Syariah Indonesia" (Maybank Syariah) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/ DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa No. 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0043068.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010.

Pada tahun 2010, Bank melakukan konversi kegiatan usahanya dari konvensional menjadi syariah. Saldo laba yang diperoleh dari kegiatan konvensional dicatat dalam ekuitas.

Berdasarkan Akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011, Rapat Pemegang Saham Bank memutuskan untuk menjual 30.000 lembar saham Bank yang dimiliki oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Malayan Banking (Maybank) Berhad dan Maybank telah melakukan penjualan 9.451 saham Bank kepada PT Prosperindo.

Pada tanggal 15 Juni 2012, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui untuk mengubah pasal 9 Anggaran Dasar sehubungan perubahan ketentuan pemindahan hak atas saham. Keputusan ini didokumentasikan dalam Akta Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 34 tanggal 15 Juni 2012 dan perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.10-25737 tanggal 16 Juli 2012.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

The Bank once again changed its name from "PT Bank Maybank Indocorp" to "PT Bank Maybank Syariah Indonesia" (Maybank Syariah) in line with the change of business field from conventional commercial bank to sharia commercial bank based on the Governor of Bank Indonesia Decision Letter No.12/60/ KEP.GBI/DpG/2010 dated September 23, 2010. The said amendment to the Articles of Association was based on the Decision Statement of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1 dated June 1, 2010 of Arman Lany, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-29107.AH.01.02. Tahun 2010 dated June 8, 2010, and has been registered in the Company Registry of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0043068.AH.01.09.Tahun 2010 dated June 8, 2010.

In 2010, the Bank converted its business activities from conventional to sharia. Retained earnings from conventional activities are recorded in shareholders' equity.

Based on the Notary Deed of Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 dated December 19, 2011, the Bank's Shareholders Meeting decided to sell 30,000 shares of the Bank owned by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to Malayan Banking (Maybank) Berhad and Maybank sold 9,451 shares of the Bank to PT Prosperindo.

On June 15, 2012, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders which agreed to amend Article 9 of the Articles of Association in connection with the changes in the provisions for transfer of rights over shares. This decision is documented in the Notary Deed of Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 34 dated June 15, 2012 and these changes have been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-AH.01.10-25737 dated July 16, 2012.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2013, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui untuk mengubah Pasal 25 Anggaran Dasar sehubungan perubahan ketentuan Dewan Pengawas Syariah. Keputusan ini didokumentasikan dalam Akta Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 54 tanggal 19 Desember 2013, perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.10-06466 tanggal 25 Februari 2014.

Bank kembali berganti nama menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Bank No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035488.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0105852.AH. 01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 20460 Tahun 2020. Perubahan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat pergantian nama, dimana pergantian nama menjadi efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No. 113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah.

Pada tanggal 31 Januari 2020, akuisisi Bank telah berlaku efektif dan disahkan oleh Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., berdasarkan Akta No. 20 tanggal 31 Januari 2020 mengenai akuisisi Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

On December 19, 2013, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders which agreed to amend Article 25 of the Articles of Association in connection with changes to the provisions of the Sharia Supervisory Board. This decision is documented in the Notary Deed of Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 54 dated December 19, 2013, these changes have been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-AH.01.10-06466 dated February 25, 2014.

The Bank changed its name again to "PT Bank Net Indonesia Syariah" based on the Deed of Shareholders' Decision Statement taken outside the Banks Meeting No. 5 dated July 3, 2019 of Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the said amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0035488.AH.01.02.Tahun 2019 dated July 8, 2019, registered in the Company Registry of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0105852.AH.01.11.Tahun 2019 dated July 8, 2019 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 9, 2020, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20460 Year 2020. The change was approved by the Financial Services Authority ("OJK") through a name change letter which became effective after OJK issued Decree No. 113/PB.1/2019 dated December 20, 2019 stipulating the change in the use of business license from PT Bank Maybank Syariah Indonesia to PT Bank Net Indonesia Syariah.

On January 31, 2020, the acquisition of the Bank has been effective and validated by Notary Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., based on Deed No. 20 dated January 31, 2020 regarding the acquisition of Bank.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Dengan ditandatanganinya akta tersebut maka susunan pemegang saham sejak tanggal akta akuisisi adalah sebagai berikut:

1. PT NTI Global Indonesia sebagai pemilik dari 661.548 lembar saham atau 70% saham Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp573.514.815.318 (nilai penuh); dan

2. PT Berkah Anugerah Abadi sebagai pemilik dari 283.521 lembar saham atau 30% Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp245.792.435.248 (nilai penuh).

Atas pelaksanaan pengambilalihan kepemilikan Bank tersebut, telah dilakukan pengumuman pada media masa pada 7 Februari 2020.

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham Bank No. 37 tanggal 30 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Bank. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU 0035208.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 3 Juli 2020 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Bank dari semula Rp819.307.250.566,5 (nilai penuh) menjadi Rp2.500.000.000.000 (nilai penuh) dan modal ditempatkan/disetor Bank dari Rp819.307.250.566,5 (nilai penuh) menjadi Rp819.307.256.000 (nilai penuh) sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor Bank sebesar Rp5.433,5 (nilai penuh) yang diambil oleh PT Berkah Anugerah Abadi dan PT NTI Global Indonesia masing-masing sebesar Rp4.751,5 (nilai penuh) dan Rp682 (nilai penuh). Para pemegang saham juga menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp866.928,50 (nilai penuh) menjadi Rp200 (nilai penuh).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

With the signing of the deed, the composition of the shareholders from the date of the deed of acquisition is as follows:

1. PT NTI Global Indonesia as the owner of 661,548 shares or 70% of the Bank's shares with a total nominal value amounted to Rp573,514,815,318 (full amount); and

2. PT Berkah Anugerah Abadi as the owner of 283,521 shares or 30% of the Bank with a total nominal value amounting to Rp245,792,435,248 (full amount).

In relation to the transfer of ownership of the Bank, an announcement was made in mass media on February 7, 2020.

Based on the Deed of Circular Decision of the Bank's Shareholders No. 37 dated April 30, 2020 of Notary Eliwaty Tjitra, S.H., the shareholders decided to amend several articles in the Bank's Articles of Association. These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU 0035208.AH.01.02.Tahun 2020 dated May 12, 2020.

Based on Deed No. 17 dated July 3, 2020 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed to increase the Bank's authorized capital from the Rp819,307,250,566.5 (full amount) to Rp2,500,000,000,000 (full amount) and the Bank's issued/paid-up capital from Rp819,307,250,566.5 (full amount) to Rp819,307,256,000 (full amount) resulting in an increase in the Bank's issued/paid-up capital by Rp5,433.5 (full amount) taken by PT Berkah Anugerah Abadi and PT NTI Global Indonesia amounting to Rp4,751.5 (full amount) and Rp682 (full amount), respectively. The shareholders also agreed to change the par value of the shares from Rp866,928.50 (full amount) to Rp200 (full amount) per share.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Dengan demikian, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut: 1) PT NTI Global Indonesia sebagai pemilik dari 2.867.574.080 lembar saham atau 70% lembar saham Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp573.514.816.000 (nilai penuh); dan 2) PT Berkah Anugerah Abadi sebagai pemilik dari 1.228.962.200 lembar saham atau 30% Bank dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp245.792.440.000 (nilai penuh). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU 0045699.AH. 01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0276124 tanggal 6 Juli 2020.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 6 Juli 2020, dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham-saham Bank kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp200 (nilai penuh) dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia, serta mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, memberikan kuasa pada Direksi dan Dewan komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum saham, mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank, dan menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Bank sehubungan dengan perubahan status Bank menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Therefore, the composition of the shareholders is now as follows: 1) PT NTI Global Indonesia as the owner of 2,867,574,080 shares or 70% of the Bank's shares with a total nominal value amounting to Rp573,514,816,000 (full amount); and 2) PT Berkah Anugerah Abadi as the owner of 1,228,962,200 shares or 30% of the Bank's shares with a total nominal value amounting to Rp245,792,440,000 (full amount). These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU 0045699.AH.01.02.Tahun 2020 dated July 6, 2020 and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0276124 dated July 6, 2020.

Based on Deed No. 26 dated July 6, 2020 of Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed on the following plan to issue new shares through Initial Public Offering to a maximum number of 2,500,000,000 shares with a nominal value of Rp200 (full amount) per share and list the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange, change the status of the Bank from a private company to a public company, authorize the Board of Directors and the Board of Commissioners in connection with the Public Offering of the shares, change the purpose and objective, as well as the business activities of the Bank, and amend and adjust the Bank's Articles of Association in connection with the change of the Bank's status to a public company.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 14 Juli 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp200 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham, menyetujui perubahan rencana Bank untuk Penawaran Umum perdana saham-saham Bank (*Initial Public Offering*) dari sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham menjadi sampai dengan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (nilai penuh), serta menyetujui rencana Bank menerbitkan waran atas nama Bank sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020.

Berdasarkan Akta No. 113 tanggal 24 September 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan status Bank yang semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Tertutup/Non Fasilitas Umum. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0066400.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on Deed No. 53 dated July 14, 2020 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed to change the nominal value of the shares from Rp200 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share, approved the change in the Bank's plan for an Initial Public Offering of the Bank from a maximum number of 2,500,000,000 shares to a maximum of 5,000,000,000 shares and list the Bank's shares in the Indonesia Stock Exchange with a nominal value Rp100 (full amount) per share, as well as approved the Bank's plan to issue warrants to a maximum number of 2,800,000,000 (full amount) warrants. These changes have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0288622 dated July 14, 2020.

Based on Deed No. 113 dated September 24, 2020 Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders has approved the change of the status of the Bank from a Public Company to a Private/Non-Public Facility. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0066400.AH.01.02.Tahun 2020 dated September 25, 2020.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 November 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui beberapa hal, antara lain: rencana Bank untuk menerbitkan saham baru melalui penawaran umum perdana sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia, serta mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, menyetujui rencana Bank menerbitkan waran atas nama Bank sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran sesuai dengan syarat dan ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran, memberikan kuasa pada Direksi dan Dewan komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum saham, mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank, dan menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Bank sehubungan dengan perubahan status Bank menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

Perubahan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, serta diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0403667 tanggal 3 November 2020. Perubahan tersebut juga telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU00183733.AH. 01.11.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on Deed No. 1 dated November 2, 2020 of Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders agreed on the following among others: the Bank's plan to issue new shares through Initial Public Offering at maximum number of 5,000,000,000 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share, list the Bank's shares on Indonesia Stock Exchange, and change the status of Bank from a private company to a public company. Bank's plan to issue warrants on behalf of the Bank to a maximum number of 2,800,000,000 warrants in accordance with the terms and conditions relating to the issuance of the warrants, authorize the Boards of Directors and Commissioners in connection with the Public Offering of the shares, change the purpose and objective, as well as the business activities of the Bank, and amend and adjust the Bank's Articles of Association in accordance with the change of the Bank's status to a public company.

These changes have been submitted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on Decree No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 dated November 3, 2020, and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0403667 dated November 3, 2020. It has also been registered in the Company Register of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU00183733.AH.01.11.Tahun 2020 dated November 3, 2020.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank, yang telah diaktakan dalam akta No. 63 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 17 Desember 2020, para Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada PT Berkah Anugerah Abadi untuk menjual seluruh sahamnya dalam Bank, yakni sebanyak 2.457.924.400 saham, kepada dan menunjuk sebagai pembelinya, yakni: 1) PT Alphaplus Adhigana Asia, sebanyak 204.826.814 saham dan 2) PT NTI Global Indonesia sebanyak 2.253.097.586 saham. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diaktakan dalam akta No. 11 dari Notaris Yulia S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 7 April 2021, para pemegang saham memberikan persetujuan perubahan nama Bank dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021937.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021. Perubahan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat pergantian nama, dimana pergantian nama menjadi efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Pada tanggal 24 September 2021, Bank menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik terkait perubahan nama Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank yang semula bernama PT NTI Global Indonesia menjadi PT Aladin Global Ventures.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on the Decree of the Bank's Shareholders, which is notified in Deed No. 63 by Yulia, S.H., Notary in Jakarta, dated December 17, 2020, the Shareholders gave approval to PT Berkah Anugerah Abadi to sell all of 2,457,924,400 shares in the Bank, to designated buyers, namely: 1) PT Alphaplus Adhigana Asia for 204,826,814 shares and 2) PT NTI Global Indonesia for 2,253,097,586 shares. These changes have been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0420308 dated December 17, 2020.

Based on the result of the Extraordinary Shareholders General Meeting (EGMS) which has been notarized indeed No. 11 from Notary Yulia S.H., Notary in Jakarta, dated April 7, 2021, the shareholders gave their approval to change the Bank's name from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk.

The change has been submitted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on Decree No. AHU-0021937.AH.01.02 Year 2021 dated April 12, 2021. The change has been approved by the Financial Service Authority ("OJK") through a name change letter which became effective after OJK issued Decree No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 stipulating the change in the use of business license from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk.

On September 24, 2021, the Bank submits information disclosure to public regarding the change of the Bank's Controlling Shareholder name of the Bank which was formerly named PT NTI Global Indonesia to PT Aladin Global Ventures.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 21 Februari 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0013582.AH.01.02 tanggal 23 Februari 2022. Para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Bank dari Rp2.500.000.000.000 menjadi Rp5.000.000.000.000.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Pemegang Saham PT Bank Aladin Syariah Tbk No. 43 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 24 Juni 2024 mengenai penyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("Tata Kelola") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan "POJK" No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("Tata Kelola Syariah").

Pemegang saham pengendali Bank adalah PT Aladin Global Ventures (dahulu PT NTI Global Indonesia) dengan Pemegang saham akhir adalah John Dharma J. Kusuma.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan usaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa dengan kegiatan usaha utama melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Millennium Centennial Center, Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Based on Deed No. 56 dated February 21, 2022, it was made notary by Yulia, S.H., in Jakarta and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0013582.AH.01.02 dated February 23, 2022. The shareholders agreed to increase the Authorized capital of the Bank from Rp2,500,000,000,000 to Rp5,000,000,000,000.

The Bank's Articles of Association have been amended most recently by the Deed of Shareholders Statement No. 43 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, dated June 24, 2024 concerning to align the company's Articles of Association with the Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 17 Year 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks ("Governance"), and the Financial Services Authority Regulation "POJK" No. 2 Year 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units ("Sharia Governance").

The controlling shareholder of the Bank is PT Aladin Global Ventures (previously PT NTI Global Indonesia) with the ultimate shareholder is John Dharma J. Kusuma.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in Foreign Exchange Sharia Commercial Banking with the main business activities carrying out banking activities that run their business according to sharia principles.

The Bank's head office is located at 7th Floor Millennium Centennial Center, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, South Jakarta.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Penawaran Umum Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia

Pada tanggal 22 Januari 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham Bank dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 (nilai penuh) per saham dan disertai dengan 2.800.000.000 waran I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran Rp110 yang mulai berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026. Pada tanggal 1 Februari 2021, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 24 Februari 2021 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0124836 tanggal 25 Februari 2021. Dari hasil penawaran umum saham perdana, Bank berhasil mencatat penambahan modal disetor sebesar Rp500.000 dan tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp15.000 sebelum dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp4.612. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum saham perdana ini adalah sebesar Rp510.388.

Pada tanggal 28 April 2022, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-74/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Bank sejumlah 504.264.065 (lima ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima) lembar saham dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham pada harga penawaran Rp2.000 (nilai penuh) per lembar saham.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Initial Public Offering on Indonesia Stock Exchange

On January 22, 2021, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority (OJK) in its letter No. S-8/D.04/2021 for the public offering of 5,000,000,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share with offering price at Rp103 (full amount) per share and simultaneously issued 2,800,000,000 warrants I accompanying the new shares issued, which are to be granted free as an incentive for the shareholders at an exercise price of Rp110 which is effective starting from August 2, 2021 up to January 30, 2026. As of February 1, 2021, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

Based on Deed No. 54 dated February 24, 2021 of Yulia, S.H., a Notary in Jakarta and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0124836 dated February 25, 2021. From the results of the initial public offering, the Bank managed to record an additional share capital of Rp500,000 and additional paid-in capital in the form of premium of Rp15,000 before deducting the issuance costs of shares issuance of Rp4,612. The net proceeds from this initial public offering amounted to Rp510,388.

On April 28, 2022, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority (OJK) in its letter No. S-74/D.04/2022 for Limited Public Offering I with pre-emptive rights to the Bank's shareholders amounting to 504,264,065 (five hundred four million and two hundred sixty-four thousand sixty-five) shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share with the offering price of Rp2,000 (full amount) per share.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Penawaran Umum Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia (lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 94 tanggal 20 Juni 2022 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252875 tanggal 20 Juni 2022.

Dari hasil Penawaran Umum Terbatas I, Bank berhasil mencatat penambahan modal disetor sebesar Rp50.427 dan tambahan modal disetor berupa agio sebesar Rp958.102 sebelum dikurangi biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp5.031. Hasil penerimaan bersih dari penawaran umum terbatas ini adalah sebesar Rp1.003.498.

Adapun Komposisi pemegang saham Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2022 telah mengalami perubahan, pasca pelaksanaan Aksi Korporasi Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) tanggal 29 Desember 2022 dimana Bank menerbitkan saham baru sejumlah 850.000.000 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp1.400 (nilai penuh) per saham, dan PT BNC Technologies Ventures menyerap seluruh saham yang ditawarkan Bank dalam PMTHMETD tersebut.

Berdasarkan Aksi Korporasi tersebut, komposisi pemegang saham Bank yang sebelumnya terdiri dari PT Aladin Global Ventures dengan komposisi saham sebesar 60,22% dan masyarakat sebesar 39,78%, pada tanggal 31 Desember 2023 berubah menjadi PT Aladin Global Ventures selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 53,67% dan PT BNC Technologies Ventures dengan porsi kepemilikan sebesar 5,80%, sementara sisanya adalah kepemilikan saham di bawah 5% oleh Masyarakat dengan komposisi sebesar 40,53% (Catatan 21).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Initial Public Offering on Indonesia Stock Exchange (continued)

The Limited Public Offering I has been recorded on Deed No. 94 dated June 20, 2022 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252875 dated June 20, 2022.

From the results of the Limited Public Offering I, the Bank managed to record an additional share capital of Rp50,427 and additional paid-in capital in the form of premium of Rp958,102 before deducting the issuance costs of shares issuance of Rp5,031. The net proceeds from this initial public offering amounted to Rp1,003,498.

As for the composition of Bank Aladin Syariah shareholders as of December 31, 2022 there has been a change, following the implementation of the Corporate Action to Increase Capital Without Going Through Pre-emptive Rights (PMTHMETD) on December 29, 2022 where the Bank issued 850,000,000 new shares at a price exercise of Rp1,400 (full amount) per share, and PT BNC Technologies Ventures absorbs all the shares offered by the Bank in the PMTHMETD.

Based on the Corporate Action, the composition of the Bank's shareholders which previously consisted of PT Aladin Global Ventures with a share composition of 60.22% and the public 39.78%, as of December 31, 2023 changed to PT Aladin Global Ventures as the Main and Controlling Shareholder of the Bank with a composition of share ownership of 53.67% and PT BNC Technologies Ventures with an ownership portion of 5.80%, while the rest is under 5% shareholding by the public with a composition of 40.53% (Note 21).

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian bank dan informasi umum (lanjutan)

Penawaran Umum Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia (lanjutan)

Aksi korporasi tersebut berakibat pada peningkatan modal ditempatkan/disetor Bank dari Rp1.380.561.760.100 (nilai penuh) menjadi Rp1.465.561.760.100 (nilai penuh) dan telah dicatatatkan pada Akta No. 32 tanggal 17 Januari 2023 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 tanggal 19 Januari 2023.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. The bank's establishment and general information (continued)

Initial Public Offering on Indonesia Stock Exchange (continued)

The corporate action resulted in an increase in the Bank's issued/paid-up capital from Rp1,380,561,760,100 (full amount) to Rp1,465,561,760,100 (full amount) and was recorded in Deed No. 32 dated January 17, 2023 made before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 dated January 19, 2023.

b. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees

Compositions of the Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board of the Bank as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris (Independen)	Rudy Hamdani	*President Commissioner (Independent)*
Komisaris	Ationo Teguh Basuki	*Commissioner*
Komisaris (Independen)	Fransisca Ekawati	*Commissioner (Independent)*
Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Koko Tjatur Rachmadi*	*President Director*
Direktur	Firdila Sari	*Director*
Direktur	Jo, Anula Putra**	*Director*
Direktur Kepatuhan	Baiq Nadea Dzurriatin	*Compliance Director*

* Efektif sejak ditetapkan lulus uji kemampuan dan kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan No. KEPR-18/PB.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024

** Efektif sejak ditetapkan lulus uji kemampuan dan kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan No. KEPR-5/PB.02/2024 tanggal 7 Juni 2024

* *Effective since fit and proper test decision based on Decree of Members of the Head of the Banking Licensing and Crisis Management Department No. KEPR-18/PB.02/2024 dated August 23, 2024*

** *Effective since fit and proper test decision based on Decree of Members of the Head of the Banking Licensing and Crisis Management Department No. KEPR-5/PB.02/2024 dated June 7, 2024*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees (continued)

Compositions of the Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board of the Bank as of December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris (Independen)	Rudy Hamdani	*President Commissioner (Independent)*
Komisaris	Ationo Teguh Basuki	*Commissioner*
Komisaris (Independen)	Fransisca Ekawati	*Commissioner (Independent)*
Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Dyota Mahottama Marsudi***	*President Director*
Direktur	Firdila Sari	*Director*
Direktur	Mayang Ekaputri***	*Director*
Direktur Kepatuhan	Baiq Nadea Dzurriatin	*Compliance Director*

*** Efektif mengundurkan diri pada tanggal 26 Juni 2024 yang tercantum dalam Akta Notaris No. 95

*** *Effective resigned by June 26, 2024 as stated on notarial deed No. 95*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 December/ *December 31,* 2023**	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Fransisca Ekawati	Fransisca Ekawati	*Chairman*
Anggota	Rudy Hamdani	Rudy Hamdani	*Member*
Anggota (Pihak Independen)	Jeffri Sugiarto	Jeffri Sugiarto	*Member (Independent Party)*
Anggota (Pihak Independen)	Andreas Danny Soesanto	Andreas Danny Soesanto	*Member (Independent Party)*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Prof. DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Prof. DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	*Chairman*
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub S.Ag, M.Si.	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub S.Ag, M.Si.	*Member*

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.001.BOD/07.2022 tertanggal 15 Juli 2022, Sekretaris Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Indira Indah Prameshwari.

Based on Decree No. SK.001.BOD/07.2022 dated July 15, 2022, the Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2024 and 2023 is Indira Indah Prameshwari.

Berdasarkan Surat Keputusan No. Srt.543/ HCD/04/2024 tentang Pengangkatan Head of Internal Audit tertanggal 26 April 2024, mengangkat Tony Prima Witono sebagai Head of Internal Audit PT Bank Aladin Syariah, Tbk terhitung efektif sejak tanggal 30 April 2024 menggantikan Senof Gremaldy.

Based on Decree No. Srt.543/HCD/04/2024, the appointment of Head of the Internal Audit, dated April 26, 2024 appointed Tony Prima Witono as Head Of Internal Audit of PT Bank Aladin Syariah, Tbk effective from April 30, 2024 replacing Senof Gremaldy.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan (lanjutan)

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Kunci untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees (continued)

Salaries and other compensations paid to the Board of Commissioners and Directors, Sharia Supervisory Board and Key Management for the year ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Direksi	8.872	11.595	*Board of Directors*
Dewan Komisaris	2.544	2.935	*Board of Commissioners*
Dewan Pengawas Syariah	708	837	*Sharia Supervisory Board*
Manajemen Kunci	23.146	26.401	*Key Management*

Personel manajemen kunci Bank terdiri dari Pemimpin Grup dan Pemimpin Divisi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank mempekerjakan masing-masing 290 dan 291 karyawan tetap (tidak diaudit).

Bank's key management consist of Group Head and Division Head.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank employs 290 and 291 permanent employees, respectively (unaudited).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), termasuk PSAK No. 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402, "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 405, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 406, "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 407, "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 410, "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 411, "Akuntansi *Wa'd*", PSAK No. 459, "Akuntansi Perbankan Syariah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), including SFAS No. 401, "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 402, "Accounting for Murabahah", SFAS No. 405, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 406, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 407, "Accounting for Ijarah", SFAS No. 410, "Accounting for Sukuk", SFAS No. 411, "Accounting for Wa'd", SFAS No. 459, "Sharia Banking Accounting", Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), and Bapepam Regulation-LK No. VIII.G.7 Attachment to Decree of the Chairman of Bapepam and LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning "Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements for Issuers or Public Companies".

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 401, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan;
2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
3) Laporan Perubahan Ekuitas;
4) Laporan Arus Kas;
5) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
6) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
8) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal akuisisi.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Based on SFAS No. 401, a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

1) Statements of Financial Position;
2) Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income;
3) Statements of Changes in Equity;
4) Statements of Cash Flows;
5) Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing;
6) Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds;
7) Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds; and
8) Notes to the Financial Statements.

The financial statements are presented on the historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method which presents receipt and withdrawal of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks maturing within 3 (three) months from the acquisition date.

The financial statements are presented on the historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional;
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK);
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The statements of sources and distribution of zakat funds and sources and uses of qardhul hasan funds are statements that represent the Bank's role as mandate holder of social activities funds which upon separately managed.

The statement of sources and distribution of zakat represents a statement showing the sources and the distribution of zakat funds for a certain period and the balance of undistributed funds on a specific date.

The statement of sources and uses of qardhul hasan funds represents statement of the sources and uses of qardhul hasan funds during certain period of time and balance of undistributed qardhul hasan on a specific date.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded in millions of Rupiah.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards;*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK);*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability; and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Efektif 1 Januari 2024, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") revisi yang relevan untuk Bank, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 116, "Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik".

Penerapan dari standar revisi tersebut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh,* pembiayaan *musyarakah* dan komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian dan antara lain terdiri dari *suspense accounts*. *Suspense account* adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya. Sesuai dengan POJK, Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari 5 (lima) kategori dan non-produktif ke dalam 1 (satu) dari 4 (empat) kategori.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

The accounting policies are applied consistently in the financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Effective on January 1, 2024, the Bank has applied revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") which are relevant to the Bank, as follows:

- *Amendment of SFAS No. 116, "Lease Liability in Sale and Leaseback".*

The implementations of such revised standards did not result in substantial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior periods.

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies

Earning assets consist of current accounts and placement with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing and commitments and contingencies with credit risk.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss and among others consist of suspense accounts. Suspense account are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account. In accordance with POJK, the Bank classifies earning assets into 1 (one) of 5 (five) categories and non-earning assets into one of 4 (four) categories.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Khusus untuk surat berharga kualitasnya ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Piutang *murabahah*

Sesuai dengan PSAK No. 402, "Akuntansi *Murabahah*" dan PAPSI 2013, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin pembiayaan restrukturisasi dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

Performing earning assets are categorized as "Current" and "Special Mention", while non-performing earning assets are categorized into three categories: "Substandard", "Doubtful" and "Loss". Non-earning assets are divided into "Current", "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

For marketable securities, the quality rating is classified into 3 (three) categories: current, substandard and loss. For equity investments, the quality rating is determined into 4 (four) categories: current, substandard, doubtful and loss.

Murabahah receivables

In accordance with SFAS No. 402, "Accounting for Murabahah" and PAPSI 2013, the Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired at each statement of financial position date. A financial assets or a group of financial assets is deemed to be impaired and the value is reduced if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the assets (an incurred 'loss event') which has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Objective evidence of impairment may include indications that the debtors or issuers are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in principal or margin payments, financing restructuring with terms that may not be applied if the debtor is not experiencing financial difficulty, the probability that the debtor will enter bankruptcy or other financial reorganization, and observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of the debtor or issuer in the group or economic conditions that correlate with defaults in the asset in such group.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Piutang *murabahah* (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan marjin tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat imbal hasil efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut. Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* pada masa lalu, waktu pengembalian, dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*).

Aset produktif lainnya

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam POJK No. 2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Pedoman pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif berdasarkan POJK tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

Murabahah receivables (continued)

The carrying values of the assets is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Margin income continues to be accrued on the reduced carrying amount and is accrued using efective rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. If, in subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.

In determining the allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed collectively, the Bank uses statistical method of the historical data such as the probability of defaults, time of recoveries, the amount of loss incurred (Loss Given Default).

Other earning assets

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by POJK No. 2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit".

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets based on the aforementioned POJK are as follows:

a. General reserve shall be at least 1% of total earning assets classified as current, excluding securities issued by the government based on sharia principles, as well as portion of the earning assets guaranteed by government guarantees and cash collaterals in the form of demand deposits, savings deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged and accompanied with the power of attorney for disbursement.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Aset produktif lainnya (lanjutan)

Pedoman pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif berdasarkan POJK tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   1) 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
   2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan
   3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
   4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai liabilitas komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

Apabila pihak manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut sudah tidak dapat ditagih kembali maka aset tersebut harus dihapusbukukan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari masing-masing cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dalam tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan cadangan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan, sedangkan penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan usaha lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets and estimated losses on commitment and contingencies (continued)

Other earning assets (continued)

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets based on the aforementioned POJK are as follows: (continued)

b. Special reserve, shall be at least:
   1) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting collateral value;
   2) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting collateral value;
   3) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting collateral value; and
   4) 100% of earning assets classified as Loss after deducting collateral value.

The criteria of assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Financial Services Authority regulation.

Allowance for impairment losses on commitments and contingencies is recorded under "Estimated Losses on Commitments and Contingencies" account.

If the management believes that certain earning assets are not recoverable then those assets should be written-off by deducting the balance of earning assets from their respective allowances.

Recovery of earning assets which are previously written-off during the year is recorded as a reduction to allowance for possible losses on earning assets during the year, while recovery of earning assets previously written-off in the previous years is recorded as other operating income.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi

Dalam usahanya Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

(iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
(ii) atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Transactions and balances with related parties

In the normal course of business, the Bank enters into transactions with related parties. In these financial statements, the term related parties are defined under SFAS No. 224, "Related Parties Disclosures".

A party is considered as a related party of the Bank if:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

(i) has control or joint control of the reporting entity;

(ii) has significant influence over the reporting entity; or

(iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

(i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

(ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member);

(iii) both entities are joint ventures of the same third party.
(iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

(v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika: (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau

(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan.

e. Giro pada bank Lain

Giro pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari Bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

f. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penempatan dana pada Bank Indonesia berupa FASBIS. Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Transactions and balances with related parties (continued)

A party is considered as a related party of the Bank if: (continued)

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)

(vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or

(vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

Transactions with related parties are conducted under terms agreed by both parties, whereby such terms may not be the same as other transactions undertaken by third parties.

All significant transactions and balances with related parties, are disclosed in the notes to the financial statement and the finansial presented in Note 29 of these financial statements.

e. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses. Bonuses received from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Interest on current accounts placed with non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the qardhul hasan funds. The interest from current accounts with conventional banks will be recorded as Bank's liabilities before being distributed.

f. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of FASBIS. Placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain Obligasi Syariah (Sukuk), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan Reksadana.

Investasi pada surat berharga sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank dan arus kas kontraktual pada saat pembelian surat berharga tersebut sesuai PSAK No. 410, "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

(i) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

(ii) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi periode yang bersangkutan.

(iii) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi karena investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Investment in marketable securities

Sharia marketable securities is a proof of investment under the sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as Sharia Bonds (Sukuk), Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS), Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA) and Mutual Funds.

Investment in sukuk marketable securities are classified based on business model determined by the Bank and contractual cash flows at the date of purchase of the securities in accordance with SFAS No. 410, "Accounting for Sukuk" as follows:

(i) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount where premium and discount are amortized over the period until maturity.

(ii) At fair value securities are stated at fair values through profit or loss where unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.

(iii) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value where unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

Sukuk is classified as measured at amortized cost as the investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Investasi dalam unit reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

SIMA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*. SIMA disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Cadangan kerugian diakui sesuai dengan pedoman dari OJK dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

h. Piutang dan pinjaman

Piutang *murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan marjin yang ditangguhkan yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh* yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dimana nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Investment in marketable securities (continued)

Investment in sharia mutual funds are presented at market value based on net asset value of mutual funds on statement of financial position date.

SIMA is a certificate issued by Sharia Bank or Sharia Business Unit (UUS) which used as short-term investment in the interbank money market based on sharia principles with a mudharabah agreement. SIMA is presented at cost less allowance for impairment losses.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of OJK and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

h. Receivables and financing

Murabahah receivables

Murabahah is the sale and purchase of goods in which the selling price is determined based on acquisition cost added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to the buyer.

Murabahah receivables are stated at the balance of the receivable less deferred margin and allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the review of the quality of individual murabahah receivables balance.

Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of fund with qardh contract, which is a borrowing contract whereby the borrower should repay the loan at a specified period of time.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang dan pinjaman (lanjutan)

Pinjaman *qardh (lanjutan)*

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

i. Aset tetap dan aset hak guna

Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

h. Receivables and financing (continued)

Funds of qardh (continued)

Funds of qardh are recognized at the same amount of funds lent when these occur. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue when these are incurred. On the statement of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah financing

Musyarakah financing is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

i. Fixed assets and right of use assets

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated from the month of the usage of assets and depreciated using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Renovasi bangunan yang disewa	5	*Leasehold improvements*
Peralatan kantor	5	*Office equipment*
Kendaraan	4	*Vehicles*
Komputer	5	*Computers*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset diestimasikan ketika kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Pembangunan". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai, dan aset siap digunakan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fixed assets and right of use assets (continued)

Fixed assets (continued)

The cost of repair and maintenance are charged to operations as incurred, significant renewal and improvement are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed, their cost and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is recorded in current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying value of property and equipment is derecognized upon disposal or when there are no future economic benefits expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of the assets (calculated as the difference of the net proceeds from disposal and the carrying amount of the assets is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized.

The recoverable value of an assets is estimated when events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be fully recoverable. Assets impairment, if any, is recognized as a loss in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Assets Under Construction". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed, and the asset is ready for its intended use.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset hak guna

Bank menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Bank merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 (dua belas) bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah.

Suatu kontrak mengandung sewa bila:

- Terdapat aset identifikasian;
- Bank secara substansial menikmati manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dimaksud.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Bank mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

i. pembayaran lunas dimuka
ii. pembayaran angsuran tetap
iii. pembayaran angsuran sewa secara variabel yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh *counterpart*

Berdasarkan PSAK No. 116, Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Setelah tanggal permulaan, aset hak guna diukur pada biaya perolehan. Aset hak guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fixed assets and right of use assets (continued)

Right of use assets

The Bank assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Bank recognizes a right of use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 (twelve) months or less) and leases of low value assets.

A contract contains on lease if:

- *There are identifiable assets;*
- *Banks substantially receives the economic benefits of using identifiable assets; and*
- *The Bank has the right to control those identifiable asset.*

At the inception date or at the time of revaluation of a contract containing a lease component, the Bank allocates the consideration in the contract to each component of the lease based on the relative separate prices of the lease component. Lease payments that are included in the measurement of lease liabilities include:

i. prepayments
ii. fixed installment payments
iii. variable lease installment payments based on fluctuations in lease payments determined by the counterpart

In accordance with SFAS No. 116, the Bank recognizes the rights of use assets and lease liabilities. Rights of use assets are initially measured at cost, which consists of the initial measurement amount of the lease liabilities adjusted for lease payments made on or before the inception date, plus the initial direct costs incurred. After the commencement date, rights of use assets are measured using the cost basis. Rights of use assets are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Lease liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

PSAK No. 116 menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Untuk sewa yang tidak memenuhi kriteria PSAK No. 116 maka diperlakukan sebagai sewa operasi biasa.

j. Aset tak berwujud

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat terkait sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula.

Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaatnya, yaitu 5 (lima) tahun.

k. Aset lain-lain

Terdiri dari aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya, termasuk di dalamnya biaya dibayar dimuka. Aset lain-lain dinyatakan sebesar nilai tercatat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fixed assets and right of use assets (continued)

SFAS No. 116 specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

For rent that does not meet the criteria of SFAS No. 116 then it is treated as a regular operating lease.

j. Intangible assets

Computer software which is not an integral part of the related hardware is recorded as intangible assets and stated at carrying value, which is cost less accumulated amortization.

Cost of software consists of all expense directly attributable to the preparation of such software to be used for its intended purpose.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits of the software so that it becomes higher than the standard performance originally expected.

Expenditure with no addition of future economic benefits of the software is directly recognized as expense when incurred.

Computer software is amortized by using straight-line method over the estimated useful life of the software, which is 5 (five) years.

k. Other assets

These represent assets that cannot be classified under the above accounts, including prepaid expenses. Other assets are stated at carrying value.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

m. Simpanan dari nasabah

Simpanan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang tabungan di Bank.

n. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas yang disalurkan kepada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dengan akad *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada bank lain.

o. Surat berharga yang diterbitkan

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank dan digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dengan akad *mudharabah*.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately represent Bank's liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

m. Deposits from customers

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts, and receive bonuses according to the Bank policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

n. Deposits from other banks

Deposits from other banks consist of liabilities distributed to other banks in the form of current accounts and savings accounts with wadiah contracts. Deposits from other banks are stated at the amount payable to the other banks.

o. Securities issued

Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) is a certificate issued by a Bank and is used as a means of short-term investment in the Interbank Money Market based on sharia principles (PUAS) with a mudharabah contract.

Interbank Sharia Fund Management Certificate (SIPA) is a certificate issued by a Bank as a statement of acceptance of fund management in the Interbank Money Market based on sharia principles (PUAS) with a wakalah bi al-istitsmar contract.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Surat berharga yang diterbitkan (lanjutan)

SIMA dan SIPA disajikan sebesar biaya perolehan nilai kewajiban bank kepada bank lain.

p. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Giro *mudharabah* merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan akad *mudharabah.*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang dapat ditarik setiap saat dan mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Securities issued (continued)

SIMA and SIPA are presented at the acquisition cost of the bank's liability to other banks.

p. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties on the basis of mudharabah mutlaqah in which the owners of the funds (shahibul maal) entrust the fund manager (mudharib/Bank) in managing their investments with a pre-agreed profit-sharing distribution. Temporary syirkah funds consist of mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah demand deposits from other customer which can be withdrawn at any time based on mudharabah contract.

Mudharabah savings deposits represent third party funds that can be withdrawn at any time and receive predetermined and pre-agreed profit-sharing ratio (nisbah) from income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah demand deposits are stated based on the customer's savings deposits balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed by deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the Bank's management's negligence or misrepresentation. On the other hand, temporary syirkah funds also cannot be classified as equity, because of the existence of maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholder such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi pendapatan.

q. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, pendapatan *ujrah qardh*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (marjin efektif). Marjin efektif adalah marjin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung marjin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari marjin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan oleh Bank adalah metode efektif (anuitas) sesuai dengan jangka waktu akad.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Temporary syirkah funds (continued)

Temporary syirkah funds represent one of the financial position report, accounts which is in accordance with sharia principle which give right to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and borne loss based on proportion to the total funds. The profit distribution of temporary syirkah funds can be based on profit sharing or revenue sharing concept.

q. Income from fund management as mudharib

Income from fund management as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, qardh ujrah income, profit sharing from musyarakah financing and other main operating income.

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income recognition from murabahah transaction with deferred payment or installment is conducted over the period of the contract in line with the level of risk and effort to realize the income. The method implemented by the Bank is effective method (annuity) based on the term of the contract.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* (lanjutan)

Pendapatan *murabahah* yang termasuk marjin ditangguhkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode yang setara dengan tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil setara yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas pada masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan termasuk biaya dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari efektif marjin.

Pendapatan atas pinjaman *qardh* diakui sebesar *ujrah* yang diterima. Pendapatan atas pinjaman *qardh* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga termasuk kedalam pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* dan akan dibagihasilkan kepada nasabah.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*.

Setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pengembalian harga perolehan atau pokok piutang/ pembiayaan. Kelebihan pembayaran diatas harga perolehan atau pokok piutang/ pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan giro pada bank lain. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual *(accrual basis)*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Income from fund management as mudharib (continued)

Murabahah income which includes deferred margin and administrative income, are recorded using the effective rate of return method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the effective financing rate.

Revenue from funds of qardh is recognized in the amount of ujrah received. Income from funds of qardh whose funds come from third party funds is included in the management of funds by the bank as a mudharib and will be shared with the customer.

Musyarakah income which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah income which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

The Bank prescribes the risk rating policies based on the internal regulations. The Bank discontinues the amortization of deferred income at the time its financing is classified as non-performing.

Repayment from debtors classified as non-performing is treated as repayment of acquisition cost or principal of receivable/ financing. Payment in excess of the acquisition cost or principal of receivable/financing will be recognized as income when it received.

Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS), Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA) and current accounts with other banks. Other main operating income is recognized on an accrual basis.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian laba bank milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Pembagian laba dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba, yaitu dihitung dari pendapatan Bank.

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan dan aset produktif lainnya akan dibagikan kepada penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagihasilkan pada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

s. Provisi dan komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan setara tingkat imbal hasil efektif sesuai dengan jangka waktunya. Provisi dan komisi sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau tidak untuk jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents fund owners' share on the profit of the Bank derived from managing of such fund under mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah and mudharabah musytarakah principles. The profit sharing is determined on cash basis.

Distribution of profit is based on profit sharing principle which is calculated based on the Bank's revenue.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank, based on the proportion of the fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit-sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio. Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

s. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to the lending activities and/or which cover a specific period are deferred and amortized using effective rate of return over the respective periods. Fees and commissions related to financing settled prior to maturity is recognized as revenue or expense upon settlement. Fees and commissions, which are indirectly related to the financing activities and/or do not cover specific periods, are recognized upon execution of the transactions.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Dana kebajikan

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dikenakan berupa denda sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

u. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal-tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs spot *Reuters* pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah/1 Dolar AS	16.095	15.397	*Rupiah/US Dollar 1*

v. Imbalan kerja

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 6/2023 (”Cipta Kerja - CK”) dan Peraturan Perusahaan yang merupakan liabilitas imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

t. Qardhul hasan funds

Penalties/sanctions are charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined on the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

u. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the spot rate at those transaction dates. At the financial position report dates, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated using the Reuters spot rate at 16.00 Western Indonesia Time (WIB) prevailing at that date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2024 and 2023, the exchange rates used are as follows (full amount):

v. Employee benefits

The Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Indonesian Law No. 6/2023 (“Job Creation - JC”) and Company Regulation which represents an underlying defined benefit obligation.

The liability recognized in the statement of financial position in respect to defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan kerja (lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

w. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak pada masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Employee benefits (continued)

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are immediately recognized in full through other comprehensive income at the time they occur.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Bank also provides other post-employment benefits, such as service pay, and separation pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

w. Income tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan ke ekuitas.

Koreksi atas liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka perubahan diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut ditetapkan.

x. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima, kecuali selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi yang diakui secara akrual.

y. Rugi neto per saham dasar

Rugi neto per saham dasar dihitung dengan membagi rugi neto dengan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Income tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statements of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net income or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if there is objection or appeal, when the decision on the objection and or the result of the appeal is received.

x. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services are generally recognized when cash is received, except for the unamortized discount/premium which is recognized on accrual basis.

y. Basic loss per share

Basic loss per share is computed by dividing net loss with the weighted average number of shares issued and fully paid during the year.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect amounts reported in the financial statement. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those that have been estimated.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya pada masa mendatang.

Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak Bank. Bank menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan (Catatan 2w).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Judgment made in applying accounting policies

Going concern

The Bank's management has made an assessment of its ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business in the foreseeable future.

Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data are not available, management's judgment is required to establish fair values. The management's judgment includes considerations of liquidity and model inputs such as discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for tax. The Bank provides tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of corporate taxable income (Note 2w).

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Penurunan nilai aset keuangan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan pada masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihnya, yaitu yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya yang menjual dan nilai pakainya.

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Nilai pakai ditentukan dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut. Estimasi nilai yang dapat terpulihkan tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan pada masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Key sources of estimation uncertainty

Impairment losses on financial assets

The Bank reviews the quality of its assets at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss, the Bank makes an assessment whether there is any indication of impairment in the quality of the assets. These estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance for impairment.

Impairment losses on non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generating Unit ("CGU") exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use.

The fair value less costs to sell calculation is based on available data from the binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Value in use is determined using the estimated future cash flows which are discounted using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets. These estimates of recoverable amount are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance for impairment.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat, dan tingkat laba fiskal pada masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2w).

Penyisihan imbalan kerja karyawan

Penyisihan imbalan kerja karyawan ditentukan bedasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain (Catatan 2v). Karena imbalan kerja tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Umur ekonomis aset tetap dan perangkat lunak

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap dan perangkat lunak berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tidak berwujud ditinjau secara berkala dan diperbaharui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut (Catatan 2i dan 2j).

Menentukan jangka waktu kontrak - Bank sebagai *lessee*

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Key sources of estimation uncertainty (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available to compensate the temporary differences which result in such deferred tax assets. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable income together with future tax planning strategies (Note 2w).

Provision for employee benefits

Provision for employee benefits programs is determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rates and others (Note 2v). Due to the long-term nature of these employee benefits, such estimates are subject to significant uncertainty.

Economic life of fixed assets and software

The Bank's Management estimates the useful lives of fixed assets and software based on the period over which the assets are expected to be available for use. The useful life of each item is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical and technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the used of the asset (Note 2i and 2j).

Determine the term of the contract - the Bank is the lessee

The Bank determines the lease term as the term of the lease that non-cancellable, along with the period covered by the option to extend the lease if it is certain to be exercised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Menentukan jangka waktu kontrak - Bank sebagai *lessee* (lanjutan)

Bank memiliki kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Key sources of estimation uncertainty (continued)

Determine the term of the contract - the Bank is the lessee (continued)

The Bank has lease contracts which include an option to extend the lease term. The Bank applies its judgment in evaluating whether it can be ascertained if it will exercise the option to extend the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend the lease.

4. KAS

Kas seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memiliki saldo kas masing-masing sebesar Rp233 dan Rp1.013.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah mengasuransikan *cash in safe* dan *cash in transit* kepada PT Asuransi Central Asia Syariah, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.500 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang ada.

4. CASH

Cash was all denominated in Rupiah. As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's cash amounted to Rp233 and Rp1,013, respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has insured cash in safe and cash in transit to PT Asuransi Central Asia Syariah, a third party, under blanket policies amounting to Rp1,500, respectively, which management believes is adequate to cover possible losses arising from such risks.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ *December 31*, 2024	**31 Desember/ *December 31*, 2023**	
Rupiah			*Rupiah*
Giro			*Current Accout*
Giro *wadiah*	306.671	423.140	*Wadiah demand deposit*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.892.700	1.752.700	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)*
	2.199.371	2.175.840	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Giro			*Current Accout*
Giro *wadiah*	805	770	*Wadiah demand deposit*
Total	**2.200.176**	**2.176.610**	***Total***

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Jangka waktu penempatan pada fasilitas FASBIS adalah 1-3 hari pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Tingkat bonus yang diterima dari penempatan pada fasilitas FASBIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing berkisar antara 5,25% sampai dengan 5,50% dan 4,75% sampai dengan 5,25%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat giro dan penempatan pada Bank Indonesia yang dijadikan jaminan.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The placement period of the FASBIS facility are 1-3 days as of December 31, 2024 and 2023.

Bonus rates received from placement on FASBIS facility for the years ended December 31, 2024 and 2023 were ranging from 5.25% to 5.50% and 4.75% to 5.25%, respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, no current accounts and placement with Bank Indonesia are pledged as collaterals.

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	340	100	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Nano Syariah (dahulu PT Bank Sinarmas Tbk - unit usaha syariah)	78	12.463	*PT Bank Nano Syariah (previously PT Bank Sinarmas Tbk - syariah unit)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	19	231	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	437	12.794	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	732	694	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
	1.169	13.488	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12)	(135)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.157**	**13.353**	***Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses of current accounts with other banks as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Saldo awal	135	19	*Beginning balance*
(Pembalikan) pembentukan selama tahun berjalan	(124)	117	*(Reversal) provision during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	1	(1)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**12**	**135**	***Ending balance***

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

Rata-rata tingkat imbal bagi hasil per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah	0,87%	1,16%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,14%	0,14%	*United States Dollar*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan jaminan.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks established is adequate.

Average annual rate of return are as follows:

As of December 31, 2024 and 2023, no current accounts with other banks are pledged as collaterals.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES

a. By type and currency

	31 Desember/ *December 31*, 2024		31 Desember/ *December 31*, 2023		
	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai tercatat/ Nilai wajar/ *Carrying amount/ Fair value*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Nilai tercatat/ Nilai wajar/ *Carrying amount/ Fair value*	
Diukur pada biaya perolehan					***Measured at cost***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	288.700	288.632	617.700	615.779	*National Islamic Securities (SBSN)*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	175.000	175.000	-	-	*Interbank Sharia Fund Management Certificate (SIPA)*
Sukuk Bank Indonesia	100.000	100.000	10.000	10.000	*Bank Indonesia Sukuk*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	50.000	50.000	325.000	325.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Reksadana Syariah	25.000	25.000	-	-	*Sharia Mutual Funds*
	638.700	638.632	952.700	950.779	
Surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Securities measured at fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Reksadana Syariah	910.000	913.146	328.025	328.025	*Sharia Mutual Funds*
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	250.000	246.816	-	-	*Government Islamic Securities (SBSN)*
Sukuk Bank Indonesia	245.377	245.377	131.088	131.088	*Bank Indonesia Sukuk*
Sukuk Korporasi	50.000	50.324	-	-	*Corporation Sukuk*
	1.455.377	1.455.663	459.113	459.113	
Total	2.094.077	2.094.295	1.411.813	1.409.892	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(12.135)		(6.530)	*Allowance for impairment losses*
Investasi pada surat berharga - neto		**2.082.160**		**1.403.362**	***Investment in marketable securities - net***

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak / *By remaining contractual period to maturity*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Diukur pada biaya perolehan			***Measured at cost***
Sampai dengan 1 tahun	588.508	693.139	*Up to 1 year*
Lebih dari 1-5 tahun	50.124	237.659	*Over 1-5 years*
Di atas 5 tahun	-	19.981	*Over 5 years*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Measured at fair value through other comprehensive income***
Sampai dengan 1 tahun	443.787	131.088	*Up to 1 year*
Lebih dari 1-5 tahun	98.730	-	*Over 1-5 years*
Tidak memiliki kontrak jatuh tempo	913.146	328.025	*No contractual maturity*
	2.094.295	1.409.892	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.135)	(6.530)	*Allowance for impairment losses*
Total	**2.082.160**	**1.403.362**	***Total***

c. Berdasarkan penerbit / *By issuer*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Korporasi	988.470	328.025	*Corporate*
Pemerintah Republik Indonesia	535.448	615.779	*Government of the Republic of Indonesia*
Bank Indonesia	345.377	141.088	*Bank Indonesia*
Bank lain	225.000	325.000	*Other banks*
	2.094.295	1.409.892	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.135)	(6.530)	*Allowance for impairment losses*
Total	**2.082.160**	**1.403.362**	***Total***

d. Informasi lain / *Other information*

Sukuk korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Corporate sukuk based on the rating is as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	
PT Global Mediacom Tbk		*PT Global Mediacom Tbk*
Pemeringkat	Pefindo	*Rating agency*
Peringkat	id A+	*Rating*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Informasi lain (lanjutan)

Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp3.484 dan Rp2.120 dari perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dalam laporan posisi keuangan.

Selama tahun 2024 dan 2023, Bank melakukan penjualan sejumlah efek-efek dan membukukan keuntungan neto masing-masing sebesar Rp24.498 dan Rp4.070 yang dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Tingkat kupon yang diterima dari investasi pada surat berharga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing berkisar antara 4,95% sampai dengan 10,25% dan 4,00% sampai dengan 6,92%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	December 31/ *December 31*, 2024	**December 31/ *December 31*, 2023**	
Saldo awal	6.530	2.754	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	5.605	3.776	*Additional during the year*
Saldo akhir	**12.135**	**6.530**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga yang dibentuk telah memadai.

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. Other information (continued)

The Bank recognized unrealized gain amounting to Rp3,484 and Rp2,120, respectively from the changes in fair value of securities measured at fair value through other comprehensive income as of December 31, 2024 and 2023 which is presented as "Unrealized gain on securities measured at fair value through other comprehensive income" in the statement of financial position.

During 2024 and 2023, the Bank sold some of its securities and booked net gain of Rp24,498 and Rp4,070, respectively, which was recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Coupont rates received from investment in marketable securities for the year ended December 31, 2024 and 2023 were ranging from 4.95% to 10.25% and 4.00% to 6.92%, respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, the movement in the allowance for impairment losses are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on investment in marketable securities established is adequate.

8. PIUTANG *MURABAHAH* / *MURABAHAH RECEIVABLES*

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan mata uang / *a. By economic sector and currency*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Rumah tangga	23.237	16.536	*Household sector*
Industri pengolahan	21.455	24.862	*Processing industry*
Konstruksi	-	53.083	*Construction*
Sosial/kesehatan	-	500.000	*Social/health*
Perdagangan	-	125.409	*Trading*
Biro perjalanan wisata	-	94.679	*Tour & travel agency*
Total	44.692	814.569	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.845)	(23.924)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**38.847**	**790.645**	***Net***

b. Berdasarkan jangka waktu perjanjian / *b. By contractual period*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	21.480	233.399	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	357	565.603	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	16.788	15.406	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	6.067	161	*> 5 years*
Total	44.692	814.569	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.845)	(23.924)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**38.847**	**790.645**	***Net***

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak / *c. By contractual remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
> 1 - ≤ 3 bulan	21.517	85.250	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	1.348	713.518	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 2 tahun	8.145	3.554	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	13.532	12.247	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	150	-	*> 5 years*
Total	44.692	814.569	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.845)	(23.924)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**38.847**	**790.645**	***Net***

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / *MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

d. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga	44.668	814.488	*Third party*
Pihak berelasi (Catatan 29)	24	81	*Related party (Note 29)*
Total	44.692	814.569	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.845)	(23.924)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**38.847**	**790.645**	***Net***

e. Informasi penting lainnya / *Other significant information*

Tingkat marjin keuntungan piutang dalam Rupiah berkisar antara 11,50% sampai dengan 13,00% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 6,50% sampai dengan 13,00% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

The profit margin rate on receivables in Rupiah range from 11.50% to 13.00% per annum for the year ended December 31, 2024 and from 6.50% to 13.00% per annum for the year ended December 31, 2023.

Tingkat marjin keuntungan piutang kepada karyawan Bank dalam Rupiah masing-masing berkisar 6,00% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The profit margin rate on receivables to the Bank's employees in Rupiah range from 6.00% per annum for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

Pendapatan marjin *murabahah* yang ditangguhkan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.731 dan Rp12.744.

Deferred murabahah margin income as of December 31, 2024 and 2023 are Rp3,731 and Rp12,744, respectively.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on murabahah receivables are as follows:

	December 31/ *December 31*, 2024	December 31/ *December 31*, 2023	
Saldo awal	23.924	30.282	*Beginning balance*
Pembalikan selama tahun berjalan	(18.079)	(6.358)	*Reversal during the year*
Neto	**5.845**	**23.924**	***Net***

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / *8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

e. Informasi penting lainnya (lanjutan) / *e. Other significant information (continued)*

Fasilitas yang belum ditarik masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp153.545 dan Rp109.232. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi atas fasilitas yang belum ditarik adalah sebagai berikut:

Undrawn facilities as of December 31, 2024 and 2023 are Rp153,545 and Rp109,232, respectively. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies for undrawn facilities are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	**31 Desember/ *December 31*, 2023**	
Saldo awal	2.822	1.752	*Beginning balance*
(Pembalikan) pembentukan selama tahun berjalan	(949)	1.070	*(Reversal) provision during the year*
Neto	**1.873**	**2.822**	***Net***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover impairment losses from uncollectible receivables.

Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan tabungan dan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tabungan dan deposito *mudharabah* yang menjadi agunan piutang masing-masing sebesar Rp5.000 dan Rp42.500 (Catatan 20).

Murabahah receivables are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, power of attorney to liquidate mudharabah savings and time deposits, and other collateral accepted by the Bank. As of December 31, 2024 and 2023, mudharabah savings and time deposits which collateralized receivables amounting to Rp5,000 and Rp42,500, respectively (Note 20).

9. PINJAMAN *QARDH* / *9. FUNDS OF QARDH*

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan mata uang / *a. By economic sector and currency*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	**31 Desember/ *December 31*, 2023**	
Rupiah			*Rupiah*
Jasa keuangan	505.717	715.850	*Financial services*
Rumah tangga	50.360	64	*Household sector*
Perdagangan	45.773	107.448	*Trading*
Industri pengolahan	2.145	-	*Processing industries*
Total	603.995	823.362	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.000)	(7.739)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**597.995**	**815.623**	***Net***

9. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *9. FUNDS OF QARDH (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu perjanjian / *b. By contractual period*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	389.690	823.298	*≤ 1 year*
> 1 tahun	214.305	64	*> 1 years*
Total	603.995	823.362	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.000)	(7.739)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**597.995**	**815.623**	***Net***

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak / *c. By contractual remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	106.049	177.165	*1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	251.758	643.962	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	246.140	2.171	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 tahun	48	64	*> 1 years*
Total	603.995	823.362	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.000)	(7.739)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**597.995**	**815.623**	***Net***

d. Berdasarkan hubungan / *d. By relationship*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga	603.995	823.362	*Third party*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.000)	(7.739)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**597.995**	**815.623**	***Net***

e. Informasi penting lainnya / *e. Other significant information*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	December 31/ *December 31*, 2024	December 31/ *December 31*, 2023	
Saldo awal	7.739	5.066	*Beginning balance*
(Pembalikan) pembentukan selama tahun berjalan	(1.739)	2.673	*(Reversal) provision during the year*
Neto	**6.000**	**7.739**	***Net***

9. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan)

e. Informasi penting lainnya (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya pinjaman.

Pinjaman *qardh* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan tabungan dan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tabungan dan deposito *mudharabah* yang menjadi agunan pinjaman masing-masing sebesar Rp49.950 dan Rp59.150 (Catatan 20).

9. FUNDS OF QARDH (continued)

e. Other significant information (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover impairment losses from uncollectible funds.

Funds of qardh are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, power of attorney to liquidate mudharabah savings and time deposits, and other collateral accepted by the Bank. As of December 31, 2024 and 2023, mudharabah savings and time deposits which collateralized funds amounting to Rp49,950 and Rp59,150, respectively (Note 20).

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan mata uang

a. By economic sector and currency

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Perdagangan	1.099.239	345.848	*Trading*
Jasa keuangan	590.457	650.500	*Financial services*
Pergudangan	548.500	-	*Storage*
Jasa akomodasi	500.000	-	*Accommodation services*
Jasa konsultan	428.000	428.000	*Consultant services*
Real estate	424.991	-	*Real estate*
Rumah tangga	278.420	485	*Household sector*
Industri pengolahan	103.000	-	*Processing Industry*
Konstruksi	81.431	5.000	*Construction*
Pengelolaan sampah	31.828	34.545	*Waste management*
Jasa *outsourching*	14.500	-	*Outsourcing services*
Total	4.100.366	1.464.378	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.280)	(14.446)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**4.050.086**	**1.449.932**	***Net***

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu perjanjian / *b. By contractual period*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	625.432	716.611	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 5 tahun	665.329	160.000	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	2.809.605	587.767	*> 5 years*
Total	4.100.366	1.464.378	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.280)	(14.446)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**4.050.086**	**1.449.932**	***Net***

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak / *c. By contractual remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	490	150.000	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	159.286	285.500	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	1.098.655	441.111	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 tahun	2.841.935	587.767	*> 1 years*
Total	4.100.366	1.464.378	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.280)	(14.446)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**4.050.086**	**1.449.932**	***Net***

d. Berdasarkan hubungan / *d. By relationship*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga	4.100.366	1.464.378	*Third party*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.280)	(14.446)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**4.050.086**	**1.449.932**	***Net***

e. Informasi penting lainnya / *e. Other significant information*

Tingkat bagi hasil pembiayaan dalam Rupiah berkisar antara 4,63% sampai dengan 15,00% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 6,00% sampai dengan 15,00% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

The profit margin rate on financing in Rupiah range from 4.63% to 15.00% per annum for the year ended December 31, 2024 and 6.00% to 15.00% per annum for the year ended December 31, 2023.

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

e. Informasi penting lainnya (lanjutan) / *Other significant information (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:

	December 31/ *December 31*, 2024	December 31/ *December 31*, 2023	
Saldo awal	14.446	-	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan	35.834	14.446	*Provision during the year*
Neto	**50.280**	**14.446**	***Net***

Bank memiliki liabilitas komitmen dan kontinjensi atas pembiayaan *musyarakah* yang belum digunakan sebagai berikut:

The Bank's payables from commitment and contingencies for unused musyarakah financing are as follows:

	December 31/ *December 31*, 2024	December 31/ *December 31*, 2023	
Rupiah			***Rupiah***
Fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang belum digunakan	225.001	151.211	*Unused musyarakah financing facilities*
Neto	**225.001**	**151.211**	***Net***

Sesuai dengan POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 46 ayat 2, fasilitas pembiayaan yang belum digunakan dikecualikan dari penyisihan atas aset produktif.

According to POJK No. 2/POJK.03/2022 concerning the asset quality of Sharia Banks and Sharia Business Units article 46 paragraph 2, unused financing facilities are excluded from the allowance for productive assets.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pembiayaan *musyarakah* telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya pembiayaan.

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover impairment losses from uncollectible financing.

Saldo pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp903.000. Restrukturisasi pembiayaan antara lain dilakukan dengan cara perpanjangan waktu dan penjadwalan kembali.

The balance of financing that has been restructured as of December 31, 2024 is Rp903,000. The restructuring of financing is carried out through methods such as extending the time and rescheduling.

Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan tabungan dan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tabungan dan deposito *mudharabah* yang menjadi agunan pembiayaan sebesar Rp76.475 dan Rp63.375 (Catatan 20).

Musyarakah Financing are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, power of attorney to liquidate mudharabah savings and time deposits, and other collateral accepted by the Bank. As of December 31, 2024 and 2023, mudharabah savings and time deposits which collateralized financing amounting to Rp76,475 and Rp63,375 (Note 20).

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA / *11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS*

31 Desember/*December 31*, 2024

	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Penambahan/ Additions*	*Pengurangan/ Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Renovasi bangunan yang disewa	9.697	-	-	139	9.836	*Leasehold improvements*
Peralatan kantor	9.233	87	(31)	-	9.289	*Office equipment*
Kendaraan	46	-	-	-	46	*Vehicles*
Komputer	14.555	113	(221)	-	14.447	*Computers*
	33.531	200	(252)	139	33.618	
Aset dalam pembangunan	251	109	-	(139)	221	*Construction in progress*
Aset hak guna	44.157	3.752	(2.186)	-	45.723	*Right of use of assets*
Total biaya perolehan	77.939	4.061	(2.438)	-	79.562	***Total cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Renovasi bangunan yang disewa	4.827	1.975	-	-	6.802	*Leasehold improvements*
Peralatan kantor	4.662	1.674	(16)	-	6.320	*Office equipment*
Kendaraan	22	11	-	-	33	*Vehicle*
Komputer	7.305	2.689	(216)	-	9.778	*Computers*
	16.816	6.349	(232)	-	22.933	
Aset hak guna	13.756	10.315	(2.186)	-	21.885	*Right of use of assets*
Total akumulasi penyusutan	30.572	16.664	(2.418)	-	44.818	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku neto	**47.367**				**34.744**	***Net book value***

31 Desember/*December 31*, 2023

	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Penambahan/ Additions*	*Pengurangan/ Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Renovasi bangunan yang disewa	8.886	90	-	721	9.697	*Leasehold improvements*
Peralatan kantor	9.088	109	-	36	9.233	*Office equipment*
Kendaraan	46	-	-	-	46	*Vehicles*
Komputer	13.348	720	(19)	506	14.555	*Computers*
	31.368	919	(19)	1.263	33.531	
Aset dalam pembangunan	525	989	-	(1.263)	251	*Construction in progress*
Aset hak guna	41.844	16.628	(14.315)	-	44.157	*Right of use of assets*
Total biaya perolehan	73.737	18.536	(14.334)	-	77.939	***Total cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Renovasi bangunan yang disewa	2.842	1.985	-	-	4.827	*Leasehold improvements*
Peralatan kantor	3.287	1.375	-	-	4.662	*Office equipment*
Kendaraan	11	11	-	-	22	*Vehicle*
Komputer	5.183	2.132	(10)	-	7.305	*Computers*
	11.323	5.503	(10)	-	16.816	
Aset hak guna	17.237	10.603	(14.084)	-	13.756	*Right of use of assets*
Total akumulasi penyusutan	28.560	16.106	(14.094)	-	30.572	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku neto	**45.177**				**47.367**	***Net book value***

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Aset hak guna per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

Right of use of assets as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan					***Acquisiton cost***
Bangunan	39.815	2.131	-	41.946	*Buildings*
Kendaraan	4.342	1.621	(2.186)	3.777	*Vehicles*
Total biaya perolehan	**44.157**	**3.752**	**(2.186)**	**45.723**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	11.344	8.898	-	20.242	*Buildings*
Kendaraan	2.412	1.417	(2.186)	1.643	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	**13.756**	**10.315**	**(2.186)**	**21.885**	***Total accumulated depreciation***
Nilai tercatat	**30.401**			**23.838**	***Carrying value***

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan					***Acquisiton cost***
Bangunan	37.761	14.716	(12.662)	39.815	*Buildings*
Kendaraan	4.083	1.912	(1.653)	4.342	*Vehicles*
Total biaya perolehan	**41.844**	**16.628**	**(14.315)**	**44.157**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	15.175	8.831	(12.662)	11.344	*Buildings*
Kendaraan	2.062	1.772	(1.422)	2.412	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	**17.237**	**10.603**	**(14.084)**	**13.756**	***Total accumulated depreciation***
Nilai tercatat	**24.607**			**30.401**	***Carrying value***

Aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan kontrak sewa atas gedung kantor dan kendaraan dengan pihak ketiga.

Right of use assets as of December 31, 2024 and 2023 represent lease contracts for office buildings and vehicles with third parties.

Bank melakukan perjanjian sewa aset dengan periode sewa berkisar antara 1 - 3 tahun.

The Bank entered into an asset lease agreement with lease period ranging from 1 - 3 years.

Jumlah beban penyusutan aset tetap dan aset hak guna sebesar Rp16.664 dan Rp16.106 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The depreciation expenses of fixed assets and right of use assets charged to profit and loss amounting to Rp16,664 and Rp16,106 for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank menghapusbukukan aset tetap berupa peralatan kantor dan komputer dengan nilai buku sebesar Rp20 dan Rp9. Bank mengakui kerugian atas penghapusbukuan tersebut pada akun pendapatan non-operasional - neto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank dispose fixed assets of office equipment and computers with book value amounting to Rp20 and Rp9. The Bank recognized loss on that disposal on non-operating income - net account on the statement of profit or loss and other comprehensive income current year.

11. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan aset hak guna selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Nilai bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.846 dan Rp2.055.

Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

Management believes that there is no impairment of fixed assets and right of use assets of the Bank during the year because management believes that the carrying amounts of assets do not exceed the estimated recoverable amount.

As of December 31, 2024 and 2023, the gross value of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp1,846 and Rp2,055, respectively.

Construction in progress as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	**31 Desember/ *December 31, 2024***	
Renovasi bangunan yang disewa	2024	173	*Leasehold improvements*
Peralatan kantor	2024	48	*Office equipment*
Total		221	***Total***

	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	**31 Desember/ *December 31, 2023***	
Renovasi bangunan yang disewa	2024	213	*Leasehold improvements*
Peralatan kantor	2024	38	*Office equipment*
Total		251	***Total***

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah berkisar 10%-95% dan 50%-95%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Central Asia Syariah, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp11.134 dan Rp17.125 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang ada.

The estimated percentage of completion of construction in progress as of December 31, 2024 and 2023 are around 10%-95% and 50%-95%, respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, fixed assets are covered by insurance against losses on fire and other risks with PT Asuransi Central Asia Syariah, a third party, with total coverage amounting to Rp11,134 and Rp17,125, respectively, which management believes is adequate to cover possible losses arising from such risks.

12. ASET TAK BERWUJUD - NETO / *12. INTANGIBLE ASSETS - NET*

	31 Desember/*December 31, 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	***Penambahan/ Additions***	***Pengurangan/ Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Piranti lunak	88.117	300	-	65.330	153.747	*Software*
Aset dalam penyelesaian	35.076	38.728	-	(65.330)	8.474	*Assets under development*
Total biaya perolehan	123.193	39.028	-	-	162.221	***Total cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Piranti lunak	45.854	13.898	-	-	59.752	*Software*
Total akumulasi penyusutan	45.854	13.898	-	-	59.752	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**77.339**				**102.469**	***Net book value***

	31 Desember/*December 31, 2023*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	***Penambahan/ Additions***	***Pengurangan/ Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Piranti lunak	60.756	3.599	-	23.762	88.117	*Software*
Aset dalam penyelesaian	28.672	30.166	-	(23.762)	35.076	*Assets under development*
Total biaya perolehan	89.428	33.765	-	-	123.193	***Total cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Piranti lunak	37.890	7.964	-	-	45.854	*Software*
Total akumulasi penyusutan	37.890	7.964	-	-	45.854	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**51.538**				**77.339**	***Net book value***

Piranti lunak merupakan aplikasi metadata integrasi pelaporan dan lisensi program komputer yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Bank.

Software represent metadata integrated reporting application and license of computer programme which used to support the Bank's operational activities.

Aset dalam penyelesaian merupakan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Bank dalam rangka mendukung kegiatan usaha Bank menjadi Bank digital.

Assets under development represent applications that are being developed by the Bank in order to support the Bank's business activities into a digital bank.

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah berkisar 15%-50% dan 20%-75%.

The estimated percentage of completion of assets under development as of December 31, 2024 and 2023 are around 15%-50% and 20%-75%, respectively.

13. ASET LAIN-LAIN - NETO / *13. OTHER ASSETS - NET*

	31 Desember/ *December 31, 2024*	**31 Desember/ *December 31, 2023***	
Biaya dibayar dimuka	206.266	250.302	*Prepaid expense*
Tagihan ATM	28.743	19.037	*ATM receivables*
Pendapatan yang masih akan diterima	16.005	8.815	*Accrued income*
Setoran jaminan	303	302	*Security deposits*
Pajak dibayar dimuka	-	33.758	*Prepaid tax*
Lain-lain	2.901	4.662	*Others*
Total	**254.218**	**316.876**	***Total***

13. ASET LAIN-LAIN - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, akun pajak dibayar dimuka merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan pasal 25 tahun 2018 yang diajukan ke kantor pajak untuk direstitusi. Pada tahun 2024, Bank telah menerima restitusi atas lebih bayar tersebut (Catatan 15).

Pendapatan yang masih akan diterima terutama berasal dari piutang pendapatan dari investasi pada surat berharga dan piutang *murabahah.*

Aset lain-lain merupakan uang muka atas pembayaran jasa yang diberikan oleh pihak ketiga.

Biaya dibayar dimuka terutama merupakan biaya sewa pemakaian dan jasa pengelolaan piranti lunak, biaya promosi dibayar dimuka dan bonus dibayar dimuka atas rekrutmen pegawai.

Pada tanggal 16 Agustus 2021, Bank melakukan perjanjian dengan PT Orange Inovasi Digital (OID) sehubungan dengan Layanan *Branding* dan Pemasaran. Perjanjian ini di adendum pertama pada tanggal 29 Juli 2022 sehubungan dengan *acquisiton marketing* dan *retention marketing* dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan tanggal 29 Juli 2027. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali addendum dengan addendum terakhir pada tanggal 30 April 2024 atas perubahan ruang lingkup pekerjaan (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat biaya dibayar dimuka sehubungan dengan *acquisiton marketing* dan *retention marketing* dihitung penurunan nilainya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Desmar, Susanto, Salman dan Rekan dalam laporannya masing-masing tanggal 20 Maret 2025 dan 25 Maret 2024 dengan menggunakan pendekatan berbasis pendapatan melalui metode Pendapatan Berlebih (*Excess Earnings Method*).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat neto setelah penurunan nilai biaya dibayar dimuka sehubungan dengan *acquisiton marketing* dan *retention marketing* masing-masing adalah sebesar Rp166.933 dan Rp231.218 yang dicatat sebagai bagian dari biaya dibayar dimuka.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai biaya dibayar dimuka di atas dapat dipulihkan.

13. OTHER ASSETS - NET (continued)

As of December 31, 2023, the prepaid tax account represents overpayment of corporate income tax article 25 for fiscal year 2018 which is submitted to Tax Office for refund. In 2024, the Bank has received the tax refund of such overpayment (Note 15).

Accrued income is mainly due to receivables from investments in marketable securities and murabahah receivables.

Other assets represent advance payment for services provided by third parties.

Prepaid expenses mainly represent rental fees and software management services, prepaid promotions expenses and prepaid bonuses for employee recruitment.

On August 16, 2021, the Bank entered into an agreement with PT Orange Inovasi Digital (OID) regarding Branding and Marketing Services. This agreement was first amended on July 29, 2022, concerning acquisition marketing and retention marketing, with a duration of 5 years until July 29, 2027. The agreement have been several amended several times, most recently by addendum on April 30, 2024, to reflect changes in the scope of work (Note 34).

As of December 31, 2024, and 2023, the carrying amount of prepaid expenses related to acquisition marketing and retention marketing has been tested for impairment by Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, with reports dated March 20, 2025, and March 25, 2024, respectively, using an income-based approach through the Excess Earnings Method.

As of December 31, 2024 and 2023, net carrying amount after impairment losses of prepaid expenses related to the acquisiton marketing and retention marketing amounting to Rp166,933 and Rp231,218, respectively which recorded as part of prepaid expenses.

The management believes that the prepaid expenses above is recoverable.

14. LIABILITAS SEGERA / *14. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Titipan ATM	31.997	69.255	*ATM remittance*
Dana kebajikan	615	584	*Qardhul hasan funds*
Total	**32.612**	**69.839**	***Total***

15. PERPAJAKAN / *15. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Pasal 21	2.296	4.051	*Article 21*
Pasal 4 (2)	4.710	2.615	*Article 4 (2)*
Pasal 23	797	247	*Article 23*
Pajak Pertambahan Nilai	50	60	*Value Added Tax*
Total	**7.853**	**6.973**	***Total***

b. Beban pajak / *b. Taxes expense*

Rekonsiliasi rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran rugi fiskal adalah sebagai berikut:

Reconciliation between loss before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated fiscal loss as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*		
	2024	**2023**	
Rugi sebelum beban pajak	(73.727)	(226.738)	*Loss before tax expense*
Beda temporer			*Temporary differences*
Liabilitas lain-lain	(3.501)	(14.181)	*Other liabilities*
Penyusutan aset tetap	2.052	(165)	*Fixed assets depreciation*
Amortisasi aset tidak berwujud	(10.060)	(9.950)	*Amortization of intangible assets*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif	4.102	(1.528)	*Provision for impairment losses of earning assets*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9.820	3.007	*Employee benefit liabilities*
Penyusutan aset hak guna dan beban bunga liabilitas sewa	(330)	960	*Depreciation of right of use assets and interest expense on lease liabilities*
Beda tetap			*Permanent differences*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	6.708	5.878	*Non-deductible expense*
Liabilitas segera	388	7	*Liabilities due immediately*
Taksiran rugi fiskal	**(64.548)**	**(242.710)**	***Estimated fiscal loss***

15. PERPAJAKAN (lanjutan) / *15. TAXATION (continued)*

b. Beban pajak (lanjutan) / *b. Taxes expense (continued)*

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rangkuman akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:			*Summary of accumulated fiscal losses are as follows:*
Tahun 2024	(64.548)	-	*Year 2024*
Tahun 2023	(242.710)	(242.710)	*Year 2023*
Tahun 2022	(230.875)	(230.875)	*Year 2022*
Tahun 2021	(103.751)	(103.751)	*Year 2021*
Total akumulasi rugi fiskal	**(641.884)**	**(577.336)**	***Total accumulated fiscal losses***

c. Rekonsiliasi tarif pajak efektif / *c. Reconciliation of effective tax rate*

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menerapkan perkalian antara tarif pajak maksimum dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense as computed by applying the maximum tax rate to the loss before tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*		
	2024	**2023**	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(73.727)	(226.738)	*Loss before income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak berdasarkan tarif pajak maksimum yang berlaku	(16.220)	(49.883)	*Tax expense at maximum enacted tax rate*
Pengaruh pajak atas beda tetap	1.561	1.295	*Permanent differences*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	14.659	48.588	*Unrecognized deferred income tax*
Beban pajak	**-**	**-**	***Tax expense***

Perhitungan taksiran pajak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 di atas akan digunakan sebagai dasar pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024.

The calculations of estimated taxable income for the year ended December 31, 2024 above, will be used as the basis for the amounts reported in the Annual Tax Return for 2024.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Bank.

The calculations of income tax for the year ended December 31, 2023 conform to the Bank's Annual Tax Return.

Bank telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menggunakan tarif pajak 22%.

The Bank has calculated its corporate income tax for the year ended December 31, 2024 and 2023 using the tax rate of 22%.

Bank telah menghitung cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024. Pada tanggal 1 Januari 2024 terdapat selisih lebih nilai cadangan per fiskal sebesar Rp692. Sesuai dengan ketentuan di dalam PMK 74, Bank memutuskan untuk mengakui dampak tersebut pada perhitungan pajak penghasilan tahun 2024.

The Bank has calculated the allowance for bad debt in accordance with The Minister of Finance Regulation number 74 of 2024. On January 1, 2024, there is an excess value of reserves value per fiscal amounting to Rp692. In accordance with the provisions in PMK 74, the Bank decided to recognize the impact in the 2024 income tax calculation.

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Rekonsiliasi tarif pajak efektif (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan tahun-tahun selanjutnya.

d. Aset pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan berasal dari perbedaan temporer pengakuan antara pelaporan komersial dan pajak serta rugi fiskal.

Manfaat yang diperoleh dari aset pajak tangguhan yang diakui Bank tergantung pada adanya penghasilan kena pajak yang lebih besar dari pembalikan perbedaan temporer yang bisa dikurangkan pada masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen tidak mengakui aset pajak tangguhan neto yang berasal dari beda temporer dan akumulasi rugi fiskal masing-masing sebesar Rp140.756 dan Rp131.823. Manajemen Bank berkeyakinan belum besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga beda temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat digunakan.

e. Informasi lainnya

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 4 Juli 2019, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. S-0800/WPJ.07/KP.0600/2019 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak untuk tahun pajak 2018. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pada tanggal 24 April 2020, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") lebih bayar sebesar Rp33.758 (Catatan 13) (sebelumnya Bank melaporkan rugi fiskal sebesar Rp115.000) dan SKP kurang bayar atas pajak lainnya sebesar Rp489. Pada tanggal 19 Juni 2024, Bank telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp33.269, setelah dikurangi SKPKB atas pajak lainnya sebesar Rp489.

15. TAXATION (continued)

c. Reconciliation of effective tax rate (continued)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due and subsequent years.

d. Deferred tax assets

Deferred tax assets and liabilities are originated from temporary differences between commercial and tax reporting and fiscal loss.

The utilization of deferred tax assets recognized by the Bank depends on future availability of taxable income against which the deferred tax assets will be realized.

As of December 31, 2024 and 2023, management did not recognize the net deferred tax assets arising from temporary differences and accumulated fiscal losses amounting to Rp140,756 and Rp131,823, respectively. The Bank's management believes that it is not yet very likely that taxable income will be available so that the deductible temporary difference can be used.

e. Other information

Fiscal year 2018

On July 4, 2019, the Bank received a Field Inspection Notification Letter No. S-0800/WPJ.07/KP.0600/2019 regarding field inspections for all taxes for the 2018 fiscal year. From the results of the audit that was carried out, on April 24, 2020 the Bank received an overpayment of Tax Assessment Letter ("SKPLB") amounting to Rp33,758 (Note 13) (previously the Bank reported fiscal loss amounting to Rp115,000) and an underpayment SKP for other taxes amounting to Rp489. On June 19, 2024, the Bank has receipt those tax refund amounting to Rp33,269 after deducted with SKPKB of other taxes amounting to Rp489.

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Informasi lainnya (lanjutan)

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 14 November 2018, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. S2079/WPJ.07/KP.0600/2018 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak untuk tahun pajak 2017. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pada tanggal 14 April 2021, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") pajak penghasilan badan dan pajak lainnya masing-masing sebesar Rp79.541 dan Rp312. Bank memutuskan untuk melakukan keberatan atas SKP pajak penghasilan badan.

Pada tanggal 2 Agustus 2022, Bank menerima surat penolakan keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Bank mengajukan proses banding ke pengadilan pajak pada tanggal 1 November 2022.

Pada tanggal 28 Februari 2024, Pengadilan Pajak telah menerbitkan Keputusan No. PUT-012324.15/2022/PP/M.VB yang mengabulkan seluruh keberatan banding yang diajukan oleh Bank.

Keputusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan karena Bank sebelumnya tidak melakukan pembayaran atau pencadangan atas SKPKB tersebut.

15. TAXATION (continued)

e. Other information (continued)

Fiscal year 2017

On November 14, 2018, the Bank received Field Examination Notification Letter No. S2079/WPJ.07/KP.0600/2018 regarding field examination for all taxes for the 2017 fiscal year. From the results of the audit that was carried out, on April 14, 2021, the Bank received an underpayment of Tax Assessment Letter ("SKPKB") of corporate income tax and other taxes amounting to Rp79,541 and Rp312, respectively. The Bank decided to object to the underpayment SKP of corporate income tax.

On August 2, 2022, the Bank receive rejection letter of objection from the Directorate General of Taxes. Based on those letter, the Bank has submitted the appeal process to the tax court on November 1, 2022.

On February 28, 2024, the Tax Court has issued Decision No. PUT-012324.15/2022/ PP/M.VB to grant all objections to appeal filed by the Bank.

The Tax Court Decision has no impact on the financial statements since the Bank did not previously make any payments or provision on that SKPKB.

16. SIMPANAN *WADIAH*

16. WADIAH DEPOSITS

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	5.073	1	*Third parties*
Total simpanan *wadiah*	**5.073**	**1**	***Total wadiah deposits***

Simpanan *wadiah* merupakan simpanan tabungan dari pihak ketiga dengan akad *wadiah yad-dhamanah* yang akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan Bank.

Wadiah deposits represent wadiah savings deposits from third party in wadiah yad-dhamanah principle which will earn bonus based on the Bank's policy.

17. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA / *17. LIABILITIES TO BANK INDONESIA*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	-	584.248	*Third parties*
Total	**-**	**584.248**	***Total***

Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Bank dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah dengan nilai nominal sebesar Rp617.700 (Catatan 7).

Liabilities to Bank Indonesia as at December 31, 2023 represent Liquidity Management based on Bank Indonesia Sharia Principles ("PaSBI") instrument, which is a funding facility from Bank Indonesia for managing the Bank's liquidity with collateral in the form of securities that comply with sharia principles with nominal value amounting to Rp617,700 (Note 7).

Pada akhir bulan Desember 2023, Bank mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp584.248 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 7,55% per tahun, serta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024. Pada tanggal jatuh tempo, Bank telah melakukan pelunasan atas liabilitas tersebut.

At the end of December 2023, the Bank obtained PaSBI facilites amounting to Rp584,248 with a percentage profit sharing paid by the Bank of 7.55% per annum, and mature on January 24, 2024. On the maturity date, the Bank has made full payment of the liability.

18. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *18. SECURITIES ISSUED*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	600.000	-	*Interbank sharia fund management certificate (SIPA)*
Total	**600.000**	**-**	***Total***

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah untuk mengelola dana antarbank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate (SIPA) is financial instrument issued by sharia bank to manage interbank funds in accordance with sharia principles.

Pada tanggal 20 Desember 2024, 30 Desember 2024, dan 31 Desember 2024, Bank menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA) kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan nominal masing-masing sebesar Rp300.000, Rp200.000, dan Rp100.000 yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 3 Januari 2025, 6 Januari 2025, dan 7 Januari 2025 dengan persentase bagi hasil masing-masing sebesar 6,45%, 6,37%, dan 6,38%. Bank telah melakukan pembayaran atas SIPA tersebut pada saat tanggal jatuh temponya.

On December 20, 2024, December 30, 2024 and December 31, 2024, the Bank issued a Certificate of Fund Management Based on Interbank Sharia Principles (SIPA) to PT Bank Syariah Indonesia Tbk with nominal amounting to Rp300,000, Rp200,000 and Rp100,000 which will mature on January 3, 2025, January 6, 2025 and January 7, 2025 respectively, with profit sharing percentage are 6.45%, 6.37%, and 6.38%, respectively. The bank has made the payment of the SIPA at the time of its maturity date.

19. LIABILITAS LAIN-LAIN / 19. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			***Rupiah***
Angsuran diterima di muka	73.853	-	*Installments received in advance*
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	39.095	41.224	*Accrued expense and others*
Liabilitas sewa	23.530	30.423	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 30)	16.032	8.915	*Employee benefit liabilities (Note 30)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 8)	1.873	2.822	*Estimated losses on commitment and contingencies (Note 8)*
Bagi hasil yang belum didistribusikan	13.030	6.946	*Undistributed revenue sharing*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	510	489	*Accrued expense and others*
Total	**167.923**	**90.819**	***Total***

Analisis jatuh tempo liabilitas lain-lain terkait sewa adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of other liabilities related to lease is as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
1 tahun	32	9.121	*1 year*
2 tahun	10.057	9.235	*2 years*
3 tahun	13.441	8.455	*3 years*
Di atas 3 tahun	-	3.612	*Above 3 years*
Total	**23.530**	**30.423**	***Total***

Biaya yang masih harus dibayar dan lainnya merupakan liabilitas kepada pihak ketiga atau vendor dan akrual atas bonus, tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun dan lainnya.

Accrued expenses and others represents liabilities to third parties or vendor and accruals for bonuses, holiday allowances, year-end allowance, and others.

Akun angsuran diterima dimuka merupakan akumulasi angsuran atas debitur-debitur Taspen yang belum memasuki usia pensiun. Akumulasi angsuran tersebut akan didebit otomatis secara reguler selama masa prapensiun.

The installment received in advance account is the accumulation of installments from Taspen debtors who have not get reached retirement age. This accumulated installment will be automatically debited regularly during the pre-retirement period.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo liabilitas imbalan kerja termasuk liabilitas imbalan kerja lainnya sebesar Rp6.743 sehubungan dengan pelaksanaan program pengurangan jumlah tenaga kerja dan karyawan (Catatan 30).

As of December 31, 2024, employee benefit liabilities balance including other benefit liability amounting to Rp6,743 in connection with the implementation of the workforce reduction program (Note 30).

20. DANA *SYIRKAH* TEMPORER

a. Giro *mudharabah*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga	678	-	*Third parties*
Total	**678**	**-**	***Total***

Giro *mudharabah* merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan akad mudharabah.

Bagi hasil untuk giro *mudharabah* dalam Rupiah berkisar antara 0,10% sampai dengan 0,50% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, giro *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar RpNihil. (Catatan 8, 9, dan 10).

20. *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

a. *Mudharabah demand deposits*

Mudharabah demand deposits from other customer which can be withdrawn at any time based on mudharabah contract.

The annual profit sharing ratio for mudharabah demand deposits in Rupiah ranges from 0.10% to 0.50% per annum for the year ended December 31, 2024.

As of December 31, 2024, mudharabah demand deposits which collateralized murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing amounting to RpNil. (Note 8, 9, and 10).

b. Tabungan *mudharabah*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Bukan bank			*Non bank*
Pihak ketiga	652.830	493.064	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 29)	12.318	17.587	*Related parties (Note29)*
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	65	-	*Third parties*
Total	**665.213**	**510.651**	***Total***

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan nisbah yang disetujui sebelumnya.

Pemilik dana *syirkah* memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi pendapatan.

Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* dalam Rupiah berkisar antara 0,56% sampai dengan 5,68% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 0,91% sampai dengan 5,91% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Bank juga memberikan bonus tambahan bagi nasabah tabungan *mudharabah* dengan nilai bonus sesuai kebijakan Bank.

Mudharabah savings are deposits from other parties which are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such fund based on a predetermined ratio.

The owners of syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and borne loss based on proportion to the total funds. The profit distribution of syirkah funds can be based on profit sharing or revenue sharing concept.

The annual profit sharing ratio for mudharabah savings deposits in Rupiah ranges from 0.56% to 5.68% per annum for the year ended December 31, 2024 and 0.91% to 5.91% per annum for the year ended December 31, 2023. Bank also give additional bonuses for mudharabah savings deposits customers with a bonus value in accordance Bank policy.

20. DANA *SYIRKAH* TEMPORER (lanjutan)

b. Tabungan *mudharabah (lanjutan)*

Pada tanggal 31 Desember 2024, tabungan *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar RpNihil, Rp2.700 dan Rp24.000 (Catatan 8, 9, dan 10).

Pada tanggal 31 Desember 2023, tabungan *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar RpNihil, Rp5.700 dan Rp22.000 (Catatan 8, 9, dan 10).

20. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

b. Mudharabah savings deposits (continued)

As of December 31, 2024, mudharabah savings deposits which collateralized murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing amounting to RpNil, Rp2,700 and Rp24,000, respectively (Note 8, 9, and 10).

As of December 31, 2023, mudharabah savings deposits which collateralized murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing amounting to RpNil, Rp5,700 and Rp22,000, respectively (Note 8, 9, and 10).

c. Deposito *mudharabah*

c. Mudharabah time deposits

i. Berdasarkan mata uang

i. By currency

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
Bukan bank			*Non bank*
Pihak ketiga	4.739.224	2.735.118	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 29)	3.916	9.230	*Related parties (Note 29)*
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	1.000	-	*Third parties*
Total	**4.744.140**	**2.744.348**	***Total***

ii. Berdasarkan jangka waktu kontrak

ii. By contractual period

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	155.250	122.300	*1 month*
1-3 bulan	3.058.859	1.413.330	*1-3 months*
3-6 bulan	604.443	720.236	*3-6 months*
> 6 bulan	925.588	488.482	*> 6 months*
Total	**4.744.140**	**2.744.348**	***Total***

iii. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo sesuai kontrak

iii. By remaining contractual period to maturity

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	2.795.119	1.953.141	*1 month*
1-3 bulan	1.163.899	644.013	*1-3 months*
3-6 bulan	597.179	146.194	*3-6 months*
> 6 bulan	187.943	1.000	*> 6 months*
Total	**4.744.140**	**2.744.348**	***Total***

20. DANA *SYIRKAH* TEMPORER (lanjutan)

c. Deposito *mudharabah* (lanjutan)

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan nisbah yang disetujui sebelumnya.

Bagi hasil untuk deposito berjangka *mudharabah* dalam Rupiah berkisar antara 4,73% sampai dengan 7,81% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 4,56% sampai dengan 5,91% per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Bank juga memberikan bonus tambahan bagi nasabah deposito berjangka *mudharabah* dengan nilai bonus sesuai kebijakan Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024, deposito *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar Rp5.000, Rp47.250 dan Rp52.475 (Catatan 8, 9, dan 10).

Pada tanggal 31 Desember 2023, deposito *mudharabah* yang menjadi agunan piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* masing-masing adalah sebesar Rp42.500, Rp53.450 dan Rp41.375 (Catatan 8, 9, dan 10).

20. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

c. Mudharabah time deposits (continued)

Mudharabah time deposits represent other parties' investment which are entitled to received a share in the income derived by the Bank from the use of such fund based on a predetermined ratio.

The annual profit sharing ratio for mudharabah time deposits in Rupiah ranges from 4.73% to 7.81% per annum for the year ended December 31, 2024 and 4.56% to 5.91% per annum for the year ended December 31, 2023. Bank also give additional bonuses for mudharabah time deposits customers with a bonus value in accordance Bank policy.

As of December 31, 2024, mudharabah time deposits which collateralized murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing amounting to Rp5,000, Rp47,250 and Rp52,475, respectively (Note 8, 9, and 10).

As of December 31, 2023, mudharabah time deposits which collateralized murabahah receivables, funds of qardh and musyarakah financing amounting to Rp42,500, Rp53,450 and Rp41,375, respectively (Note 8, 9, and 10).

21. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL

The compositions of the Bank's shareholders as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Nama pemegang saham	31 Desember/*December 31, 2024*			*Name of shareholder*
	Total saham/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	
PT Aladin Global Ventures	7.591.658.246	54,54%	759.166	*PT Aladin Global Ventures*
Masyarakat	6.326.818.571	45,46%	632.682	*Public*
	13.918.476.817	**100,00%**	**1.391.848**	

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

21. SHARE CAPITAL (continued)

The compositions of the Bank's shareholders as of December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

Nama pemegang saham	31 Desember/*December 31, 2023* Total saham/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	*Name of shareholder*
PT Aladin Global Ventures	7.759.230.746	55,75%	775.923	*PT Aladin Global Ventures*
Masyarakat	6.159.148.771	44,25%	615.915	*Public*
	13.918.379.517	**100,00%**	**1.391.838**	

Dana setoran modal

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, mutasi dana setoran modal Bank adalah sebagai berikut:

Capital deposit funds

As of December 31, 2024 and 2023, the movement of Bank's capital deposit funds are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Saldo awal	1.512.501	1.363.862	*Beginning balance*
Penambahan modal dari pemegang saham pengendali	123.000	152.500	*Additional capital from ultimate shareholder*
Pelaksanaan Waran I	1	(3.861)	*Warrants I exercise*
Saldo akhir	**1.635.502**	**1.512.501**	***Ending balance***

Untuk memperkuat struktur permodalan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah menerima dana setoran modal dari PT Aladin Global Venture masing-masing sebesar Rp123.000 dan Rp152.500.

To strengthen the capital structure during year ended December 31, 2024 and 2023, the Bank receipt capital deposit funds from PT Aladin Global Ventures amounting to Rp123,000 and Rp152,500, respectively.

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank telah melaksanakan aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) kepada PT BNC Technologies Ventures dengan penerbitan saham baru 850.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp1.400 (nilai penuh) untuk memperkuat struktur permodalan Bank. Bank telah menerima penambahan modal tersebut dengan nilai sebesar Rp1.190.000 pada tanggal tersebut. Pada tanggal 30 Desember 2022, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

On December 29, 2022, the Bank carried out a corporate action to increase capital without pre-emptive right (PMTHMETD) to PT BNC Technologies Ventures by issuing 850,000,000 new shares with a nominal value of Rp100 (full amount) with an exercise price of Rp1,400 (full amount) to strengthen the Bank's capital structure. The Bank has received those additional capital amounting to Rp1,190,000 on that date. As of December 30, 2022, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

PMTHMETD tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 32 tanggal 17 Januari 2023 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 tanggal 19 Januari 2023.

PMTHMETD has been notarited on Deed No. 32 dated January 17, 2023 of Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008480 dated January 19, 2023.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dana setoran modal (lanjutan)

Komposisi pemegang saham setelah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Total saham/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Modal disetor/ *Paid capital*	*Name of shareholder*
PT Aladin Global Ventures	7.865.630.746	53,67%	786.563	*PT Aladin Global Ventures*
PT BNC Technologies Ventures	850.000.000	5,80%	85.000	*PT BNC Technologies Ventures*
Masyarakat	5.939.986.855	40,53%	593.999	*Public*
	14.655.617.601	**100,00%**	**1.465.562**	

Bank telah mengomunikasikan penambahan dana setoran modal dari PMTHMETD tersebut kepada OJK. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bank masih menunggu persetujuan OJK atas penambahan modal dari PMTHMETD tersebut.

Waran I

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, mutasi waran I adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		
	Lembar waran (nilai penuh)/ *Warrants (full amounts)*	Nilai nominal/ *Nominal amounts*	Lembar waran (nilai penuh)/ *Warrants (full amounts)*	Nilai nominal/ *Nominal amounts*	
Total eksekusi waran I	221.160.240	24.327	221.053.392	24.316	*Total executed warrants I*
Reklasifikasi ke modal saham	(221.140.192)	(22.114)	(221.042.892)	(22.104)	*Reclassified as share capital*
Reklasifikasi ke tambahan modal disetor (agio saham)	-	(2.211)	-	(2.210)	*Reclassified as share additional paid-in-capital (shares premium)*
Waran I yang dicatat sebagai dana setoran modal	**20.048**	**2**	**10.500**	**2**	***Warrants I which recorded as capital deposits funds***

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sisa waran yang telah dieksekusi namun belum diaktakan masing-masing sebesar 20.048 waran (nilai eksekusi sebesar Rp1) dan 10.500 waran (nilai eksekusi sebesar Rp1).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 8 November 2021 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0470683 tanggal 8 November 2021 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 48.281.804 saham atau Rp4.828.180.400 (nilai penuh).

21. SHARE CAPITAL (continued)

Capital deposit funds (continued)

The composition of shareholders after PMTHMETD are as follows:

The Bank has communicated the capital deposit funds from PMTHMETD to OJK. Until the completion date of the financial statements, the Bank is still waiting OJK approval for those additional capital from PMTHMETD.

Warrants I

As of December 31, 2024 and 2023, the movements of warrants I are as follows:

Until December 31, 2024 and 2023, the remaining warrants that have been executes but not yet notarize of 20,048 warrants (executed amount of Rp1) and 10,500 warrants (executed amount of Rp1), respectively.

Based on Deed of Shareholder Decision Statement No. 36 dated November 8, 2021 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta and has been accepted and recorded in the Administrative System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0470683 dated November 8, 2021, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into the shares of 48,281,804 shares or Rp4,828,180,400 (full amount).

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Waran I (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 19 Januari 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061046 tanggal 27 Januari 2022, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 24.405.460 saham atau Rp2.440.546.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 8 Maret 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0156976 tanggal 10 Maret 2022 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 478.400 saham atau Rp47.840.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 15 Juni 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0251353 tanggal 16 Juni 2022 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 7.700 saham atau Rp770.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Akta No. 94 tanggal 20 Juni 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252875 tanggal 20 Juni 2022 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/ disetor Bank dari Rp1.326.624.592.400 (nilai penuh) menjadi Rp1.377.050.998.900 (nilai penuh) peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) menjadi saham sebanyak 504.264.065 saham atau Rp50.426.406.500 (nilai penuh).

21. SHARE CAPITAL (continued)

Warrants I (continued)

Based on the Deed No. 25 dated January 19, 2022 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and has been accepted and recorded in the Administrative System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061046 dated January 27, 2022, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into shares of 24,405,460 shares or Rp2,440.546.000 (full amount).

Based on Deed No. 18 dated March 8, 2022 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0156976 dated March 10, 2022, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into the of 478,400 shares or Rp47,840,000 (full amount).

Based on Deed No. 79 dated June 15, 2022 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0251353 dated June 16, 2022 the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank due to the exercise of warrants into shares totaling 7,700 shares or Rp770,000 (full amount).

Based on Deed No. 94 dated June 20, 2022 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252875 dated June 20, 2022, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital from Rp1,326,624,592,400 (full amount) to Rp1,377,050,998,900 (full amount) the increase is in connection with the implementation of the corporate action of Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) into shares as many as 504,264,065 shares or Rp50,426,406,500 (full amount).

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Waran I (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 16 Januari 2023 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008011 tanggal 17 Januari 2023 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dari Rp1.377.050.998.900 (nilai penuh) menjadi Rp1.380.561.760.100 (nilai penuh) peningkatan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 35.107.612 saham atau Rp3.510.761.200 (nilai penuh).

Berdasarkan Akta No. 81 tanggal 24 Juni 2024 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0155601 tanggal 24 Juni 2024 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 97.300 saham atau Rp9.730.000 (nilai penuh).

Tambahan modal disetor

Berdasarkan Akta No. 82 tanggal 20 Desember 2023 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0159560 tanggal 20 Desember 2023 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 112.761.916 saham atau Rp11.276.191.600 (nilai penuh). Penambahan modal ini meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dari Rp1.380.561.760.100 (nilai penuh) menjadi Rp1.391.837.951.700 (nilai penuh).

Berdasarkan Akta No. 81 tanggal 24 Juni 2024 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0155601 tanggal 24 Juni 2024 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dengan adanya pelaksanaan waran menjadi saham sebanyak 97.300 saham atau Rp9.730.000 (nilai penuh). Penambahan modal ini meningkatkan modal ditempatkan/disetor Bank dari Rp1.391.837.951.700 (nilai penuh) menjadi Rp1.391.847.681.700 (nilai penuh).

21. SHARE CAPITAL (continued)

Warrants I (continued)

Based on Deed No. 28 dated January 16, 2023 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0008011 dated January 17, 2023 the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank from Rp1,377,050,998,900 (full amount) to Rp1,380,561,760,100 (full amount) the increase was in connection with the exercise of warrants into shares of 35,107,612 shares or Rp3,510,761,200 (full amount).

Based on Deed No. 81 dated June 24, 2024 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0155601 dated June 24, 2024, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank with the exercise of warrants into shares totaling 97,300 shares or Rp9,730,000 (full amount).

Additional paid-in capital

Based on Deed No. 82 dated December 20, 2023 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0159560 dated December 20, 2023, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank with the exercise of warrants into shares totaling 112,761,916 shares or Rp11,276,191,600 (full amount). This additional shares capital increase the issued/paid-up capital of the Bank from Rp1,380,561,760,100 (full amount) to Rp1,391,837,951,700 (full amount).

Based on Deed No. 81 dated June 24, 2024 drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0155601 dated June 24, 2024, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Bank with the exercise of warrants into shares totaling 97,300 shares or Rp9,730,000 (full amount). This additional shares capital increase the issued/paid-up capital of the Bank from Rp1,391,837,951,700 (full amount) to Rp1,391,847,681,700 (full amount).

21. MODAL SAHAM (lanjutan) / *21. SHARE CAPITAL (continued)*

Tambahan modal disetor (lanjutan) / *Additional paid-in capital (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: / *As of December 31, 2024 and 2023, additional paid-in capital are as follows:*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Agio saham	965.669	964.190	*Shares premium*
Pelaksanaan Waran I	1	1.479	*Warrants I exercise*
Total	**965.670**	**965.669**	***Total***

22. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB* / *22. INCOME FROM FUND MANAGED BY BANK AS MUDHARIB*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pendapatan dari jual beli, bagi hasil dan ujrah			***Income from margin, profit sharing and ujrah***
Pendapatan marjin *murabahah*	16.835	97.609	*Murabahah margin income*
Pendapatan ujrah *qardh*	75.719	76.814	*Qardh ujrah income*
Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	353.515	26.633	*Musyarakah profit sharing income*
	446.069	201.056	
Pendapatan usaha utama lainnya			***Other main operating income***
Pendapatan dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	103.141	78.580	*Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Pendapatan dari Sukuk Negara	31.168	39.023	*Income from Government Sukuk*
Pendapatan dari Sukuk Bank Indonesia	19.031	9.998	*Income from Sukuk Bank Indonesia*
Pendapatan Fasilitas Simpanan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA)	6.349	1.102	*Income from Sharia Principle based fund Management (SIPA)*
Pendapatan dari Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	5.771	3.778	*Income from Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Pendapatan dari giro Bank Indonesia	1.880	931	*Income from current accounts with Bank Indonesia*
Pendapatan dari simpanan *mudharabah pada* bank lain	33	34	*Income from mudharabah saving in other Banks*
	167.373	133.446	
Total	**613.442**	**334.502**	***Total***

23. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH* TEMPORER

23. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Deposito *mudharabah*	285.823	96.441	*Mudharabah time deposits*
Tabungan *mudharabah*	12.966	5.647	*Mudharabah savings deposits*
Bank			***Bank***
Deposito *mudharabah*	135	-	*Mudharabah time deposits*
Surat berharga yang diterbitkan	9.877	18.959	*Securities issued*
Total	**308.801**	**121.047**	***Total***

Termasuk dalam hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagi hasil dana syirkah temporer yang berasal dari pihak-pihak berelasi dengan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp380 dan Rp312 (Catatan 29).

Third parties' share on return of temporary syirkah funds includes temporary syirkah funds from related parties for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp380 and Rp312, respectively (Note 29).

24. PENDAPATAN IMBALAN JASA PERBANKAN

24. FEE BASED INCOME FROM BANKING SERVICES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pendapatan administrasi pembiayaan	87.682	2.479	*Income from financing administration*
Pendapatan transaksi perbankan	66.860	30.168	*Income from banking transactions*
Lain-lain	201	87	*Others*
Total	**154.743**	**32.734**	***Total***

25. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF

25. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING ASSETS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pembiayaan *musyarakah*	35.834	14.446	*Musyarakah financing*
Investasi pada surat berharga	5.605	3.776	*Investment in marketable securities*
Giro pada bank lain	(124)	117	*Current accounts in other banks*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(949)	1.070	*Estimated losses on commitment and contingencies*
Pinjaman *qardh*	(1.739)	2.673	*Funds of qardh*
Piutang *murabahah*	(18.079)	(6.358)	*Murabahah receivables*
Total	**20.548**	**15.724**	***Total***

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Transfer antarbank	75.834	39.574	*Interbank transfer*
Jasa tenaga ahli	57.358	54.084	*Professional service*
Komunikasi	23.432	19.931	*Communication*
Premi penjaminan simpanan	10.143	2.215	*Deposit guarantee premium*
Sewa gedung dan peralatan	4.909	5.603	*Office and equipment rent*
Asuransi	3.400	70	*Insurance*
Pemeliharaan	2.207	4.197	*Maintenance*
Transportasi dan perjalanan dinas	1.697	1.904	*Transportation and travel*
Kartu debit	1.038	4.347	*Debit card*
Pengiriman kartu	1.044	3.470	*Card delivery*
Listrik dan air	905	945	*Electricity and water*
Perlengkapan kantor	404	544	*Office supplies*
Lain-lain	8.363	783	*Others*
Total	**190.734**	**137.667**	***Total***

27. GAJI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN / *27. SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Gaji dan upah	126.657	121.033	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	74.832	67.464	*Employee allowances*
Pendidikan dan pelatihan	3.714	5.754	*Education and training*
Total	**205.203**	**194.251**	***Total***

28. BEBAN OPERASIONAL LAIN-LAIN / *28. OTHER OPERATING EXPENSES*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beban operasional lain-lain terutama berasal dari beban *outsourcing*, beban pajak, beban CSR, dan beban liabilitas sewa.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, other operating expenses mainly consist of expenses for outsourcing, tax expenses, CSR expenses, and rent liability expenses.

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi, karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties due to the relationship of ownership and/or management. All transactions with related parties were made according to the mutually agreed policies and terms.

Pihak berelasi/*Related parties*	***Sifat dari hubungan/Relationship:***
John Dharma J. Kusuma	Pemegang saham utama/*Ultimate shareholder*
PT Aladin Global Ventures	Pemegang saham pengendali/*Controlling shareholder*
Komisaris, Direksi, Pemimpin Grup dan Pemimpin Divisi/*Commissioners, Directors, Group Head and Division Head.*	Manajemen kunci/*Key management*

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Pembiayaan			**Financing**
Piutang *murabahah* (Catatan 8)			*Murabahah receivables (Note 8)*
Manajemen kunci	24	81	*Key management*
Persentase terhadap total piutang *murabahah*, pinjaman *qardh* pembiayaan *musyarakah*	0,001%	0,003%	*Percentage to total murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing*
Dana *syirkah* temporer			***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah* (Catatan 20)			*Mudharabah savings deposits (Note 20)*
Pemegang saham utama	8.446	8.377	*Ultimate shareholder*
Pemegang saham pengendali	67	65	*Controlling shareholder*
Manajemen kunci	3.805	9.145	*Key management*
	12.318	17.587	
Deposito *mudharabah* (Catatan 20)			*Mudharabah time deposits (Note 20)*
Manajemen kunci	3.916	9.230	*Key management*
	16.234	26.817	
Persentase terhadap dana *syirkah* temporer	0,30%	0,82%	*Percentage to total temporary syirkah funds*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban			***Expenses***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah temporer* (Catatan 23)	380	312	*Third parties' share on return of temporary syirkah funds (Note 23)*
Persentase terhadap total Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah temporer*	0,12%	0,26%	*Percentage to total third parties' share on return of temporary syirkah funds*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

30. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

Employee benefit obligations consist as follows:

	2024	**2023**	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9.289	8.915	*Post-employment benefits liability*
Liabilitas imbalan kerja lainnya (Catatan 38)	6.743	-	*Other benefits liability (Note 38)*
	16.032	**8.915**	

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Bank menerapkan kebijakan program imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 6/2023 ("Cipta Kerja-CK") dan Peraturan Perusahaan. Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dalam laporannya masing-masing No. 1188/MR-FA-PSAK219-BANK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan No. 0868/ST-FA-PSAK24-BANK/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

30. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

The Bank implements post-employment benefit program policy in accordance with the Indonesian Law No. 6/2023 ("Job Creation-JC") and Company Regulation. The post-employment benefits obligation is calculated based on actuarial calculations made by Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits for the year ended December 31, 2024 and 2023, with reports No. 1188/MR-FA-PSAK219-BANK/I/2025 dated January 13, 2025 and No. 0868/ST-FA-PSAK24-BANK/I/2024 dated January 31, 2024.

The actuarial valuation was carried out using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Tingkat diskonto	7,10%	6,80%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	*Rate of salary increase*
Tingkat mortalita	TMI 2019	TMI 2019	*Mortaility rate*
Tingkat cacat	10% TMI 2019	10% TMI 2019	*Disability rate*
Usia pensiun normal	56	56	*Normal retirement age*

Berikut ini merupakan komponen-komponen beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following are the components of employee benefits expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the post-employment benefits liability recognized in the statement of financial position as of December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja awal tahun	8.915	7.950	*Present value of post-employment benefits liability beginning of the year*
Beban tahun berjalan	4.490	3.442	*Expense in current year*
Keuntungan aktuarial	(2.703)	(2.041)	*Actuarial gain*
Pembayaran manfaat	(1.363)	(219)	*Payment of benefits*
Kelebihan pembayaran	(50)	(217)	*Excess benefit paid*
Nilai kini liabilitas imbalan Kerja	**9.289**	**8.915**	***Present value of post-employment benefits liability***

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*		
	2024	**2023**	
Beban imbalan kerja:			*Employees' benefits expense:*
Beban jasa kini	3.871	4.618	*Current service cost*
Perubahan imbalan	-	(1.835)	*Changes in benefits*
Beban jasa lalu	569	442	*Past service cost*
Kelebihan pembayaran	50	217	*Excess benefit paid*
Beban imbalan kerja - neto	**4.490**	**3.442**	***Employee benefits expense - net***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Pengukuran kembali keuntungan di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Saldo awal	4.761	2.720	*Beginning balance*
Keuntungan aktuarial	2.703	2.041	*Actuarial gain*
Saldo akhir	**7.464**	**4.761**	***Ending balance***

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini liabilitas imbalan kerja diakhir tahun pelaporan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 16 tahun.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja karyawan: (tidak diaudit)

	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Kenaikan tingkat diskonto 1%	(8.388)	(8.061)	*Increase in discount rate by 1%*
Penurunan tingkat diskonto 1%	10.329	9.901	*Decrease in discount rate by 1%*
Kenaikan tingkat kenaikan gaji 1%	10.645	10.522	*Increase in salary increase rate by 1%*
Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%	(8.118)	(7.844)	*Decrease in salary increase rate by 1%*

Jatuh tempo kewajiban imbalan manfaat pasti adalah sebagai berikut (tidak diskonto): (tidak diaudit):

	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	133	1.105	*Within the next 12 months*
Diantara 1-2 tahun	188	169	*Between 1-2 years*
Diantara 2-5 tahun	6.036	3.554	*Between 2-5 years*
Diatas 5 tahun	195.235	223.564	*Beyond 5 years*
Total	**201.592**	**228.392**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank membukukan liabilitas imbalan kerja lainnya sebesar Rp6.743 sehubungan dengan pelaksanaan program pengurangan jumlah tenaga kerja dan karyawan (Catatan 38).

30. *POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)*

Remeasurement of gain in other comprehensive income are as follows:

The weighted average duration of present value of benefit obligation at the end of reporting year December 31, 2024 and 2023 is 16 years, respectively.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change at 1% change in discount rate and salary rate with all other variables held constant of the present value of the post-employment benefit liabilities: (unaudited)

The maturity profile of defined benefit obligation is as follows (undiscounted): (unaudited)

As of December 31, 2024, the bank has recorded other employee benefit liabilities amounting to Rp6,743 in connection with the implementation of the workforce reduction program (Note 38).

31. DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan merupakan penerimaan pendapatan denda dari nasabah dan pendapatan dari transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp386 dan Rp7.

31. *QARDHUL HASAN FUNDS*

Qardhul hasan funds represents penalty from customers and income from sharia transactions that are not fulfilled by the terms and limitations (pillars and/or conditions) for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp386 and Rp7, respectively.

32. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam setiap menjalankan kegiatan usaha. Bank menerapkan fungsi manajemen risiko secara independen sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan *Regulator* serta *best practices* yang diterapkan oleh perbankan berlandaskan prinsip syariah.

Tata Kelola Manajemen Risiko

Misi Bank dalam manajemen risiko adalah mempersiapkan kerangka dan metodologi yang sesuai untuk pengelolaan risiko secara efektif di Bank. Tujuan pengelolaan risiko mencakup pengembangan pendekatan dan metodologi baku dalam mengelola risiko di Bank, mempertegas struktur fungsional termasuk tujuan, peran dan tanggung jawab, serta menumbuhkan budaya sadar akan risiko di Bank secara keseluruhan.

Penerapan manajemen risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui strategi dan kebijakan manajemen risiko. Guna mendukung efektivitas pemantauan risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta eksposur risiko.

Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan strategi dan kebijakan manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, mengembangkan budaya manajemen risiko, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait serta memastikan fungsi manajemen risiko dilakukan secara independen.

Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tingkat Direksi untuk memantau pengembangan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi masalah penting terkait risiko.

Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank.

32. *RISK MANAGEMENT*

Risk management is an important aspect of any business activities of the Bank. The Bank implements an independent risk management function in accordance with Regulators as well as best practices for sharia-based banking.

Risk Management Governance

The Bank's mission on risk management is to provide the appropriate frameworks and methodologies for the effective risk management in the Bank. The objectives of managing risk are to establish standard approach and methodology in managing risks across the Bank, to clarify functional structure including objectives, roles and responsibilities and to cultivate a risk-awareness culture throughout the Bank.

Implementation of risk management involves active oversight by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Board of Sharia Supervisory.

The Board of Commissioners is responsible for approving and evaluating risk management strategy and policy. To support effective oversight, the Board of Commissioners has formed the Oversight Risk Management Committee (ORMC) responsible for overseeing the implementation of risk management strategy, policies and risk exposures.

The Board of Commissioners delegates authority to the Board of Directors to implement the risk management strategy and policies. The Board of Directors is responsible for formulating risk management strategy and policy, developing a risk management culture, ensuring continuing competence enhancement of related risk personnel, and ensuring the independent function of risk management.

The Risk Management Committee is established at the Board of Directors level for overseeing the development of risk strategy, policy and reviewing the major risk issues.

Sharia Supervisory Board conduct compliance evaluation of the Sharia Principles in Bank's business activities.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Tata Kelola Manajemen Risiko (lanjutan)

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan risiko, Bank telah membentuk Unit Manajemen Risiko untuk memonitor risiko di Bank secara keseluruhan, terpisah dari *Risk Taking Unit* dan Audit Internal.

Unit Bisnis merupakan *Risk Taking Unit* yang bertanggung jawab mengelola risiko secara keseluruhan dalam ruang lingkup tanggung jawab mereka. Unit tersebut harus secara jelas mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol, dan menetapkan mitigasi yang tepat sebelum memasuki setiap aktivitas yang mengandung risiko.

Audit internal akan memberikan penilaian terhadap kecukupan kontrol internal, struktur organisasi dan garis tanggung jawab, dan juga kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan internal Bank serta prinsip syariah.

Profil risiko

a. Pengelolaan risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, originasi dan persetujuan pembiayaan, penetapan harga, pemantauan nasabah, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan manajemen portofolio.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko kredit dan mempertahankan kualitas aset yang baik, Bank melakukan *monitoring* ketat terhadap kinerja portofolio pembiayaan termasuk deteksi awal dan usaha-usaha penagihan pembiayaan bermasalah.

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Governance (continued)

To undertake the risk management function, the Bank has formed the Risk Management Unit to monitor risks across the Bank, the unit is an independent function set apart from Risk Taking Unit and Internal Audit.

Business Unit is Risk Taking Unit which is responsible to manage the risk end to end within their areas of responsibility. They must clearly identify, measure, monitor, control and have mitigations to manage risk before embarking on any risk taking activity.

Internal Audit will provide reasonable assurance of appropriateness of internal controls, organization structure, and reporting lines and also compliance with prevailing law, regulations, and internal policies of the Bank as well as sharia principles.

Risk profile

a. Credit risk management

Credit risk is the risk of loss resulting from the defaulting obligor or counterparty in fulfilling their obligations. Credit risk is managed both at the transaction and portfolio levels and through established policies and procedures covering financing acceptance criteria, financing origination and approval, pricing, account monitoring, problem loan management, and portfolio management.

To increase the effectiveness of credit risk management and to maintain the good asset quality, the Bank closely monitors financing portfolio performance including early detection and collection effort of problematic financing.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

32. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Profil risiko (lanjutan)

Risk profile (continued)

a. Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk management (continued)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan *(on-statement of financial position)* dan rekening administratif *(off-balance sheet*) tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

The following table presents the maximum exposure to credit risk of on-statement of financial position and off-balance sheet financial instruments without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	2.200.176	2.176.610	*Current accounts and Placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.169	13.488	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	2.094.295	1.409.892	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	44.692	814.569	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	603.995	823.362	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	4.100.366	1.464.378	*Musyarakah Financing*
Aset lain-lain*)	16.308	9.117	*Other assets**)
	9.061.001	6.711.416	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.272)	(52.774)	*Less: Allowance for Impairment losses*
Total	**8.986.729**	**6.658.642**	***Total***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

*) *Other assets consist of accrued income and security deposits*

Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collaterals and other credit risk mitigations are as follows:

a. Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain piutang menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

a. The carrying amount of Bank's financial assets other than receivable represent the maximum exposure of credit risk.

b. Untuk piutang, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit.

b. For receivables, the Bank uses collaterals to minimize the credit risk.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

32. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Profil risiko (lanjutan)

Risk profile (continued)

a. Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk management (continued)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kategori portofolio adalah sebagai berikut:

The disclosure on the maximum credit risk concentration by portfolio category are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Pemerintah/ *Government*	**Lembaga keuangan/ *Financial institution***	**Lainnya/ *Others***	**Total/ *Total***	
Laporan posisi keuangan					***Financial assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.200.176	-	-	2.200.176	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain		1.169	-	1.169	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	880.825	225.000	988.470	2.094.295	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	-	-	44.692	44.692	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	-	-	603.995	603.995	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	-	-	4.100.366	4.100.366	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	7.210	8.431	667	16.308	*Other assets*)*
	3.088.211	234.600	5.738.190	9.061.001	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai				(74.272)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto				**8.986.729**	***Net***

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Pemerintah/ *Government*	**Lembaga keuangan/ *Financial institution***	**Lainnya/ *Others***	**Total/ *Total***	
Laporan posisi keuangan					***Financial assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.176.610	-	-	2.176.610	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	13.488	-	13.488	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	756.867	325.000	328.025	1.409.892	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	-	-	814.569	814.569	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	-	-	823.362	823.362	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	-	-	1.464.378	1.464.378	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	6.651	952	1.514	9.117	*Other assets*)*
	2.940.128	339.440	3.431.848	6.711.416	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai				(52.774)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto				**6.658.642**	***Net***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

*) *Other assets consist of accrued income and security deposits*

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

32. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Profil risiko (lanjutan)

Risk profile (continued)

a. Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk management (continued)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kategori portofolio adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The disclosure on the maximum credit risk concentration by portfolio category are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*	**Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/*Impaired***	**Total/*Total***	
Laporan posisi keuangan					***Financial assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.200.176	-	-	2.200.176	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.169	-	-	1.169	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	2.094.295	-	-	2.094.295	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	44.671	21	-	44.692	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	597.625	4.527	1.843	603.995	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	4.099.976	390	-	4.100.366	*Financing musyarakah*
Aset lain-lain*)	16.308	-	-	16.308	*Other assets**)
	9.054.220	4.938	1.843	9.061.001	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(73.741)	(252)	(279)	(74.272)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**8.980.479**	**4.686**	**1.564**	**8.986.729**	***Net***

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*	**Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/*Impaired***	**Total/*Total***	
Laporan posisi keuangan					***Financial assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.176.610	-	-	2.176.610	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	13.488	-	-	13.488	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	1.409.892	-	-	1.409.892	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	814.569	-	-	814.569	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	823.362	-	-	823.362	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	1.464.378	-	-	1.464.378	*Financing musyarakah*
Aset lain-lain*)	9.117	-	-	9.117	*Other assets**)
	6.711.416	-	-	6.711.416	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.774)	-	-	(52.774)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**6.658.642**	-	-	**6.658.642**	***Net***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

*) *Other assets consist of accrued income and security deposits*

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

a. Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini, adalah:

1. Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit.

2. Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten.

3. Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai, Tim *Collection* dengan sistem yang mendukung, serta pembukuan pencadangan kerugian atas kemungkinan pembiayaan bermasalah berupa PPAP dan/atau CKPN sesuai dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan.

4. Bank menetapkan batas kredit, termasuk BMPD, *financing lines*, wewenang pemutus pembiayaan dan portofolio berdasarkan sektor ekonomi guna mengelola risiko kredit.

b. Pengelolaan risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank *(adverse movement)*. Faktor pasar adalah suku bunga (imbal hasil) dan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Bank baik di *banking books* maupun di *trading books*.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* oleh Bank.

32. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Risk profile (continued)

a. Credit risk management (continued)

Some mitigations taken to manage and mitigate this risk are:

1. *The Bank has established and implemented credit risk management governance, framework, processes and controls.*

2. *The Bank has and consistently implemented Credit Policies and Procedures, Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria, and Credit Committee.*

3. *Having well-documented standard procedures and infrastructure related to the financing process, including adequate financing procedures, Collection Team with a supporting system, provisions booking for losses of non performing financing in the form of PPAP and/or CKPN in accordance with the financing agreement.*

4. *Banks determine credit limits, including BMPD, financing lines, financing decision authority and portfolios based on economic sectors to manage credit risk.*

b. Market risk management

Market risk is the risk arising from movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables are defined as interest rates (rate of return risk) and exchange rates. Market risk is inherent in most of the Bank's operating positions and activities, in the banking books and in the trading books.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to measure and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

b. Pengelolaan risiko pasar (lanjutan)

1. Menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian risiko pasar.
2. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur *Treasury* serta *Risk Appetite Framework*.
3. Menerapkan strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank antara lain melalui *Asset and Liabilities Management* dan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).
4. Melakukan pemantauan dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar, serta limitasi risiko pasar.
5. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja bank.
6. Melakukan pemantauan dan pengukuran risiko pasar termasuk pemantauan limit *dealer* (limit utilisasi dan batas kerugian transaksi) yang dijalankan oleh *Treasury*.
7. Melakukan perhitungan *stress test* risiko pasar secara berkala.

c. Pengelolaan risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi Bank yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya Bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

b. Market risk management (continued)

1. *To implement market risk governance framework, process and control.*
2. *To implement Treasury Policy and Procedure and Risk Appetite Framework.*
3. *To implement Bank's asset and liabilities strategy i.e. through Asset and Liabilities Management and Asset and Liabilities Committees (ALCO).*
4. *To conduct regular monitoring and assessment of market price changes trends, the possibilities of market pressure and market risk limitations.*
5. *To monitor the volatility of margin levels in the market and analyzing its impact on Bank's performance.*
6. *To conduct regular monitoring and assessment of market risk i.e. dealer limit monitoring (utilization limit and cut loss transaction limit) performed by Treasury.*
7. *To conduct regular market risk stress testing.*

c. Liquidity risk management

Liquidity risk is a risk caused among others by the inability of the Bank to meet its obligation associated with financial liabilities at due date, from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's activities and financial condition.

Liquidity risk is one of major concerns for the Bank that must be managed on an on-going basis.

Liquidity risk arises when there is a timing difference between the maturity of the Bank's liabilities and receivable/financing. This is due to the short-term nature of the funds obtained by the Bank whereas the Bank uses these funds to finance financing granted to customers which are usually for a longer period of time.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

c. Pengelolaan risiko likuiditas (lanjutan)

Likuiditas dikelola dan dimonitor berdasarkan arus kas untuk memastikan kecukupan sumber dana dalam memenuhi liabilitas keuangan dan kewajiban regulator berdasarkan normal bisnis proses dan skenario *stress*. Analisis kesenjangan likuiditas dan *monitoring* terhadap indikator likuiditas telah diterapkan untuk memberikan informasi tambahan dalam mengelola posisi risiko likuiditas. Sumber dana terdiversifikasi untuk meminimalkan konsentrasi pendanaan. Rencana pendanaan darurat likuiditas telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Profil sisa umur aset dan liabilitas Bank berdasarkan perjanjian dengan nasabah/pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

c. Liquidity risk management (continued)

Liquidity is managed and monitored on a cash flow basis to ensure that sufficient sources of funding is available to meet financial and regulatory obligations under business-as-usual (BAU) and stress scenarios. Liquidity gap analysis and monitoring on liquidity indicators have been implemented to serve as supplementary information in managing liquidity risk position. Sources of funding are diversified to minimize funding concentration. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

The maturity profiles of the Bank's assets and liabilities based on contractual agreements with customers/counterparties as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/*December* 2024							
	Total	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 - 3 bulan/ *More than 1 - 3 month*	Lebih dari 3 - 6 bulan/ *More than 3 - 6 month*	Lebih dari 6 - 12 bulan/ *More than 6 - 12 month*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 month*	Tidak memiliki kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	
Aset								***Assets***
Kas	233	233	-	-	-	-	-	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.200.176	2.200.176	-	-	-	-	-	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.169	1.169	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	2.094.295	225.000	263.935	160.000	383.360	148.854	913.146	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	44.692	12	21.506	479	868	21.827	-	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	603.995	106.050	251.758	14.557	231.583	47	-	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	4.100.366	490	159.287	427.065	1.152.035	2.361.489	-	*Financing musyarakah*
Aset lain-lain *)	16.308	2.876	5.061	1.833	6.114	424	-	*Other assets *)*
Sub-total	**9.061.234**	**2.536.006**	**701.547**	**603.934**	**1.773.960**	**2.532.641**	**913.146**	***Sub-total***
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.272)	(3.532)	(7.993)	(4.484)	(8.648)	(40.483)	(9.132)	*Less: Allowance for impairment losses*
Total aset	**8.986.962**	**2.532.474**	**693.554**	**599.450**	**1.765.312**	**2.492.158**	**904.014**	***Total assets***
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	32.612	31.997	-	-	-	-	615	*Liabilities due immediately*
Tabungan *wadiah*	5.073	5.073	-	-	-	-	-	*Wadiah savings deposits*
Surat berharga yang diterbitkan	600.000	600.000	-	-	-	-	-	*Securities issued*
Liabilitas lain-lain **)	150.018	15.012	2.580	7.476	9.209	106.422	9.319	*Other liabilities **)*
Sub-total	**787.703**	**652.082**	**2.580**	**7.476**	**9.209**	**106.422**	**9.934**	***Sub-total***
Dana *Syirkah* Temporer								***Temporary Syirkah Funds***
Giro *mudharabah*	678	678	-	-	-	-	-	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	665.213	665.213	-	-	-	-	-	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	4.744.140	2.949.226	1.017.534	589.438	187.942	-	-	*Mudharabah time deposits*
Sub-total	**5.410.031**	**3.615.117**	**1.017.534**	**589.438**	**187.942**	**-**	**-**	***Sub-total***
Neto	**2.789.228**	**(1.734.725)**	**(326.560)**	**2.536**	**1.568.161**	**2.385.736**	**894.080**	***Net***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya masih harus dibayar dan lainnya, liabilitas sewa dan bagi hasil yang belum dibagikan

*) *Other assets consist of accrued income and security deposits*

**) *Other accrued income consist of accrued expenses and others, lease liabilities and undistributed revenue sharing*

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

c. Pengelolaan risiko likuiditas (lanjutan)

Profil sisa umur aset dan liabilitas Bank berdasarkan perjanjian dengan nasabah/pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk profile (continued)

c. Liquidity risk management (continued)

The maturity profiles of the Bank's assets and liabilities based on contractual agreements with customers/counterparties as of December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

31 Desember/*December* 2023

	Total	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 - 3 bulan/ *More than 1 - 3 month*	Lebih dari 3 - 6 bulan/ *More than 3 - 6 month*	Lebih dari 6 - 12 bulan/ *More than 6 - 12 month*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 month*	Tidak memiliki kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	
Aset								***Assets***
Kas	1.013	1.013	-	-	-	-	-	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.176.610	2.176.610	-	-	-	-	-	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	13.488	13.488	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	1.409.892	426.396	25.731	-	372.100	257.640	328.025	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	814.569	54.374	30.876	690.616	22.902	15.801	-	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	823.362	177.165	643.962	2.171	-	64	-	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	1.464.378	150.000	285.500	6.111	435.000	587.767	-	*Financing musyarakah*
Aset lain-lain *)	9.117	7.840	46	721	73	437	-	*Other assets *)*
Sub-total	**6.712.429**	**3.006.886**	**986.115**	**699.619**	**830.075**	**861.709**	**328.025**	***Sub-total***
Dikurangi:								*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.774)	(7.908)	(9.444)	(21.230)	(4.793)	(6.119)	(3.280)	*Allowance for impairment losses*
Total aset	**6.659.655**	**2.998.978**	**976.671**	**678.389**	**825.282**	**855.590**	**324.745**	***Total assets***
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	69.839	69.255	-	-	-	-	584	*Liabilities due immediately*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	584.248	584.248	-	-	-	-	-	*Liabilities due to Bank Indonesia*
Liabilitas lain-lain **)	79.082	1.637	5.212	1.459	4.266	57.710	8.798	*Other liabilities **)*
Sub-total	**733.169**	**655.140**	**5.212**	**1.459**	**4.266**	**57.710**	**9.382**	***Sub-total***
Simpanan *wadiah*								***Wadiah deposits***
Tabungan *wadiah*	1	1	-	-	-	-	-	*Wadiah Savings deposits*
Sub-total	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Sub-total***
Dana *Syirkah* Temporer								***Temporary Syirkah Funds***
Tabungan *mudharabah*	510.651	510.651	-	-	-	-	-	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	2.744.348	1.953.141	644.013	146.194	1.000	-	-	*Mudharabah time deposits*
Sub-total	**3.254.999**	**2.463.792**	**644.013**	**146.194**	**1.000**	**-**	**-**	***Sub-total***
Neto	**2.671.486**	**(119.955)**	**327.446**	**530.736**	**820.016**	**797.880**	**315.363**	***Net***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima dan setoran jaminan

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya masih harus dibayar dan lainnya, liabilitas sewa dan bagi hasil yang belum dibagikan

*) *Other assets consist of accrued income and security deposits*

**) *Other accrued income consist of accrued expenses and others, lease liabilities and undistributed revenue sharing*

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko (lanjutan)

c. Pengelolaan risiko likuiditas (lanjutan)

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini adalah:

1. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas;
2. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas;
3. Mengatur dan menjaga likuiditas Bank secara keseluruhan dan sesuai ketentuan Regulator dalam hal pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
4. Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank;
5. Menyusun dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, prosedur risiko likuiditas dan *contingency funding plan*.

32. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Risk profile (continued)

c. *Liquidity risk management (continued)*

These are general mitigations to manage the risks:

1. *To conduct liquidity risk profile measurements that describe Bank's liquidity risk position and tendencies on an ongoing basis, in order to be the early warning indicators if the Bank begins to exposed with liquidity issues;*
2. *To conduct reviews of policies and procedures related to liquidity risk management;*
3. *To regulate and maintain the Bank's overall liquidity in compliance to regulatory obligation in fulfilment of Giro Wajib Minimum (GWM), RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) and Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);*
4. *To maintain Bank's access to money market through interbank placement and borrowing;*
5. *To establish and implement Risk Appetite Statement, liquidity risk procedure and contingency funding plan.*

33. RUGI PER SAHAM DASAR

Rugi per saham dasar dihitung dengan membagi rugi tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

33. *BASIC LOSS PER SHARE*

Basic loss per share is calculated by dividing the loss for the years by the weighted everage number of ordinary shares outstanding during the years.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Rugi bersih tahun berjalan	(73.727)	(226.738)	*Loss income for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	13.918.463.517	13.813.658.645	*Weighted average number of ordinary shares outstanding*
Rugi per saham dasar (nilai penuh)	**(5)**	**(16)**	***Basic loss per share (full amount)***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PMTHMETD dan waran yang belum di-*exercise* tidak diperhitungkan dalam perhitungan rugi per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif.

For the year ended December 31, 2024 and 2023, PMTHMETD and unexercised warrant is not considered in the calculation of diluted loss per share as the instrument is antidilutive.

34. PERJANJIAN - PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pada tanggal 16 Agustus 2021, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Orange Inovasi Digital (OID) sehubungan dengan Layanan *Branding* dan Pemasaran. Perjanjian ini berlaku efektif mulai dari 16 Agustus 2021 sampai dengan 12 bulan dan akan terus diperpanjang secara otomatis untuk setiap periode perjanjian.

Perjanjian Bank dengan PT Orange Inovasi Digital (OID) mencakup layanan untuk membangun *branding* dan akuisisi pelanggan dalam bentuk *Out of Home Branding* dan *Acquisition Marketing.*

Pada tanggal 29 Juli 2022, Bank dengan PT Orange Inovasi Digital (OID) melakukan adendum atas perjanjian tersebut dengan perubahan atas ruang lingkup pekerjaan dari *Acquisition Marketing* menjadi *Acquisition Marketing* dan *Retention Marketing* dengan jangka waktu 5 tahun sejak adendum perjanjian tersebut ditandatangani.

Perjanjian tersebut terakhir diadendum pada tanggal 30 April 2024 atas perubahan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi *Out of Home Branding* dan *Sponsorship Program*. Setelah adendum perjanjian tersebut, PT Orange Inovasi Digital (OID) tidak memberikan layanan dalam bentuk akuisisi nasabah.

b. Pada tanggal 4 Januari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk sehubungan dengan Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Multiguna untuk Karyawan SAT yang berlaku efektif sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 4 Desember 2027.

Perjanjian tersebut telah diaddendum pada tanggal 25 Maret 2024 atas perubahan signifikan pada batas nilai/plafon atas setiap Fasilitas Pembiayaan Multiguna Karyawan yang akan disediakan oleh Bank. Adendum tersebut berlaku efektif sejak tanggal 16 Januari 2024.

c. Pada 6 November 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk sehubungan dengan Penyediaan Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor dengan jangka waktu perjanjian selama 3 tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2023.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. On August 16, 2021, the Bank entered into an agreement with PT Orange Inovasi Digital (OID) regarding Branding and Marketing Services. This agreement became effective from August 16, 2021, for a period of 12 months and will be automatically renewed for each agreement period.

The agreement between the Bank and PT Orange Inovasi Digital (OID) covers services for building branding and customer acquisition in the form of Out of Home Branding and Acquisition Marketing.

On July 29, 2022, the Bank and PT Orange Inovasi Digital (OID) made an amendment to the agreement, changing the scope of work from Acquisition Marketing become Acquisition Marketing and Retention Marketing, with a duration of 5 years from the signing of the agreement amendment.

The agreement was last amended on April 30, 2024, to change the scope of work to Out of Home Branding and Sponsorship Program. After the amendment of the agreement, PT Orange Inovasi Digital (OID) did not provide services in the form of customer acquisition.

b. On January 4, 2023, the Bank entered into an agreement with PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk regarding the Provision of Multipurpose Financing Facilities for SAT Employees, which has been effective from August 28, 2023 until December 4, 2027.

The agreement was amended on March 25, 2024, due to significant changes in the value limit/ceiling for each Multipurpose Employee Financing Facility to be provided by the Bank. The addendum became effective starting January 16, 2024.

c. On November 6, 2023, the Bank entered into an agreement with PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk regarding the Provision of Working Capital Financing for Contractors with a contract term of 3 years, effective from December 1, 2023.

34. PERJANJIAN - PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Pada 3 Agustus 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk sehubungan dengan Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun, efektif sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 2 Agustus 2028.

e. Pada 12 Mei 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk sehubungan dengan Layanan Keagenan atas layanan transaksi perbankan seperti tarik tunai dan setor tunai. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Pelaksanaan Layanan Kerja Sama disepakati dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode 2 tahun yang hanya berlaku untuk satu kali perpanjangan.

   Perjanjian tersebut diadendum pada tanggal 6 Oktober 2023 atas perubahan lampiran terkait mekanisme komersial layanan transaksi setor tarik tunai.

f. Pada 12 Maret 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk sehubungan dengan Pembiayaan *Invoice* dengan ruang lingkup kerja sama layanan pembiayaan *Invoice* dengan menggunakan *Secure File Transfer Protocol* (SFTP), sisem yang digunakan Bank dan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk dalam menjalankan perjanjian.

   Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak 12 Maret 2022 dan dapat diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya dengan maksimal perpanjangan sebanyak 4 kali.

g. Bank juga mengadakan perjanjian kerja sama terkait dengan layanan *payroll* dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk yang berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Pelaksanan Layanan Kerja Sama dan diperpanjang otomatis untuk periode 2 tahun yang hanya berlaku untuk satu kali perpanjangan.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. On August 3, 2023, the Bank entered into an agreement with PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk regarding the Provision of Vehicle Financing Facilities with a contract term of 5 years, effective from August 3, 2023 until August 2, 2028.

e. On May 12, 2022, the Bank entered into an agreement with PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk regarding Agency Services for banking transactions such as cash withdrawals and cash deposits. This agreement is valid for 3 years starting from the date the Minutes of Implementation of the Cooperation Services are agreed upon and may be automatically extended for a period of 2 years, which is only applicable for one extension.

   The agreement was amended on October 6, 2023, to change the appendix of the agreement regarding commercial mechanism of cash deposit and withdrawal.

f. On March 12, 2022, the Bank entered into an agreement with PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk regarding Invoice Financing, with the scope of the cooperation being Invoice Financing services using Secure File Transfer Protocol (SFTP), the system used by the Bank and PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk in executing the agreement.

   This agreement is valid for a period of 1 year from March 12, 2022, and may be automatically extended for another 1 year term, with a maximum of 4 extensions.

g. The bank also entered into a cooperation agreement related to payroll services with PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk, which is valid for 3 years from the date of the Minutes of Implementation of the Cooperation Services and is automatically extended for a period of 2 years, applicable only for one extension.

34. PERJANJIAN - PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Pada tahun 2024, Bank memiliki produk pembiayaan baru berupa pembiayaan Ala Pensiun. Bank mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Taspen (Persero) pada tanggal 6 Juli 2023 sehubungan dengan Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Layanan Perbankan Digital. Perjanjian ini sehubungan pembayaran manfaat tabungan hari tua, nilai tunai, pensiun pertama dan pensiun bulanan dilakukan melalui Bank sampai dengan pembiayaan lunas, nasabah pembiayaan meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lainnya.

i. Pada tanggal 21 Desember 2023, mengadakan kerja sama tantang pemeliharaan data pegawai negeri sipil dan pensiunan yang memperoleh pembiayaan pada Bank dengan PT Taspen (Persero) sejak 21 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2025 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis.

j. Pada 15 Mei 2024, Bank mengadakan perjanjian fasilitas pembiayaan dengan PT Trinusa Travelindo dengan akad *qardh* dengan jumlah fasilitas sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian tersebut. Atas fasilitas pembiayaan tersebut, PT Trinusa Travelindo membayarkan kewajiban pembiayaan dengan pemberian piutang afiliasi PT Trinusa Travelindo kepada Bank yang berupa debitur akhir.

k. Bank mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Caturnusa Sejahtera Finance (CSF) terkait dengan proses penagihan dan pengurusan pembayaran debitur akhir dari pengalihan piutang PT Trinusa Travelindo kepada Bank.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. In 2024, the Bank have a new financing product called Ala Pensiun financing. The Bank entered into a cooperation agreement with PT Taspen (Persero) on July 6, 2023, regarding the Payment of Old Age Savings, Pensions, Work Accident Insurance, and Death Benefits through Digital Banking Services. This agreement pertains to the payment of old age savings benefits, cash value, first pension, and monthly pensions, which will be processed through the Bank until the financing is fully paid off, the financing customer passes away, or for other reasons.

i. On December 21, 2023, a cooperation agreement was established regarding the maintenance of data for civil servants and retirees who receive financing from the Bank with PT Taspen (Persero) from December 21, 2023, to December 20, 2025, and may be extended for a certain period with prior written notice.

j. On May 15, 2024, the Bank entered into a financing facility agreement with PT Trinusa Travelindo under a qardh contract, with a facility amount of Rp100,000 and a facility term of 36 months from the signing of the agreement. For this financing facility, PT Trinusa Travelindo will fulfill its financing obligations by providing the Bank with receivables from its affiliated debtors.

k. The Bank has entered into a cooperation agreement with PT Caturnusa Sejahtera Finance (CSF) regarding the collection process and payment management for the end debtors from the transfer of receivables from PT Trinusa Travelindo to the bank.

35. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. S.170.BOD/02.2025 tanggal 28 Februari 2025 dan No. S.048.BOD/02.2024 tanggal 28 Februari 2024, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

35. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. S.170.BOD/02.2025 dated February 28, 2025 and No. S.048.BOD/02.2024 dated February 28, 2024, the Sharia Supervisory Board (DPS) of the Bank stated that in general, the sharia aspects on products and operations of the Bank for the year ended December 31, 2024 and 2023, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and sharia opinion of DPS.

36. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ *January 1,* 2024	Arus kas/ *Cash flow*	Aktivitas non-kas/ *Non-cash activity*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Liabilitas sewa	30.423	(12.726)	5.833	23.530	*Lease liabilities*

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Arus kas/ *Cash flow*	Aktivitas non-kas/ *Non-cash activity*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Liabilitas sewa	23.689	(12.376)	19.110	30.423	*Lease liabilities*

37. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Bank bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

PSAK No. 413, "Penurunan Nilai"

Standar ini mengatur tentang penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pembentukan provisi kafalah penjaminan risiko kredit. Standar ini diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak tagih yang jumlah dan waktu penerimaannya ditentukan dalam akad.

Standar ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar ini serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

37. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT NOT EFFECTIVE

The accounting standards that are issued by the Board of Financial Accounting Standards, but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Bank intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

SFAS No. 413, "Impairment"

These standards regulates the impairment of Sharia financial assets and the establishment of provisions for kafalah (guarantee) on credit risk. These standard is applied to Sharia financial assets in the form of receivables whose amount and timing of receipt are determined in the contract.

The standard is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2027 retrospectively with early adoption permitted.

At the authorization date of the financial statements, the Bank is still assessing the potential impact of the adoption of this standard and their effect on the financial statements.

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Sejak awal diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2021 hingga tanggal 31 Desember 2024, jumlah waran yang telah di ekskusi adalah sejumlah 221.160.240 lembar waran atau sebesar Rp24.327.626.400 (nilai penuh) dimana 221.140.192 lembar waran atau sebesar Rp24.325.421.120 (nilai penuh) telah dicatat sebagai modal ditempatkan dan disetor dan untuk sisa waran yang telah di eksekusi namun belum diaktakan sejumlah 20.048 lembar waran, masih dicatat sebagai dana setoran modal. Sisa waran yang belum di eksekusi sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan adalah sejumlah 2.578.837.260 lembar waran.

b. Berdasarkan memorandum internal dengan nomor M.001/HDC/03/2025 pada tanggal 10 Maret 2025 Bank melaksanakan program pengurangan jumlah tenaga kerja Bank atau pengakhiran hubungan kerja antara Bank dan karyawan Bank dalam rangka efisiensi biaya operasional Bank. Program ini dilaksanakan pada 19 Maret 2025 dengan skema Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) atas 72 karyawan tetap Bank. Bank telah membukukan cadangan atas 72 karyawan tersebut pada perhitungan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp3.063 dan tambahan cadangan sebesar Rp6.743 pada laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Catatan 30).

   Pada tanggal 20 Maret 2025, Bank telah membayarkan kewajiban atas pelaksanaan program pengurangan jumlah tenaga kerja Bank atau pengakhiran hubungan kerja antara Bank dan karyawan Bank sebesar Rp9.806. Besaran kewajiban tersebut didasarkan pada besaran gaji pokok dan tunjangan transportasi yang dikalikan dengan *multiplier* pesangon yang dihitung berdasarkan masa kerja karyawan.

38. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Since its initial issuance on August 2, 2021 until December 31, 2024, the number of warrants that have been exercised is 221,160,240 warrants or Rp24,327,626,400 (full amount) of which 221,140,192 warrants or Rp24,325,421,120 (full amount) have been recorded as issued and paid-up capital and the remaining warrants that have been executed but have not been notarized, amounting to 20,048 warrants, are still recorded as capital deposit funds. The remaining warrants that have not been exercised as of the date the financial statements are published are 2,578,837,260 warrants.

b. Based on the internal memorandum number of M.001/HDC/03/2025 dated March 10, 2025, the Bank is implementing a program to reduce the number of employees or terminate the employment relationship between the Bank and its employees in order to achieve operational cost efficiency. This program will take place on March 19, 2025, under a Collective Agreement scheme (PKB) affecting 72 permanent employees of the Bank. The Bank has recorded a provision for these 72 employees on employee benefit liabilities amounting to Rp3,063 and additional provision of Rp6,743 in the Bank's financial statements for the year ending December 31, 2024 (Note 30).

On March 20, 2025, the Bank paid the obligation for the implementation of the program to reduce the number of the Bank's workforce or terminate the employment relationship between the Bank and the Bank's employees amounting to Rp9,806. The amount of the obligation is based on the amount of basic salary and transportation allowance multiplied by the severance multiplier, which is calculated based on the employee's length of service.

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:

Giro Wajib Minimum ("GWM")

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 12/PADG/2023 tanggal 27 September 2023 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023 mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,50% dan 1,00% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 4 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Juni 2024 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial".

Komponen insentif GWM pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan PADG No. 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Perubahan PADG Insentif)", serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard:

Minimum Statutory Reserve Requirements ("MRR")

The MRR ratio as at December 31, 2024 and 2023 is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 12/PADG/2023 dated September 27, 2023 concerning "Second Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation No. 24/8/PADG/2022 concerning Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" which became effective on October 1, 2023, regulates that each bank is required to maintain a MRR in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.50% and 1.00% of third-party funds ("TPF") in Rupiah and foreign exchange.

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves as of December 31, 2024, there is a MRR incentive component which is in accordance with the PADG No. 4 Year 2024 which became effective on June 1, 2024 concerning "Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation No. 11 Year 2023 concerning Implementation Regulations of Macroprudential Liquidity Incentive Policy".

MRR incentive component as of December 31, 2023, in accordance with the PADG No. 24/12/PADG/2022 dated July 20, 2022 concerning "Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation No. 24/4/PADG/2022 concerning Regulations for Implementation of Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities (Changes to PADG Incentives)", as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation No. 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation No. 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Giro Wajib Minimum ("GWM") (lanjutan)

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM"). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84,00% atau melebihi batas atas target Bank Indonesia sebesar 94,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, insentif GWM dalam Rupiah yang diterima oleh Bank masing-masing sebesar 4,00% dan 1,00%. Sehingga, total kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 3,50% dan 6,50%.

Rasio Giro Wajib Minimum Bank:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Rasio GWM			*MRR Ratio*
Rupiah			*Rupiah*
Kewajiban pemenuhan GWM:			*Fulfillment of MRR*
GWM harian	0,00%	0,00%	*MRR daily*
GWM rata-rata	7,50%	7,50%	*MRR average*
Insentif GWM	(4,00%)	(1,00%)	*MRR incentive*
Total kewajiban pemenuhan GWM	3,50%	6,50%	*Total of fulfillment of MRR*
Realisasi pemenuhan GWM harian	0,00%	0,00%	*Realisation fulfillment of MRR daily*
Realisasi pemenuhan GWM rata-rata	5,53%	13,46%	*Realisation fulfillment of MRR average*
Valuta asing			*Foreign currencies*
Kewajiban pemenuhan GWM	1,00%	1,00%	*Fulfillment of MRR*
Realisasi pemenuhan GWM	157,73%	157,73%	*Realisation fulfillment of MRR*

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Minimum Statutory Reserve Requirements ("MRR") (continued)

In addition, based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 which is effective on May 1, 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from November 28, 2019, there are changes in the calculation of MRR Financing to Deposit Ratios ("FDR") to the Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM"). Bank must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84.00% or exceeds the upper limit of the Bank Indonesia target of 94.00%.

As of December 31, 2024 and 2023, the MRR incentives amount in Rupiah received by the Bank is 4.00% and 1.00%, respectively. Therefore, the total of fulfillment of MRR in Rupiah as of December 31, 2024 and 2023 is 3.50% and 6.50%, respectively.

The Bank's Minimum Reserve Requirement:

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the MRR as of December 31, 2024 and 2023.

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Posisi devisa neto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih neto aset dan liabilitas dari masing-masing mata uang asing, baik dalam laporan posisi keuangan maupun rekening administratif yang dinyatakan dalam Rupiah.

Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, sejak tanggal 29 Mei 2015 Bank umum wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Net open position

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 regarding Bank Net Open Position. The Net Open Position (NOP) is the sum of absolute value of the net difference between assets and liabilities of each foreign currency, either on the statement of financial position or off statement of financial position which are stated in Rupiah.

According to these regulations, since May 29, 2015, commercial banks are required to manage and maintain overall NOP at a maximum of 20% from capital.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has complied with Bank Indonesia Regulation on Net Open Position.

The Bank's NOP as of December 31, 2024 and 2023 in accordance with Bank Indonesia regulation are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Aset dan aset pada rekening administratif/ *Assets and off balance sheet assets*	**Liabilitas dan Liabilitas pada rekening administratif/ *Liabilities and off balance sheet liabilities***	**Nilai neto/ *Net value***	**Nilai neto absolut/ *Net absolute value***	
Dolar Amerika Serikat	1.530	(510)	1.020	1.020	*United States Dollar*
Total modal				3.084.835	***Total capital***
Rasio PDN terhadap modal				**0,03%**	***NOP to capital ratio***

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Posisi devisa neto (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai peraturan Bank Indonesia sebagai berikut: (lanjutan)

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Net open position (contiinued)

The Bank's NOP as of December 31, 2024 and 2023 in accordance with Bank Indonesia regulation are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Aset dan aset pada rekening administratif/ *Assets and off balance sheet assets*	Liabilitas dan Liabilitas pada rekening administratif/ *Liabilities and off balance sheet liabilities*	Nilai neto/ *Net value*	Nilai neto absolut/ *Net absolute value*	
Dolar Amerika Serikat	1.457	(488)	969	969	*United States Dollar*
Total modal				3.040.138	***Total capital***
Rasio PDN terhadap modal				**0,03%**	***NOP to capital ratio***

Jaminan pemerintah terhadap liabilitas pembayaran bank umum

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 tentang LPS. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp100 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100 diubah menjadi maksimum Rp2.000.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Government guarantees on obligation of commercial banks

On September 22, 2004, the President of the Republic of Indonesia approved the Law No. 24 of the LPS. Based on the said law, LPS will guarantee customer's deposits up to Rp100 and actively participate in maintaining the stability of the banking system in accordance with the authority given. The said law became effective from September 22, 2005 and since that date, the LPS has been formally operated.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved the Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the maximum amount of deposits guaranteed by LPS. Based on such regulation, the maximum amount of deposits guaranteed for a particular customer in a bank which previously according to the Law No. 24 Year 2004 amounted to Rp100 was amended to Rp2,000.

Based on Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regulation No. 2 dated November 25, 2010, the deposits guaranteed included current account, time deposits, certificates of deposits and saving deposits.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank is a participant of the guarantee program.

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Manajemen modal

Kebijakan pengelolaan modal Bank bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank pada masa yang akan datang, serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Rencana permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha dan kebutuhan likuiditas Bank.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dihitung berdasarkan POJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Bank diwajibkan membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Banks*.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dimana Bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000. Apabila ketentuan Modal Inti tersebut tidak dipenuhi, maka Bank dapat dikenakan:

a. Sanksi administratif berupa teguran tertulis;

b. Sanksi administratif berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor dan pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan

c. Menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Bank menjadi BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum Syariah apabila Bank telah dikenakan sanksi administratif pada poin b dan belum dapat memenuhi ketentuan dalam POJK tersebut.

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Capital management

The Bank's capital management policy aims to ensure that the Bank has an efficient capital structure, has a strong capital to support the Bank's current business development strategy and to maintain the continuity of the Bank's business in the foreseeable future, as well as to meet the capital adequacy set by the regulator.

Capital plan is prepared by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and is approved by the Board of Commissioners. The Bank's capital plan is formulated based on the assessment of capital adequacy requirements, business expansion plan and the Bank's liquidity needs.

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Requirement (KPMM) as of December 31, 2024 and 2023, calculated based on the POJK No. 21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014, concerning the Minimum Capital Requirement for Sharia Commercial Banks. Banks are required to establish additional capital according to the risk profile that functions as a buffer, namely Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer and Capital Surcharge for Domestic Systematically Important Banks.

In addition, based on POJK No. 12/POJK.03/2020 dated March 17, 2020 regarding Consolidation of Commercial Banks where the Bank are required to meet a minimum core capital at least is Rp3,000,000. If the Core Capital requirement is not met, the Bank may be subject to:

a. Administrative sanctions in the form of written reprimands;
b. Administrative sanctions in the form of prohibitions on expanding business activities or office networks and suspension certain business activities; and
c. Adjust the form and business activities of the Bank to become BPRS, or submit an application for revocation of the business license at the request of the Bank in accordance with the laws and regulations regarding Sharia Commercial Banks if the Bank has been subject to administrative sanctions in point b and has not been able to comply with the POJK.

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Manajemen modal (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa Bank dapat memenuhi POJK tersebut di atas untuk menjaga modal inti Bank minimum sebesar Rp3.000.000.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara internal *(self assessment)*, profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah peringkat 3 (tiga). Atas dasar ini, KPMM minimum yang ditetapkan sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%.

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhatikan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing dihitung sebagai berikut:

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Capital management (continued)

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (continued)

Management believes that the Bank can fulfill that POJK above to maintain the Bank's minimum core capital amounting to Rp3,000,000.

Based on the assessment carried out internally (self assessment), the Bank's risk profile as of December 31, 2024 is rank 3 (three). On this basis, the minimum KPMM is set at 10% to less than 11%.

The Bank's capital adequacy ratio with regard to credit risk, operational risk, and market risk as of December 31, 2024 and 2023 are calculated as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Modal inti (*Tier* 1)			*Core capital (Tier 1)*
Modal inti utama (CET 1)	3.028.660	3.003.141	*Main core capital (CET 1)*
Modal inti tambahan (AT-1)	-	-	*Additional core capital (AT-1)*
Total modal inti	3.028.660	3.003.141	*Total core capital*
Modal pelengkap (*Tier* 2)	56.175	36.997	*Supplementary capital (Tier 2)*
Total modal	3.084.835	3.040.138	*Total capital*
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR):			*Risk weighted Assets (RWA):*
ATMR untuk risiko kredit	4.494.024	3.048.909	*RWA for credit risk*
Sisa cadangan umum PPA atas aset produktif	(1.899)	-	*Remaining allowances for impairment losses*
ATMR untuk risiko pasar	1.020	969	*RWA for market risk*
ATMR untuk risiko operasional	255.179	111.447	*RWA for operational risk*
Total ATMR	4.748.324	3.161.325	*Total RWA*
Rasio CAR			*CAR ratio*
Rasio CET 1	63,78%	95,00%	*CET 1 ratio*
Rasio *Tier* 1	63,78%	95,00%	*Tier 1 ratio*
Rasio *Tier* 2	1,18%	1,17%	*Tier 2 ratio*
	64,96%	96,17%	
Rasio minimum CET 1	4,5%	4,5%	*Minimum CET 1 ratio*
Rasio minimum *Tier* 1	6,00%	6,00%	*Minimum Tier 1 ratio*
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	10,00% - 11,00%	9,00% - 10,00%	*Minimum CAR based on risk profile*

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Manajemen modal (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

Aset keuangan berdasarkan kolektabilitas

Tingkat kolektibilitas atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Capital management (continued)

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has met the ratio required by Financial Services Authority for the capital adequacy ratio.

Financial asset based on collectibility

The collectibility levels of financial instruments in the financial position report as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember/*December 31, 2024*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Jumlah/ *Total*	
Instrumen Keuangan						***Acquisition cost***
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	2.200.176	-	-	-	2.200.176	*Current accounts placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.169	-	-	-	1.169	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	2.094.295	-	-	-	2.094.295	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	44.671	21	-	-	44.692	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	597.625	4.527	1.837	6	603.995	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	4.099.975	391	-	-	4.100.366	*Financing musyarakah*
Total biaya perolehan	9.037.911	4.939	1.837	6	9.044.693	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(73.741)	(252)	(276)	(3)	(74.272)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	8.964.170	4.687	1.561	3	8.970.421	***Total***

31 Desember/*December 31, 2023*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Jumlah/ *Total*	
Instrumen Keuangan						***Acquisition cost***
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	2.176.610	-	-	-	2.176.610	*Current accounts placement with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	13.488	-	-	-	13.488	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	1.409.892	-	-	-	1.409.892	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	814.569	-	-	-	814.569	*Murabahah receivables*
Pinjaman *qardh*	823.362	-	-	-	823.362	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	1.464.378	-	-	-	1.464.378	*Financing musyarakah*
Total biaya perolehan	6.702.299	-	-	-	6.702.299	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.774)	-	-	-	(52.774)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**6.649.525**	**-**	**-**	**-**	**6.649.525**	***Total***

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Aset keuangan berdasarkan kolektibilitas (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, pinjaman *qardh* dan pembiayaan *musyarakah* yang wajib dibentuk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saldo pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp903.000 dengan kolektibilitas lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, *non-performing* bruto untuk rasio piutang, pinjaman dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 0,04% dan 0,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, *non-performing* neto untuk rasio piutang, pinjaman dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 0,03% dan 0,00%.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyaluran dana kepada pihak terkait atau modal inti Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pelampauan BMPD oleh Bank.

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Financial asset based on collectibility (continued)

The allowance for losses on current accounts with other banks, investment in marketable securities, funds of qardh and financing musyarakah that should be provided on December 31, 2024 and 2023 are in compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations.

The balance of financing that has been restructured as of December 31, 2024, is Rp903,000 with the collectibility current.

As of December 31, 2024, and 2023, non-performing ratios (gross) for receivables, loans, and financing are 0.04% and 0.00%, respectively.

As of December 31, 2024, and 2023, non-performing ratios (net) for receivables, loans, and financing are 0.03% and 0.00%, respectively.

Based on the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 26/POJK.03/2021 dated December 17, 2021 concerning the Maximum Limit for Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks. The Maximum Fund Disbursement Limit (BMPD) is the maximum percentage of fund disbursement determined against the Bank's capital for the distribution of funds to related parties or the Bank's core capital for the distribution of funds to other related parties.

As of December 31, 2024 and 2023, there was no excess of the BMPD by the Bank.

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Pengelolaan risiko

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan POJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 25/POJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Pengelolaan risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengendalian risiko operasional perlu dilakukan untuk memitigasi risiko operasional. Pengendalian risiko dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control/dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override*/otorisasi, pembatasan wewenang akses sistem, peningkatan kompetensi karyawan termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan fungsi audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko ini antara lain:

1. Melakukan analisa risiko operasional untuk produk dan/atau layanan baru yang diusulkan dan/atau kegiatan yang akan oleh Bank;
2. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko, mencakup termasuk prosedur untuk risiko teknologi informasi, misalnya termasuk pengaturan jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*;

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Risk management

In conducting its business, the Bank has developed risk management for 10 (ten) different risks as stipulated by POJK No. 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 and Financial Service Authority Regulation Circular Letter (SEOJK) No. 25/ POJK.03/2023 dated December 21, 2023 about Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units which are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, rate of return risk and investment risk that have been outlined in the Risk Management General Policy (KUMR).

Operational risk management

Operational risk is the risk of loss arising from inadequate internal process, internal process failure, human error, system failure, and/or external events that affect the operations of the Bank.

Controls of operational risk are necessary to mitigate the operational risk. The risk controls was done through the segregation of tasks and duties, dual control/dual custody mechanism in execution of transaction, override/authorization function, restrictions on system access authority, employee capacity building including human resources adequacy, and assessment and implementation of internal audit.

The mitigation measures taken by the Bank to manage this risk include:

1. *To conduct operational risk analysis for new product and/or new services proposal that is planned by the Bank;*
2. *To enhance risk management policy, including information technology procedure, i.e. data communication network arrangement and software standard, user access management, e-banking services development, specifically on the security access and Disaster Recovery Plan;*

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Pengelolaan risiko (lanjutan)

Pengelolaan risiko operasional (lanjutan)

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko ini antara lain: (lanjutan)

3. Melakukan *review* terhadap ketentuan baik itu kebijakan maupun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional;
4. Menyusun dan menerapkan pedoman internal di antaranya *Risk Appetite Statement*, Prosedur *Anti Fraud*, Prosedur Risiko Operasional, dan *Business Continuity Plan;*
5. Mengembangkan perangkat untuk mendukung identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pelaporan risiko operasional.

Pengelolaan risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi bank syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini antara lain:

a. Mengingatkan seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Bank termasuk penyampaian laporan-laporan kepada regulator;

b. Melaksanakan pelatihan secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko untuk memastikan seluruh karyawan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan bisnis dan operasional;

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Risk management (continued)

Operational risk management (continued)

The mitigation measures taken by the Bank to manage this risk include: (continued)

3. To review policy and procedure related with operational risk management;

4. To develop and implement internal procedure i.e. Risk Appetite Statement, Anti Fraud Procedure, Operational Risk Procedure, and Business Continuity Plan;

5. To enhance tools to support identification, assessment, monitoring, and reporting of operational risk.

Compliance risk management

Compliance risk is the risks resulting from the failure of the Bank in fulfilling and/or implementing the prevailing laws and regulations for sharia bank. In engaging in the banking industry services, the Bank is required to always comply with the banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia, Financial Services Authority, and National Sharia Board. The Bank inability to follow and comply with all laws and regulations related to the banking business activities may affect the continuity of the Bank.

Several methods to mitigate the compliance risks conducted by the Bank up to present are as follows:

a. Requesting all employees and units to further enhance prudence and thoroughness in performing the Bank's operations as well as in submitting regulatory reports to the regulators.

b. To conduct regular compliance and risk management training to ensure all employees are implementing prudential principles in every business and operational activities;

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Pengelolaan risiko (lanjutan)

Pengelolaan risiko kepatuhan (lanjutan)

c. Riviu pemenuhan aspek kepatuhan termasuk kepatuhan syariah sebelum aktivitas peluncuran produk/layanan baru;

d. Melakukan riviu terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan internal Bank, dan prinsip syariah dalam rangka memastikan telah diakomodasi dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;

e. Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada seluruh karyawan unit kerja terkait sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku;

f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.

Pengelolaan risiko hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain dapat bersumber dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

a. Menyusun dan menerapkan Kebijakan Hukum dan *Risk Appetite Statement* untuk risiko hukum;

b. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat;

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Risk management (continued)

Compliance risk management (continued)

c. To review compliance, including sharia compliance adherence to new product/new services before launching;

d. To conduct assessment of the internal policies and procedures in place to ensure that all regulation, other effective requirement, Bank's internal requirement and sharia principles;

e. Disseminating information regarding applicable regulations to all employees so that each working unit can carry out its duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations.

f. Cooperating with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank's operations with sharia principles.

Legal risk management

Risks due to lawsuits and/or weakness in juridical aspects, among others, can be caused by lack of legal binding made the Bank, missing or changes in the regulation causing transaction performed by the Bank is incompliance with the prevailing regulation, and litigation or dispute settlement caused by third party lawsuit to the Bank, or vice versa.

Mitigations and risk management carried out by the Bank include:

a. Developing and managing Legal Policy and Risk Appetite Statement for legal risk;

b. Examining all agreements to be made between the Bank and third parties and conducting periodic checks on agreements that have been made;

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Pengelolaan risiko (lanjutan)

Pengelolaan risiko hukum (lanjutan)

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup: (lanjutan)

c. Menerapkan standardisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu;

d. Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau layanan baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau layanan tersebut; dan

e. Memberikan opini hukum atas permintaan divisi lain guna memitigasi adanya potensi hukum bagi Bank.

Pengelolaan risiko stratejik

Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategi antarlevel strategi.

Risiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko ini antara lain:

a. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategi sejak awal penyusunan rencana bisnis Bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi dan kemampuan Bank;

b. Mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi; dan

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Risk management (continued)

Legal risk management (continued)

Mitigations and risk management carried out by the Bank include: (continued)

c. Implementing standardization of contracts and cooperation agreements for certain financing programs;

d. Conducting legal analysis for new products and/or new services, and preparing legal document standards related with the product/services; and

e. Provide legal opinion at the request of other divisions in order to mitigate the existence of legal potential for the Bank.

Strategic risk management

This risk refers to inaccuracies in taking and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises, among others, because the Bank adopts a strategy that is not in line with the Bank's vision and mission, carries out a strategic environmental analysis that is not comprehensive and/or there are discrepancies in the strategic plan between strategic levels.

Strategic risks also arise from failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate changes in technology, changes in macroeconomic conditions, dynamics of competition in the market and changes in policies of relevant authorities.

Mitigations and risk management carried out by the Bank include:

a. Identifying and quantifying strategic risks from the start of the preparation of the Bank's business plan based on the Bank's vision, mission, strategy and capabilities;

b. Managing strategic risk through a collective and comprehensive consideration and decision-making process within the Risk Management Committee for submission to the Board of Directors; and

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Pengelolaan risiko (lanjutan)

Pengelolaan risiko stratejik (lanjutan)

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko ini antara lain: (lanjutan)

c. Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis Bank masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis Bank.

Pengelolaan risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan *(Stakeholders)* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis termasuk prinsip syariah, dan keluhan nasabah.

Bank melakukan penerapan manajemen risiko reputasi dengan melakukan aktivitas *public relation*, CSR *(Corporate Social Responsibility)*, respons yang cepat terhadap keluhan nasabah, dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

a. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Bank dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antarunit kerja;

b. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media;

c. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Bank apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media;

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Risk management (continued)

Strategic risk management (continued)

Mitigations and risk management carried out by the Bank include: (lanjutan)

c. Implementing regular reviews to ensure that the Bank's strategy and business plan is still relevant to the current situation and condition and to measure the success rate of achieving the Bank's business plan.

Reputation risk management

Risks due to reduced level of stakeholder trust stemming from negative perceptions to the Bank. This risk arises due to, among others, negative mass media coverage, violations of business ethics including sharia principles, and customer complaints.

The Bank implements reputational risk management by carrying out public relations activities, CSR (Corporate Social Responsibility), quick responses to customer complaints, and consistent implementation of Good Corporate Governance.

Mitigations and risk management carried out by the Bank include:

a. Providing information disclosure to the public through the Bank's website and newspapers by coordinating with other relevant business units;

b. Supervising media coverage to monitor negative publications or customer complaints that appear in the media;

c. Making clarifications and responses in accordance with the best steps taken by the Bank if there is negative news and customer complaints that appear in the media;

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Pengelolaan risiko (lanjutan)

Pengelolaan risiko reputasi (lanjutan)

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup: (lanjutan)

d. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank; dan

e. Menerbitkan laporan keuangan Bank melalui media sesuai ketentuan regulator.

Pengelolaan risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil *(rate of return risk)* adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

a. *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan pemberian pricing secara berkala sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko Bank;

b. Memastikan kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap portofolio pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil serta sensitivitas terhadap perubahan *pricing*; dan

c. Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar.

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Risk management (continued)

Reputation risk management (continued)

Mitigations and risk management carried out by the Bank include: (lanjutan)

d. Performing a reputation risk analysis that may arise, as well as strategies to anticipate risks when launching new products/services/ programs of the Bank; and

e. Publish the Bank's financial statement through the media in accordance with regulatory requirements.

Rate of return risk management

The rate of return risk is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, as result of changing the rate of return received by the Bank from channeling funds, which can affect the behavior of the Bank's third party fund customers.

Mitigations and risk management carried out by the Bank include:

a. Monitoring and assessment on the pricing policy through ALCO meeting or as needed in the event of market pressure that can increase risk exposure in the Bank;

b. Ensuring adequacy of limit setting and an adequate review process of transaction limits and financing portfolio with a profit-sharing based contract and sensitivity to changes in pricing in the market; and

c. Periodic estimation of the Bank's potential economic losses in abnormal market conditions in order to see the sensitivity of the Bank's performance to changes in benchmark interest rates and market ratios.

39. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA (lanjutan)

Informasi berikut merupakan informasi tambahan yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

Pengelolaan risiko (lanjutan)

Pengelolaan risiko investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Bank mencakup:

a. Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif.

b. Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

c. Monitoring terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank.

d. Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

40. PENYELESAIAN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 17 April 2025.

39. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

The following information is additional information that is not required by Indonesian Financial Accounting Standard: (continued)

Risk management (continued)

Investment risk management

Risks due to the Bank taking part in the losses of the customers' business financed in profit-sharing based financing using both the net revenue sharing method and/or the profit and loss sharing method.

Mitigation and risk management carried out by Bank include:

a. Identification of the risks of investment activities with a profit-sharing agreement based on existing portfolios or on potential risks that may arise in order to facilitate the preparation and implementation of investment policies with a clear and careful profit-sharing based contract, so that these risks can be managed and controlled effectively.

b. Implementing an investment approval process with an effective profit-sharing based contract among others by setting limits of authority (limit) and a mechanism for making investment decisions with a profit-sharing based contract.

c. Monitoring the concentration of fund disbursement by means of a profit-sharing based contract so that it is in line with the Bank's risk appetite.

d. Effectively supervise and control the nature, characteristics and quality of investments under a profit-sharing based contract.

40. COMPLETION AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Bank on April 17, 2025.

2024
Laporan Tahunan
Annual Report

Membangun Pertumbuhan Usaha dengan Mengedepankan **Transformasi, Kolaborasi, dan Inovasi**

(Building Business Growth by Prioritizing Transformation, Collaboration, and Innovation)

Bank Aladin Syariah

PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center, lt 7 dan lt 9,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25.
Jakarta Selatan 12920 Indonesia

Tel: +62 21 85500947
E-mail: cs@aladinbank.id